



**BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 8 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2016-2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang: a. bahwa dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021, perlu dilakukan penyesuaian agar serasi, selaras, dan sesuai dengan dinamika kebijakan nasional dan perkembangan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa didasarkan pada hasil evaluasi dan penyelarasan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah, dan dalam rangka mengakomodir perubahan kebijakan nasional dan perkembangan peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021, perlu dilakukan penataan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Eilayah Nasional (LEmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (LEmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan PEngawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LEmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai WakilPemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
 18. Peraturan Daerah provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2010 Nomor 2, Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2013 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG
dan
BUPATI KARAWANG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2016-2021.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 8), sebagai berikut:

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
8. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan DPRD, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan Daerah/desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
9. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
10. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
13. Rancangan teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Bupati dan wakil Bupati.

14. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
20. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
21. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
22. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
23. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
24. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
25. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Bupati serta target pembangunan nasional.
26. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

27. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
28. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
29. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
30. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
31. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
32. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
33. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
34. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
35. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
36. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
37. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
38. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
39. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
40. Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara optimal.

41. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
42. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
43. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
44. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
45. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
46. Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman dalam memfasilitasi dan memandu diskusi kelompok/ konsultasi publik yang memenuhi kualifikasi kompetensi teknis/substansi dan memiliki keterampilan dalam penerapan berbagai teknik dan instrumen untuk menunjang partisipatif dan efektivitas kegiatan.
47. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil musrenbang.
48. Delegasi adalah perwakilan yang disepakati peserta musrenbang untuk menghadiri musrenbang pada tingkat yang lebih tinggi.
49. Kabupaten/kota lainnya adalah kabupaten/kota lainnya yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan;
50. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindari kesimpangsiuran dan duplikasi.
51. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan Daerah ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
52. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
53. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

54. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.
55. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
56. Hari adalah hari kerja.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Sistematika penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun sebagai berikut :

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III	: GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH
BAB IV	: PERMASALAHAN DAN ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS KABUPATEN KARAWANG
BAB V	: VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
BAB VI	: STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII	: KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
BAB VIII	: KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB IX	: PENUTUP

- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **23 Mei 2019**



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **23 Mei 2019**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2019

NOMOR **3** .

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG, PROVINSI JAWA
BARAT : (8/77/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2016-2021

I. UMUM

Perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Karawang sebagai bagian integral dari perencanaan pembangunan jangka menengah nasional, dan dengan memperhatikan perencanaan pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021, pada hakikatnya telah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan, namun seiring dengan perubahan kebijakan nasional dan perkembangan peraturan perundang-undangan, mendorong Pemerintah Kabupaten Karawang untuk menempuh kebijakan melakukan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021, yang disesuaikan, diselaraskan, diharmonisasikan dan disinkronisasikan dengan dinamika kebijakan nasional dan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga diharapkan dapat terwujud sinergitas dengan pencapaian Program dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Karawang sebagai perwujudan visi dan misi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Karawang.

Pada prinsipnya, merujuk pada ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 342 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, memberikan hak dan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sepanjang memenuhi kriteria yakni perubahan dapat dilakukan dalam hal antara lain sebagai berikut:

- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme, tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

- c. terjadi perubahan yang mendasar;
- d. perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; atau
- e. merugikan kepentingan nasional.

Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi, maka substansi/muatan materi perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021, merubah Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021, antara lain mencakup berbagai aspek untuk menyesuaikan dengan dinamika perubahan kebijakan nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dan dalam rangka penyesuaian dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dengan cara merumuskan kembali struktur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan yang paling utama yakni dalam kerangka penyesuaian terhadap indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021, dengan tetap memperhatikan dan mempedomani kondisi, potensi, capaian kinerja, target, dan saran serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adanya pembatasan jangka waktu perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah secara umum, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 342 ayat (2) huruf b, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang tidak boleh kurang dari 3 (tiga) tahun dari sisa masa berlaku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021, sehingga hal ini mendorong Pemerintah Kabupaten Karawang untuk menempuh kebijakan melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Karawang memandang perlu untuk menempuh kebijakan melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021, dengan tujuan agar dapat mengoptimalkan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kabupaten Karawang, dan dalam rangka mendukung kebijakan nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 8
TAHUN 2016 TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN
2016-2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 25 tahun; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun; dan (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun. Dengan demikian dokumen perencanaan tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lain untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintah di daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010. Periodisasi RPJMD Kabupaten Karawang tahun 2016-2021 disusun dengan berlandaskan pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/795/SJ tanggal 4 Maret 2016 Tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD Tahun 2017 selanjutnya menjadi pedoman bagi satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan yang memuat strategi, kebijakan umum, dan kerangka ekonomi makro yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Aksi serta prioritas pembangunan daerah yang mengakomodasi aspirasi masyarakat yang ada dalam lingkup wilayah Kabupaten.

Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2016. Pada tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Karawang melaksanakan Revisi RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021, revisi tersebut dilakukan dengan beberapa alasan sebagai berikut :

1. Penajaman substansi dalam RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021; dengan memperhatikan ketepatan berbagai rumusan unsur-unsur kunci dalam perencanaan, seperti tujuan dan sasaran, indikator kinerja utama yang digunakan untuk menunjukkan keberhasilan pencapaian target, serta ketepatan menentukan target-target jangka pendek dan jangka panjang;
2. Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja di Pemerintah Kabupaten Karawang berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah, dengan disusunya Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang;
3. Penyesuaian terhadap urusan pemerintahan sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan RPJMD Kabupaten Karawang tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Nomor 1950);
2. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287)
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019;
15. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011-2031;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RPJMD Kabupaten Karawang

Tahun 2016-2021 sebagai dokumen perencanaan pembangunan disusun sebagai satu kesatuan yang utuh dengan dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah, sehingga dalam penyusunannya, harus memperhatikan RPJMN Tahun 2015-2019.

Selanjutnya, RPJMD juga merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah sehingga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 disusun dengan berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Karawang 2005-2025 dan memperhatikan RTRW Kabupaten Karawang tahun 2011-2031, terutama dari sisi pola dan struktur tata ruang, sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Kabupaten Karawang.

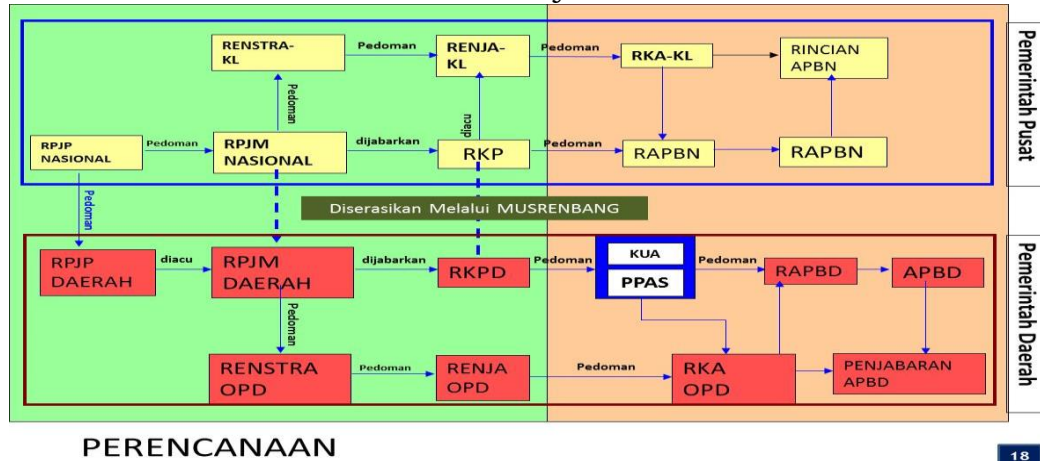
Selain berpedoman dan memperhatikan RPJMN, RPJPD Kabupaten Karawang dan RTRW Kabupaten Karawang, penyusunan RPJMD juga memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk **memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program** serta dokumen lainnya seperti Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, dan target pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

RPJMD juga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), yang menjabarkan RPJMD menjadi kebijakan, program strategis dan operasional dalam rangka menangani isu strategis dan peningkatan pelayanan publik untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan.

Kemudian, pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Karawang yang memuat prioritas program dan

kegiatan dari Rencana Kerja SKPD. Secara Skematis hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Hubungan Hierarkis RPJMD dengan Dokumen Perencanaan lainnya



1.3.1. Hubungan RPJMD dengan RPJMN

Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004, RPJMD harus mengacu dan selaras dengan RPJP dan RPJMN karena keberhasilan pembangunan di daerah seperti yang direncanakan akan menjadi bagian dari keberhasilan pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Nasional dalam kurun waktu 5 tahun (2015-2019) yang tertuang dalam Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019 menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Karawang dalam merancang pembangunan di daerah sesuai kondisi daerah. Adapun agenda pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019 disusun sebagai penjabaran operasional dari Nawa Cita yaitu:

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
2. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa; dan
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

1.3.2. Hubungan RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Karawang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 merupakan rencana pembangunan tahap ketiga dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Karawang tahun 2005-2025. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi dan program prioritas Bupati dan wakil Bupati periode 2016-2021, harus berpedoman pada RPJPD Kabupaten Karawang.

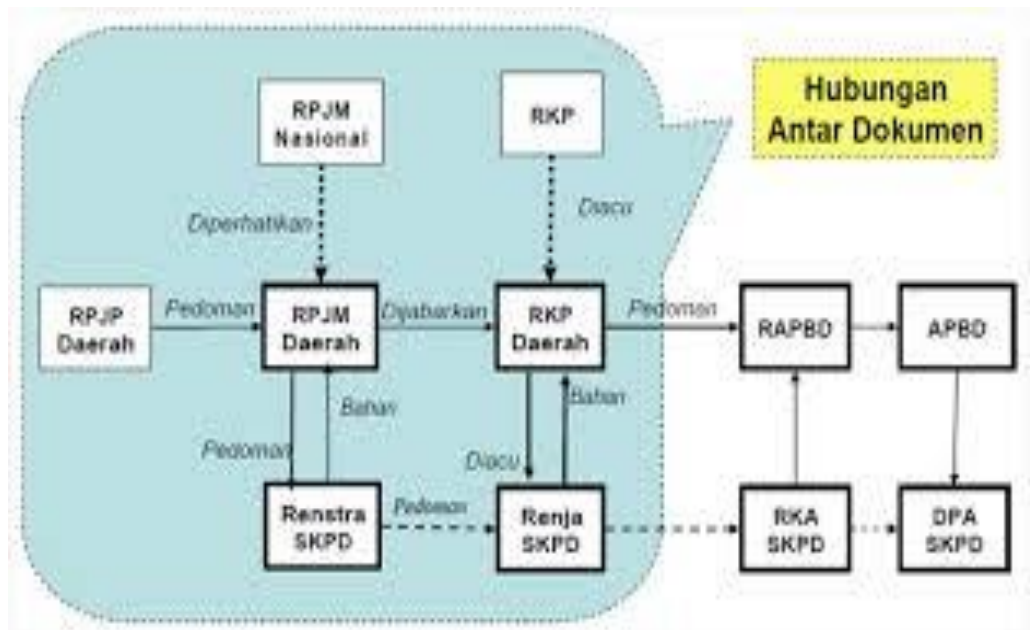
RPJPD Kabupaten Karawang tahun 2005-2025, memiliki visi **“Karawang Sejahtera Berbasis Pertanian dan Industri”**, dengan Misi, yaitu:

1. **Mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan berakhlak dalam lingkungan kehidupan sosial yang berbudaya dan beradab** adalah : Upaya pembangunan kualitas individu masyarakat yang memiliki kompetensi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, berperilaku hidup bersih dan sehat, memiliki akhlak yang disertai dengan upaya pembangunan modal sosial dimana individu masyarakat yang berkualitas dimaksud, secara kolektif dapat hidup bersama secara tertib berlandaskan norma agama, norma sosial dan nilai-nilai budaya dalam suasana yang dinamis, harmonis dan toleransi.

2. **Mewujudkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing, berkualitas dan rasional yang digerakan oleh sektor pertanian dan industri** adalah : upaya membangun perekonomian secara makro dan aktifitas ekonomi masyarakat karawang guna memperoleh pendapatan secara layak yang digerakkan oleh sektor pertanian dan industri yang didukung sektor perdagangan dan jasa sebagai fungsi dari sektor industri dengan memanfaatkan faktor kekayaan alam dan keuntungan lokasi sebagai keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif secara berkelanjutan yang dibangun dalam kerangka regulasi dan iklim usaha yang kondusif disertai dengan upaya penumbuhkembangan budaya dan pola konsumsi yang sehat dan seimbang.
3. **Mewujudkan Kabupaten Karawang yang produktif, nyaman, indah dan lestari** adalah upaya pembangunan yang dilaksanakan oleh seluruh komponen baik pemerintah, swasta dan masyarakat dengan kesadarannya dalam memanfaatkan ruang wilayah sehingga memberikan kenyamanan sebagai tempat hidup, tempat melaksanakan aktifitas sosial ekonominya secara berkelanjutan dengan memperhatikan nilai estetika, daya tampung dan daya dukung lingkungan.
4. **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang mandiri, profesional dan akuntabel dalam kerangka otonomi daerah** adalah upaya membangun sistem manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah yang otonom, transparan dan akuntabel yang mampu mewadahi keterlibatan swasta dan masyarakat secara partisipatif dengan mengandalkan pada seluruh potensi yang dimiliki dengan didukung oleh ketersediaan aparatur yang handal dan kompeten, serta mampu memberikan pelayanan publik kepada seluruh

masyarakat secara optimal sesuai dengan kewenangan dan urusan pemerintahan yang dimiliki.

Gambar 1.2
Skema keterkaitan antara RPJPD 2005 -2025 dan RPJMD Kabupaten Karawang 2016-2021



1.3.3. Hubungan RPJMD dan RTRW Kabupaten Karawang

Penyusunan RPJMD Kabupaten Karawang tahun 2016-2021, juga harus berpedoman pada berbagai pola dan struktur tataruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Karawang sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Karawang. Dalam menyeimbangkan kebutuhan (*demand*) dan ketersediaan (*supply*) ruang agar mendekati kondisi optimal, maka pendekatan perencanaan dilakukan dengan mensesuaikan kegiatan antar sektor dengan kebutuhan ruang dan potensi sumber daya alam yang berasaskan kelestarian lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan.

1.3.4. Hubungan RPJMD dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat

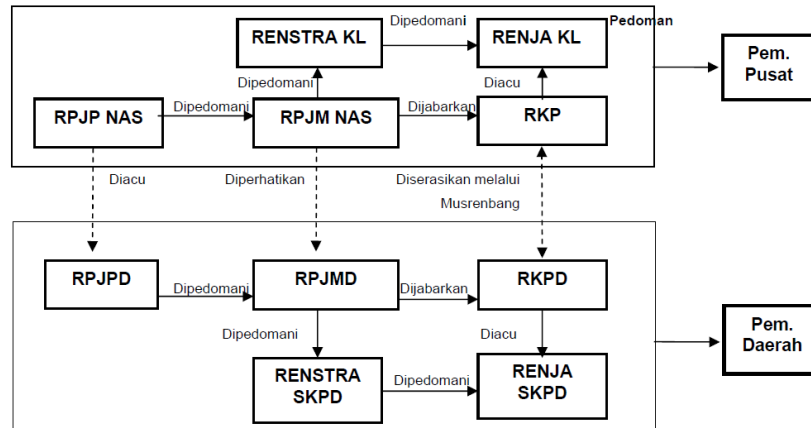
Penyusunan RPJMD Kabupaten Karawang tahun 2016-2021 memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013. Visi RPJM Provinsi Jawa Barat: “Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua“. Makna yang terkandung dalam visi pembangunan Provinsi Jawa Barat tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
2. Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan;
3. Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur dan Perluasan Partisipasi Publik;
4. Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan;
5. Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal.

1.3.5. RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disusun oleh setiap SKPD dan ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah diverifikasi terlebih dahulu oleh Bappeda Kabupaten Karawang. Dengan demikian Kondisi kesinambungan, konsistensi dan

integrasi perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik sebagaimana skema di bawah ini:



1.3.6. RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Karawang 2016-2021 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Karawang yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD, serta merupakan hasil dari pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Karawang yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan.

1.3.7. RPJMD dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sesuai amanat peraturan perundang-undangan, Kajian Lingkungan Hidup Strategis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang tahun 2016-2021, merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 15 (ayat 1) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Instrumen pengelolaan lingkungan hidup dalam kebijakan perencanaan pembangunan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan atau evaluasi rencana pembangunan daerah. Dalam UU PPLH Pasal 1 (angka 10) disebutkan bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai “rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program”.

Sedangkan dalam UU PPLH Pasal 15 (ayat 1) disebutkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Senada dengan hal tersebut, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, pasal 2 disebutkan bahwa “Gubernur dan Bupati/Walikota wajib melaksanakan KLHS dalam penyusunan RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup”

1.3.8. Hubungan RPJMD dengan Rencana Pembangunan Sektoral

Penyusunan RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 memperhatikan beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral, baik di tingkat nasional, provinsi maupun di Kabupaten Karawang. Beberapa dokumen

rencana pembangunan sektoral di tingkat nasional antara lain: Peta Jalan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan *Sustainable Development Goals* (SDG's) di Indonesia, Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN PG), dan *Grand Design* Reformasi Birokrasi.

1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen yang menyajikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pemberian pelayanan masyarakat serta sekaligus sebagai acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Karawang selama kurun waktu lima tahun ke depan.

Adapun tujuan disusunnya RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 adalah :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar ruang, antar sektor, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.5. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan RPJMD Kabupaten Karawang, landasan hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB III GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah, yang terdiri atas kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan kerangka pendanaan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS KABUPATEN KARAWANG

Bab ini menyajikan permasalahan dan isu-isu strategis daerah yang menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tentang visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah disepakati.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih.

Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini memuat Penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

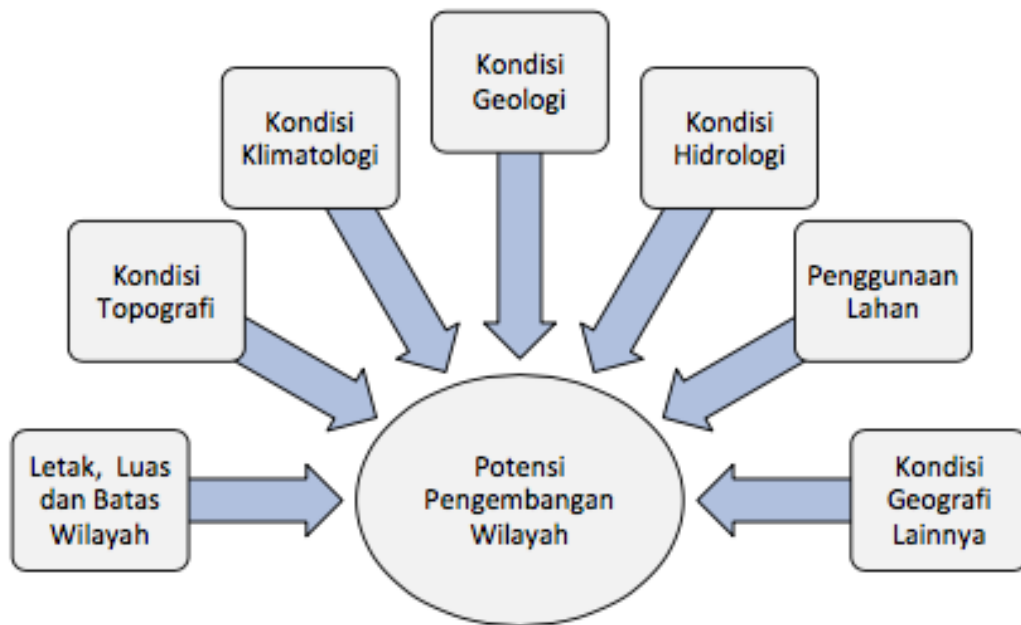
Wilayah Kabupaten Karawang secara geografis terletak antara 107° 02'-107° 40' BT dan 5° 56'-6° 34' LS, termasuk daerah dataran yang relatif rendah, mempunyai variasi ketinggian wilayah antara 0 - 1.279 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan wilayah 0 - 20, 2 - 150, 15 - 400, dan diatas 400 dengan suhu rata-rata 270 °C. Topografi di Kabupaten Karawang sebagian besar berbentuk dataran yang relatif rendah (25 m dpl) terletak pada bagian utara mencakup Kecamatan Pakisjaya, Batujaya, Jayakarta, Cibuya, Tirtajaya, Cilebar, Pedes, Tempuran, Cilamaya Wetan, Cilamaya Kulon, Rengasdengklok, Kutawaluya, Rawamerta, Majalaya, Telagasari, Lemahabang, Banyusari, Jatisari, Kotabaru, Cikampek, Purwasari, Klari, Karawang Barat, Karawang Timur, Tirtamulya, sebagian Telukjambe Barat, Sebagian Telukjambe Timur, dan sebagian Kecamatan Ciampel. Hanya sebagian kecil wilayah yang bergelombang dan berbukit-bukit di bagian selatan dengan ketinggian antara 26 – 1.200 dpl. Daerah perbukitan tersebut antara lain : Gunung Pamoyanan, Dindingsari, Cigolosor, Jayanti, Godongan, Rungking, Gadung, Kuta, Tonjong, Seureuh, Sinalanggeng, Lanjung dan Gunung Sanggabuana. Terdapat pula Pasir Gabus, Cielus, Tonjong dengan ketinggian bervariasi antara 300-1.200 m dpl dan tersebar di Kecamatan Tegalwaru, sebagian kecil Kecamatan Pangkalan dan Kecamatan Ciampel. Kabupaten Karawang terutama di pantai utara tertutup pasir pantai yang merupakan batuan sedimen yang dibentuk oleh bahan-bahan lepas terutama endapan laut dan alluvium vulkanik. Di bagian tengah ditempati oleh perbukitan terutama dibentuk oleh batuan sedimen, sedangkan dibagian selatan terletak Gunung Sanggabuana dengan ketinggian \pm 1.291 m dpl, yang mengandung endapan vulkanik. Kabupaten Karawang dilalui oleh beberapa sungai yang bermuara di Laut Jawa. Sungai Citarum merupakan pemisah antara Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Bekasi, sedangkan sungai Cilamaya merupakan batas wilayah dengan Kabupaten Subang. Selain sungai, terdapat 3 buah saluran irigasi yang besar, yaitu : Saluran Induk Tarum Utara, Saluran Induk Tarum Tengah, dan Saluran Induk Tarum Barat yang dimanfaatkan untuk pengairan sawah, tambak dan pembangkit tenaga listrik. Luas wilayah Kabupaten Karawang 1.753,27 Km² atau 175.327 Ha, luas tersebut merupakan 3,73 % dari luas Provinsi Jawa Barat (37.116,54 Km²) dan memiliki garis pantai sepanjang 84,23 Km, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Batas Alam yaitu Laut Jawa.
- Sebelah Timur : Kabupaten Subang
- Sebelah Tenggara : Kabupaten Purwakarta
- Sebelah Selatan : Kab. Bogor
- Sebelah Barat : Kabupaten Bekasi.

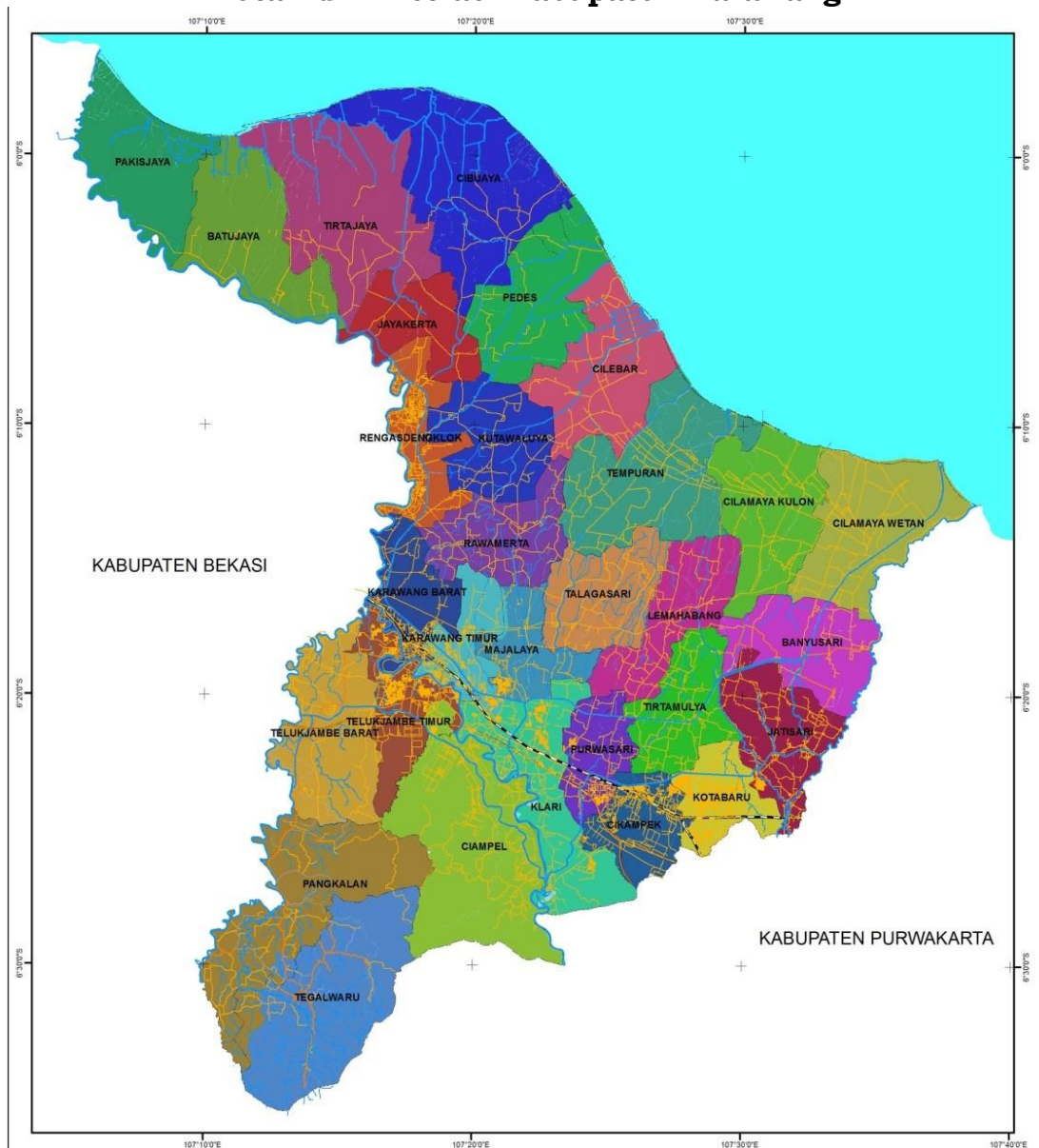
Kabupaten Karawang merupakan salah satu daerah yang memiliki lahan subur di Jawa Barat, sehingga sebagian besar lahannya digunakan untuk pertanian. Wilayah ini, secara administrasi terdiri dari 30 kecamatan, 297 desa dan 12 kelurahan. Penamaan Kecamatan baru menurut Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan yaitu:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Kecamatan Pangkalan | 16. Kecamatan Telagasari |
| 2. Kecamatan Tegalwaru | 17. Kecamatan Majalaya |
| 3. Kecamatan Ciampel | 18. Kec. Karawang Timur |
| 4. Kec. Telukjambe Timur | 19. Kec. Karawang Barat |
| 5. Kec. Telukjambe Barat | 20. Kecamatan Rawamerta |
| 6. Kecamatan Klari | 21. Kecamatan Tempuran |
| 7. Kecamatan Cikampek | 22. Kecamatan Kutawaluya |
| 8. Kecamatan Purwasari | 23. Kec. Rengasdengklok |
| 9. Kec. Tirtamulya | 24. Kecamatan Jayakarta |
| 10. Kecamatan Jatisari | 25. Kecamatan Pedes |
| 11. Kecamatan Banyusari | 26. Kecamatan Cilebar |
| 12. Kecamatan Kotabaru | 27. Kecamatan Cibuaya |
| 13. Kec Cimalaya Wetan | 28. Kecamatan Tirtajaya |
| 14. Kec Cilamaya Kulon | 29. Kecamatan Batujaya |
| 15. Kec Lemahabang | 30. Kecamatan Pakisjaya |

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya



Gambar 2.2
Peta Administrasi Kabupaten Karawang



Kabupaten Karawang beriklim tropis, mempunyai musim yang hampir sama dengan wilayah di Kabupaten wilayah Pantai Utara Jawa pada umumnya, yaitu musim kemarau dan musim hujan dengan suhu rata-rata berkisar antara 26,8° celcius sampai dengan 27,7° celcius. Potensi sumberdaya air di Kabupaten Karawang terdiri atas sumberdaya air permukaan (sungai, danau, dan waduk) dan air tanah. Kemiringan lereng di Kabupaten Karawang sebagian besar datar, yaitu sebesar 80,44% luas lahan.

Kabupaten Karawang diarahkan menjadi salah satu gerbang (*gateway city*) pembangunan di wilayah Indonesia bagian barat sebagai penyangga Ibukota Negara. Dikenal juga sebagai gudang beras dan lumbung pangan nasional.

Wilayah Kabupaten Karawang berdasarkan kondisi geologis merupakan kawasan yang relatif aman dari bencana gempa bumi, walaupun mempunyai resistensi dari beberapa potensi bencana seperti : banjir (kawasan perkotaan disepanjang aliran sungai), rob di pesisir laut, tanah longsor (Pangkalan, Tegalwaru) dan puting beliung di beberapa kecamatan.

Kabupaten Karawang juga mempunyai potensi pariwisata berupa wisata alam, budaya, dan sejarah. Wisata Alam berupa pantai (Pantai Tanjung Baru, Pantai Tanjung Pakis, Pantai Pisangan, Pantai Samudra Baru, Pantai Sedari), pegunungan (Sanggabuana), air terjun (Curug Cigentis, Curug Bandung, Curug Cikoleangkap, Curug Lalay, Curug Santri, *Green Canyon*), wisata sejarah berupa Tugu Perjuangan Rengasdengklok, Rumah Sejarah Ir. Soekarno di Rengasdengklok, Makam Syech Quro, Situ Cipule, Bendungan Walahar, Wisata Air Leuweungseureuh, Monumen Rawagede, Situs Candi Jiwa dan Candi Blandongan dan Monumen Surotokunto.

Secara geografis wilayah Kabupaten Karawang terletak antara 070-02-1070-40° B dan 50-56-60-34° LS, termasuk daerah dataran yang relatif rendah, mempunyai variasi ketinggian wilayah antara 0 - 1.279 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan wilayah 0 - 2 %, 2 - 15 %, 15 - 40 % dan diatas 40 %.

Luas wilayah Kabupaten Karawang 1.753,27 Km² atau 175.327 Ha, 3,73 % dari luas Propinsi Jawa Barat, dengan komposisi penggunaan lahan sebagai berikut :

1. Pertanian Padi Sawah : 94,075 Ha

2. Pekarangan dan Bangunan : 22,609 Ha
3. Tegal/Kebun : 12,300 Ha
4. Ladang/Huma : 7,705 Ha
5. Pengembalaan Padang Rumput : 10,460 Ha
6. Hutan Rakyat
7. Rawa
8. Tambak : 10,570 Ha
9. Kolam/Empang : 1,935 Ha
10. Hutan Negara : 10,650 Ha
11. Perkebunan : 0,793 Ha
12. Kawasan Industri dan Zona Industri : 2,459 Ha
13. Lain-lain 1,239 Ha

Karawang merupakan salah satu daerah yang memiliki lahan subur di Jawa Barat sehingga sebagian besar lahannya dipergunakan untuk pertanian.

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang dapat diketahui bahwa perkembangan penduduk Kabupaten Karawang selama beberapa tahun terakhir senantiasa bertambah dari tahun ke tahun dengan tingkat pertumbuhan relatif tinggi. Jumlah penduduk Kabupaten Karawang pada tahun 2011 sebesar 2.077.267 jiwa, tahun 2012 berkurang menjadi 1.948.015 jiwa dengan laju pertumbuhan 3,24%. Sedangkan untuk tahun 2013, berjumlah 2.075.748 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 3,64%, pada tahun 2014 penduduk Kabupaten Karawang telah mencapai 1.903.115 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk mencapai 4,04%. Tahun 2015 penduduk Kabupaten Karawang telah mencapai 2.059.742 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk mencapai 4,61 %.

Untuk melihat data secara rinci dapat kami sampaikan pada tabel sebagai berikut :

LAJU PERKEMBANGAN PENDUDUK TAHUN 2009 s/d 2013*

TAHUN	KELAHIRAN (Pertumbuhan Alami)	MIGRASI (Pendatang)	JUMLAH PENDUDUK	LPP (%)
1	2	3	4	5
2009	54.158	3.994	2.007.701	2,90
2010	52.638	12.598	2.003.164	3,26
2011	51.256	15.985	2.077.267	3,24
2012	54.330	19.051	1.948.015	3,77
2013	60.019	15.489	2.075.748	3,64
2014	57.044	19.929	1.903.115	4,04
2015	68.514	26.466	2.059.742	4,61
Rata-Rata	56.851	16.216		3,47

Keterangan :

Data Jumlah Penduduk Berdasarkan DAK2 (Daftar Agregat Kependudukan)

**Data Migrasi Tahun 2009 mulai Bulan Agustus



- Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa tingkat kelahiran tertinggi pada tahun 2012 seiring dengan bertambahnya migrasi (pendatang) ke Kabupaten Karawang dengan jumlah migrasi sebanyak 19.051 jiwa.
- Rata-rata pertahun angka kelahiran mencapai 49.109 jiwa.
- Kabupaten Karawang yang wilayahnya didominasi oleh sektor industri menyebabkan banyak penduduk dari luar Kabupaten Karawang yang datang ke Kabupaten Karawang. Terlihat bahwa jumlah migrasi (pendatang) setiap tahunnya bertambah dengan rata-rata pertahun jumlah migrasi (pendatang) sebanyak 11.885 jiwa.
- Seiring dengan bertambahnya jumlah pendatang setiap tahunnya menyebabkan jumlah penduduk di Kabupaten Karawang meningkat.
- Menurut data di atas Jumlah Penduduk terbanyak sebesar 2.077.267 jiwa yaitu pada tahun 2011 sedangkan rata-rata pertahun jumlah penduduk sekitar 1.996.832 jiwa.
- Untuk Laju Perkembangan Penduduk setiap tahunnya meningkat yaitu sebesar 3,05 %.

2.2. Kondisi Ekoregional

Ekoregion merupakan pola susunan wilayah geografis yang memiliki kesamaan kondisi iklim, tanah, air, flora dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, Indonesia telah menetapkan ekoregion sebagai acuan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup. Penetapan ekoregion menjadi dasar dan memiliki peran yang sangat penting dalam melihat keterkaitan, interaksi, interdependensi, dan dinamika pemanfaatan berbagai sumber daya alam antar ekosistem dalam satu wilayah ekoregion. Secara umum, Kabupaten Karawang memiliki lima jenis ekoregion dengan peta ekoregion terlampir pada Tabel 2-1.

Tabel 2-1 Jenis Ekoregion Kabupaten Karawang

Jenis Ekoregion	Luas (Ha)	Persentase (%)
Dataran Fluvial	127.003,38	66,39%
Dataran Kaki Gunung Api	10.066,94	5,26%
Dataran Pantai	17.660,15	9,23%
Perbukitan Solusional Karst	1.979,21	1,03%
Perbukitan Struktural Lipatan	34.580,75	18,08%

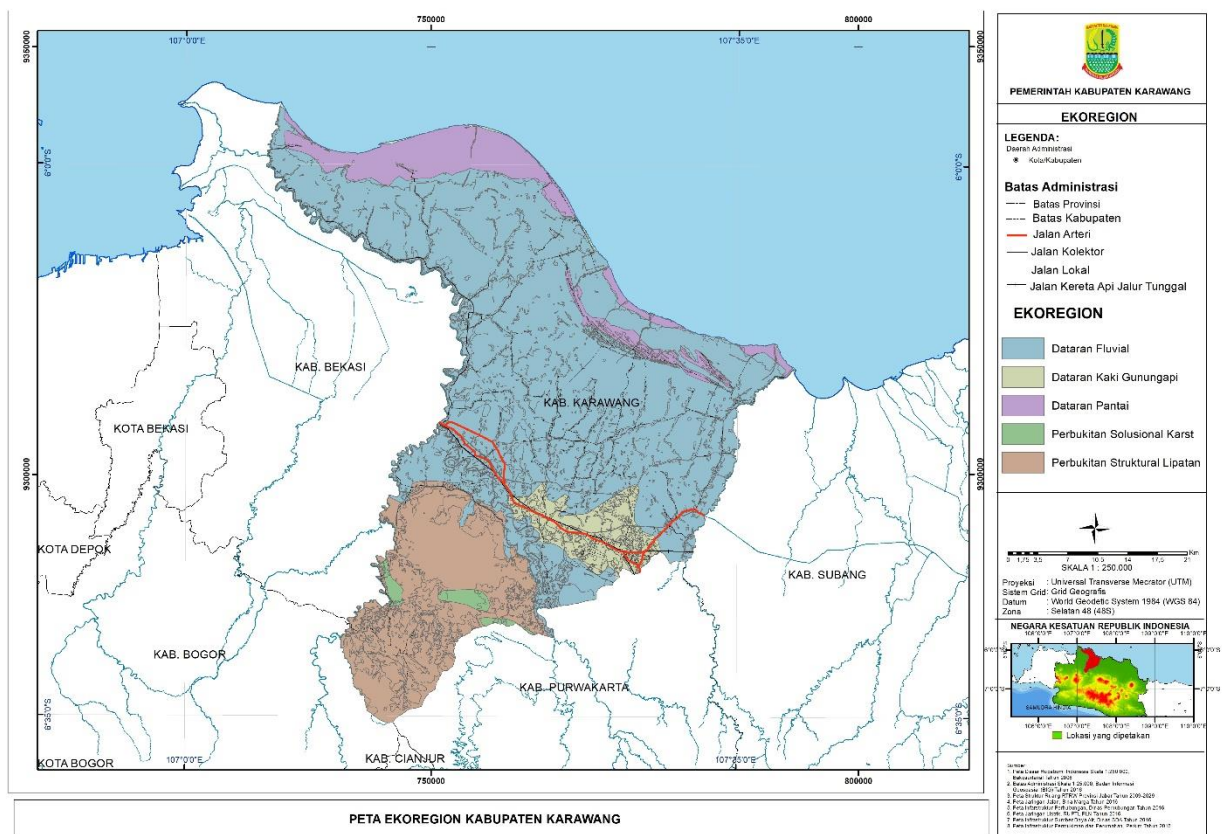
Sumber : D3TLH Provinsi Jawa Barat, 2018

Adapun jenis-jenis ekoregion tersebut adalah sebagai berikut.

1. Dataran fluvial, yaitu wilayah dengan geomorfologi datar berombak dan kemiringan $\leq 15\%$. Secara hidrologis, jenis ekoregion ini memiliki air tanah dan air permukaan yang tersedia dengan cukup dan berkualitas relatif baik. Adapun tipe pemanfaatan lahan jenis ekoregion ini meliputi lahan sawah, ladang, permukiman, dan semak belukar. Kerawanan lingkungan yang mungkin terjadi adalah pencemaran air, banjir dan kekeringan.
2. Perbukitan struktural, yaitu wilayah dengan ketinggian dominan < 500 mdpl, geomorfologi relief dan lereng berbukit dengan amplitudo 0-300 m, serta kemiringan $> 16\%$. Secara hidrologis, jenis ekoregion ini menyediakan sumber daya air yang melimpah dengan tipe sungai berpola aliran radial sentrifugal, mata air tidak besar, dan air tanah pada dataran kaki gunung. Jenis ekoregion ini mempunyai tipe tutupan lahan beragam, antara lain hutan, semak belukar, savana, ladang dan permukiman. Kerawanan lingkungan pada jenis ekoregion ini adalah tanah longsor dan erosi.
3. Perbukitan karst, yaitu wilayah dengan elevasi dominan < 500 mdpl, geomorfologi lereng berbukit dengan amplitudo 0-300 m, dan kemiringan > 16 mdpl. Secara hidrologis, jenis ekoregion ini memiliki sumber daya air berupa sungai bawah tanah dengan kualitas air relatif buruk. Penggunaan lahan pada jenis ekoregion ini terbatas pada semak belukar, ladang, dan permukiman.
4. Dataran kaki gunung api merupakan satuan bentuk lahan yang lebih datar dan terbentuk dari pengendapan material oleh proses fluvial. Proses sedimentasi pada lembah sungai mulai aktif karena adanya penurunan kemiringan lereng yang memungkinkan terjadinya pengendapan yang cukup besar. Kemiringan lerengnya bervariasi dari agak landai sampai landai. Pemanfaatan lahan untuk pertanian mulai berkembang. Material permukaan didominasi oleh kerikil hingga pasir kasar. Proses erosi pada unit

ini mulai lebih kecil dari pengendapannya. Secara umum proses erosi yang tampak adalah dari erosi lembar sampai erosi alur.

5. Dataran pantai adalah dataran yang letaknya dekat ke laut dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Karena berbatasan langsung dengan laut, dataran pantai dipengaruhi langsung oleh laut. Baik ekosistemnya maupun kondisi geologisnya. Dataran pantai lazimnya juga disebut sebagai perbatasan antara lautan dan daratan. Karena berhadapan langsung dengan laut. Dataran pantai selalu berevolusi bentuknya untuk menghadapi energi yang cukup kuat dari gelombang laut. Biasanya gelombang laut yang disebabkan oleh energi angin adalah gelombang yang mampu mempengaruhi kawasan pantai. Dataran pantai selalu berevolusi bentuknya supaya tetap bertahan melawan serangan gelombang.



Gambar 2-3 Peta Ekoregion Kabupaten Karawang

2.3. Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

2.3.1 Daya Dukung Air

Daya dukung sumber daya air pada suatu wilayah dapat diartikan sebagai ketersediaan potensi sumber daya air yang dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup di wilayah tersebut. Potensi air pada suatu wilayah dinyatakan sebagai *supply*, sedangkan kebutuhan air di

wilayah tersebut dinyatakan sebagai *demand*. Idealnya, nilai *demand* tidak melebihi kemampuan *supply*. Jika nilai *demand* lebih besar dari *supply*, maka dapat dikatakan bahwa daya dukung air di wilayah tersebut telah terlampaui, sehingga diperlukan penerapan teknologi dan pengelolaan lingkungan yang baik sebagai bentuk pengendalian.

Perhitungan daya dukung air pada kajian ini mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah. Pada peraturan tersebut, dijelaskan metode perhitungan daya dukung air dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kebutuhan suatu wilayah, baik pada keadaan surplus ataupun defisit. Keadaan surplus menunjukkan bahwa ketersediaan air di wilayah tersebut tercukupi, sedangkan keadaan defisit menunjukkan bahwa wilayah tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan airnya. Guna mencapai kondisi surplus, fungsi lingkungan yang terkait dengan sistem tata kelola air harus dilestarikan.

Dalam perhitungan ketersediaan air, digunakan Metode Koefisien Limpasan yang dimodifikasi dari Metode Rasional dengan mempertimbangkan curah hujan tahunan dan tutupan lahan, sehingga diperoleh ketersediaan air di Kabupaten Karawang sebesar 9.022.270,47 m³/tahun. Adapun ketersediaan air di masing-masing kabupaten/kota berdasarkan perhitungan yang dilakukan dapat dilihat pada Tabel 2-2.

Tabel 2-2 Ketersediaan Air di Kabupaten Karawang berdasarkan Kecamatan

Kecamatan	Koefisien Limpasan	Curah Hujan Tahunan	Luas Wilayah (Ha)	Ketersediaan Air (M3/th)
Pangkalan	0,30	208,17	9.759,99	612.697,03
Tegalwaru	0,24	142,25	10.770,22	368.639,40
Ciampel	0,35	149,00	11.747,25	619.411,88
Telukjambe Timur	0,41	143,54	4.500,11	262.493,97
Telukjambe Barat	0,33	143,54	7.335,42	345.511,80
Klari	0,35	199,42	7.555,45	530.348,34
Cikampek	0,41	144,25	3.677,01	214.935,96
Purwasari	0,35	144,25	3.127,26	155.666,38
Tirtamulya	0,31	144,25	4.781,04	216.866,92
Jatisari	0,32	100,46	5.544,77	175.734,20
Banyusari	0,31	112,58	5.646,51	198.006,62
Kotabaru	0,34	100,46	3.281,48	111.004,60
Cilamaya Wetan	0,31	185,08	7.753,28	446.593,43
Cilamaya Kulon	0,31	113,33	6.819,24	241.359,20
Lemahabang	0,32	101,75	5.123,19	164.411,36
Talagasari	0,31	130,00	5.344,34	218.470,53
Majalaya	0,32	128,92	3.364,42	137.824,76
Karawang Timur	0,35	180,67	2.762,35	176.582,17
Karawang Barat	0,34	180,67	4.001,11	244.893,76
Rawamerta	0,31	189,25	5.132,20	301.575,00

Kecamatan	Koefesien Limpasan	Curah Hujan Tahunan	Luas Wilayah (Ha)	Ketersediaan Air (M3/th)
Tempuran	0,31	158,08	9.368,84	457.890,75
Kutawaluya	0,31	174,08	5.365,53	288.495,21
Rengasdengklok	0,32	174,08	3.939,48	222.411,57
Jayakarta	0,31	129,17	4.181,98	169.261,62
Pedes	0,31	105,75	7.077,57	231.838,60
Cilebar	0,31	148,58	7.250,54	330.043,27
Cibuaya	0,30	100,42	11.367,76	346.554,65
Tirtajaya	0,31	154,92	10.593,80	502.457,06
Batujaya	0,31	163,92	7.542,29	385.708,98
Pakisjaya	0,31	163,92	6.825,93	344.581,43
Kab. Karawang				9.022.270,47

Sumber : Hasil Analisis, 2018

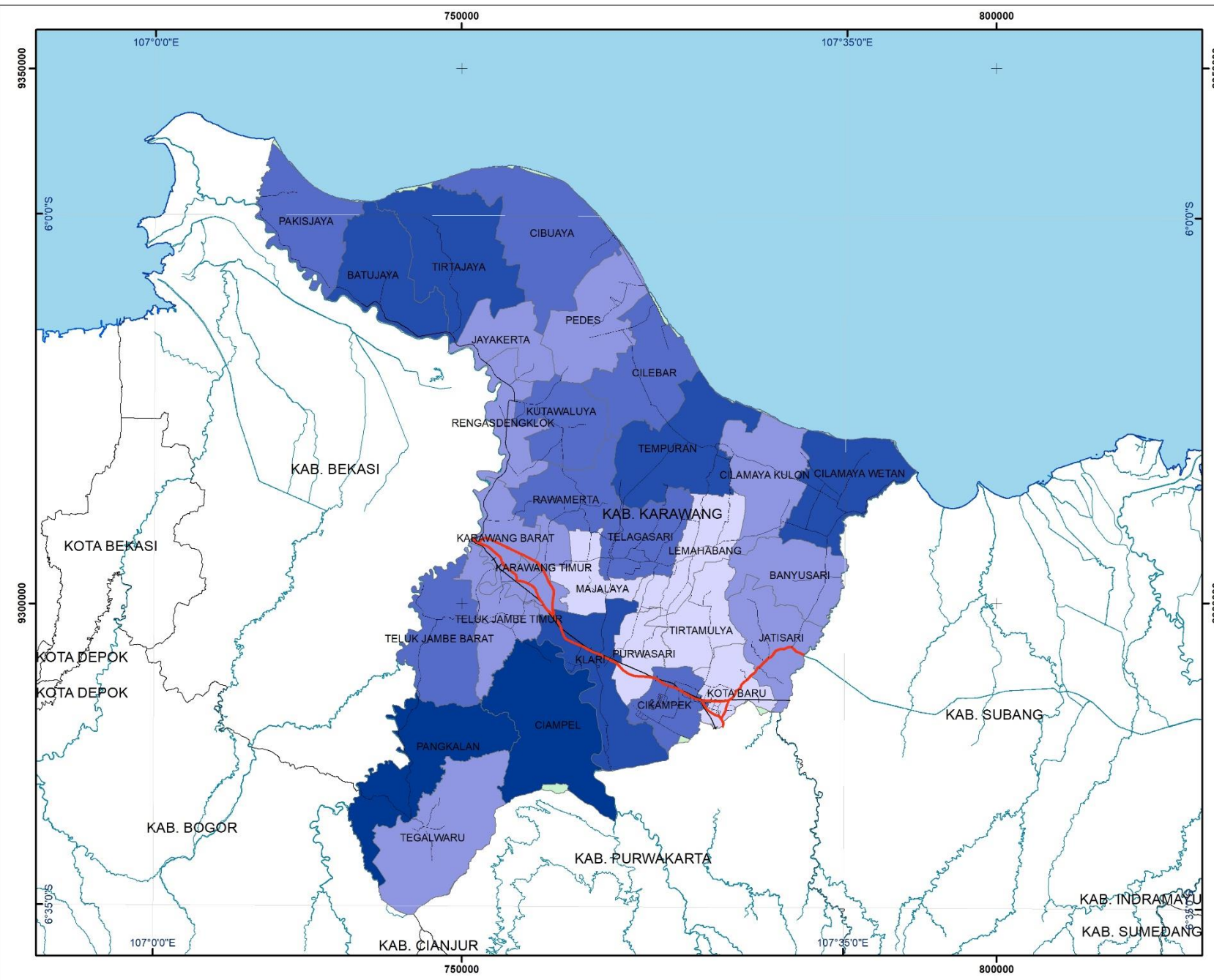
Selanjutnya, dilakukan pula perhitungan kebutuhan air menggunakan standar kebutuhan air untuk hidup layak yang mengacu kepada Permen LH Nomor 17 Tahun 2009, yaitu sebesar 1.600 m³ air/kapita/tahun. Hasil perhitungan kebutuhan air kemudian dikomparasi dengan nilai ketersediaan air yang diperoleh sebagaimana tercantum dalam Tabel 2-3 sehingga diketahui bahwa hingga lima tahun mendatang ketersediaan air secara umum di Kabupaten Karawang mengalami defisit atau kekurangan jika hanya mengandalkan air hujan, karena rata-rata curah hujan di Kabupaten Karawang cenderung kecil.

Tabel 2-3 Supply dan Demand Air Bersih Kabupaten Karawang

Kecamatan	Ketersediaan Air (M3/th)	Kebutuhan Air (M3/TAHUN)	Daya Dukung Air	
			2016	2021
Pangkalan	612.697,03	1526904,5	- 914.207,47	1746087
Tegalwaru	368.639,40	1614030	- 1.245.390,60	1691994
Ciampel	619.411,88	1859529	- 1.240.117,12	1949757
Telukjambe Timur	262.493,97	5982773,4	- 5.720.279,43	6271634,4
Telukjambe Barat	345.511,80	2306245,2	- 1.960.733,40	2417716,2
Klari	530.348,34	7341361,8	- 6.811.013,46	7696798,8
Cikampek	214.935,96	5057629,8	- 4.842.693,84	5302033,8
Purwasari	155.666,38	2990445	- 2.834.778,62	3135204
Tirtamulya	216.866,92	2092369,8	- 1.875.502,88	2193547,8
Jatisari	175.734,20	3402822	- 3.227.087,80	3567729
Banyusari	198.006,62	2410795,8	- 2.212.789,18	2527303,8
Kotabaru	111.004,60	5657339,4	- 5.546.334,80	5930870,4
Cilamaya Wetan	446.593,43	3559231,8	- 3.112.638,37	3731146,8
Cilamaya Kulon	241.359,20	2825012,4	- 2.583.653,20	2961668,4
Lemahabang	164.411,36	2871309	- 2.706.897,64	3010155
Talagasari	218.470,53	2843058	- 2.624.587,47	2980371
Majalaya	137.824,76	2080062	- 1.942.237,24	2180583
Karawang Timur	176.582,17	5576046,6	- 5.399.464,43	5845197,6
Karawang Barat	244.893,76	7347406,2	- 7.102.512,44	7703281,2
Rawamerta	301.575,00	2299368,6	- 1.997.793,60	2410401,6
Tempuran	457.890,75	2769605,4	- 2.311.714,65	2903414,4

Kecamatan	Ketersediaan Air (M3/th)	Kebutuhan Air (M3/TAHUN)	Daya Dukung Air		Kebutuhan Air (M3/TAHUN)	Daya Dukung Air	
		2016			2021		
Kutawaluya	288.495,21	2539480,2	-	2.250.984,99	2662120,2	-	2.373.624,99
Rengasdengklok	222.411,57	4938231	-	4.715.819,43	5176941	-	4.954.529,43
Jayakarta	169.261,62	2831889	-	2.662.627,38	2968545	-	2.799.283,38
Pedes	231.838,60	3315879	-	3.084.040,40	3476187	-	3.244.348,40
Cilebar	330.043,27	1862857,8	-	1.532.814,53	1952866,8	-	1.622.823,53
Cibuaya	346.554,65	2299587,6	-	1.953.032,95	2410839,6	-	2.064.284,95
Tirtajaya	502.457,06	2926190,4	-	2.423.733,34	3067445,4	-	2.564.988,34
Batujaya	385.708,98	3560677,2	-	3.174.968,22	3733030,2	-	3.347.321,22
Pakisjaya	344.581,43	1728129	-	1.383.547,57	1811787	-	1.467.205,57
Kab. Karawang	9.022.270,47	100555076,4	-	91.532.805,93	105416657,4	-	96.394.386,93

Sumber : Hasil Analisis, 2018



PETA KETERSEDIAAN AIR KABUPATEN KARAWANG



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

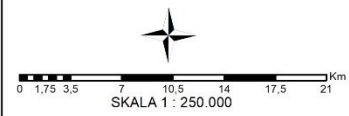
KETERSEDIAAN AIR

LEGENDA:

- Daerah Administrasi
- Kota/Kabupaten
- Batas Administrasi**
- Batas Provinsi
 - - - Batas Kabupaten
 - Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lokal
 - + Jalan Kereta Api Jalur Tunggal

KETERSEDIAAN AIR

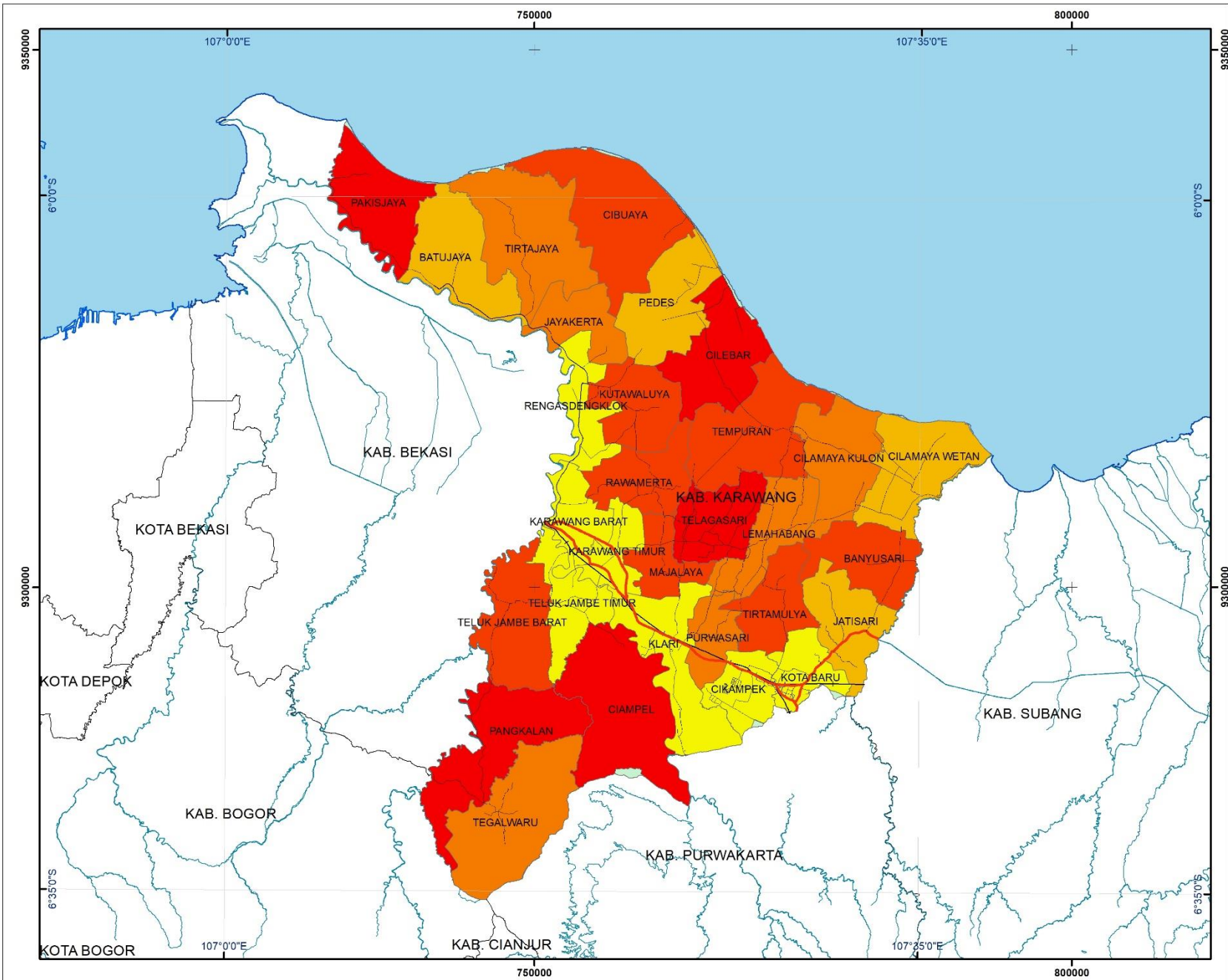
	103.004,90 - 159.031,24
	159.031,24 - 234.080,60
	234.080,60 - 345.539,05
	345.539,05 - 469.920,77
	469.920,77 - 592.420,98



Proyeksi : Universal Transverse Mecrator (UTM)
 Sistem Grid : Grid Geografis
 Datum : World Geodetic System 1984 (WGS 84)
 Zona : Selatan 48 (48S)



- Sumber:
1. Peta Dasar Rupabumi Indonesia Skala 1:250.000, Bakosurtanal Tahun 2008
 2. Batas Administrasi Skala 1:250.000, Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2016
 3. Peta Struktur Ruang RTRW Provinsi Jabar Tahun 2009-2029
 4. Peta Jaringan Jalan, Sin Waga Tahun 2016
 5. Peta Infrastruktur Perhubungan, Dinas Perhubungan Tahun 2016
 6. Peta Jaringan Listrik, RUPTEL PLAN Tahun 2016
 7. Peta Infrastruktur Sumber Daya Air, Dinas SDA Tahun 2016
 8. Peta Infrastruktur Pemukiman dan Perumahan, Perkim Tahun 2016



PETA DAYA DUKUNG AIR KABUPATEN KARAWANG



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

DAYA DUKUNG AIR

LEGENDA:

Daerah Administrasi
● Kota/Kabupaten

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- - - Batas Kabupaten
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- + Jalan Kereta Api Jalur Tunggal

DAYA DUKUNG AIR

- 7497.137,88 - -499.9327,14
- 4.999.327,13 - -3.263.109,43
- 3.263.109,42 - -2.629.909,83
- 2.629.909,82 - -2.034.516,56
- 2.034.516,55 - -1.153.666,02



0 1,75 3,5 7 10,5 14 17,5 21 Km
SKALA 1 : 250.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid : Grid Geografis
Datum : World Geodetic System 1984 (WGS 84)
Zona : Selatan 48 (48S)

NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA



- Sumber:
1. Peta Dasar Rupabumi Indonesia Skala 1:250.000, Bakosurtanal Tahun 2009
 2. Batas Administrasi Skala 1:25.000, Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2016
 3. Peta Struktur Ruang RTRW Provinsi Jabar Tahun 2009-2029
 4. Peta Jaringan Jalan, Sinema Tahun 2016
 5. Peta Infrastruktur Perhubungan, Dinas Perhubungan Tahun 2016
 6. Peta Jaringan Listrik, RUPPL-PLN Tahun 2016
 7. Peta Infrastruktur Sumber Daya Air, Dinas SDA Tahun 2016
 8. Peta Infrastruktur Permukiman dan Perumahan, Perkim Tahun 2016

2.3.2 Daya Dukung Pangan

Daya dukung pangan merupakan fungsi dari persentase lahan yang dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian terhadap satuan luas dan waktu. Semakin besar persentase lahan yang dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian di suatu wilayah, semakin besar pula daya dukung pangan di wilayah tersebut.

Perhitungan daya dukung pangan suatu wilayah dilakukan dengan menggunakan pendekatan terhadap swasembada pangan wilayah tersebut, sejalan dengan kemampuan suatu daerah dalam swasembada pangan. Hal ini sejalan dengan program pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2009 tentang Ketahanan Pangan, yaitu Diversifikasi Pangan. Adapun persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut.

$$\emptyset = \frac{X}{K} \quad (2.1)$$

Keterangan:

\emptyset = tingkat daya dukung pangan

X = luas panen tanaman pangan per kapita, yaitu $\left(\frac{\text{Luas Panen (Ha)}}{\text{Jumlah Penduduk Jiwa}} \right)$

K = luas lahan untuk swasembada pangan, yaitu

$$\left(\frac{\text{Kebutuhan Fisik Minimum (KFM)}}{\text{Produksi Tanaman Pangan (Ha/tahun)}} \right)$$

Adapun nilai KFM adalah sebesar 2.600 kalori/kapita, atau setara dengan 265 kg beras/orang/tahun. Dari hasil perhitungan yang dilakukan, dapat diketahui klasifikasi suatu wilayah berdasarkan daya dukung pangannya, yaitu:

- Kelas I ($\emptyset > 2,466$), yaitu wilayah dengan swasembada pangan baik dan telah mampu memberikan kehidupan layak bagi penduduknya.
- Kelas II ($1 \leq \emptyset \leq 2,466$), yaitu wilayah dengan swasembada pangan baik, tetapi belum mampu memberikan kehidupan layak bagi penduduknya.
- Kelas III ($\emptyset < 1$), yaitu wilayah dengan swasembada pangan yang masih buruk.

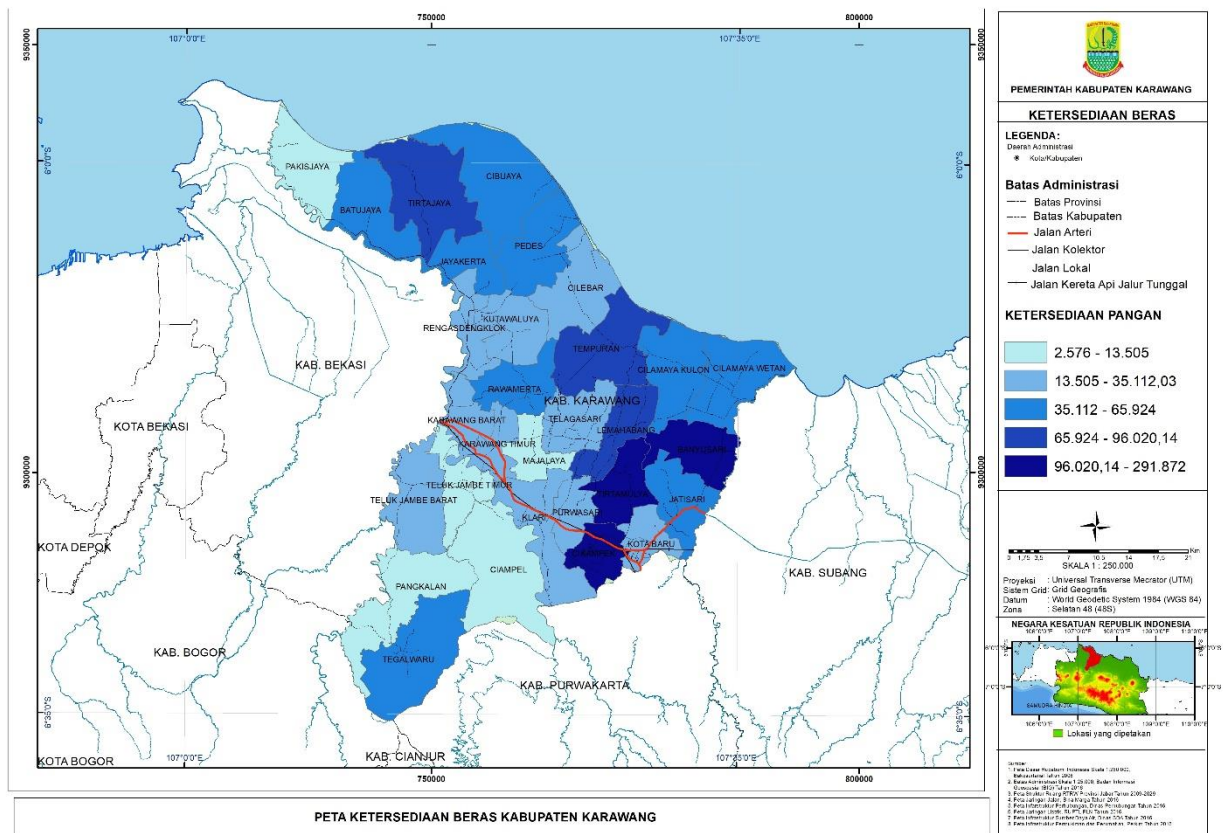
Dengan menggunakan persamaan 2.1, diperoleh data daya dukung pangan Kabupaten Karawang berdasarkan kecamatan sebagaimana tercantum dalam Tabel 2-4 dengan visualisasi spasial pada gambar Peta Ketersediaan Pangan dan gambar Peta Daya Dukung Pangan. Mengacu kepada data tersebut, dapat disimpulkan bahwa Provinsi Jawa Barat secara umum tergolong baik dalam hal swasembada pangan dan telah mampu memenuhi kebutuhan minimum penduduknya. Akan tetapi, masih terdapat sejumlah kabupaten/kota dengan nilai daya dukung pangan < 1, yaitu Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Cirebon, dan Kota Bekasi.

Tabel 2-4 Daya Dukung Pangan Kabupaten Karawang Berdasarkan Kecamatan

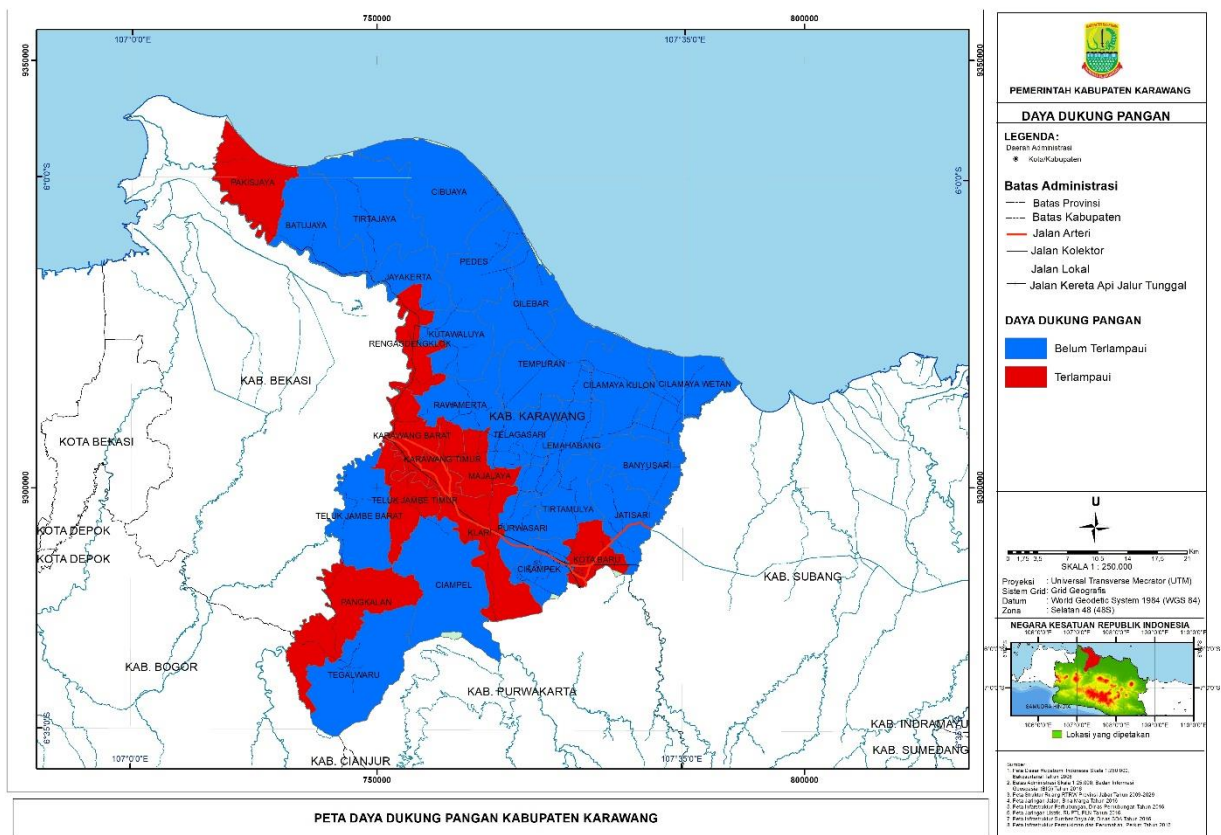
No	Kecamatan	Ketersediaan Beras (Ton/tahun)	Kebutuhan Beras (Ton/Tahun)		Daya Dukung Pangan		Keterangan
			2016	2021	2016	2021	
1	Pangkalan	9.787,06	10.077,95	10.564,23	0,97	0,93	Terlampai
2	Tegalwaru	27.176,60	9.765,25	10.236,95	2,78	2,65	Belum Terlampaui
3	Ciampel	13.505,00	11.250,58	11.796,48	1,20	1,14	Belum Terlampaui
4	Telukjambe Timur	8.191,00	36.197,15	37.944,82	0,23	0,22	Terlampai
5	Telukjambe Barat	22.420,00	13.953,31	14.627,74	1,61	1,53	Belum Terlampaui
6	Klari	22.627,43	44.416,92	46.567,39	0,51	0,49	Terlampai
7	Cikampek	291.872,00	30.599,82	32.078,52	9,54	9,10	Belum Terlampaui
8	Purwasari	19.395,00	18.092,88	18.968,70	1,07	1,02	Belum Terlampaui
9	Tirtamulya	166.243,00	12.659,32	13.271,47	13,13	12,53	Belum Terlampaui
10	Jatisari	47.295,99	20.587,85	21.585,58	2,30	2,19	Belum Terlampaui
11	Banyusari	175.476,93	14.585,87	15.290,77	12,03	11,48	Belum Terlampaui
12	Kotabaru	24.078,18	34.228,20	35.883,12	0,70	0,67	Terlampai
13	Cilamaya Wetan	48.739,50	21.534,17	22.574,29	2,26	2,16	Belum Terlampaui
14	Cilamaya Kulon	61.577,67	17.091,97	17.918,77	3,60	3,44	Belum Terlampaui
15	Lemahabang	83.123,16	17.372,08	18.212,13	4,78	4,56	Belum Terlampaui
16	Talagasari	50.946,40	17.201,15	18.031,93	2,96	2,83	Belum Terlampaui
17	Majalaya	2.576,00	12.584,85	13.193,03	0,20	0,20	Terlampai
18	Karawang Timur	17.598,91	33.736,36	35.364,78	0,52	0,50	Terlampai
19	Karawang Barat	26.772,00	44.453,49	46.606,61	0,60	0,57	Terlampai
20	Rawamerta	57.039,73	13.911,71	14.583,48	4,10	3,91	Belum Terlampaui
21	Tempuran	96.020,14	16.756,75	17.566,32	5,73	5,47	Belum Terlampaui
22	Kutawaluya	30.994,03	15.364,44	16.106,44	2,02	1,92	Belum Terlampaui
23	Rengasdengklok	29.364,20	29.877,43	31.321,68	0,98	0,94	Terlampai
24	Jayakarta	54.602,00	17.133,58	17.960,38	3,19	3,04	Belum Terlampaui
25	Pedes	45.808,00	20.061,83	21.031,73	2,28	2,18	Belum Terlampaui

No	Kecamatan	Ketersediaan Beras (Ton/tahun)	Kebutuhan Beras (Ton/Tahun)		Daya Dukung Pangan		Keterangan
			2016	2021	2016	2021	
							Terlampau
26	Cilebar	35.112,03	11.270,72	11.815,29	3,12	2,97	Belum Terlampaui
27	Cibuaya	61.823,00	13.913,03	14.586,13	4,44	4,24	Belum Terlampaui
28	Tirtajaya	76.279,00	17.704,12	18.558,75	4,31	4,11	Belum Terlampaui
29	Batujaya	65.924,00	21.542,91	22.585,69	3,06	2,92	Belum Terlampaui
30	Pakisjaya	5.524,45	10.455,58	10.961,73	0,53	0,50	Terlampau

Sumber : Hasil Analisis, 2019



Gambar 2-4 Peta Ketersediaan Pangan Kabupaten Karawang



Gambar 2-5 Peta Daya Dukung Pangan Kabupaten Karawang

2.3.3 Daya Dukung Fungsi Lahan

Daya dukung fungsi lindung (DDL) dilihat dari luas guna lahan yang memiliki fungsi lindung, koefisien lindung untuk guna lahan, dan luasan wilayah. Perhitungan daya dukung fungsi lindung dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$DDL = \frac{\sum Lgl_1 \cdot \alpha_1 + Lgl_2 \cdot \alpha_2 + Lgl_3 \cdot \alpha_3 + \dots + Lgl_n \cdot \alpha_n}{LW} \quad (2.2)$$

Keterangan:

DDL = daya dukung fungsi lindung

Lgl_n = luas guna lahan jenis n (Ha)

α_n = koefisien lindung untuk guna lahan n

LW = luasan wilayah (Ha)

Daya dukung fungsi lindung memiliki kisaran nilai antara 0 hingga 1. Jika nilainya semakin mendekati angka 1, maka semakin baik fungsi lindung yang ada di wilayah tersebut, demikian pula sebaliknya. Adapun tingkat kualitas daya dukung fungsi lindung dan koefisien lindung lahan berdasarkan jenis guna lahan adalah sebagai berikut.

Tabel 2-5 Tingkat kualitas daya dukung fungsi lindung

Tingkat Kualitas Daya Dukung Fungsi Lindung	Rentang Nilai DDL
Sangat rendah	0-0,2
Rendah	0,2-0,4
Sedang	0,4-0,6
Baik	0,6-0,8
Sangat Baik	0,8-1

Sumber : Pedoman Daya Dukung dan Daya Tampung LH, KLH 2014

Tabel 2-6 Koefisien lindung lahan Berdasarkan Jenis Guna Lahan

Jenis Tata Guna Lahan	Koefisien Lindung
Cagar alam	1,00
Suaka margasatwa	1,00
Taman wisata	1,00
Taman buru	0,82
Hutan Lindung	1,00
Hutan Cadangan	0,61
Hutan Produksi	0,68
Perkebunan besar	0,54
Perkebunan rakyat	0,42
Persawahan	0,46
Ladang/tegalan	0,21
Padang rumput	0,28
Danau/tambak	0,98
Tanaman kayu	0,37
Permukiman	0,18
Tanah kosong	0,01

Sumber : Pedoman Penentuan Daya Dukung dan Daya Tampung LH, KLH 2014

Dalam perhitungan daya dukung fungsi lahan, seluruh penggunaan lahan memiliki fungsi lindung dengan koefisien yang berbeda. Berikut hasil perhitungan luas guna lahan fungsi lindung Kabupaten Karawang dengan data yang diperoleh dari Peta Guna Lahan Kabupaten Karawang Tahun 2015.

Tabel 2-7 Daya Dukung Lahan Lindung Kabupaten Karawang

No	Guna lahan	Luas (Ha)	Koefesien	Luas Lahan/ Lgl (Ha)
1	Kawasan Lindung	3026,50	1,00	3026,50
2	Kawasan Perikanan	17828,18	0,48	8557,53
3	Kawasan Perlindungan Setempat	605,64	1,00	605,64
4	Kawasan Pertanian Lahan Basah	109343,03	0,46	50297,79
5	Kawasan Pertanian Lahan Kering	29668,00	0,46	13647,28
6	Kawasan peruntukan lainnya	21,34	0,48	10,24

No	Guna lahan	Luas (Ha)	Koefesien	Luas Lahan/ Lgl (Ha)
7	Kawasan Peternakan	11,08	0,46	5,10
8	Kawasan Wisata	64,33	1,00	64,33
9	Sungai	1793,02	1,00	1793,02
Total		162.361,12		78.007,43

Sumber : Hasil Analisis, 2018

Berdasarkan Tabel 2-7, dapat dihitung nilai DDL Kabupaten Karawang sebagai berikut.

$$DDL = \frac{78.007,43}{162.361,12} = 0,48$$

Dari hasil perhitungan diatas didapatkan nilai DDL Kabupaten Karawang sebesar 0,48 atau masuk kedalam kategori sedang.

2.3.4 Daya Dukung Lahan Terbangun

Daya dukung lahan terbangun (DDLb) ditinjau dari koefisien luas lahan terbangun, luas wilayah, dan luas lahan terbangun. Nilai daya dukung lahan terbangun dapat dihitung menggunakan persamaan berikut.

$$DDLb = \frac{\alpha \times LW}{LTb} \quad (2.3)$$

Dimana,

$$LTb = LB + LTp \quad (2.4)$$

Keterangan:

DDLb = Daya dukung lahan terbangun

LW = Luas wilayah (Ha)

α = Koefisien luas lahan terbangun maksimal yaitu 70% untuk lahan perkotaan sesuai UU Penataan Ruang No. 26 Tahun 2007 sehingga 30% wajib digunakan untuk RTH, sedangkan untuk pedesaan menggunakan asumsi 50% (untuk kepentingan lahan pertanian dan fungsi lindung)

LTb = Luas lahan terbangun (Ha)

LB = Luas lahan bangunan (Ha)

LTp = Luas lahan untuk infrastruktur seperti jalan, sungai, drainase, dan lainnya (Ha), dapat diasumsikan 20% dari luas bangunan

Hasil perhitungan:

DDLB < 1 = Daya dukung lahan permukiman terlampaui atau buruk

DDLB 1-3 = Daya dukung lahan permukiman bersyarat atau sedang

DDLB >3 = Daya dukung lahan permukiman baik

Berdasarkan data tutupan lahan tahun 2015, luas terbangun di Kabupaten Karawang pada tahun 2015 adalah 28.410,00 hektar. Diasumsikan luas lahan untuk infrastruktur adalah 20% dari luas bangunan maka luasnya adalah 5.682 Ha dan rata-rata koefisien lahan terbangun adalah 60% (rata-rata perkotaan dan pedesaan), maka perhitungan daya dukung lahan terbangun adalah sebagai berikut.

$$DDLB = \frac{60\% \times 190.997,07}{28.410 + 5.682} = 3,36$$

DDLB Kabupaten Karawang secara keseluruhan 3,36 yang termasuk dalam daya dukung lahan bangunan baik. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Karawang masih memiliki daya tampung bangunan yang relatif cukup untuk pengembangan pembangunan. Meskipun demikian, pengembangan pembangunan harus tetap memperhatikan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan lainnya.

2.3.5 Daya Tampung Lahan

Analisis daya tampung dilakukan untuk menghitung jumlah kegiatan dan penduduk yang dapat diakomodasi oleh suatu wilayah. Semakin berkembang pertumbuhan penduduk di suatu wilayah, semakin banyak pula lahan yang diperlukan untuk mendukung kehidupan penduduk, misalnya untuk keperluan pemukiman. Dalam menganalisa daya tampung suatu wilayah, sesuai dengan Modul Terapan PU Nomor 20 Tahun 2007, diasumsikan bahwa setiap penduduk harus memiliki ruang untuk melakukan aktivitasnya sebesar 100 m²/jiwa atau 0,01 Ha/jiwa dan untuk perumahan diasumsikan setiap rumah dihuni oleh 5 jiwa. Selanjutnya, daya tampung dihitung dengan menggunakan persamaan berikut.

$$\text{Daya Tampung} = \frac{\text{Luas Wilayah Permukiman}}{0,01} \times 100 \quad (2.5)$$

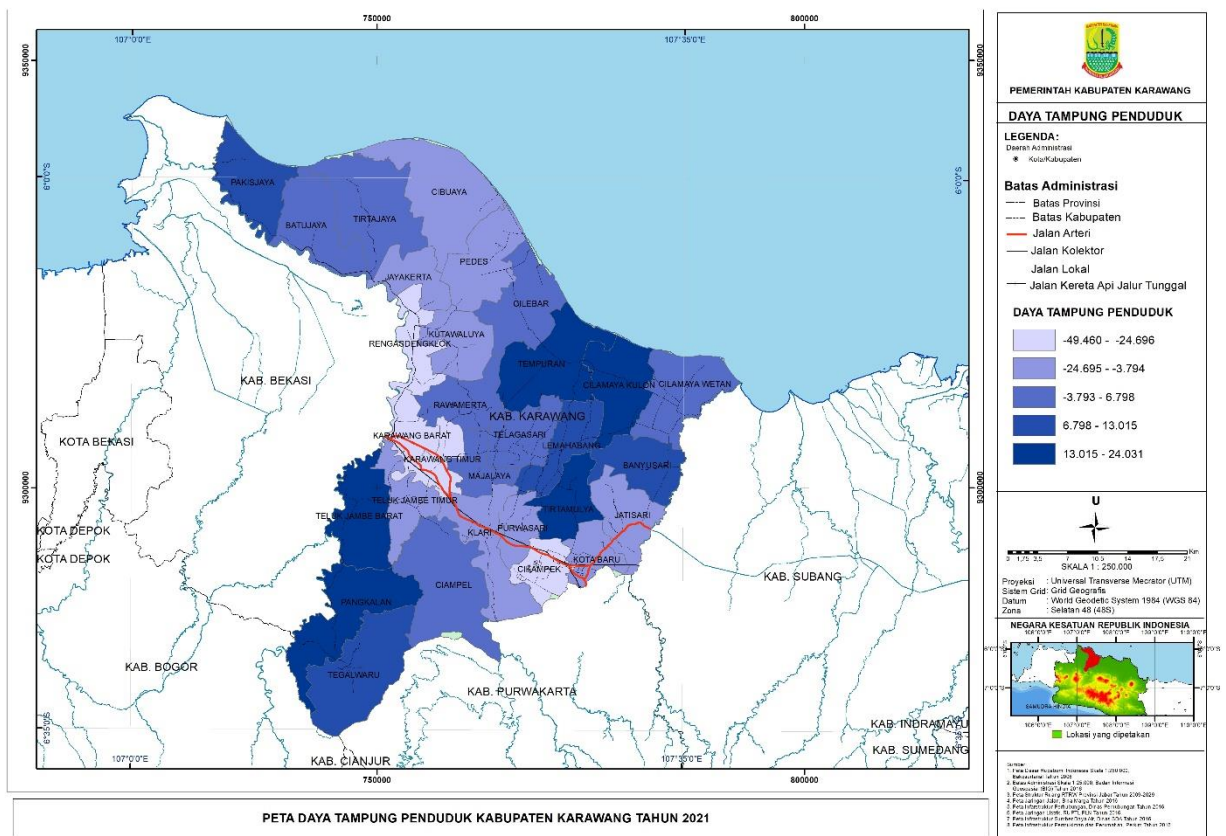
Jumlah penduduk Kabupaten Karawang pada tahun 2016 adalah sebesar 2.295.778 jiwa (BPS Kabupaten Karawang, 2018) dan diproyeksikan akan mencapai 2.406.773 jiwa pada tahun 2021. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan persamaan 2.5, diketahui bahwa nilai daya tampungnya adalah sebesar 2.365.665 jiwa. Jika dilakukan komparasi antara nilai daya tampung tersebut dengan jumlah penduduk Kabupaten Karawang, dapat disimpulkan bahwa luas lahan yang tersedia di Kabupaten Karawang pada tahun 2024 tidak dapat menampung penduduk Kabupaten Karawang. Terdapat beberapa kecamatan yang pada tahun 2024 luas lahan permukiman tidak dapat menampung aktifitas penduduk yaitu Kecamatan Telukjambe Timur, Klari, Purwasari, Jatisari, Kota Baru, Karawang Timur, Karawang Barat, Rengasdengklok, Rawamerta, Kutawaluya, Jayakarta, Pedes dan Cibuaya. Daya tampung penduduk berdasarkan kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 2-8.

Tabel 2-8 Daya Tampung Penduduk Kabupaten Karawang berdasarkan kecamatan

Kecamatan	Jumlah Penduduk		Luas Lahan Permukiman (Ha)	DT (KK)	GAP	
	2016	2021			2016	2021
Pangkalan	38.030	39.865	638,96	63.896	25.866	24.031
Tegalwaru	36.850	38.630	432,26	43.226	6.376	4.596
Ciampel	42.455	44.515	504,3	50.430	7.975	5.915
Telukjambe Timur	136.593	143.188	1316,73	131.673	-4920	-11.515
Telukjambe Barat	52.654	55.199	743,92	74.392	21.738	19.193
Klari	167.611	175.726	1.679,11	167.911	300	-7.815
Cikampek	115.471	121.051	963,55	96.355	-19.116	-24.696
Purwasari	68.275	71.580	677,86	67.786	-489	-3.794
Tirtamulya	47.771	50.081	723,7	72.370	24.599	22.289
Jatisari	77.690	81.455	742,34	74.234	-3.456	-7.221
Banyusari	55.041	57.701	658,25	65.825	10.784	8.124
Kotabaru	129.163	135.408	1.163,36	116.336	-12.827	-19.072
Cilamaya Wetan	81.261	85.186	899,39	89.939	8.678	4.753
Cilamaya Kulon	64.498	67.618	840,76	84.076	19.578	16.458
Lemahabang	65.555	68.725	792,85	79.285	13.730	10.560
Talagasari	64.910	68.045	776,45	77.645	12.735	9.600
Majalaya	47.490	49.785	554,77	55.477	7.987	5.692
Karawang Timur	127.307	133.452	1.021,01	102.101	-25.206	-31.351
Karawang Barat	167.749	175.874	1.264,14	126.414	-41.335	-49.460

Kecamatan	Jumlah Penduduk		Luas Lahan Permukiman (Ha)	DT (KK)	GAP	
	2016	2021			2016	2021
Rawamerta	52.497	55.032	537,7	53.770	1.273	-1.262
Tempuran	63.233	66.288	868,76	86.876	23.643	20.588
Kutawaluya	57.979	60.779	502,9	50.290	-7.689	-10.489
Rengasdengklok	112.745	118.195	905,5	90.550	-22.195	-27.645
Jayakarta	64.655	67.775	557,43	55.743	-8.912	-12.032
Pedes	75.705	79.365	688,46	68.846	-6.859	-10.519
Cilebar	42.531	44.586	510,5	51.050	8.519	6.464
Cibuaya	52.502	55.042	482,52	48.252	-4.250	-6.790
Tirtajaya	66.808	70.033	768,31	76.831	10.023	6.798
Batujaya	81.294	85.229	897,06	89.706	8.412	4.477
Pakisjaya	39.455	41.365	543,8	54.380	14.925	13.015
Kab. Karawang	2.295.778	2.406.773	23.656,65	2.365.665	69.887	-4.1108

Sumber : Hasil Analisis, 2019



Gambar 2-6 Daya Tampung Penduduk Kabupaten Karawang

2.4. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.4.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita, indeks gini, pemerataan pendapatan versi Bank

Dunia, Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional), persentase penduduk di atas garis kemiskinan, dan angka kriminalitas yang tertangani.

a. Pertumbuhan PDRB

Tabel 2.9
 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB
 Tahun 2011 s.d 2105 atas Dasar Harga Berlaku (%)
 Kabupaten Karawang

No.	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015*
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,44	4,22	4,38	4,16	4,05
2.	Pertambangan dan Penggalian	4,92	3,95	3,36	2,96	2,56
3.	Industri Pengolahan	69,18	70,20	70,75	70,99	71,82
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,90	0,99	0,97	1,09	1,07
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05
6.	Konstruksi	3,13	3,29	3,21	3,57	3,81
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,34	10,16	10,28	10,02	9,59
8.	Transportasi dan Pergudangan	1,60	1,60	1,49	1,54	1,64
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,85	0,86	0,83	0,83	0,80
10.	Informasi dan Komunikasi	0,78	0,76	0,73	0,78	0,74
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,99	0,97	1,02	1,04	1,00
12.	Real Estate	0,23	0,22	0,21	0,20	0,20
13.	Jasa Perusahaan	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,07	1,11	1,04	1,06	1,01
15.	Jasa Pendidikan	0,54	0,62	0,69	0,74	0,72
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,26	0,25	0,23	0,24	0,23
17.	Jasa lainnya	0,70	0,72	0,73	0,70	0,67
	PDRB DENGAN MIGAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Karawang, PDRB Menurut Lapangan Usaha

Keterangan : *) = angka sementara

Kontribusi/pangsa sektor primer atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 relatif terus menurun, yaitu dari 7,11% pada tahun 2014 menjadi 6,62%. Sedangkan di sektor sekunder justru terjadi peningkatan pangsa ekonomi yang signifikan, dari 75,71% di tahun 2014 menjadi 76,75% pada tahun 2015. Untuk pangsa ekonomi sektor tersier, relatif bergerak stabil dengan

kecenderungan sedikit menurun, yaitu dari 17,17% pada tahun 2014, menjadi 16,63% pada tahun 2015. Distribusi persentase PDRB secara sektoral menunjukkan peranan masing-masing sektor dalam pembentukan PDRB secara keseluruhan. Semakin besar persentase suatu sektor maka semakin besar pula pengaruh sektor tersebut dalam perkembangan ekonomi. Kontribusi sektor sekunder yang relatif terus membesar memperlihatkan bahwa Kabupaten Karawang telah berkembang menjadi salah satu daerah basis industri utama di Jawa Barat, sekaligus menjadi salah satu daerah yang mampu bertahan sebagai lumbung padi Nasional ditengah berbagai kemajuan ekonomi di sektor sekunder dan tersier perdagangan dan jasa.

Analisis sektor menunjukkan bahwa peranan sektor industri pengolahan pada tahun 2015 tetap merupakan sektor terunggul dan terbesar kontribusinya dalam pembentukan PDRB Kabupaten Karawang, yaitu sebesar 70,99%. Disusul kemudian oleh sektor (perdagangan dan pertanian), yang masing-masing menyumbang sebesar 10,02% dan 4,16%. Sedangkan 2 sektor penyumbang terkecil dalam pembentukan PDRB Kabupaten Karawang tahun 2015 adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dan sektor Jasa Perusahaan.

Tabel 2.10
Peranan PDRB Kab. Karawang
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut Lapangan Usaha
Tahun 2011-2015 (juta rupiah/persen)

No.	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015*
1.	Primer (Pertanian dan Pertambangan)	10.594.579,1 (9,36%)	10.145.883,2 (8,16%)	10.907.477,2 (7,75%)	11.028.418,3 (7,11%)	11.055.714,7 (6,62%)
2.	Sekunder (Industri, Listrik, Air dan Bangunan)	82.924.172,4 (73,27%)	92.622.864,8 (74,53%)	105.591.909,1 (74,99%)	117.397.909,2 (75,71%)	128.210.984,6 (76,75%)
3.	Tersier (Perdagangan, Angkutan dan Komunikasi dan Jasa)	19.662.061,7 (17,37%)	21.507.791,2 (17,31%)	24.316.666,9 (17,27%)	26.641.810,4 (17,17%)	27.786.007,4 (16,63%)
	PDRB	113.180.813,2 (100%)	124.276.539,3 (100,00%)	140.816.053,3 (100,00%)	155.068.137,9 (100,00%)	167.052.706,7 (100,00%)

Sumber: BPS Kabupaten Karawang, Keterangan : *) = angka sementara

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah Indikator ekonomi yang paling sering digunakan untuk menggambarkan perekonomian suatu daerah PDRB Kabupaten Karawang Tahun 2015 atas dasar harga berlaku adalah sebesar Rp 167,05 trilyun, sedangkan atas dasar harga konstan sebesar Rp. 131,2 trilyun. Mengalami kenaikan bila dibandingkan tahun 2014 dimana PDRB atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 155,07 trilyun dan PDRB atas dasar harga konstan sebesar Rp. 125,42 trilyun.

Struktur perekonomian suatu wilayah dapat menggambarkan sektor-sektor yang menjadi mesin pertumbuhan ekonomi daerah (*engine growth*). Di Kabupaten Karawang yang menjadi motor penggerak utama pertumbuhan adalah sektor industri pengolahan, hal tersebut terbukti dari peranan sektor industri yang mendominasi perekonomian di Kabupaten Karawang dari tahun ke tahun.

b. Laju Inflasi

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) merupakan indikator makro ekonomi yang diturunkan dari PDRB atas dasar harga konstan. Dengan memperhatikan LPE dan sektor-sektor yang membentuk PDRB, dapat diketahui sektor atau lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan yang cepat dalam suatu perekonomian daerah. Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kabupaten Karawang tahun 2015 dengan memperhitungkan kontribusi sektor migas diperkirakan mencapai angka 4,62% dengan tingkat inflasi tingkat produsen sebesar 2,97%.

Tabel 2.11
Angka Agregatif PDRB Kabupaten Karawang, PDRB Perkapita,
LPE Sektor Migas, Tingkat Inflasi
Tahun 2011-2015

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015*
1.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp)	113.180.813,2	124.276.539,3	140.816.053,3	155.068.137,9	167.052.706,7
2.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rp)	106.174.675,8	111.424.083,5	119.484.231,0	125.415.445,9	131.207.042,8

3.	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (Rp)	52.102.097,48	56.504.900,57	63.277.221,63	68.915.496,89	73.475.655,2
4.	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan (Rp)	48.876.864,8	50.661.265,58	53.691.535,8	55.737.225,53	57.709.471,63
5.	LPE Migas (%)	6,56%	4,94%	7,23%	4,96%	4,62%
6.	Inflasi (%)	6,60%	4,63%	5,67%	4,91%	2,97%

Sumber : BPS Kabupaten Karawang
Keterangan : *) = angka sementara

Bila dicermati secara lebih detail, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karawang pada tahun 2015 hanya sedikit melambat dibandingkan keadaan tahun 2014, dengan seluruh sektor bertumbuh positif. Hal yang menggembirakan adalah terus bertumbuhnya sektor industri pengolahan di kisaran 4,41% di tahun 2015 atau hanya sedikit melambat dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 4,55% sebagai akibat melemahnya perekonomian nasional maupun global. Sedangkan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan justru meraih pertumbuhan 1,74% di tahun 2015 jauh meningkat dibandingkan tahun 2014 yang hanya mencapai 0,41%.

Sektor yang mampu bertumbuh lebih dari 2 (dua) digit di tahun 2015 adalah sektor Informasi dan Komunikasi yang mencapai 17,27%, sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 13,50% dan sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,19%. Sementara itu, sektor Jasa Perusahaan dan sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang masing-masing bertumbuh 7,78% dan 7,74%, diikuti sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum bertumbuh 6,99%, dan sektor Konstruksi 6,33%. Sektor yang bertumbuh paling kecil adalah Pertambangan dan Penggalan, yaitu sebesar 1,23%.

Tabel 2.12
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karawang
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2015 (Persen)

No.	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015*
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,66	-4,22	4,07	0,41	1,74
2.	Pertambangan dan Penggalian	-8,14	-19,46	3,17	2,03	1,23
3.	Industri Pengolahan	8,51	6,79	7,59	4,55	4,41
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	-2,66	5,09	3,90	6,04	4,75
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,16	6,00	10,45	3,54	7,74
6.	Konstruksi	5,35	10,38	6,03	14,58	6,33
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,24	2,85	8,45	4,33	4,06
8.	Transportasi dan Pergudangan	2,06	7,23	2,63	8,39	10,19
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,18	7,91	8,09	6,38	6,99
10.	Informasi dan Komunikasi	10,56	3,56	9,38	18,06	17,27
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,87	3,88	10,79	9,17	6,14
12.	Real Estate	11,07	5,94	8,44	3,90	5,94
13.	Jasa Perusahaan	2,93	7,41	5,13	4,33	7,78
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-1,59	3,92	-1,13	2,51	4,77
15.	Jasa Pendidikan	11,03	15,71	14,83	17,63	9,96
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,71	2,99	2,88	8,65	13,50
17.	Jasa lainnya	9,17	10,15	7,49	6,07	7,98
	LPE DENGAN MIGAS	6,56	4,94	7,23	4,96	4,62
	LPE TANPA MIGAS	7,28	5,96	7,36	5,05	5,01

Sumber : BPS Kabupaten Karawang

Keterangan : *) = angka sementara

Indikator yang dipakai untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro adalah pendapatan perkapita (*percapita income*). Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk disuatu wilayah maka tingkat kemakmuran di wilayah yang bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan besarnya nilai tambah domestik bruto perpenduduk secara nominal, sedangkan PDRB perkapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui nilai tambah nyata serta pertumbuhan nyata perkapita. Angka tersebut diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

PDRB perkapita Kabupaten Karawang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dari jumlah penduduk sebanyak 2.2.059.742 jiwa pada tahun 2015, PDRB perkapita berlaku Kabupaten Karawang sebesar Rp. 73.475.655,00 hal tersebut menunjukkan terjadinya peningkatan sebesar 6,62% dibandingkan dengan PDRB perkapita di tahun 2014 yang berada pada nilai Rp. 68.915.496,00.

Tabel 2.13
Perkembangan dan Nilai Pendapatan Perkapita
Kabupaten Karawang Tahun 2008-2015

Tahun	Pendapatan perkapita ADHB	Perubahan ADHB(%)	Pendapatan perkapita ADHK	Perubahan ADHK(%)
2011	52.102.097,48	12,12%	48.876.864,80	5,18%
2012	56.504.900,57	8,45%	50.661.265,58	3,65%
2013	63.277.221,63	11,99%	53.691.535,80	5,98%
2014	68.915.496,89	8,91%	55.737.225,53	3,81%
2015*	73.475.655,23	6,62%	57.709.471,63	3,54%

Sumber : BPS Kabupaten Karawang
Keterangan : *) = angka sementara

Kendati demikian peningkatan PDRB perkapita tersebut masih belum menggambarkan secara riil kenaikan daya beli masyarakat Kabupaten Karawang secara umum, walaupun indeks daya beli menunjukkan peningkatan, karena PDRB perkapita yang dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku masih mengandung faktor inflasi yang berpengaruh terhadap daya beli masyarakat, terutama masyarakat yang berada pada tingkat menengah ke bawah.

2.4.2.Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial di Kabupaten Karawang dilakukan terhadap indikator Angka Harapan Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni, Angka Pendidikan yang Ditamatkan, Angka Kelangsungan Hidup Bayi, Angka Usia Harapan Hidup, Persentase Penduduk Miskin, dan Rasio Penduduk yang bekerja :

a. Angka Harapan Lama Sekolah

Tabel. 2.14
EYS dan MYS Tahun 2011-2015

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015*
EYS (tahun)	10,92	11,08	11,31	11,64	11,67
MYS/RLS (tahun)	6,23	6,52	6,73	6,78	7,09

Sumber: BPS Kabupaten Karawang, IPM Metode Baru

*)= angka sementara

Semenjak tahun 2015, penghitungan IPM di Indonesia mengalami perubahan metodologi, dengan beberapa keunggulan dibandingkan IPM metode lama, yaitu mampu digunakan sebagai indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif). Beberapa komponen IPM berubah, diantaranya angka melek huruf pada metode lama diganti dengan angka harapan lama sekolah (*expected years of schooling/EYS*) dan metode agregasi IPM diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik.

Di bidang pendidikan, capaian rata-rata lama sekolah (RLS) Kabupaten Karawang masih jauh tertinggal dibandingkan dengan rata-rata Jawa Barat, walaupun selama 5 (lima) tahun terakhir telah mampu mempersempit jarak kesenjangannya. Begitu pula, pada capaian angka harapan lama sekolah Kabupaten Karawang kecenderungan lajunya tidak secepat rata-rata Jawa Barat, bahkan semakin tertinggal. Jika di tahun 2010, angka harapan lama sekolah Kabupaten Karawang yang sebesar 10,76 tahun sedikit lebih unggul dibandingkan rata-rata Jawa Barat yang hanya mencapai 10,69 tahun. Saat ini (2015), angka harapan lama sekolah Kabupaten Karawang justru menunjukkan laju yang melambat sehingga hanya mencapai 11,64 tahun di tahun 2014, tertinggal jauh dibandingkan rata-rata Jawa Barat yang telah mencapai 12,08 tahun.

b. Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih

menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah, sehingga naiknya persentase jumlah murid cenderung diartikan semakin meningkatnya partisipasi sekolah.

Akan tetapi kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan bertambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah, sehingga angka partisipasi sekolah bisa tidak berubah atau menurun.

Tabel. 2.15
Perkembangan Angka Partisipasi Pendidikan
Tahun 2011-2015

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
APK SD/Sederajat	108,89	108,8	107,34	107,73	107,24*
APM SD/Sederajat	96,86	96,8	95,84	97,06	96,02*
APK SLTP/Sederajat	90,62	94,96	95,61	98,80	96,72*
APM SLTP/Sederajat	66,09	65,98	65,79	73,80	69,81*

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang. *=angka sementara

Ditinjau dari keberlanjutan bersekolah, total angka putus sekolah untuk tingkat SD dan SLTP selama periode tahun 2012 adalah sebesar 563 orang. Dari gambaran tersebut dapat disimpulkan bahwa angka putus sekolah tingkat SD dan SLTP pada tahun 2012 bila dibandingkan dengan tahun 2011 mengalami penurunan dan total angka putus sekolah pada tahun 2013 adalah 560 orang. Angka putus sekolah tahun 2014 sebanyak 416 orang. Sedangkan angka putus sekolah pada tahun 2015 sebanyak 497.

Pencapaian APK dan APM SLTA sederajat pada tahun 2011-2015 lebih jelas disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel. 2.16
Perkembangan Angka Partisipasi Pendidikan
Tahun 2011 s.d. 2015

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
APK SLTA Sederajat (%)	56,51	62,84	63,79	66,74	68,36
APM SLTA Sederajat (%)	38,31	42,36	45,44	50,28	53,13

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang

Ditinjau dari keberlanjutan bersekolah, total angka putus sekolah untuk tingkat SLTA selama periode 2011 dan 2012 adalah sebesar 508 orang menjadi 463 orang. Dari gambaran tersebut dapat disimpulkan bahwa angka putus sekolah tingkat SLTA pada tahun 2012 bila dibandingkan dengan tahun 2011 mengalami penurunan. Sedangkan total angka putus sekolah di tingkat SLTA pada periode 2013 adalah 458 orang, tahun 2014 sebanyak 392 orang dan tahun 2015 sebanyak 477 orang.

c. Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Persentase Angka putus sekolah pada jenjang pendidikan SD dan SLTP pada tahun 2011 sampai dengan 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.17
Persentase Angka Putus Sekolah Tingkat SD dan SLTP
Tahun 2011-2015

No.	Jenjang Sekolah	2011	2012	2013	2014	2015
1	SD/MI	0,2%	0,1%	0,09%	0,01%	0,01%
2	SMP/MTs	0,4%	0,3%	0,4%	0,2%	0,32%

Sumber: *Disdikpora Kabupaten Karawang*

Dengan semakin berkurangnya presentase angka putus sekolah menunjukkan upaya untuk mewujudkan wajib belajar sembilan tahun semakin baik dan terus diupayakannya peningkatan pelayanan pendidikan di berbagai pelosok Kabupaten Karawang.

Tabel 2.10 menggambarkan hasil persentase kelulusan pada jenjang SD dan SLTP yang melanjutkan sekolahnya. Semakin meningkatnya presentase kelulusan di jenjang pendidikan SD dan SLTP menggambarkan proses pembelajaran yang semakin baik dalam mempersiapkan anak didik dalam menghadapi ujian. Adapun presentase kelulusan di Sekolah Dasar sebaiknya memiliki angka kelulusan yang sama atau mendekati dengan angka kelulusan di SLTP tiga tahun berikutnya dengan asumsi bahwa lulusan SD melanjutkan ke SLTP. Tahun 2011 untuk SD angka kelulusan sebesar 96.60%, dan kelulusan di SLTP tahun 2013 sebesar 72,8% terdapat selisih 23.8%. Apakah dengan selisih angka tersebut ada lulusan SD yang tidak

melanjutkan, pindah ke luar kabupaten atau mereka yang sekolah adalah penduduk di luar Kabupaten Karawang. Untuk data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.18

Persentase Lulusan SD dan SLTP yang Melanjutkan Sekolahnya Tahun 2011-2015

No.	Jenjang Sekolah	2011	2012	2013	2014	2015
1.	SD/MI	96,60%	96,75%	97,72%	98,64%	97,72%
2.	SMP/MTs	67,58%	72,80%	75,58%	80,62%	86,09%

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang

Tabel 2.19

Jumlah Peserta Ujian Tahun 2010/2011-2015/2016

No.	Jenjang Sekolah	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015
1	SD/MI	38.703	44.343	44.692	40.698
2	SMP/MTs	33.097	33.150	34.252	33.983

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang

Tabel 2.20 dan Tabel 2.21 menggambarkan Angka Lulus Sekolah dan Persentase Kelulusan Ujian pada jenjang SD dan SLTP di Kabupaten Karawang pada tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.20

Angka Lulus Sekolah Tahun 2010/2011 s.d 2015/2016

No.	Jenjang Sekolah	2011	2012	2013	2014	2015
1	SD/MI	38.703	44.343	44.692	40.698	39.524
2	SMP/MTs	33.097	33.150	34.252	33.983	37.023

Sumber : Disdikpora Kabupaten Karawang

Tabel 2.21

Persentase Kelulusan Ujian Tahun 2010/2011 s.d 2015/2016

No.	Jenjang Sekolah	2011	2012	2013	2014	2015
1	SD/MI	100%	100%	100%	100%	100%
2	SMP/MTs	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang

Dalam rangka meningkatkan daya tampung sekolah dan sarana prasarana sekolah telah diupayakan melalui pembangunan unit sekolah, rehabilitasi ruang kelas, ruang laboratorium dan perpustakaan untuk SD/MI dan SMP/MTs dengan sumber dana yang berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN (DAK), Dana Dekonsentrasi dan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Tabel 2.22 menggambarkan hasil persentase lulusan pada jenjang SLTA Sederajat yang melanjutkan sekolahnya. Angka kelulusan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.22
Persentase Lulusan SLTA Sederajat
yang Melanjutkan Sekolahnya Tahun 2011 – 2015

No.	Jenjang Sekolah	2011	2012	2013	2014	2015
1	SLTA Sederajat	69,42%	80,89%	82%	82%	83%

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang

Tabel 2.23, 2.24, dan 2.25 menggambarkan hasil persentase kelulusan jenjang pendidikan menengah di Kabupaten Karawang pada tahun 2010/2011 sampai dengan 2014/2015. Angka kelulusan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.23
Jumlah Peserta Ujian Tahun 2010/2011s.d. 2014/2015

No.	Jenjang Sekolah	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015
1	SMA/SMK/MA	17.096	19.308	20.414	21.020	23.780

Sumber: Disdikpora Kaupaten Karawang

Tabel 2.24
Angka Lulus Sekolah Tahun 2010/2011s.d. 2014/2015

No.	Jenjang Sekolah	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015
1	SMA/SMK/MA	17.096	19.308	20.414	21.020	23.780

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang

Tabel 2.25
Persentase Kelulusan Ujian Tahun 2010/2011s.d. 2014/2015

No	Jenjang Sekolah	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015
1	SMA/SMK/MA	99,98%	99,98%	99,99%	100%	100%

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang

Tabel 2.26
Persentase Peserta Didik Jenjang SLTA yang Putus Sekolah
Tahun 2011-2015

No	Jenjang Sekolah	2011	2012	2013	2014	2015
1	SMA/SMK/MA	0,87%	0,7%	0,63%	0,47%	0,5%

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang

Dalam rangka meningkatkan daya tampung sekolah dan sarana prasarana penunjang telah diupayakan melalui pembangunan unit sekolah dan rehabilitasi ruang kelas, ruang laboratorium, perpustakaan maupun ruang praktek sekolah untuk SMA/SMK/MA, dengan sumber dana yang berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN (DAK), Dana Dekonsentrasi dan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

d. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Tabel 2.27
Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Tahun 2012-2015

No	Uraian	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
1	Kasus Kematian Bayi	225	187	170	189
2	Kasus Kematian Ibu	55	64	59	68
3	Persentase Ibu hamil resiko tinggi yang tertangani (%)	83,13	82,45	44,15	47,91
4	Persentase komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	76,85	75,56	70,33	80,02
5	Persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	88,44	91,54	87,12	90,57
6	Persentase pelayanan Ibu Nifas (%)	87,13	90,84	85,90	91,35
7	Persentase neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)	67,07	73,74	47,01	55,96
8	Persentase KN1 (Kunjungan Neonatal 1) (%)	93,45	96,46	91,55	95,74
9	Persentase kunjungan bayi (%)	82,89	89,91	91,77	97,66
10	Persentase pelayanan kesehatan anak balita (%)	71,43	79,16	82,16	80,03
11	Jumlah puskesmas rawat inap yang mampu melaksanakan Poned (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar)	10	28	28	12
12	Jumlah RS di Kabupaten Karawang yang melaksanakan Ponek (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif)	1	1	1	1

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang

Tabel 2.28
Penyebab Kematian Bayi di Kabupaten Karawang
Tahun 2011-2014

No	Penyebab	2011	2012	2013	2014	2015
1	BBLR	56	83	74	63	64
2	Tetanus Neonatorum	2	2	1	0	0
3	Infeksi	9	3	3	6	8
4	Penyebab lain	19	16	15	19	23
5	Asfiksia	53	55	47	41	47
6	Kelainan Kongenital	32	37	20	21	18
7	Diare	4	4	3	2	3
8	Bronchopneumoni	4	6	5	6	6
9	Kelainan Saluran Cerna	0	0	1	1	0

10	Kelainan Syaraf	0	0	0	1	0
11	Lain-lain	13	19	18	10	20
	Jumlah	192	225	187	170	189

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang

e. Angka Usia Harapan Hidup

Secara rinci komponen IPM berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.29
Angka Harapan Hidup Tahun 2011-2015

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015*
AHH (tahun)	71,38	71,41	71,44	71,45	71,50

Sumber: BPS Kabupaten Karawang, IPM Metode Baru *)= angka sementara

Derajat kesehatan masyarakat Karawang terus membaik seiring meningkatnya angka harapan hidup (AHH) selama periode 2011-2015. Data BPS menunjukkan capaian AHH-nya sebesar 71,38 tahun pada 2011, terus membaik menjadi 71,41 tahun di 2012 dan 71,44 pada tahun 2013, sedangkan capaian pada tahun 2015 sebesar 71,50 tahun. Derajat kesehatan yang cukup tinggi ini menyebabkan peningkatannya relatif melambat setiap tahunnya, walaupun demikian tantangan besar yang masih dihadapi di masa-masa mendatang adalah mendorong perbaikan sanitasi dasar yang menyeluruh di wilayah Kabupaten Karawang.

f. Persentase Penduduk Miskin

BPS mendefinisikan bahwa Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah Garis Kemiskinan.

Sedangkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Karawang dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Tabel 2.30
Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2011-2014

Uraian	2011	2012*)	2013*)	2014*)
Persentase Penduduk Miskin	11,80%	11,10%	10,82%	10,15%
Garis Kemiskinan (Rp)/bulan	288.001	311.123		344.477
Jumlah Penduduk Miskin	256.700	244.100	240.786	228.993

Sumber : BPS Kab. Karawang

g. Rasio Penduduk yang bekerja

Di era pasar global, industri di Kabupaten Karawang menjadi salah satu sektor andalan, yang tentunya mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karawang. Pasar global juga akan mengalirkan tenaga kerja dari luar Kabupaten Karawang ke wilayah Kabupaten Karawang, dan memunculkan satu fenomena baru terjadinya persaingan ketat memperebutkan pasar kerja yang jumlahnya terbatas. Oleh karena itu perlu disadari bahwa investasi substansial dan berkelanjutan dalam upaya pembangunan manusia, merupakan jalan utama meningkatkan kualitas dan produktivitas SDM. Kualitas penduduk yang tinggi diantaranya akan meningkatkan daya saing tenaga kerja Kabupaten Karawang dengan tenaga kerja pendatang, maupun meningkatkan daya tawar tenaga kerja Kabupaten Karawang di pasar global.

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Karawang terus meningkat, pada tahun 2011 jumlah angkatan kerja sebanyak 978.507 jiwa dan terus meningkat pada tahun 2015 hingga mencapai 1.026.868 jiwa, untuk jumlah penduduk yang bekerja dan jumlah angkatan kerja yang belum terserap mengalami fluktuasi dari tahun 2011 sampai dengan 2014, sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.31.

Tabel 2.31

Data Ketenagakerjaan Kabupaten Karawang Tahun 2011-2015

No	INDIKATOR	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Ketenagakerjaan					
	• Jumlah Angkatan Kerja (jiwa)	978.507	998.412	970.935	1.026.868	1.056.041
	• Jumlah penduduk yang bekerja (jiwa)	880.087	917.556	875.213	912.864	930.590
	• Jumlah Angkatan Kerja yg blm terserap (jiwa)	98.420	100.422	95.722	114.004	125.451

Sumber: BPS Kabupaten Karawang, sakernas

2.4.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Analisis kinerja atas seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator-indikator yang berhubungan dengan seni budaya dan olahraga. Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus seni budaya dan olahraga yang dapat disajikan

Tabel 2.32
Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
Tahun 2011-2015

No.	Cabang Olah Raga	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah cabang olah raga prestasi yang dibina	18	20	28	35	35
2	Jumlah sarana olah raga yang dibangun	-	-	1	1	-

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang

Pada program pembinaan dan pemasyarakatan Olah raga dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 mengalami peningkatan jumlah cabang olah raga prestasi yang di bina, hal ini disebabkan pola pembinaan yang lebih baik dan perhatian pemerintah terhadap cabang olahraga dengan menyelenggarakan even olah raga yang banyak melibatkan cabang-cabang olah raga. Namun demikian masih perlunya pembangunan sarana olah raga tempat mereka berlatih untuk meraih prestasi.

Tabel 2.33
Daftar Sarana Olah Raga di Kabupaten Karawang
Yang Berstandar Kabupaten dan Nasional Tahun 2015

No.	Tempat/Alamat	Sarana	Standar/Kelas
1	Stadion Singaperbangsa	Sepakbola	Nasional
2	Track Sintetis STD Singaperbangsa	Atletik	Nasional
3	Track Sepatu Roda Karangpawitan	Sepatu Roda	Nasional
4	Sanggar Anggar	Anggar	Nasional
5	GOR Panatayuda	Bola Basket, Bola Voli, Tenis Lapangan	Kabupaten
6	Sporthall Adiarsa	Serbaguna	Nasional
7	Cipule	Dayung	Nasional

Sumber: Disdikpora dan Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Karawang

Apabila potensi seni dan budaya ini berhasil dilestarikan, dikelola, serta dimanfaatkan dengan baik, akan berdampak kepada meningkatnya semangat masyarakat terutama generasi muda dan pelaku seni untuk lebih berperan aktif dalam melestarikan seni dan budaya asli Kabupaten Karawang.

Tabel 2.34

Pengelolaan Kekayaan Budaya Tahun 2011 s.d. 2015

No.	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah pelaku budaya (orang)	44	49	79	134	305
2.	Jumlah kelompok budaya (jenis)	6	6	6	8	11
3.	Jumlah situs sejarah dan budaya (buah)	85	96	104	116	126

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karawang

Catatan :Kelompok Budaya adalah kegiatan kebudayaan yang melibatkan orang banyak; contohnya : Mapag cai, Nadran, Hajat Bumi

Kesadaran masyarakat Kabupaten Karawang dalam mengelola kekayaan budaya cenderung meningkat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, terlihat dari bertambahnya jumlah pelaku budaya, jumlah kelompok budaya serta jumlah situs sejarah dan budaya yang dilestarikan.

Meskipun peningkatan jumlah kelompok budaya serta jumlah situs sejarah dan budaya tidak terlalu signifikan tiap tahunnya berkisar antara 8-11%, namun terjadi peningkatan yang cukup mencolok pada jumlah pelaku budaya di tahun 2014 sebesar 69,62% dan terjadi juga di tahun 2015 sebesar 127,61%. Hal ini menunjukkan kepedulian masyarakat Kabupaten Karawang dalam melestarikan kekayaannya

Tabel 2.35
Pengembangan Nilai-Nilai Budaya Tahun 2011 s.d. 2015

No.	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	a. Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya (buah)	34	43	34	36	36
	b. Jumlah situs serta Benda Cagar Budaya (BCB) yang dikelola dengan baik (buah)	85	96	104	116	126
2.	Jumlah penyelenggaraan pertunjukan kebudayaan tradisional lokal serta festival seni dan budaya (kali)	75	78	86	99	123
3.	Jumlah grup kesenian dan pelaku seni budaya yang dibina (grup)	60	85	183	116	102

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karawang

Upaya pelestarian budaya di Kabupaten Karawang diwujudkan dengan menyediakan sarana penyelenggaraan seni dan budaya, mengelola situs serta benda cagar budaya, menyelenggarakan pertunjukan kebudayaan tradisional lokal serta festival seni dan budaya, dan melakukan pembinaan terhadap grup kesenian dan pelaku seni budaya.

Kepedulian masyarakat Kabupaten Karawang terhadap pengembangan nilai budaya terlihat dari semakin meningkatnya penyelenggaraan pertunjukan kebudayaan tradisional lokal serta festival seni dan budaya dari tahun ke tahun, hal ini didukung oleh sarana penyelenggaraan seni dan budaya yang juga bertambah jumlahnya.

Namun dari tahun 2013 terjadi penurunan pada jumlah grup kesenian dan pelaku seni budaya yang dibina dikarenakan pembinaan tersebut tergantung pada pengajuan dari grup-grup kesenian yang ada di Kabupaten Karawang maupun rekomendasi pihak terkait juga dipengaruhi pula oleh anggaran yang tersedia di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karawang.

Tabel 2.36
Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya Tahun 2015

No	Jenis Sarana	Jumlah (Buah)
1.	Aula Kecamatan/Lapangan Kecamatan (tersebar di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Karawang)	30
2.	Lapang Karangpawitan	1
3.	Panggung Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1
4.	Outdoor Gedung Olahraga Panatayudha	1
5.	Gedung GOW Kabupaten Karawang	1
6.	Gedung Pentas Seni Kampung Budaya Gerbang Karawang	1
7.	Gedung Theater Terbuka Kampung Budaya Gerbang Karawang	1
	Total	36

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karawang

2.5. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum atau pelayanan publik merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Indikator aspek pelayanan umum terdiri dari fokus layanan urusan wajib, dan fokus layanan urusan pilihan.

2.5.1. Fokus Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan Daerah, yaitu bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, ketahanan pangan,

pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika dan perpustakaan.

Analisis Kinerja atas fokus Layanan Urusan wajib di Kabupaten Karawang sampai dengan tahun 2015 kami sampaikan sebagai berikut ;

a. Pendidikan

Pembangunan pendidikan merupakan prioritas pembangunan nasional sehingga dalam implementasinya juga menjadi prioritas pembangunan di daerah. Pemenuhan atas hak dasar yaitu pendidikan menjadi kewajiban pemerintah. Pendidikan merupakan salah satu gerbang penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia mengandung makna, bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penentu bagi pemantapan kesiapan menyongsong tantangan kedepan yang semakin berat dan kompleks. Dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, setiap warga negara berhak mendapatkan layanan pendidikan.

Tabel 2.28 menggambarkan hasil persentase SD dan SLTP yang terakreditasi di Kabupaten Karawang pada tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.37
Persentase SMP yang Terakreditasi
Tahun 2011 - 2015**

No.	Jenjang Sekolah	2011	2012	2013	2014	2015
1.	SD/MI	90,01%	91%	92%	92,29%	97,97%
2.	SMP/MTs	81,11%	76,84%	77,40%	77,84%	82,12%

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang

Tabel 2.29 menggambarkan Pembagunan unit Sekolah dan rehabilitasi ruang kelas SD/MI dan SMP/MTs (Lokal) pada tahun 2011 s.d. 2016, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.38
Pembangunan Unit Sekolah dan Rehabilitasi Ruang Kelas
SD/MI dan SMP/MTs (Lokal)
Tahun 2011 s.d 2015

Jenjang Sekolah	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
SD/MI	57	1.402	460	357	175
SMP/MTs	36	535	598	194	78

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang

Tabel 2.39
Jumlah Siswa Tahun Ajaran 2011/2012 s.d. 2015/2016

NO	Jenjang Sekolah	Tahun				
		2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
	TK	4.195	5.306	5.184	6.613	6.553
	RA	6.599	7.121	7.327	8.161	8.730
	SD/MI	261.513	260.168	260.581	261.260	255.951
	SDLB	173	181	167	171	77
	SMP/MTs	105.186	113.740	116.535	117.598	117.573
	SMPLB	37	37	36	37	38

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang

Manajemen pelayanan pendidikan pada jenjang SD dan SMP di Kabupaten Karawang salah satunya digambarkan melalui rasio murid terhadap sekolah, dan rasio murid terhadap ruang kelas, sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.40
Rasio Murid Terhadap Sekolah Tahun 2011 -2015

No.	Tingkat Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
1	SD/MI	259 : 1	260:1	259 : 1	255 : 1	245:1
2	SMP/MTs	525 : 1	527:1	560 : 1	565 : 1	567:1

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang

Tabel.2.41
Rasio Murid terhadap Ruang Kelas Tahun 2011 - 2015

No.	Tingkat Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
1	SD/MI	38 : 1	40:1	39 : 1	37 :1	37:1
2	SMP/MTs	49 : 1	49:1	47 : 1	44 : 1	40:1

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang

Tabel 2.42
Persentase SMA/SMK/MA Terakreditasi
Tahun 2011 - 2015

No.	Jenjang Sekolah	2011	2012	2013	2014	2015
1	SMA	97,22%	100%	94,60%	94,60%	97,97%
2	MA	94,11%	88,88%	88,88%	94,73%	94,73%
3	SMK	85,71%	83,10%	85%	84,94%	86,31%

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang

Tabel. 2.43
Pembangunan Unit Sekolah, Rehabilitasi Ruang Kelas
Sarana Prasarana Penunjang
SMA/SMK/MA (Lokal) Tahun 2011 s.d 2015

Jenjang Sekolah	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
SMA/SMK/MA	150	129	181	158	96

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang

Manajemen pelayanan pendidikan untuk jenjang SMA/SMK/MA di Kabupaten Karawang salah satunya digambarkan melalui rasio murid terhadap sekolah, rasio murid terhadap ruang kelas sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.44
Rasio Murid terhadap Sekolah Tahun 2011-2015

No	Tingkat Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
1	SMA/SMK/MA	515 : 1	517:1	502 : 1	531 :1	603:1

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang

Tabel.2.45
Rasio Murid terhadap Ruang Kelas Tahun 2011 s.d. 2015

No	Tingkat Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
1	SMA/SMK/MA	55 : 1	43:1	44 : 1	53 : 1	44:1

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang

Tabel 2.46
Jumlah Siswa Tahun Ajaran 2011/2012-2015/2016

	Jenjang Sekolah	Tahun				
		2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
1	SMA/SMK/MA	63.838	66.253	71.776	74.660	83.210
2	SMALB	16	7	9	16	17

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang

Program pendidikan non formal dan informal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang, salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan Angka Melek Huruf (AMH). Pada tahun 2012 AMH Kabupaten Karawang mencapai 93,25, berarti mengalami peningkatan jumlah penduduk yang melek huruf, bila dibandingkan dengan AMH tahun 2011, yaitu sebesar 93,22.

AMH pada tahun 2014 sebesar 93,49*,(angka sangat sementara) artinya mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 93,27. Sedangkan Angka Melek Hurup pada tahun 2015 berubah menjadi eys atau angka harapan mengikuti pendidikan mencapai sebesar 11,67 tahun artinya mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.

Penyelenggaraan paket A, B dan C, seperti tercantum dalam Tabel 2.47 adalah merupakan salah satu bagian dari program pendidikan non formal.

Tabel. 2.47
Perkembangan Program Pendidikan Kesetaraan
Tahun 2011-2015

No	Kegiatan	Jumlah Warga Belajar				
		Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Paket A Setara SD	607	737	1.630	660	352
2	Paket B Setara SMP	7.487	2.082	4.771	3.175	2.546
3	Paket C Setara SMA	1.932	2.063	2.490	4.280	4.022

Sumber : Disdikpora Kabupaten Karawang

Tabel 2.48
Jumlah Lembaga, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pusat
Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Lembaga Kursus dan
Pelatihan (LKP)

No	Indikator Kinerja	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah PKBM	103	70	70	65	56
2	Jumlah PKBM yang mempunyai nomor lembaga (NILEM)	47	47	47	47	46
3	Jumlah LKP	53	67	70	56	69
4	Jumlah Tutor	535	540	553	510	511

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang

Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dilihat dari aspek kualitas tenaga pendidik, diantaranya jumlah guru yang bersertifikat maupun persentase guru SD, SMP dan SMA yang berkualifikasi S1. Jika dilihat dari perkembangan jumlah guru di Kabupaten Karawang dalam kurun waktu 2011 sampai dengan 2013t erdapat penambahan jumlah guru. Pada tahun 2011 jumlah keseluruhan guru di Kabupaten Karawang sebanyak 18.405 orang sedangkan pada tahun 2012jumlah guru menjadi 18.902 orang, tahun 2013 jumlah guru adalah 19.351 orang, tahun 2014 jumlah guru sebanyak 20.148 orang dan tahun 2015 jumlah guru sebanyak 20.457.

Tabel. 2.49
Perkembangan Jumlah Guru di Kabupaten Karawang
Tahun 2011-2015

No	Uraian	Tahun/Jumlah Guru				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	SD/MI	10.234	10.795	10.579	10.989	11.242
2	SMP/MTs	4.835	4.522	4.737	5.012	4.966
3	SMA/MA/SMK	3.336	3.585	4.035	4.147	4.249
4	SD/MI	10.234	10.795	10.579	10.989	11.242

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang

Untuk meningkatkan mutu tenaga pendidik dilaksanakan melalui kegiatan kualifikasi dan sertifikasi guru guna memenuhi standar pendidikan. Jumlah guru yang sudah dan belum mendapat kualifikasi dan sertifikasi hingga tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.50
Pelaksanaan Kualifikasi Guru di Kabupaten Karawang
hingga Tahun 2015

Tingkat Pendidikan	Jumlah Guru	Sudah S1	Sedang Kuliah	Belum Kuliah
SD/MI	11.242	9.105	1.150	987
SMP/MTs	4.966	4.560	47	359
SMA/SMK/MA	4.249	3.908	16	325
Jumlah	20.457	17.573	1.213	1.671

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang

Dari tabel tersebut dapat digambarkan bahwa jumlah guru yang belum ikut kualifikasi ke S1 sampai dengan tahun 2015 sebanyak 1.671 orang. Pada tahun 2014 jumlah guru yang belum ikut kualifikasi ke S1 sebanyak 1.741 orang sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.51.

Tabel 2.51
Pelaksanaan Kualifikasi Guru di Kabupaten Karawang
hingga Tahun 2014

Tingkat Pendidikan	Jumlah Guru	Sudah S1	Sedang Kuliah	Belum Kuliah
SD/MI	10.989	8.824	1178	987
SMP/MTs	5.012	4.429	152	431
SMA/SMK/MA	4.147	3.816	8	323
Jumlah	20.148	17.069	1.338	1.741

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang

Tabel 2.52
Pelaksanaan Sertifikasi hingga Tahun 2015

No	Tingkat Pendidikan	Guru yang berijazah S1	Sudah sertifikasi	Belum Sertifikasi
1	SD/MI	9.105	6.313	2.792
2	SMP/MTs	4.560	1.956	2.604
3	SMA/SMK	3.908	1.169	2.739
	Jumlah	17.069	9.438	7.631

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang

Tabel 2.53
Pelaksanaan Sertifikasi hingga Tahun 2014

No	Tingkat Pendidikan	Guru yang berijazah S1	Sudah sertifikasi	Belum Sertifikasi
1	SD/MI	8.824	6.458	2.366
2	SMP/MTs	4.429	2.303	2.126
3	SMA/SMK/MA	3.816	1.186	2.647
	Jumlah	17.069	9.930	7.139

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang

Masalah Manajemen pendidikan adalah masalah yang sangat berperan dalam proses penyelenggaraan pendidikan baik sebagai sarana maupun alat penataan bagi komponen pendidikan lainnya. Manajemen pelayanan pendidikan di Kabupaten Karawang diantaranya digambarkan oleh rasio guru terhadap sekolah dan rasio murid terhadap guru, sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel.2.54
Rasio Murid Terhadap Guru Tahun 2011 - 2015

No	Tingkat Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
1	SD/MI	27 : 1	25:1	26 : 1	24 :1	23 : 1
2	SMP/MTs	25 : 1	26:1	24 : 1	24 :1	24 :1
3	SMA/SMK/MA	21 : 1	18:1	18 : 1	18 : 1	18 :1

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang

Tabel 2.55
Rasio Guru Terhadap Sekolah Tahun 2011 - 2015

No	Tingkat Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
1	SD/MI	10 : 1	11:1	11 : 1	10 :1	11 : 1
2	SMP/MTs	21 : 1	21:1	22 : 1	24 :1	24 : 1
3	SMA/SMK/MA	24 :1	28:1	28 : 1	28 : 1	28 : 1

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang

Pelaksanaan pembangunan pendidikan perlu didukung ketersediaan sarana dan prasarana fisik pendidikan yang memadai, khususnya kecukupan fasilitas pendidikan dalam melayani masyarakat serta jumlah tenaga pengelola kependidikan.

Perkembangan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan bidang pendidikan, melalui peningkatan kualitas tenaga pendidikan dan siswa didik, pembangunan unit sekolah baru, rehabilitasi ruang kelas, pembangunan ruang kelas baru dan pembangunan SD-SMP satu atap akan terus dilakukan, termasuk dalam hal pemeliharannya. Sarana dan prasarana penunjang di bidang pendidikan termasuk diantaranya sanitasi, seperti WC guru dan siswa, kecepatan akses informasi dalam bidang informasi dan teknologi dilengkapi dengan keberadaan ICT Center yang terhubung dengan jaringan Pendidikan Nasional dan bagi pemberdayaan tenaga pendidikan pun telah tersedia *Teacher Learning Center (TLC)*.

Tabel 2.56
Jumlah Sekolah Tahun Ajaran 2011/2012 s.d 2015/2016

No.	Jenjang Sekolah	Tahun				
		2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
1	TK	119	123	147	155	155
2	RA	156	165	172	173	186
3	SD	878	885	885	887	890
4	SDLB	2	2	2	3	3
5	MI	131	134	137	137	140
6	SMP	135	146	149	148	149
7	SMPLB	2	2	2	2	2
8	MTs	58	57	57	58	59
9	SMA	37	36	37	37	43
10	SMALB	2	1	1	1	1
11	MA	16	18	18	19	20
12	SMK	69	82	88	93	95

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang

Tabel 2.57
Rombongan Belajar Tahun Ajaran 2011/2012 s.sd 2015/2016

No.	Jenjang Sekolah	Tahun				
		2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
1	TK	257	349	459	379	372
2	RA	330	407	361	548	526
3	SD	8.076	7.126	7.133	7.455	7.465
4	SDLB	2	4	4	6	13
5	MI	1.141	929	967	1.000	1.007
6	SMP	2.026	2.117	2.250	2.238	2.310
7	MTs	427	484	539	593	555
8	SMPLB	5	2	3	3	2
9	SMA	640	730	693	691	769
10	SMALB	3	2	2	2	2
11	MA	108	126	124	143	145
12	SMK	733	882	929	979	1447

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang

Tabel 2.58
Ruang Kelas Milik (RKM)
Tahun Ajaran 2011/2012 s.d. 2015/2016

No.	Jenjang Sekolah	Tahun								
		2013/2014			2014/2015			2015/2016		
		B	RR	RB	B	RR	RB	B	RR	RB
1	TK	263	41	22	254	33	15	334	36	2
2	RA	325	9	69	339	128	2	383	128	2
3	SD	4.076	1.227	875	4.194	1.245	814	4.233	1.286	587
4	SMP	1.647	248	76	1.863	260	80	1.583	421	122
5	SMA	659	71	8	496	76	32	265	431	47
6	SMK	672	98	31	692	84	48	516	511	134
7	MI	563	211	135	534	248	75	533	286	81
8	MTs	306	102	42	295	141	58	333	141	48
9	MA	92	24	3	67	33	11	97	46	8

Sumber : Disdikpora Kabupaten Karawang

Keterangan : Kategori Kondisi Sekolah : B (Baik), RR (Rusak Ringan) dan RB (Rusak Berat).

Pada Tabel 2.57 s.d. 2.58 secara keseluruhan memperlihatkan kondisi pendidikan di Kabupaten Karawang meliputi jumlah sekolah, jumlah rombongan belajar, jumlah ruang kelas milik mulai dari tahun 2011/2012 s.d. 2015/2016.

Sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan minat baca dikalangan murid-murid, di sekolah disediakan fasilitas perpustakaan sekolah, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.59
Jumlah Perpustakaan Sekolah Tahun 2011 – 2015

No	Tingkat Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
1	SD/MI	219	224	316	355	369
2	SMP/MTs	127	128	128	132	159
3	SMA/SMK/MA	71	78	100	102	98

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang

Pendidikan bagi anak-anak di usia dini juga mendapat perhatian yang memadai dari pemerintah Kabupaten Karawang, hal tersebut dengan ketersediaan layanan pendukung bagi siswa PAUD.

Tabel 2.60
Jumlah Lembaga, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal dan Non Formal Tahun 2011 – 2015

No.	Indikator Kinerja	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah PAUD Formal	119	123	147	155	155
2	Jumlah Tenaga Pendidik PAUD Formal	444	582	729	635	704
3	Jumlah Peserta Didik PAUD Formal	4.400	5.953	6.589	6.613	6553
4	Jumlah PAUD Non Formal	497	614	827	877	881
5	Jumlah Tenaga Pendidik PAUD Non Formal	1.449	1.672	2.621	2.742	2742
6	Jumlah Peserta Didik PAUD Non Formal	15.481	20.482	26.893	30.145	38.088
4	Jumlah PAUD Non Formal	497	614	827	877	881

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang

b. Kesehatan

Tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengembangan Desa dan Kelurahan siaga Aktif tahun 2015 dapat dilihat dari beberapa indikator seperti di bawah ini :

1. Terbitnya Peraturan Bupati Karawang Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif di Kabupaten Karawang.
2. Terbitnya Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor 140.05/Kep.662-Huk/2015 Tentang Kelompok Kerja Operasional dan Forum Desa dan Kelurahan Siaga Aktif di Kabupaten Karawang.
3. Masuknya Kegiatan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif dalam Anggaran APBDesa dengan Rentang Biaya Rp. 5 Juta Rupiah per desa di wilayah Kabupaten Karawang.
4. Masuknya Kegiatan Pembinaan Desa Tingkat Kecamatan dalam Anggaran Tiap Kecamatan dengan rentang biaya Rp. 20 juta per kecamatan di wilayah Kabupaten Karawang.
5. Adanya komitmen seluruh camat yang mendukung kegiatan peningkatan strata desa siaga di wilayahnya.
6. Adanya komitmen seluruh kepala desa yang mendukung kegiatan peningkatan strata desa siaga di wilayahnya.
7. Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Strata Mandiri Tahun 2015 di Kabupaten Karawang terdapat 4 desa yaitu :
 - 1) Desa Karangjaya Kecamatan Pedes Wilayah Binaan Puskesmas Pedes
 - 2) Desa Kertamulya Kec. Pedes Wilayah Binaan Puskesmas Pedes
 - 3) Desa Laban Jaya Kec. Pedes Wilayah Binaan Puskesmas Pedes
 - 4) Desa Kondang Jaya Kec Karawang Timur Wilayah Binaan PKM Adiarsa
8. Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Strata Purnama Tahun 2015 di Kabupaten Karawang terdapat 8 desa yaitu :
 - 1) Desa Sindangmulya Kec Kutawaluya Binaan PKM Kutawaluya
 - 2) Desa Kutakarya Kec Kutawaluya Binaan PKM Kutamukti
 - 3) Desa Jatimulya Kec Pedes Binaan PKM Pedes
 - 4) Desa Kertaraharja Kec Pedes Binaan PKM Pedes
 - 5) Desa Payungsari Kec Pedes Binaan PKM Pedes

- 6) Desa Rangdumulya Kec Pedes Binaan PKM Pedes
- 7) Desa Cibuaya Kec. Cibuaya Binaan PKM Cibuaya
- 8) Desa Malangsari Kec Pedes Binaan PKM Pedes

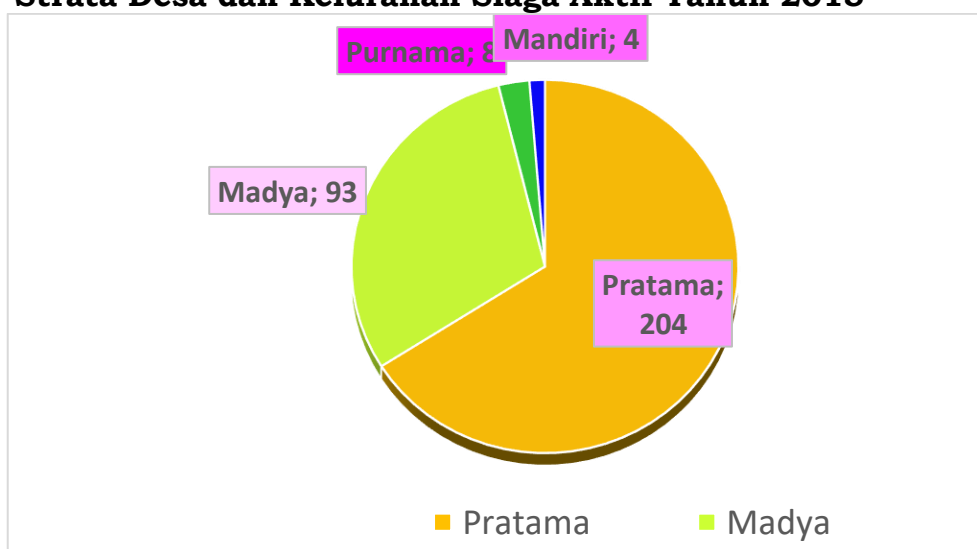
Hasil pelaksanaan kegiatan pengembangan desa dan kelurahan siaga aktif selama tahun 2015 dapat digambarkan melalui grafik- grafik di bawah ini yang membandingkan antara target program dengan realisasi dari capaian program pengembangan desa dan kelurahan siaga aktif selama tahun 2015.

Tabel 2.61
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan Tahun 2011-2015

No.	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Desa Siaga Aktif	168	128	309	307	309
2.	Persentase Rumah Tangga yang ber PHBS (%)	40,38	41,18	52	46,91	52,73
3.	Persentase Sekolah yang ber PHBS (%)	66,36	67,68	21,3	84,80	81,9
4.	Persentase Fasilitas Umum yang ber PHBS (%)	36,68	50,6	46	49,40	36,92
5.	Jumlah Poskesdes Aktif	93	104	116	145	102
6.	Jumlah Posyandu Purnama	569	698	721	721	656
7.	Jumlah Posyandu Mandiri	85	114	84	77	136

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang

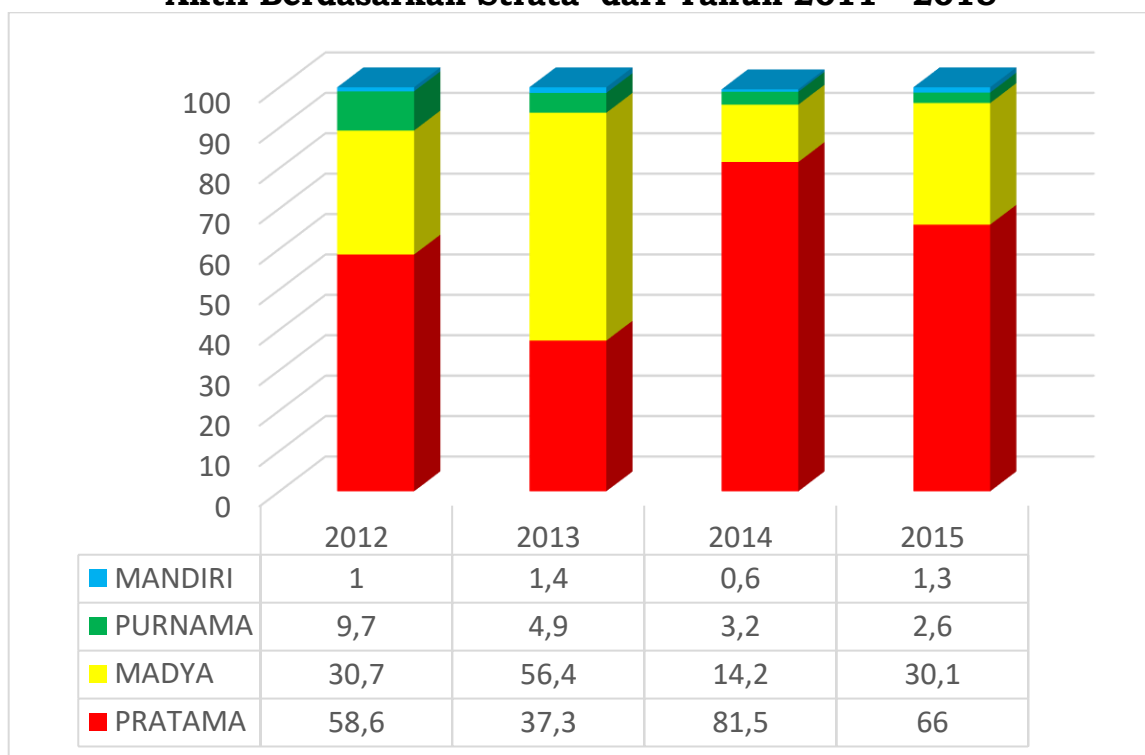
Gambar 2.8
Strata Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Tahun 2015



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang

Dari grafik di atas masih terlihat bahwa secara umum capaian desa dan kelurahan siaga aktif sudah 100 % yang artinya sudah seluruh desa menjadi desa dan kelurahan siaga aktif. Akan tetapi ketika kita tinjau berdasarkan capaian strata desa dan kelurahan siaga aktif strata pertama masih mendominasi dibanding strata lainnya. Namun jika dibanding dengan capaian desa dan kelurahan siaga aktif tahun 2014, maka tahun ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan dibuktikan dengan penurunan jumlah desa siaga strata pertama yang pada tahun 2014 berjumlah 252 desa sedangkan tahun 2015 jumlah desa siaga strata pertama berjumlah 204 desa.

Gambar 2.9
Trend Perkembangan Desa Siaga (Desi)/Kelurahan Siaga (Lusi)
Aktif Berdasarkan Strata dari Tahun 2011 - 2015



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang

Grafik di atas menunjukkan bahwa di tahun 2015 terjadi peningkatan strata desa dan kelurahan siaga aktif ke arah yang lebih baik, terlihat dari pergerakan desa dan kelurahan siaga aktif strata madya yang menggantikan keberadaan desa dan kelurahan siaga aktif pratama.

Pada grafik di atas juga terlihat ada peningkatan strata mandiri dari 0.6 % di tahun 2014 menjadi 1.3 % pada tahun 2015. Tetapi ternyata dampak pemilihan kepala desa pada tahun 2015 juga memiliki dampak yang cukup signifikan terlihat pada strata purnama yang pada tahun 2014 3.2 % turun menjadi 2.6 % di tahun 2015.

Pada tahun 2015 Persentase rumah tangga sehat mengalami kenaikan cakupan dari 46,91 (tahun 2014) menjadi 52,73 (tahun 2015) yang merupakan cerminan dari 10 indikator PHBS Rumah Tangga. Dari 10 indikator PHBS, cakupan yang paling rendah adalah jumlah bayi dan balita yang menimbang di posyandu sebesar 51 % dan rumah tangga yang merokok di dalam rumah adalah 52,73 %.

Persentase sekolah yang ber-PHBS pada tahun 2015 mengalami penurunan dalam cakupannya dari 84,80 % (tahun 2014) menjadi 81,9 % (tahun 2015). Berikut rincian capaian sekolah ber-PHBS sesuai strata :

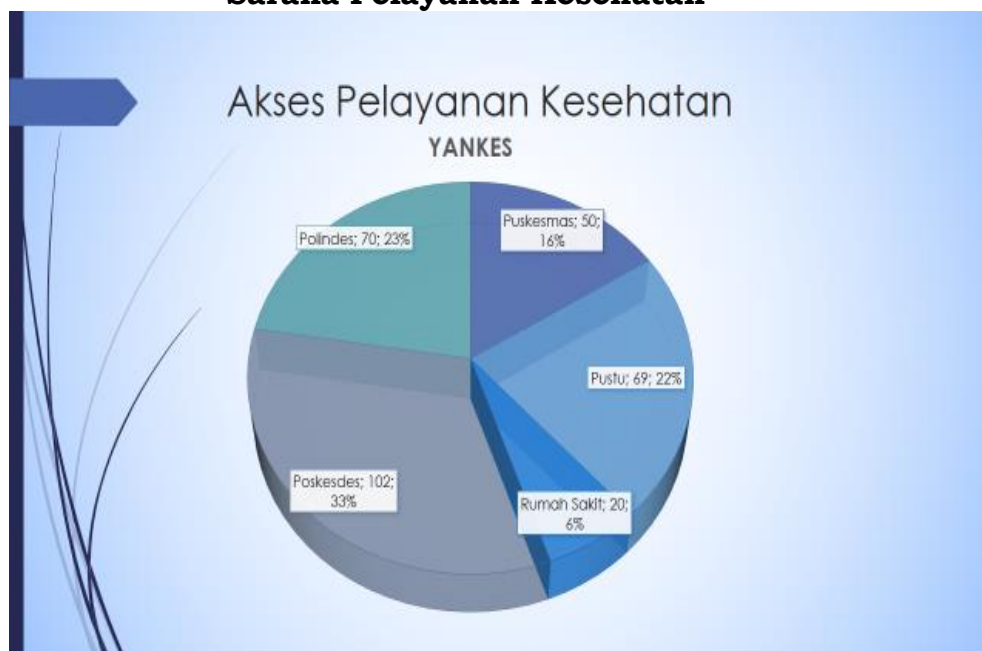
- a. Sekolah dengan PHBS pratama capaian PHBS-nya hanya 27,3 % dengan hanya memenuhi 8 indikator PHBS.
- b. Sekolah dengan PHBS Madya capaian PHBS-nya hanya 36,7 % dengan hanya memenuhi 12 indikator PHBS.

Sekolah dengan PHBS utama capaian PHBS-nya hanya 18,0 % dengan hanya memenuhi 14 indikator PHBS. Dilihat dari data tersebut diatas, bahwa di Kabupaten Karawang sekolah yang belum memenuhi strata pertama PHBS hanya 18,1 % di tahun 2015.

Persentase fasilitas umum yang ber PHBS di tahun 2015 mengalami penurunan seperti halnya sekolah yang ber-PHBS, yaitu mengalami penurunan sekitar 12,48 % dari tahun 2014 menjadi 36,92 %. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya puskesmas yang belum melaporkan hasil kegiatan PHBS-nya ke Dinas Kesehatan. Dari 7 indikator PHBS di tatanan Fasilitas Umum, cakupan yang paling rendah adalah masih kurangnya

kesadaran masyarakat untuk tidak merokok di tempat-tempat umum.

Gambar 2.10
Sarana Pelayanan Kesehatan



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa sarana Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Karawang sudah mampu memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan dasar. Dilihat dari jumlah sarana kesehatan pemerintah maupun upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat baik itu dalam bentuk poskesdes maupun polindes.

Tabel 2.62
Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin pada Tahun 2011-2015

No.	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah peserta Jamkesmas yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan sesuai aturan berlaku	684.638	684.638	684.638	857.446	856.845
2.	Jumlah peserta Jamkesda mendapat jaminan pelayanan kesehatan sesuai aturan berlaku*	551.261	551.261	551.261	-	551.261
3.	Jumlah pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	48	50	50	132	-
4.	Jumlah PNS gol I dan	0	0	0	73.561	-

No.	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
	II serta pensiunan yg memanfaatkan pelayanan kesehatan (<i>cost sharing</i>)					
5.	Jumlah pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	18	19	22	22	-
6.	Jumlah masyarakat memanfaatkan sistem jaminan kesehatan	-	-	-	1.200.565	1.459.880

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang

Ket.: Jamkesmas tidak dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang

Data peserta Jamkesmas yang ada saat ini diambil berdasarkan data penerimaan pembayaran yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan terhadap Puskesmas di wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.

Jumlah Peserta Jamkesda masih berdasarkan pada SK Bupati Nomor : 585/Kep.645-Huk/2010 tentang Peserta Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Karawang, dan sampai dengan saat ini masih belum menggunakan SK yang terbaru. Untuk jumlah PNS yang golongan I dan II serta Pensiunan yang memanfaatkan pelayanan kesehatan (*Cost Sharing*) saat ini tidak ada datanya, hanya ada data *Cost Sharing* untuk Pelayanan Jamkesmas. Dalam tabel juga terlihat bahwa jumlah masyarakat yang memanfaatkan sistem jaminan kesehatan yaitu seluruh masyarakat yang mendaftar kepesertaan Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan.

Pelayanan terhadap penduduk miskin ini selain dilaksanakan oleh RSUD Kabupaten Karawang juga melibatkan beberapa rumah sakit swasta di Kabupaten Karawang untuk menangani pasien miskin dengan tarif yang sama dan sesuai dengan tarif pelayanan masyarakat miskin yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Karawang.

Tabel 2.63
Rekapitulasi Pelayanan Pasien Miskin
Sumber Dana Jamkesda (APBD Provinsi dan Kabupaten) Tahun
2014-2015

No.	Rumah Sakit	2014		2015	
		Jumlah Kunjungan Pasien	Total Biaya Rp	Jumlah Kunjungan Pasien	Total Biaya Rp
1.	RSUD Karawang	10.441	9.777.538.422	6.505	7.205.849.800
2.	RS Islam Karawang	7.290	4.678.742.709	5.235	2.821.707.700
3.	RS. Karya Husada	205	197.800.699	164	153.840.170
4.	RS. Fikri Medika	40	54.171.808	71	113.954.794
5.	RSIA Citra Sari Husada	2.635	1.971.195.213	986	821.164.470
6.	RS. Delima Asih	42	15.456.505	5	2.363.000
7.	RS. Bayukarta	13	15.998.000	17	10.832.000
8.	RSB. Dr. Joko Pramono	85	102.235.376	3	8.292.529
9.	RS. Proklamasi	1.255	1.217.159.707	660	688.853.580
10.	RS. Izza	433	368.854.679	492	483.061.809
11.	RS. Dewi Sri	39	49.660.229	18	10.745.793
12.	RS.Cito	96	79.635.000	-	-
13.	RS. Lira Medika Center	-	-	-	-
14.	Puskesmas	-	-	-	-
15.	RSUPN Cipto	978	2.381.951.486	274	680.640.562
16.	RSUP Hasan Sadikin	2.243	3.267.295.422	441	827.173.300
17.	RS. Marzoeeki Mahdi	69	172.710.133	20	100.459.341
18.	RS. Jiwa Cimahi Bdg	21	30.339.967	7	10.892.800
19.	RS. Saraswati	18	11.251.580	9	1.046.400
20.	RS. Puri Asih	408	842.859.760	637	1.016.493.104
21.	RS. Kusta Sintanala	6	14.857.875	3	1.223.085
22.	RS. Cicendo	59	48.613.520	12	19.276.000
23.	RS. Mitra Family	2	6.514.474	-	-
24.	RS. Titian Bunda	25	39.582.766	171	255.871.524
	Jumlah	26.403	25.344.425.330	15.730	15.233.741.761

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang

Dari data diatas, jumlah kunjungan pasien yang ada berdasarkan dari jumlah klaim dari Rumah Sakit yang masuk ke Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang selama Tahun 2015. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2014) jumlah kunjungan pasien Jamkesda mengalami penurunan jumlah kunjungan sekitar 10.673 pasien dan juga mengalami penurunan jumlah dana klaim yang dibayarkan yaitu sebesar Rp. 10.110.683.569,-. Ada kemungkinan ini disebabkan karena masyarakat sudah banyak yang terdaftar dalam Jaminan Kesehatan di BPJS.

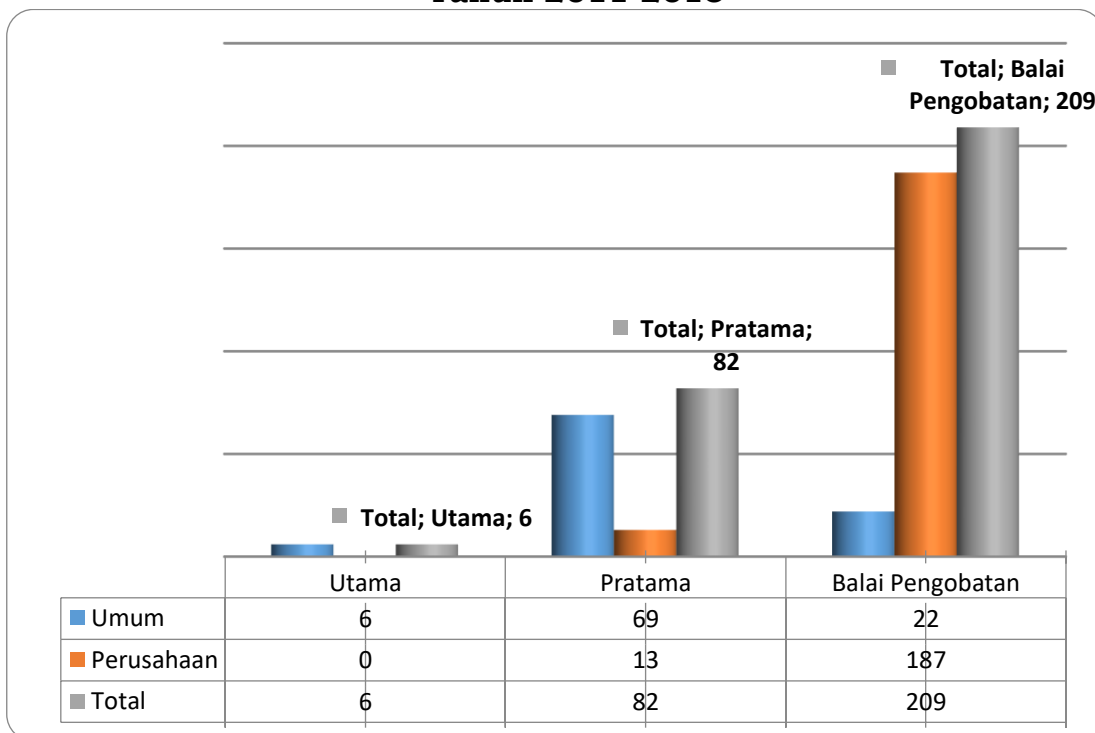
Tabel 2.64
Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Karawang
Tahun 2011-2015

No	Sarana	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	RSUD Kabupaten	1	1	1	1	1
2	RS Swasta	15	15	16	18	19
3	RS Bersalin	1	2	1	1	0
4	Puskesmas	48	50	50	50	50
5	Pustu	69	69	69	70	71
6	Pusling+ kend. Operasional	94	99	111	373	388
7	PONED	10	19	28	28	28
8	Posyandu	2.218	2.227	2.233	2.255	2.271
9	Rumah bersalin	38	38	38	0	0
10	Apotik	179	190	246	248	260
11	Balai Pengobatan Mata	2	1	1	1	1
12	Balai Pengobatan Khusus	3	1	8	2	0
13	Balai Pengobatan Umum (Klinik Pratama)	222	181	449	291	261
14	Balai Pengobatan Perusahaan	12	28	44	0	35
15	Gudang Farmasi	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang

Dari grafik diatas terlihat jumlah klinik di Kabupaten Karawang sebanyak 297 sarana dengan rincian Klinik Umum (Balai Pengobatan/BP) : 187 sarana, klinik pratama : 69 sarana, klinik utama (Klinik dokter spesialis) : 6 sarana, dan klinik perusahaan : 35 sarana, serta klinik pratama : 13 sarana. Selain klinik, sarana yang ada di Kabupaten Karawang adalah apotek dengan jumlah 260 apotek yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Karawang, dan juga Rumah Bersalin (RB, bila ijin sarana sudah habis masa berlaku RB maka harus mengurus kembali perijinannya menjadi Klinik atau kembali menjadi praktek bidan perorangan) terdapat 38 buah, Puskesmas 50 puskesmas, Puskesmas Pembantu (pustu) mengalami penambahan dari tahun sebelumnya yang hanya 69 pada tahun 2013 dan 70 pustu pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 menjadi berjumlah 71 buah.

Gambar 2.11
Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Karawang
Tahun 2011-2015



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang

Berdasarkan grafik diatas dapat kita lihat jumlah klinik di Kabupaten Karawang sebanyak 297 klinik. Dari grafik diatas terlihat ada beberapa kategori klinik. Sebelum terbitnya Permenkes No.28 tentang klinik yang terbit pada tahun 2011, Kategori klinik disebut dengan istilah balai pengobatan. Dari tabel diatas jumlah balai pengobatan baik umum maupun perusahaan sebanyak 209 buah. Setelah terbitnya Permenkes No 28 tahun 2011 dan kembali terbitnya Permenkes No 9 Tahun 2014 tentang Klinik, Kategori klinik dibagi menjadi dua jenis yaitu Klinik Pratama dan Klinik Utama. Sebagaimana dimaksud pada Peraturan menteri Kesehatan No 9 tentang Klinik Tahun 2014 Klinik Pratama merupakan Klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar baik umum maupun khusus sedangkan Klinik utama merupakan Klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialisik atau pelayanan medik dasar dan spesialisik. Sehingga dari tabel diatas dapat disimpulkan jumlah klinik yang memiliki ijin di Kab. Karawang sebanyak 297 klinik terdiri dari 6 klinik utama, 82 Klinik Pratama (Umum dan

Perusahaan), serta 209 Balai Pengobatan (umum dan Perusahaan).

Tabel 2.65
Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Karawang
Tahun 2011-2015

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014*	2015*
1	Dokter Umum	608	728	889	106	113
2	Dokter Spesialis	156	158	160	0	0
3	Dokter Gigi	81	87	108	46	47
4	Perawat	1.600	1.900	1.600	265	281
5	Sanitasi	42	46	46	25	32
6	Perawat Gigi	35	93	81	23	24
7	Bidan	813	815	1.086	694	725
8	Farmasi	37	62	265	28	29

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.

Ket.*=data pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kab. Karawang

Dari data tersebut diatas jumlah tenaga kesehatan pada tahun 2014 dan 2015 adalah petugas kesehatan yang bekerja di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang (Kantor Dinas Kesehatan dan UPTD Kesehatan), baik yang berstatus sudah PNS atau pun yang masih menjadi Pegawai Tidak Tetap. Data dari luar Lingkungan Dinas Kesehatan sulit di dapatkan sehingga jumlahnya sedikit. Tidak seperti halnya tahun 2011-2013 jumlah tenaga bisa didapatkan dengan mudah karena adanya penerbitan ijin penyelenggaraan pelayanan kesehatan masih di lingkungan Dinas Kesehatan sehingga pergeseran dan perpindahan dari tenaga kesehatan masih bisa diketahui, sehingga jumlahnya pun bisa dengan mudah didapatkan.

Tabel. 2.66
Hasil Cakupan Program KIA di Kabupaten Karawang Tahun 2013
- 2015

No	Indikator	Target 2013 (%)	2013			2014			2015		
			SSRN	ABS	%	SSRN	ABS	%	SSRN	ABS	%
1	K. 1	99	65.553	61.618	94,00	68.212	60.432	88,59	62.749	58.429	93,12
2	K. 4	98	65.553	59.440	90,67	68.212	58.042	85,09	62.749	56.175	89,52
3	LINAKES	96	62.573	57.282	91,54	65.112	56.725	87,12	59.896	54.248	90,57
4	N. 2	96	59.593	57.109	95,83	62.012	56.612	91,29	57.044	54.572	95,67
5	Kunjungan Bayi	96	59.593	53.578	89,91	62.012	56.907	91,77	57.044	55.712	97,66

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang

Tabel 2.67
Penyebab Kematian Ibu di Kabupaten Karawang
Tahun 2012-2015

No	Penyebab	2012	2013	2014	2015
1	Ekslamsi/Preeklamsi Berat	22	20	20	34
2	Pendarahan	12	18	12	17
3	Infeksi	0	5	3	6
4	Lain-lain	21	21	24	11
	Jumlah	55	64	59	68

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang

Tabel 2.68
Bayi usia 0-9 bulan yang Mendapat Imunisasi
Dasar Lengkap Tahun 2011-2015

No	Jenis Imunisasi	2011	2012	2013	2014	2015
1	HB 0-7 bulan	47.464	51.686	50.772	54.427	53.076
2	BCG	53.225	56.885	56.971	56.532	56.103
3	DPT HB 3	51.529	55.653	52.588	55.029	53.938
4	Campak	51.645	55.495	53.223	55.082	54.025
5	POLIO 4	50.406	54.854	53.905	56.029	54.364

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang

Tabel 2.69
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Tahun 2011-2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Kasus KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) yang ditangani	12	12	15	184	215
2	Persentase Desa UCI (<i>Universal Child Immunization</i>) (%)	82,20	65,28	93	93,2	80,6%
3	Jumlah Penemuan Kasus non Polio AFP (<i>Acute Flaccid Paralysis</i>) per 100.000 anak di bawah umur 15 tahun	13	13	13	15	17
4	Jumlah Desa terkena KLB yang ditangani < 24 jam	22	26	10	11	7

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang

Tabel 2.70
Cakupan Imunisasi Tahun 2012-2015

No	Indikator	2012		2013		2014		2015	
		ABS	%	ABS	%	ABS	%	ABS	%
1	BCG	53.225	90	56.971	96	56.532	95	56.103	98
2	DPT. 3	51.529	96	52.588	88	56.029	96	53.938	95
3	POLIO. 3	50.360	94	53.905	90,4	55.087	96	55.106	97
4	CAMPAK	51.645	90	53.223	89,3	55.082	95	54.025	95
5	HEPATITIS B.3	47.464	88	50.772	85	54.427	94	53.076	93
6	TT. 2	61.539	104	59.006	90	33.441	49	30.002	44

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang

Cakupan semua jenis imunisasi yang belum tercapai adalah imunisasi hepatitis B usia 0-7 hari (target 95%), karena bayi yang lahir di klinik atau Rumah Sakit terlambat untuk diimunisasi hepatitis B pada usia 0-7 hari.

Imunisasi TT 2+ tidak tercapai karena status TT di skrining berdasarkan jumlah imunisasi TT yang sudah didapat.

Tabel 2.71
Hasil Cakupan Program P2PL Tahun 2011-2015

No	Program	2011	2012	2013	2014	2015
1	P2 TBC :					
	- Penemuan BTA Kasus	2.098	2.562	2.484	2.609	2.118
2	P2 kusta :					
	- Prevalensi / 10.000 Penduduk	1,1	1,7	1,8	1,7	1,6
3	P2 PMS/HIV-AIDS :					
	- Penemuan HIV	39	41	72	92	104
	- Penemuan AIDS	-	0	10	55	101
4	P2 DIARE :					
	- Penemuan Kasus Diare	68.987	76.314	69.805	70.301	72.313
5	P2 ISPA					
	- Penemuan Penderita Pneumonia	12.979	17.314	15.944	14.397	15.112
6	P2 DBD					
	- Penemuan Kasus	249	495	758	301	569
	- Kematian 4 (CFR)	2	4	7	2	4
	- Insiden rate (IR) 100.000 Penduduk	11,5	22,8	35,00	13,3	25,7
7	P2 FILARIASIS					
	- Penemuan Kasus	34	39	43	46	51

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang

Tabel 2.72
Cakupan Sarana Air Bersih, Jamban Keluarga dan TPM Tahun 2012-2015

	Nama Sarana	2012		2013		2014		2015	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
A.	Ledeng	49.092	9,32	50.396	9,61	49.955	9,40	58.749	10,37
	Sumur Pompa Tangan (SPT)	86.891	16,49	76.897	14,67	74.957	14,10	70.834	12,51
	Sumur Gali (SGL)	70.317	13,35	63.340	12,08	65.334	12,29	64.676	11,42
	Penampungan Mata Air (PMA)	2.069	0,39	2.069	0,39	2.337	0,44	2.337	0,41
	Penampungan Air Hujan (PAH)	1.566	0,3	1.554	0,30	1.488	0,28	1.534	0,27
	Pompa Listrik	224.309	42,57	238.535	45,50	245.474	46,18	274.094	75,88
B.	Jamban Keluarga	318.418	60,44	328.380	62,64	340.446	64,05	358.565	63,30

	Nama Sarana	2012		2013		2014		2015	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
C.	Tempat Pengolahan Makanan (TUPM) yang diperiksa	4.426	62,56	5.205	73,24	5.184	71,79	5.042	66,47
	TUPM yang memenuhi syarat kesehatan	3.425	77,38	4.006	76,96	4.057	78,26	.958	78,50

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang

Tabel 2.73
Pemakaian Obat dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas
Tahun 2012-2015

No	Pemakaian Obat dan Perbekalan Kesehatan	2012	2013	2014	2015
1	Obat dan Perbekalan Kesehatan (Rp)	9.950.505.200	10.097.208.801	15.139.661.913	14.577.565.864

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang

Tabel 2.74
Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2011-2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Apotik yang dipantau	30	50	70	100	50
2	Jumlah Toko Obat yang dipantau	20	15	20	20	25
3	Jumlah pedagang makanan yang dipantau	831	1.306	1.378	2.094	1.876
4	Jumlah Produsen makanan yang dipantau	728	906	669	1.138	1.132
5	Persentase Sediaan Farmasi yg sesuai Peraturan Perundang-undangan	-	-	8	-	-

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Karawang

Tabel 2.75
Perbaikan Gizi Masyarakat Tahun 2012-2015

No	Uraian	2012	2013	2014	2015
1	Balita yang ditimbang berat badannya	154.200	145.783	147.492	153.056
2	Bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI eksklusif	8.634	16.480	18.172	20.269
3	Anak usia 6-59 bulan menandatangani kapsul	187.247	136.091	178.725	182.414
4	Kasus Gondok (GAKY) yang ditangani	-	-	-	-
5	Jumlah Puskesmas melaksanakan surveilans gizi	50	50	50	50
6	Kecamatan yang memiliki data status gizi balita	30	30	30	30
7	Jumlah Balita gizi buruk mendapatkan perawatan	669	415	395	281
8	Jumlah Balita gizi kurang yang ditangani	15.274	7.908	7.496	7.477

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang

Tabel 2.76
Kegiatan Distribusi Tablet Tambah Daerah pada Ibu Hamil dan
Ibu Nifas Tahun 2012-2015

No	Distribusi	2012		2013		2014		2015	
		Cakupan	%	Cakupan	%	Cakupan	%	Cakupan	%
1	Fe 1 Ibu Hamil	60.862	94,49	59.206	90,32	60.645	88,91	58.307	92,92
2	Fe 3 Ibu Hamil	58.096	90,2	57.208	87,27	59.290	86,92	56.424	89,92
3	Fe Ibu Nifas	51.049	83,03	49.015	78,33	50.363	77,35	54.452	90,91

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang

Tabel 2.77
Hasil Cakupan Kegiatan Penimbangan di Kabupaten Karawang
Tahun 2011-2015

No	Penyebab	2011	2012	2013	2014	2015
1	Partisipasi Masyarakat (D/S)	63,82	75,13	70,69	65,77	67,96
2	Cakupan Program (K/S)	69,65	85,92	84,05	79,53	81,45
3	Keberhasilan Program (N/S)	49,00	54,54	43,16	40,80	46,06
4	Efek Program (N/D)	76,91	72,59	61,06	60,80	62,06
5	Kelangsungan Program (D/K)	91,39	87,44	84,11	82,95	83,31

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa cakupan program Kesehatan Ibu dan Anak mengalami peningkatan di tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014. Namun, selain cakupan program yang mengalami peningkatan, kasus kematian pun ikut naik dibandingkan dengan jumlah di tahun sebelumnya, yaitu pada kematian ibu dan kematian bayi.

Penyebab terbanyak kasus kematian ibu masih didominasi oleh kasus PEB dan perdarahan, sedangkan penyebab kematian bayi masih didominasi oleh BBLR dan asfiksia. Masih terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab tingginya kasus kematian ibu yaitu terjadi karena faktor penanganan komplikasi yang belum adekuat yang dipengaruhi oleh sarana, tenaga, obat dan managerial. Faktor terlambat merujuk dan lama perjalanan sampai ke tempat tujuan rujukan dipengaruhi oleh : pendidikan, ekonomi, budaya, gender dan geografis. Selain itu juga kematian ibu mencerminkan status gizi dan kesehatan ibu, keadaan sosial ekonomi, kondisi kesehatan lingkungan serta fasilitas dan tingkat pelayanan kesehatan prenatal dan obstetri. Pada tahun 2015, di kabupaten Karawang terjadi 68 kasus kematian ibu yang tersebar di 35 puskesmas, dan terdapat 189 kasus kematian bayi yang

tersebar di 40 puskesmas. Sebaran kematian tidak terganggu oleh akses kesehatan dalam hal ini jarak tempuh dari puskesmas ke fasilitas kesehatan tempat rujukan, karena semuanya dapat ditempuh dengan kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua.ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan tingginya kasus kematian ibu yaitu :

- Faktor penanganan komplikasi yang belum adekuat yang dipengaruhi oleh sarana, tenaga, obat dan managerial.
- Faktor terlambat merujuk dan sampai ke tempat rujukan dipengaruhi oleh : pendidikan, ekonomi, budaya, gender, dan geografis.
- Faktor kurangnya kemampuan SDM dalam penanganan kasus kegawatdaruratan ibu dan bayi.

Pencapaian cakupan program kesehatan ibu dan anak mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya walaupun tahun ini masih belum memenuhi target yang diharapkan. Namun dengan kenaikan capaian sudah menunjukkan kinerja petugas kesehatan sudah cukup baik walaupun kedepan harus lebih ditingkatkan lagi baik kualitas maupun kuantitasnya dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Tabel. 2.78
Distribusi Vitamin A pada Bayi dan Balita
Tahun 2012-2015

No	Indikator	2012		2013		2014		2015	
		ABS	%	ABS	%	ABS	%	ABS	%
1	Jumlah Bayi dan Balita dapat Vit. A (bulan Pebruari)								
	a. Bayi	23.232	79,3	16.971	56,96	18.068	58,28	18.464	64,74
	b. Balita	145.320	99,1	136.091	92,81	144.996	89,37	146.969	88,66
2	Jumlah Bayi dan Balita dapat Vit. A (bulan Agustus)								
	a. Bayi	21.763	74,28	15.145	50,82	15.851	51,13	16.981	59,54
	b. Balita	142.279	97,03	145.243	99,05	145.824	89,88	151.271	91,26

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang

Tabel 2.79
Status Gizi Hasil Bulan Menimbang Tahun 2011-2015

No	Status Gizi	2011	2012	2013	2014	2015
1	Gizi buruk (Sangat kurang)	0.80	0.91	0,51	0,41	0,39
2	Gizi kurang	6.29	8.51	4,19	3,9	3,79
3	Gizi baik	9 0.30	88.25	93,44	93,4	94,18
4	Gizi lebih	1.24	2.6	1,83	2,31	1,64

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang

Dari data hasil Program perbaikan gizi masyarakat mengalami kenaikan dari semua kegiatan, mulai dari hasil kegiatan penimbangan balita di posyandu, cakupan ASI Eksklusif pada bayi usia 0-6 bulan, bayi yang mendapatkan kapsul vitamin A, dan kegiatan distribusi tablet Fe untuk ibu hamil dan ibu nifas. Meskipun naik cakupannya jika dibandingkan dengan tahun lalu tapi belum dapat mencapai target yang diharapkan. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan antara jumlah sasaran riil dengan sasaran proyeksi yang ada.

Untuk kasus balita gizi buruk masih banyak ditemukan selama tahun 2015, yaitu sebanyak 281 kasus. Meskipun jumlah ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 395 kasus, jumlah penurunannya sebesar 114 kasus. Semua balita gizi buruk yang baru ditemukan semuanya sudah mendapatkan perawatan (100%) mulai dari dilakukannya validasi data antropometri, pemeriksaan kesehatan, penyuluhan gizi sampai dengan Pemberian Makanan Tambahan Penyuluhan (PMT-P). Pada tahun 2015 jumlah balita gizi kurang yang terjaring pada saat Bulan Penimbangan Balita (BPB) sebanyak 7.477 anak. Dilihat dari tabel diatas persentase jumlah balita pada tahun 2015 (3,79%) mengalami penurunan dari tahun sebelumnya (3,9%).

Penurunan jumlah balita gizi buruk dan gizi kurang karena Pemerintah Kabupaten Karawang sangat serius dalam penanganan masalah balita kurang gizi pada tahun 2015, hal ini terbukti dengan adanya klinik gizi rawat jalan yang berada di 11 puskesmas, pemberian PMT-P untuk balita kurang gizi, peningkatan kapasitas petugas tentang gizi tentang konseling menyusui, pemantauan pertumbuhan anak serta Pemberian

Makanan Bayi dan Anak, dan juga dilakukan surveilance gizi, penyuluhan dan konseling gizi.

Dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan di wilayah pedesaan telah dilaksanakan Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/pustu serta jaringannya yang pembangunannya dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.80
Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Tahun Anggaran 2012-2015

No	Uraian	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Puskesmas yang berprestasi dan terakreditasi	3	9	20	0
2.	Pembangunan Gedung PONED (unit)	9	9	1	-
3.	Pembangunan Gedung Puskesmas (unit)	4	1	3	2
4.	Pembangunan Rumah Dinas Dokter	1	0	-	-
5.	Perbaikan Rumah Dinas Jabatan	1	1	-	-

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang

Tabel 2.81
Standarisasi Pelayanan Kesehatan Tahun 2011- 2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Sarana Kesehatan yang memenuhi Standar pelayanan					
	a. Rumah Sakit	16	16	19	19	20
	b. Klinik	230	230	493	247	297
	c. Puskesmas	48	50	50	50	50

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang

Tabel 2.82
Peningkatan Kualitas Pelayanan Rawat Jalan, Rawat Inap dan Rujukan Tahun 2011- 2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Persentase BP Puskesmas yang mempunyai protap pengobatan	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase Pasien rawat inap yang disembuhkan	85%	85%	87%	89%	87,3%
3.	Persentase pasien yang memanfaatkan rujukan puskesmas	2,05%	2,29%	3,20%	2,72%	2,85%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang

Semua puskesmas sudah memiliki protap pengobatan untuk pelayanan kesehatan dasar, tapi belum sesuai dengan standar permenpan atau permenkes sehingga tahun ini diadakan workshop sop sesuai dengan permenpan. Peserta terdiri dari perwakilan puskesmas yang mau diakreditasi tahun 2016 saat ini sedang tahap penyusunan SOP sesuai dengan standar yang ada dan disosialisasikan ke semua puskesmas dan akan dilakukan evaluasi secara berkesinambungan, sedangkan pengobatan gigi belum mempunyai protap pengobatan tahun ini akan dibuatkan sesuai dengan standar.

Persentase Pasien rawat inap yang disembuhkan hanya mencapai 87,3 % ada beberapa puskesmas memiliki data yang tidak lengkap, alat yang tidak memadai, obat yang terbatas serta kompetensi SDM yang terbatas sehingga sejak tahun 2014 dan tahun 2015 semua dokter telah dilatih kegawat daruratan pemenuhan alat kesehatan dan obat dengan menggunakan dana kapitasi di beberapa puskesmas.

Tabel 2.83
Peningkatan Kualitas Perawatan Kesehatan Masyarakat
Tahun 2011- 2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah KK rawan dibuat asuhan Keperawatan (Askep)	8.692	3.680	6.358	7.558	8.348
2.	Jumlah keluarga mandiri (KM) Tingkat IV	5.342	2.337	3.615	4.815	4.850
3.	Jumlah pasien yang memanfaatkan klinik terpadu graha semesta	65.353	68.358	70.105	71.305	90.534

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang

Jumlah KK rawan yang dibuat asuhan keperawatan (ASKEP) disetiap tahun terjadi peningkatan karena adanya dana BOK dan kapitasi sehingga perawat semangat membuat Askep melakukan kunjungan rumah keluarga rawan demikian juga pembinaan yang dilakukan perawat dengan tujuan keluarga yang dibina menjadi mandiri atau KM IV tetapi untuk menuju KM IV agak sulit dengan alasan indikator KM IV mengharuskan keluarga melakukan tindakan promotif secara aktif.

Jumlah Pasien yang memanfaatkan klinik terpadu graha semesta walaupun terjadi peningkatan baru mencapai 6 % dari pengunjung total dipuskesmas hal ini dikarenakan banyak pasien yang tidak mau dirujuk ke ruang konseling masih beranggapan membutuhkan waktu yang lama, belum memahami konsep pencegahan lebih baik dari mengobati dan pasien sehat tidak mau memanfaatkan klinik graha semesta karena masih memiliki pemahaman paradigma sakit bukan paradigma sehat sehingga dibutuhkan kegiatan sosialisasi secara berkesinambungan tentang manfaat graha semesta dan penyuluhan secara pribadi dengan menggunakan lembar balik serta contoh-contoh yang lebih lengkap.

Seiring dengan kebijakan pemerintah pusat dalam bidang kesehatan, dimana program Jaminan Kesehatan Nasional merupakan hal yang sudah diberlakukan mulai tahun 2014, dengan pengelola oleh Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS), RSUD Karawang mulai bulan Januari 2014 melayani pasien BPJS yang terdiri dari pasien PBI (Jamkesmas) dan Non PBI (PNS,TNI,POLRI dan Perusahaan yang sudah tergabung).

Total pembayaran pasien BPJS selama tahun 2015 sebesar Rp.113.519.245.082,00 (total pasien 111.977 orang), dengan rincian sebagai berikut :

NO.	Jenis Layanan	Jumlah Pasien	Jumlah Pembayaran (Rp)
1.	Rawat Jalan	93.641	28.196.675.700
2.	Rawat Inap	18.336	85.322.569.382
	TOTAL	111.977	113.519.245.082

Sedangkan pasien miskin yang tidak terdaftar BPJS, ditanggung oleh program Karawang Sehat dengan rincian jumlah pasien dan pembayaran sebagai berikut :

NO.	Jenis Layanan	Jumlah Pasien	Jumlah Pembayaran (Rp)
1.	Rawat Jalan	5.743	1.415.272.300
2.	Rawat Inap	1.481	6.702.967.800
	TOTAL	7.224	8.118.240.100

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Realisasi pembangunan peningkatan jalan dan jembatan kabupaten sepanjang minimal 80 Km pertahunnya. Pada tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam table berikut :

Tabel 2.84
Realisasi Program-program Peningkatan Jalan/Jembatan
Tahun 2011-2015

No.	Uraian	Realisasi				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Peningkatan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa(Km)	100,84	173,79	331,14	209,42	202.19
2	Pembangunan Jalan Kabupaten (Km)	21,18	20,13	-	-	-
3	Peningkatan Jembatan Kabupaten (Km)	-	0,07	0,03	0,14	0.55
4	Pembangunan Jembatan Kabupaten (Km)	0,119	0,404	0,772	-	1,09
5	Jumlah Pembangunan Jembatan, fly over, Underpass baru (unit)	-	16	24	3	54
6	Jumlah peningkatan Jembatan, fly over, Underpass (unit)	-	8	3	14	38
7	Panjang jalan penghubung pusat pengembangan wilayah (kolektor sekunder PKL/PPL dan antar PPL) (Km)	-	55,894	39,16	19,99	32.05
8	Jumlah jembatan penghubung lokasi strategis (unit) - Jemb. Pakisjaya - Pelebaran Jemb. Citarum Akses Tol Karawang Barat - Jemb. Ampera II - Jemb. Cigunungsari - Jemb. Sasak Loneng - Jemb. Ciderewak - Jemb. Cibulan-Bulan	-	7	5	3	7
9	Jumlah pemeliharaan jembatan (unit)	-	4	26	23	36

Sumber: Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Karawang

Pelaksanaan program pembangunan saluran drainase/Gorong-gorong minimal 2.000 M' pertahunnya, realisasinya pada tahun 2011- 2015 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 2.85
Realisasi Program-program Pembangunan Drainase/Gorong-gorong Tahun 2011-2015

No.	Uraian	Realisasi				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Pembangunan drainase/gorong-gorong (Km)	2,000	1,636	4,000	4,900	42.58

Sumber: Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Karawang

Pelaksanaan pembangunan turap/talud/bronjong minimal 1.000 M' pertahunnya, realisasinya pada tahun 2011- 2015 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 2.86
Realisasi Program-program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Tahun 2011-2015

No.	Uraian	Realisasi				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong (Km)	1,889	13,081	13,500	11,754	64.81

Sumber: Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Karawang

Tabel 2.87
Realisasi Program-program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan/Jembatan Tahun 2011-2015

No.	Uraian	Realisasi				
		2011	2012	2013	2014	2015
	Rehabilitasi /Pemeliharaan periodik Jalan (Km)	319,72	13,071	18,97	4,97	10,57
	Rehabilitasi /Pemeliharaan Rutin Jalan(Km)	-	60,374	75,40	24,23	21,28
	Rehabilitasi /Pemeliharaan periodik Jembatan, Fly over, Underpass (Km)	0,716	0,194	0,190	0,54	0,70

Sumber: Dinas Bina Marga & Pengairan Kabupaten Karawang

Tabel 2.88
Realisasi Program-program Peningkatan Sasaran Perencanaan dan Data Base Jalan, Jembatan serta Pengairan Tahun 2011-2015

No.	Uraian	Realisasi				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Penyusunan perencanaan jalan, jembatan dan pengairan (paket)	452	1.120	1.540	1.884	2.487
2	Pembangunan system informasi/database jalan, jembatan dan pengairan (paket)	-	7	12	-	2
3	Penyusunan DED perencanaan fisik tertentu (paket)	-	23	47	20	32

Sumber: Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Karawang

Kabupaten Karawang sebagai lumbung padi Jawa Barat bahkan nasional memiliki peran yang vital dalam program ketahanan pangan. Sebagai bentuk komitmen dan dukungan terhadap sektor pertanian, dilaksanakan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya minimal 40,00 km dan pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya minimal 40 km.

Beberapa kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sebagai upaya untuk menjaga status Kabupaten Karawang sebagai lumbung padi Jawa Barat diantaranya adalah pengembangan, pengelolaan pada daerah irigasi sesuai kewenangan kabupaten yaitu dengan uasan dibawah 1.000 ha.

Tabel 2.89
Realisasi Program-program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Tahun 2011-2015

No.	Uraian	Realisasi				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi (Km)	13,88	13,327	14,00	15,87	2,92
2	Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Km)	20,00	19,50	17,30	30,91	68,55

Sumber: Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Karawang

Tabel 2.90
Penyusunan dan Pemutakhiran Data Base Jaringan Irigasi Pengairan Tahun 2011-2015

No.	Uraian	Realisasi				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Penyusunan dan Pemutakhiran data base jaringan pengairan (paket)	-	1	1	-	-

Tabel 2.91
Pengendalian Banjir dan Penanganan Pantai Tahun 2011-2015

No	Uraian	Realisasi				
1	Wilayah Pengendalian Banjir (Km)	-	-	-	-	-
2	Wilayah penanganan Abrasi di pantai (Km)	-	0,600	0,400	-	0,41

Sumber: Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Karawang

Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai danau dan sumber daya air lainnya diperlukan untuk menjaga kelestariannya dalam rangka menjaga fungsinya untuk menyokong pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Hal tersebut sangat penting mengingat Kabupaten Karawang memiliki banyak sungai, situ serta sumber air tanah.

Tabel 2.92
Realisasi Program-program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumberdaya Air Tahun 2011-2015

No	Uraian	Realisasi				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Normalisasi saluran pembuang (Km)	10,77	69,001	15,00	32,68	4.48
2	Pembangunan pengamanan daerah pantai (Km)	-	0,600	0,400	-	0,41

Sumber: Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Karawang

Tabel 2.93
Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Tahun 2011-2015

No	Uraian	Realisasi				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Pembangunan jalan poros desa (Km)	-	77,25	81,76	74,44	108,92
2	Pemeliharaan jalan poros desa (Km)	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Karawang

Tahun 2015 penanganan infrastruktur jalan tetap menjadi salah satu prioritas utama pembangunan. Tidak hanya pembangunan infrastruktur jalan, dibangun juga infrastruktur jembatan di ruas jalan yang membutuhkan jembatan dan didalamnya termasuk pembangunan gorong-gorong/box culvert. Pada prinsipnya pembangunan jalan harus sebanding atau diikuti dengan jembatan pada ruas yang ditangani, karena merupakan satu kesatuan ruas jalan.

Pemerintah Kabupaten Karawang juga membangun infrastuktur dalam bidang pengairan irigasi yang di dalamnya adalah pembangunan/rehabilitasi/normalisasi sejumlah saluran dari mulai saluran sekunder, tersier dan saluran penunjang lainnya, di samping itu juga membangun bangunan lainnya seperti pintu air, embung/dam mini yang semuanya adalah untuk menunjang sistem pertanian, khususnya padi sawah yang

sangat erat hubungannya dengan produktivitas petani secara menyeluruh.

Tabel 2.94
Analisa Perbandingan Kinerja Sasaran Dinas Bina Marga dan Pengairan Tahun 2011-2015

No.	Uraian	Realisasi				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Terlaksananya peningkatan jalan kabupaten minimal 80 Km	100,48 Km	173,79 Km	199,50 Km	134,98 Km	202,28 Km
2	Terlaksananya rehabilitasi jalan dan bahu jalan kabupaten minimal sepanjang 40 Km	21,18 Km	93,575 Km	55,50 Km	4,97 Km	3,24 Km
3	Terlaksananya pemeliharaan rutin jalan kabupaten minimal 350 Km	319,72 Km	73,445 Km	46,50 Km	24,23 Km	21,28 Km
4	Terlaksananya pembangunan jalan desa (penyirtuan dan Rigid) minimal 100,00 Km	44,07 Km	20,13 Km	49,88 Km	74,44 Km	108,92 Km
5	Terlaksananya rehabilitasi/ pemeliharaan / pelebaran/ penggantian jembatan minimal 4 Unit	4 unit/ 716 M'	8 unit/ 230,30 M'	26 unit/ 152 M'	37 unit/ 728 M'	36 unit/ 532,8 M'
6	Terlaksananya pembuatan turap/ talud/ bronjong	1.889 M'	13.081 M'	13.500 M'	11.754 M'	89.518, 76 M'
7	Terlaksananya pembuatan/perbaikan assainerring/drainage minimal 2000 M	2.000 M'	1.636 M'	4.000 M'	4.900 M'	23.025, 55 M'
8	Terlaksananya pembangunan jembatan minimal 8 unit	119 M'	16 unit/ 404 M'	772 M'	3 unit/ 14 7 M'	53 unit/ 1. 094,3 M'
9	Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi minimal 100,00 Km	20,00 Km	19,50 Km	17,30 Km	30,91 Km	68,55 Km
10	Terlaksananya rehabilitasi/perbaikan jaringan irigasi minimal 25 Km	13, 88 Km	13,327 Km	14,00 Km	15,87 Km	2,92 Km
11	Terlaksananya pengerukan dan normalisasi jaringan irigasi minimal 10 Km	-	69,001 Km	15,00 Km	4,45 Km	202,16 Km
12	Terlaksananya pembuatan turap, talang air, pintu air, bangunan bagi, bending, saluran minimal 1 Km/ 6 unit dan pembinaan pengelolaan jaringan irigasi	6 unit	38 unit pintu air	25 unit pintu air	20 unit pintu air	16 unit pintu air
13	Terlaksananya rehabilitasi, pengerukan dan normalisasi sungai, saluran pembuang dan muara minimal 10 Km	10,77 Km	69,001 Km	15,00 Km	32,684 Km	71,470 Km

No.	Uraian	Realisasi				
		2011	2012	2013	2014	2015
14	Terlaksananya pembangunan pengaman daerah abrasi pantai minimal 800 M'	-	600 M'	300 M'	-	697,5 M'
15	Terlaksananya rekrutmen waker sebanyak 400 orang ; terlaksananya pembinaan waker sebanyak 400 orang	400 orang	400 orang	450 orang	-	400 orang
16	Terlaksananya pengadaan alat berat (Excavator dan Mesin Gilas)	-	-	-	9 unit	2 unit

Sumber : Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Karawang

Secara kuantitatif data kondisi infrastruktur jalan, jembatan, pengairan/jaringan irigasi hingga tahun 2015 dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 2.95
Kondisi Jalan, Jembatan dan Pengairan/Jaringan Irigasi di Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2015

STATUS	VOLUME (KM)	KELAS (TONASE)	BAIK (KM)	SEDANG (KM)	RUSAK (KM)	KET.
-Jalan Negara	69,516	I	51,22	10,97	7,32	
-Jalan Provinsi	47,927	III	33,55	9,59	4,79	
-Jalan Kabupaten	1.582,8	III	1.028,82	316,56	237,42	
-Jalan layang(Fly over)	2,8	III	2,52	0,28	-	
- Jalan Tol		Tol	36,37	1,12	-	
- Jalan Desa	37,495	-	475,75	264,31	317,17	
	1.057,23					
- Jembatan Negara	2,19		2,19	-	-	
- Jembatan Provinsi	0,16		0,16	-	-	
- Jembatan Kabupaten	2,55		1,61	0,61	0,33	
- Bendung	2,55		1,53	0,62	0,4	
- Bangunan Bagi/sadap dan bangunan lainnya	382		95	137	150	
- Saluran Induk	120		25	40	55	
- Saluran Sekunder	289,6		145,77	219,94	223,89	
- Citarum	60		51	6	3	
- Cibeet	35		-	-	-	
- Cigentis	20		-	-	-	
- Kali Cilamaya	30		-	-	-	
- Situ	12 buah		-	-	-	
- Saluran pembuang	912		182,40	456,00	273,60	
- Muara	27 buah		5	15	7	
- Pantai	76,42		1,31	30,00	45,1	

Sumber: Dinas Bina Marga & Pengairan Kabupaten Karawang

Tabel 2.96
Realisasi Kinerja Perencanaan Tata Ruang Tahun 2011-2015

No	Uraian	Realisasi				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah produk kebijakan tata ruang daerah yang dihasilkan	20 lokasi	29 lokasi	1. Penyusunan Studi Kelayakan, Masterplan dan DED Komplek Perkantoran.	1.Penyusunan RDTR dan Zoning Regulation 2.Kajian Akademis Tata Ruang dan Permukiman Kota Karawang.	1.Penyusunan RDTR dan Zoning Regulation, kawasan Cilamaya dan Rengasdengklok

No	Uraian	Realisasi				
		2011	2012	2013	2014	2015
				2. Masterplan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kab. Karawang 3. Penyusunan RDTR dan zoning Regulation Wilayah Kota Karawang. 4. Penyusunan Database Perumahan	3. Pembuatan Peta Garis Kawasan Perkotaan Kab. Karawang	2. Kajian Akademis Tata Ruang dan Permukiman Kota Karawang 3. Kajian Teknis IPLT, RTH, Pengelolaan Sampah, Pemakaman 4. Penyusunan Juklak Juknis Akta Pemisahan, Pertelaan dan Sertifikat Laik Fungsi

Sumber: Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang

Tabel 2.97
Realisasi Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang
Tahun 2011-2015

No	Uraian	Realisasi				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah taman kota yang mendapat penataan dan pemeliharaan	14 lokasi	14 lokasi	15 lokasi yaitu : 1. Taman Tugu Udang 2. Taman Depan kantor Imigrasi 3. Ruas Jembatan alun-alun 4. Taman Dinas Kesehatan 5. Taman persimpangan Badami 6. Taman Veteran 7. Taman Playover 8. Taman Alun-alun 9. Median Depan Kantor CPM 10. Taman gardu alun-alun 11. Taman Lampu merah depan RMK 12. Taman Rengasdengklok 13. Taman Lampu Merah Tanjungpura 14. Taman Lampu Merah Klari 15. Taman Bunderan Pabrik Es	23 lokasi yaitu al : 1. Taman Sepandan Rel Kereta Api Depan Pertokoan Hero. 2. Taman Depan Kantor Dinas Cipta Karya 3. Taman Median Jalan Negara (Tugu batas Karawang - Bekasi s.d Jembatan Citarum) 4. Taman Median Jalan Negara (Jembatan Citarum - Lampu Merah Terminal Tanjungpura) 5. Taman Lampu Merah Tol Karawang Timur 6. Taman median Jembatan Gantung Telukjambe 7. Taman Jembatan Gantung Telukjambe 8. Taman Median Depan Pos Gatur Lantar Gempol 9. Tama Tugu Udang (lanjutan) 10. Taman Median Depan BJB 11. Taman Pos Lantas Gempol 12. Taman Sepadan Rel Kereta Api di bawah Fly Over 13. Taman Depan Terminal 163 14. Taman Bundaran Perumnas Telukjambe Depan Masjid Raya/Tiang Sutet 15. Taman Median Jl. Negara (Lampu Merah Terminal Tanjungpura - Lampu Merah Jl Alternatif Tanjungpura)	37 lokasi antara lain : 1. Pembangunan dan Penataan Taman Median Jl. Gempol Sepadan Rel Kereta Api dengan Pos Lantas Gempol 2. Penataan Taman Pulau Jalan Badami 3. Pembangunan Taman Pulau Jl Perumnas Telukjambe Blok L dan M, Penataan Taman Pulau Jl Bunderan Perumnas Arah Desa Wadas dan penataan Taman Median Perumnas Telukjambe (Bunderan Sutet Sampai Dengan Bunderan Wadas) 4. Pembangunan dan Penataan Taman Rawasari 5. Penataan Taman Ibu (Pertigaan DINKES) 6. Penataan Taman Seroja dan Taman Depan Engsiutong 7. Pembangunan dan Penataan Taman Sari Ayu 8. Taman Tugu Padi 9. Taman dibawah Flyover Karawang Barat 10. Taman Median Sasak Misran 11. Penataan Bundaran Air Mancur (Lanjutan) 12. Penataan Taman Sempada Jalan Depan Mega M 13. Taman Sempadan Jembatan Citarum Bank BJB 14. Taman Sempadan Jalan Depan Terminal 163

No	Uraian	Realisasi				
		2011	2012	2013	2014	2015
					16. Taman Bundaran Air Mancur Pabrik Es (lanjutan) 17. Taman NNKBS (Lanjutan) 18. Taman Lampu Merah Jl. Alternatif Tanjungpura (lanjutan) 19. Taman Median Lampu Merah Klari (lanjutan) 20. Tamn Pintu Rel Kereta Api Jln. Otista 21. Penataan Taman Alun-alun. 22. Penataa RTH Jl. Pasundan 23. Penataan Taman Kota di pertigaaan Jl Menuju Terminal Cikampek	15. Taman Median Jalan Depan AB 16. Pemagaran Taman Ade Irma Suryani 17. Taman Median Depan Jembatan Purwasari Depan Gedung Bulog 18. Taman Pulau jalan Jembatan Gantung Telukjambe 19. Taman Sempadan jalan depan Sport Hall 20. Taman Pulau Adiarsa 21. Rehabilitasi Taman Veteran 22. Penataan Taman Median Jalan Tanjungpura 23. Pembangunan dan Penataan Taman Jl. Siliwangi dan Taman Sudut APIL DPRD dan Sudut APIL Kantor KEMENAG Kabupaten Karawang 24. PenataanTaman Interchange Tol Karawang Timur 25. Penataan Taman Gading Elok 26. Penataan Taman Situ Gempol 27. Penataan Taman Sempadan Jl. Depan Kupoh 28. Penataan Taman Lapang Serbaguna Kepuh 29. Penataan Taman Alun-alun Lanjutan 30. Penataan Taman Bunderan Peruri 31. Penataan Median Rel Kereta Api depan Kantor Dinas Cipta Karya (lanjutan) 32. Taman Bunderan Depan Mega Mall Karawang 33. Penataan Taman Rekreasi Lapang Karangpawitan 34. Penataan Taman Makam Pahlawan Pancawati 35. Taman Makam Pahlawan di Perumnas Telukjambe 36. Pembangunan dan penataan Taman Pulau Jalan Depan Plaza dan Median di bawah Fly Over Cikampek 37. Taman Median Jalan Jembatan Tamelang Cikampek
2	Jumlah lapangan olah raga masyarakat di pusat kegiatan	6 lokasi	6 lokasi	11 lokasi yaitu : 1. Lapang Desa Wargasetra Kec. Tegalwaru 2. Lapang Desa Kertasari Kec. Pangkalan 3. Lapang Desa Pangulah Utara kec. Kotabaru 4. Lapang Desa Pangulah Selatan Kec. Kotabaru	Sarana Olah Raga : 12 lokasi 1. Pemb. Sarana Panjat Tebing 2. Pemb. Gedung Olah Raga Kec. Tirtajaya 3. Penataan Lapang Serba Guna (lanjutan)	12 lokasi antara lain : 1) Penataan Lapang serba guna (lanjutan) 2) Emplacement Lapang Karangpawitan 3) Penataan Ruang Publik Perum Bumi Taruno Permai Adiarsa

No	Uraian	Realisasi				
		2011	2012	2013	2014	2015
				5. Lapang Desa Cengkong Kec. Purwsari 6. Lapang Desa Lemahkarya Dsn. Wagir Jengkol Kec. Tempuran 7. Lapang Desa Medan Karya Kec. Tirtajaya 8. Lapang Dsn. Kramat Jaya Kec. Batujaya 9. Lapang Bola Lampean 10. Ds. Wanci Mekar Kec. Kotabaru 11. Lapang Karangpawitan Karawang	4. Pengarugan Lapang Bola Perseto Dsn.Krajan Ds. Cialongsari Kec. Klari 5. Penataan Lapang Sepakbola Ds. Wancimekar Kotabaru 6. Penataan Lapang Bola Dsn. Sukatani Ds.Pangulah Utara Ktbr 7. Penataan lapang Bola Dsn. Gandoan Ds.Pangulah Selatan Kec. Kotabaru 8. Penurapan Lapang Sepak Bola Dsn. Lampean Ds. Kedawung Lemahabang 9. Pengarugan Lapang Bola Ds. Lemahduhur Kec. Tempuran 10. Pengarugan Lapang Bola Ds. Bolang Trtjy 11. Penataan Lapang Olah Raga Perum Gading Elok Krw Timur 12. Pembuatan Tribun Lapang Bola Ds. Pangulah Selatan Ktbr	4) Pengarugan Lapangan Sepak Bola Astana Cinangoh Gg. Beo Karawang Wetan 5) Pemagaran Lapangan Sepak Bola Raseta Kp. Buniagi Seri RT 02/RW 01 Karawang Timur 6) Penataan Lapangan Sepak Bola Perseto Cibalongsari Klari 7) Penataan lapangan Sepak Bola Tegal Renceng Kp. Kidang Ranggah, Cintaasih Pangklan 8) Penataan Lapangan Sepak Bola Dsn. Sukamaju, Cikampek Timur, Cikampek 9) Panataan Lapang Sepak Bola Kec. Kotabaru (Lanjutan), Wancimekar, Kotabaru. 10) Pemagaran dan Drainase Lapangan Sepak Bola Pangulah Selatan, Kec. Kotabaru 11) Pemagaran Lapangan Sepak Bola, Pangulah Utara Kec. Kotabaru. 12) Pengarugan Lapangan Sepak Bola Dsn. Kelantarik, Lemahabang.
3	Jumlah bangunan yang memiliki nilai sejarah yang mendapat penataan	4 TPU bersejarah	4 TPU bersejarah	2 TPU bersejarah : 1. Makam Syech Jakaria Pakisjaya 2. Taman Makam Pahlawan Pancawati Kec. Klari	3 lokasi : 1. Penataan Komplek Makam Bupati Karawang, Manggungjaya Cikul 2. Penataan Taman Makam Pahlawan Pancawati 3. Makam Mbah Ru'biah Cikampek Pusaka Ckp	12 Lokasi yaitu : 1. Taman Makam Pahlawan Perumnas Telukjambe 2. Makam Pejuang Siliwangi Kec. Tegalwaru 3. Makam Mbah Nagasari, Kec. Karawang Barat 4. Makam Wirasaba, Kec. Telukjambe Timur 5. Makam Pejuang Kemerdekaan Kecamatan Rengasdengklok 6. Komplek Makam para Bupati Manggungjaya, Cilamaya Kulon 7. Makam Raden Anom Wirasuta Tegalwaru 8. Makam Mbah Jabig Ds.Cikampek Utara 9. Makam Mbah Timbel Cibungur, Krw Wetan, Krw Timur 10. Makam Jati Ugel Karangjaya Tirtamulya 11. Makam Mbah Dalem Adiarsa Karawang Barat 12. Makam Mbah Kirasimah Ciptasari Pangkalan

No	Uraian	Realisasi				
		2011	2012	2013	2014	2015
4	Jumlah kebijakan produk tata ruang daerah yang dihasilkan (IMB)	1.161 lembar	1.302 lembar	1. 880 rekomendasi IMB 2. 60 rekomendasi siteplan	1. 1.135 Rekomendasi IMB, 2. 50 Rekomendasi Siteplan	1. 1.365 Rekomendasi IMB 2. 148 Rekomendasi Siteplan untuk kegiatan perumahan dan non perumahan
5	Jumlah PJU yang dibangun	371 titik	764 titik	1.481 titik	1.085 Titik	1.200 Titik
6	Luas ruang terbuka hijau di Karawang	1.000 M ²	1.000 M ²	1.000 M ²	23.699,15 M ²	30.966,6 M ²

Sumber: Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perumahan merupakan salah satu aspek penting yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Karawang, yang dijabarkan sebagai berikut: Terwujudnya tata ruang yang mampu memberikan akses terhadap tumbuh dan berkembangnya aktifitas sosial ekonomi masyarakat secara memadai dan seimbang antara tata guna lahan, sistem transportasi, bangunan privat dan publik serta jaringan utilitas masyarakat. Hal tersebut kemudian diarahkan pada:

- 1) Pembangunan kawasan permukiman dan perumahan yang lebih murah dan sebesar-besarnya melibatkan peran swasta;
- 2) Manajemen pengelolaan air bersih guna peningkatan kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan air bersih jaringan pipa melalui pembangunan instalasi produksi dan jaringan pipa distribusi yang baru;
- 3) Peningkatan kemampuan jangkauan instalasi penjernihan air guna menjamin kualitas air bersih;
- 4) Rehabilitasi seluruh jaringan pipa distribusi untuk mengurangi kebocoran;
- 5) Pencegahan dan penanggulangan pencemaran terhadap sumber air baku; dan
- 6) Pembangunan prasarana permukiman jalan lingkungan guna memberikan akses bagi penduduk setempat melakukan aktifitas sosial ekonomi dan menghubungkan pada jalan kolektor.

Bidang perumahan di Kabupaten Karawang menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, hal tersebut ditunjukkan dengan bergairahnya sektor properti/perumahan yang ada di Kabupaten Karawang selama empat tahun terakhir.

Selain itu penataan dan perbaikan lingkungan telah dilaksanakan setiap tahun dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan jalan lingkungan, perbaikan drainase, perbaikan rumah tidak layak huni dan plesterisasi.

Tabel 2.98
Pembangunan Bidang Perumahan Tahun 2011-2014

No	Uraian	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
1	Penyedia Perumahan (developer)	20 developer	18 developer	28 developer	28 developer
2	Rehabilitasi rumah tidak layak huni (unit)	-	155 unit	670 unit (BSPS)	631 unit (BSPS)
3	Pemasangan jaringan distribusi air bersih	6.063 M'	30.242 M'	1.Ciampel = 1.266 SR 2. Jatisari = 518 SR 3. Pedes = 401 SR	Total : 55 paket (126 unit) 1. Karawang Barat : 1 pkt (2 unit) 2. Telukjambe Timur : 1 pkt (2 unit) 3. Telukjambe Barat : 1 pkt (2 unit) 4. Tegalwaru : 7 paket (1 unit + pengadaan pipa 50 mm untukSR : 6 pkt) 5. Klari : 3 pkt (4 unit + pompa centrifugal bank. Bak 50 m3) 6. Ciampel : 1 pkt (pipa PVC dia 50 mm) 7. Pangkalan : 1 pkt (pipa dia 50 mm)

No	Uraian	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
					8. Jayakarta : 1 pkt (3 unit) 9. Tirtajaya : 1 pkt (2 unit) 10. Pakisjaya : 1 pkt (2 unit) 11. Cibuaya : 2 pkt (6 unit) 12. Pedes : 2 pkt (6 unit) 13. Kutawaluya 1 pkt (3 unit) 14. Cikampek : 2 pkt (5 unit) 15. Cilamaya Wetan : 3 pkt (8 unit) 16. Jatisari : 3 pkt (9 unit) 17. Tirtamulya : 1 pkt (3 unit) 18. Rawamerta : 2 pkt (3 unit) 19. Cilamaya Kulon : 6 pkt (19 unit) 20. Tempuran : 6 pkt (15 unit) 21. Lemahabang 3 pkt (9 unit) 22. Telagasari : 2 pkt (5 unit) 23. Cilebar : 2 pkt (7 unit) 24. Batujaya : 2 pkt (4 unit) 25. Purwasari : 1 pkt (2 unit)
4	Pembangunan MCK umum (unit)	8 unit	28 unit	39 unit	26 unit
5	Jumlah pemeliharaan jalan lingkungan dan jalan setapak (japak)	4 wilayah UPTD	4 wilayah UPTD	4 wilayah UPTD	4 wil UPTD = 3,667 km
6	Peningkatan Jalan Lingkungan (Km)	59,309 km	79,469 km	123,667 km	175,978 km

No	Uraian	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
7	Jumlah unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah	235.337 unit	10.257 unit (3 kec.)	234.924 unit	120.896 unit
8	Jumlah pembangunan rumah layak huni (rumah sederhana sehat)	-	413 unit	154 unit	297 unit

Sumber: Dinas Ciptakarya Kabupaten Karawang

e. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Sistem politik dalam negeri di Indonesia dewasa ini mengarah pada proses demokratisasi yang membawa konsekuensi pada peran dan posisi masyarakat sebagai elemen penting penunjang penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pembangunan sistem politik yang demokratis tersebut memberikan ruang yang semakin luas bagi perwujudan keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai upaya pembangunan sistim politik yang demokratis, khususnya dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, Pemerintah Kabupaten Karawang telah melaksanakan program-program diantaranya : 1) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan; 2) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan; 3) Program Pendidikan Politik Masyarakat; 4) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan; 5) Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal; 6) Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan; 7) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat.

Berdasarkan pelaksanaan program-program tersebut, maka hasil-hasil pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dalam kurun waktu tahun 2011-2014 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini.

Tabel 2.99
Perkembangan Bantuan Partai Politik
Tahun 2011-2014 (Rp.)

No.	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	DEMOKRAT	169.007.000	169.007.000	169.007.000	103.853.306	103.853.306
2.	PPP	39.162.000	39.162.000	39.162.000	50.764.606	50.764.606
3.	PDI-P	173.679.000	173.679.000	173.679.000	211.084.336	211.084.336
4.	PKS	84.510.000	84.510.000	84.510.000	71.707.920	71.707.920
No.	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
5.	PAN	32.516.000	32.516.000	32.516.000	63.954.832	63.954.832
6.	GOLKAR	154.623.000	154.623.000	154.623.000	201.596.576	201.596.576
7.	PKB	49.844.000	49.844.000	49.844.000	102.263.190	102.263.190
8.	PBB	51.044.000	51.044.000	51.044.000	56.418.578	56.418.578
9.	GERINDRA	72.661.000	72.661.000	72.661.000	162.480.944	162.480.944
10.	HANURA	44.221.000	44.221.000	44.221.000	59.472.578	59.472.578
11.	PBR	12.056.000	12.056.000	12.056.000	-	-
12.	NASDEM	-	-	-	60.303.266	60.303.266

Sumber: Kantor Kesbangpol Kabupaten Karawang

Tabel 2.100
Pendidikan Politik Masyarakat Tahun 2011-2014

No.	Uraian	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
1.	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu	-	-	-	-
2.	Tingkat penyelenggaraan pendidikan politik oleh partai politik	-	-	-	-

Sumber: Kantor Kesbangpol Kabupaten Karawang

Tabel 2.101
Rekapitulasi Keberadaan Orkemas, Yayasan dan TKA di
Kabupaten Karawang Tahun 2011-2014

No.	Organisasi/Perorangan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	ORKEMAS	610	642	74	111	126
	J U M L A H	610	642	74	111	126

Sumber: Kantor Kesbangpol Kabupaten Karawang

Keterangan: Validasi data orkesmas yang ada di Kantor Kesbangpol Kabupaten Karawang dari tahun 2013 sampai dengan tanggal 5 Juni 2015.

Tabel 2.102
Rekapitulasi Tenaga Inti Linmas se-Kabupaten
Karawang Tahun 2011-2014

No.	Uraian	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
1.	Kasatlinmas Kecamatan	30	30	30	30
2.	Anggota Linmas Inti Desa/Kelurahan	3.090	3.090	3.090	3.090

Sumber: Kantor Kesbangpol Kabupaten Karawang

Tabel 2.103
Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman
Masyarakat dan Pencegahan Tindakan Kriminal se-
Kabupaten Karawang
Tahun 2011-2014

No.	Uraian	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah unjuk rasa	63	78	93	63
2.	Rasio jumlah polisi pamong praja per jumlah penduduk	2.000.000 /334	2.000.000 /332	2.000.000 /328	2.200.000 /323
3.	Jumlah penanganan pelanggaran perda	65	80	118	154
4.	Jumlah penegakan Perda Yustisial	42	345	219	75

Sumber: Sat Pol PP Kabupaten Karawang

Tabel 2.104
Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
(Pekat) Tahun 2011-2014

No.	Uraian	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah penertiban/operasi penyakit masyarakat (Pekat)	8 kali; 61 PSK	40 kali; 384 PSK, 350 VCD/DVD Porno	40 kali: 124 PSK,102 Praktek mesum 890 VCD/DVD Porno	40 kali: 174 PSK/asusila, 785 VCD/DVD Porno

Sumber: SatPol PP Kabupaten Karawang

Tabel 2.105
Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Tahun 2011-2014

No.	Uraian	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah penegakan perda	96	178	219	229

Sumber: Sat Pol PP Kabupaten Karawang

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok :
 “Membantu Pemerintah Daerah menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati”. Implementasi tugas tersebut dilaksanakan melalui fungsi pengawasan, penertiban dan penindakan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, serta melakukan pemeriksaan dan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melanggar peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya.

Dalam menjalankan tugas pokok untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kebijakan yang diambil oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah :

- a. Mewujudkan lembaga Satuan Polisi Pamong Praja yang proporsional, efektif dan efisien dalam pelaksanaan trantibum dan penegakan Perda, melalui Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

- b. Mewujudkan aparatur Pol PP dan PPNS yang memiliki kompetensi untuk menunjang pelaksanaan trantibum dan penegakan Perda, untuk mencapai kebijakan tersebut dilaksanakan melalui program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan:
 - a) Peningkatan Kapasitas Pegawai
 - b) Pelatihan Teknis Tugas Pokok dan Fungsi
- c. Terwujudnya Ketentraman Masyarakat, Tertib Hukum dan Tertib Sosial; untuk mencapai kebijakan tersebut dilaksanakan melalui program :
 - 1) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan Tindak Kriminal dengan kegiatan :
 - a) Penegakan Perda Yustisial
 - b) Pengawasan Terhadap Badan Hukum dan Perorangan dalam Penegakan Perda dan Perbup
 - c) Penanggulangan Masalah Kenakalan Remaja
 - d) Pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang
 - e) Pemeliharaan Gatur dan Trantibum
 - 2) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) dengan kegiatan Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat (Pekat)
- d. Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan, untuk mencapai kebijakan tersebut dilaksanakan melalui program :
 - 1) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan kegiatan :
 - a) Penertiban PKL, Bangunan Liar, Parkir Liar, Gepeng dan Reklame/Baligo
 - b) Operasi Gerakan Disiplin Daerah (GDD)
 - c) Kegiatan Operasi Penertiban Alat Peraga kampanye (APK)
 - 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Kemanan, dengan kegiatan Sosialisasi Trantibum.

- e. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan Perda.
- f. Mendorong sistem koordinasi perencanaan dan pelaksanaan yang intensif antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan aparat penegak hukum lainnya serta kecamatan untuk mendukung tugas-tugas dibidang ketentraman dan ketertiban umum, serta penegakan Perda dan peraturan pelaksanaannya.

f. Sosial

Pembangunan bidang sosial masih terus perlu ditingkatkan untuk mencapai hasil yang diinginkan, hal tersebut ditandai dengan usaha Pemerintah Kabupaten Karawang dalam pembangunan sosial yang digambarkan tabel di bawah ini.

Tabel 2.106
Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 2011-2014

No	Uraian	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah penduduk miskin perkotaan	139.675	256.629	-	106.260
2.	Jumlah penduduk miskin perdesaan	401.134	284.993	-	600.728
3.	Jumlah KK penyandang masalah sosial	177.489	185.815	189.121	214.261
4.	Jumlah Anak Jalanan	295	316	334	329
5.	Jumlah Gepeng	330	353	142	152
6.	Jumlah Panti Asuhan	40	40	51	52
	- Terdaftar	28	28	37	42
	- Tidak Terdaftar	12	12	14	10
7.	Panti Sosial Tresna Werda	1	1	1	1
8.	Sarana Rehabilitasi Sosial	2	2	2	2
9.	Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial, pemberdayaan serta perlindungan dan jaminan sosial	-	-	50%	66,88%

Sumber : Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Karawang

Tabel 2.107
Data Bidang Sosial 2011-2014

No	Uraian	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah Panti Asuhan				
	- Terdaftar	28	28	37	42
	- Tidak Terdaftar	12	12	14	10
2.	Panti Sosial Tresna Werda	1	1	1	1
3.	Sarana rehabilitasi sosial	2	2	2	2

Sumber : Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Karawang

Tabel 2.108
Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMK)
Tahun 2011-2014

No.	Jenis PMKS	2011	2012	2013	2014
1.	Balita terlantar	773	798	596	761
2.	Anak terlantar	5.764	5.849	5.447	6.125
3.	Anak nakal	599	664	599	660
4.	Wanita rawan sosial ekonomi	19.665	19.873	17.830	19.147
5.	Korban tindak kekerasan	141	233	25	391
6.	Lanjut usia terlantar	27.129	27.385	19.350	21.078
7.	Penyandang cacat	8.031	8.082	5.784	6.364
8.	Wanita Tuna Susila	278	299	158	158
9.	Pengemis	125	137	72	82
10.	Gelandangan	175	201	70	70
11.	Eks Napi	1.081	1.189	105	110
12.	Korban NAPZA	127	308	21	20
13.	Keluarga fakir miskin	177.489	186.079	155.212	176.747
14.	Keluarga dengan kondisi perumahan dan lingkungan tidak layak	36.243	38.377	27.298	29.923
15.	Korban bencana alam	2.638	7.650	238.275	465.987
16.	Korban bencana sosial	58	5.695	275	122
17.	Pekerja migran bermasalah	64	70	243	372
18.	ODHA	213	238	327	221
19.	Anak jalanan	301	326	334	329

Sumber: Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana Kab. Karawang

Tabel 2.109
Data Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
Tahun 2011-2014

No.	Jenis PMKS	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
1.	Pekerja sosial masyarakat (PSM)	1.258	1.258	1.545	1.545
2.	Karang Taruna	261	390	309	309
3.	Organisasi Sosial	40	40	51	52
4.	Dunia usaha bidang kesos	185	185	165	165
5.	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	30	30	30	30

No.	Jenis PMKS	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
6.	Keperintisan dan kepahlawanan	102	106	8	6
7.	Taruna siaga bencana (Tagana)	60	60	60	60

Sumber: Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana Kab. Karawang

Tabel 2.110
Capaian Kinerja Kesejahteraan Rakyat Tahun 2011-2014

No	Uraian	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
1	Jumlah Rakor pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan	-	1	5	-
2	Jml kasus penanggulangan kekerasan terhadap perempuan	-	-	-	-
3	Jml BAZ dan LAZ yang dibina	-	31	31	-
4	Jumlah tanah waqaf yang disertifikasi	21	30	-	40
5	Jumlah calon jamaah haji Kab. Karawang	1.978	2.094	1.720	1.750
6	Jumlah penyuluh agama honorer yang dibina	237	237	237	237
7	Jumlah kader khotib dan mubaligh yang dibina	1.729/1.033	1.729/1.033	1.729/1.033	-
8	Jumlah penderita HIV/AIDS di Kab. Karawang	270	283	327	-
9	Jumlah masjid yang mendapat bantuan	796	111	1.597	1.115
10	Jumlah TPA/TKA yang mendapat bantuan	292	147	266	822
11	Jumlah pondok pesantren yang mendapat bantuan	224	336	132	16
12	Jumlah majlis ta'lim yang mendapat bantuan	854	356	864	414
13	Jumlah guru TPA, MI, MDA, MTs dan guru ngaji yang mendapatkan bantuan honor	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Jumlah kegiatan keagamaan yang mendapat bantuan	122	100	1.000	-
15	Jumlah PKK yang mendapat bantuan	-	-	1	-
16	Jumlah organisasi wanita (GOW) yang mendapat bantuan	30	30	30	-

No	Uraian	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
17	Jumlah anak asuh GN-OTA yang mendapat bantuan	-	-	-	-
18	Jumlah organisasi keagamaan yang mendapat paket idul fitri	-	-	5	5
19	Jumlah guru agama MDA yang mendapat dana stimulan/subsidi	1.500	1.500	1.500	1.500
20	Jumlah pelajar dan mahasiswa dari umum yang mendapat bantuan keuangan	186	-	-	-

Sumber: Bagian Kesejahteraan Rakyat, Setda Kabupaten Karawang

2.5.2. Fokus Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Tenaga Kerja

Kesempatan kerja yang tersedia saat ini tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja yang ada, belum terserapnya pencari kerja oleh lapangan kerja yang ada menyebabkan tingginya angka pengangguran di Kabupaten Karawang. Tingginya angka pengangguran tersebut disebabkan:

- a. Rendahnya keterampilan yang dimiliki para pencari kerja;
- b. Tingginya migrasi masuk pencari kerja dari luar Kabupaten Karawang;
- c. Sebagian besar perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Karawang adalah perusahaan yang bersifat padat modal dan padat teknologi;
- d. Lemahnya daya inovatif dan wira usaha;
- e. Sektor primer subsisten dan monokultur;
- f. Kebijakan ekonomi fiskal pemerintah.

Kebijakan yang ditempuh dalam upaya menanggulangi pengangguran adalah peningkatan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan kemampuan dan keterampilan, perluasan kesempatan kerja dan berusaha serta perlindungan tenaga kerja dalam hubungan industrial yang harmonis. Berikut ini adalah

beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja :

Tabel 2.111
Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2011-2014

No.	Uraian	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
1.	Pelatihan peningkatan keterampilan kerja (org)	512	1.552	2.000	1.223
2.	Wira usaha baru (org)	84	98	40	189
3.	Penempatan Tenaga Kerja (org)	54.692	7.997	12.000	12.693
4.	Perluasan kesempatan kerja (HOK)	315	98	172	145
5.	Penyelesaian kasus perselisihan (kasus)	94	90	52	40
6.	Pengawasan Tenaga Kerja (NHP)	293	300	460	700

Sumber: Disnakertrans Kabupaten Karawang

Tabel 2.112
Data Ketenagakerjaan Tahun 2011 s.d. 2014

No.	Uraian	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah Angkatan kerja (org)	978.507	1.033.921	970.935	1.069.036
2.	Pencari kerja yang terdaftar (org)	73.443	28.443	21.228	24.098
3.	Jumlah lowongan kerja yang tersedia (org)	55.165	8.567	4.886	13.991
4.	Tenaga kerja yang ditempatkan (org)	54.692	7.997	12.000	12.693

Sumber : Disnakertrans Kabupaten Karawang

Tabel 2.113
Komposisi Penduduk Kabupaten Karawang
Tahun 2011-2014

No	Indikator	2011	2012	2013	2014
I.	Jumlah Penduduk	2.168.710	2.207.181	2.230.641	2.250.120
II.	Penduduk Usia Kerja	1.557.876	1.580.712	1.598.498	1.621.766
	Angkatan Kerja :	978.507	1.033.921	970.935	1.069.036
	- Penduduk yg bekerja	880.087	917.556	875.213	960.439
	- Penduduk yg mencari kerja (penganggur)	98.420	116.365	95.722	108.597
	- Persentase penganggur (%)	10	11,2	9,86	10.15
	Bukan Angkatan Kerja	579.369	546.791	627.563	552.730

Sumber : Disnakertrans Kabupaten Karawang

Tabel 2.114
Data Ketenagakerjaan Tahun 2011 s.d. 2014

No.	Tahun	Angkatan Kerja		Bekerja		Pengangguran	
		Laki-laki	Wanita	Laki-laki	Wanita	Laki-laki	Wanita
1.	2011	665.268	313.239	599.211	280.876	66.057	32.363
2.	2012	688.945	344.976	612.186	305.376	76.759	39.606
3.	2013	695.869	275.066	627.531	247.682	68.338	27.384
4.	2014	714.035	355.001	642.790	317.649	71245	37.357

Sumber: Disnakertrans Kabupaten Karawang

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 2.115
Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Tahun 2011 s.d. 2015

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah PEKKA	19	21	22	25	27
2.	Jumlah Kota Layak Anak	1	1	1	1	1

Sumber: BKBPP Kabupaten Karawang

Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak bertujuan untuk memperkuat kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender (PUG) dan anak (PUA) di berbagai bidang pembangunan baik di tingkat nasional maupun di daerah. Beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak adalah melalui pengembangan materi dan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi tentang kesetaraan dan keadilan gender dan kesejahteraan dan perlindungan anak, peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, termasuk pusat studi wanita/gender dan lembaga-lembaga penelitian, pemerhati dan pemberdayaan anak. Selain itu juga perlu didukung melalui berbagai kebijakan dalam rangka penguatan kelembagaan PUG dan PUA serta penyusunan mekanisme perencanaan, pemantauan dan evaluasi PUG dan PUA baik di tingkat nasional maupun daerah. Pelaksanaan program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan

Anak pada tahun 2011 sampai dengan 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.116
Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
di Kab. Karawang Tahun 2011 s.d. 2015

No	Nama Kegiatan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pengarusutamaan Gender					
	- Pembentukan dan pembinaan desa P2WKSS	1	1	1	1	1
	- Pembentukan dan pembinaan kelompok PRIMA	22	32	42	52	57
	- Pembentukan dan pembinaan kelompok PEKKA	19	21	22	25	27
	- Jumlah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan perempuan dan Anak (P2TP2A)	1	1	1	1	1

Sumber: BKBPP Kabupaten Karawang

Peningkatan kualitas hidup, peran dan kedudukan perempuan di berbagai kehidupan dan pembangunan serta peningkatan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi merupakan tujuan dari program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan. Hal tersebut dilakukan dalam bentuk peningkatan kualitas hidup perempuan melalui aksi afirmasi, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, hukum, ketenagakerjaan, sosial, politik, lingkungan hidup dan ekonomi, serta peningkatan upaya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, termasuk upaya pencegahan dan penanggulangannya. Pelaksanaan komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) dan pengembangan penyempurnaan perangkat hukum dan kebijakan dalam peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan sangat diperlukan, pembangunan pusat pelayanan terpadu berbasis rumah sakit berbasis masyarakat sebagai sarana perlindungan perempuan korban kekerasan, termasuk perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga serta peningkatan peran masyarakat dan media dalam penanggulangan.

Tabel 2.117
Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kab. Karawang Tahun 2011 s.d. 2015

No	Nama Kegiatan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Perlindungan Perempuan dan Anak					
	- Jumlah <i>trafficking</i> perempuan dan anak	18	17	8	19	3
	- Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga	3	2	11	30	31
2.	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan tindak pidana perdagangan orang	-	1.020	1.272	1.302	1012
3.	Jumlah rumah aman di tingkat kecamatan	15	15	15	15	15
4.	Jumlah pusat pelayanan perlindungan perempuan dan anak tingkat Kabupaten	1	1	1	1	1

Sumber: BKBPP Kabupaten Karawang

c. Pertanahan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004, serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, bahwa bidang pertanahan merupakan kewenangan wajib yang harus dilaksanakan oleh daerah (pemerintah kabupaten/kota) akan tetapi masalah penyerahan Personil, Pembiayaan, Perlengkapan dan Dokumentasi (P3D) Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang belum dilaksanakan, setelah dikeluarkannya Keppres Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.

Pelaksanaan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Karawang, pada periode tahun 2011-2014 telah dilaksanakan dalam hal pemberian Surat Ijin Lokasi dan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum dan pemberian sertifikat hak atas tanah yaitu:

Tabel 2.118
Ijin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Sertifikat Hak Atas Tanah
Tahun 2011-2014

Uraian	Tahun			
	2011	2012	2013	2014
Ijin Lokasi dan Penetapan Lokasi		51 buah		
• Ijin lokasi perumahan	25 buah; luas = 1.216.276 m ²	17 buah	41 Buah 2.652.918 M ²	18 Buah 1.650.508 M ²
• Ijin lokasi industri	27 buah; luas = 1.857.238 m ²	28 buah	61 Buah 32.489.170 M ²	28 Buah 5.815.623 M ²
• Ijin lokasi jasa	12 buah; luas = 94.133 m ²	6 buah	64 Buah 1.677.232 M ²	28 Buah 4.062.603 M ²
• Penetapan lokasi	15 buah; luas = 336.306 m ²	7 buah; luas = 16.595 m ²	6 Buah 21.461 M ²	29 Buah 244.906 M ²
• Perubahan lampiran Peta lokasi	1	1	-	-
Sertifikat Hak Atas Tanah	391.743 bidang; luas = 141.972,88 Ha	392.579 bidang, luas = 142.272,24 Ha	401.133 bidang	658.178 bidang
• Hak milik	360.848 bidang; luas = 60.569,19 Ha	361.584,57 bidang, luas = 60.584,57 Ha	49 Bidang 146.561 M ²	61.155,72 ha, 365.639 sertifikat
• Hak Guna Bangunan (Perorangan)	30.125 bidang; luas = 79.786,17 Ha	29.829 bidang, luas = 80.064,12 Ha	25 Bidang 19.739 M ²	80.938 ha 33.869 sertifikat
• Hak Guna Bangunan (Badan Hukum)			227 Bidang 4.369.864 M ²	
• Hak pakai	391.743 bidang; luas = 141.972,88	789 bidang, luas = 1.623,55 Ha	25 Bidang 209.349 M ²	1.655,07 ha 830 sertifikat
• Hak Guna Usaha	-	-	-	77,34 ha 57 sertifikat
• Hak Pengelolaan	-	-		75,23 ha 42 sertifikat

Sumber: BPN Kabupaten Karawang dan BPMPT Kabupaten Karawang

Tabel 2.119
Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah Tahun 2011-2014

No	Uraian	Jumlah			
		2011	2012	2013	2014
1	Jumlah Kecamatan yang diinventarisasi :				-
	a. Tanah-tanah Garapan	-	132.95.465 m ²	2.997.767 m ²	-
	b. Tanah Kosong	-	2.151.949.096 m ²	117.553 m ²	-

Sumber: Bagian Pertanahan Setda Kabupaten Karawang

d. Lingkungan Hidup

Pembangunan di Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Karawang masih memerlukan perhatian untuk mengantisipasi semakin meningkatnya pembangunan di segala bidang di Kabupaten Karawang, sehingga manfaat yang dapat diambil dari pembangunan tersebut dapat maksimal dan dampak negatif yang timbul dapat diminimalisir semaksimal mungkin.

1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Tabel 2.120
Capaian Kinerja Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Tahun 2011-2014

No	Uraian	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
1	Tersedianya peta rawan bencana	-	-	1	-
2	Jumlah penanganan pencemaran dan kerusakan lingkungan (kasus)	8	11	26	26
3	Terlaksananya koordinasi adipura	12 OPD/46 titik pantau adipura	12 OPD/46 titik pantau adipura	12 OPD/46 titik pantau adipura	12 OPD/46 titik pantau adipura
4	Tersedianya PPLH (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup)	-	-	3	-
5	Tersedianya Perda Lab Lingkungan	-	-	Prolegda 2014	Tahap pemba hasan Kemen keu
6	Jumlah industri yang menerapkan produksi bersih	50 perusahaan teridentifikasi	3 UKM	20 perusahaan teridentifikasi	-
7	Jumlah industri yang taat terhadap pengelolaan lingkungan hidup	6	8	10	14
8	Jumlah pedoman teknis/kebijakan pengelolaan B3 dan Limbah B3	-	-	1	-
9	Jumlah perusahaan pengangkut, pengumpul, pemanfaat dan pengelola limbah B3 terantau	-	Pengangkut B3 : 13 Pengumpul B3 : 6	Pengangkut B3 : 17 Pengumpul B3 : 8	Pengangkut B3 : 17 Pengumpul B3 : 8

No	Uraian	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
			Pemanfaat B3 : 10 Pengelola B3 : 0	Pemanfaat B3 : 18 Pengelola B3 : 6	Pemanfaat B3 : 18 Pengelola B3 : 6
10	Jumlah Perusahaan yang berpotensi besar memberikan cemaran limbah terhadap badan air	76	145	164	164
11	Jumlah industri yang telah melaksanakan EPCM (<i>Environmental Pollution Control Management</i>)	9 perusahaan terverifikasi	37 perusahaan terverifikasi	30 perusahaan terverifikasi	-
12	Jumlah kader lingkungan	30 orang	30 orang	10 orang	10 orang
13	Jumlah pengujian kualitas air limbah industri	34	83	60	60
14	Tersedianya dokumen mitigasi bencana	-	-	-	-
15	Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan hidup di perusahaan	160 perusahaan	108 perusahaan	120 perusahaan	104 perusahaan
16	Pengambilan sampel uji air sungai	36 titik	44 titik	44 titik	44 titik
17	Pengambilan sampel uji air limbah industri	34 titik	83 titik	-	-
18	Pengambilan sampel uji udara emisi cerobong industri (Pengambilanujiudaraambien)	20 titik	3 titik	38 titik	38 titik
19	Verifikasi TPS limbah B3 dari perusahaan di kawasan dan zona industri	92 lokasi	71 lokasi	89 lokasi	100 lokasi
20	Penanganan kasus lingkungan hidup	8 kasus	11 kasus	-	-
21	Jumlah LSM lingkungan Hidup : (GALIH – Gerakan Lingkungan Hidup; PSPLP – Pengembangan Strategi Pemberdayaan Lingkungan Petani; Biharia Lingkungan Hidup; LP2D – Lembaga Lingkungan dan Pembangunan Daerah; Sar Sagara, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI DPC Karawang); UPAS, Korak, Lodaya, Sepetak, Laskar Karawang dan AMIB)	12 LSM	-	2 LSM	-
22	Produk hukum bidang pengelolaan LH				
	a. Peraturan Daerah	1 buah	1 buah	1 buah	-
	b. Peraturan Bupati	3 buah	-	-	5
	c. Keputusan Bupati	5 buah	-	-	4
23	Laboratorium Lingkungan Hidup	11 jenis alat	1 gedung + 5 jenis alat	16 jenis alat	8 jenis alat + mobil lab
24.	AlatTelemetry air	-	-	-	4 statis + 2 portable
25.	StasiunPengukurKualitasUdara Ambien /ISPU	-	-	-	1 titik
26.	Penerapansanksiadministratifterhadap apperusahaan	-	-	-	21 perusahaan

Sumber : Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang

Tabel 2.121
Dokumen Pengelolaan Lingkungan yang Dimiliki oleh
Industri di Kab. Karawang Tahun 2011-2014

No	Uraian	Jumlah			
		2011	2012	2013	2014
1	Industri yang memiliki AMDAL	16	2	3	0
2	Industri yang memiliki UKL/UPL	459	106	170	172
3	Industri yang memiliki SPPL	8	16	8	10

Sumber : Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kab. Karawang

2) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Tabel 2.122
Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH
Tahun 2011-2014

No	Uraian	Jumlah			
		2011	2012	2013	2014
1	Jumlah Dokumen Informasi SDA	1	1	4	3
2	Jumlah Dokumen Informasi LH (SLHD)	1	-	1	1

Sumber: Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kab. Karawang

3) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Tabel 2.123
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Tahun 2011-2014

No	Uraian	Jumlah			
		2011	2012	2013	2014
1	Volume sampah terangkut	480 M ³	595 M ³	595 M ³	672 M ³
2	Jumlah kecamatan yang menerapkan sistem komposting	2 Kecamatan : Telukjambe Timur & Karawang Barat	2 Kecamatan : Telukjambe Timur & Karawang Barat	2 Kecamatan: Telukjambe Timur & Karawang Barat	3 Kecamatan 1. Telukjambe Timur 2. Telukjambe Barat Ciampel

Sumber: Dinas Cipta Karya Kab. Karawang

4) Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam

Tabel 2.124
Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam Tahun 2011-2014

No	Uraian	Jumlah			
		2011	2012	2013	2014
1	Jumlah potensi sungai yang ada di wil. Kab. Karawang	4	4	4	4
2	Sumber pencemaran sungai (titik)	-	69 titik	83 titik	164 titik
3	Jumlah tanaman di sepanjang sempadan DAS	-	-	-	-

Sumber: Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang

5) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Tabel 2.125
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Tahun 2011-2014

No	Uraian	Jumlah			
		2011	2012	2013	2014
1	Jumlah/luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	-	-	-	-
2	Jumlah industri atau kawasan yang menerapkan <i>eco-industrial park</i>	-	-	-	-

Sumber : Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang

6) Program Pengelolaan Ekosistem Pesisir dan Laut

Tabel 2.126
Pengelolaan Ekosistem Pesisir dan Laut
Tahun 2011-2014

No	Uraian	Jumlah			
		2011	2012	2013	2014
1	Jumlah/luas kawasan pesisir dan laut yang dievaluasi	-	-	-	-

Sumber : Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kab. Karawang

7) Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Tabel 2.127
Peningkatan Pengendalian Polusi
Tahun 2011-2014

No	Uraian	Jumlah			
		2011	2012	2013	2014
1	Jumlah sample kualitas udara <i>ambien</i>	3	38	38	38

Sumber : Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kab. Karawang

e. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 2.128
Jumlah Dokumen Kependudukan yang Dikeluarkan
Tahun 2011 s.d. 2015

No	Jenis Dokumen Kependudukan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	KTP WNI	284.000	234.278	58.280	122.051	79.222
2.	KTP WNA	5	3	0	0	0
3.	KK WNI	108.000	121.759	83.427	191.121	247.147
4.	KK WNA	0	0	0	0	0
5.	Surat Ket. Tempat Tinggal (SKTT)	803	798	687	1.175	837
6.	Surat Ket. Tinggal Sementara (SKTS)	1.663	1.488	2.129	3.096	807
7.	Surat Ket. Pindah Luar Daerah (SKPLD)	6.865	13.069	8.073	11.329	14.598
8.	Surat Ket. Datang Luar Daerah (SKDLD)	9.856	12.435	10.696	19.929	26.466
9.	Surat Ket. Pindah Luar Negeri (SKPLN)	-	-	1	0	0
10.	Surat Ket. Datang Luar Negeri (SKDLN)	278	126	212	285	255

Sumber: Bidang Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang

Penerapan KTP elektronik (KTP-el) adalah Program Strategis Nasional yang mulai dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari awal bulan April 2012 sampai dengan Desember 2013. Jumlah Penduduk Wajib KTP berdasarkan data per bulan Juli 2011 sebanyak 1.525.478 jiwa yang tersebar di 30 Kecamatan, dan KTP Non Elektronik tetap berlaku bagi Penduduk yang belum mendapatkan KTP-el sampai dengan paling lambat tanggal 31 Desember 2014. Sampai dengan bulan Desember 2013, dari target Penduduk Wajib KTP-el sebanyak 1.525.478 jiwa, telah terekam sebanyak 1.350.865 jiwa dan sampai dengan 31 Desember 2014 (data WKTP dari DKB semester II 2014) hasil perekaman KTP-el Bidang Kependudukan mencapai 1.272.130. Pelaksanaan Perekaman KTP-el di Kabupaten Karawang dari Tahun 2012 sampai dengan 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.129
Pelaksanaan Perekaman KTP-el di Kabupaten Karawang Tahun 2011-2015

No	Uraian	Jumlah				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Penerbitan SP NIK (KK)		682.542	-	-	-
2.	Jumlah Penduduk Wajib KTP (yang telah melakukan perekaman KTP-el)		1.302.955	1.350.865	*)1.272.130	1.251.835
	a. Laki-laki (orang)		661.210	686.528	648.943	632.670
	b. Perempuan (orang)		641.745	664.337	623.187	619.165

Sumber: *) Data WKTP s.d 31 Desember 2014 dari DKB Semester II 2014 dengan hasil perekaman KTP-el Bidang Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang

Salah satu produk unggulan dari Program Pencatatan Sipil yang sudah dimulai dari bulan Oktober 2011 sampai sekarang adalah Pelayanan Akta Kelahiran *one-day service*, pelayanan akta kelahiran di tempat/desa, yaitu berupa Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran satu hari selesai. Jumlah Akta yang dikeluarkan dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.130
Jumlah Akta yang Dikeluarkan pada Tahun 2011 s.d. 2015

No	Jenis Akta	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pelayanan Akta Di Kantor	80.865	36.116	94.386	36.482	44.515
2.	Pelayanan Akta Di Desa/Kecamatan (Paten)	11.004	2.051	1.728	24.623	23.999
3.	Akta Kawin	216	185	152	158	287
4.	Akta Cerai	12	18	18	14	19
5.	Akta Kematian	97	115	92	113	164
6.	Akta Pengakuan & Pengesahan Anak	24	8	14	19	8
7.	Akta Pengangkatan Anak	5	0	0	0	0
8.	Legalisasi Akta	4.857	2.878	2.302	2.944	
9.	Surat Keterangan Catatan Pinggir	9	845	540	476	693

Sumber: Bidang Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang

f. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pembangunan di Bidang ini diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan Pemerintah Desa sebagai wujud pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada Pengembangan Desa dan Kelembagaan Masyarakat Desa. Pelaksanaan pembangunan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yaitu melalui : (1)

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat; (2) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa; (3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa; (4) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa; (5) Program Pembangunan Desa; (6) program Penataan Otonomi Baru.

Tabel 2.131
Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Tahun 2011-2014

No.	Uraian	Satuan	Capaian 2011	Capaian 2012	Capaian 2013	Capaian 2014
1.	Peningkatan jalan lingkungan	M	59.249	51.111	29.851	64.243
2.	Pembangunan jembatan	Buah	1	6	52	10
3.	Pembangunan prasarana air bersih	Buah	1	-	1	1
4.	Pembangunan MCK	Buah	7	-	3	2
5.	Pembangunan Polindes	Buah	6	3	-	-
6.	Pembangunan Saluran Tersier	M	49.287	58.789	37.815	28.702
7.	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Buah	88	2	17	4
8.	Rehabilitasi Madrasah	Buah	7	20	203	23

Sumber: BPMPD Kabupaten Karawang (Kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan)

g. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program Keluarga Berencana merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas. Pendataan keluarga yang dilakukan dalam rangka menghimpun data basis untuk pelaksanaan program Keluarga Berencana pada tahun 2011 sampai dengan 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.132
Pendataan Keluarga Tahun 2011-2015

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
A.	Data KB					
	- Jumlah PUS	494.568	515.913	542.773	536.642	543.898
	- Jumlah Peserta KB	367.007	434.208	392.328	383.896	399.804
	Hamil	21.329	22.166	28.412	25.376	18.861
	Ingin anak segera	34.696	37.367	39.344	78.710	77.009
	Ingin anak ditunda	34.551	30.746	36.116	21.802	23.077

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
	Tdk ingin anak lagi	36.985	47.219	46.573	26.858	24.347
B.	Data Tahapan Keluarga Sejahtera					
	- Keluarga Prasejahtera	233.554	221.252	212.314	226.781	
	- Keluarga Sejahtera I	167.488	172.540	184.617	167.772	
	- Keluarga Sejahtera II	98.260	61.751	67.926	69.112	
	- Keluarga Sejahtera III	125.615	202.639	241.278	200.094	
	- Keluarga Sejahtera III+	20.260	11.735	17.442	13.550	

Sumber: Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Tabel 2.133
Pencapaian Peserta Akseptor KB Baru
Tahun 2013-2015

No	Mix Kontrasepsi	Tahun Pencapaian 2013			Tahun Pencapaian 2014			Tahun Pencapaian 2015		
		Target	Pencapaian	%	Target	Pencapaian	%	Target	Pencapaian	%
1	IUD	2.936	3.531	120,3	5246	4626	87,35	6,133	4,903	79,9
2	MOP	195	95	48,7	203	64	31,53	116	54	46,5
3	MOW	804	1.380	171,6	1498	1161	77,50	1732	1306	75,4
4	Kondom	2.669	4.843	181,4	5088	4970	97,68	5075	6942	136,8
5	Implant	3.328	4.900	147,2	7326	4910	67,02	6646	4378	65,9
6	Suntikan	40.324	43.466	107,8	46763	51549	110,23	43034	52011	120,9
7	Pil	50.568	36.815	72,8	39776	30764	77,34	42264	50356	119,1
	JUMLAH	100.823	95.030	94,2	105450	98.004	92,54	105000	119950	114,2

Sumber: Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Tabel 2.134
Keadaan Peserta Akseptor KB Aktif Tahun 2013-2015

No	Mix Kontrasepsi	Tahun Pencapaian 2013			Tahun Pencapaian 2014			Tahun Pencapaian 2015		
		Target	Pencapaian	%	Target	Pencapaian	%	Target	Pencapaian	%
1	IUD	17.103	22.501	131,5	23174	22033	95,07	23175	23920	103,2
2	MOP	4.853	3.566	73,5	3672	3672	1	3672	3614	98,42
3	MOW	7.354	10.607	144,2	10,913	10,493	96,15	10493	10693	101,9
4	Kondom	3.562	6.779	190,3	6974	7066	101,31	6974	8213	117,7
5	Implant	19.345	15.948	82,4	16341	15421	94,37	16341	16565	101,3
6	Suntikan	144.852	202.543	139,8	204714	202452	98,88	204714	205108	100,2
7	Pil	90.561	130.384	143,9	135,464	120805	891,78	135464	128159	94,60
	JUMLAH	287.630	392.328	136,4	406302	833.896	205,24	406302	396272	97,53
	Peserta Ganti Cara		0	5,774		3218			8684	
	Pencabutan Implant		0	4,062		3430			4653	
	Komplikasi Berat		0	22		43			17	
	Kegagalan		0	17		33			7	

Sumber: Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Tabel 2.135
Pelayanan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Tahun 2011-2015

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
A.	Peserta Akseptor KB Baru	133.625	98.479	95.030	98.044	119.950
	- IUD	3.017	3.639	3.531	4.626	4.903
	- MOP	86	139	95	64	54
	- MOW	1.276	1.180	1.380	1.161	1.306
	- Kondom	5.357	4.842	4.843	4.970	6.942
	- Implan	3.747	3.331	4.900	4.910	4.378
	- Suntikan	69.983	47.533	43.466	51.549	52.011

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
	- Pil	50.159	37.815	36.815	30.764	50.356
B.	Peserta Akseptor KB Aktif	362.630	376.545	392.328	383.896	399.804
	- IUD	2.747	22.310	22.501	23.033	23.067
	- MOP	3.588	3.542	3.566	3.626	3.555
	- MOW	9.364	9.963	10.607	10.993	10352
	- Kondom	5.992	6.088	6.779	7.066	8624
	- Implan	19.144	14.185	15.948	15.921	17051
	- Suntikan	191.332	197.181	202.543	202.452	207.319
	- Pil	124.439	123.276	130.384	120.805	129816
C.	Peserta Ganti Cara	2.574	2.574	5.774	3.218	4.274
D.	Pencabutan Implan	3.439	3.439	4.062	3.430	3.422
E.	Komplikasi Berat	0	0	22	43	12
F.	Kegagalan	11	11	17	33	9
G.	Jumlah Peserta KB Baru MJP	8.126	8.289	9.906	10.761	10.641

Sumber: Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Tabel 2.136
Distribusi Alat Kontrasepsi Tahun 2011-2015

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
A.	IUD (set)					
	- Penerimaan	13.550	17.250	13.250	11.500	4.625
	- Pengeluaran	12.800	16.500	12.750	11.375	3.200
	- Sisa Gudang	750	750	500	625	1425
B.	Kondom (lusin)					
	- Penerimaan	21.950	8.786	6.166	4.380	2.751
	- Pengeluaran	19.664	8.500	5.788	4.003	1.411
	- Sisa Gudang	2.286	286	378	755	1.340
C.	Implan (set)					
	- Penerimaan	15.500	13.150	9.000	18.000	4.040
	- Pengeluaran	14.750	12.650	8.760	18.240	4.040
	- Sisa Gudang	750	500	240	0	0
D.	Suntikan (vial)					
	- Penerimaan	846.000	1.121.000	1.011.000	616.000	125.880
	- Pengeluaran	755.000	1.115.500	995.000	576.120	125.820
	- Sisa Gudang	91.000	5.500	16.000	55.880	60
E.	PIL (strip)					
	- Penerimaan	1.512.000	2.062.500	1.539.500	640.000	464.500
	- Pengeluaran	1.387.000	2.051.000	1.521.500	575.500	459.455
	- Sisa Gudang	125.000	11.500	18.000	82.500	5.045

Sumber: Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Tabel 2.137
Sarana Kesehatan yang Melaporkan Pelayanan KB Tahun 2011 s.d. 2015

No	Nama Sarana Pelayanan KB	2011	2012	2013	2014	2015
1	Rumah Sakit Umum Daerah	1	1	1	1	1
2	Rumah Sakit Umum Swasta	12	12	20	20	20
3	Puskesmas/Klinik KB	52	50	52	52	52
4	Puskesmas Pembantu	53	69	60	69	69
5	Dokter Praktek Swasta	77	81	145	145	145
6	Bidan Praktek Swasta	327	402	446	667	667

Sumber: Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Tabel 2.138
Data Kelompok Kegiatan Tahun 2011 s.d. 2015

No	Nama Kelompok Kegiatan	2011	2012	2013	2014	2015
1	BKB (Bina Keluarga Balita)	448	615	650	531	531
2	BKR (Bina Keluarga Remaja)	221	281	278	248	248
3	BKL (Bina Keluarga Lansia)	218	273	273	246	227
4	PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Keluarga)	63	72	115	115	115
5	UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera)	324	300	323	283	301
6	Jumlah Konseling Remaja yang dilaksanakan	-	-	-	-	-

Sumber: Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Tabel 2.139
Data Institusi Masyarakat Perdesaan Tahun 2011 s.d. 2015

No	Nama Kelompok Kegiatan	2011	2012	2013	2014	2015
1	PPKBD/Pos KB Desa	309	322	331	334	335
2	Sub PPKBD/Sub Pos KB Desa	1.767	1.840	1.849	1833	185
3	Kelompok Akseptor/Kelompok KB	6.162	6.377	6.411	6516	6520

Sumber: Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

h. Perhubungan

Tabel 2.140
Realisasi Kinerja Pembangunan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Tahun 2011-2015

No	Uraian	Realisasi				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	FS Terminal Tipe A berlokasi di Cikampek	-	1 Kajian	-	-	-
2.	Shelter / Halte	-	1 Unit (Jl. Pangkal Perjuangan)	1 Unit (SMAN 1 Karawang)	1 Unit (SMAN 4 Karawang)	-
3.	Kajian Angkutan Masal Trans Karawang	-	1 Kajian	-	-	-
4.	Kajian Potensi PAD Parkir dan Penentuan Lokasi Wilayah Tempat Parkir	-	1 Kajian	1 Kajian	-	-

No	Uraian	Realisasi				
		2011	2012	2013	2014	2015
5.	Papan Sosialisasi dan Penetapan Retribusi Parkir	-	-	5 Buah	-	-
6.	Survey O/D Asal Tujuan Kabupaten Karawang	-	-	-	1 Kajian dan 45 Buku	-
7.	Pengadaan dan Pemasangan Papan Sosialisasi Lintas Trayek	-	-	-	10 Buah	-
8.	Pengadaan dan Pemasangan Alat Komunikasi Radio dan Penerus Pancar Frekuensi di 4 Lokasi Terminal Wilayah I, II, III dan Kantor Dishubkominfo	-	-	-	4 Lokasi	-
9.	FS Kajian Pembangunan dan Pemasangan Variabel Messege Sign dan Jembatan Penyeberangan Orang	-	-	-	2 Kajian	-
10.	Pembuatan Pagar Depan Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	-	-	-	1 Lokasi	-
11.	Pengadaan dan Pemasangan Rambu-rambu Tambahan	-	-	-	24 Unit	60 buah
12.	Pengadaan Alat Uji Emisi Bensin dan Uji Asap Solar	-	-	-	2 Set Alat Uji Bensin 2 Set Alat Solar dan 2 Buah Genset	-
13.	Pemeliharaan Fasilitas Perhubungan (Halte/RPPJ/Portal/Papan Sosialisasi Trayek/Deliniator/Guardrail/Road Stud)	-	-	-	-	7 macam
14.	Pendataan Kapal dan Pembuatan Tanda Pas Kecil Kapal 7 GT	-	-	2 Tempat Pelelangan Ikan	-	5 Tempat Pelelangan Ikan
15.	Master Plan Transportasi	-	-	-	-	1 kajian
16.	DED JPO (Jembatan Penyeberangan Orang)	-	-	-	-	1 kajian
17.	DED VMS (Variabel Messege Sign)	-	-	-	-	1 kajian
18.	DED Dermaga (Kapal) 7 GT Lokasi TPI Muara Mina Cilamaya	-	-	-	-	1 kajian
19.	Amdal Lalin Terminal dan Pasar Kaliwangi/ Rengasdengklok	-	-	-	-	1 kajian
20.	FS Terminal Type C	-	-	-	-	1 Kajian Tegalwaru/ Pangkala
21.	FS Terminal Depo Container	-	-	-	-	1 kajian
22.	Kajian Lalulintas One Way Rekayasa Lalu Lintas Johar - Lamarin	-	-	-	-	1 kajian
23.	Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan (Zebra Cross)	-	-	-	-	30 lokasi disekolah dan 30 lokasi ditempat umum
24.	Pengadaan dan Pemasangan Rambu-rambu terpasang pada Zebra Cross	-	-	-	-	30 unit di sekolah dan 30 unit ditempat umum
25.	Alat Uji Brake Tester	-	-	-	-	1 set lengkap
26.	Pengadaan dan Pemasangan Warning Light	-	-	-	-	1 set lengkap
27.	Andalalin Underpass Pawarengan	-	-	-	-	1 kajian

No	Uraian	Realisasi				
		2011	2012	2013	2014	2015
28.	Pengadaan Papan Visual/Running Text LED Display	-	-	-	-	1 set lengkap

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang

Tabel 2.141
Realisasi Kinerja Peningkatan Pelayanan Angkutan
Tahun 2011-2015

No	Uraian	Realisasi				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumah Jaringan Trayek yang dioperasikan - Angkutan Perkotaan	28	28	29	30	30
2.	Sosialisasi TIBLANTAS terhadap Siswa dan Siswi Pelajar	-	-	95 Siswa/Siswi SLTA Di Kab. Karawang	300 Siswa/Siswi SLTP di Kab. Karawang	-
3.	Pembuatan Peraturan Bupati yang terkait dengan Pelaksanaan Perda Penyelenggaraan Perhubungan	-	-	-	1 Perda dan 16 Perbup	-
4.	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat kabupaten Karawang	-	-	-	40 Orang Pelajar (SLTA)	20 orang Pelajar (SLTA)
5.	Pemasangan Palang Pintu Perlintasan Kereta Api beserta Rambu Perlintasan Kereta Api	-	-	-	14 Set Perlintasan tanpa Palang Pintu	-
6.	Pembinaan Masyarakat Peduli Lalu Lintas	-	-	125 Orang Peserta	45 orang Peserta Petugas Palang Pintu	-
7.	Legal Opinion Peraturan Bupati	-	-	-	-	1 kegiatan
8.	Pemantauan Pelaksanaan Tarif Penumpang Lokal	-	-	-	-	1 kegiatan
9.	Kajian Pengembangan Jaringan Trayek	-	-	-	-	1 kegiatan
10.	Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalulintas dan Angkutan	-	-	-	-	1 kegiatan 3 orang
11.	Pengiriman Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi	-	-	-	-	3 orang pelajar (SLTA)
12.	Pendataan Angkutan Barang	-	-	-	-	1 kegiatan

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang

Tabel 2.142
Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
Tahun 2011-2015

No	Uraian	Realisasi				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pengujian Kendaraan Bermotor	21.941 unit	24.535 unit	27.930 unit	29.762 unit	29.246 Unit
2.	Pemeriksaan Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor					
a.	Kendaraan Bermotor Wajib Uji (Mobil Barang/Bis/Kendaraan Tempelan/Gandengan dan Kendaraan Khusus	-	-	-	23.112 unit	29.161 Unit
b.	Non Kendaraan Wajib Uji Mobil Penumpang/Sepedamotor	-	-	-	1.805 unit	158 unit

Sumber: Dishubkominfo Kabupaten Karawang (data dari Januari s.d. Desember 2015)

- Pengujian Emisi terhadap Non Kendaraan Wajib Uji, mulai dilaksanakan oleh UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Terhitung mulai Bulan April 2014;

- Untuk Kendaraan Wajib Uji, Uji Emisi tidak berikut Buku Uji Emisi, karena wajib uji untuk Non Kendaraan Wajib Uji dengan mendapat legalitas ambang batas gas buang (Buku Uji Emisi).

Tabel 2.143
Realisasi Kinerja Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Tahun 2011-2015

No	Uraian	Realisasi				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Fasilitas dan Rambu jalan					
	a. <i>Traffic Light</i>	1 Paket (tiga kaki) Ciranggon	1 Paket (empat Kaki) Talagasari	1 Paket Simpang Tiga Karasak	1 Paket Simpang Telukjambe	-
	b. Rambu Lalu Lintas					
	- Rambu Peringatan	38 buah	4 buah	28 buah	85 buah	8 buah
	- Rambu Larangan	13 buah	-	93 buah	19 buah	12 buah
	- Rambu Perintah	-	-	111 buah	31 buah	8 buah
	- Rambu Petunjuk	21 buah	8 buah	10 buah	-	9 buah
	- Papan Rambu Tambahan	-	-	64 buah	4 buah	-
	- RPPJ Portal	-	-	1 buah (Jl.Tuparev)	-	10 unit
	c. Marka Jalan	1.865 ml	-	10.714,4 ml	42.837,29 ml	21.747 ml
	d. Marka Jalan ZoSS (Zona Selamat Sekolah)	-	-	7.137 ml Depan SMAN 1 Karawang & SMPN 5 Karawang	-	-
	e. <i>Guard Rail</i>	80 m	-	-	-	260 m (PON XIX)
	f. Paku Jalan (<i>Road Stud</i>)	-	497 buah	913 buah	-	-
	g. Deliniator	-	185 buah	-	-	-
	h. Water Barrier	-	-	10 buah	70 buah	100 buah
	i. Mobile Concrete Barrier (MCB)	-	-	10 buah	70 buah	80 buah
	j. Traffic Cone	-	-	10 buah	73 buah	100 buah
	k. Kunci Gembok Parkir Sembarangan	-	-	10 buah	-	-
	l. Timbangan Kendaraan Portable 10-80 Ton	-	-	1 unit	-	-
	m. Warning Light	-	-	-	4 unit	6 unit
	n. Cermin Tikungan	-	-	-	-	2 unit
2	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Karawang	4 triwulan/16 kali	4 triwulan/16 kali	4 triwulan/16 kali	4 triwulan/16 kali	4 triwulan/16 kali
3	Pengendalian Gatur Lintas Anggota Dalops	366 hari	366 hari	366 hari	366 hari	366 hari
4	Pemeriksaan Kelaikan Jalan Kendaraan Bermotor	-	-	-	14 Hari (Angkutan Lebaran=36 unit) dan 2 Hari (Natal	14 Hari (Angkutan Lebaran=36 unit) dan 2 Hari

No	Uraian	Realisasi				
		2011	2012	2013	2014	2015
					dan Tahun Baru=108 unit)	(Natal dan Tahun Baru=108 unit)
5	Pengendalian dan Penindakan Operasi Uji Emisi Gas Buang	-	-	-	4 Triwulan / 20 kali	4 Triwulan / 20 kali

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang

i. Komunikasi dan Informatika

Urusan bidang komunikasi dan informatika dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika dan Bagian Humas Setda Kabupaten Karawang.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk penyelenggaraan negara yang baik, bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggara negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Tabel 2.144
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Tahun 2011-2015

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pelayanan Informasi Lintas Sektoral dalam Menunjang TMMD	2 desa	1 paket	-	1 paket	1 keg
2.	Penerangan dan Komunikasi Terpadu dalam Kegiatan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	1 keg	1 keg	-	-	-
3.	Pelayanan Informasi Lintas Sektoral dalam menunjang BSMSS dan/Satatasariksa	1 keg	1 keg	-	-	1 keg
4.	Pengadaan Bahan Materi Penerangan Melalui Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dan SKPD di Kab. Karawang	335 buku	1 paket	-	-	-

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
5.	Sosialisasi Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang KIP	15 Kecamatan	15 Kecamatan	-	-	
6.	Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Informasi Wanita melalui P2WKSS	2 Desa dan 2 Kec.	1 paket	-	1 paket	1 keg
7.	Pendataan Potensi Menara Tower, Radio, Warnet melalui Study Banding	4 Kab.	-	-	-	-
8.	Pendataan Potensi Menara Komunikasi dan Informatika a. Pembangunan Menara Tower/ Radio Siaran b. Radio Siaran c. Warnet	188 - 94	491 83 174	437 83 174	516 83 174	513 83 174
9.	Peringatan Hari Perhubungan	-	1	1	1	Belum dilaksanakan (Triwulan III)
10.	Sosialisasi Program dan Hasil-hasil Pembangunan melalui Media Tradisional	-	-	1	17 kali pementasan	51 kali
11.	Talkshow/Dialog Interaktif melalui Radio Swasta	3 radio	1 keg	35	35 kali talkshow	44 kali
12.	Sosialisasi Program Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat	-	-	1 keg	1 keg	1 keg
13.	Lokakarya Optimalisasi Teknologi Informasi Bagi OPD	-	-	30 orang	-	-
14.	Monitoring dan Pengawasan Sarana Prasarana Telekomunikasi	-	-	1 keg	1 keg	1 keg
15.	Pembuatan dan Pemasangan Stiker Lunas Retribusi Menara	-	-	600 buah	600 buah	600 buah
16.	Sosialisasi Program dan Kegiatan Pembangunan melalui Media Luar Ruang	-	-	1 keg	1 keg	-
17.	Desiminasi Informasi melalui Media Interpersonal	-	-	10 kali sewa film	1 keg	1 keg
18.	Kajian Cellplan Menara Telekomunikasi	-	-	1 kajian	-	-
19.	Pembuatan sarana informasi media luar ruang	-	20 kecamatan	10 kecamatan	30 kecamatan	30 kecamatan

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Karawang

Pengembangan komunikasi, informasi dan media masa yang dilaksanakan Bagian Humas, ditempuh melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Penerbitan Majalah Pemerintah Kabupaten Karawang.

Penerbitan majalah ini dimaksudkan untuk mempublikasikan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan

oleh pemerintah daerah serta menginformasikan dan mensosialisasikan hasil kegiatan yang telah dicapai. Pada tahun 2011 telah dilaksanakan sebanyak 15.000 eksemplar, tahun 2012 sebanyak 15.000 eksemplar, tahun 2013 sebanyak 15.000 eksemplar, tahun 2014 sebanyak 15.000 eksemplar dan tahun 2015, sampai dengan bulan juni 2015 sebanyak 7.500 eksemplar.

2. Penyusunan sambutan, yang terdiri dari sambutan Bupati, Wakil Bupati, Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW), dan Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP). Pada tahun 2011 telah dilaksanakan sebanyak 720 sambutan, tahun 2012 sebanyak 700 sambutan, tahun 2013 sebanyak 720 sambutan, tahun 2014 sebanyak 720 sambutan serta tahun 2015 sampai dengan bulan Juni 2015 mencapai 360 sambutan.
3. Penyampaian kegiatan hasil pembangunan melalui media elektronik. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mempublikasikan hasil-hasil pembangunan melalui media elektronik sehingga dapat disosialisasikan pada masyarakat. Pada tahun 2011 telah terlaksana sebanyak 37 paket tayangan, tahun 2012 sebanyak 38 paket tayangan, tahun 2013 sebanyak 28 paket tayangan, tahun 2014 sebanyak 28 paket tayangan, serta pada tahun 2015, sampai dengan bulan Juni 2015 terlaksana sebanyak 14 paket tayangan.
4. Kehumasan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menjalin kerjasama yang harmonis antara pemerintah daerah dengan para pencari berita sehingga dapat menyampaikan berita-berita pembangunan di berbagai media cetak, tahun 2011 dilaksanakan pembinaan pada pencari berita dengan kegiatan sebanyak 10.500 kegiatan, tahun 2012 dilaksanakan sebanyak 10.500 kegiatan, tahun 2013 sebanyak 9.200 kegiatan, tahun 2014 sebanyak 9.200 kegiatan, dan tahun 2015, sampai dengan bulan Juni 2015 sebanyak 4.600 kegiatan.

5. Kemitraaan dengan media massa. Kegiatan ini ditangani secara khusus sejak tahun 2008, sebagai upaya bermitra dengan para pencari berita di media cetak dalam mengcover berita-berita pembangunan pemerintah daerah. Pada tahun 2011 dapat terealisasi sebanyak 1.860 kemitraan, tahun 2012 SEBANYAK 1860 kemitraan, tahun 2013 SEJUMLAH 1.860 kemitraan, tahun 2014 SEJUMLAH 1.860 kemitraan, dan tahun 2015 sampai dengan Juni 2015 sebanyak 930 kemitraan.
6. Peliputan dan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kabupaten Karawang. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendokumentasikan setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Kegiatan ini mulai dilaksanakan secara khusus semenjak tahun 2007. Pada tahun 2011 terealisasi sebanyak 120 Kli terbit dengan jumlah kliping 1.440, tahun 2012 sebanyak 245 kali terbit dengan jumlah kliping 1440, tahun 2013 sebanyak 250 kali terbit, 1.440 kliping, tahun 2014 sebanyak 250 kali terbit dengan jumlah kliping 1.4490, dan tahun 2015 sampai dengan Juni 2015 baru terealisasi sebanyak 120 kali terbit dengan jumlah kliping 745.
7. Transfer Film Kegiatan Liputan. Kegiatan ini dilaksanakan sejak tahun 2009. Tahun 2011-2014 terealisasi 150 keping CD/VCD (per tahun) dan tahun 2015 sampai dengan bulan Juni 2015 terealisasi sebanyak 75 keping CD/VCD.
8. Pemeliharaan Jaringan Internet. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pemeliharaan jaringan internet di lingkup Sekretariat Daerah. Pemeliharaan berupa penggantian/pemeliharaan HUB, switch, modem, wireless, maupun kabel serta koneksi internetnya. Pada tahun 2011-2014 terealisasi sebanyak 82 titik per tahun.
9. *Update Data Homepage* Kabupaten Karawang. Kegiatan ini merupakan *up date*/pemutakhiran data-data pembangunan Kabupaten Karawang yang sudah di *up date* pada situs resmi Pemerintah Kabupaten Karawang, pada tahun 2011

teralisasi penambahan 32 klasifikasi menu pada content www.karawangkab.go.id, tahun 2012 sebanyak 64, tahun 2013 sebanyak 64, dan tahun 2014 sebanyak 64.

10. Paparan Informasi Kebijakan Pemerintah. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menunjang publikasi hasil-hasil pembangunan melalui pemaparan kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mulai dilaksanakan tahun 2010. Tahun 2011-2014 terealisasi sebanyak 60 paparan per tahun.
11. Penyusunan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD). Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bagian Humas semenjak tahun 2010, yaitu menyusun dan mempublikasikan penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang dipublikasikan melalui beberapa media cetak, radio dan internet. Tahun 2011-2014 terealisasi sebanyak 5 dokumen per tahun.
12. Relay Lapangan. Semenjak tahun 2009 Radio Sturada AM/FM pengelolaannya ditangani oleh Bagian Humas Setda. Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan relay langsung kegiatan dari lapangan. Pada tahun 2011 telah dilaksanakan sebanyak 15 kegiatan, tahun 2012 sebanyak 7 kegiatan, tahun 2013 sebanyak 15 kegiatan dan tahun 2015 sebanyak 15 kegiatan, tahun 2015 sampai dengan bulan Juni terealisasi sebanyak 10 kegiatan.

j. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Tabel 2.145
Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif
Koperasi UMKM Tahun 2011 s.d. 2015

No.	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah wirausaha yang berdaya saing	1.002	3.708	9.650	10.850	11.602
2.	Jumlah Kualitas kelembagaan KUMKM (yang telah standarisasi, akreditasi dan sertifikasi)	258	305	455	569	639
3.	Jumlah fasilitas kemitraan UMKM	6	35	187	289	305

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang

Tabel 2.146
Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Tahun 2011 s.d. 2015

No.	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Sosialisasi pemahaman Perkoperasian (orang)	120	275	270	490	490
2.	Pelatihan Kemampuan Menyusun RAPBK (koperasi)	20	30	50	50	50
3.	Pelatihan Pengetahuan Teknologi Pemasaran dan keuangan (koperasi)	40	-	-	-	-
4.	Jumlah koperasi yang dibina (koperasi)	110	122	132	125	130
5.	Jumlah koperasi yang sehat (koperasi)	110	122	132	125	130

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang

Program Peningkatan Kualitas kelembagaan Koperasi pada indikator sosialisasi pemahaman perkoperasian terjadi kenaikan jumlah dari tahun 2014 sebanyak 490 orang menjadi 490 orang pada tahun 2015 atau tetap. Untuk pelatihan kemampuan menyusun RAPBK jumlah pada tahun 2014 yaitu 50 orang dan pada tahun 2015 masih sama dengan jumlah 50 orang yang dilakukan pembinaan. Indikator pelatihan teknologi pemasaran dan keuangan perubahan pada tahun 2015 dibandingkan tahun 2014 yakni tidak ada perubahan karena tidak dilaksanakan. Untuk jumlah koperasi yang dibina pada tahun 2014 sebanyak 125 koperasi sedangkan pada tahun 2015 sebanyak 130 koperasi atau meningkat sebanyak 4%. Jumlah koperasi yang sehat pada tahun 2014 sebanyak 125 koperasi meningkat sebesar 4% pada tahun 2015 menjadi sebanyak 130 koperasi.

Tabel 2.147
Keberadaan KUMKM Kabupaten Karawang Tahun 2015

No.	Uraian	Satuan	Jumlah
I.	KOPERASI		
a.	KELEMBAGAAN KOPERASI		
1.	Jumlah Koperasi	Unit	1.538
2.	Jumlah Koperasi Aktif	Unit	627
3.	Jumlah Koperasi Tidak/Kurang Aktif	Unit	911
4.	Jumlah Koperasi yang RAT	Unit	114
5.	Jumlah Koperasi yang RAT Tepat Waktu	Unit	108
6.	Jumlah Anggota Koperasi	Orang	364.854
7.	Jumlah Karyawan Koperasi	Orang	1.738
8.	Jumlah Manajer Koperasi	Orang	310
9.	Jumlah Koperasi Berprestasi	Orang	20
b.	USAHA KOPERASI		
1.	Jumlah Modal Koperasi	Rp	177.689.000.000

No.	Uraian	Satuan	Jumlah
2.	Jumlah Modal Sendiri	Rp	127.843.000.000
3.	Jumlah Modal Luar	Rp	49.846.000.000
4.	Jumlah SHU Koperasi	Rp	13.790.000.000
5.	Jumlah Volume Usaha	Rp	230.037.000.000
6.	Jumlah Volume Usaha KSP	Rp	82.257.839.400
7.	Jumlah Volume Usaha USP	Rp	138.022.000.000
8.	Jumlah Volume Usaha Perdagangan	Rp	71.621.000.000
c.	PENGAWASAN KOPERASI		
1.	Pengawas Koperasi	Orang	4.443
2.	Pengawas yang Aktif	Orang	1.968
3.	Pengawas yang Tidak/Kurang Aktif	Orang	2.475
II.	USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH		
1.	Jumlah Unit Usaha	Unit	38.904
2.	Nilai Produksi	Rp.	4.489.740.000
3.	Tenaga Kerja	Orang	116.172
a.	UMKM Industri		
1.	Jumlah Unit Usaha	Unit	37.356
2.	Nilai Produksi	Rp.	325.868.105.000
3.	Tenaga Kerja	Orang	17.457
b.	UMKM Perdagangan		
1.	Jumlah Unit Usaha	Unit	31.339
2.	Nilai Produksi	Rp.	2.112.428.000
3.	Tenaga Kerja	Orang	94.117
c.	UMKM Jasa		
1.	Jumlah Unit Usaha	Unit	3.117
2.	Nilai Produksi	Rp.	501.040.000
3.	Tenaga Kerja	Orang	4.698

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang

Tabel 2.148
Penciptaan Iklim Usaha-usaha Kecil Menengah yang Kondusif
Tahun 2011 s.d. 2015

No.	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah dukungan usaha yang mampu mengakses modal	1	2	12	26	30
2.	Jumlah UMKM yang memiliki sertifikasi SP kesehatan	138	168	218	268	298

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang

Program Penciptaan Iklim Usaha-usaha Kecil Menengah yang Kondusif juga mengalami peningkatan. Jumlah dukungan usaha yang mampu mengakses modal meningkat pada tahun 2015 dibandingkan tahun 2014 sebesar 15,38%, sedangkan jumlah UMKM yang memiliki sertifikat SP kesehatan meningkat sebesar 11,19%.

Tabel 2.149
Pengembangan sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi UMKM
Tahun 2011 s.d. 2015

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah wirausaha baru per tahun	140	240	1.440	1.620	1.821
2.	Tingkat kapasitas SDM KUMKM per tahun	-	-	-	-	-
3.	Ketersediaan aspek legalitas bagi KUMKM per tahun (ijin terdaftar)	258	305	-	64	68
4.	Akses permodalan ke lembaga keuangan mikro per tahun	4	6	16	26	26
5.	Promosi produk KUMKM per tahun melalui jaringan dan pameran KUMKM	6	7	-	120	136

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang

k. Penanaman Modal

Tabel 2.150
Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Tahun 2011 - 2015

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Pameran Dalam Negeri yang Diikuti	-	-	5 kali	5 kali	6 kali
2.	Jumlah Promosi melalui Media Elektronik dan Media Luar Ruang	-	-	20 kecamatan, 10 lokasi strategis	20 kecamatan, 10 lokasi strategis	20 kecamatan, 10 lokasi strategis, 6 perusahaan
3.	Pengadaan Leaflet Perizinan	-	-	-	7 jenis	8 jenis
4.	Pembuatan Peta Potensi dan Profil Investasi	-	-	-	-	1 jenis

Sumber: Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang

Tabel 2.151
Peningkatan Mutu Pelayanan Perijinan
Tahun 2011-2015

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah peraturan/ketentuan mengenai investasi yang berdaya saing (ijin)	-	7	3	3	6
2.	Jumlah pelaku usaha yang dibina (unit usaha)	-	15	15	37	37
3.	Persentase ketepatan waktu pelayanan perijinan (hari)	-	95%	95%	95%	95%
4.	Persentase kepastian dan ketepatan biaya pelayanan perijinan (%)	-	100	100	100	100

Sumber: Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang

Tabel 2.152
Jumlah Perizinan di Kab. Karawang Tahun 2015

No.	Perijinan	Jumlah
1.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	3.714
2.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	3.034
3.	Tandan Daftar Gudang (TDG)	74
4.	Tanda Daftar Industri (TDI)	14
5.	IPALASA	26
6.	Surat Izin Tanda Pendaftaran Usaha Wiralaba (STPUW)	2
7.	Izin Trayek (IT)	1.073
8.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	176
9.	Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh (IOPPJ)	-
10.	Izin Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata (IUODTW)	-
11.	Izin Lokasi (IL)	111
12.	Izin Reklame (IR)	1.012
13.	Pengesahan Rencana Tapak (PRT)	-
14.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	1.172
15.	Izin Gangguan (HO)	525
16.	Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 (IPS LB3)	84
17.	Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)	-
18.	Rekomendasi Kios Sarana Produksi Pertanian (RKSP)	-
19.	Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Swasta (IOPSS)	1
20.	Izin Penyelenggaraan Apotek (IPA)	56
21.	Izin Penyelenggaraan Optikal (IPO)	3
22.	Izin Penyelenggaraan Toko Obat (IPTO)	17
23.	Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional/Izin Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional (STPT/IPPTr)	9
24.	Izin Pengelolaan Kamar Mandi/Kamar Kecil (IPKM/KK)	11
25.	Izin Penyelenggaraan Usaha Pengelolaan Kebersihan (IP UPK)	-
26.	Izin Usaha Industri (IUI)	5
27.	Izin Usaha Perikanan (IUP)	86
28.	Surat Pembudidayaan Ikan (SPBI)	-
29.	Izin Sarana dan Jasa Pariwisata (ISJP)	31
30.	Izin Penggunaan Air Bawah Tanah (IPA-ABT)	10
31.	Izin Pemakaian Tanah Bagian Daerah Milik Jalan (IPT DMJ)	17
32.	Surat Izin Kerja Tenaga Kerja Teknis Kefarmasian (SIKTTK)	59
33.	Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja (IPLPK)	18
34.	Izin Pendirian Lembaga Bursa kerja Khusus (IPLBK)	28
35.	Surat Izin Pengeboran (SIP)	-
36.	Rekomendasi Kelayakan Investasi (RKI)	-
37.	Izin Prinsip Perluasan Modal (IPPM)	169
38.	Surat Izin Menempati Bangunan Pasar (Sim B)	68
39.	Rencana Penataan Lahan (RPL)	-
40.	Izin Usaha Pertambangan (IUPt)	1
41.	Izin Pendirian Lembaga Bursa Kerja Luar Negeri (IPL BKLN)	7
42.	Izin Usaha untuk Tenaga Kelistrikan (UK)	-
43.	Izin Latihan Kerja (ILK)	170
44.	Izin Akomodasi/Akomodasi Penampungan Calon TKI (IA-APCTKI)	1
45.	Surat Izin Klinik Kecantikan (SIKK)	16
46.	Izin Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional (STPT/IPPTr)	9
47.	Izin Penyelenggaraan Usaha Pengelolaan Kebersihan Lingkungan (IUPKL)	27

No.	Perijinan	Jumlah
48.	Izin Usaha Perikanan (IUPPHP)	86
49.	Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIK.Ro.)	12
50.	Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)	43
51.	Izin Ops. Lembaga Bursa Kerja Luar Negeri (IOLPTKS)	10
52.	Surat Izin Praktek Bidan (SIP.B)	218
53.	Surat Izin Praktek Dokter (SIP.Dr)	455
54.	Surat Izin Usaha Toko Modern (IUTM)	98
	JUMLAH	12.672

Sumber: Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang

Tabel 2.153
Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Tahun 2011-2015

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah kebijakan di bidang investasi	-	7	3	3	6
2.	Total Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Rp Trilyun)	-	14,253	40,925	25,722	25,454
3.	Jumlah LKPM PMA dan PMDN	-	137	2.196	2.872	2.802
4.	Total Realisasi Investasi PMA (Rp Trilyun)	-	8,408	36,272	20,226	17,814
5.	Jumlah LKPM PMA	-	119	275	440	805
6.	Total Realisasi Investasi PMDN (Rp Trilyun)	-	5,845	4,652	5,497	7,640
7.	Jumlah LKPM PMDN	-	18	1.921	2.432	1.997
8.	Total Penyerapan Tenaga Kerja PMA dan PMDN (orang)	-	68.570	61.430	70.906	34.008
	a. Tenaga Kerja Indonesia (orang)	-	68.459	61.027	70.714	-
	b. Tenaga kerja Asing (orang)	-	111	403	192	-
9.	Total Penyerapan Tenaga Kerja PMA (orang)	-	49.413	54.854	64.999	29.412
	a. Tenaga Kerja Indonesia (orang)	-	49.316	54.464	64.807	-
	b. Tenaga Kerja Asing (orang)	-	97	390	192	-
10.	Total Penyerapan Tenaga Kerja PMDN (orang)	-	19.157	6.596	5.911	4.596
	a. Tenaga Kerja Indonesia (orang)	-	19.143	6.583	5.911	-
	b. Tenaga Kerja Asing (orang)	-	14	13	-	-

1. Kepemudaan dan Olahraga

Prestasi olahraga merupakan gambaran dari keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 pasal 20. Olahraga prestasi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan

martabat bangsa. Selaras dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan peranan pemuda dan olahraga, Pemerintah Kabupaten Karawang terus melaksanakan pembinaan dan memperbaiki sarana dan prasarana keolahragaan.

1) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Tabel 2.154
Capaian Kinerja Peningkatan Peran serta Kepemudaan
Tahun 2011-2014

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah Organisasi Pemuda yang dibina	50	60	62	65

Sumber: Kantor Kesbangpollinmas dan Disdikpora Kab. Karawang

2) Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga

Tabel. 2.155
Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga
Tahun 2011-2014

No.	Cabang Olah Raga	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
1	Jumlah cabang olah raga prestasi yang dibina	18	20	28	35
2	Jumlah sarana olah raga yang dibangun	-	-	1	1

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Karawang

Tabel. 2.156
Daftar Sarana Olah Raga di Kabupaten Karawang
Yang Berstandar Kabupaten dan Nasional Tahun 2014

No.	Tempat/Alamat	Sarana	Standar/Kelas
1	Stadion Singaperbangsa	Sepakbola	Nasional
2	Track Sintetis STD Singaperbangsa	Atletik	Nasional
3	Track Sepatu Roda Karangpawitan	Sepatu Roda	Nasional
4	Sanggar Anggar	Anggar	Nasional
5	GOR Panatayuda	Bola Basket, Bola Voli, Tenis Lapangan	Kabupaten
6	Sporthall Adiarsa	Serbaguna	Nasional
7	Cipule	Dayung	Nasional

Sumber: Disdikpora dan Bagian Perlengkapan Setda Kab. Karawang

Prestasi olahraga yang diraih Kabupaten Karawang pada tahun 2014 sebagai berikut :

Tabel. 2.157
Perolehan Medali yang diraih Kabupaten Karawang pada
POPDA, PORDA dan O2SN Tahun 2014

No.	Cabang Olah Raga	Kejuaraan		
		POPDA	PORDA	O2SN
1	Bola Volly			1 Perunggu
2	Tenis Lapangan			1 Emas 1 Perunggu
3	Atletik	1 Emas 1 Perunggu	1 Perak	1 Perunggu
4	Catur		2 Perak	1 Emas
5	Pencak Silat	4 Perak 2 Perunggu	1 Perak	2 Emas
6	Anggar		5 Emas 4 Perak 5 Perunggu	
7	Judo	2 Emas 3 Perak 1 Perunggu	2 Emas 5 Perak 6 Perunggu	
8	Panjat Tebing		2 Emas	
		POPDA	PORDA	O2SN
9	Sepatu Roda		7 Emas 2 Perak 4 Perunggu	
10	Atletik	1 Perak	1 Perak	
11	Hockey		1 Perak	
12	Kempo		2 Perak 2 Perunggu	
13	Tarung Derajat		1 Perak	
14	Gulat	1 Perak 4 Perunggu	1 Perak	
15	Billiard		1 Perak 1 Perunggu	
16	Tinju		3 Perak	
17	Angkat Besi	2 Perak	1 Perunggu	
18	Balap Motor		1 Perunggu	
19	Dayung	1 Perunggu	2 Perak 1 Perunggu	
20	Karate	1 Perak	1 Perunggu	
21	Taekwondo	1 Emas 3 Perunggu	2 Perunggu	

No.	Cabang Olah Raga	Kejuaraan		
		POPDA	PORDA	O2SN
22	Renang		2 Perunggu	
23	Softball		1 Perunggu	
24	Menembak		2 Perak	
25	Lomba Martir	1 Perak		
26	Tolak Peluru	1 Perak		
27	Jalan Cepat	1 Perunggu		
28	Lempar Lembing	1 Perunggu		

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang

m. Kebudayaan

Kabupaten Karawang mempunyai potensi kebudayaan yang cukup beragam. Hal ini ditandai dengan banyaknya jenis kesenian antara lain : seni jaipongan, ketuk tilu, kliningan, calung, topeng banjet, wayang golek, egrang, barongsay, reog, ajeng/tari soja, kedok menyon dan budaya yang masih melekat dan berkembang di masyarakat Kabupaten Karawang, diantaranya : kaulinan urang lembur, babaritan, mapag cai, nadran/pesta laut, hajat bumi, nyalin, upacara ngarak pusaka, sasalimpetan, tardug, 1 Muharraman/1 Suro. Namun demikian potensi tersebut masih belum terkelola dan termanfaatkan dengan baik. Padahal apabila potensi seni dan budaya ini berhasil diletarikan, dikelola, serta dimanfaatkan dengan baik, akan berdampak kepada meningkatnya semangat masyarakat terutama generasi muda dan pelaku seni untuk lebih berperan aktif dalam melestarikan seni dan budaya asli Kabupaten Karawang.

Hal ini disikapi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karawang dengan melaksanakan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya dan Program Pengembangan Nilai-nilai Budaya. Bentuk partisipasi pada kegiatan-kegiatan yang bersifat pengembangan nilai budaya seperti Pasanggiri Mojang dan Jajaka Tingkat Kabupaten, Pementasan Kesenian Tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional, Heleran Kemilau Nusantara, Binojakrama Padalangan Tingkat Kabupaten, Pameran Potensi Daerah Tingkat Nasional, Kerjasama Penyelenggaraan Promosi Pembangunan

Daerah Melalui Karawang Expo, pembuatan peta dan rambu wisata, sinergitas dan kemitraan dengan masyarakat dalam pengembangan obyek wisata Tanjungbaru. Dalam rangka memepkenalkan budaya dan kearifan lokal Kabupaten Karawang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karawang aktif mengikuti kegiatan seni dan budaya tingkat provinsi dan nasional.

Tabel di bawah menunjukkan peran serta dan upaya Pemerintah Kabupaten Karawang dalam menjaga dan memajukan seni, budaya, dan pariwisata dari kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2014. Selain yang tercantum di dalam tabel, Kabupaten Karawang mempunyai banyak potensi objek tujuan wisata yang perlu dikaji dan dikembangkan sehingga berkontribusi secara optimal terhadap pembangunan Kabupaten Karawang.

Tabel 2.158
Pengembangan Nilai-nilai Budaya
Tahun 2011 s.d. 2014

No.	Uraian	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
1.	a. Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya (buah)	34	43	34	36
	b. Jumlah situs serta Benda Cagar Budaya (BCB) yang terkelola dengan baik (buah)	85	96	104	116
2.	Jumlah penyelenggaraan pertunjukan kebudayaan tradisional lokal serta festival seni dan budaya (kali)	75	78	86	99
3.	Jumlah grup kesenian dan pelaku seni budaya yang dibina (grup)	60	85	183	116

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karawang

Catatan: Sarana penyelenggaraan seni dan budaya terdiri atas :

1. 30 buah aula kecamatan/lapangan kecamatan yang tersebar di masing-masing kecamatan di Kab. Karawang
2. Lapang Karangpawitan
3. Panggung Disbudpar
4. *Outdoor* GOR Panatayudha
5. Gedung GOW Kabupaten Karawang
6. Gedung Pentas Seni Kampung Budaya Gerbang Karawang

7. Gedung Theatre Terbuka Kampung Budaya Gerbang Karawang

n. Perpustakaan

Dalam rangka memelihara buku bahan perpustakaan dilaksanakan melalui Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan, dengan kegiatan-kegiatan diantaranya : melakukan pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar, pembinaan layanan TBM, pembinaan pengelolaan perpustakaan desa, pembinaan perpustakaan keliling, pengolahan, pemeliharaan dan pengawetan bahan pustaka serta pembuatan bibliografi koleksi referensi perpustakaan umum, pengadaan buku-buku rujukan/referensi berupa buku ensiklopedia, kamus bahasa, buku peraturan perundang-undangan, jurnal *compact disc* dan buku peta/atlas/globe, pengadaan sarana dan prasarana perpustakaan desa, pembuatan *accession list*, koleksi perpustakaan daerah, pembuatan buku panduan/leaflet perpustakaan daerah, lomba minat baca tingkat SD se-Kabupaten Karawang, dan monitoring perpustakaan desa.

Tabel 2.159
Data Pengunjung Perpustakaan s.d. Tahun 2015

No.	Jenis Anggota	2011	2012	2013	2014	2015	Jumlah
1.	SD	3.685	2.238	2.311	2.257	1.245	10.491
2.	SMP	1.562	1.466	1.562	1.444	544	6.034
3.	SMA	2.292	1.900	1.639	1.578	703	7.409
4.	Mahasiswa	3.406	3.769	2.436	3.610	1.467	13.221
5.	Karyawan	1.815	3.939	3.931	3.771	1.533	13.456
6.	Umum	3.316	3.777	3.806	3.982	1.452	14.881
7.	PNS	1.732	745	769	902	292	4.148
	JUMLAH	17.808	17.834	16.454	17.544	7.236	69.640

Sumber: Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Karawang
Data sampai dengan 31 Mei 2015

Tabel 2.160
Data Pengunjung Perpustakaan Keliling melalui Mobil/motor Pintar Perpustakaan

2011	2012	2013	2014	2015	Jumlah
260.000	252.000	256.000	248.000	53.600	1.069.600

Sumber: Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Karawang
Data sampai dengan 31 Mei

Catatan:

1. Motor 29 unit dan mobil 4 unit operasional pustakling (mulai dilaksanakan bulan April dan Mei 2015).

2. Jumlah keseluruhan pengunjung yang memanfaatkan perpustakaan umum dan perpustakaan keliling s/d bulan Mei 2015 sebanyak 1.146.476 orang.

o. Kearsipan

Dilihat dari aspek sumber daya manusia para pengelola arsip dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang masih belum memenuhi syarat, sampai saat ini belum memiliki tenaga fungsional arsiparis yang sesuai dengan kopetensi dan kualifikasi pendidikan yang sesuai dan mayoritas pengelola arsip ini berpendidikan hanya lulusan SLTA dan belum mendapatkan pelatihan tentang kearsipan, sedangkan untuk menjadi Fungsional Arsiparis pada pengangkatan pertama harus berijazah minimal D III baik D II Kearsipan ataupun D III umum.

Fasilitas sarana dan Prasarana yang digunakan untuk mendukung pengelola arsip dinamis aktif dan arsip in-aktif yang ada di SKPD-SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang belum memenuhi standar pengelolaan arsip terutama untuk DEPO pada masing-masing SKPD untuk menyimpan arsip-arsip in-aktif, karena SKPD belum memprioritaskan kelengkapan pengadaan sarana dan prasarana kearsipan, sehingga penataan dan pengelolaaanya pun menjadi kurang sempurna yang pada akhirnya menjadi tidak terata secara tertib.

Kegiatan akusisi arsip in-aktif di masing-masing SKPD belum terlaksana sesuai dengan ketentuan, karena kebanyakan SKPD menyerahkan arsip tersebut masih dalam bentuk arsip kacau atau dalam karungan.

- 1) Program Perbaikan Administrasi Kearsipan

Tabel 2.161
Perbaikan Administrasi Kearsipan
Tahun 2011-2014

No	Uraian	2011	2012	2013	2014
1.	Arsip media baru :				
	a. Album	30	30	60	
	b. Bingkai	40	30	-	250
	c. Buku Laporan Kegiatan	1	4	4	4
2.	Tertib Arsip				

No	Uraian	2011	2012	2013	2014
	a. Buku Laporan (buku)	-	-	-	
	b. Pembinaan (orang)	60	60	30	30

Sumber: Kantor Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Karawang

2) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip

Tabel 2.162
Penyelamatan dan Pelestarian Arsip
Tahun 2011-2014

No	Uraian	2011	2012	2013	2014
1.	Arsip multimedia	1.440	1.440	47.000	47.000
2.	Jumlah arsip yang terpelihara	15.000	15.000	15.000	15.000
3.	Jumlah arsip yang diselamatkan	3.000	3.000	6.000	6.000
4.	Jumlah arsip statis sebagai sumber sejarah	10	12	2	2

Sumber: Kantor Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Karawang

3) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

Tabel 2.163
Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
Tahun 2011-2014

No	Uraian	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah pelayanan informasi kearsipan daerah	480	720	720	720
2.	Pemeliharaan jaringan SIM-ARDA	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit

Sumber: Kantor Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Karawang

Tabel 2.164
Penyelamatan dan Pelestarian Arsip
Sampai Dengan Tahun 2014

No	Uraian	2011	2012	2013	2014
1.	Arsip multimedia	1.440	1.440	47.000	47.000
2.	Jumlah arsip yang terpelihara	15.000	15.000	15.000	15.000
3.	Jumlah arsip yang diselamatkan	3.000	3.000	6.000	6.000
4.	Jumlah arsip statis sebagai sumber sejarah	10	12	2	2

Sumber: Kantor Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Karawang

2.5.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

Adapun analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah Kabupaten, yaitu bidang urusan pertanian, peternakan dan perikanan serta kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, pariwisata, perdagangan dan industri dan ketrasmigrasian. Adapun analisis terhadap kinerja urusan pilihan dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

a. Kelautan dan Perikanan

Tabel 2.165
Potensi Perikanan Budidaya Tahun 2011-2015

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Luas potensi tambak (Ha)	18.273,30	18.273,30	18.273,30	18.273,30	18.725,00
	Luas tambak yang telah dimanfaatkan (Ha)	15.567,40	15.567,40	15.567,40	15.571,00	15.828,8
2.	Luas potensi kolam (Ha)	1.279,40	1.279,40	1.279,40	1.188,2	1.088,80
	Luas kolam yang telah dimanfaatkan (Ha)	980,00	980,00	980,00	638,00	678,44
3.	Luas potensi mina padi (Ha)	10.580,8	10.580,8	10.580,8	10.580,8	9.241,32
	Luas mina padi yang telah dimanfaatkan (Ha)	236,7	141,0	179,1	182,0	177,2
4.	Jumlah potensi Kolam Jaring Apung (KJA) (unit)	168	168	168	148	293
	Jumlah KJA yang telah dimanfaatkan (unit)	79	79	79	83	184

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Karawang

Tabel 2.166
Potensi Perikanan Tangkap Tahun 2011-2015

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Potensi panjang pantai (km)	84,23	84,23	84,23	84,23	84,23
	Panjang pantai yang telah dimanfaatkan (km)	84,23	84,23	84,23		
2.	Potensi panjang sungai (km)	744	744	744	744	744
	Panjang sungai yang telah dimanfaatkan (km)	577	577	577		
3.	Potensi rawa (Ha)	20,00	20,00	20,00	72,10	72,10
	Rawa yang telah dimanfaatkan (Ha)	5,00	5,00	5,00		
4.	Potensi bekas galian C (Ha)	282,30	282,30	282,30	282,3	282,3
	Bekas galian C yang telah dimanfaatkan (Ha)	132,00	132,00	132,00		

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Karawang

Tabel 2.167
Produksi Perikanan Tangkap (Ton) Tahun 2011-2015

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Perikanan Tangkap Laut	7.756,88	8.330,08	8.551,08	8.580,93	8.499,87
2.	Perikanan Tangkap Perairan Umum	167,56	206,78	200,91	185,62	92,12
	a. Sungai	56,25	67,23	64,83	64,06	29,61
	b. Rawa	35,12	43,79	41,33	28,32	7,96
	c. Bekasi Galian C	76,19	95,76	94,75	93,24	54,55
	JUMLAH	7.924,44	8.536,86	8.751,99	8.766,55	8.591,99

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Karawang

Tabel 2.168
Jumlah Produksi dan dan Populasi Perikanan Tahun 2011-2015

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
A.	Jumlah Produksi (ton)	46.320,51	47.121,21			
1.	Ikan	46.320,51	47.121,21	48.604,67	49.923,55	51.075,14

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Karawang

Tabel 2.169
Jumlah Pendapatan Pembudidaya Ikan dan Nelayan di Kabupaten Karawang Tahun 2011-2014 (Rp/thn)

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pembudidaya Ikan	13.350.000	13.430.000	13.927.000	14.456.000	15.122.300
2.	Nelayan	21.400.000	21.722.000	22.252.000	22.318.000	23.144.200
3.	Pengolah hasil perikanan	16.686.000	17.702.000	17.833.000	18.368.000	18.919,040
4.	Petani Garam	6.280.000	7.873.500	7.921.000	8.091.000	8.544.300

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Karawang

Tabel 2.170
Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Hasil
Perikanan Tahun 2011-2015

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	
1.	Jumlah hasil perikanan yang dipasarkan ke luar Karawang	12.310 ton	12.700 ton	13.245,90 ton	13.643,27 ton	14.052,57 ton	Bogor, Jakarta, Bekasi, Depok
2.	Jumlah hasil perikanan yang dipasarkan di Karawang	18.724 ton	19.303 ton	19.867,90 ton	20.463,93 ton	26.126,85 ton	Bandung, Subang, Purwakarta, Bogor, Jakarta, Bekasi, Depok
3.	Jumlah usaha kecil (<i>home industry</i>) perikanan	2.631 orang	2.763 orang	2.763 orang	2.845 orang	2.930 orang	
4.	Jumlah kelompok hasil olahan perikanan	126 kelompok	130 kelompok	130 kelompok	134 kelompok	138 kelompok	

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Karawang

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Hasil Perikanan mengalami peningkatan mulai tahun 2011 sampai dengan 2015 untuk semua indikator. Pada tahun 2015 terjadi peningkatan dibanding tahun 2011 sebesar :

- Jumlah hasil perikanan yang dipasarkan ke luar Karawang sebesar 14,16%;
- Jumlah hasil perikanan yang dipasarkan di Karawang sebesar 12,57%;
- Jumlah usaha kecil (*home industry*) perikanan sebesar 11,36%; dan
- Jumlah kelompok hasil olahan perikanan sebesar 9,52%.

Tabel 2.171
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan
Pengendalian Sumberdaya Kelautan Tahun 2011-2015

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Pembinaan Pokmaswas	2 kali	6 kali	10 kali	10 kali	10 kali
2.	Jumlah Pembinaan TPI	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	12 kali
3.	Jumlah Kapal Pengawasan	1 unit	1 unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
4.	Jumlah Perahu POKMASWAS	4 unit	6 unit	8 unit	8 unit	8 unit

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
5.	PAD sektor perikanan (Rp)	18.784.790,00	36.250.248,00	256.235.845	299.634.727	255.329.844

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Karawang

Analisa terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan untuk setiap indikator adalah sebagai berikut :

- Jumlah pembinaan pokmaswas tahun 2015 meningkat sebesar 400% dibanding tahun 2011;
- Jumlah pembinaan TPI meningkat sebesar 200%;
- Jumlah kapal pengawasan tetap;
- Jumlah perahu pengawasan meningkat 100%; dan
- PAD sektor perikanan meningkat sebesar 1.259,24%, hal ini disebabkan adanya penyerahan penyelenggaraan retribusi TPI dari Provinsi ke Kabupaten berdasarkan PP No. 38 Th. 2008. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kab. Karawang mengeluarkan Perda No.3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Perbup no 106 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan TPI dan Pemungutan TPI. Sejak itu Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Karawang gencar melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap para pengurus TPI.

Tabel 2.172
Produk Unggulan Perikanan Tahun 2011-2015

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah desa yang memiliki produk unggulan perikanan	Desa Cicinde Utara (Banyusari) dan Desa Bayurkidul (Cilamaya Kulon)	Desa Cicinde Utara (Banyusari) dan Desa Bayurkidul (Cilamaya Kulon)	Desa Cicinde Utara (Banyusari) dan Desa Bayurkidul (Cilamaya Kulon)	Desa Cicinde Utara (Banyusari) dan Desa Bayurkidul (Cilamaya Kulon)	Desa Cicinde Utara (Banyusari) dan Desa Bayurkidul (Cilamaya Kulon)
2.	Produk unggulan perikanan					
	a. ikan asin	3.323 ton	3.429 ton	3.571,20 ton	3.953,56 ton	4.072,17 ton
	b. pindang	26.390 ton	27.200 ton	28.119,00 ton	28.356,00 ton	29.206,68 ton
	c. terasi	254 ton	271 ton	282,96 ton	285,36 ton	293,92 ton
	d. Mini Plan (Rajungan)	-	374 ton	392,70 ton	783,00 ton	807,00 ton
	e. Kerupuk	1.068 ton	1.104 ton	1.140,00 ton	1.178,00 ton	1.213,34 ton

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Karawang

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan menunjukkan peningkatan setiap tahunnya untuk setiap produk unggulan perikanan. Namun untuk jumlah desa yang memiliki produk unggulan perikanan tidak mengalami penambahan dari tahun 2011.

Tabel 2.173
Jumlah Sarana Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karawang Tahun 2011-2014 (Unit)

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014
1.	TPHT	14	15	15	15
2.	BBI	1	2	2	2
3.	TPI	11	12	12	12
4.	PPP	2	2	2	2

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Karawang

Jumlah sarana perikanan dan kelautan Kabupaten Karawang hampir selalu tetap, kecuali tahun 2012 yang mengalami peningkatan sebanyak 1 unit untuk TPHT, BBI dan TPI.

Sesuai dengan potensi yang tersedia, yakni panjang garis pantai lebih kurang 84,23 Km dan banyaknya muara dan anak sungai yang bisa dimanfaatkan sebagai tempat berlabuhnya kapal-kapal penangkap ikan (nelayan), setiap tahunnya armada nelayan yang melakukan sandar dan pelelangan di Kabupaten Karawang selalu meningkat menjadi 258.608 unit pada Tahun 2015.

Tabel 2.174
Pengembangan Sistem Penyuluhan Tahun 2011-2014

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014
1.	Tenaga teknis professional perikanan	17	17	17	
2.	Tenaga teknis professional kelautan	1	1	1	

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan dan BP4K Kab. Karawang

Program ini bertujuan untuk meningkatkan tersedianya sarana evaluasi dan layanan informasi bidang perikanan dan kelautan dengan sasaran tersedianya data potensi dan produksi bidang perikanan dan kelautan, dan laporan evaluasi kegiatan bidang perikanan dan kelautan selama satu tahun.

Tabel 2.175
Potensi dan Kondisi Terumbu Karang Tahun 2015

Kecamatan	Luas (Ha)	Kondisi		
		Rusak	Sedang	Baik
Tempuran	247,27	136,17	105,10	6,00
Cilamaya Kulon	1.229,80	677,70	522,80	29,30
Cilamaya Wetan	614,40	338,60	261,10	14,70
JUMLAH	2.091,47	1.152,47	889,00	50,00

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Karawang

Tabel 2.176
Potensi dan Kondisi Magrove (Hutan Bakau) Tahun 2015

Kecamatan	Luas (Ha)	Kondisi		
		Rusak	Sedang	Baik
Tujaya	1.463,80	428,25	991,41	44,14
Cibuaya	1.583,47	1.278,74	295,40	9,33
Cilamaya Kulon	350,45	-	92,00	258,45
Cilamaya Wetan	793,38	-	684,00	109,38
Cilebar	326,50	-	226,00	100,50
Pakisjaya	1.035,98	536,63	384,72	114,63
Pedes	520,00	-	520,00	-
Tempuran	517,42	-	512,00	5,42
Tirtajaya	3.414,93	3.156,69	243,43	14,81
JUMLAH	10.005,93	5.400,31	3.949,96	656,66

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Karawang

b. Pariwisata

Tabel 2.177
Pengembangan Destinasi Pariwisata
Tahun 2011-2014

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014
1.	Persentase peningkatan jumlah objek wisata yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	78%	83%	89%	94%
2.	Persentase peningkatan penyediaan sarana prasarana pendukung pariwisata	78%	83%	89%	94%
3.	Persentase peningkatan mutu dan pelayanan pariwisata	73%	80%	86%	93%
4.	Persentase penyediaan informasi pariwisata	78%	83%	89%	94%
5.	Persentase tingkat penyerapan tenaga kerja pariwisata	73%	79%	85%	91%

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karawang

Tabel 2.178
Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Tahun 2011-2014

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah kunjungan wisatawan per tahun	323.402	459.826	419.628	428.895
2.	Keikutsertaan dalam pameran pariwisata (kali)	6	6	6	5

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karawang

Tabel 2.179
Pengembangan Kemitraan
Tahun 2011-2014

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah pelaku usaha kepariwisataan				
	a. Jumlah hotel (buah)	23	23	24	29
	b. Jumlah restoran (buah)	93	115	121	123
	c. Usaha pariwisata (buah)	7	7	21	23

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karawang

Catatan : Usaha Pariwisata dalam bentuk Travel Biro

Potensi wisata dan obyek wisata di Kabupaten Karawang diantaranya adalah :

a) Obyek wisata budaya berupa

1. Situs

Situs yang telah dikelola oleh BP3 (Balai Pengelolaan Pengembangan Purbakala) Serang di Kabupaten Karawang ada 2 (dua) lokasi :

- a. Situs Batujaya (terdiri atas situs Segaran 1 s.d. 8 dan situs Telagajaya 1 s.d. 8) berlokasi di Kecamatan Batujaya
- b. Situs Cibuaya (terdiri atas situs Lanang dan situs Wadon) berlokasi di Kecamatan Cibuaya.
- c. Situs Kebonjambe di Kecamatan Tegalwaru.

2. Kawasan Cagar Budaya

- a. Makam Mantan para Bupati Karawang, berlokasi di Kecamatan Cilamaya Kulon
- b. Kawasan Kuta Tandingan, bertempat di Kecamatan Ciampel
- c. Patilasan Tubagus Rangin, bertempat di Kecamatan Rawamerta

- d. Patilasan Joko Tingkir, bertempat di Kecamatan Rawamerta
 - e. Makam Syekh Quro, tempat/makam/petilasan penyebaran agama Islam di Kabupaten Karawang oleh Syekh Quro.
- b) Obyek wisata sejarah, berupa tempat-tempat bersejarah yang monumental kaitannya dengan masa perjuangan rakyat Kabupaten Karawang untuk merebut kemerdekaan dari penjajah bangsa Jepang dan Belanda, antara lain :
1. Tugu Kebulatan Tekad Rengasdengklok, bertempat di Kecamatan Rengasdengklok
 2. Rumah Djiouw Ki Siong, bertempat di Kecamatan Rengasdengklok
 3. Monumen Rawa Gede, bertempat di Kecamatan Rawamerta
 4. Monumen Suroto Kunto, bertempat di Kecamatan Karawang Timur
 5. Monumen Resimen V Cikampek, bertempat di Kecamatan Cikampek
 6. Taman Makam Pahlawan, bertempat di Kecamatan Purwasari
 7. Peristiwa Gunung Goong di Kecamatan Pangkalan
 8. Peristiwa Rawa Sikut, di Rawasikut Kecamatan Telagasari
 9. Peristiwa Karawang, Karawang dan sekitarnya.
- c) Obyek wisata Tirta berupa Danau buatan dan kolam renang, diantaranya :
1. Situ Kamojing, bertempat di Kecamatan Cikampek
 2. Bendungan Parisdo Walahar, bertempat di Kecamatan Klari
 3. Situ Gempol, bertempat di Kecamatan Karawang Barat
 4. Situ Cipule, bertempat di Kecamatan Ciampel
 5. Danau San Diego Hill, bertempat di Kecamatan Telukjambe Barat
 6. Kolam renang Sportif, bertempat di Kecamatan Karawang Barat

7. Kolam Renang Tirta Angsana, bertempat di Kecamatan Karawang Barat
 8. Kolam Renang PD. Prakasa, bertempat di Kecamatan Karawang Barat
 9. Kolam Renang Mutiara, bertempat di Kecamatan Rengasdengklok
 10. Kolam Renang DG'S Pool, bertempat di Kecamatan Rengasdengklok
 11. Kolam Renang PKPRI KGL, bertempat di Kecamatan Lemahabang
 12. Kolam Renang Tirtasari Cikampek, bertempat di Kecamatan Cikampek
 13. Kolam Renang PT. Bukit Muria Jaya Resinda, bertempat di Kecamatan Telukjambe Barat
 14. Kolam Renang Tirtakencana Jatisari, bertempat di Kecamatan Jatisari
 15. Kolam Renang Tirta Ilani Cilamaya Kulon, bertempat di Kecamatan Cilamaya Kulon
 16. Kolam Renang Permata Rubi di Kecamatan Karawang Barat
 17. Wahana Bermain Batu Tumpang Adventure Camp, bertempat di Kecamatan Tegalwaru
 18. *Waterboom* di Kecamatan Rengasdengklok
 19. Kampung Wisata Curug Cigentis di Kecamatan Pangkalan
 20. Water Park Wonderland di Kecamatan Telukjambe Timur
 21. Kampung Budaya Gerbang Karawang di Kecamatan Telukjambe Timur
- d) Obyek wisata Alam berupa alam pengunungan dan pantai, diantaranya:
1. Curug Bandung, bertempat di Kecamatan Tegalwaru
 2. Curug Peuteuy, bertempat di Kecamatan Tegalwaru
 3. Curug Cigentis, bertempat di Kecamatan Tegalwaru
 4. Curug Lalay, bertempat di Kecamatan Tegalwaru
 5. Curug Cipanundaan, bertempat di Kecamatan Tegalwaru
 6. Curug Santri, bertempat di Kecamatan Tegalwaru

7. Curug Cikoleangkak, bertempat di Kecamatan Tegalwaru
 8. Pantai Tanjungpakis, bertempat di Kecamatan Pakisjaya
 9. Pantai Samudra Baru, bertempat di Kecamatan Pedes
 10. Pantai Tanjung Baru, bertempat di Kecamatan Cilamaya Kulon
 11. Gunung Sanggabuana, bertempat di Kecamatan Tegalwaru
 12. Pantai Pasir Putih, bertempat di Kecamatan Cilamaya Kulon
 13. Buana Wisata Cikeong di Kecamatan Tirtajaya
- e) Obyek wisata keagamaan berupa tempat-tempat peribadatan, antara lain :
1. Mesjid Agung Karawang, tempat beribadah agama Islam
 2. Candi Jiwa, tempat pemujaan agama Budha
 3. Vihara Sian Jin Kupo, tempat peribadatan agama Kong Hu Chu/Umat Budha
 4. Makam Syekh Quro, tempat/makam/petilasan penyebaran agama Islam di Kabupaten Karawang
 5. Gereja Immanuel, tempat peribadatan agama Kristen Protestan
 6. Gereja Sion, tempat peribadatan agama Kristen Katholik
 7. Gereja Kristus Raja Karawang tempat peribadatan Agama Katholik
- f) Obyek wisata kuliner, berupa makanan khas Karawang antara lain:
1. Bolu Kijing Desa Kutagandok Kecamatan Kutawaluya
 2. Opak Kawung, nasi tangkar, telur asin, semprong Mondy Kecamatan Karawang Barat
 3. Pepes Jambal Walahar di Bendungan Parisdo Kecamatan Klari
 4. Sorabi Hijau, Kerupuk Udang dan Kue Semprong Kecamatan Rengasdengklok
 5. Kupat Tahu, Sangu Tahu/Sangtau Kecamatan Karawang Timur

6. Resto Alam Sari Interchange Kecamatan Telukjambe Timur
7. Saung Beureum di Rengasdengklok
8. Pemancingan Ajo di Kecamatan Telukjambe Timur
9. Pemancingan Rio di Kecamatan Karawang Barat
10. Rumah Makan Cibiuk di Kecamatan Telukjambe Timur
11. Rumah Makan Sindang Reret di Kecamatan Telukjambe Timur
12. Restoran Lebaksari Indah di Kecamatan Telukjambe Timur
13. Pemancingan dan Restoran Saung Endah di Kecamatan Karawang Timur
14. Restoran Danau Bukit Indah Alamsari di Kecamatan Cikampek
15. Restoran Alam Ceria di Kecamatan Karawang Timur
16. Opak Cibuaya di Kecamatan Cibuaya

Secara keseluruhan jumlah obyek wisata yang ada mencapai 32 buah terdiri dari 21 buah obyek wisata buatan dan 13 buah obyek wisata alam. Selain itu sejumlah prasarana penunjang kepariwisataanpun sudah tersedia, diantaranya hotel bintang berjumlah 10 buah dan hotel non bintang berjumlah 19 buah.

c. Pertanian

Kabupaten Karawang merupakan lumbung padi Jawa Barat dan salah satu daerah yang dapat memberikan kontribusi kebutuhan beras nasional, setiap tahunnya mencapai ±811.485 ton/tahun.

Tabel 2.180
Jenis Komoditas dan Luas Tanam Tanaman Padi Sawah, Palawija, dan Hortikultura Kabupaten Karawang Tahun 2011-2015 (Ha)

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Padi Sawah	197.013	195.924	197.599	198.644	195.726
2	Kedelai	886	152	640	486	1.839
3	Kacang Hijau	1.432	819	621	789	122
4	Jagung Pipilan Kering	1.553	1.260	486	167	1.108
5	Ketela Pohon	231	499	372	297	177
6	Ubi Jalar	21	32	29	24	6

Sumber : Dinas Pertanian Kehutanan Perkebunan danPeternakanKab. Karawang

Tabel 2.181
Jenis Komoditas dan Produktivitas Tanaman Padi Sawah,
Palawija, dan Hortikultura Kabupaten Karawang Tahun 2011-
2015 (Kw/Ha)

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Padi Sawah	74,08	74,37	75,61	76,05	79,5
2	Kedelai	16,32	13,30	16,60	14,36	12,96
3	Kacang Hijau	11,28	10,80	11,05	11,42	16,22
4	Jagung Pipilan Kering	56,61	58,98	59,00	58,00	58,68
5	Ketela Pohon	195	195	195	195	145,04
6	Ubi Jalar	160	160	150	150	78,67

Sumber : Dinas Pertanian Kehutanan Perkebunan dan Peternakan Kab. Karawang

a) Potensi tanaman padi :

- (1) Luas lahan sawah : 97.577 Ha
- Sawah pengairan teknis : 92.916 Ha
 - Sawah setengah teknis : 0 Ha
 - Sawah pengairan sederhana : 0 Ha
 - Sawah tadah hujan : 4.661 Ha
 - Sawah irigasi desa/non PU : 0 Ha
- (2) Luas pemanfaatan lahan sawah sebagai berikut :
- Ditanami padi 2 kali satu tahun : 92.920 Ha
 - Ditanami padi 3 kali satu tahun : 3.271 Ha
 - Ditanami padi 1 kali setahun : 1.338 Ha

Pada tahun 2015 produksi padi mencapai 1.531.104,5 ton GKP yang terdiri dari produksi padi sawah 1.524.842,55 ton GKP dan produksi padi gogo 6.261,95 ton GKP. Luas panen padi sawah mencapai 190.725 Ha dengan produktivitas 79,99 kwintal GKP/Ha, dan luas panen padi gogo mencapai 1.901 Ha dengan produktivitas 32,9 kwintal GKP/Ha.

Tabel 2.182
Perkembangan Luas Lahan Sawah di Kab. Karawang
Per Desember Tahun 2011-2015 (dalam Ha)

No	Kecamatan	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Karawang Barat	2.243	2.201	2.201	2.119	1.824
2.	Karawang Timur	1.744	1.744	1.744	1.535	1.497
3.	Majalaya	2.233	2.233	2.233	2.233	2.233
4.	Klari	2.445	2.445	2.445	2.445	2.445
5.	Telukjambe Barat	2.378	2.378	2.378	2.260	2.260
6.	Telukjambe Timur	1.135	1.135	1.135	1.135	826
7.	Ciampel	583	852	583	583	852
8.	Pangkalan	2.341	2.341	2.341	2.341	2.341
9.	Tegalwaru	1.912	1.912	1.912	1.912	1.912
10.	Rengasdengklok	2.026	2.026	2.026	2.026	2.026
11.	Jayakarta	3.531	3.531	3.531	3.531	3.531

No	Kecamatan	2011	2012	2013	2014	2015
12.	Kutawaluya	4.372	4.372	4.372	4.372	4.372
13.	Batujaya	4.931	4.931	4.931	4.931	4.931
14.	Tirtajaya	5.658	5.658	5.658	5.658	5.658
15.	Pakisjaya	3.360	3.360	3.360	3.360	3.166
16.	Pedes	5.156	5.156	5.156	5.156	5.156
17.	Cilebar	5.395	5.395	5.395	5.395	5.395
18.	Cibuaya	4.416	4.416	4.416	4.416	3.946
19.	Cikampek	725	725	725	725	701
20.	Purwasari	1.611	1.611	1.611	1.611	1.611
21.	Tirtamulya	2.521	2.521	2.521	2.521	2.521
22.	Jatisari	4.067	4.067	4.067	4.067	4.067
23.	Banyusari	3.814	3.814	3.814	3.814	3.814
24.	Kotabaru	1.413	1.434	1.434	1.332	1.332
25.	Cilamaya Wetan	5.218	5.218	5.218	5.218	5.216
26.	Cilamaya Kulon	4.570	4.570	4.570	4.570	4.570
27.	Telagasari	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
28.	Lemahabang	3.798	3.798	3.798	3.798	3.798
29.	Rawamerta	4.191	4.191	4.191	4.191	4.191
30.	Tempuran	6.480	6.480	6.480	6.480	6.480
JUMLAH		98.612	98.615	98.346	97.835	97.577

Sumber : Dinas Pertanian Kehutanan Perkebunan dan Peternakan Kab. Karawang

b) Potensi Palawija dan Hortikultura

Palawija yang ditanam antara lain: kedelai, kacang tanah, kacang hijau, jagung, ketela pohon dan ubi. Pada tahun 2015 luas panen kedelai mencapai 1.793 Ha dengan produktivitas 12,9 kwintal bi kering/Ha, sedangkan luas panen kacang hijau 113 Ha dengan produktivitas 16,22Kw/Ha, produksi jagung sebesar 2.611,25 Ton pipilan kering dengan luas panen 445 Ha dan produktivitas 58,68Kw pipilan kering/Ha, produksi ketela pohon 2.364,17 ton dengan luas panen 163 Ha dan produktivitas 145,04Kw/Ha, ubi jalar 47,2 ton dengan luas panen 6 Ha dan produktivitas 78,67Kw/Ha.

Tanaman hortikultura yang dibudidayakan antara lain: jamur merang, kacang panjang, mentimun, terong, caisin, kangkung, bayam dan cabe merah/rawit, petsai dan mentimun. Jamur merang merupakan komoditas yang dijadikan prioritas unggulan lokal sehingga berbagai upaya dalam pengembangan komoditas ini senantiasa dilakukan secara terintegrasi.

Pada tahun 2015 produksi jamur merang mencapai 4.131 ton dengan produktivitas 2,40Kw/kubung. Terjadi penurunan produksi sebesar 541 ton atau 11,58% dibandingkan tahun 2014. Jumlah kubung tahun 2015 yang memproduksi juga mengalami

penurunan dari 2.030 kubung menjadi 1.723 kubung. Dari sisi pemasaran ada kenaikan harga jual jamur dari Rp. 15.000./kg menjadi Rp 23.000/kg.

Keberhasilan pembangunan di Bidang Pertanian selama ini menunjukkan hasil yang menggembirakan. Produktivitas padi sawah pada tahun 2014 mencapai 76,05 Kw GKP/Hektar naik menjadi 79,99 Kw GKP/hektar pada tahun 2015. Produktivitas padi gogo pada tahun 2014 sebesar 40,83Kw GKP/ha menurun menjadi 32,9kw GKP/ha pada tahun 2015. Produksi padi sawah pada tahun 2014 mencapai 1.485.298 ton GKP naik menjadi 1.524.842,55 ton GKP, sedangkan produksi padi gogo tahun 2014 mencapai 13.204 ton GKP pada tahun 2015 turun menjadi 6.261,95 ton GKP.

Perkembangan luas panen, produksi dan produktivitas padi sawah dan padi gogo dari tahun 2011 sampai dengan 2015 tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.183
Perkembangan Produksi dan Produktivitas Padi Sawah
Tahun 2011 s.d. 2015

No.	Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton GKP)	Produktivitas (Kw/Ha)
1	2011	197.004	1.459.406	74,08
2	2012	193.458	1.438.775	74,37
3	2013	195.929	1.481.466	75,61
4	2014	195.285	1.485.298	76,05
5	2015	190.725	1.524.842,55	79,95

Sumber : Dinas Pertanian Kehutanan Perkebunan dan Peternakan Kab. Karawang

Tabel. 2.184
Perkembangan Produksi dan Produktivitas Padi gogo
Tahun 2011 s.d. 2015

No.	Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton GKP)	Produktivitas (Kw/Ha)
1	2011	2.908	11.316	39,97
2	2012	2.427	7.357	39,01
3	2013	3.338	11.400	34,15
4	2014	3.234	13.204	40,57
5	2015	1.901	6.261,95	32,94

Sumber : Dinas Pertanian Kehutanan Perkebunan dan Peternakan Kab. Karawang

Tabel. 2.185
Perkembangan Produksi dan Produktivitas Palawija
Tahun 2011 s.d. 2015

No.	Tahun	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kw/Ha)
1	2011	22.127	49,34
2	2012	17.265	64,86
3	2013	12.970	48,59
4	2014	12.651	51,13
5	2015	8.004,04	27,11

Sumber : Dinas Pertanian Kehutanan Perkebunan danPeternakanKab. Karawang

Tabel. 2.186
Perkembangan Produksi dan Produktivitas Jamur Merang
Tahun 2011 s.d. 2015

No.	Tahun	Jumlah Kubung (unit)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kw/kubung)
1	2011	2.560	5.632	2,20
2	2012	2.610	5.742	2,25
3	2013	2.349	5.403	2.30
4	2014	2.030	4.672	2,30
5	2015	1.723	4.131	2,40

Sumber : Dinas Pertanian Kehutanan Perkebunan danPeternakanKab. Karawang

Tabel. 2.187
Jenis Komoditas dan Luas Tanam Tanaman Padi Sawah,
Palawija, dan Hortikultura Kab. Karawang
Tahun 2011-2015 (Ha)

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Padi Sawah	197.013	195.924	197.599	198.644	195.726
2.	Kedelai	886	152	640	486	1.839
3.	Kacang Hijau	1.432	819	621	789	122
4.	Jagung pipilan kering	535	1.260	486	167	1.108
5.	Ketela Pohon	231	499	372	297	177
6.	Ubi Jalar	21	32	29	24	6

Sumber : Dinas Pertanian Kehutanan Perkebunan dan Peternakan Kab. Karawang

Tabel 2.188
Jenis Komoditas dan Produktivitas Tanaman Padi Sawah,
Palawija, dan Hortikultura Kab. Karawang
Tahun 2011-2015 (kw/ha)

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Padi Sawah	74,08	74,37	75,61	75,49	79,48
2.	Kedelai	16,32	13,30	16,60	14,36	12,96
3.	Kacang Hijau	11,28	10,80	11,05	11,42	16,22
4.	Jagung pipilan kering	56,61	58,98	59,00	58,00	58,68
5.	Ketela Pohon	195	195	195	195	145,04
6.	Ubi Jalar	160	160	150	156	78,67

Sumber : Dinas Pertanian Kehutanan Perkebunan dan Peternakan Kab. Karawang

Tabel 2.189
Data Produksi dan Produktivitas Padi
Tahun 2011-2015

No.	Jenis Komoditas	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Padi Sawah					
	Luas Panen (ha)	197.004	193.458	195.929	195.285	190.725
	Produksi (Ton GKP)	1.459.406	1.438.775	1.481.466	1.485.298	1.524.842,55
	Produktivitas (Kw/Ha)	74,08	74,37	75,61	76,05	79,9
2.	Padi Ladang					
	Luas Panen (ha)	2.908	2.427	3.338	3.234	1901
	Produksi (Ton GKP)	11.316	7.357	11.400	13.204	6.261,95
	Produktivitas (Kw/Ha)	39,94	39,01	34,15	40,,83	32,9
	Jumlah Produksi (ton GKP)	1.470.722	1.446.132	1.492.866	1.498.502	1.531.104,5

Sumber : Dinas Pertanian Kehutanan Perkebunan dan Peternakan Kab. Karawang

Tabel 2.190
Data Produksi Palawija (Ton) Tahun 2011-2015

No.	Jenis Komoditas	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jagung tua	3.021	2.323	1.905	116	2.611,25
	Jagung muda	7.662	5.489	4.494	3.214	0
2.	Kedelai tua	595	73	1.046	326	2.322,98
	Kedelai muda	3.827	803	360	350	0
3.	Kacang tanah	380	517	424	600	475,14
4.	Kacang hijau	1.800	1.800	1.097	890	183,31
5.	Ubi kayu	4.505	6.100	3.366	6.826	2.364,17
6.	Ubi jalar	337	161	278	329	47,2
	Jumlah produksi	22.127	17.265	12.970	12.651	8.004,05
	Produktivitas	49,34	64,86	48,59	51,13	27,11

Sumber : Dinas Pertanian Kehutanan Perkebunan dan Peternakan Kab. Karawang

Tabel 2.191
Data Jumlah Kubung, Produksi dan Produktivitas
Jamur Merang

No.	Komoditas	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jamur Merang					
	Jumlah kubung (unit)	2.560	2.610	2.349	2.030	1.723
	Produksi (ton)	5.362	5.872	5.403	4.672	4.131
	Produktivitas (Kw/Kbg/panen)	2,20	2,25	2,30	2,30	2,40

*) Data semester I 2015

Sumber : Dinas Pertanian Kehutanan Perkebunan dan Peternakan Kab. Karawang

Tabel 2.192
Peningkatan Kesejahteraan Petani
Tahun 2011-2015

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pendapatan Petani	14.349.700	15.227.700	17.817.130	18.532.000	27.275.000

Sumber : Dinas Pertanian Kehutanan Perkebunan dan Peternakan Kab. Karawang

Keterangan : Asumsi Pendapatan petani padi sawah/ha/musim

Tabel. 2.193
Perkembangan Produksi Hasil Peternakan (ton)
Tahun 2011 s.d. 2015

No.	Tahun	Daging	Telur
1	2011	10.250,00	4.500,00
2	2012	10.361,50	4.625,00
3	2013	9.325,35	4.163,00
4	2014	9.116,25	4.023,00
5	2015	8.988,00	3.974,40

Sumber : Dinas Pertanian Kehutanan Perkebunan dan Peternakan Kab. Karawang

Tabel 2.194
Jumlah Konsumsi per Kapita Tahun 2011-2015 (kg/kap/th)

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Daging	10,00	10,10	9,09	9,00	8,69
2.	Telur	9,00	9,25	9,00	9,00	8,75
3.	Susu	0,28	0,29	0,25	0,20	0,19

Sumber : Dinas Pertanian Kehutanan Perkebunan dan Peternakan Kab. Karawang

Tabel 2.195
Jumlah Produksi dan Populasi Peternakan
Tahun 2011-2015

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
A.	Jumlah Produksi (ton)					
1.	Daging	10.250,00	10.361,50	9.325,35	9.116,25	8.988,00
2.	Telur	4.500,00	4.625,00	4.163,00	4.023,00	3.974,40
3.	Susu	53,00	54,00	50,00	40,00	34,16
B.	Jumlah Populasi (ekor)					
1.	Ternak besar	13.688	13.171	11.092	10.702	10.721
2.	Ternak kecil	2.491.784	3.244.866	3.762.101	3.756.102	3.599.460
3.	Unggas	15.469.102	14.700.298	14.410.439	14.109.338	12.747.147

Sumber : Dinas Pertanian Kehutanan Perkebunan dan Peternakan Kab. Karawang

Tabel 2.196
Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
Tahun 2011-2015

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pendapatan Peternak	17.000.000	18.500.000	19.500.000	20.500.000	19.000.000

Sumber : Dinas Pertanian Kehutanan Perkebunan dan Peternakan Kab. Karawang

d. Kehutanan

Secara umum pelestarian sumberdaya alam dilakukan dengan tujuan untuk : (1) memantapkan, melindungi dan mengamankan keberadaan kawasan hutan sebagai aset negara dan (2) menjaga fungsi serta memulihkan hutan dan lahan

kritis. Rehabilitasi hutan dan lahan dilaksanakan dalam rangka mengurangi lahan kritis, baik untuk hutan darat maupun hutan pantai. Hasil Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis (GRLK) dan Gerakan Rehabilitasi Hutan (GERHAN) yang dimulai tahun 2004 telah berhasil melakukan penanaman untuk mengurangi lahan kritis seluas 8.500,5 Ha, sampai dengan tahun 2014.

Tabel 2.197
Perkembangan Rehabilitasi Lahan Kritis untuk Lahan Darat di Luas Kawasan Hutan

No.	Tahun	Luas Lahan Kritis (Ha)	Luas Penanaman (Ha)	Sisa Lahan Kritis (Ha)
1.	2004	10.354	2.500	7.854
2.	2005	7.854	125	7.729
3.	2006	5.729	2.760	4.969
4.	2007	4.969	890	4.079
5.	2008	4.079	800	3.279
6.	2009	3.279	81	3.198
7.	2010	3.198	25	3.173
8.	2011	3.173	25	3.148
9.	2012	3.148	502	2.646
10.	2013	2.646	296,8	2.349,2
11.	2014	2.419,7	270,5	2.184,4

Sumber: Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, dan Peternakan Kabupaten Karawang

Tabel 2.198
Perkembangan Rehabilitasi Lahan Kritis untuk Lahan Hutan Pantai di Luar Kawasan Hutan

No.	Tahun	Luas Lahan Kritis (Ha)	Luas Penanaman (Ha)	Sisa Lahan Kritis (Ha)
1.	2004	6.595	-	6.595
2.	2005	6.595	-	6.595
3.	2006	6.595	530	6.065
4.	2007	6.065	450	5.615
5.	2008	5.615	-	5.615
6.	2009	5.615	-	5.615
7.	2010	5.615	-	5.615
8.	2011	5.615	15	5.600
9.	2012	5.600	75	5.525
10.	2013	5.525	84,5	5.440,5
11.	2014	5.440,5	35,5	5.405,0

Sumber: Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, dan Peternakan Kabupaten Karawang

Jumlah total lahan kritis di Kabupaten Karawang pada tahun 2014 adalah 7.173,9 Ha tersebar di 14 kecamatan (9 kecamatan di wilayah pantai dan 5 kecamatan di wilayah darat). Perbandingan luas lahan kritis tahun 2011 s.d. 2014, seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.199
Perbandingan Luas Lahan Kritis Tahun 2011 s.d. 2014

No.	Kecamatan	Luas (Ha)			
		2011	2012	2013	2014
1.	Pakisjaya	1.572	1.172	1.172	1.172,0
2.	Ciampel	1.272	752	747	707,0
3.	Tegalwaru	1.134	1.054	891,5	731,5
4.	Batujaya	1.004	1.004	1.004	1.004,0
5.	Tirtajaya	830	830	830	830,0
6.	Cilamaya Wetan	664	634	627,8	612,3
7.	Pedes	520	520	515	515,0
8.	Telukjambe Timur	500	480	480	480,0
9.	Tempuran	412	402	389,5	379,5
10.	Telukjambe Barat	322	255	215	215,0
11.	Cibuaya	270	270	270	270,0
12.	Cilebar	226	211	156	156,0
13.	Pangkalan	132	92	65,3	30,3
14.	Cilamaya Kulon	92	82	81,3	71,3
T O T A L		8.950	8.171	7.444,3	7.173,9

Sumber: Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, dan Peternakan Kabupaten Karawang

Terjadinya lahan kritis di Kabupaten Karawang disebabkan antara lain karena adanya alih fungsi hutan menjadi tambak dan banyak lahan yang dimiliki oleh pengusaha di kawasan industri yang dibiarkan terlantar.

Tabel 2.200
Perkembangan Rehabilitasi Lahan Kritis untuk Lahan Darat Di Luas Kawasan Hutan

No.	Tahun	Luas Lahan Kritis (Ha)	Luas Penanaman (Ha)	Sisa Lahan Kritis (Ha)
1.	2010	3.198	25	3.173
2.	2011	3.173	125	3.043
3.	2012	3.148	502	2.646
4.	2013	2.646	296,8	2.349,2
5.	2014	2.349,2	164,8	2.313,7

Sumber: Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, dan Peternakan Kabupaten Karawang

Tabel 2.201
Perkembangan Rehabilitasi Lahan Kritis untuk Lahan Hutan Pantai di Luar Kawasan Hutan

No.	Tahun	Luas Lahan Kritis (Ha)	Luas Penanaman (Ha)	Sisa Lahan Kritis (Ha)
1.	2010	5.615	-	5.615
2.	2011	5.615	140	5.475
3.	2012	5.600	75	5.525
4.	2013	5.525	84,5	5.440,5
5.	2014	5.440,5	35,5	5.275,7

Sumber: Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, dan Peternakan Kabupaten Karawang

Tabel 2.202
Perkembangan Luas Hutan Kota di Kab. Karawang

No.	Tahun	Luas Hutan Kota (Ha)	Luas Penanaman (Ha)	Jumlah (Ha)
1.	2010	-	2	2
2.	2011	-	-	-
3.	2012	-	-	-
4.	2013	-	-	-
5.	2014	-	-	-

Sumber: Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, dan Peternakan Kabupaten Karawang

Tabel 2.203
Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan
Tahun 2011-2014

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014
1.	Lebah madu (stup)	-	-	-	20
2.	Pengembangan bambu (ha)	-	-	-	5
3.	Pengembanganwisataalam (paket)	-	-	-	2
4.	Pemanfaatanlahanbawahtegakan (ha)	5	5	5	5

Sumber: Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, dan Peternakan Kabupaten Karawang

Tabel 2.204
Penataan dan Pemantapan Kawasan Hutan
Tahun 2011-2014

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah Kajian Rencana Teknis Tahunan Rehabilitasi (RTnRHL)	-	6 buku	-	-

Sumber: Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, dan Peternakan Kabupaten Karawang

Kabupaten Karawang sampai saat ini memiliki sumber daya hutan, yang terdiri dari : hutan produksi, hutan bakau dan hutan lindung, dimana kawasan hutan produksi dan hutan lindung sebagian besar terletak di Kecamatan Pangkalan dan Tegalwaru, sedangkan hutan bakau terdapat di daerah pantai utara; yaitu di Kecamatan Batujaya, Cibuaya, Pakisjaya, Cilamaya Wetan dan Tirtajaya. Berdasarkan kondisi yang ada, sampai dengan tahun 2010 luas hutan di Wilayah Kabupaten Karawang mencapai 36.831 Ha, berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. S.276/Menhut/VII/2010, terdiri atas :

- a. Hutan Lindung : ±9.325,7 Ha
terletak di : Kecamatan Pakisjaya, Batujaya, Tirtajaya, Cibuaya dan Cilamaya Wetan.

- b. Hutan Produksi Terbatas : ±3.643,14 Ha
 terletak di : Kecamatan Tegalwaru,
 Pangkalan dan Ciampel
- c. Hutan Produksi Tetap : ±10.557,59 Ha
 terletak di : Kecamatan Telukjambe Timur,
 Telukjambe Barat, Pangkalan,
 Tegalwaru dan Ciampel.

Tabel 2.205
Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsi/Statusnya

No	Uraian	Luas (Ha)			
		2011	2012	2013	2014
A.	Kawasan Konservasi	-	-	-	-
	1. Cagar Alam	-	-	-	-
	2. Suaka Margasatwa	-	-	-	-
	3. Taman Wisata	-	-	-	-
	4. Taman Buru	-	-	-	-
	5. Taman Nasional	-	-	-	-
	6. Taman Hutan Raya	-	-	-	-
B.	Hutan Lindung	8.454	8.454	8.454	8.454
C.	Hutan Produksi				
	1. Hutan Produksi Terbatas	12.355	12.355	12.355	12.355
	2. Hutan Produksi Konservasi	2.897	2.897	2.897	2.897
	3. Hutan Kota	2	2	2	-

Sumber: Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, dan Peternakan Kabupaten Karawang

Hutan mangrove di Kabupaten Karawang tersebar di sembilan kecamatan, yaitu : Kecamatan Pakisjaya, Batujaya, Tirtajaya, Cibuya, Pedes, Cilebar, Tempuran, Cilamaya Kulon dan Cilamaya Wetan. Potensi koloni hutan mangrove yang terbesar terdapat di Kecamatan Tirtajaya, Cibuya, Cilebar dan Cilamaya, sedangkan di kecamatan-kecamatan lainnya hanya bersifat setempat dengan jumlah pohon yang tinggal beberapa batang saja. Mengingat mangrove lebih cocok tumbuh di tanah yang berpasir lumpur, khusus di daerah Pakisjaya yang struktur tanahnya hanya berpasir dan tidak berlumpur, vegetasi didominasi oleh tanaman pakis atau Pinus merkusii, bukan vegetasi mangrove.

Tabel 2.206
Luas Hutan Mangrove Wilayah Kecamatan dan Jumlah
Desa/Kelurahan Tahun 2014

No.	Kecamatan	Desa	Luas Desa (Ha)	Panjang Garis Pantai (km)	Luas Hutan Mangrove (Ha)
1.	Pakisjaya	Tanjungpakis	1.828	11,25	10
2.	Batujaya	Segarjaya	1.626	2,25	10
3.	Tirtajaya	Tambaksari	2.475	6	15
4.	Cibuaya	Sedari	2.518	12	5
		Cemarajaya	1.031	8	5
5.	Pedes	Sungaibuntu	996	4,5	10
6.	Cilebar	Pusakajaya Utara	866	6,3	65
		Mekarpohaci	872	2,25	40
7.	Tempuran	Tanjungjaya	1.008	1,7	5
		Sumberjaya	686	0,6	3
		Cikuntul	547	0,8	4
		Tempuran	479	1	2
		Ciparagejaya	480	2,5	10
8.	Cilamaya Kulon	Pasirjaya	862	0,9	5
		Sukajaya	620	3,6	25
9.	Cilamaya Wetan	Sukakerta	732	1	20
		Rawagempol Kulon	548	1,7	-
		Muara Baru	738	4,5	60
		Muara	1.569	2,8	75
	JUMLAH		20.481	73,65	369

Sumber: Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, dan Peternakan

Kabupaten Karawang

Catatan : 369 Ha adalah di luar kawasan hutan

e. Energi dan Sumberdaya Mineral

Penyambungan listrik desa (lisdas) untuk masyarakat kurang mampu pada tahun 2014 sebanyak 10.162 SR, bila dibandingkan tahun 2013 sebanyak 2.066 SR maka terjadi peningkatan sebesar 491 %. Sementara untuk penyediaan listrik tenaga surya (*solar cell*) pada tahun 2014 tidak dilaksanakan. Sedangkan penyambungan listrik desa yang bersumber dari APBD I pada tahun 2014 sebanyak 1.460 SR dengan total sambungan dari tahun 2010 sebanyak 4.000 SR. Adapun data keluarga miskin pada tahun 2010 yang belum mendapat sambungan listrik sebanyak 40.907 keluarga miskin dan sudah teraliri pada tahun 2014 sebanyak 20.374 sehingga masih tersisa 20.533 keluarga miskin yang belum mendapat sambungan listrik.

Tabel 2.207
Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
Tahun 2011-2014

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014
1.	Penyambungan Listrik Desa (Lisdes) utk masyarakat kurang mampu	1.222 SR	2.908 SR	3.342 SR	11.662 SR
2.	Penyediaan Listrik Tenaga Surya (Solar Cell)	-	32 SR	-	-

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, dan Energi Kabupaten Karawang

Pengawasan penertiban pertambangan rakyat pada tahun 2014 dan Tahun 2013 tidak dilaksanakan dikarenakan Wilayah Pertambangan (WP) baru ditetapkan pada tanggal 26 Februari 2014 serta belum terbitnya Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) dan lahirnya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tanggal 28 September 2014 yang mengatur Kewenangan Pemerintahan. Untuk penyebaran peta rawan bencana tidak dilaksanakan mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 dikarenakan penyusunan peta rawan bencana dilaksanakan oleh Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat.

Tabel 2.208
Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan Tahun 2011-2014

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014
1.	Pengawasan penertiban pertambangan rakyat	26	554	-	-
2.	Pengawasan penertiban penggunaan air bawah tanah	70	75	100	-
3.	Penyebaran peta daerah rawan bencana alam	-	-	-	-

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, dan Energi Kabupaten Karawang

Kabupaten Karawang memiliki tiga sumber air yang cukup potensial dengan kualitas yang cukup baik untuk dikembangkan menjadi air minum kemasan. Ketiga sumber air dimaksud adalah :

- 1) Sumber air Ciburial dengan kapasitas 10 liter/detik, yang baru dimanfaatkan oleh PDAM Kabupaten Karawang 4 liter/detik, untuk melayani konsumen sebanyak 1.163 SL dan 27 KU tersebar di 4 desa.

- 2) Sumber air Curug Cigentis dengan kapasitas 300 liter/detik, dimanfaatkan untuk air minum pedesaan ± 40 liter/detik guna melayani 4 desa.
- 3) Sumber air di Cinapel Desa Cigunungsari ± 20 liter/detik, dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kebutuhan pertanian.

Dari potensi air tersebut, baru dimanfaatkan untuk air minum pedesaan dan PDAM Kabupaten Karawang kurang lebih sebanyak 50 liter/ detik, sisanya 280 liter/detik belum dimanfaatkan, baik untuk kebutuhan air bersih maupun air kemasan lainnya.

Berdasarkan hasil survey data Potensi Sumber Daya Air Bawah Tanah pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.209
Potensi Sumberdaya Air Bawah Tanah di
Kabupaten Karawang

No	Bahan Galian	Lokasi	Potensi	Keterangan
1.	Mata Air	Desa Wargasetra, Kec. Tegalwaru	Belum Dikaji	-
2.	Mata Air	Mekarbuana Kec. Tegalwaru	Dikelola Oleh PDAM	-
3.	Mata Air	Desa Tamansari, Kec. Pangkalan	Belum Dikaji	Dsn Citanam
4.	Mata Air	Desa Tamansari, Kec. Pangkalan	Dikelola Oleh PDAM	Ciburial

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, dan Energi Kabupaten Karawang

Air Bawah Tanah sangat bermanfaat baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun untuk perusahaan. Ada sekitar 182 perusahaan di Kabupaten Karawang yang memanfaatkan potensi Air Bawah Tanah, terjadi penambahan sebanyak 14 perusahaan yang menggunakan air bawah tanah karena adanya penambahan perusahaan baru yang tidak terlayani oleh PDAM dibandingkan data tahun 2014.

Sumbangan sektor pertambangan dan bahan galian terhadap PDRB Kabupaten Karawang tidak terlalu besar dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Hal tersebut sesuai dengan kondisi

alam Kabupaten Karawang, karena daerah yang memungkinkan untuk dieksploitasi hanya bagian selatan, khususnya sekitar kecamatan Pangkalan. Potensi bahan galian di Kabupaten Karawang diketahui terdiri atas batu andesit, pasir, sirtu, lempung dan tanah merah Adapun data potensinya sebagai berikut:

Tabel 2.210
Data Potensi Sumberdaya Mineral di Kabupaten Karawang

No	Jenis Bahan Galian	Lokasi	Potensi	Luas Eksploitasi	Keterangan
1.	Tanah Merah	Purwasari	- Ha	± - Ha	-
2.	Batu Gamping	Pangkalan	300 Ha	- . Ha	Pertambangan Rakyat
3.	Tanah Lempung	Pangkalan	720 Ha	5 Ha	Pertambangan Rakyat
4.	Batu Andesit/Batu Belah Tanah Lempung Tanah Liat	Tegalwaru	> 50 Ha	20 Ha	Pengusaha
5.	Tanah Liat	Tlj Barat			-
6.	Pasir Laut	Kec. Pakisjaya			-
7.	Pasir Laut	Kec. Tempuran			-
8.	Pasir Laut	Kec. Cilamaya			-
9.	Tanah Urug	Kec. Cikampek			-
10.	Pasir Kwarsa	Kec. Jatisari			Belum Dikaji
11.	Basi Titan	Kec. Cibuaya			Belum Dikaji
12.	Batu Galena	Gunung Sanggabuana			Belum Dikaji

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, dan Energi Kabupaten Karawang

Untuk sektor pertambangan diwilayah Karawang Selatan khususnya di Kecamatan Pangkalan dan Kecamatan Tegalwaru pada tahun 2014 terjadi pengurangan dari 3 (tiga) perusahaan pada tahun 2013 menjadi 2 (dua) perusahaan pada tahun 2014, yaitu perusahaan perorangan atas nama Lili Suriwati yang habis perijinannya dan belum dapat diperpanjang menunggu penetapan Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK). Adapun data potensinya sebagai berikut :

Tabel. 2.211
Data Pertambangan (Galian C) yang Berizin (SIPT) di
Kabupaten Karawang

No	Nama Perusahaan	Jenis Bahan Galian	Lokasi	Nama Pemilik	Luas Eksploitasi
1	PT. Tianti Nauli	Tanah Lempung	Desa Taman Mekar, Kac. Pangkalan	Chang Kuo Liang	± 5 Ha
2	PT. Atlasindo Utama	Batu Andesit	Desa Cinta Langgeng, Kec. Tegalwaru	Drs. Gerald Sugito	± 20 Ha

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, dan Energi Kabupaten Karawang

Berdasarkan hasil survey, sumberdaya mineral di Kabupaten Karawang yang merupakan potensi bahan galian adalah sebagai berikut:

(a) Pasir dan Sirtu

- Pertambangan pasir di Kecamatan Klari terdapat di daerah Curug yang digali dari permukaan tanah, namun sekarang potensinya sudah habis.
- Pertambangan pasir dan sirtu yang berada di Kecamatan Pangkalan terutama yang berada di Desa Taman Mekar merupakan Pertambangan Rakyat yang pada umumnya digali dari Sungai Cibeet di perbatasan antara Karawang dan Bekasi.
- Pertambangan pasir dan sirtu serta koral yang berada di Kecamatan Ciampel merupakan pertambangan rakyat dengan potensi bahan galian yang berada di bukit-bukit serta mempunyai susunan terdiri atas komponen batuan beku berukuran bongkah hingga kerikil dengan bentuk umumnya bundar tanggung yang berada di permukaan tanah dan tersebar sangat luas, demikian pula dengan endapan pasir berwarna kehitaman yang tersebar sangat luas.

(b) Tanah Merah

- Potensi pertambangan galian tanah merah berlokasi di Desa Tamelang, Kecamatan Purwasari yang merupakan bukit-bukit kecil, namun potensi tersebut sudah mulai habis

dieksploitasi, kecuali yang dikelola oleh perorangan yang bernama Ihsan.

(c) Batu Andesit/Batu Belah

- Potensi batu andesit berlokasi di Desa Wargasetra, Kecamatan Tegalwaru yang tersebar di perbukitan. Batu andesit tersebut berwarna abu kehijauan, pejal dan keras sebagian retak dan berongga, penggalian sangat sulit dilakukan dengan alat sederhana. Pertambangan batu andesit selama ini dikelola sebagai pertambangan rakyat walaupun ada juga yang dikelola oleh perusahaan yang sudah mempunyai izin.

(d) Batu Gamping

- Potensi batu gamping terdapat dan tersebar di Kecamatan Pangkalan dengan jumlah terbesar di Desa Citaman dan Desa Tamanmekar. Batu gamping tersebut selain dikelola oleh perusahaan yang sudah mempunyai izin, juga dikelola oleh masyarakat sebagai pertambangan Rakyat yang tidak memiliki perizinan. Batu Gamping merupakan kristalisasi sebagai bahan Batu Kapur.

(e) Tanah Lempung

- Potensi tanah lempung terdapat dan tersebar di Kecamatan Pangkalan, Tegalwaru dan Telukjambe Barat yang digali dari permukaan tanah, dengan jumlah terbesar terdapat di Desa Tamanmekar. Berwarna abu-abu kecoklatan agak elastis.

(f) Pasir Laut

- Potensi pasir laut tersebar dan terdapat di 3 Kecamatan yaitu: Kecamatan Pakisjaya, Kecamatan Tempuran dan Kecamatan Cilamaya. Potensi pasir laut dengan lokasi yang tersebar di seluruh Kabupaten belum dikaji luasan potensinya.

(g) Batu Galena

- Batu galena adalah batuan yang mengandung biji emas, biji tembaga, biji kuningan dan lain-lain yang belum dikaji. Lokasi potensi galian batu galena berada di Gunung

Sanggabuana yang sulit untuk dijangkau karena berada di atas gunung

Kegiatan pertambangan dan bahan galian di Kabupaten Karawang terdiri atas :

- Galian Batu untuk bahan bangunan dan pekerasan jalan, banyak tersebar didaerah perbukitan Kecamatan Pangkalan.
- Galian pasir dengan memanfaatkan Sungai Cigentis, Cikompeni dan Cibeet.
- Galian Batu Kapur yang diolah ditempat, banyak tersebar sepanjang jalan raya Kecamatan Pangkalan menuju Objek Wisata Mekarbuana.

Jumlah dan nilai produksi pertambangan dan bahan galian tidak terdata, namun untuk pemasarannya sebagian besar dimanfaatkan untuk kebutuhan lokal dan sebagian dipasarkan keluar Kabupaten Karawang, diantaranya ke Kabupaten Purwakarta, Bekasi dan Depok.

Sumbangan sektor pertambangan dan bahan galian terhadap PDRB Kabupaten Karawang tidak terlalu besar dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Hal tersebut sesuai dengan kondisi alam kabupaten karawang, karena daerah yang memungkinkan untuk dieksploitasi hanya bagian selatan, khususnya sekitar kecamatan Pangkalan. Potensi bahan galian di Kabupaten Karawang diketahui terdiri atas batu andesit, pasir, sirtu, lempung dan tanah merah.

f. Perdagangan

Program Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 untuk semua indikator menunjukkan kinerja yang stabil.

Tabel 2.212
Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri
Tahun 2011-2014

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014
1.	Pengawasan penyaluran barang beredar kebutuhan pokok masyarakat	10 Pasar	10 Pasar	10 Pasar	10 pasar
2.	Pengawasan dan pembinaan distributor/penyalur	30 Distributor	30 Distributor	30 Distributor	30 distributor
3.	Pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)	5 Pasar Modern	5 Pasar Modern	5 Pasar Modern	5 pasar modern

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, dan Energi Kabupaten Karawang

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan hampir semua indikator menunjukkan hasil yang stabil sejak tahun 2011, kecuali untuk jumlah pengaduan konsumen pada tahun 2014 meningkat sebesar 106 % dibandingkan tahun 2013.

Tabel 2.213
Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Tahun 2011-2014

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014
1.	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	10 barang	15 barang	15 barang	15 barang
2.	Jumlah pengaduan konsumen	-	36	45	48
3.	Peningkatan Pengawasan Barang Beredar Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)	10 Pasar / 5 Pasar Modern	10 Pasar / 5 Pasar Modern	10 Pasar / 5 Pasar Modern	10 pasar / 5 pasar modern
4.	Pelayanan Tera Ulang	30 Kec.	30 Kec.	30 Kec.	30 Kec.

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, dan Energi Kabupaten Karawang

Hasil perolehan perijinan SIUP – TDP tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

Tabel. 2.214
Hasil Perolehan Perizinan SIUP – TDP Tahun 2011 s.d. 2014

JENIS/ TAHUN	2011	2012	2013	2014
SIUP PK				
PO	2.086	1.971	2.647	2.290
KOP	88	82	90	66
CV	817	756	994	945
PT	91	185	188	259
BUL	-	-	-	-
SIUP PM				

JENIS/ TAHUN	2011	2012	2013	2014
PO	45	16	29	36
KOP	6	4	7	3
CV	128	46	58	62
PT	121	220	285	336
BUL	-	-	-	-
SIUP PB				
PO	23	-	-	8
KOP	4	-	-	-
CV	35	4	4	1
PT	237	33	35	52
BUL	-	-	-	-
JUMLAH	3.681	3.254	4.140	4.058
TDP				
PT	434	365	106	630
CV	870	659	722	853
PO	1.744	2.349	2.431	1.810
KOP	4	53	60	67
BUL	-	-	-	6
PMA	87	115	122	3
JUMLAH	3.228	2.771	3.441	3.369
TDG	84	52	31	48

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, dan Energi Kabupaten Karawang

Tabel 2.215
Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
Tahun 2011-2014

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014
1.	Pembangunan <i>trade center</i> untuk Promosi Produk unggulan (Kios Kerajinan)	3	3	1	0
2.	Partisipasi pameran	5	4	5	4
3.	Pembinaan Teknis Bidang Perdagangan Ekspor dan Impor	40 Pengusaha	40 Pengusaha	60 Pengusaha	100 Pengusaha

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, dan Energi Kabupaten Karawang

Kegiatan ekspor Kabupaten Karawang selama kurun waktu dua tahun terakhir (2011 - 2014) adalah sebagaimana Tabel 2.150 Data tersebut bukan merupakan total ekspor yang terjadi dari produk Karawang, namun itu hanya sebagian kecil saja. Mengingat data ekspor tercantum merupakan data ekspor perusahaan yang pengurusan dokumen Surat Keterangan Asal (SKA) dilaksanakan di Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Karawang, selebihnya pengurusan SKA dapat dilakukan dimana saja, seperti di Disperindag Kabupaten Purwakarta atau di Kantor Kawasan Berikat dan lainnya seperti di Jakarta.

Tabel. 2.216
Kegiatan Ekspor di Kabupaten Karawang
Tahun 2011 s.d. 2014

Tahun	Nilai Ekspor (US\$)	Negara Tujuan
2011	954.777.989,30	USA, Itali, Jepang, Belgia, India, Pakistan, Singapura, Denmark, Belanda, Inggris, Perancis, Australia, Korea, Afrika, China, dll.
2012	5.723.847.940,85	Sda
2013	1.536.108.020,26	Sda
2014	1.178.089.893,65	Sda

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, dan Energi Kabupaten Karawang

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan dengan indikator kinerja pengadaan bantuan kios dorong pada tahun 2013 tidak dilaksanakan, sedangkan pada tahun 2012 diadakan sebanyak 31 unit dan untuk tahun 2014 tidak diadakan terkendala dengan tupoksi pembinaan pedagang kaki lima yang berada pada Dinas Koperasi dan UKM.

Tabel 2.217
Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
Tahun 2011-2014

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014
1.	Pengadaan Bantuan Kios Dorong	-	31	-	-

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, dan Energi Kabupaten Karawang

Program Pembinaan Pedagang Pasar Tradisional pada tahun 2014 dilaksanakan dengan jumlah sasaran sama dengan tahun 2012 dan 2011 yaitu 200 pedagang.

Tabel 2.218
Pembinaan Pedagang Pasar Tradisional
Tahun 2011-2014

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014
1.	Pembinaan Pedagang Pasar Tradisional	200 pedagang	200 pedagang	200 pedagang	200 pedagang

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, dan Energi Kabupaten Karawang

g. Perindustrian

Tabel 2.219
Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Tahun 2011-2014

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah penyerapan tenaga kerja industri kecil menengah	8.600	8.663	9.528	9.528
2.	Persentase tingkat pelayanan usaha IKM	80 %	90 %	90%	90%
3.	Persentase komoditi unggulan IKM dengan total komoditi IKM	10 %	10 %	10%	10%
4.	Persentase IKM yang bermitra dengan industri besar/BUMN	-	-	-	-
5.	Peningkatan kualitas produk IKM knalpot dan produk logam lainnya (IKM Pandai besi)	15	15	-	20
6.	Penerapan dan partisipasi konveksi Gugus Kendali Mutu (GKM)	25	25	20	20
7.	Fasilitasi Pembuatan desain kemasan produk industri kecil agro (peserta)	25	25	25	25

Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Karawang

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pada beberapa indikator hasilnya perkembangan IKM berada pada posisi stabil dibandingkan dengan tahun 2013, yaitu indikator persentase tingkat pelayanan usaha IKM, persentase komoditi unggulan IKM dengan total komoditi IKM dan fasilitasi pembuatan desain kemasan produk industri kecil agro. Jumlah penyerapan tenaga kerja IKM pada tahun 2014 sebanyak 9.528 tidak ada peningkatan dibandingkan tahun 2013. Penerapan dan partisipasi konveksi Gugus Kendali Mutu (GKM) pada tahun 2014 sebanyak 25 peserta tidak ada peningkatan dibandingkan tahun 2013. Sedangkan untuk peningkatan kualitas produk IKM knalpot dan produk logam lainnya pada tahun 2014 diikuti 20 peserta. Sedangkan indikator persentase IKM yang bermitra dengan industri besar/BUMN sampai tahun 2014 belum dapat didata.

Program pengembangan sentra-sentra industri potensial pada indikator jumlah sentra IKM yang dibina dan jumlah wirausaha industri kecil menengah tidak mengalami perubahan dari tahun 2013. Namun pembangunan sentra IKM terpadu telah dilaksanakan pada tahun 2014 dengan telah dibangunnya 1 unit sentra IKM terpadu.

Tabel 2.220
Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
Tahun 2011-2014

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah Sentra IKM yang dibina	5	6	6	6
2.	Jumlah wirausaha industri kecil menengah	2.760	2.866	2.866	2.866
3.	Pembangunan Sentra IKM terpadu	-	-	1	-

Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Karawang

Tabel 2.221
Peningkatann Kemampuan Teknologi Industri
Tahun 2011-2014

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014
1.	Persentase Penerapan GKM pada IKM	25 IKM	25 IKM	20 IKM	20 IKM
2.	Restrukturisasi peralatan IKM (unit usaha)	39 uu	49 uu	60 uu	
3.	Perluasan penerapan Sertifikasi halal	20	20	25	35

Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Karawang

Pengembangan industri di Kabupaten Karawang diarahkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan daya saing produksi dengan senantiasa memperhatikan permasalahan sosial ekonomi yang mendasar. Sektor industri di Kabupaten Karawang masih didominasi oleh industri kecil formal dan non formal disusul industri menengah besar.

Tabel. 2.222
Jenis Industri di Kabupaten Karawang Tahun 2011-2014

No.	Unit Usaha	2011	2012	2013	2014
1.	PMA	371	486	511	511
2.	PMDN	213	213	226	226
3.	Non Fasilitas	179	207	217	217
4.	Industri Kecil	9.001	9.014	9.025	9.025
	Jumlah	9.764	9.920	9.963	9.963

Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Karawang

h. Transmigrasi

Program Transmigrasi Regional bertujuan untuk terlaksananya perpindahan penduduk dari Kabupaten Karawang keluar Pulau Jawa khususnya ke Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) terpilih disertai dengan peralatan kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sasaran program ini adalah keluarga yang berminat dan terpilih serta kurang mampu tetapi mempunyai tekad yang kuat untuk memperbaiki kehidupannya.

Dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui program transmigrasi maka dilakukan pelaksanaan tahap awal, adalah diadakannya penyuluhan tentang ketransmigrasian yang dilaksanakan oleh Tim Penyuluh tingkat kabupaten, yang dilaksanakan di kecamatan maupun desa/kelurahan dan dilanjutkan dengan pendaftaran bagi calon transmigran. Sambil menunggu kesiapan lokasi dan jadwal keberangkatan petugas kabupaten terus mengadakan pembinaan lanjutan.

Tahapan pelaksanaan transmigrasi adalah :

1. Kegiatan pengerahan dan pengiriman transmigrasi
Merupakan proses awal dari penyuluhan sampai calon transmigran siap untuk diberangkatkan, baik secara administrasi maupun kesiapan fisik dan mental.
2. Pengadaan perbekalan transmigrasi
Perbekalan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang merupakan penunjang untuk persiapan pada saat menempati lokasi baru, selain pembekalan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat maupun provinsi.
3. Koordinasi dan Kerjasama antar daerah di luar Jawa
Dari hasil koordinasi ini akan diperoleh lokasi untuk transmigran tahun berikutnya, melewati penjajakan dan observasi.

Tabel 2.223
Pencapaian Pemberangkatan Transmigran
Tahun 2011 s.d. 2014

No.	Tahun	Jumlah		Tempat/lokasi
		KK	Jiwa	
1.	2011	15	60	UPT Bekkae SP 2 Kab. Wajo Prov. Sulawesi Selatan
		8	30	UPT Daruba SP 3/Dehe Gile Kab. Kep. Morotai Prov. Maluku Utara
		10	67	UPT Dadaup SP 2 Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah
	JUMLAH	33 KK	157 JW	
2.	2012	5	26	UPT Dadaup C.4 Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah
		15	43	UPT Motongkat Kab. Bolaang Mangondow Timur Prov. Sulawesi Utara
	JUMLAH	20 KK	69 JW	

No.	Tahun	Jumlah		Tempat/lokasi
		KK	Jiwa	
3.	2013	13 KK	56	UPT Kosa SP.2 Kota Kepulauan Tidore Provinsi Maluku Utara
	JUMLAH	13 KK	56 JW	
4.	2014	10	40	Unit Pemukiman Transmigrasi Saembawalati Desa Kancu Kec. Pamona Timur Kab. Poso Provinsi Sulawesi Tengah Keterangan: Akan diberangkatkan pada awal tahun 2015 sesuai Surat Perintah Penempatan
	JUMLAH	10 KK	40 JW	

Sumber: Disnakertrans Kabupaten Karawang

Terjadi penurunan pemberangkatan transmigrasi pada tahun 2014 dibanding tahun 2013. Kecenderungan penurunan ini terjadi pula pada tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012.

Tabel 2.224
Capaian Kinerja Transmigrasi Regional
Tahun 2011-2014

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah pengarahan dan pengiriman calon transmigrasi yang dilaksanakan	33	20	13	10
2.	Jumlah koordinasi dan kerjasama antar daerah di luar Jawa yang dilaksanakan	7	6	1	4
3.	Jumlah Pengadaan perbekalan transmigran	40	20	40	10

Sumber: Disnakertrans Kabupaten Karawang

Kuantitas pengarahan dan pengiriman calon transmigran serta frekuensi koordinasi dan kerjasama antar daerah di luar Jawa yang dilaksanakan memperlihatkan adanya kecenderungan penurunan mulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014.

2.6. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan Kabupaten lainnya yang berdekatan. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

Namun karena keterbatasan data, hanya dapat ditayangkan data aspek daya saing daerah fokus kemampuan ekonomi daerah berikut ini :

2.6.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi digunakan untuk mengukur kemajuan ekonomi secara makro dengan melihat besaran laju Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Sedangkan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk digunakan pendekatan Pendapatan perkapita, semakin besar pendapatan perkapita dapat menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kemakmuran penduduk dan juga produktivitasnya.

Laju pertumbuhan ekonomi jugasering dijadikan asumsi dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan Negara untuk perencanaan pembangunan nasional atau sektoral dan regional. Sebagai dasar penentuan prioritas pemberian bantuan luar negeri oleh Bank Dunia atau lembaga internasional lainnya.

Tabel 2.225
Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2011-2015

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015*
LPE dengan Migas (%)	6,56	4,94	7,23	4,96	4,62
LPE tanpa Migas (%)	7,28	5,96	7,36	5,05	5,01

Sumber: BPS Kab. Karawang

*) = angka sementara

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang umum digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian dengan fungsinya yang dapat menggambarkan struktur ekonomi dan laju pertumbuhan serta pendapatan perkapita penduduk. Pada tingkat regional PDRB dapat dijadikan ukuran kemampuan suatu wilayah dalam menciptakan nilai tambah yang diharapkan dapat memberikan

kesejahteraan bagi masyarakat. Semakin besar nilai tambah yang dihasilkan suatu daerah menggambarkan besaran pendapatan masyarakat yang bersangkutan.

Bila dilihat berdasarkan sektor, bahwa terdapat 3 (tiga) sektor penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB di Kabupaten Karawang pada tahun 2015 adalah sektor industri pengolahan tetap merupakan sektor (terunggul dan terbesar kontribusinya dalam pembentukan PDRB Kabupaten Karawang), yaitu sebesar 70,99%. Disusul kemudian oleh sektor perdagangan dan pertanian, yang masing-masing menyumbang sebesar 10,02% dan 4,16%. Sedangkan 2 sektor penyumbang terkecil dalam pembentukan PDRB Kabupaten Karawang tahun 2015 adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dan sektor Jasa Perusahaan. Distribusi persentase PDRB secara sektoral menunjukkan peranan masing-masing sektor dalam pembentukan PDRB secara keseluruhan. Semakin besar persentase suatu sektor maka semakin besar pula pengaruh sektor tersebut dalam perkembangan ekonomi.

Tabel 2.226
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahun 2011-2015

No	INDIKATOR	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015*
1	PDRB dengan Migas					
	• Harga Berlaku (juta Rp)	113.180.813,2	124.276.539,3	140.816.053,3	155.068.137,9	167.052.706,7
	• Harga Konstan (juta Rp)	106.174.675,8	111.424.083,5	119.484.231,0	125.415.445,9	131.207.042,8

Sumber : BPS Kab. Karawang

* = angka sementara

Sedangkan Peningkatan PDRB perkapita atas dasar harga berlaku dan PDRB per kapita atas harga konstan, sebagaimana yang tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 2.227
PDRB per Kapita Tahun 2011-2015*

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015*
PDRB perkapita ADHB (Rp)	52.102.097,48	56.504.900,57	63.277.221,63	68.915.496,89	73.475.655,2
PDRB perkapita ADHK (Rp)	48.876.864,8	50.661.265,58	53.691.535,8	55.737.225,53	57.709.471,63

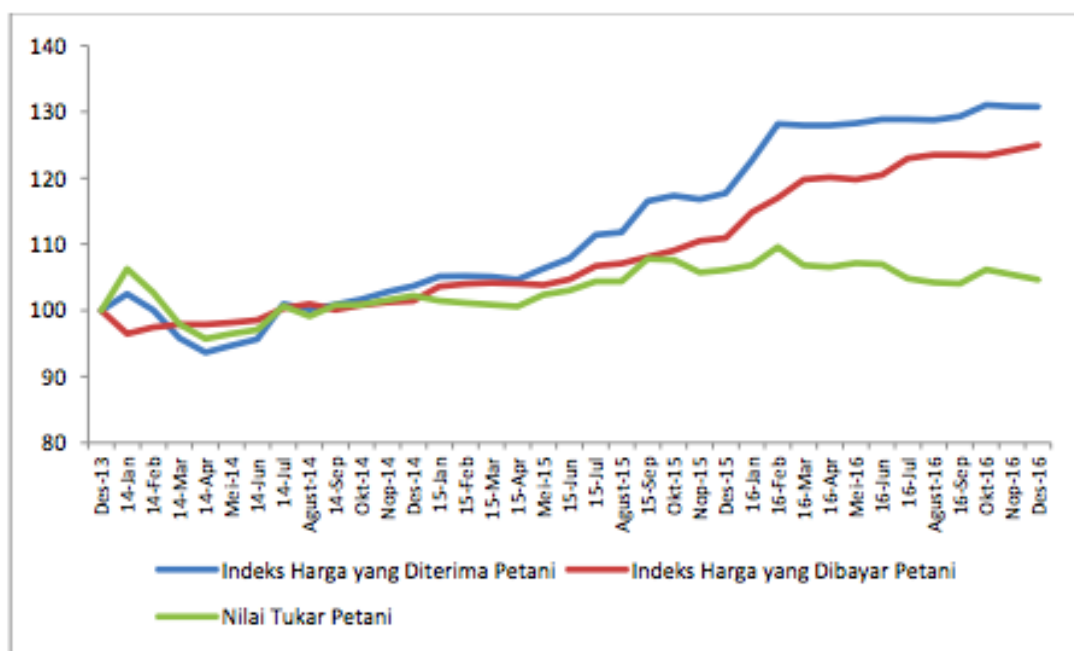
Sumber : BPS Kab. Karawang PDRB * = angka sementara

c. Nilai Tukar Petani

Penghitungan NTP Kabupaten Karawang Periode 2014-2016 menggunakan tahun dasar 2013 (NTP 2013 = 100). Perkembangan NTP Kabupaten Karawang menunjukkan trend meningkat. NTP Kabupaten Karawang bulan Desember 2014 sebesar 102,22 persen atau naik sebesar 2,22 persen dibandingkan tahun sebelumnya, di bulan Desember 2013 capaian NTP Kabupaten karwang sebesar 106,13 persen dan daya beli petani mencapai puncaknya di bulan Februari 2016, yaitu sebesar 109,56. Walaupun di penghujung tahun 2016 mengalami tekanan cukup kuat sehingga capaian NTP-nya melandai hanya sebesar 104,66 di bulan Desember 2016.

Perilaku NTP seperti diuraikan di atas tidak lepas dari pergerakan nilai marginal faktor-faktor penyusunnya, yaitu perilaku indeks harga yang diterima petani (IT) maupun indeks harga yang dibayar petani (IB). Perilaku NTP dibandingkan perilaku IT dan IB tidak banyak perubahan dari bulan dasar, Desember 2011. Selama Periode 2014-2016, harga yang diterima petani dan yang dibayar petani meningkat secara simultan, namun harga yang diterima petani meningkat lebih tinggi (30,78 persen) dibandingkan harga yang dibayar (24,96 persen), sehingga terjadi kesenjangan antara harga yang diterima dan dibayar petani.

Gambar 2.12
Trend Indeks Nilai Tukar Petani (NTP), Indeks yang Diterima Petani (IT) dan Indeks yang Dibayar Petani (IB) selama Periode 2014-2016



Dengan asumsi bahwa kuantitas produksi komoditas yang dihasilkan petani tetap bersamaan dengan perubahan harga-harga barang konsumsi dan produksi perilaku NTP di atas mencerminkan bahwa daya beli petani relative naik selama periode tersebut, atau kesejahteraan petani meningkat. Apabila diukur dengan kriteria standar hidup, hampir sepanjang 3 (tiga) tahun terakhir, kecuali pada bulan Maret – Juni 2014, petani relatif lebih sejahtera yang ditunjukkan oleh peningkatan NTP.

Tabel 2.228
Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2014 s.d 2016
Kabupaten Karawang

No	Uraian	2014	2015	2016
1.	Indeks Yang Diterima Petani (It)	103,68	117,73	130,78
2.	Indeks Yang Dibayar Petani (Ib)	101,43	110,93	124,96
3.	Rasio	102,22	106,13	104,67

2.6.2 Fokus Iklim Investasi

Pertumbuhan industri yang terus meningkat membuat Kabupaten Karawang harus terus melakukan perbaikan serta inovasi guna meningkatkan pelayanan perijinan terhadap para investor. Jaminan kepastian agar industri yang ada tidak

terombang-ambing kebijakan pemerintah serta birokrasi yang mempermudah perizinan bagi dunia usaha menjadi unsur yang tidak dapat diabaikan untuk peningkatan iklim investasi. Ketepatan waktu, kepastian dan ketepatan biaya dalam pelayanan perizinan di Kabupaten Karawang yang mencapai lebih dari 90% menunjukkan profesionalitas dalam pemberian layanan terhadap para penanam modal. Meningkatnya jumlah pelaku usaha yang dibina hingga 147% dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir mengindikasikan adanya peningkatan minat pelaku usaha untuk melakukan penanaman modal di Kabupaten Karawang.

Tabel 2.229
Peningkatan Mutu Pelayanan Perijinan
Tahun 2011-2015

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah peraturan/ketentuan mengenai investasi yang berdaya saing (ijin)	-	7	3	3	6
2.	Jumlah pelaku usaha yang dibina (unit usaha)	-	15	15	37	37
3.	Persentase ketepatan waktu pelayanan perijinan (hari)	-	95%	95%	95%	95%
4.	Persentase kepastian dan ketepatan biaya pelayanan perijinan (%)	-	100	100	100	100

Sumber: Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karawang salah satunya berasal dari hasil retribusi daerah, dimana retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah. Retribusi daerah meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa khusus dan retribusi perijinan. Adanya penurunan 1,63% jumlah perijinan yang dikeluarkan di Kabupaten Karawang dari 12.729 perijinan pada tahun 2014 menjadi 12.522 perijinan pada tahun 2015 berpengaruh pula terhadap menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karawang dari hasil retribusi daerah sebanyak 16%, dimana PAD retribusi daerah Kabupaten Karawang tahun 2014 sebesar Rp. 129.306.846.320 menjadi Rp. 109.112.693.000 pada tahun 2015. Hal ini terjadi karena adanya kelesuan ekonomi dan juga pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap nilai tukar dollar.

Tabel 2.230
Jumlah Perizinan di Kab. Karawang
Tahun 2015

No.	Perijinan	Jumlah
1.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	3.714
2.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	3.034
3.	Tandan Daftar Gudang (TDG)	74
4.	Tanda Daftar Industri (TDI)	14
5.	IPALASA	26
6.	Surat Izin Tanda Pendaftaran Usaha Wiralaba (STPUW)	2
7.	Izin Trayek (IT)	1.073
8.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	176
9.	Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh (IOPPJ)	-
10.	Izin Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata (IUODTW)	-
11.	Izin Lokasi (IL)	111
12.	Izin Reklame (IR)	1.012
13.	Pengesahan Rencana Tapak (PRT)	-
14.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	1.172
15.	Izin Gangguan (HO)	525
16.	Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 (IPS LB3)	84
17.	Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)	-
18.	Rekomendasi Kios Sarana Produksi Pertanian (RKSP)	-
19.	Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Swasta (IOPSS)	1
20.	Izin Penyelenggaraan Apotek (IPA)	56
21.	Izin Penyelenggaraan Optik (IPO)	3
22.	Izin Penyelenggaraan Toko Obat (IPTO)	17
23.	Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional/Izin Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional (STPT/IPPTr)	9
24.	Izin Pengelolaan Kamar Mandi/Kamar Kecil (IPKM/KK)	11
25.	Izin Penyelenggaraan Usaha Pengelolaan Kebersihan (IP UPK)	-
26.	Izin Usaha Industri (IUI)	5
27.	Izin Usaha Perikanan (IUP)	86
28.	Surat Pembudidayaan Ikan (SPbI)	-
29.	Izin Sarana dan Jasa Pariwisata (ISJP)	31
30.	Izin Penggunaan Air Bawah Tanah (IPA-ABT)	10
31.	Izin Pemakaian Tanah Bagian Daerah Milik Jalan (IPT DMJ)	17
32.	Surat Izin Kerja Tenaga Kerja Teknis Kefarmasian (SIKTTK)	59
33.	Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja (IPLPK)	18
34.	Izin Pendirian Lembaga Bursa kerja Khusus (IPLBK)	28
35.	Surat Izin Pengeboran (SIP)	-
36.	Rekomendasi Kelayakan Investasi (RKI)	-
37.	Izin Prinsip Perluasan Modal (IPPM)	169
38.	Surat Izin Menempati Bangunan Pasar (Sim B)	68
39.	Rencana Penataan Lahan (RPL)	-
40.	Izin Usaha Pertambangan (IUPt)	1
41.	Izin Pendirian Lembaga Bursa Kerja Luar Negeri	7

No.	Perijinan	Jumlah
	(IPL BKLN)	
42.	Izin Usaha untuk Tenaga Kelistrikan (UK)	-
43.	Izin Latihan Kerja (ILK)	170
44.	Izin Akomodasi/Akomodasi Penampungan Calon TKI (IA-APCTKI)	1
45.	Surat Izin Klinik Kecantikan (SIKK)	16
46.	Izin Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional (STPT/IPPTr)	9
47.	Izin Penyelenggaraan Usaha Pengelolaan Kebersihan Lingkungan (IUPKL)	27
48.	Izin Usaha Perikanan (IUPPHP)	86
49.	Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIK.Ro.)	12
50.	Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)	43
51.	Izin Ops. Lembaga Bursa Kerja Luar Negeri (IOLPTKS)	10
52.	Surat Izin Praktek Bidan (SIP.B)	218
53.	Surat Izin Praktek Dokter (SIP.Dr)	455
54.	Surat Izin Usaha Toko Modern (IUTM)	98
	JUMLAH	12.672

Sumber: Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 1 Angka 1 bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Investasi (Penanaman Modal) merupakan pembangunan ekonomi suatu negara atau daerah, dipercaya menjadi salah satu faktor penting yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, banyak daerah yang berlomba-lomba membuka daerahnya dengan mengeluarkan berbagai macam peraturan untuk mempermudah iklim investasi di daerahnya bagi investor yang akan masuk.

Terdapat beragam pendekatan untuk mendefinisikan investasi. Salah satu pendekatan yang umum digunakan untuk mengetahui aliran modal (kapital) baik dari dalam negeri dan luar negeri. Oleh karena itu, secara umum investasi dengan fasilitas di Indonesia dapat di bedakan menjadi dua hal bergantung pada asal investornya yaitu investasi dalam negeri (penanaman modal dalam negeri/PMDN) dan investasi asing (penanaman modal asing/PMA).

Investasi dalam negeri (penanaman modal dalam negeri/PMDN) dapat dilakukan oleh perseorangan warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia (dapat berbentuk Perseroan Terbatas / PT), Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.

Investasi asing (penanaman modal asing/PMA) dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Beberapa kelebihan penanaman modal asing diantaranya bersifat jangka panjang, memberikan terobosan dalam alih teknologi, alih keterampilan manajemen, dan membuka lapangan kerja baru.

Realisasi investasi di Kabupaten Karawang pada tahun 2015 mencapai Rp. 25,454 Trilyun, menurun Rp. 0,268 Trilyun dibandingkan tahun sebelumnya. Di tahun 2013 terjadi peningkatan realisasi investasi yang signifikan sebesar 187% dikarenakan adanya rencana pembangunan pelabuhan di Kabupaten Karawang, sehingga menjadi daya tarik bagi para investor untuk melakukan penanaman modal.

Dari realisasi investasi tersebut, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) meningkat 38,98% dibandingkan tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar Rp. 2,143 Trilyun. Sementara Penanaman Modal Asing (PMA) menurun 11,93% dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar Rp. 2,412 Trilyun. Hal ini terjadi karena mulai adanya issue ketidakpastian rencana pembangunan pelabuhan di wilayah Cilamaya.

Adapun dari sisi tenaga kerja, realisasi investasi sepanjang tahun 2015 menyerap tenaga kerja sebanyak 34.008 orang, turun 52,04% dibandingkan tahun 2014 yang menyerap tenaga kerja sebanyak 70.906 orang.

Tabel 2.231
Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Tahun 2011-2015

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah kebijakan di bidang investasi	-	7	3	3	6
2.	Total Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Rp Trilyun)	-	14,253	40,925	25,722	25,454
3.	Jumlah LKPM PMA dan PMDN	-	137	2.196	2.872	2.802
4.	Total Realisasi Investasi PMA (Rp Trilyun)	-	8,408	36,272	20,226	17,814
5.	Jumlah LKPM PMA	-	119	275	440	805
6.	Total Realisasi Investasi PMDN (Rp Trilyun)	-	5,845	4,652	5,497	7,640
7.	Jumlah LKPM PMDN	-	18	1.921	2.432	1.997
8.	Total Penyerapan Tenaga Kerja PMA dan PMDN (orang)	-	68.570	61.430	70.906	34.008
	a. Tenaga Kerja Indonesia (orang)	-	68.459	61.027	70.714	-
	b. Tenaga kerja Asing (orang)	-	111	403	192	-
9.	Total Penyerapan Tenaga Kerja PMA (orang)	-	49.413	54.854	64.999	29.412
	a. Tenaga Kerja Indonesia (orang)	-	49.316	54.464	64.807	-
	b. Tenaga Kerja Asing (orang)	-	97	390	192	-
10.	Total Penyerapan Tenaga Kerja PMDN (orang)	-	19.157	6.596	5.911	4.596
	a. Tenaga Kerja Indonesia (orang)	-	19.143	6.583	5.911	-
	b. Tenaga Kerja Asing (orang)	-	14	13	-	-

Sumber: Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang

2.6.3 Fokus Sumber Daya Manusia

Komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Karawang secara umum masih relatif rendah atau masih dalam taraf pendidikan sekolah dasar. Berdasarkan data Susenas BPS Kabupaten Karawang, pada tahun 2015 jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang berpendidikan kurang atau setara SD berjumlah 1.094.940 orang, SMP sebanyak 345.634 orang, SMA sebanyak 383.233 orang dan Diploma sebanyak 66.619 orang. Terjadi perubahan yang cukup positif dengan komposisi penduduk dilihat dari tingkat pendidikannya, dimana penduduk yang berpendidikan SMP keatas terus meningkat diiringi dengan

penurunan jumlah penduduk berpendidikan SD kebawah secara kontinu.

Tabel 2.232
Komposisi Penduduk Kabupaten Karawang Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2011-2015

No.	Tingkat Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
1.	≤SD	1.075.044	1.101.014	1.112.657	1.128.351	1.094.940
2.	SLTP	311.440	318.964	322.337	326.879	345.634
3.	SLTA	315.295	322.911	326.326	330.925	383.233
4.	Diploma	52.781	54.056	54.628	55.395	66.619

Sumber : BPS Kabupaten Karawang
Keterangan : *) = angka sementara

Komposisi penduduk Kabupaten Karawang berdasarkan usia pada tahun 2014 terdiri atas penduduk berusia 5 – 9 tahun berjumlah 198.205 jiwa atau sekitar 8,72% dan 10 – 14 tahun berjumlah 201.390 jiwa atau sekitar 8,86%.

Penduduk Kabupaten Karawang usia produktif atau usia 15 – 64 tahun berjumlah 1.555.595 jiwa atau sekitar 68,42%. Berdasarkan komposisi penduduk dapat dilihat angka beban ketergantungan (*dependency ratio*) yaitu perbandingan antara penduduk usia non produktif dengan penduduk usia produktif. Pada tahun 2015 nilai *dependency ratio* menunjukkan angka 46,15% yang berarti bahwa dari 100 orang usia produktif menanggung beban sekitar 46 orang yang tidak produktif. Selama 5 (lima) tahun terakhir terjadi trend data angka beban ketergantungan (*Dependency Ratio*) cenderung mengalami penurunan dari sebelumnya 48,68% di tahun 2010 berubah menjadi 46,15% di tahun 2015. Kondisi ini mencerminkan bahwa peningkatan jumlah penduduk usia produktif karena kaum pendatang/migran relatif lebih besar dibandingkan dengan penambahan penduduk alamiah, sementara pada saat yang sama derajat kesehatan masyarakat pun semakin meningkat.

Tabel 2.233
Komposisi Penduduk Kabupaten Karawang Menurut
Struktur Usia Tahun 2011-2015

No.	Struktur Usia	2011	2012	2013	2014	2015
1.	5 – 9	189.467	191.804	194.046	195.207	198.205
2.	10 – 14	192.132	194.599	196.973	197.769	201.390
3.	15 – 64	1.487.215	1.505.545	1.523.097	1.541.809	1.555.595
4.	Angka Beban Ketergantungan (<i>Dependency Ratio %</i>)	46,06%	46,09%	46,11%	45,94%	46,15%

Sumber: BPS Kabupaten Karawang, Proyeksi Penduduk Kabupaten Karawang

2.7. Kerjasama Daerah

Kerjasama daerah merupakan sarana untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam wadah NKRI, menyetarakan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal. Kerjasama daerah akan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam menyediakan pelayanan umum.

Kerjasama daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan sumber pendapatan asli daerah. Kerjasama daerah dilakukan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah NKRI, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan dan kepastian hukum. Kerjasama tersebut diwujudkan dalam bentuk badan kerjasama antar daerah.

Obyek kerjasama merupakan faktor utama yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kerja sama untuk menentukan pilihan bentuk kerja sama yang akan dilaksanakan. Obyek yang dapat dikerjasamakan meliputi seluruh urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom, asset daerah dan potensi daerah serta penyediaan pelayanan umum.

Dengan terobosan yang kreatif dan inovatif, kerjasama antar daerah diharapkan dapat meningkatkan perbaikan ekonomi dan mendorong terciptanya iklim investasi yang pada gilirannya akan membuka peluang terciptanya lapangan pekerjaan yang lebih luas bagi masyarakat Karawang.

1. Kebijakan

Pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga berdasarkan peraturan, peraturan sebagai berikut :

- a) Undang-undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;
- b) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
- c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- e) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
- g) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
- h) Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau penerimaan hibah serta penerusan pinjaman dan atau hibah luar negeri;
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
- k) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri;
- l) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri dengan Lembaga Asing Non Pemerintah;
- m) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;

n) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah.

2. Realisasi dan Pelaksanaan Kegiatan

Pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Karawang melaksanakan kerjasama (*Memorandum of Understanding*) dengan diantaranya adalah :

Tabel 2.234
Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi
Tahun 2015

No	Mitra Kerjasama	Nomor Perjanjian	Tanggal	Tentang
1.	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	119/05/Otdaksm	20 Januari 2015	Pengawasan dan Penerapan Sanksi Administratif dalam Pengelolaan LH di Jabar
2.	BPKP Perwakilan Jawa Barat	073/745/Pem.Um MOU-4/PW10/2/2015	4 Pebruari 2015	Pengembangan Manajemen Pemerintah Kabupaten Karawang
3.	Dirjen Tanaman Pangan-Kementan	294/HK/220/C/04/2015 073/1968/Pem.Um	1 April 2015	Pengelolaan Organisme Pengganggu Tanaman Pangan

Sumber: Bagian Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Karawang (data s.d. Mei 2015)

Dalam menyelenggarakan pemerintahannya, daerah diberi kewenangan untuk melakukan kerja sama dengan daerah lain dan pihak ketiga.

1. Kebijakan dan Kegiatan

Kerjasama dengan pihak ketiga merupakan kerjasama daerah, Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan semua yang berbadan hukum seperti : BUMN, BUMD, Koperasi dan lain-lainnya serta dengan luar negeri yaitu lembaga internasional untuk menggali potensi yang sekiranya dapat dikerjasamakan untuk meningkatkan investasi daerah dalam upaya mensejahterakan masyarakat serta meningkatkan pelayanan umum. Beberapa alternatif kegiatan diantaranya :

1) Kerjasama dengan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

- 2) Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR)/Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)/ Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP);
- 3) Kerjasama dengan Perguruan Tinggi;
- 4) Kerjasama dengan Perusahaan Negara/Lembaga Keuangan/Perbankan;
- 5) Kerjasama dengan Lembaga Internasional;
- 6) Kerjasama dengan Polda, Kodam, BAKN.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Selama kurun waktu tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Karawang telah melaksanakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dapat dilihat pada Tabel 2.235 berikut ini :

Tabel 2.235

Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Ketiga Tahun 2015

No	Mitra Kerjasama	Nomor Perjanjian	Tanggal	Tentang
1.	KODIM 0604/KRW	073/019/Pem.Um B/35/I/2015	13 Januari 2015	Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian
2.	ITB (Institut Teknologi Bandung)	073/777/Pem.Um 008/1.A/DN/2015	6 Pebruari 2015	Kerjasama Dalam Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
3.	PJT II Purwakarta	690/1481/pem.um 1/04/mou/2015	9 Maret 2015	Rencana Kerjasama Pengembangan Spam (system penyediaan air minum)
4.	Pemkab. Purwakarta	180/07-Huk/2015 dan 073/1984/Pem.Um	2 April 2015	Kerjasama Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Karawang
5.	Pemkab. Kotabaru	05 Tahun 2015 dan 073/2116/Pem.Um	10 April 2015	Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

Sumber: Bagian Pemerintahan Umum Setda Kab. Karawang (data s.d. Mei 2015)

1) Pemerintah Kabupaten Karawang pada tahun 2015 menganggarkan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Kabupaten Karawang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang.

2) Pengelolaan parkir

Kerjasama Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang pada tahun 2015 dalam hal pengelolaan parkir di Kabupaten Karawang, baik pengelolaan parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

Tabel 2.236

MoU Parkir antara Pemerintah Kabupaten Karawang dan Pihak Ketiga Tahun 2015 Retribusi parkir di tepi jalan umum

NO	NAMA REKANAN/LOKASI	TARGET PERTAHUN (Rp)
1.	CV. FIJAR KEADILAN SEJAHTERA Dijalan Pasar Pemda II Cikampek	47,382,191.00
2.	CV. INTAN Jl. Tuparev, Toko K.L s/d Toko Hari-hari Karawang	145,440,000.00
3.	CV. Siliwangi Dijalan Pasar Cikampek, Jl. Ahmad Yani	40,154,400.00
4.	CV. PUTRA PAKU SARAKAN Didepan SD. Bhineka, Pertokoan seroja, Pangkas Rambut Gaya Bandung, Toko Enjah, RM. Dukuh, Baso H. Yatmin, Apotik Karawang, Dewi Bakery, SDN. Mandala Sari, Baso H. Lili Gg. Rumput	21,600,000.00
5.	CV. EUCLUDIEN LIMA BINTANG Diseputar Lapang Karangpawitan Jl. Banten, Jl. Sukabumi, Jl. Subang, Jl. Bandung, Jl. Purwakarta	9,360,000.00
6.	CV. SEJAHTERA JAYA UTAMA Jl. Tuparev, Toko Holand s/d Toko Eks Roma	81,840,000.00
7.	CV. CAKRA BUANA	

NO	NAMA REKANAN/LOKASI	TARGET PERTAHUN (Rp)
	Diruas Jl. Interchange Karawang Barat	6,000,000.00
8.	CV. SUMBER JAJA Dijalan Kertabumi, Baso Kumis s/d Pertokoan Buyoh	7,200,000.00
9.	CV. SAGARA KANCANA Dijalan Niaga Karawang	10,080,000.00
10.	CV. VASA PERKASA Ruas Jalan Amansari, Kota Rengasdengklok dan Ruas Jalan Karang Anyar	50,347,000.00
11.	CV. EUCLUDIEN LIMA BINTANG Jl. Surotokunto, Jalur Johar Cinangoh, Jl. Ahmad Yani Karawang dan Jalan Syeh Quro	25,920,000.00
12.	PT. NURHIKMAH SAPUTRA JAYA Jl. Terminal Cikampek, Pasar Anyar	54,274,147.00
13.	CV. MUTIARA JAYA Jl. Syeh Quro Lemah Abang Wadas dan Jalan Tempuran Cikampek, Parakan, Kecamatan Lemah Abang Wadas	7,300,800.00
J U M L A H		506,898,538.00

Sumber: Dishubkominfo Kabupaten Karawang (data s.d. Mei 2015)

Untuk tahun 2015 target parkir khusus berdasarkan nilai MoU adalah Rp. **506,898,538,-** (Lima Ratus Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah).

Tabel 2.237
**MoU Parkir antara Pemerintah Kabupaten Karawang dan Pihak
Ketiga Tahun 2015 Retribusi Parkir Tempat Khusus Parkir**

NO	NAMA REKANAN/LOKASI	TARGET PERTAHUN (Rp)
1.	CV. TSURAYA Karawang Plaza	60,000,000.00
2.	CV. RAMA PUTRA PERSADA RSUD Karawang	173,250,000.00
3.	CV. KURNIAWAN BCA Karawang dan Jl. Panatayuda Karawang	57,892,527.00
4.	IKATAN PEDAGANG PASAR KARAWANG (IPPK) Pasar Karawang	93,522,000.00
5.	CV. TRI MEDIA SEJAHTERA Dipasar Rengasdengklok	9,018,000.00
6.	CV. DWI PATRIOT KARAWANG	18,000,000.00

NO	NAMA REKANAN/LOKASI	TARGET PERTAHUN (Rp)
	Dipasar Cilamaya	
7.	BAMBANG Ditempat Khusus Parkir BJB Karawang	7,200,000.00
8.	CV. SAGARA KANCANA didalam GOR Panatayuda Karawang	7,200,000.00
9.	Bp. Karna Ditempat Khusus Parkir Kantor Dinas Tenaga Kerja	5,280,000.00
J U M L A H		431,362,527.00

Sumber: Dishubkominfo Kabupaten Karawang (data s.d. Mei 2015)

Untuk tahun 2015 target Retribusi Tempat Khusus Parkir berdasarkan Nilai MoU adalah Rp 431,362,527,- (Empat Ratus Tiga Puluh Satu Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah).

3) Pengembangan Sistem Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah, serta dalam rangka menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pada tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Karawang bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat menandatangani Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat Nomor :

073/745-Huk/2015
MOU-4/PW 10/3/2015
, tanggal 4 Pebruari 2015, tentang Pengembangan Manajemen Pemerintah Kabupaten Karawang.

2.8. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Karawang

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dirancang dengan jumlah tujuan (goals) sebanyak 17 poin. Dalam Sistem TPB ini diimplementasikan di Indonesia dengan pengembangan menjadi 169 target dan 319 indikator yang dibagi sesuai kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota. Jumlah Indikator TPB berdasarkan urusan dan kewenangannya, yaitu meliputi:

- a. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan kabupaten: 104

Adapun penilaian dan analisis capaian indikator TPB untuk Kabupaten Karawang dalam laporan ini terbagi ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:

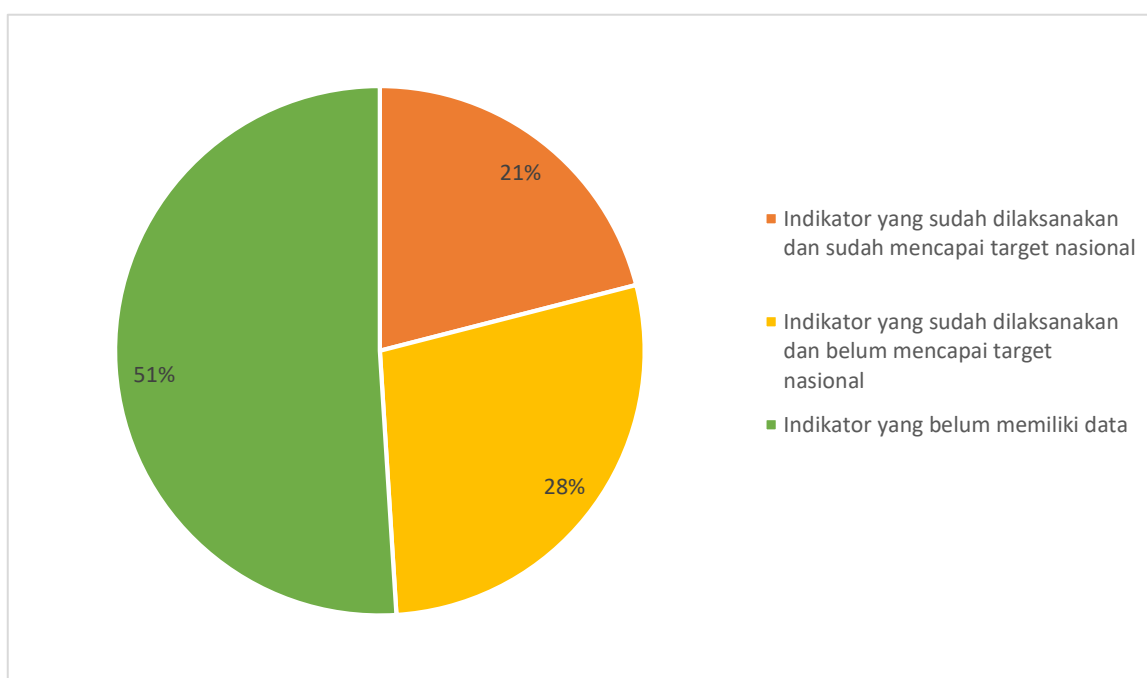
- a. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS)
- b. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB)
- c. Indikator TPB dengan data tidak ada/belum ada data (NA)

Penilaian dan analisis mengenai capaian setiap indikator untuk masing-masing TPB mengacu pada target nasional RPJMN 2019. Adapun Kondisi data yang didapatkan melalui dokumen SDG's Center Bappeda ditunjukkan dalam tabel 2.238 dan gambar 2.13.

Tabel 2.238

Capaian Indikator TPB Kabupaten Karawang

No	Kondisi Data	Jumlah	Persentase
1	Indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional	22	21
3	Indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional	30	28
4	Indikator yang belum memiliki data	54	51
Total		100	100,00%



Gambar 2.13 Persentase capaian TPB di Kabupaten Karawang

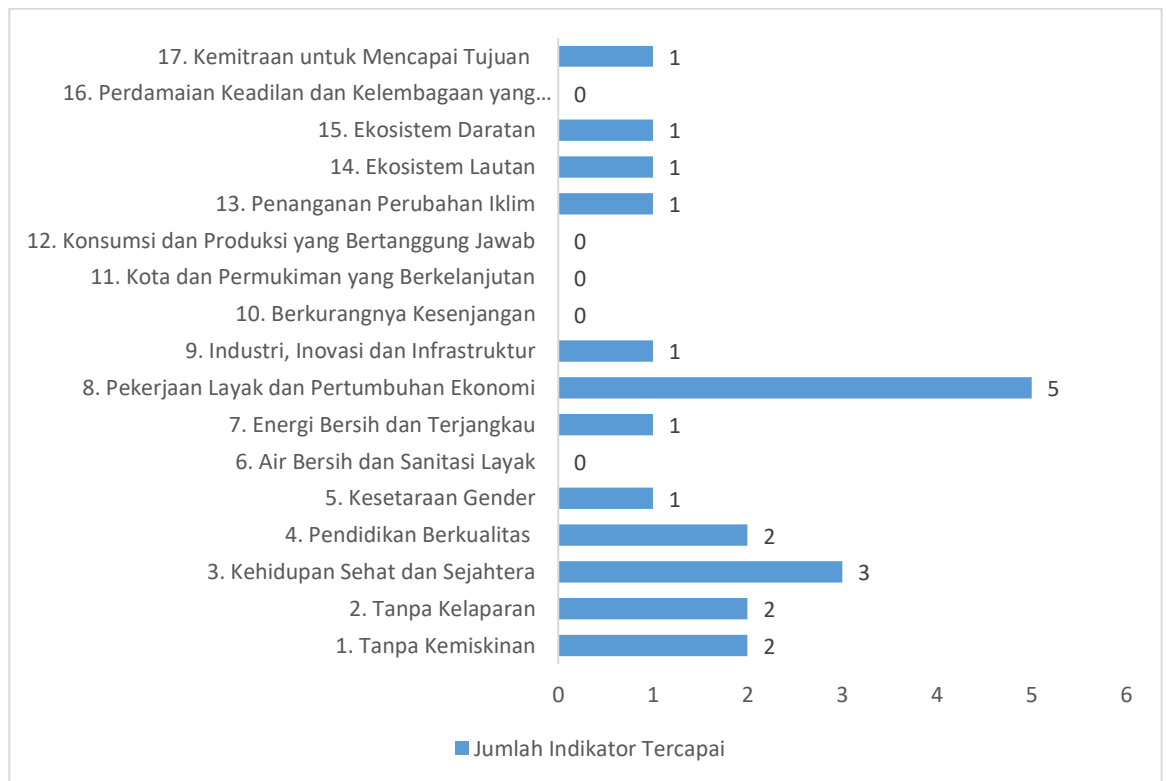
Penilaian terdapat tujuan pembangunan berkelanjutan yang terdiri dari 104 indikator indikator yang sudah dilaksanakan oleh Kabupaten Karawang dengan 23 di antaranya telah mencapai target nasional yang ditetapkan dalam Perpers 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Adapun 30 indikator yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional, dan 54 indikator dengan data-data tidak tersedia.

Pengkategorian hasil capaian bertujuan untuk memetakan isu strategis yang akan dipergunakan sebagai prioritas dalam

pencapaian tujuan pembangunan di Kabupaten Karawang pada periode RPJMD berikutnya, yaitu 2016-2021. Isu strategis yang akan menjadi prioritas utama adalah target-target dalam indikator TPB yang sudah dilaksanakan namun belum tercapai, dan indikator yang tidak memiliki data. Berikut adalah capaian indikator TPB Kabupaten Karawang yang mengacu kepada target nasional RPJMN 2019.

2.8.1. Target TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target (SS)

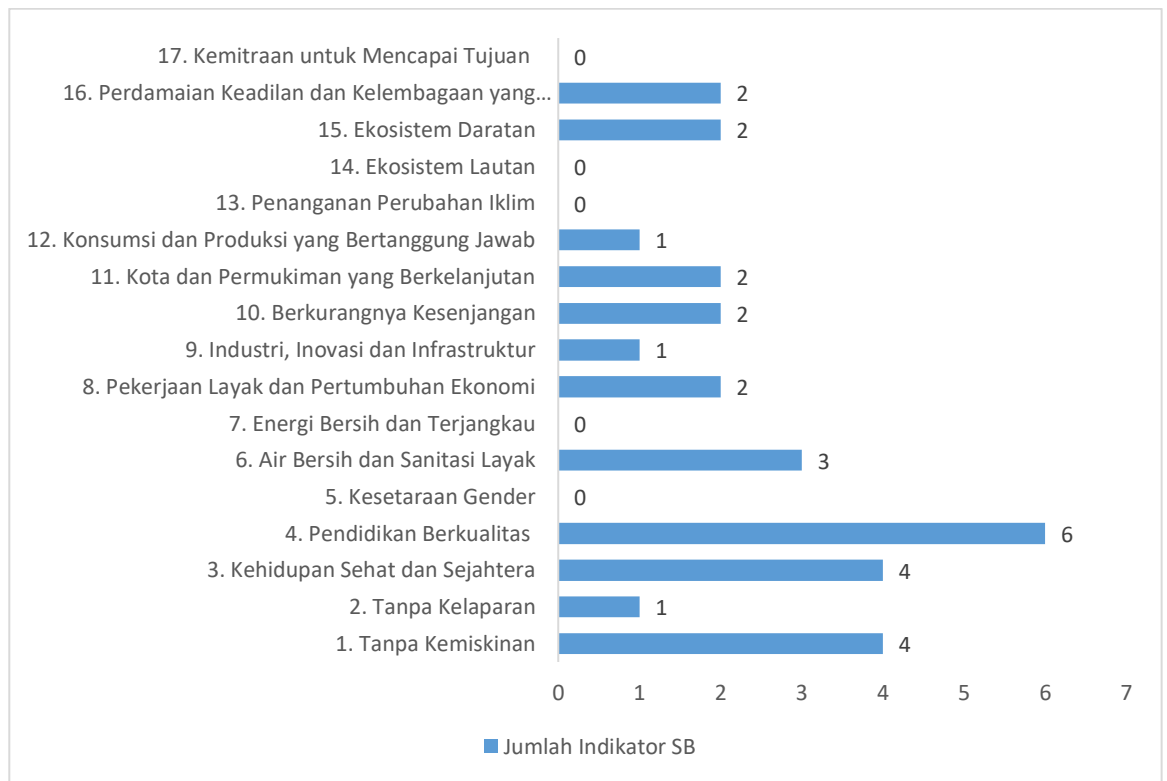
Capaian TPB berdasarkan tabel 3.1 yang masuk dalam kategori ini adalah sebanyak 22 indikator atau 21% dari keseluruhan target yang telah dianalisis dalam kewenangan Kabupaten. Capaian paling tinggi dicapai oleh Tujuan ke 8 (tujuh) yaitu Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, dimana sebanyak 5 indikator telah dilaksanakan dan sudah mencapai target. Adapun pencapaian terbesar selanjutnya terdapat dalam Tujuan ke 3 (tiga) yaitu Kehidupan Sehat dan Sejahtera sebanyak 3 indikator, dan Tujuan ke 4 Pendidikan Berkualitas dengan 2 indikator yang sudah memenuhi target Gambar 2.14 akan menunjukkan pencapaian setiap indikator TPB untuk kategori sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional yang ditentukan (SS)



Gambar 2.14 Jumlah Indikator Berdasarkan Tujuan TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional

2.8.2. Target TPB yang Sudah Dilaksanakan Tetapi Belum Mencapai Target (SB)

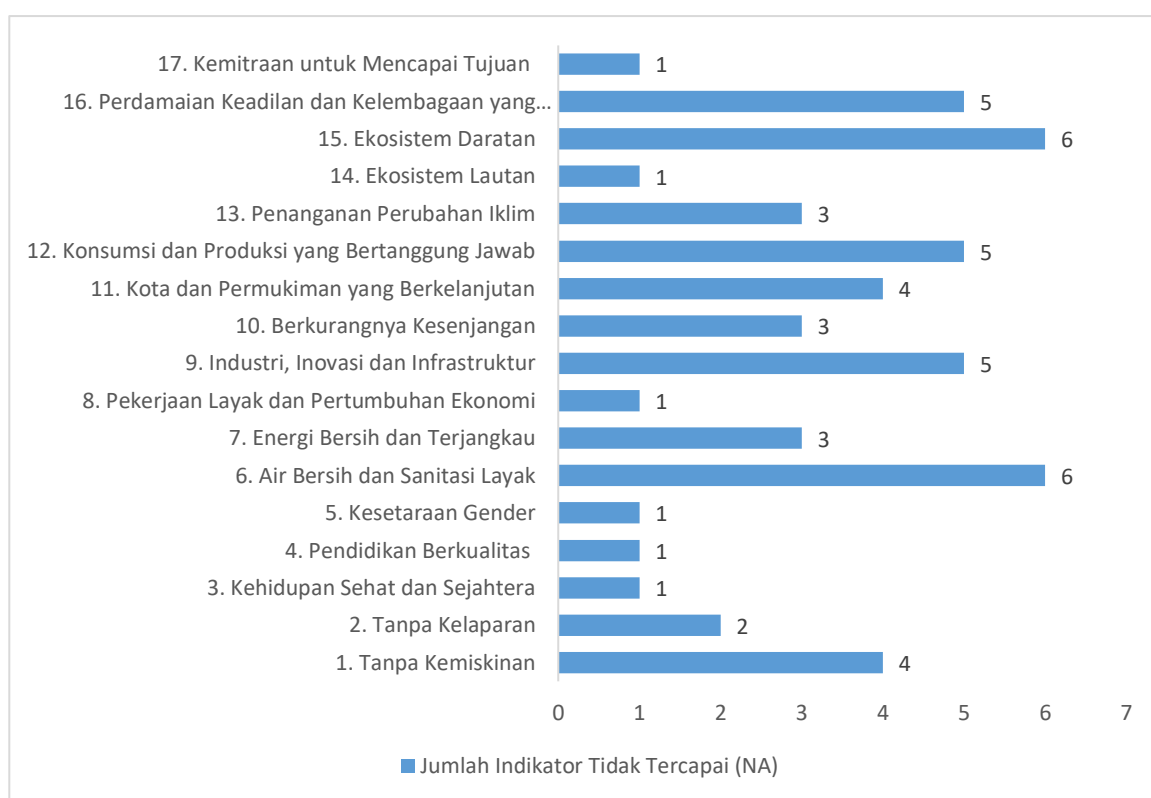
Berdasarkan kategori 2 ini, terdapat 30 indikator atau sebanyak 28% dari keseluruhan target yang sudah terkaji dalam kewenangan kabupaten. Tujuan TPB dengan indikator tertinggi dalam kategori ini adalah indikator terkait dengan Tujuan Ke 4 yaitu Pendidikan Berkualitas berjumlah 6 indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target, serta Tujuan ke 1 Tanpa Kelaparan berjumlah 4 indikator. Pencapaian setiap indikator TPB untuk kategori sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target dapat dilihat pada gambar 2.15.



Gambar 2.15 Jumlah Indikator Berdasarkan Tujuan TPB yang Sudah Dilaksanakan Namun Belum Mencapai Target (SB)

2.8.3. Target TPB Dengan Data Tidak Tersedia (NA)

Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan berdasarkan kategori ini merangkum seluruh indikator TPB dengan data-data pendukung capaian yang tidak tersedia. Jumlah indikator yang masuk ke dalam kategori TPB dengan data tidak tersedia adalah sebanyak 54 indikator atau 51% dari keseluruhan indikator yang di analisis sesuai dengan target dalam kewenangan kabupaten. Jumlah indikator tertinggi dalam kategori ini dicapai oleh Tujuan ke 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak sebanyak 6 indikator yang belum tercapai, serta Tujuan ke 15 Ekosistem Daratan sebanyak 6 indikator, selanjutnya Tujuan ke 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur sebanyak 5 indikator. Pencapaian setiap indikator TPB untuk kategori data tidak ada, dapat dilihat pada gambar 2.16.



Gambar 2.16 Jumlah Indikator Berdasarkan Tujuan TPB dengan Data Tidak Tersedia

2.8.4. Rekapitulasi Capaian Indikator TPB Kabupaten Karawang

Jumlah total indikator yang digunakan dalam analisis, capaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Karawang berdasarkan kategori, sebagaimana tercantum dalam tabel 2.239, yaitu :

Tabel 2.239

Rekapitulasi Capaian Indikator TPB di Kabupaten Karawang

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	SS	SB	NA	Jumlah
1	Tanpa Kemiskinan	2	4	5	10
2	Tanpa Kelaparan	2	2	2	5
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	2	3	3	8
4	Pendidikan Berkualitas	3	6	1	9
5	Kesetaraan Gender	1	0	1	2
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	0	3	6	9
7	Energi Bersih dan Terjangkau	1	0	3	4

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	SS	SB	NA	Jumlah
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	5	2	1	8
9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	1	1	5	7
10	Berkurangnya Kesenjangan	0	2	3	5
11	Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	0	2	4	6
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	0	1	5	6
13	Penanganan Perubahan Iklim	1	0	3	4
14	Ekosistem Lautan	1	0	1	2
15	Ekosistem Daratan	1	2	6	10
16	Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	1	2	4	7
17	Kemitraan untuk mencapai Tujuan	1	0	1	2

Keterangan:

- Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS)
- Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB)
- Indikator TPB yang tidak ada/belum ada data (NA)

Berdasarkan hasil penilaian dari capaian TPB di Kabupaten Karawang terhadap target nasional, terdapat 2 TPB yang memiliki indikator yang telah dilaksanakan dan mencapai target, yaitu:

- Tujuan ke 8 adalah Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi dengan total indikator 8 dan indikator yang telah dilaksanakan mencapai target sebanyak 5 indikator.
- Tujuan ke 4 adalah pendidikan berkualitas dengan total indikator 9 dan indikator yang telah dilaksanakan mencapai target sebanyak 3 indikator.

Adapun tujuan TPB dengan indikator yang belum tercapai, tujuan tersebut adalah Tujuan 4 yaitu Pendidikan berkualitas. Indikator TPB yang belum memiliki data adalah sebanyak 54 indikator dengan indikator terbanyak adalah Tujuan 6 Air Bersih

dan Sanitasi Layak, Tujuan 15 Ekosistem Daratan, Tujuan 9 Industri Inovasi dan Infrastruktur, dan Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab. Sedangkan, kelompok kategori TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target terdiri dari 30 indikator, dengan indikator terbanyak berasal dari Tujuan 4 yaitu Pendidikan Berkualitas sebanyak 6 indikator, Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan sebanyak 4 indikator.

2.9. Capaian Indikator TPB pada Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil analisis dari setiap indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kabupaten Karawang dengan 100 indikator yang terdiri dari 3 kategori pencapaian yakni :

- Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SS)
- Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB)
- Indikator TPB yang tidak ada/belum ada data (NA)

Capaian indikator Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada setiap TPB yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.240
Capaian indikator TPB pada organisasi perangkat daerah pada masing-masing TPB

No	OPD	Jumlah	SS	SB	NA
TPB 1					
1	Dinas Sosial	4		3	1
2	Dinas Kesehatan	4		4	
3	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)	1		1	
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4			4
TPB 2					
5	Dinas Kesehatan	3		2	1
6	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultural	1			1
TPB 3					
7	Dinas Kesehatan	6	2	4	
8	Belum ada OPD	1			1

No	OPD	Jumlah	SS	SB	NA
TPB 4					
9	Dinas Pendidikan	10	1	8	1
TPB 5					
10	Dinas Sosial	1			1
11	Dinas Kesehatan	1		1	
TPB 6					
12	Dinas Perumahan dan Permukiman	5	1	1	3
13	Dinas Kesehatan	2			2
14	Dinas Sumber Daya Air	2			2
15	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	1			1
16	BMKG	1			1
TPB 7					
17	Dinas ESDM	4	1		3
TPB 8					
18	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2	1	1	
19	Otoritas Keuangan	3	2		1
20	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3	2	1	
TPB 9					
21	Dinas Perhubungan	5			5
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2		1	1
TPB 10					
23	Bappeda, multi sektor	1		1	
24	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	5	1		4
TPB 11					
25	Dinas Perumahan dan Permukiman	1		1	
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3			3
27	Dinas Lingkungan Hidup	1	1		
TPB 12					
28	Dinas Perumahan dan Permukiman	2			2
29	Dinas Kehutanan	2			2
30	Dinas Lingkungan Hidup	2	1	1	
TPB 13					

No	OPD	Jumlah	SS	SB	NA
31	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	1		
32	Belum ada OPD	3			3
TPB 14					
33	Dinas Perikanan dan Kehutanan	2	1		1
TPB 15					
34	Dinas Kehutanan	7	1	1	5
35	Belum ada OPD	2			2
TPB 16					
36	KESBANGPOL	1		1	
37	Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil	2	1		1
38	Diskominfo	3			3
TPB 17					
39	Bapenda	2		1	1

OPD dengan indikator terbanyak adalah Dinas Kesehatan yaitu dengan 16 indikator. Diikuti dengan Dinas Kehutanan 9 indikator dan Dinas Perumahan dan Permukiman sebanyak 8 indikator. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh antara aspek lainnya dalam pencapaian TPB di Kabupaten Karawang.

Adapun Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Karawang yang terlibat tidak hanya pemerintah dalam pencapaian tersebut, tetapi ada pemangku kepentingan lainnya yang terlibat di Kabupaten Karawang meliputi PT. AT Indonesia/KIIC, PT.P&G/KIIC, PT. Kawai/KIIC, KIM, PERURI. Pemangku kepentingan tersebut di luar struktural pemerintahan memiliki peran penting dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Berikut peran para pihak dalam pencapaian TPB.

Tabel 2.241
Peran Para Pihak dalam Pencapaian TPB

Nama Lembaga	Jumlah Target
PT. AT Indonesia/KIIC	Perusahaan industri yang membentuk, menyalurkan dan menghimpun bantuan untuk TPB 4 yaitu Pendidikan Berkualitas (bantuan infrastruktur sekolah), TPB 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera (Pembinaan kesehatan Posyandu, puskesmas), TPB 1 Tanpa Kemiskinan, TPB 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan (Lingkungan yang berseri).
PT Kawai/ KIIC	Perusahaan industri yang menyalurkan bantuan yang berkaitan dengan TPB 15 yaitu Ekosistem Daratan yang dipulihkan (dengan penanaman pohon)
PT. FUJI SEAT Indonesia/KIIC	Perusahaan industri yang menyalurkan dan mendukung TPB 12 Konsumsi Produksi yang Bertanggung Jawab (pengolahan limbah), TPB 1 Tanpa Kemiskinan.
KIM	Perusahaan industri yang membentuk, menyalurkan dan menghimpun bantuan untuk TPB 4 yaitu Pendidikan Berkualitas (bantuan infrastruktur sekolah), TPB 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan (Lingkungan sosial).
PERURI	Perusahaan umum percetakan uang RI atau BUMN yang bertugas untuk mencetak uang rupiah bagi Republik Indonesia yang mendukung menghimpun dan menyalurkan bantuan terhadap TPB 1 Tanpa Kemiskinan, TPB 4 Pendidikan Berkualitas, dan TPB 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan.

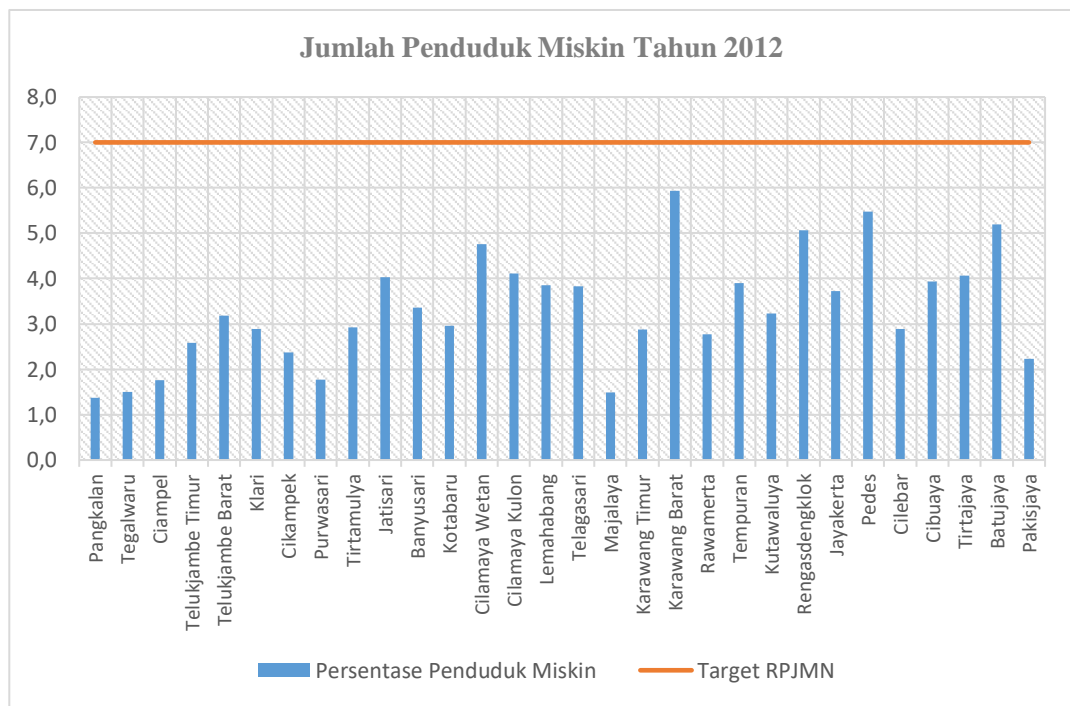
Sumber : Rekapitulasi CSR, 2017

2.10. Kondisi TPB di Kabupaten Karawang

2.10.1 TPB 1: Tanpa Kemiskinan

1. Persentase Kemiskinan

Kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Karawang mengalami peningkatan dari jumlah penduduk miskin dari tahun 2012 hingga 2017. Adapun jumlah penduduk miskin Kabupaten Karawang sebanyak 197.291 dengan persentase pada tahun 2012 yaitu 10,69 persen, angka ini berada dibawah persentase kemiskinan nasional sebesar 10,70 persen. Upaya Penanggulangan kemiskinan masih harus dilakukan untuk mengurangi penduduk miskin di Kabupaten Karawang untuk mencapai target yang sudah ditentukan oleh RPJMN.



Gambar 2.16a
Persentase penduduk miskin di Kabupaten Karawang
Berdasarkan Kabupaten/Kota

Dari gambar 2.16a terlihat bahwa daerah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi di Kabupaten Karawang adalah Kecamatan Karawang Barat, Kecamatan Pedes, dan Kecamatan Batujaya, Kecamatan Cilamaya Wetan.

2. Garis Kemiskinan

Berdasarkan proses analisis perhitungan, besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan. Pendekatan asumsi menggunakan cara perbandingan jumlah penduduk miskin dan garis kemiskinan pada tahun 2017 di keseluruhan Kabupaten Karawang. Jika jumlah penduduk miskin mengalami pertumbuhan dari tahun 2012 hingga 2017 maka penduduk miskin di setiap kecamatan akan cenderung mengalami sebaran yang sama.

2.10.2 TPB 2: Tanpa Kelaparan

1. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan kondisi yang diartikan sebagai tersedianya pangan dalam jumlah yang cukup, terdistribusi dengan harga terjangkau, dan aman dikonsumsi bagi setiap warga untuk menopang aktivitasnya sehari-hari sepanjang waktu. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketahanan pangan adalah konsep yang integratif antara keberadaan, distribusi, dan konsumsi pangan. Sementara itu, akan timbul kerawanan pangan ketika kondisi pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga pada waktu tertentu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Ketahanan pangan dapat dilihat dari jumlah penduduk yang mengalami kurang gizi sehingga pemenuhan konsumsi pangan tidak terpenuhi. Dapat terlihat pada tabel 2.242 jumlah balita yang mengalami gizi buruk:

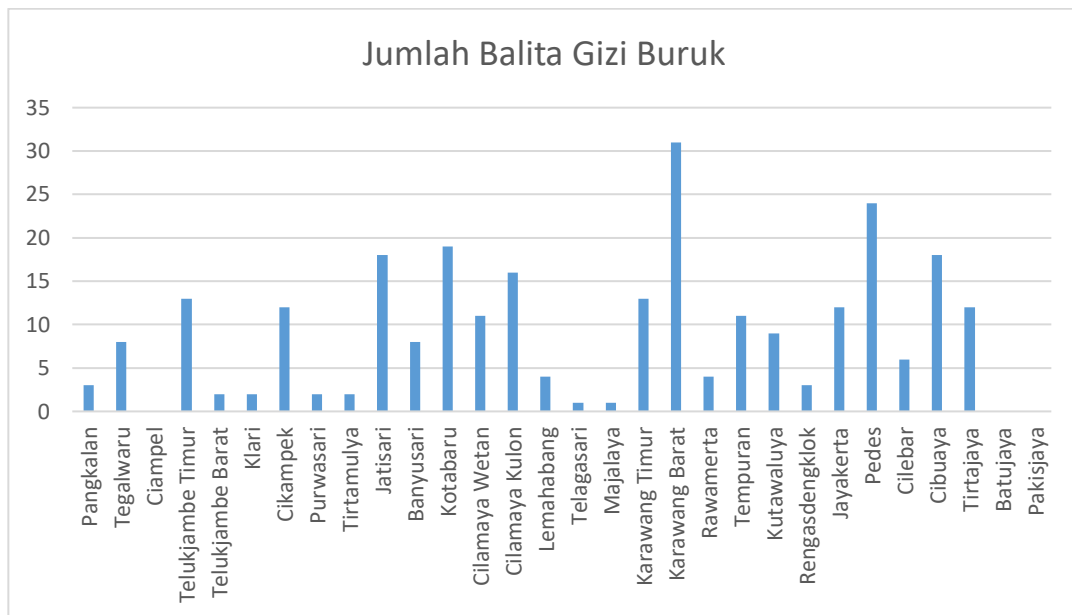
Tabel 2.242
Jumlah Balita Gizi Buruk

No	Kecamatan	Jumlah Balita Gizi Buruk
1	Pangkalan	3
2	Tegalwaru	8
3	Ciampel	0
4	Telukjambe Timur	13
5	Telukjambe Barat	2
6	Klari	2
7	Cikampek	12
8	Purwasari	2
9	Tirtamulya	2
10	Jatisari	18

No	Kecamatan	Jumlah Balita Gizi Buruk
11	Banyusari	8
12	Kotabaru	19
13	Cilamaya Wetan	11
14	Cilamaya Kulon	16
15	Lemahabang	4
16	Telagasari	1
17	Majalaya	1
18	Karawang Timur	13
19	Karawang Barat	31
20	Rawamerta	4
21	Tempuran	11
22	Kutawaluya	9
23	Rengasdengklok	3
24	Jayakarta	12
25	Pedes	24
26	Cilebar	6
27	Cibuaya	18
28	Tirtajaya	12
29	Batujaya	0
30	Pakisjaya	0
	Jumlah	265

Sumber: Buku Dalam Angka Kabupaten Karawang, 2017

Adapun dari jumlah balita yang mengalami gizi buruk di Kabupaten Karawang pada tahun 2017 sebanyak 265 balita, sedangkan Kecamatan yang paling banyak jumlah balita gizi buruk yaitu Kecamatan Karawang barat, Kecamatan Pedes, Kecamatan Cibuaya. Dari Kecamatan tersebut disebabkan adanya tingkat kemiskinan yang tinggi sehingga tidak pemenuhan konsumsi pangan tidak terpenuhi.

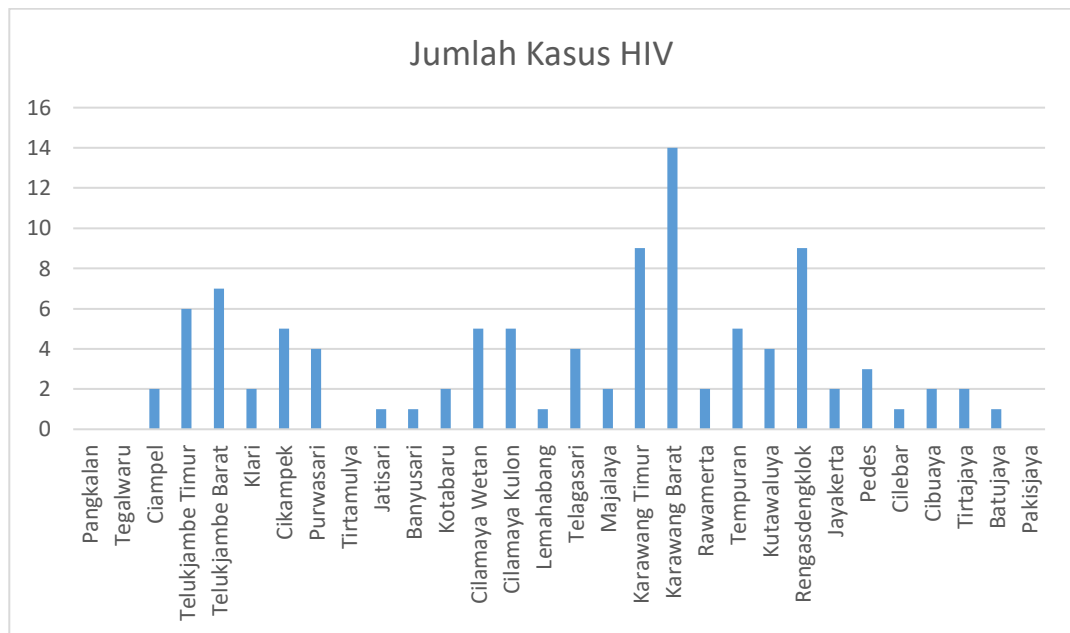


Gambar 2.17 Kebutuhan beras di Kabupaten Karawang Berdasarkan Kecamatan

2.10.3 TPB 3: Kesehatan

1. Kesehatan

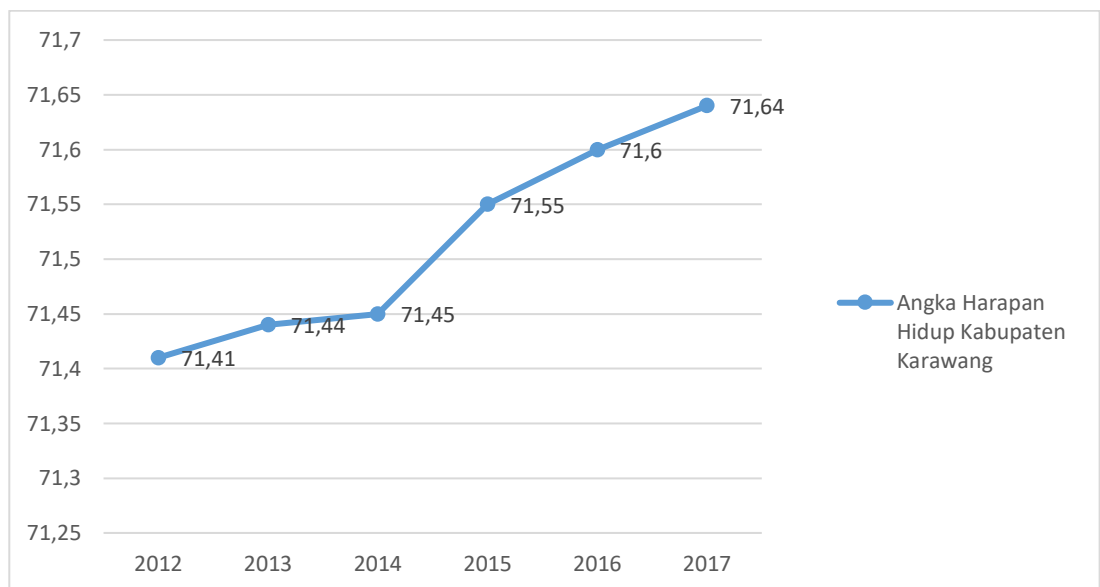
Kesehatan dinilai dari kondisi masyarakat dengan indikator jumlah kasus orang yang terjangkit HIV dan angka harapan hidup (AHH). Adapun kesehatan yang dilihat dari jumlah kasus HIV terlihat pada grafik 2.18. bahwa Kecamatan paling banyak kasus HIV adalah Kecamatan Karawang Barat sebanyak 14 kasus HIV, begitu dengan kemiskinan yang paling tinggi adalah Kecamatan Karawang Barat, ini terlihat bahwa faktor kemiskinan bisa mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat.



Gambar 2.18 Jumlah Kasus HIV Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2017

2. Angka Harapan Hidup

Pengertian yaitu angka harapan hidup (AHH) merupakan salah satu indikator kesehatan yang digunakan sebagai salah satu dasar analisis indeks pembangunan manusia (IPM). Angka harapan hidup memberikan gambaran probabilitas umur maksimal yang dapat dicapai seorang bayi baru lahir. Indikator ini dipandang dapat menggambarkan kinerja pemerintah dalam suatu peningkatan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Peningkatan Angka Harapan Hidup menunjukkan adanya peningkatan kehidupan dan kesejahteraan penduduk serta meningkatnya derajat kesehatan suatu bangsa.



Gambar 2.19 Angka harapan hidup di Kabupaten Karawang Tahun 2012-2017

Berdasarkan gambar 2.19 bahwa pada setiap tahun angka harapan hidup di Kabupaten Karawang mengalami peningkatan hingga pada tahun 2017 mencapai 71,64 persen. Angka harapan hidup saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ketahun. Selama periode 2012-2017, Kabupaten Karawang meningkatkan angka harapan hidup sebesar 0,03 persen. Angka harapan hidup pada tahun 2012 sebesar 71,41 sedangkan pada tahun 2017 meningkat menjadi 71,64 persen. Tetapi dalam target Kabupaten Karawang meningkat 72,3 persen, dengan begitu Kabupaten Karawang harus meningkatkan sebanyak 0,66 persen untuk mencapai target.

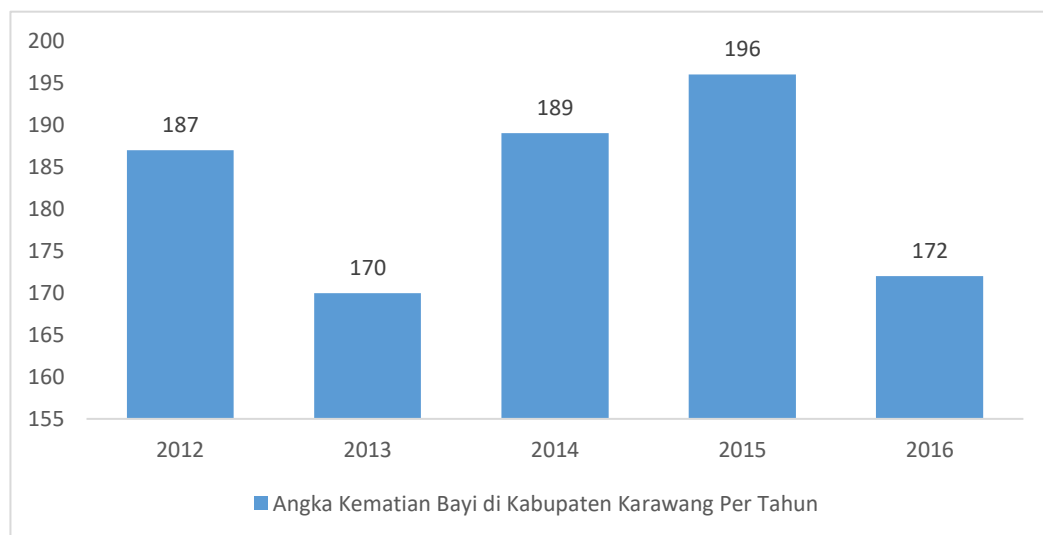
3. Angka Kematian Bayi

Pengertian angka kematian merupakan salah satu indikator outcome pembangunan kesehatan. Angka kematian dapat menggambarkan seberapa tinggi derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah. Pada dasarnya penyebab kematian ada yang langsung dan tidak langsung, walaupun dalam kenyataannya terdapat interaksi dari berbagai faktor yang mempengaruhi terhadap tingkat kematian di masyarakat.

Berbagai faktor yang berkaitan dengan penyebab kematian, baik langsung maupun tidak langsung, antara lain dipengaruhi oleh tingkat sosial ekonomi, kualitas lingkungan hidup, upaya

pelayanan kesehatan dan lain-lain. Angka Kematian Bayi (AKB) atau Infant Mortality Rate (IMR) adalah Angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Selain itu, AKB berguna untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orangtua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi.

Adapun angka kematian bayi merupakan tolak ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan terutama yang berhubungan dengan bayi baru lahir.



Gambar 2.20 Angka Kematian Bayi di Kabupaten Karawang Per Tahun (2012-2016)

Proporsi kematian bayi setiap tahun di Kabupaten Karawang mengalami peningkatan, dan setiap tahunnya memiliki kenaikan yang cukup tinggi.

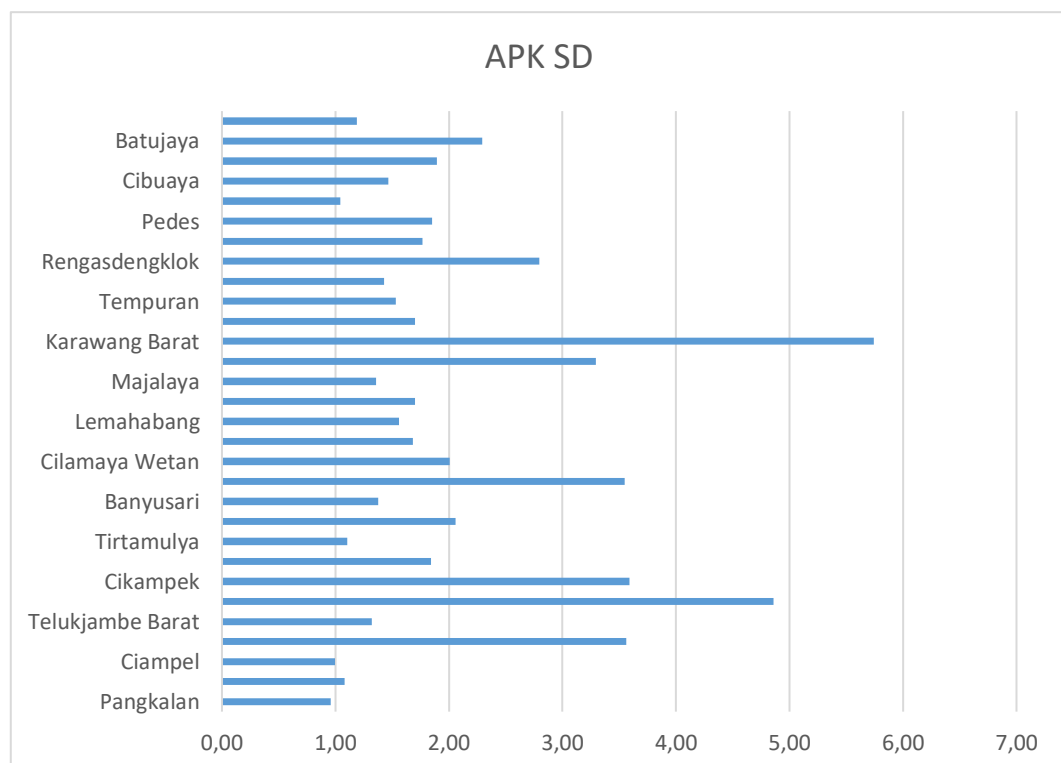
4. Angka Kematian IBU (AKI)

Indikator Angka Kematian Ibu (AKI) atau Maternal Mortality Rate (MMR) menggambarkan besarnya risiko kematian ibu pada fase kehamilan, persalinan dan masa nifas di antara 100.000 kelahiran hidup dalam satu wilayah pada kurun waktu tertentu.

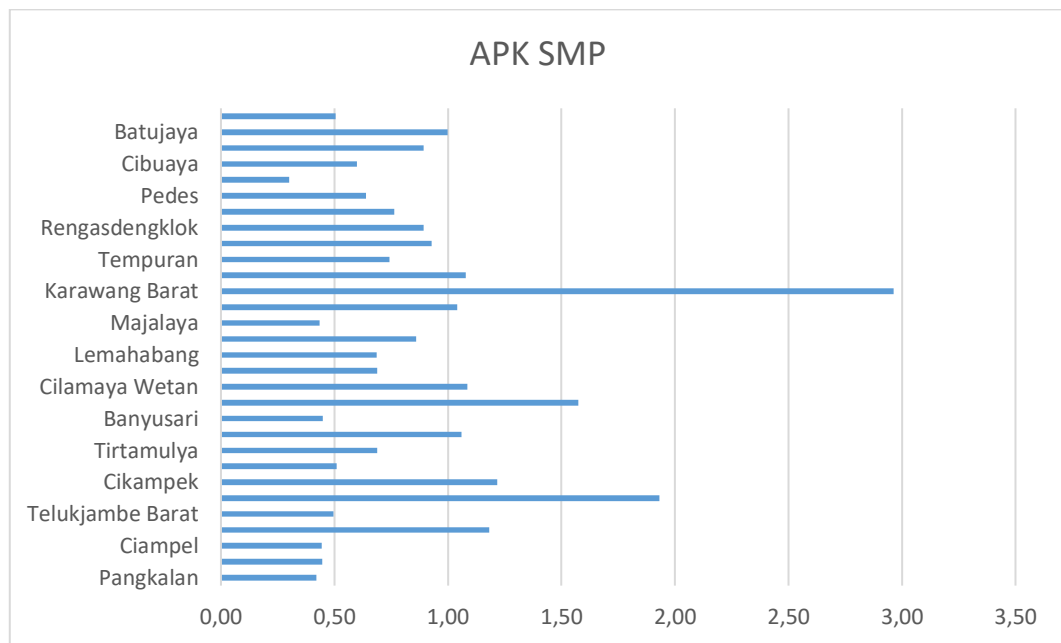
Proporsi Angka kematian ibu di Kabupaten Karawang setiap tahun mengalami kenaikan hanya pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 59, dari tahun 2015 sebanyak 68 per 100.000 kelahiran.

2.10.4 TPB 4: Pendidikan

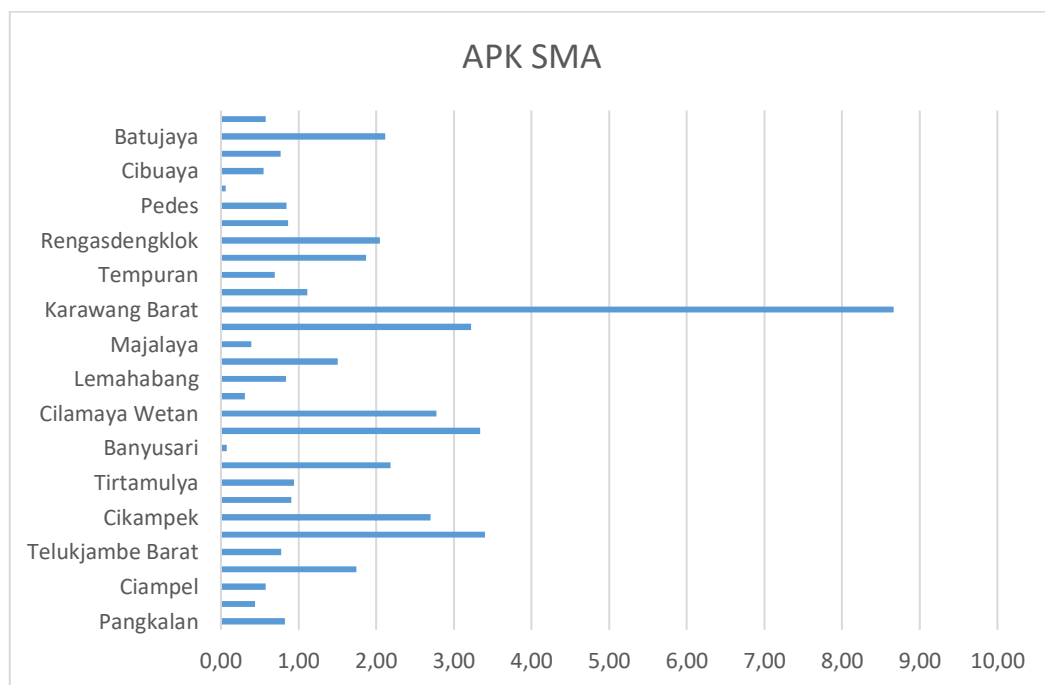
Pembangunan suatu wilayah mencapai keberhasilan ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut. Oleh karena itu, peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK), menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya dan merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.



Gambar 2.21 Angka partisipasi kasar (APK) tingkat SD/MI



Gambar 2.22 Angka partisipasi kasar (APK) tingkat SMP/MTs/Sederajat



Gambar 2.23 Angka partisipasi kasar (APK) tingkat SMA/SMK/MA/Sederajat

Berdasarkan grafik 2.23 pada tahun 2017, sebagian besar daerah di Kabupaten Karawang memiliki nilai APK SD/MA/ sederajat Kurang dari 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak penduduk yang tidak sekolah dasar pada usia 7-12 tahun. Tidak hanya itu, ketimpangan APK SD/MI/ sederajat antar daerah tempat tinggal terlihat secara

signifikan. Dengan demikian, akses menempuh pendidikan dasar bagi semua penduduk cenderung belum sama dan merata.

Demikian pula, indikator APK mengukur kemudahan akses bagi penduduk terutama remaja usia sekolah dalam menempuh pendidikan. Selama tahun 2017 terlihat bahwa APK SMP/MTs/ sederajat di Kecamatan Kabupaten Karawang terlihat tidak tersebar dengan merata, hal ini terlihat dari adanya ketimpangan yang signifikan melihat dengan Kecamatan Karawang Barat paling tinggi APK dibandingkan dengan kecamatan lainnya. dimana terdapat ketimpangan antara daerah (kecamatan).

2.10.5 TPB 5: Kesetaraan Gender

Salah satu faktor penentu daya saing suatu daerah adalah kualitas sumber daya manusia, baik dalam hal kemampuan, maupun produktivitasnya. Jika melihat proporsi jumlah penduduk, sumber daya manusia laki-laki dan perempuan hampir setara. Artinya, pembangunan yang dicapai, separuhnya ditentukan oleh perempuan.

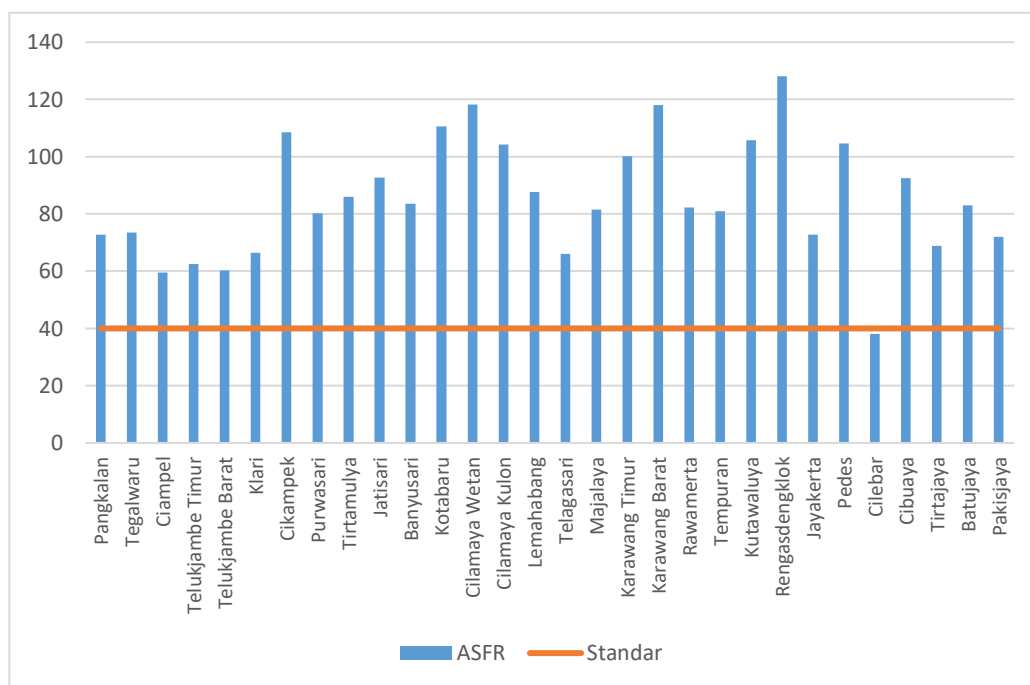
Adapun sebagian diskriminasi terhadap perempuan sudah terjadi dalam proses yang cukup panjang. Paham patriarki yang membentuk pemikiran bahwa laki-laki dianggap lebih superior dalam semua lini kehidupan telah menjadi pemicu terjadinya diskriminasi. Perbedaan perilaku, status, dan otoritas antara laki-laki dan perempuan menjadi hal yang turun temurun dipraktikkan di masyarakat. Ketidakadilan gender tersebut termanifestasi dalam bentuk *stereotype*, marginalisasi, subordinasi dan tindak kekerasan terhadap perempuan.

Tabel 2.243
Jumlah Kekerasan Sosial di Kabupaten Karawang
Pada Tahun 2013-2016

NO	Jenis	Tahun			
		2016	2015	2014	2013
1	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	17.009	16.877	18.629	20.432
2	Korban Tindak Kekerasan	154	187	391	407
3	Wanita Tuna Susila	120	118	158	287

Sumber: Buku Dalam Angka Kabupaten Karawang, 2013-2016

Dari tabel 2.243 Terlihat bahwa tindak kekerasan berkurang setiap tahunnya mencapai 154 pada tahun 2016, sedangkan untuk wanita yang rawn terhadap sosial ekonomi masih sangat banyak mencapai 17.009 pada tahun 2016 angka ini terlihat menurun jika dibandingkan pada tahun 2013 sebanyak 20.432.



Gambar 2.24 Angka Kelahiran Pada Perempuan Umur 15-19 di Setiap Kecamatan, Kabupaten Karawang

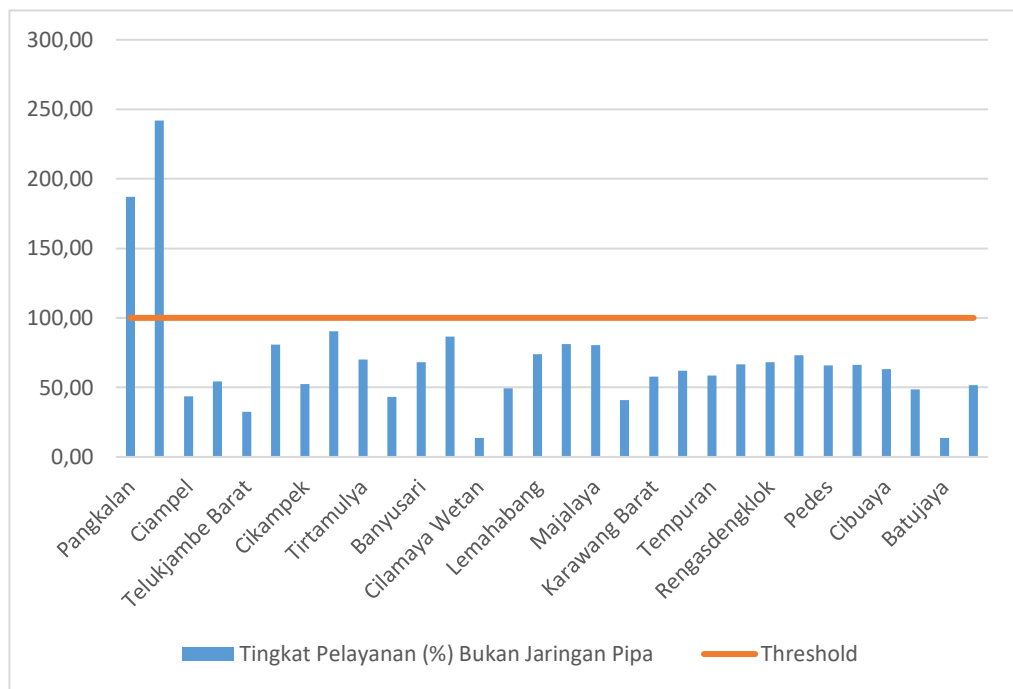
2.10.6 TPB 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak

Kondisi air bersih dan sanitasi layak di Kabupaten Karawang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu tingkat pelayanan air minum non perpipaan dan pelayanan air minum perpipaan. Kondisi dari adanya sanitasi yang belum layak dari rumah tangga, adapun rumah tangga yang memiliki akses terhadap pelayanan sumber air minum sebagai berikut:

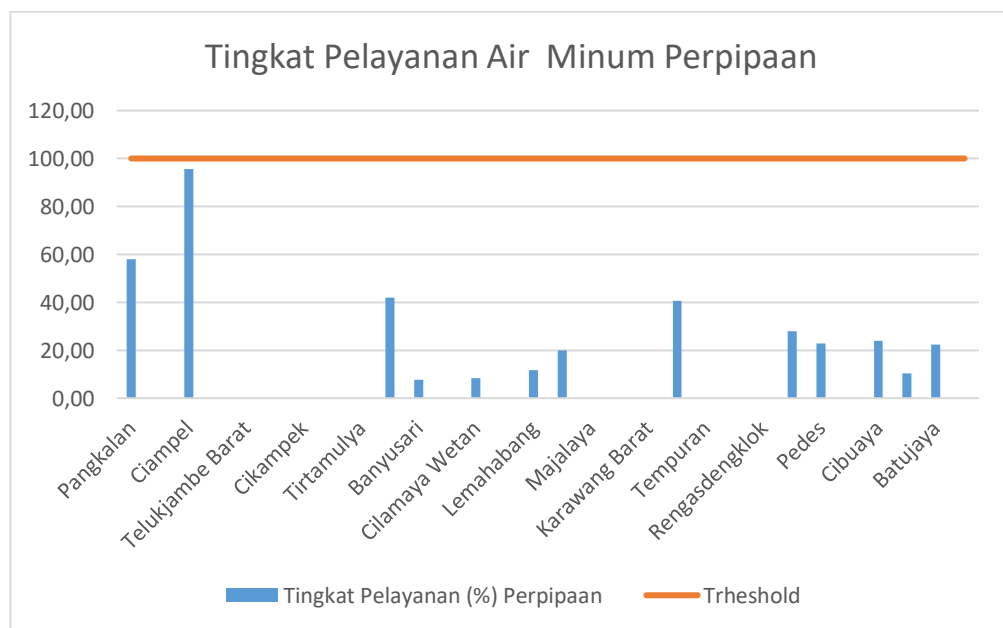
1. Tingkat Pelayanan Air Minum di Kabupaten Karawang

Air minum dan air bersih yang digunakan memiliki standar masing-masing memiliki standar baku mutu masing-masing kelas peruntukannya yang tertuang pada UU No 18 tahun 2001 dan air minum pada Permenkes No 492 tahun 2010. Komponen air minum yang berkualitas adalah air minum yang bersumber dari sarana air bersih yang telah memenuhi persyaratan baik biologis, fisik, dan

kimia. Tujuan TPB 6 selain pemenuhan tingkat Pelayanan air minum non perpipaan dan perpipaan.



Gambar 2.25 Tingkat Pelayanan Air Minum Non Perpipaan di Kabupaten Karawang Berdasarkan Kecamatan



Gambar 2.26 Tingkat Pelayanan Air Minum Perpipaan di Kabupaten Karawang Berdasarkan Kecamatan

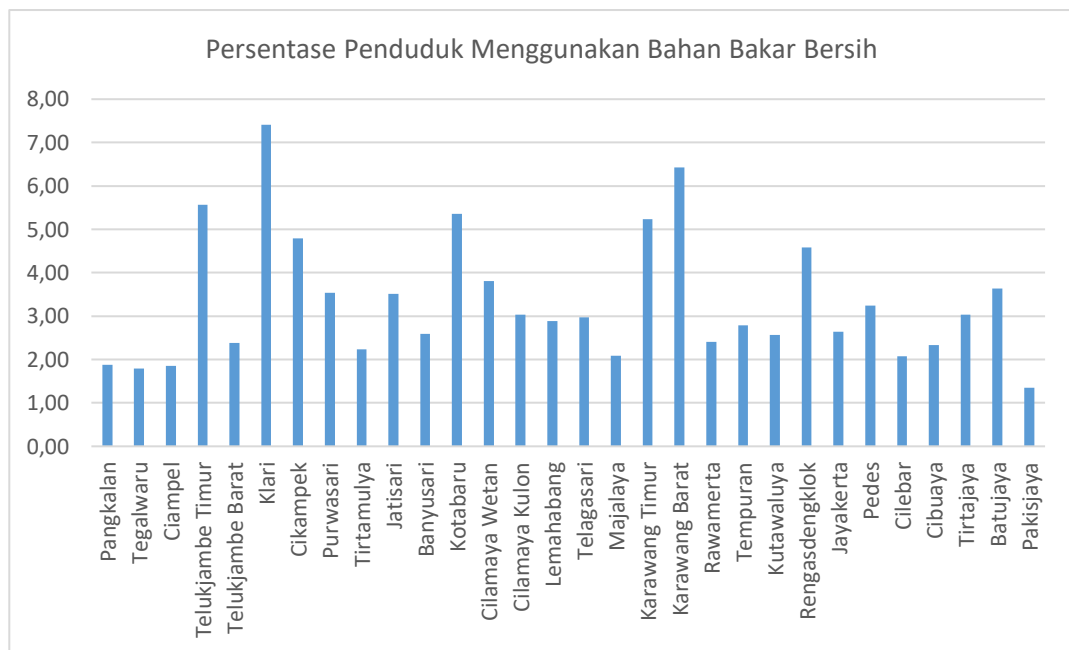
Berdasarkan grafik 2.25 Tingkat pelayanan air minum non perpipaan yang melebihi dari 100 persen yaitu Kecamatan Tegalwaru seban yak 242,00 persen dan Kecamatan Pangkalan 187,90 persen. Jika pada grafik 2.26 Tingkat pelayanan air minum

perpipaan setiap kecamatan di Kabupaten Karawang masih jauh dan kurang dibawah 100 persen.

2.10.7 TPB 7: Energi Bersih dan Terjangkau

Dalam melaksanakan Global Goals dengan integrasi SDG's (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam rencana pembangunan untuk mendorong pemerintah mempunyai kemampuan mengidentifikasi ketimpangan akses pada energi. Karena itu pemerintah dapat berkontribusi menjalankan efisiensi energi dengan memanfaatkan energi hijau, serta menggunakan syarat keberlanjutan untuk mendorong dalam memanfaatkan energi.

Adapun dari data proporsi penduduk dengan sumber energi utama pada teknologi dan bahan bakar yang bersih yang dapat mendorong keberlanjutan dapat dilihat pada gambar 2.27 Persentase penduduk yang menggunakan bahan bakar bersih.



Gambar 2.27 Persentase Penduduk Menggunakan Bahan Bakar Bersih Berdasarkan Kecamatan, Kabupaten Karawang

Berdasarkan gambar 2.27 Kecamatan yang paling banyak menggunakan bahan bakar bersih adalah Kecamatan Klari sebanyak 7,41 persen.

2.10.8 TPB 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

1. Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita (ADHK)

Transaksi ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu produsen dan konsumen. Kelompok produsen menggunakan faktor produksi yang berasal dari kelompok konsumen dan digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Transaksi dari kedua kelompok tersebut terjadi secara berkesinambungan dan membentuk siklus perekonomian.

Tabel 2.244
Laju Pertumbuhan PDRB PER KAPITA (ADHK)

No	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,16	0,04	3,12	4,13
2	Pertambangan dan Penggalian	2,03	1,32	5,04	2,49
3	Industri Pengolahan	5,26	3,95	6,33	6,42
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6,04	0,15	4,25	2,4
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,54	7,74	6,61	7,25
6	Konstruksi	11,23	9,61	8,95	7,36
7	Perdagangan Besar dan Eceran	4,33	5,77	4,82	4,76
8	Transportasi dan Pergudangan	8,3	9,38	8,83	5,61
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,38	9,78	9,3	8,56
10	Informasi dan Komunikasi	18,06	17,27	14,2	11,97
11	Jasa Keuangan	9,17	9,56	10,87	5,4
12	Real Estate	3,9	5,94	6,45	9,43
13	Jasa Perusahaan	4,33	9,05	8,78	8,54
14	Administrasi Pemerintahan	2,51	5,66	3,53	0,31
15	Jasa Pendidikan	18,91	14,81	11,22	11,8
16	Jasa Kesehatan	8,65	14,14	9,24	8,5
17	Jasa Lainnya	6,07	8,49	8,93	9,9
PDRB (ADHK)		5,37	4,5	6,29	5,76

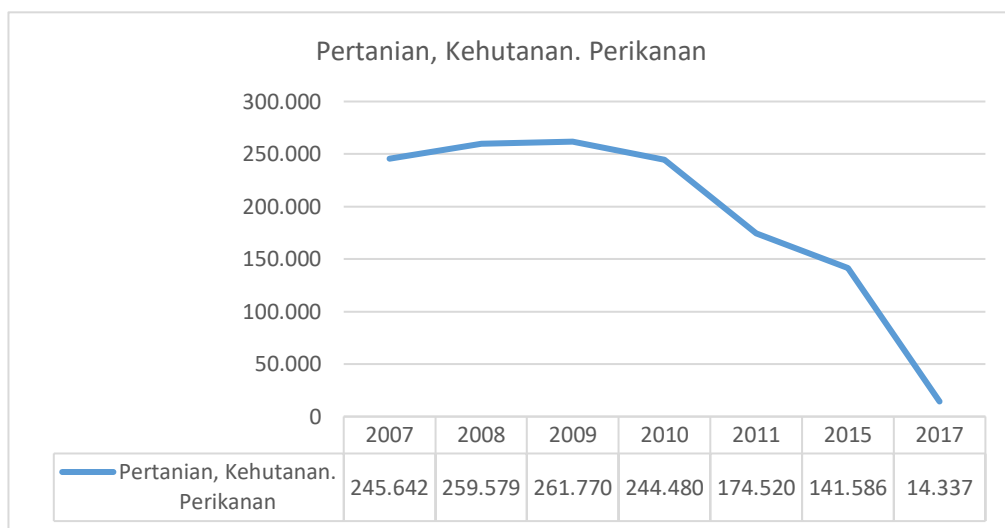
Sumber: Buku Dalam Angka Kabupaten Karawang, 2014-2017

Berdasarkan tabel 2.244 Laju pertumbuhan menurut lapangan usaha yang paling besar yaitu dari informasi dan komunikasi 11,97 persen pada tahun 2017, jasa pendidikan 11,8

persen. Adapun grafik yang memperlihatkan peningkatan dan penurunannya.

2. Penduduk Bekerja Pada Sektor Informal Pertanian

Sektor informal meliputi semua usaha komersial dan nonkomersial, yang tidak memiliki struktur formal dalam organisasi dan operasinya. Sektor informal mempunyai aturan-aturan budaya sendiri hukum dan kecakapan terapan tradisional, nilai dan pola sosial, cara berinteraksi dan berproduksi (Munkner dan Walter, 2001). Sektor informal juga termasuk pertanian, kehutanan, dan perikanan. Berdasarkan data sektor informal di Kabupaten Karawang dengan jumlah penduduk yang bekerja pada sektor informal paling banyak pada tahun 2009 sebanyak 261.770 penduduk tahun selanjutnya berkurang hingga 100.000 penduduk.

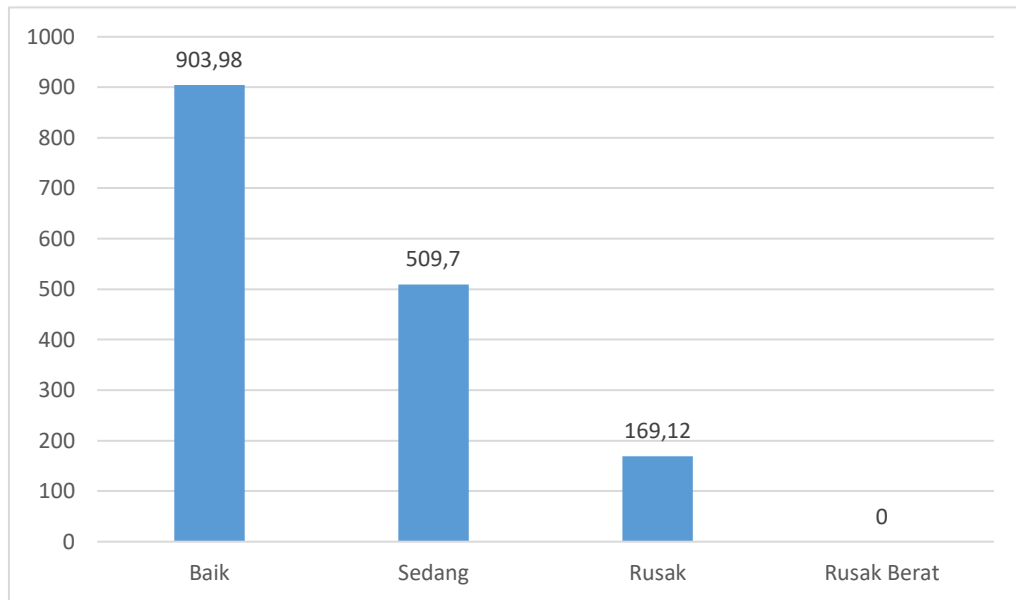


Gambar 2.28 Jumlah Penduduk Bekerja Pada Sektor Informal Pertanian Kabupaten Karawang Pada Tahun 2007-2017

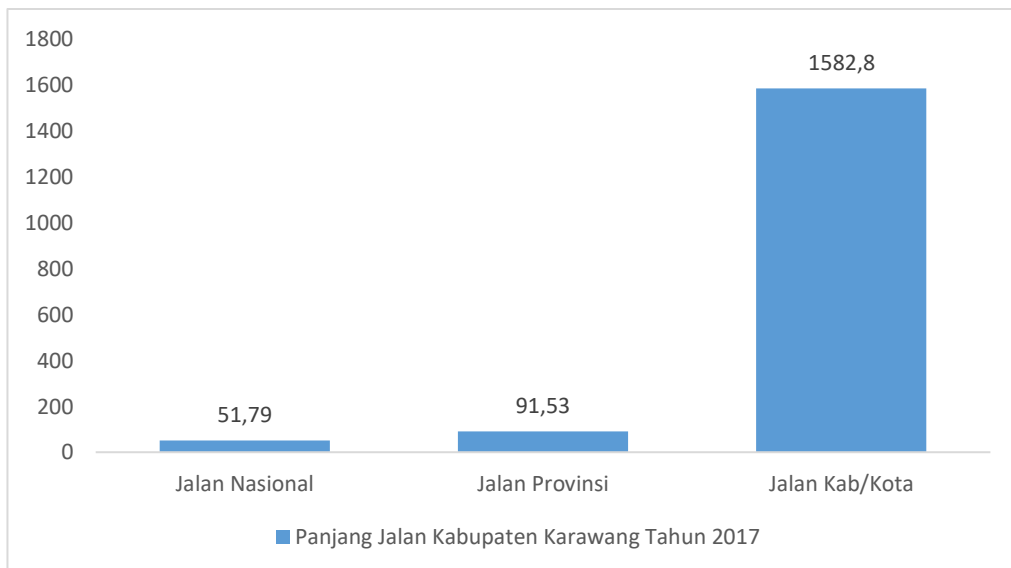
2.10.9 TPB 9: Infrastruktur

Pembangunan merupakan salah satu dasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun, indikator untuk melihat pembangunan yaitu dari adanya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang positif akan menunjukkan adanya peningkatan aktivitas per ekonomian, sebaliknya pertumbuhan ekonomi yang negatif menunjukkan adanya penurunan dalam aktivitas perekonomian. Pembangunan digunakan sebagai metode untuk dapat mengalokasikan sumber-sumber daya (*resources*)

yang dimiliki oleh daerah tersebut, seperti sumber daya alam, sumber daya energi, sumber dana dan sumber daya manusia.



Gambar 2.29 Kondisi Jalan di Kabupaten Karawang Tahun 2017

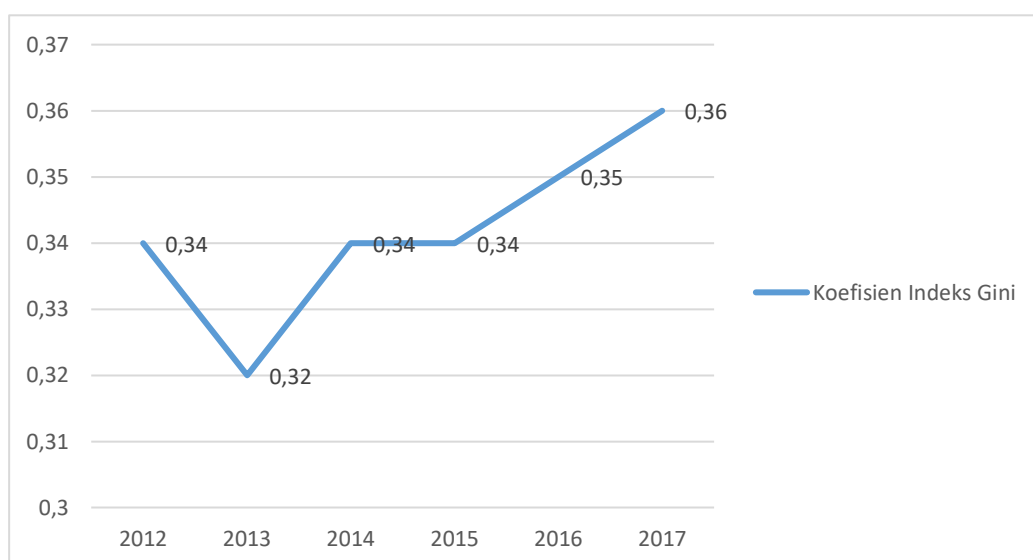


Gambar 2.30 Kondisi Jalan di Kabupaten Karawang Tahun 2017

Berdasarkan gambar 2.29 kondisi jalan di Kabupaten Karawang dalam kondisi baik 903,98 sedangkan rusak berat tidak ada. Diharapkan dengan adanya pembangunan maka dapat memperluas akses public guna mencapai kesejahteraan masyarakat, serta menjamin ketersediaan infrastruktur dan sumber-sumber daya bagi kelangsungan hidup masyarakat.

2.10.10 TPB 10: Berkurangnya Kesenjangan

Tingginya indeks gini/*gini ratio* di Kabupaten Karawang menunjukkan bahwa aktifitas ekonomi masyarakat bawah kurang berkembang secara baik, selain itu pembangunan di Kabupaten Karawang yang kurang berdampak terhadap masyarakat yang berada di kelas bawah (miskin). Permasalahan yang dapat terlihat berdasarkan grafik diatas adalah tingkat ketimpangan yang tidak cukup signifikan (dengan rata-rata 0,02). Hal ini dipengaruhi juga oleh persoalan demografi dikarenakan distribusi pendatang tidak merata. Hal ini dapat dilihat pada gambar 2.31:



Gambar 2.31 Indeks Gini di Kabupaten Karawang Tahun 2012-2017

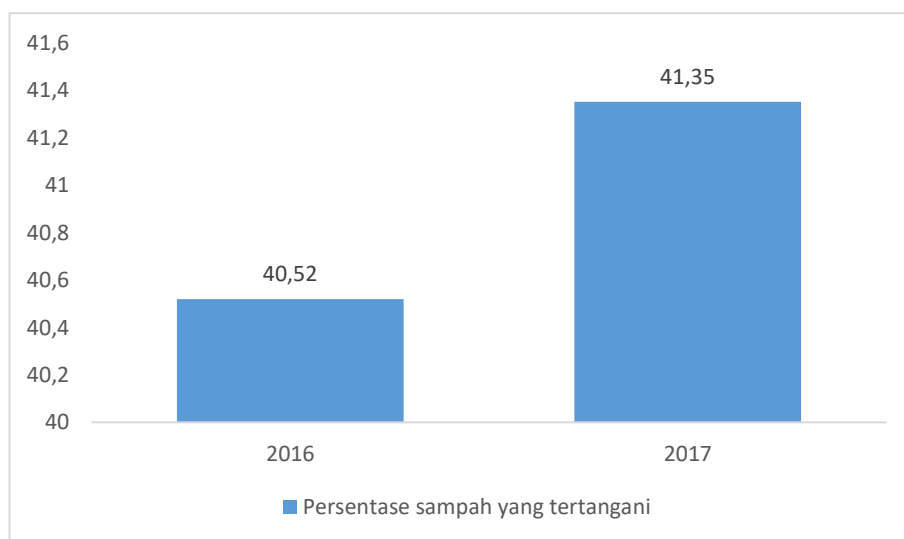
2.10.11 TPB 11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan

Pembangunan kota dan permukiman yang berkelanjutan dapat diartikan sebagai pembangunan permukiman, termasuk di dalamnya pembangunan suatu daerah/kota guna untuk menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi sosial, kualitas lingkungan. Inti dari pembangunan berkelanjutan adalah meningkatkan kualitas hidup.

1. Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani

Beberapa indikator dari pembangunan kota dan permukiman yang berkelanjutan yaitu adalah proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan

terjangkau serta kota yang dapat menangani persampahan atau lingkungan sekitarnya. Berdasarkan proporsi sampah yang tertangani oleh pemerintah Kabupaten Karawang pada tahun 2016-2017 sebanyak 81,87 persen.



Gambar 2.32 Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani di Kabupaten Karawang Tahun 2012-2017

2.10.12 TPB 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab tujuan yang mencangkup mengenai pengolahan limbah baik itu limbah sampah rumahan, atau limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Limbah B3 adalah zat dan atau komponen lain yang karena sifat dapat terkonsentrasi secara langsung ataupun tidak langsung, dapat mencemarkan merusak lingkungan hidup dan membahayakan lingkungan sekitar, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.

Adapun indikator mengenai jumlah limbah yang terkelola dan proporsi limbah B3 di Kabupaten Karawang sebanyak 1595,109 ton/tahun pada tahun 2012. Setiap tahunnya proporsi limbah yang terkelola mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebanyak 1731,042 ton/tahun.

2.10.13 TPB 13: Penanganan Perubahan Iklim

Pengertian dari Gas Rumah Kaca (GRK) yaitu gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun antropogenik, yang

menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Kenaikan konsentrasi GRK penyebab dari meningkatnya suhu global dan berdampak pada perubahan iklim (climate change). Pada sub bab ini menjelaskan mengenai perubahan iklim yang terjadi di Kabupaten Karawang dalam 100 tahun terakhir. Adapun, suhu udara rata-rata di Kabupaten Karawang 27 derajat celcius, dengan kelembaban udara 80% dengan curah hujan bervariasi 1.100 – 3.200 mm/tahun.

Sedangkan dari adanya perubahan iklim dapat menimbulkan ketidak seimbangan alam yang dapat menjadikan terjadinya beberapa bencana yang melanda seperti : longsor yang di akibatkan intensitas hujan tinggi dan angin puting beliung, serta banjir.

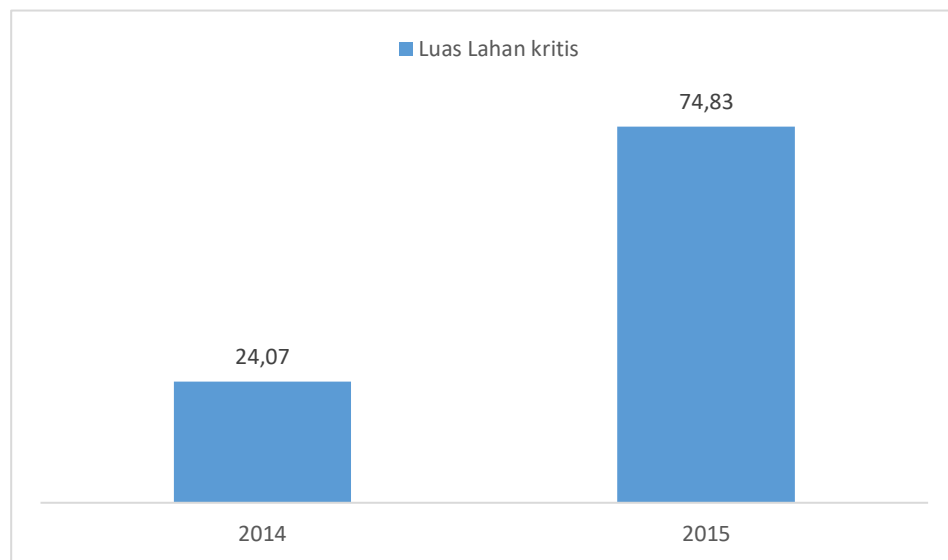
2.10.14 TPB 14: Ekosistem Lautan

Ekosistem Lautan adalah ekosistem perairan dalam, ekosistem pasir dangkal dan ekosistem pasang surut. Dalam melakukan analisis ketercapaian untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan untuk ekosistem lautan diperlukan analisis aspek yang menjadi kondisi sebagai potensi ataupun adanya permasalahan yang dapat menghambat tercapainya tujuan pembangunan. Potensi ekosistem laut di Kabupaten Karawang luas daerah budidaya dan tangkapan, persentase luas 68,80% untuk daerah budidaya.

2.10.15 TPB 15: Ekosistem Daratan

Ekosistem darat ini meliputi wilayah yang sangat luas dan seringkali disebut sebagai bioma. Ekosistem darat atau bioma ini sangat dipengaruhi oleh hal tertentu, yaitu iklim. Sementara iklim sangat dipengaruhi oleh beberapa hal, yakni letak geografis (meliputi ketinggian tempat suatu tempat terhadap permukaan air laut), dan juga letak astronomis (yang meliputi garis lintang ataupun garis bujur). Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan berdasarkan hasil analisis target yang belum tercapai yaitu menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, bebas dari lahan terdegradasi.

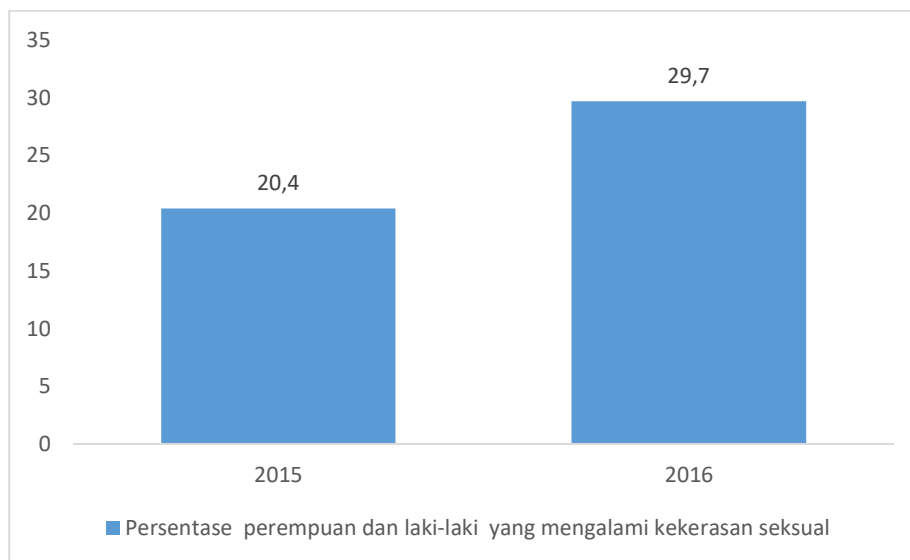
Adapun analisis yang telah dilakukan terdapat beberapa kondisi mengenai ekosistem darat di Kabupaten Karawang terutama lahan kritis, dan lahan tutupan hutan. Jika dilihat dari luasan total hutan Kabupaten Karawang mempunyai luas total hutan seluas 23.716 Ha, terdiri dari hutan lindung, hutan produksi, dan hutan produksi terbatas. Adapun lahan kritis di Kabupaten Karawang seluas 14.070 Ha, proporsi lahan kritis di Kabupaten Karawang dapat dilihat pada gambar 2.33:



Gambar 2.33 Proporsi Lahan Kritis di Kabupaten Karawang Tahun 2014-2015

2.10.16 TPB 16: Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Analisis kondisi-kondisi yang memungkinkan menghambat tujuan pembangunan berkelanjutan terhadap ketercapaian perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh. Gambaran kondisi yang dapat menunjukkan hal tersebut adalah proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.



Gambar 2.34 Persentase Perempuan dan laki-laki yang Mengalami Kekerasasn Seksual di Kabupaten Karawang Tahun 2015-2016

2.10.17 TPB 17: Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

Tujuan pembangunan berkelanjutan, mengenai kemitraan untuk mencapai tujuan adalah kerjasama antara usaha. Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin tinggi rasio maka akan semakin baik dikarenakan semakin rendah tingkat ketergantungan daerah terhadap pendapatan yang bersumber dari pemerintah pusat. Rasio kemandirian Kabupaten Karawang tahun 2011-2013 mengalami penurunan kemudian sampai tahun 2014 mengalami peningkatan. Berdasarkan data tahun 2011-2015 nilai rata-rata fiskal Kabupaten Karawang sebesar 25,91% atau masih relatif rendah.

2.11. Keterkaitan Antara TPB dalam Bidang RPJMD

Pada keterkaitan antara TPB dalam bidang RPJMD akan dibahas terkait dengan antara Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, diantaranya akan saling berkaitan, saling melengkapi baik berupa sebab, akibat ataupun kerjasama dalam upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pembangunan yang dilakukan, tentunya memiliki upaya dan tidak hanya berlangsung secara tunggal. Pembangunan wilayah di Kabupaten Karawang tentunya akan saling terkait dan mempengaruhi, untuk mencapai satu tujuan

Berikut adalah proses yang telah dilakukan sebelumnya dalam hal melakukan pengelompokan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam setiap bidang. Perumusan dilakukan dengan cara melihat kesesuaian indikator dalam setiap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terhadap indikator pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang sesuai dengan klasifikasi bidang di dalam RPJMD Kabupaten Karawang 2018-2021 berikut klasifikasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam bidang-bidang urusan pembangunan di Kabupaten Karawang.

Tabel 2.245
Klasifikasi TPB dalam Bidang Pembangunan
Kabupaten Karawang

Bidang	Tujuan
Lingkungan Hidup Air Bersih	Tujuan 6 Air bersih dan sanitasi layak
Perempuan, Kesenjangan gender	Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan
Sampah, Lingkungan	Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
	Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan
Kesehatan, sosial	Tujuan 3 Kehidupan sehat dan sejahtera
Pendidikan	Tujuan 4 Pendidikan yang berkualitas
	Tujuan 8 Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
Pertanian	Tujuan 1 Tanpa Kelaparan
	Tujuan 15 Ekosistem daratan
Kereta api	Tujuan 9 industri inovasi dan infrastruktur
Perindustrian	Tujuan 9 industri inovasi dan infrastruktur
	Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
Keuangan	Tujuan 16 Kemitraan untuk mencapai tujuan
Energi dan Sumber daya mineral	Tujuan 7 Energi bersih dan terjangkau

Sumber : Hasil Pengolahan Analisis, 2019

2.12. Isu Pembangunan Berkelanjutan

Identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan pengolahan data berdasarkan indikator-indikator dari setiap tujuan pembangunan. Selanjutnya, indikator-indikator akan diolah sesuai dengan data yang ada dan menghitung gap setiap

TPB di Kabupaten Karawang yang diperoleh untuk dimasukkan kedalam pengkategorian yaitu:

- Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SS)
- Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB)
- Indikator TPB yang tidak ada/belum ada data (NA)

Selanjutnya, setelah analisis pengkategorian indikator setiap tujuan pembangunan berkelanjutan akan memperoleh nilai persentase dari perhitungan gap dan akan terlihat yang memenuhi target dengan yang belum memenuhi target yang sudah ditentukan. Tujuan pembangunan berkelanjutan akan melakukan sintesis atau pengolahan kembali untuk menemukan isu prioritas, yaitu dengan cara melihat persentase dari indikator yang belum tercapai dari persentase semua indikator yang terdapat dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan proses analisis diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 2.246
Persentase Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang Belum Tercapai

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Indikator yang Tercapai (SS)	Indikator yang belum tercapai (SB)	Jumlah Indikator	Persentase yang belum tercapai
1. Tanpa kemiskinan	2	4	10	40,00
2. Tanpa kelaparan	2	2	5	40,00
3. Kehidupan sehat dan sejahtera	2	3	8	37,50
4. Pendidikan berkualitas	3	6	9	66,67
5. Kesetaraan gender	1	0	2	0,00
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak	0	3	9	33,33
7. Energi Bersih dan Terjangkau	1	0	4	0,00
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	5	2	8	25,00
9. Industri, Inovasi, dan	1	1	7	14,29

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Indikator yang Tercapai (SS)	Indikator yang belum tercapai (SB)	Jumlah Indikator	Persentase yang belum tercapai
Infrastruktur				
10. Berkurangnya Kesenjangan	0	2	5	40,00
11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	0	2	6	33,33
12. Kosumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	0	1	6	16,67
13. Penanganan Perubahan Iklim	1	0	4	0,00
14. Ekosistem Lautan	1	0	2	0,00
15. Ekosistem Daratan	1	2	10	20,00
16. Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	1	2	7	28,57
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	1	0	2	0,00

Sumber: Hasil Analisis, 2019

Berdasarkan tabel 2.246 isu prioritas yang menjadi hasil dari analisis dan memiliki persentase belum tercapai yang paling besar akan diolah kembali dalam proses pengrangkingan setiap indikator dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Adapun untuk memperoleh isu strategis yang diprioritaskan penanganannya dilakukan hasil perangkingan dari beberapa indikator yang menjadi permasalahan prioritas. Berdasarkan serangkaian proses analisis dengan demikian didapat isu pembangunan berkelanjutan yang menjadi prioritas di Kabupaten Karawang hingga isu yang tidak prioritas, setelah dilakukan pengrankingan/prioritas TPB maka isu strategis didapat sebagai berikut:

Tabel 2.247
Ranking/Isu Prioritas TPB di Kabupaten Karawang Tahun 2019

No Ranking	No TPB	Ranking/Prioritas TPB di Kabupaten Karawang	Persentase Tidak Tercapai
1	4	Pendidikan berkualitas	66,67
2	10	Berkurangnya Kesenjangan (mengurangi kesenjangan antar kecamatan atau suatu daerah)	40,00
3	1	Tanpa kemiskinan	40,00
4	3	Kehidupan sehat dan sejahtera	37,50
5	6	Air Bersih dan Sanitasi Layak (menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.)	33,33

No Ranking	No TPB	Ranking/Prioritas TPB di Kabupaten Karawang	Persentase Tidak Tercapai
6	11	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan (mencakup hunian layak dan persampahan)	33,33
7	16	Perdamaian keadilan dan kelembagaan yang tangguh	28,57
8	8	Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi	25,00
9	15	Ekosiste Daratan	20,00
10	2	Tanpa kelaparan (menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan)	20,00
11	12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	16,67
12	9	Industri, Inovasi, dan Infrastruktur (mencakup pencemaran udara emisi CO2 , perubahan emisi gas rumah kaca GRK)	14,29
13	5	Kesetaraan gender	0,00
14	7	Energi Bersih dan Terjangkau (menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua)	0,00
15	14	Ekosistem Lautan (melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.	0,00
16	13	Penanganan Perubahan Iklim (mencakup pengambilan tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya)	0,00
17	17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	0,00

Sumber: Hasil Analisis, 2019

Dari hasil analisis pengelompokkan isu strategis serta hasil pengrangkingan yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Karawang, yang memerlukan penanganan dan perhatian khusus adalah Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas mencakup 9 indikator, Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan (mengurangi kesenjangan antar kecamatan atau suatu daerah) sebanyak 5 indikator, Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan sebanyak 10 indikator, Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera mencakup 8 indikator, Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi sebanyak 9 indikator. Dengan adanya Tujuan pembangunan berkelanjutan prioritas, maka akan diketahui cara penanganannya dan mendapatkan perhatian khusus. Berdasarkan, hasil analisis yang telah dilakukan dan menghasilkan isu prioritas, maka isu strategis serta pengaruh terhadap capaian TPB di

Kabupaten Karawang dapat mendorong dan mendukung pencapaian TPB di Kabupaten Karawang.

2.13. Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Karawang

**Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Karawang**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015**)		
1)	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1.1.	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1.1.1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1.1.1	PDRB dengan migas							
	Harga Berlaku (juta Rp)	113.180.813,2	124.276.539,3	140.816.053,3	155.068.137,9	167.052.706,7		
	Harga Konstan (juta Rp)	106.174.675,8	111.424.083,5	119.484.231,0	125.415.445,9	131.207.042,8		
1.1.1.2	Laju inflasi	6,60%	4,63%	5,67%	4,91%	2,97%		
1.1.1.3	PDRB per kapita (ADHB)	52.102.097,48	56.504.900,57	63.277.221,63	68.915.496,89	73.475.655,2		
1.1.1.4	PDRB per kapita (ADHK)	48.876.864,8	50.661.265,58	53.691.535,8	55.737.225,53	57.709.471,63		
1.1.1.5	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB ADHB berdasarkan Lapangan usaha							
	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,44	4,22	4,38	4,16	4,05		
	Pertambangan dan Penggalian	4,92	3,95	3,36	2,96	2,56		
	Industri Pengolahan	69,18	70,20	70,75	70,99	71,82		
	Pengadaan Listrik dan Gas	0,90	0,99	0,97	1,09	1,07		
	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05		
	Konstruksi	3,13	3,29	3,21	3,57	3,81		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015**)		
	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,34	10,16	10,28	10,02	9,59		
	Transportasi dan Pergudangan	1,60	1,60	1,49	1,54	1,64		
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,85	0,86	0,83	0,83	0,80		
	Informasi dan Komunikasi	0,78	0,76	0,73	0,78	0,74		
	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,99	0,97	1,02	1,04	1,00		
	Real Estate	0,23	0,22	0,21	0,20	0,20		
	Jasa Perusahaan	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03		
	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,07	1,11	1,04	1,06	1,01		
	Jasa Pendidikan	0,54	0,62	0,69	0,74	0,72		
	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,26	0,25	0,23	0,24	0,23		
	Jasa lainnya	0,70	0,72	0,73	0,70	0,67		
1.1.1.6	Peranan PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha	113.180.813,2 (100%)	124.276.539,3 (100,00%)	140.816.053,3 (100,00%)	155.068.137,9 (100,00%)	167.052.706,7 (100,00%)		
	Primer (Pertanian dan Pertambangan)	10.594.579,1 (9,36%)	10.145.883,2 (8,16%)	10.907.477,2 (7,75%)	11.028.418,3 (7,11%)	11.055.714,7 (6,62%)		
	Sekunder (Industri, Listrik, Air dan Bangunan)	82.924.172,4 (73,27%)	92.622.864,8 (74,53%)	105.591.909,1 (74,99%)	117.397.909,2 (75,71%)	128.210.984,6 (76,75%)		
	Tersier (Perdagangan, Angkutan dan Komunikasi dan Jasa)	19.662.061,7 (17,37%)	21.507.791,2 (17,31%)	24.316.666,9 (17,27%)	26.641.810,4 (17,17%)	27.786.007,4 (16,63%)		
1.1.1.7	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp)	113.180.813,2	124.276.539,3	140.816.053,3	155.068.137,9	167.052.706,7		
1.1.1.8	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rp)	106.174.675,8	111.424.083,5	119.484.231,0	125.415.445,9	131.207.042,8		
1.1.1.9	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (Rp)	52.102.097,48	56.504.900,57	63.277.221,63	68.915.496,89	73.475.655,2		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015**)		
1.1.1.10	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan (Rp)	48.876.864,8	50.661.265,58	53.691.535,8	55.737.225,53	57.709.471,63		
1.1.1.11	LPE Migas (%)	6,56%	4,94%	7,23%	4,96%	4,62%		
1.1.1.12	LPE tanpa Migas (%)	7,28	5,96	7,36	5,05	5,01		
1.1.1.13	LPE Menurut Lapangan Usaha							
	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,66	-4,22	4,07	0,41	1,74		
	Pertambangan dan Penggalian	-8,14	-19,46	3,17	2,03	1,23		
	Industri Pengolahan	8,51	6,79	7,59	4,55	4,41		
	Pengadaan Listrik dan Gas	-2,66	5,09	3,90	6,04	4,75		
	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,16	6,00	10,45	3,54	7,74		
	Konstruksi	5,35	10,38	6,03	14,58	6,33		
	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,24	2,85	8,45	4,33	4,06		
	Transportasi dan Pergudangan	2,06	7,23	2,63	8,39	10,19		
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,18	7,91	8,09	6,38	6,99		
	Informasi dan Komunikasi	10,56	3,56	9,38	18,06	17,27		
	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,87	3,88	10,79	9,17	6,14		
	Real Estate	11,07	5,94	8,44	3,90	5,94		
	Jasa Perusahaan	2,93	7,41	5,13	4,33	7,78		
	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-1,59	3,92	-1,13	2,51	4,77		
	Jasa Pendidikan	11,03	15,71	14,83	17,63	9,96		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015**)		
	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,71	2,99	2,88	8,65	13,50		
	Jasa lainnya	9,17	10,15	7,49	6,07	7,98		
1.2.	Kesejahteraan Sosial							
1.2.1	Pendidikan							
1.2.1.1	Angka melek huruf	93,22	93,25	93,27	93,49			
1.2.1.2	Angka rata-rata lama sekolah (MYS)	6,23	6,52	6,73	6,78	7,09		
1.2.1.3	Angka Harapan Lama Sekolah (EYS)	10,92	11,08	11,31	11,64	11,67		
1.3.	Dst							
1.3.1	Dst....							
2)	PELAYANAN UMUM							
2.1	Pelayanan Urusan Wajib							
2.1.1	Pendidikan							
2.1.1.1	Pendidikan dasar							
2.1.1.1.1	Angka partisipasi sekolah							
2.1.1.1.2	APK SD/Sederajat	108,89	108,8	107,34	107,73	107,24*		
2.1.1.1.3	APM SD/Sederajat	96,86	96,8	95,84	97,06	96,02*		
2.1.1.1.4	APK SLTP/Sederajat	90,62	94,96	95,61	98,80	96,72*		
2.1.1.1.5	APM SLTP/Sederajat	66,09	65,98	65,79	73,80	69,81*		
2.1.1.1.6	Rasio Murid terhadap Ruang Kelas							
	SD/MI	38 : 1	40:1	39 : 1	37 :1	37:1		
	SMP/MTs	49 : 1	49:1	47 : 1	44 : 1	40:1		
2.1.1.1.7	Rasio Murid terhadap sekolah							
	SD/MI	259 : 1	260:1	259 : 1	255 : 1	245:1		
	SMP/MTs	525 : 1	527:1	560 : 1	565 : 1	567:1		
2.1.1.1.8	Perkembangan Jumlah Guru							
	SD/MI	10.234	10.795	10.579	10.989	11.242		
	SMP/MTs	4.835	4.522	4.737	5.012	4.966		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015**)		
2.1.1.1.9	Rasio Murid terhadap Guru							
	SD/MI	27 : 1	25:1	26 : 1	24 :1	23 : 1		
	SMP/MTs	25 : 1	26:1	24 : 1	24 :1	24 : 1		
2.1.1.1.10	Rasio Guru terhadap Sekolah							
2.1.1.1.11	SD/MI	10 : 1	11:1	11 : 1	10 :1	11 : 1		
2.1.1.1.12	SMP/MTs	21 : 1	21:1	22 : 1	24 :1	24 : 1		
2.1.1.2	Pendidikan menengah	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.2.1	Angka partisipasi sekolah	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.2.2	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.3	Dst.....							
2.1.2	Kesehatan							
2.1.2.1	Jumlah Posyandu Purnama	569	698	721	721	656		
2.1.2.2	Jumlah Posyandu Mandiri	85	114	84	77	136		
2.1.2.3	Jumlah puskesmas	48	50	50	50	50		
2.1.2.4	Jumlah Balai Pengobatan Umum (Klinik Pratama)	222	181	449	291	261		
2.1.2.5	Jumlah pustu	-	69	69	70	71		
2.1.2.6	Kasus Kematian Bayi	-	225	187	170	189		
2.1.2.7	Kasus Kematian Ibu	-	55	64	59	68		
2.1.2.8	Persentase Ibu hamil resiko tinggi yang tertangani (%)	-	83,13	82,45	44,15	47,91		
2.1.2.9	Persentase komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	-	76,85	75,56	70,33	80,02		
2.1.2.10	Angka Harapan Hidup	71,38	71,41	71,44	71,45	71,50		
2.1.2.11	Dokter Umum	608	728	889	106	113		
2.1.2.12	Dokter Spesialis	156	158	160	0	0		
2.1.2.13	Dokter Gigi	81	87	108	46	47		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015**)		
2.1.2.14	Perawat	1.600	1.900	1.600	265	281		
2.1.2.15	Sanitasi	42	46	46	25	32		
2.1.2.16	Perawat Gigi	35	93	81	23	24		
2.1.2.17	Bidan	813	815	1.086	694	725		
2.1.2.18	Farmasi	37	62	265	28	29		
2.1.2.19	Balita yang ditimbang berat badannya	-	154.200	145.783	147.492	153.056		
2.1.2.20	Bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI eksklusif	-	8.634	16.480	18.172	20.269		
2.1.2.21	Anak usia 6-59 bulan menadapatkan kapsul	-	187.247	136.091	178.725	182.414		
2.1.2.22	Kasus Gondok (GAKY) yang ditangani	-	-	-	-	-		
2.1.2.23	Jumlah Puskesmas melaksanakan surveilans gizi	-	50	50	50	50		
2.1.2.24	Kecamatan yang memiliki data status gizi balita	-	30	30	30	30		
2.1.2.25	Jumlah Balita gizi buruk mendapatkan perawatan	-	669	415	395	281		
2.1.2.26	Jumlah Balita gizi kurang yang ditangani	-	15.274	7.908	7.496	7.477		
2.1.2.27	Status Gizi buruk (Sangat kurang)	0.80	0.91	0,51	0,41	0,39		
2.1.2.28	Status Gizi kurang	6.29	8.51	4,19	3,9	3,79		
2.1.2.29	Status Gizi baik	90.30	88.25	93,44	93,4	94,18		
2.1.2.30	Status Gizi lebih	1.24	2.6	1,83	2,31	1,64		
2.1.3	Dst...							
2.1.3.1	Dst....							
2.2	Pelayanan Urusan Pilihan							
2.2.1	Pertanian							
2.2.1.1	Jenis komoditas dan Produktivitas							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015**)		
	(Kw/Ha)							
	Padi Sawah	74,08	74,37	75,61	76,05	79,5		
	Kedelai	16,32	13,30	16,60	14,36	12,96		
	Kacang Hijau	11,28	10,80	11,05	11,42	16,22		
	Jagung Pipilan Kering	56,61	58,98	59,00	58,00	58,68		
	Ketela Pohon	195	195	195	195	145,04		
	Ubi Jalar	160	160	150	150	78,67		
2.2.1.2	Pendapatan Petani (Rp/ha/musim)	14.349.700	15.227.700	17.817.130	18.532.000	27.275.000		
2.2.1.3	Kontribusi Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada PDRB ADHB	4,44	4,22	4,38	4,16	4,05		
2.2.2	Kehutanan	-	-	-	-	-		
2.2.2.1	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	-	-	-	-	-		
2.2.2.2	Kerusakan Kawasan Hutan	-	-	-	-	-		
2.2.2.3	Dst....							
2.2.3	Dst....							
2.2.3.1	Dst.....							
3)	DAYA SAING DAERAH							
3.1	Kemampuan Ekonomi							
3.1.1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
3.1.1.1	Jumlah Konsumsi Per kapita (kg/kap/th)							
	Daging	10,00	10,10	9,09	9,00	8,69		
	Telur	9,00	9,25	9,00	9,00	8,75		
	Susu	0,28	0,29	0,25	0,20	0,19		
3.1.1.2	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	-	-	-	-	-		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015**)		
3.1.1.3	Perkenbangan dan Nilai Pendapatan per Kapita							
	Pendapatan per kapita ADHB	52.102.097,48	56.504.900,57	63.277.221,63	68.915.496,89	73.475.655,23		
	Pendapatan per kapita ADHK	48.876.864,80	50.661.265,58	53.691.535,80	55.737.225,53	57.709.471,63		
3.1.1.4	Produktivitas total daerah	-	-	-	-	-		
3.1.1.5	Dst	-	-	-				
3.1.2	Pertanian							
3.1.2.1	Nilai tukar petani							
	Indeks Yang Diterima Petani (lt)	-	-	-	103,68	117,73		
	Indeks Yang Dibayar Petani (lb)	-	-	-	101,43	110,93		
	Rasio	-	-	-	102,22	106,13		
3.2	Fasilitas Wilayah/Infrastruktur							
3.2.1	Perhubungan							
3.2.1.1	Pengujian Kendaraan Bermotor	21.941 unit	24.535 unit	27.930 unit	29.762 unit	29.246 Unit		
3.2.1.2	Pemeriksaan Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor							
3.2.1.3	Kendaraan Bermotor Wajib Uji (Mobil Barang/Bis/Kendaraan Tempelan/Gandengan dan Kendaraan Khusus	-	-	-	23.112 unit	29.161 Unit		
3.2.1.4	Non Kendaraan Wajib Uji Mobil Penumpang/Sepedamotor	-	-	-	1.805 unit	158 unit		
3.2.2	Penataan Ruang	-	-	-	-	-		
3.2.2.1	Ketaatan terhadap RTRW	-	-	-	-	-		
3.2.2.2	Luas wilayah produktif	-	-	-	-	-		

BAB III
GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH

3.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU

APBD merupakan instrumen paling utama dalam kebijakan fiskal daerah sebagaimana kewenangan yang diserahkan sesuai undang-undang otonomi daerah. APBD dikatakan sebagai instrumen kebijakan utama pemerintah daerah karena APBD adalah intisari dari apa yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam satu tahun ke depan sebagai rangkaian tak terpisahkan dari kebijakan masa lalu dan tujuan yang akan dicapai pada masa yang akan datang.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

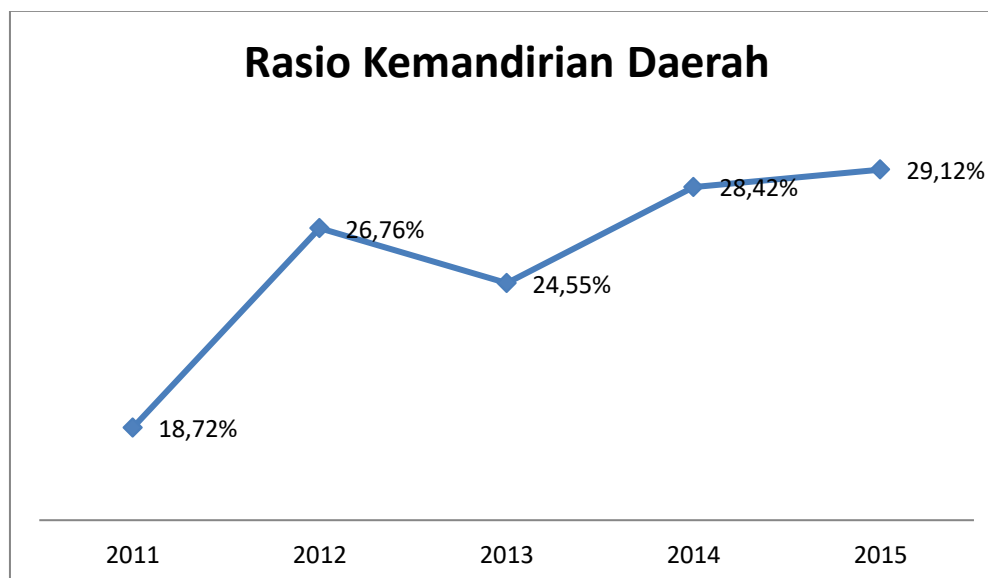
Tabel 3.1
Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tahun 2011 s/d Tahun 2015
Kabupaten Karawang (Rupiah)

No.	Uraian	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015**) (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	PENDAPATAN	2.022.376.611.223,00	2.461.055.535.050	2.691.829.177.177	3.198.281.323.336,00	3.628.504.872.151,00	15,83
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	378.630,05	658.597.372.181	660.841.119.615	909.147.525.752,00	1.056.322.140.475,00	32,01
1.1.1.	Pajak daerah	240.875.370.850,00	477.595.086.584	466.028.015.475	554.228.363.507,00	710.902.495.025,00	35,76
1.1.2.	Retribusi daerah	34.387.072.414,00	35.256.065.679	59.406.479.316	129.306.846.320,00	77.633.051.175,00	37,18
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	4.321.681.153,00	6.376.152.271	8.127.522.922	7.316.691.914,00	4.176.682.124,00	5,53
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	99.045.927.401,00	139.370.067.647	127.279.101.902	218.295.624.011,00	263.609.912.151,00	31,08
1.2.	Dana Perimbangan	1.201.893.814.738,00	1.413.869.849.941	1.528.879.268.723	1.580.220.357.071,00	1.623.936.961.915,00	7,97
1.2.1.	Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak	305.575.671.738,00	332.856.838.941	288.808.848.723	267.117.867.071,00	245.075.218.915,00	-5,02
1.2.2.	Dana alokasi umum	814.562.743.000,00	1.004.178.461.000	1.134.530.200.000	1.188.478.470.000,00	1.246.484.473.000,00	11,47
1.2.3.	Dana alokasi khusus	81.755.400.000,00	76.834.550.000	105.540.220.000	124.624.020.000,00	132.377.277.000,00	13,91
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	441.852.744.667,00	388.588.312.928	502.108.788.839	708.913.440.513,00	948.245.769.761,00	23,03
1.3.1	Hibah	6.000.000.000,00	1.129.337.000	1.737.111.000	6.378.469.599,00	9.560.382.000,00	72,43
1.3.2	Dana darurat					0,00	0,00
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya **)	131.269.421.165,00	147.494.101.489	211.112.199.734	293.321.154.086,00	334.848.811.776,00	27,15
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus***)	261.615.332.400,00	164.132.014.000	247.349.527.000	364.789.871.000,00	480.323.533.000,0	23,15
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	42.511.823.540,00	74.262.735.830	40.607.188.000	43.072.337.300,00	123.296.254.035,00	55,42
2	Belanja	1,864,227,49	2,416,221,18	2,762,122,44	3,151,280,49	3,614,140,81	18,18
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.146.710.335.658	1.157.954.991.916	1.330.995.377.452	1.580.485.973.438,00	1.735.409.637.147,00	11,12
2.1.1	Belanja Pegawai	827.140.350.649,00	962.293.081.316	1.081.059.712.806	1.260.757.734.138,00	1.331.256.663.590,00	12,72
2.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Uraian	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015**) (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
2.1.3	Belanja Subsidi	28.742.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	72.983.649.609,00	89.547.007.000	113.142.401.850	130.914.160.300,00	148.021.196.200,00.	19,45
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	99.359.403.000,00	9.889.584.550	17.430.531.000	52.224.000.000,00	20.159.550.000,00	31,10
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	31.979.662.400,00	33.480.254.050	42.957.272.794	45.165.375.000,00	0,00	-15,47
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	86.504.420.000,00	62.745.065.000	75.867.911.002	91.424.704.000,00	235.972.227.357,00	43,01
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	537.548.000	0,00	0,00	0,00
2.2	Belanja Langsung	717.921.081.438,00	1.258.266.184.262	1.430.960.352.546	1.570.823.976.325,77	1.878.750.984.020,97	29,59
2.2.1	Belanja Pegawai	166.298.493.045,00	200.137.074.570	238.761.474.173,68	241.000.382.968,77	187.186.814.460,00,00	4,56
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	353.694.685.163,00	412.360.875.555	620.951.837.206,32	736.972.196.228,00	1.060.513.017.910,97	32,44
2.2.3	Belanja Modal	197.927.903.230,00	645.768.234.137	571.264.424.618,00	592.851.397.329,00	631.051.151.650,00	56,24
3	Pembiayaan	297.169.922.647,00	455.335.061.274	495.170.270.146	418.908.508.877	453.891.215.641,23	13,73
3.1	Penerimaan Pembiayaan	307.670.275.913,00	455.335.061.274	850.000	424.908.508.877	465.890.847.641,23	14,12
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	10.500.331.266,00	0,00	5.000.000.000,	6.000.000.000	12.000.000.000,00	5,00

Berdasarkan data realisasi APBD, pendapatan tahun 2015 sebesar Rp. 3,6 Trilyun atau selama 5 tahun secara rata-rata tumbuh sebesar 12,40 persen dibandingkan tahun 2011 sebesar Rp. 2 Triliyun. Pertumbuhan pendapatan diperoleh dari PAD dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 22,78 persen, Dana Perimbangan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,20 persen, Lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 16,50 persen. Sedangkan secara proporsi, dana perimbangan merupakan penyumbang pendapatan terbesar dengan rata-rata sebesar 72,67 persen, Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 29,57 persen, sedangkan PAD rata-rata menyumbang 25,51 persen.

Gambar. 3.1
Rasio Kemandirian Daerah



Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah ini menunjukkan tingkat kemandirian daerah. Semakin tinggi rasio ini semakin baik karena semakin rendah tingkat ketergantungan daerah terhadap pendapatan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat. Rasio kemandirian Kabupaten Karawang tahun 2011-2015 mengalami penurunan pada tahun 2013 kemudian sampai tahun 2015 terus meningkat.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan azas desentralisasi, kepada daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak/retribusi (*tax assignment*) dan pemberian bagi hasil penerimaan (*revenue sharing*) serta bantuan keuangan (*grant*) atau dikenal sebagai dana perimbangan sebagai sumber dana bagi APBD. Secara umum, sumber dana bagi daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus) dan pinjaman daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Tiga sumber pertama langsung dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui APBD, sedangkan yang lainnya dikelola Pemerintah Pusat melalui kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

3.1.1.1. Kapasitas Fiskal Daerah

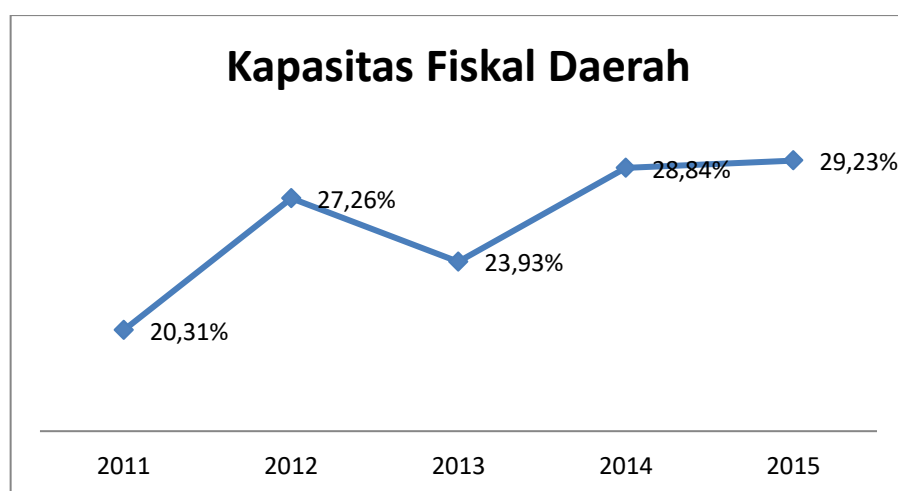
Kapasitas fiskal adalah kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan daerah yang dijalankan, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari pemerintah pusat.

Berdasarkan data tahun 2011 –2015 nilai rata-rata kapasitas fiskal Kabupaten Karawang sebesar 25,91% persen, atau masih relatif rendah. Rendahnya kapasitas fiskal terlihat dari masih rendahnya kontribusi PAD dimana nilai rata-rata *Tax effort* tahun 2015 (yang diukur berdasarkan rasio antara penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PDRB non migas) dapat dinilai kemampuan membayar pajak masyarakat karawang relatif masih kecil (kurang dari 1 persen). Namun demikian dari data tersebut tampak kecenderungan rasio kemampuan fiskal Kabupaten Karawang yang terus naik, artinya kapasitas fiskal Kabupaten Karawang semakin meningkat.

Tabel 3.2
Realisasi pendapatan daerah dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2011 – 2015
(Dalam Juta Rupiah)

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	378,630.05	658,597.37	660,841.12	908,771.81	1,056,535.78
2	BELANJA DAERAH	1,864,227.49	2,416,221.18	2,762,122.44	3,151,280.49	3,614,140.81
Kapasitas fiskal Daerah		20.31%	27.26%	23.93%	28.84%	29.23%

Gambar. 3.2
Kapasitas Fiskal

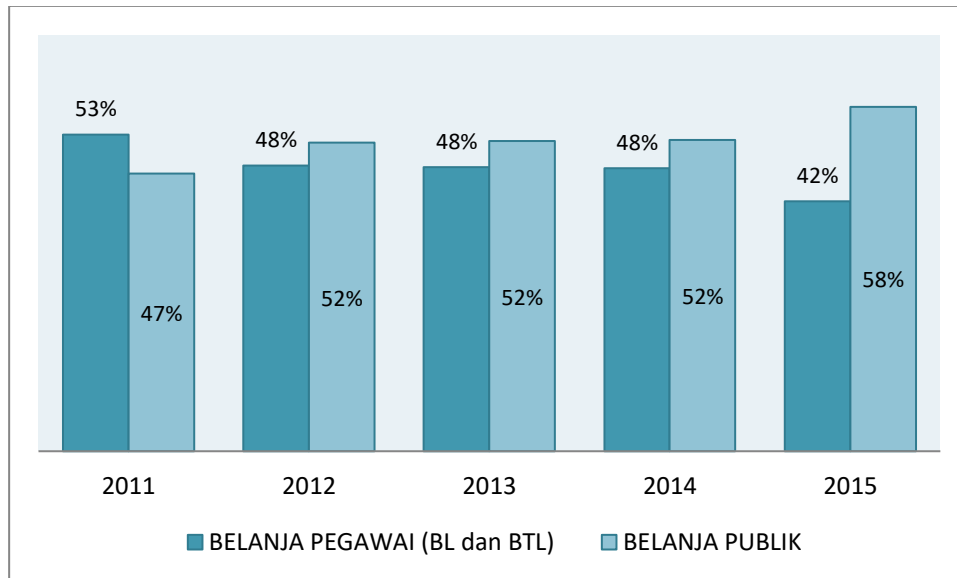


3.1.1.2. Rasio Aktifitas

Tabel 3.3
Realisasi Belanja Publik dan Belanja Aparatur Tahun 2011 – 2015
(Dalam Juta Rupiah)

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
	BELANJA DAERAH	1,864,227.49	2,416,221.18	2,762,122.44	3,151,280.49	3,614,140.81
A	BELANJA PEGAWAI (BL dan BTL)	993,438.84	1,162,430.16	1,319,821.19	1,501,728.65	1,518,446.01
B	BELANJA PUBLIK	870,788.65	1,253,791.02	1,442,301.25	1,649,551.83	2,095,694.79

Gambar. 3.3
Rasio Aktifitas



Rasio aktifitas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja aparatur dan belanja publik secara optimal. Semakin rendah rasio belanja aparatur, semakin baik sehingga ruang gerak belanja daerah untuk pelayanan masyarakat akan semakin tinggi. Dalam tahun 2011-2015 tren belanja pegawai Kabupaten Karawang memperlihatkan penurunan.

Berdasarkan data realisasi belanja daerah tahun 2015 sebesar Rp.3,6 Trilyun. Untuk alokasi belanja publik mencapai 58 persen, sedangkan belanja aparatur mencapai 42 persen. Besaran belanja gaji dan tunjangan pegawai dimaksud sebagian besar terserap untuk gaji dan tunjangan tenaga pendidik dan kependidikan sebesar Rp. 998,22 Milyar atau sekitar 60 persen, sedangkan belanja gaji dan tunjangan aparatur pelayanan kesehatan sebesar Rp. 102,34 Milyar atau sekitar 10 persen. Belanja transfer kepada pemerintah desa juga mengalami trend peningkatan baik proporsi maupun pertumbuhan yang diarahkan untuk penguatan kemampuan keuangan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Untuk tahun 2015 belanja transfer kepada pemerintah desa diberikan dalam bentuk kegiatan fisik yang dianggarkan di Dinas Cipta Karya dan Dinas Bina Marga. Adapun untuk belanja langsung dialokasikan untuk melaksanakan 6 urusan konkuren pelayanan dasar, 19 urusan konkuren non pelayanan dasar dan 8 urusan pilihan.

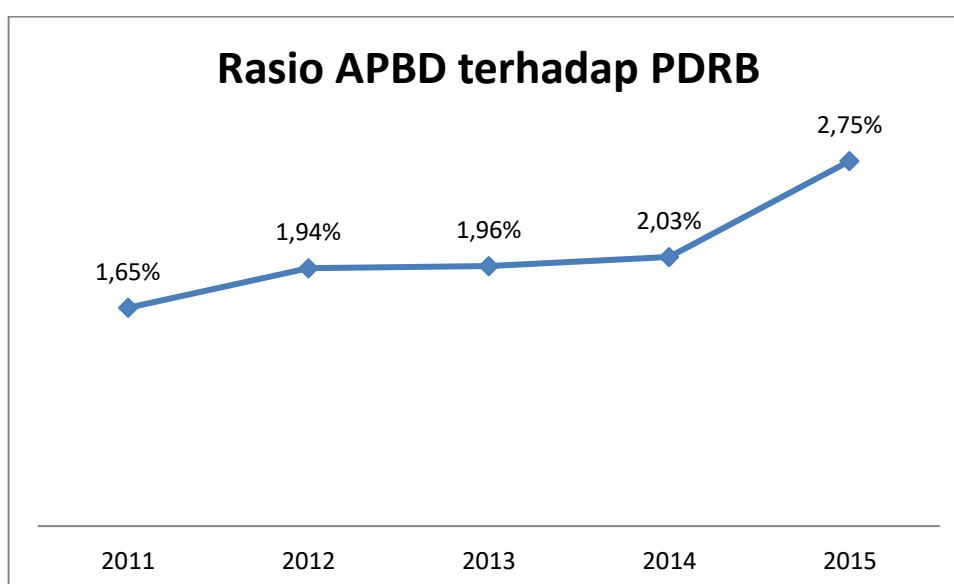
3.1.1.3. Rasio Pertumbuhan

APBD Tahun 2015 telah mencapai angka Rp 3,6 Triliun atau selama periode 2011 – 2015 rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 14,16 persen dari angka tahun 2011 sebesar Rp. 1,86 Trilyun. Rasio APBD terhadap PDRB pada periode 2011-2015 memperlihatkan kecenderungan yang semakin meningkat, hal ini memperlihatkan bahwa kemampuan belanja pemerintah (*Government expenditure*) semakin meningkat dalam pembentukan PDRB. Adapun fungsi APBD lebih bersifat stimulus terhadap berjalannya kinerja perekonomian makro daerah.

Tabel 3.4
Perkembangan dan Pertumbuhan APBD, Rasio APBD terhadap PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011 – 2015

Tahun	APBD	Pertumbuhan	PDRB	Rasio APBD terhadap PDRB
2011	1.864.227,49		113.180.813,20	1,65%
2012	2.416.221,18	29,61%	124.276.539,30	1,94%
2013	2.762.122,44	14,32%	140.816.053,30	1,96%
2014	3.151.280,49	14,09%	155.068.137,90	2,03%
2015	3.614.140,81	14,69%	167.052.706,70	2,16%
Rata-Rata Pertumbuhan		14,16%		

Gambar. 3.4
Rasio APBD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi



3.1.2 Neraca Daerah

Berdasarkan data *time series* dengan menggunakan rumus eksponensial diperoleh rata-rata pertumbuhan PAD per tahun sebesar 22.78 persen sehingga diproyeksi pada akhir tahun 2020 realisasi PAD mencapai angka Rp. 2,95 Trilyun. Performa APBD Kabupaten Karawang yang surplus pada tahun 2011, 2012, 2014 dan 2015 serta defisit pada tahun 2013 diperlihatkan pada Tabel 3.5. Pertumbuhan pendapatan sebesar 12.40 persen, sedangkan pertumbuhan belanja mencapai 14,16 persen, yang memunculkan defisit APBD dalam trend cenderung semakin besar. Walaupun defisit dimaksud masih dapat ditutupi dengan penerimaan pembiayaan yang sebagian besar dikontribusi melalui penerimaan SilPa tahun sebelumnya, namun hal tersebut memperlihatkan pula lemahnya kinerja perencanaan sehingga berdampak pada kinerja pelaksanaan dan penyerapan anggaran. Oleh sebab itu perlu adanya reorientasi dalam penyusunan formulasi APBD yang lebih mengedepankan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah tanpa menghambat investasi, pengelolaan belanja yang efektif dan efisien berbasis pada kinerja riil serta pengembangan skema alternatif pembiayaan.

Tabel 3.5
Perkembangan Neraca Daerah Kab. Karawang, 2011- 2015

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015	Growth Rate (%)
1	ASET	3,051,376,203,979.01	3,914,542,384,460.18	4,781,862,394,846.03	6,901,408,635,551.43	4,773,238,661,930.78	9.36%
1.1	ASET LANCAR	540,896,434,586.99	541,632,625,815.77	800,394,415,389.27	2,185,226,093,396.28	938,110,917,051.16	11.64%
1.1.1	Kas	489,831,105,639.00	502,137,904,995.00	427,302,633,581.00		468,949,954,357.26	-0.87%
1.1.2	Piutang	8,365,390,085.05	11,023,204,569.01	324,703,852,977.82	324,121,565,410.80	202,256,950,301.49	89.10%
1.1.3	Piutang Lain - Lain	21,420,674,105.94	7,533,637,798.51	23,033,729,267.18	1,826,028,240,158.00	25,715,948,610.00	3.72%
1.1.4	Persediaan	21,279,264,757.00	20,937,878,453.25	25,354,199,563.27	35,076,287,827.48	240,914,872,775.41	62.47%
1.1.5	Biaya Dibayar Dimuka	-	-	-	-	273,191,007.00	
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	59,292,379,673.29	61,352,799,304.40	64,595,532,523.83	69,038,066,912.08	88,028,337,289.05	8.22%
1.2.1	Investasi Non Permanen	5,186,990,478.12	3,865,008,732.47	6,370,843,253.99	4,076,065,588.35	4,339,124,139.35	-3.51%
1.2.2	Investasi Permanen	54,105,389,195.17	57,487,790,571.93	58,224,689,269.84	64,962,001,323.73	83,689,213,149.70	9.12%
1.3	ASET TETAP	2,408,753,128,585.38	3,285,906,597,485.66	3,889,019,479,915.58	4,317,924,512,118.70	3,587,247,242,455.70	8.29%
1.3.1	Tanah	271,151,814,006.00	523,307,554,864.00	515,055,228,905.00	664,345,235,318.00	963,232,960,599.00	9.12%
1.3.2	Peralatan dan Mesin	339,384,922,826.29	482,627,040,187.49	571,102,202,030.49	545,329,696,200.15	695,243,808,144.97	15.42%
1.3.3	Gedung dan Bangunan	664,657,581,183.90	787,936,046,977.90	1,003,930,412,482.90	1,014,281,189,558.18	1,307,247,260,383.83	14.49%
1.3.4	Jalan, Jaringan dan Instalasi	1,107,526,810,241.92	1,406,082,651,882.00	1,755,375,533,303.92	2,040,254,754,241.10	2,337,389,937,107.10	16.11%
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	21,258,311,827.27	34,290,878,174.27	30,699,007,938.27	35,279,912,986.27	53,465,318,055.27	20.26%

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015	Growth Rate (%)
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	4,773,688,500.00	51,662,425,400.00	12,857,095,255.00	18,433,723,815.00	43,235,757,026.00	55.38%
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	-	-	-	-	-	
1.4	ASET LAINYA	42,434,261,133.35	25,650,361,854.35	27,852,967,017.35	329,219,963,124.37	159,852,165,134.87	30.38%
1.4.1	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	144,612,500.00	134,662,500.00	162,467,500.00	202,747,500.00	83,038,333.00	-10.50%
1.4.2	Aset Tidak Berwujud	3,392,871,088.00	4,357,098,088.00	12,463,386,539.00	13,418,025,039.00	5,825,362,686.50	11.42%
1.4.3	Aset Lain - lain	38,896,777,545.35	21,158,601,266.35	15,227,112,978.35	315,599,190,585.37	153,943,764,115.37	31.67%
2	KEWAJIBAN	96,893,556,310.51	64,421,084,003.42	38,719,671,326.82	40,069,464,780.50	45,203,304,923.92	-14.14%
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	96,359,315,910.51	63,886,843,603.42	38,719,671,326.82	40,069,464,780.50	45,203,304,923.92	-14.05%
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-	-	-	-	
2.1.2	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	77,995,545.92	77,995,545.92	77,995,545.92	77,995,545.92	77,995,545.92	0.00%
2.1.3	Utang Jangka Pendek Lainnya	96,281,320,364.59	63,808,848,057.50	38,641,675,780.90	39,991,469,234.58	45,125,309,378.00	-14.06%
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	534,240,400.00	534,240,400.00	-	-	-	100.00 %
2.2.1	Utang Dalam Negeri	534,240,400.00	534,240,400.00	-	-	-	100.00%
2.2.2	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-	-	-	
3	EKUITAS DANA	2,954,482,647,677.50	3,850,764,896,257.68	4,776,108,369,678.21	5,552,427,706,814.74	4,728,035,357,007.15	9.86%
3.1	EKUITAS DANA LANCAR	444,537,118,685.48	477,745,782,212.35	761,674,744,062.45	803,279,518,500.59		
3.1.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	455,319,061,274.00	500,169,420,146.00	424,877,008,877.00	465,890,847,641.23	-	-
3.1.2	Cadangan Untuk Piutang	29,786,064,199.99	18,556,842,367.52	347,737,582,245.00	342,381,847,812.38	-	-
3.1.3	Cadangan Untuk Persediaan	21,279,264,757.00	20,937,878,453.25	25,354,199,563.27	35,076,287,827.48	-	-
3.1.4	Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(61,925,221,619.51)	(61,948,045,554.42)	(36,353,156,112.82)	(40,069,464,780.50)	-	-
3.1.5	Pendapatan yang Ditangguhkan	77,950,074.00	29,686,800.00	59,109,490.00	-	-	-
3.1.6	Cadangan Biaya Dibayar Dimuka	-	-	-	-	-	-
3.1.7	Cadangan Kas Dipemegang Kas	-	-	-	-	-	-
3.2	EKUITAS DANA INVESTASI	2,509,945,528,992.02	3,373,019,114,045.33	4,014,433,625,615.76	4,749,148,188,314.15		
3.2.1	Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang	59,292,379,673.29	61,352,799,304.40	64,595,532,523.83	69,038,066,912.08	-	-
3.2.2	Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	2,408,753,128,585.38	3,285,906,597,486.58	3,889,019,479,915.58	4,317,924,512,118.70	-	-
3.2.3	Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya (Tidak Termasuk Dana Cadangan)	42,434,261,133.35	26,293,957,654.35	60,818,613,176.35	362,185,609,283.37	-	-
3.2.4	Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran	(534,240,400.00)	(534,240,400.00)	-	-	-	-
3.2.5	Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		3,051,376,203,988.01	3,915,185,980,261.10	4,814,828,041,005.03	5,592,497,171,595.24	4,773,238,661,931.07	9.36%

Tabel 3.6
Perkembangan Performa APBD Kabupaten Karawang
Tahun 2011- 2015

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
1.	PENDAPATAN	2.022.376.611.223,00	2.461.055.535.050,00	2.691.829.177.177,00	3.197.905.607.797	3.628.718.508.162,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	378.630.051.818,00	658.597.372.181,00	660.841.119.615,00	908.771.810.213	1.056.535.776.486,00
1.1.1	Pajak Daerah	240.875.370.850,00	477.595.086.584,00	466.028.000.475,00	554.203.022.658	710.742.585.693,00
1.1.2	Retribusi Daerah	34.387.072.414,00	35.256.065.679,00	59.406.479.316,00	129.000.286.320	77.693.791.775,00
1.1.3	HslPeng. Kekayaan daerah yg dipisahkan	4.321.681.153,00	6.376.152.271,00	8.127.522.922,00	7.316.691.914,00	4.176.682.124,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	99.045.927.401,00	139.370.067.647,00	127.279.116.902,00	218.251.809.321	263.922.716.894,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.201.893.814.738,00	1.413.869.849.941,00	1.528.879.268.723,00	1.580.220.357.071,00	1.623.936.961.915,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak	305.575.671.738,00	332.856.838.941,00	288.808.848.723,00	267.117.867.071,00	155.275.520.800,00
1.2.2	Bagi Hasil Bukan Pajak SDA	0,00	0,00	0,00	0,00	89.799.698.115,00
1.2.3	Dana Alokasi Umum (DAU)	814.562.743.000,00	1.004.178.461.000,00	1.134.530.200.000,00	1.188.478.470.000,00	1.246.484.473.000,00
1.2.4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	81.755.400.000,00	76.834.550.000,00	105.540.220.000,00	124.624.020.000,00	132.377.270.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH	441.852.744.667,00	388.588.312.928,00	502.108.788.839,00	708.913.440.513,00	948.245.769.761,00
1.3.1	Hibah	6.000.000.000,00	1.129.337.000,00	1.737.111.000,00	6.378.469.599,00	9.560.382.000,00
1.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3	Dana Bagi Hasil dari Provinsi	131.269.421.165,00	147.494.101.489,00	211.112.199.734,00	293.321.154.086,00	334.848.811.776,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	261.615.332.400,00	164.132.014.000,00	247.349.527.000,00	364.789.871.000,00	480.323.533.000,00
1.3.5	Dana bantuan Keuangan dari Provinsi	42.511.823.540,00	74.262.735.830,00	40.607.188.000,00	43.072.337.300,00	123.296.254.035,00
1.3.7	Bagi hasil Retribusi dari Provinsi	456.167.562,00	1.570.124.609,00	1.302.763.105,00	1.351.608.528,00	216.788.950,00
	BELANJA DAERAH	1.864.227.494.596,00	2.416.221.176.178,00	2.762.122.438.446,00	3.151.280.485.664	3.614.140.806.167,97
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.146.306.413.158,00	1.157.954.991.916,00	1.330.995.377.452,00	1.580.456.509.138	1.735.411.572.147,00
5.1.1	Belanja Pegawai	827.140.350.649,00	962.293.081.316,00	1.081.059.712.806,00	1.260.728.269.838	1.331.258.598.590,00
5.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.3	Belanja Subsidi	28.742.850.000,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.4	Belanja Hibah	72.983.112.109,00	89.547.007.000,00	113.105.500.000,00	130.914.160.300,00	148.021.196.200,00
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	99.006018.000,00	9.889.584.550,00	17.400.531.000,00	52.224.000.000,00	20.159.550.000,00
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kpd Pem. Desa	31.929.662.400,00	33.480.254.050,00	43.024.174.644,00	45.165.375.000,00	235.972.227.357,00
5.1.7	Belanja Ban. Keuangan Kpd Pem. Desa	86.504.420.000,00	62.745.065.000,00	75.867.911.002,00	91.424.704.000,00	0,00
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	537.548.000,00	0,00	0,00
5.2	BELANJA LANGSUNG	717.921.081.438,00	1.258.266.184.262,00	1.431.127.060.994,00	1.570.823.976.325,77	1.878.729.234.020,97
5.2.1	BELANJA PEGAWAI	166.298.493.045,00	200.137.074.570,00	238.761.474.173,68	241.000.382.968,77	187.187.414.460,00
5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	353.694.685.164,00	412.360.875.555,00	620.951.437.202,32	736.972.196.028,00	1.060.521.907.915,97
5.2.3	BELANJA MODAL	197.927.903.230,00	645.768.234.137,00	571.414.149.618,00	592.851.397.329,00	631.019.911.645,00
	SURPLUS/DEFISIT	158.149.116.627,00	44.834.358.872,00	(70.293.261.269,00)	46.625.122.133	14.577.701.994,03
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	307.670.275.913,00	455.335.061.274,00	500.170.270.146,00	424.908.508.877,00	465.890.847.641,23
3.1.1	SiLPA Sebelumnya	307.064.861.407,00	455.319.061.274,00	500.169.420.146,00	424.877.008.877,00	465.890.847.641,23
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	428.143.176,00	16.000.000,00	850.00,00	31.500.000,00	
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	177.271.330,00	0,00	0,00	0,00	
3.2	PENGELUARAN	10.500.331.266,00	0,00	5.000.000.000,00	6.000.000.000,00	12.000.000.000,00

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
	PEMBIAYAAN DAERAH					
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi)	9.189.468.953,00	0,00	5.000.000.000,00	6.000.000.000,00	12.000.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	1.310.862.313,00	0,00	0,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETO	297.169.944.647,00	455.335.061.274,00	495.170.270.146,00	418.908.508.877,00	
	SILPA	455.319.061.274,00	500.169.420.146,00	424.877.008.877,00	465.533.631.010	468.468.549.635,26

3.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MASA LALU

Dengan pertimbangan tersebut di atas, maka mengharuskan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang untuk berupaya meningkatkan PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah perlu terus diupayakan melalui proses analisa dan perencanaan yang matang tanpa menimbulkan *high cost economy* terhadap perkembangan arus investasi.

Pelaksanaan Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, secara legal formal, dituangkan dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Selain itu, terdapat juga UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur hal-hal mengenai kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan kepada masyarakat daerah guna mendapatkan sumber pendanaan bagi pembangunan daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam prakteknya, instrumen utama yang digunakan adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak (*taxing power*) dan transfer ke daerah. UU Nomor 28 Tahun 2009 yang baru saja dikeluarkan dan berlaku efektif sejak 1 Januari 2010 merupakan salah satu wujud upaya penguatan *taxing power* daerah, yaitu dengan perluasan basis pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah ada, penambahan jenis pajak daerah dan retribusi daerah, peningkatan tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah, dan pemberian diskresi penetapan tarif pajak.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi Belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan proporsi realisasi belanja akan diuraikan dalam sub bab ini sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 3.7
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Karawang

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	Tahun anggaran 2013	1.081.059.712.806	2.767.122.438.446	39,068
2	Tahun anggaran 2014	1.260.757.734.138	3.157.280.485.664	39,932
3	Tahun anggaran 2015	1.331.256.663.590	3.626.140.806.167,97	36,713

Proporsi Belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan proporsi realisasi belanja Kabupaten Karawang pada tahun 2013 sebesar 39,068% dan mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2014 sebesar 39,932%, sedangkan pada tahun 2015 turun menjadi 36,713%.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari (a) pendapatan daerah, (b) belanja daerah, dan (c) pembiayaan daerah. Pembiayaan Daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran.

Kebijakan pembiayaan timbul karena jumlah pengeluaran daerah lebih besar dari penerimaan sehingga menimbulkan defisit. Penetapan defisit APBD berdasarkan peraturan Menteri Keuangan sesuai dengan PP Nomor 23 tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

Tabel 3.8
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Karawang

NO	Uraian	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	2.691.829.177.177	3.197.905.607.797	3.628.718.508.162
	Dikurangi realisasi:			
2.	Belanja Daerah	2.762.122.438.446	3.151.280.485.664	3.614.140.806.167,97
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	5.000.000.000	6.000.000.000	12.000.000.000
	Defisit riil	(75.293.261.269)	40.625.122.133	2.577.701.994,03

Tabel 3.9
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Karawang

No.	Uraian	Proporsi dari total defisit riil		
		2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	500.169.420.146,00	424.877.008.877,00	465.890.847.641,23
2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	850.00,00	31.500.000,00	-
6.	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-

Tabel 3.10
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Karawang

No.	Uraian	2013		2014		2015	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1.	Jumlah SiLPA	424.877.008.877		465.533.631.010		468.468.549.635,26	
2.	Pelampauan penerimaan PAD	87.623.150.469		72.683.469.897		111.502.928.739	
3.	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	30.021.678.688		(20.855.044.639)		(70.187.345.085)	
4.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	(39.967.706.050)		3.359.003.983,19		(3.383.788.925)	
5.	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	343.365.744.216		410.660.954.008,04		430.303.303.895,26	

3.3 KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2016-2021

Dengan pertimbangan tersebut di atas, maka mengharuskan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang untuk berupaya meningkatkan PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah perlu terus diupayakan melalui proses analisa dan perencanaan yang matang tanpa menimbulkan *high cost economy* terhadap perkembangan arus investasi.

Pelaksanaan Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, secara legal formal, dituangkan dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Selain itu, terdapat juga UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur hal-hal mengenai kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan kepada masyarakat daerah guna mendapatkan sumber pendanaan bagi pembangunan daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam prakteknya, instrumen utama yang digunakan adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak (*taxing power*) dan transfer ke daerah. UU Nomor 28 Tahun 2009 yang baru saja dikeluarkan dan berlaku efektif sejak 1 Januari 2010 merupakan salah satu wujud upaya penguatan *taxing power* daerah, yaitu dengan perluasan basis pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah ada, penambahan jenis pajak daerah dan retribusi daerah, peningkatan tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah, dan pemberian diskresi penetapan tarif pajak.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Pada Tabel berikut dicantumkan hasil proyeksi APBD Kabupaten Karawang untuk 5 tahun kedepan berdasarkan asumsi persentase pertumbuhan dengan memperhatikan data-data APBD dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.

Tabel 3.11
Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tahun 2016 s/d Tahun 2020 Kabupaten Karawang

No.	Uraian	Pertumbuhan %	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
1	PENDAPATAN	15,83	4.203.027.919.023	4.777.550.965.895	5.352.074.012.767	5.926.597.059.639	6.501.120.106.511
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	32,01	1.394.465.022.757	1.732.607.905.038	2.070.750.787.320	2.408.893.669.601	2.747.036.551.883
1.1.1	Pajak daerah	35,76	965.134.877.657	1.219.367.260.289	1.473.599.642.921	1.727.832.025.554	1.982.064.408.186
1.1.2	Retribusi daerah	37,18	106.498.867.026	135.364.682.876	164.230.498.727	193.096.314.578	221.962.130.428
1.1.3	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	5,53	4.407.591.602	4.638.501.081	4.869.410.559	5.100.320.037	5.331.229.516
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	31,08	345.529.822.294	427.449.732.438	509.369.642.581	591.289.552.724	673.209.462.867
1.2.	Dana Perimbangan	7,97	1.753.428.805.715	1.882.920.649.514	2.012.412.493.314	2.141.904.337.114	2.271.396.180.914
1.2.1	Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak	-5,02	232.779.765.871	220.484.312.826	208.188.859.782	195.893.406.737	183.597.953.693
1.2.2	Dana alokasi umum	11,47	1.389.502.889.054	1.532.521.305.108	1.675.539.721.162	1.818.558.137.217	1.961.576.553.271
1.2.3	Dana alokasi khusus	13,91	150.792.515.377	169.207.753.753	187.622.992.130	206.038.230.507	224.453.468.883
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	23,03	1.166.594.603.749	1.384.943.437.736	1.603.292.271.724	1.821.641.105.711	2.039.989.939.699
1.3.1	Hibah	72,43	16.484.793.210	23.409.204.421	30.333.615.631	37.258.026.842	44.182.438.052

No.	Uraian	Pertumbuhan %	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
1.3.2	Dana darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya **)	27,15	425.752.812.062	516.656.812.347	607.560.812.633	698.464.812.918	789.368.813.204
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus***)	23,15	591.506.774.529	702.690.016.058	813.873.257.586	925.056.499.115	1.036.239.740.644
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	55,42	191.630.838.292	259.965.422.548	328.300.006.805	396.634.591.061	464.969.175.318
2	BELANJA	18,18	4.271.035.096.866	4.927.929.387.563	5.584.823.678.261	6.241.717.968.959	6.898.612.259.656
2.1	Belanja Tidak Langsung	11,12	1.928.348.851.957	2.121.288.066.767	2.314.227.281.576	2.507.166.496.386	2.700.105.711.196
2.1.1	Belanja Pegawai	12,72	1.500.645.719.380	1.670.034.775.169	1.839.423.830.959	2.008.812.886.749	2.178.201.942.538
2.1.2	Belanja Bunga	0,00	-	-	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	19,45	176.818.400.999	205.615.605.798	234.412.810.598	263.210.015.397	292.007.220.196
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	31,10	26.430.129.520	32.700.709.041	38.971.288.561	45.241.868.082	51.512.447.602
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	-15,47	-	-	-	-	-
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	43,01	337.475.168.903	438.978.110.449	540.481.051.995	641.983.993.540	743.486.935.086
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	0,00	-	-	-	-	-
2.2	Belanja Langsung	29,59	2.434.706.415.268	2.990.661.846.514	3.546.617.277.761	4.102.572.709.007	4.658.528.140.254
2.2.1	Belanja Pegawai	4,56	195.729.806.927	204.272.799.394	212.815.791.861	221.358.784.329	229.901.776.796
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32,44	1.404.535.167.736	1.748.557.317.561	2.092.579.467.386	2.436.601.617.211	2.780.623.767.036
2.2.3	Belanja Modal	56,24	985.937.497.699	1.340.823.843.748	1.695.710.189.796	2.050.596.535.845	2.405.482.881.894
3	PEMBIAYAAN	13,73	516.212.922.003	578.534.628.364	640.856.334.725	703.178.041.087	765.499.747.448
3.1	Penerimaan Pembiayaan	14,12	400.106.528.879	334.322.210.116	268.537.891.354	202.753.572.591	136.969.253.829
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	5,00	12.600.000.000	13.200.000.000	13.800.000.000	14.400.000.000	15.000.000.000

3.3.1.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana amanat UU Nomor 23 Tahun 2014, maka kebijakan pengelolaan pendapatan diarahkan pada upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebagai barometer tingkat kemandirian daerah dalam menjalankan amanat otonomi daerah. Namun demikian PAD sebagai pendapatan daerah yang dapat dikendalikan (*controllable*) masih relatif sangat kecil memberikan kontribusi terhadap APBD. sebagaimana diketahui, porsi dana perimbangan dalam neraca APBD Kabupaten Karawang masih menjadi sumber pendapatan utama dengan rata-rata proporsi terhadap APBD sebesar 53,57 persen. kondisi kapasitas fiskal Kabupaten Karawang masih relatif rendah, dimana rata-rata besaran kontribusi yang disumbangkan oleh komponen PAD terhadap APBD hanya sebesar 25,51 persen.

Dalam prakteknya, instrumen utama yang digunakan adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak (*taxing power*) dan transfer ke daerah. UU Nomor 28 Tahun 2009 yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2010 merupakan salah satu wujud

upaya penguatan *taxing power* daerah, yaitu dengan perluasan basis pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah ada, penambahan jenis pajak daerah dan retribusi daerah, peningkatan tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah, dan pemberian diskresi penetapan tarif pajak.

Kebijakan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian merupakan amanat dari UU Nomor 35 Tahun 2008, yang dialokasikan antara lain untuk dana penyesuaian berupa dana tambahan penghasilan guru PNSD, Dana Insentif Daerah, dana tambahan untuk tunjangan profesi guru (TPG), dan bantuan operasional sekolah (BOS). Dana Insentif Daerah terutama ditujukan kepada daerah berprestasi yang memiliki kriteria keuangan dan kriteria kinerja ekonomi dan kesejahteraan yang baik, serta tetap mengupayakan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Sementara itu, dana tambahan untuk TPG sejalan dengan telah ditetapkan PP Nomor 41 tahun 2009 tentang tunjangan profesi guru dan dosen, yang dialokasikan mulai tahun 2010. Dana tersebut diberikan kepada guru dan dosen yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya, sesuai dengan kewenangannya.

1) Kebijakan

Kondisi rendahnya kemampuan fiskal APBD Kabupaten Karawang berimplikasi terhadap ketergantungan yang masih sangat besar terhadap Dana Alokasi Umum (DAU), sedangkan porsi DAU dimaksud sebagian besar telah terserap untuk membiayai belanja pegawai. Berdasarkan data realisasi tahun 2015 memperlihatkan penurunan porsi DAU terhadap belanja pegawai yaitu 94,27 persen menjadi 93,63 persen. Kenaikan DAU yang diterima oleh Kabupaten Karawang lebih disebabkan karena peningkatan belanja pegawai sehingga relatif kecil dalam menambah porsi belanja pembangunan.

Dengan pertimbangan tersebut diatas, maka mengharuskan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang untuk berupaya meningkatkan PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah perlu terus diupayakan melalui proses analisa dan perencanaan yang

matang tanpa menimbulkan *high cost economy* terhadap perkembangan arus investasi.

Upaya peningkatan PAD juga harus dilakukan dengan memperhatikan aspek biaya-manfaat yang dihasilkan, yaitu harus memperhitungkan rasio tingkat biaya pemungutan dengan tingkat realisasi penerimaan. Oleh sebab itu efisiensi dan efektifitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah oleh SKPD yang berkompeten harus dilakukan secara akuntabel. Kebijakan lain terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang akan dilaksanakan adalah pendayagunaan kekayaan atau aset-aset daerah yang *idle* baik secara langsung maupun melalui bentuk kerjasama dengan pihak ketiga.

2) Strategi

- a) Strategi untuk meningkatkan PAD
 - (1) Intensifikasi dan ekstensifikasi
 - (2) Menerapkan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah
 - (3) Penyesuaian tarif pajak daerah
 - (4) Meningkatkan pendayagunaan dan pengelolaan aset serta keuangan daerah;
 - (5) Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
- b) Strategi untuk meningkatkan dana perimbangan
 - (1) Optimalisasi penerimaan pajak orang pribadi dalam negeri (PPH, PPH Pasal 21 dan PPN)
 - (2) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam peningkatan dana perimbangan;
 - (3) Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar penghitungan pembagian dalam dana perimbangan;
- c) Strategi untuk meningkatkan lain-lain pendapatan yang sah
 - (1) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
 - (2) Menjalin kerja sama dan jejaring dengan lembaga non pemerintah;

- (3) Menginisiasi dan mencari sumber pendapatan dari masyarakat, dunia usaha dan dunia industri;
- (4) Meningkatkan CSR

3) Upaya yang dilakukan untuk pelaksanaan kebijakan dan strategi pendapatan daerah;

a) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- (1) Penyesuaian berbagai peraturan dalam rangka pelaksanaan pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
- (2) Pendekatan ekstensifikasi untuk perluasan basis pajak serta intensifikasi dalam bentuk perubahan regulasi guna peningkatan basis pajak tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat.
- (3) Peningkatan kepatuhan dan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah yang dibarengi dengan penerapan akuntabilitas dan pemantapan kelembagaan dan kinerja pelayanan unit pemungut dan pengelola pendapatan dalam bentuk insentif, pembinaan, pengawasan dan pengendalian sistem dan prosedur kerja.
- (4) Perbaikan kinerja dan pengelolaan BUMD yang efisien dan efektif dalam rangka peningkatan kontribusi laba terhadap pendapatan asli daerah.
- (5) Peningkatan tarif retribusi daerah yang dipungut oleh SKPD disertai peningkatan pengawasan mutunya.
- (6) Upaya peningkatan PAD juga harus dilakukan dengan memperhatikan aspek biaya-manfaat yang dihasilkan, yaitu harus memperhitungkan rasio tingkat biaya pemungutan dengan tingkat realisasi penerimaan, oleh sebab itu efisiensi dan efektifitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah oleh SKPD yang berkompeten harus dilakukan secara akuntabel melalui proses analisa dan perencanaan yang matang tanpa menimbulkan *high cost economy* terhadap perkembangan investasi.
- (7) Kebijakan lain terkait peningkatan pendapatan asli daerah yang akan dilaksanakan adalah pendayagunaan kekayaan

atau aset-aset daerah yang *idle* baik secara langsung maupun melalui bentuk kerjasama dengan pihak ketiga.

- b) Konsep *revenue Sharing* atas perimbangan keuangan pusat dan daerah memerlukan langkah-langkah proaktif Pemerintah Kabupaten Karawang dalam:
- (1) Melakukan pemantauan , pendataan dan analisa terhadap wajib pajak seperti sumber daya alam dan kontribusi penerimaan yang disetorkan ke pusat maupun propinsi;
 - (2) Berkoordinasi serta melakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi, sehingga alokasi yang diterima sesuai dengan kontribusi yang diberikan.
 - (3) Upaya untuk memperoleh alokasi DAK diarahkan pada meningkatkan penyediaan data-data teknis, koordinasi pengelolaan DAK secara utuh dan terpadu di pusat dan di daerah, sinkronisasi kegiatan DAK dengan kegiatan lain yang didanai APBN dan APBD, serta meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan DAK di daerah. berdasarkan kebijakan DAK di daerah.
 - (4) Kebijakan dana otonomi khusus dan penyesuaian merupakan amanat dari UU Nomor 35 Tahun 2008 yang dialokasikan antara lain untuk dana penyesuaian berupa dana tambahan penghasilan guru PNSD, Dana Insentif Daerah, dana tambahan untuk Tunjangan Profesi Guru (TPG), dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- c) Kebijakan Dana Desa yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dialokasikan untuk desa dengan komposisi perhitungan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

3.3.1.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

1) Kebijakan

Kebijakan belanja daerah disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan potensi dan peluang yang dihadapi.

Belanja daerah diarahkan kepada komponen-komponen penyediaan anggaran dan pembiayaan yang merupakan kewajiban-kewajiban daerah, dengan harapan dapat mencapai hasil yang optimal pada setiap bidang kewenangan pemerintahan daerah. Komponen belanja daerah dan kinerja pelayanan selain berdasarkan aspirasi masyarakat juga dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian target RPJMD, target pencapaian IPM, dukungan terhadap SDGs, dukungan terhadap program prioritas nasional dan Provinsi Jawa Barat. Kebijakan daerah diupayakan dengan mengatur pola belanja daerah yang proporsional optimal dan efisien untuk berbagai kebutuhan pembangunan yang sinergis antara pembangunan pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka mewujudkan nawa cita dan 10 *common goals* Provinsi Jawa Barat. Agenda pembangunan secara umum dapat dicirikan melalui:

- a) Pencapaian rencana pembangunan yang tercantum dalam RPJMD 2016 – 2021
- b) Mendanai agenda prioritas dan rencana aksi
- c) Mendanai kegiatan yang bersifat terobosan
- d) Mendanai program janji Bupati dan wakil Bupati

3.3.1.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dalam struktur APBD, disamping komponen pendapatan dan belanja daerah juga mencakup komponen pembiayaan yang meliputi sumber penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan pembiayaan muncul karena jumlah pengeluaran daerah lebih besar daripada penerimaan daerah sehingga menimbulkan defisit. Penetapan defisit APBD diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Kapasitas riil kemampuan keuangan Kabupaten Karawang berdasarkan hasil proyeksi dan rencana penggunaannya pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.12
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Kabupaten Karawang

No.	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1.	Pendapatan	4.203.027.919.023	4.777.550.965.895	5.352.074.012.767	5.926.597.059.639	6.501.120.106.511
2.	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	-	-
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	-	-	-	-	-
	Total penerimaan	4.203.027.919.023	4.777.550.965.895	5.352.074.012.767	5.926.597.059.639	6.501.120.106.511
	Dikurangi:					
4.	Belanja Tidak Langsung	1.928.348.851.957	2.121.288.066.767	2.314.227.281.576	2.507.166.496.386	2.700.105.711.196
5.	Pengeluaran Pembiayaan	12.600.000.000	13.200.000.000	13.800.000.000	14.400.000.000	15.000.000.000
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	2.262.079.067.066	2.643.062.899.128	3.024.046.731.191	3.405.030.563.253	3.786.014.395.315

Tabel 3.13
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Karawang

No	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	2.262.079.067.066,00	2.643.062.899.128,00	3.024.046.731.191,00	3.405.030.563.253,00	3.786.014.395.315,00
	Prioritas Misi I	34.398.531.298,00	39.150.823.915,00	45.363.615.041,00	44.789.090.145,00	46.149.179.033,00
	Prioritas Misi II	600.515.862.668,00	1.111.050.484.311,00	1.669.705.319.564,00	1.829.717.500.881,00	1.844.746.975.137,00
	Prioritas Misi III	20.317.829.144,00	22.736.644.000,00	30.359.001.000,00	362.914.279.500,00	38.012.058.250,00
	Prioritas Misi IV	463.624.410.800,00	712.854.753.000,00	873.130.453.000,00	943.050.453.000,00	1.022.700.453.000,00
	Prioritas Misi V	191.454.242.400,00	42.573.120.000,00	68.693.495.000,00	67.846.495.000,00	76.154.620.000,00

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
KABUPATEN KARAWANG

4.1. Permasalahan Pembangunan

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Bila identifikasi dinamika eksternal, khususnya yang berjalan selama 5 (lima) tahun dapat diidentifikasi dengan baik, maka diharapkan Pemerintah Kabupaten Karawang dapat mempertahankan/meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Analisis isu-isu strategis dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan pembangunan di masa depan dan menciptakan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Perumusan isu-isu strategis di Kabupaten Karawang dilaksanakan dengan memperhatikan serta menelaah visi, misi dan program-program kepala daerah terpilih, RPJMD Provinsi Jawa Barat serta RPJMN dengan juga memperhatikan berbagai sumber informasi dari lingkungan eksternal dalam skala regional, nasional dan internasional yang berkorelasi atau mempengaruhi tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah.

Berdasarkan hasil evaluasi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2011-2015, yang merupakan rencana pembangunan tahap II dari RPJPD Kabupaten Karawang 2005-2025, cukup banyak kinerja yang harus ditingkatkan dengan berbagai permasalahan yang belum tuntas. Hal tersebut disebabkan oleh faktor penghambat yang menyebabkan program dan kegiatan tidak dapat terlaksana dengan sempurna. Permasalahan pembangunan yang dihadapi Kabupaten Karawang diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah antara lain adalah :

4.1.1. Bidang Sosial Budaya

4.1.1.1. Pendidikan

1. Belum optimalnya pencapaian indikator dan Standar Pelayanan Minimal dalam pelayanan pendidikan;
2. Belum tuntasnya program wajib belajar 9 Tahun di Kabupaten Karawang, dengan Rata-rata lama sekolah pada tahun 2015 adalah 7,09 tahun, berarti tidak tamat kelas 2 SMP. Kondisi ini disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan bagi anak, demikian juga dengan masih banyaknya lulusan SLTP yang tidak melanjutkan ke SLTA;
3. Ketersediaan Sekolah Menengah Kejuruan masih kurang, khususnya untuk jurusan yang sesuai dengan permintaan pasar tenaga kerja di Kabupaten Karawang. Pada tahun 2015, jumlah SMK di Kabupaten Karawang adalah sebanyak 95 SMK dengan jumlah rombongan belajar pada tahun ajaran 2015/2016 adalah 1.447;
4. Kualitas ruang kelas yang belum sepenuhnya ideal dengan total Ruang Kelas Milik (RKM) pada tahun 2015/2016 yang baik sebanyak 7.560 unit, rusak ringan sebanyak 3.122 unit dan yang rusak berat sebanyak 1.027 unit. Selama 5 tahun kedepan terdapat potensi kerusakan dari posisi baik ke rusak ringan dan rusak ringan ke rusak berat.

Jenjang Sekolah	Tahun		
	2015/2016		
	B	RR	RB
SD	4.233	1.286	587
SMP	1.583	421	122
SMA	265	431	47
SMK	516	511	134
MI	533	286	81
MTs	333	141	48
MA	97	46	8
	1749.816	1837.286	1027

4.1.1.2. Kesehatan

1. Belum optimalnya pencapaian indikator dan Standar Pelayanan Minimal dalam pelayanan kesehatan;
2. Masih mengkhawatirkannya Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI). Angka Kematian Bayi di Kabupaten Karawang sebesar 189 kematian bayi per 1.000 kelahiran pada tahun 2015, angka tersebut masih jauh dari target *SDGs (Sustainable Development Goals)* Nasional, yaitu 23 kematian bayi per 1.000 kelahiran pada tahun 2015. Sedangkan untuk kasus kematian ibu pada tahun 2014 masih tinggi, yaitu sebanyak 59 orang per 100.000 kelahiran.
3. Terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan serta pelayanan kesehatan belum maksimal;
 - a. Jangkauan pelayanan kesehatan di Kabupaten Karawang melalui Puskesmas/Pustu masih belum memadai karena masih jauh dari target layanan kesehatan ideal dimana Standar pelayanan kesehatan 1 Puskesmas untuk 10.000 penduduk, sementara di Kabupaten Karawang dengan jumlah penduduk 2.250.120 orang dengan jumlah puskesmas sebanyak 50 unit, berarti 1 puskesmas melayani 45.002 penduduk, demikian juga dengan Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP) baru 13 Puskesmas DTP dari 50 Unit Puskesmas yang ada.
 - b. Tenaga kesehatan masih terbatas. Jumlah tenaga kesehatan yang ada bila dibandingkan dengan jumlah penduduk masih jauh di bawah standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
 - c. Tarif pelayanan kesehatan relatif masih mahal, dan tidak semua lapisan masyarakat mampu menjangkau dan memanfaatkannya.
4. Pengendalian penyakit menular terutama HIV/AIDS masih perlu ditingkatkan :

- a. Angka perkembangan kasus HIV/AIDS di Kabupaten Karawang menunjukkan peningkatan, dimana pada tahun 2014 penderita AIDS di Kabupaten Karawang berjumlah 55 orang dengan penemuan HIV sebanyak 92 orang.
 - b. Penderita TB di Kabupaten Karawang masih tinggi, yaitu sebanyak dengan penemuan BTA sebanyak 2.609 kasus.
5. Masih adanya status gizi buruk di Kabupaten Karawang :
- Masih terdapatnya kasus balita gizi buruk dan balita gizi kurang di Kabupaten Karawang yang disebabkan oleh rendahnya kualitas hidup sebagian masyarakat di Kabupaten Karawang yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terutama orang tua balita terhadap pentingnya gizi balita di masa pertumbuhan juga menjadi pemicu terjadinya status gizi buruk. Pada tahun 2014 jumlah balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan di Kabupaten Karawang sebanyak 399 orang dan balita gizi kurang yang ditangani sebanyak 7.496 orang.

4.1.1.3. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Kesetaraan Gender
Kelembagaan dan jejaring pengarusutamaan gender masih lemah di Kabupaten Karawang, dengan jumlah PEKKA pada tahun 2014 sebanyak 25 kelompok dari 309 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Karawang serta jumlah PRIMA sebanyak 52 kelompok pada tahun 2014.
2. Perlindungan Perempuan dan Anak masih perlu dioptimalkan :
 - a. Jumlah *trafficking* perempuan dan anak tercatat 19 kasus pada tahun 2014;

- b. Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu tercatat 30 kasus pada tahun 2014, yang sebelumnya hanya 11 kasus pada tahun 2013;
- c. Belum optimalnya penegakan hukum terhadap kasus TPPO dan KDRT.

4.1.1.4. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Karawang masih cukup tinggi, yaitu 4,61% pada tahun 2015. Salah satu penyebab peningkatan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Karawang adalah disebabkan oleh pendatang dari wilayah lain (migrasi). Oleh karena Kabupaten Karawang memiliki daya tarik tersendiri bagi pendatang karena pembangunan di sektor industri.
2. Tingkat kesertaan ber-KB pasangan usia subur belum optimal. Pada tahun 2014 tercatat 383,896 peserta KB aktif atau 71,54% dari pasangan usia subur (PUS) yang berjumlah 536.642 orang.
3. Pengendalian usia perkawinan.
4. Pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan reproduksi masih rendah.

4.1.1.5. Sosial

1. Penanggulangan Kemiskinan
Angka kemiskinan di Kabupaten Karawang masih cukup tinggi, dengan pesatnya pembangunan di Kabupaten Karawang menimbulkan kesenjangan sosial antara perkotaan dan perdesaan. Jumlah penduduk miskin perkotaan di Kabupaten Karawang tahun 2014 adalah sebanyak 106.260 orang dan jumlah penduduk miskin perdesaan pada tahun 2014 sebanyak 600.728 orang.
2. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) :
Gelandangan, pengemis, anak terlantar, anak jalanan, penyandang cacat, tunasusila dan penyandang AIDS/HIV yang termasuk dalam PMKS

di Kabupaten Karawang menunjukkan peningkatan di Kabupaten Karawang pada tahun 2014 mencapai 66,88% bila dibandingkan dengan tahun 2013 yang mencapai 50%.

Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Karawang adalah sebagai berikut :

No.	Jenis PMKS	2011	2012	2013	2014
1.	Balita terlantar	773	798	596	761
2.	Anak terlantar	5.764	5.849	5.447	6.125
3.	Anak nakal	599	664	599	660
4.	Wanita rawan sosial ekonomi	19.665	19.873	17.830	19.147
5.	Korban tindak kekerasan	141	233	25	391
6.	Lanjut usia terlantar	27.129	27.385	19.350	21.078
7.	Penyandang cacat	8.031	8.082	5.784	6.364
8.	Wanita Tuna Susila	278	299	158	158
9.	Pengemis	125	137	72	82
10.	Gelandangan	175	201	70	70
11.	Eks Napi	1.081	1.189	105	110
12.	Korban NAPZA	127	308	21	20
13.	Keluarga fakir miskin	177.489	186.079	155.212	176.747
14.	Keluarga dengan kondisi perumahan dan lingkungan tidak layak	36.243	38.377	27.298	29.923
15.	Korban bencana alam	2.638	7.650	238.275	465.987
16.	Korban bencana sosial	58	5.695	275	122
17.	Pekerja migran bermasalah	64	70	243	372
18.	ODHA	213	238	327	221
19.	Anak jalanan	301	326	334	329

Sumber : Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana Kab. Karawang

3. Penanggulangan Bencana

- a. Sarana dan prasarana penanggulangan bencana masih terbatas;
- b. Sumberdaya aparatur terlatih untuk penanggulangan bencana masih terbatas;

- c. Belum memiliki peraturan daerah mengenai Rencana Aksi Penanggulangan Bencana Aksi Daerah.

4.1.1.6. Tenaga Kerja

1. Jumlah pencari kerja yang ditetapkan lebih sedikit dari jumlah pencari kerja;
2. Banyaknya jumlah pencari kerja pendatang dari luar Kabupaten Karawang
3. Masih rendahnya kualitas ketrampilan pencari kerja
4. Rendahnya motivasi dan daya juang angkatan kerja dalam bidang wirausaha dan sector informal
5. Investasi perusahaan yang lebih mengutamakan padat modal dan padat teknologi yang menuntut pekerja dengan kualifikasi tertentu
6. Pengangguran dan Kesempatan Kerja serta Berusaha
7. Penduduk yang mencari kerja (penganggur) di Kabupaten Karawang masih tinggi, pada tahun 2014 penganggur berjumlah 108.597 orang atau 10,15% dari angkatan kerja.

Komposisi Penduduk Kabupaten Karawang Tahun 2011-2014

No	Indikator	2011	2012	2013	2014
I.	Jumlah Penduduk	2.168.710	2.207.181	2.230.641	2.250.120
II.	Penduduk Usia Kerja	1.557.876	1.580.712	1.598.498	1.621.766
	Angkatan Kerja :	978.507	1.033.921	970.935	1.069.036
	- Penduduk yg bekerja	880.087	917.556	875.213	960.439
	- Penduduk yg mencari kerja (penganggur)	98.420	116.365	95.722	108.597
	- Persentase penganggur (%)	10	11,2	9,86	10.15
	Bukan Angkatan Kerja	579.369	546.791	627.563	552.730

Sumber : Disnakertrans Kabupaten Karawang

8. Kesempatan kerja dan lapangan usaha tidak sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja, pada tahun 2014 jumlah lowongan kerja yang tersedia untuk 13.991 orang sedangkan jumlah pencari kerja yang terdaftar berjumlah 24.098 orang.

Data Ketenagakerjaan Tahun 2011 s.d. 2014

No.	Uraian	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah Angkatan kerja (org)	978.507	1.033.921	970.935	1.069.036
2.	Pencari kerja yang terdaftar (org)	73.443	28.443	21.228	24.098
3.	Jumlah lowongan kerja yang tersedia (org)	55.165	8.567	4.886	13.991
4.	Tenaga kerja yang ditempatkan (org)	54.692	7.997	12.000	12.693

Sumber: *Disnakertrans Kabupaten Karawang*

9. Sistem informasi ketenagakerjaan masih terbatas.
10. Kompetensi dan Perlindungan Tenaga Kerja
11. Daya saing calon tenaga kerja di Kabupaten Karawang masih rendah, hal tersebut digambarkan dari data tingkat pendidikan pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang sebagaimana tabel berikut :

Tabel Pencari Kerja yang ditempatkan pada tahun 2011-2014

No.	Tingkat Pendidikan	2011	2012	2013	2014
1.	TTSD	-	-	-	39
2.	SD	2.105	-	40	757
3.	SLTP	15.408	1	68	2.866
4.	SLTA	35.955	7.960	4.523	8.827
5.	D1/D2	117	-	17	-
6.	D3	584	27	97	25
7.	S1	523	9	11	59
	JUMLAH	54.692	7.997	4.756	12.573

Sumber: *Disnakertrans Kabupaten Karawang*

12. Kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai pekerja masih rendah, serta kurangnya perlindungan terhadap tenaga kerja.

4.1.1.7. Kebudayaan

1. Pengaruh globalisasi berdampak pada kultur budaya lokal.
2. Apresiasi masyarakat terhadap seni budaya lokal belum optimal.
3. Kurangnya regenerasi seniman terhadap budaya lokal yang menjadi warisan leluhur
4. Seni budaya lokal yang sudah populer belum memiliki hak cipta.
5. Kreativitas seniman masih kurang karena tidak didukung oleh pengetahuan/pendidikan formal.

6. Belum adanya sarana dan prasarana yang memadai untuk pertunjukan seni budaya
7. Regulasi yang belum ada
8. Masih rendahnya penyelenggaraan event seni budaya
9. Belum ada tenaga ahli dibidang arkeologi, antropologi, museologi dan filologi
10. Nilai budaya daerah mulai luntur karena pengaruh budaya asing dan arus globalisasi;
11. Sarana prasarana pengembangan seni dan budaya masih perlu dioptimalkan untuk menampung kreatifitas seni dari para seniman di Kabupaten Karawang. Pada tahun 2014 jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya sebanyak 36 buah. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya tersebut terdiri atas :
 - a. 30 buah aula kecamatan/lapangan kecamatan yang tersebar di masing-masing kecamatan di Kab. Karawang
 - b. Lapang Karangpawitan
 - c. Panggung Disbudpar
 - d. Outdoor GOR Panatayudha
 - e. Gedung GOW Kabupaten Karawang
 - f. Gedung Pentas Seni Kampung Budaya Gerbang Karawang
 - g. Gedung Theatre Terbuka Kampung Budaya Gerbang Karawang
12. Perlindungan dan pelestarian cagar budaya masih perlu dioptimalkan, khususnya pada Kawasan Percandian Situs Batujaya yang terletak di Desa Segaran (Kecamatan Batujaya) dan Desa Telagajaya (Kecamatan Pakisjaya).

4.1.1.8. Kepemudaan dan Olahraga

Prestasi olahraga merupakan gambaran dari keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 pasal 20. Olahraga prestasi dimaksudkan sebagai

upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Selaras dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan peranan pemuda dan olahraga, Pemerintah Kabupaten Karawang terus melaksanakan pembinaan dan memperbaiki sarana dan prasarana keolahragaan.

Tabel Capaian Kinerja Peningkatan Peran serta
Kepemudaan Tahun 2011-2015

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Organisasi Pemuda yang dibina	50	60	62	65	65

Sumber: Kantor Kesbangpollinmas Kabupaten Karawang dan Disdikpora

Terdapat peningkatan jumlah binaan organisasi pemuda dari tahun 2011 sebanyak 50 organisasi pemuda dan 2012 sebanyak 60 organisasi pemuda hal ini bertambah 10 organisasi pemuda yang di bina begitupun tahun 2013 sebanyak 62 organisasi pemuda, terdapat pertambahan 2 organisasi pemuda dan peningkatan terjadi juga pada tahun 2014 sebanyak 65 hal ini jumlah organisasi pemuda bertambah 3 organisasi dari tahun sebelumnya, sedangkan untuk tahun 2015 jumlah organisasi tidak mengalami penambahan jumlah binaan. Jumlah organisasi yang dibina oleh bidang pemuda dan olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga pada program peningkatan peran serta kepemudaan tiap tahunnya meningkat, hal ini semakin sadarnya masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan melalui wadah organisasi. Selain itu faktor pertumbuhan penduduk yang tinggi di Kabupaten Karawang sebagai salah satu faktor tumbuhnya organisasi yang baru.

Dengan semakin banyaknya organisasi tanpa disertai dengan pengelolaan sumberdaya manusia di dalamnya akan menyebabkan rawan konflik, untuk itu pembinaan organisasi kepemudaan harus benar benar di lakukan secara menyeluruh baik di internal maupun

eksternal organisasi yang dibina oleh pemerintah maupun pihak swasta.

Tabel Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Tahun 2011-2014

No.	Cabang Olah Raga	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah cabang olah raga prestasi yang dibina	18	20	28	35	35
2	Jumlah sarana olah raga yang dibangun	-	-	1	1	-

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang

Pada program pembinaan dan pemasyarakatan Olah raga dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 mengalami peningkatan jumlah cabang olah raga prestasi yang di bina, hal ini disebabkan pola pembinaan yang lebih baik dan perhatian pemerintah terhadap cabang olahraga dengan menyelenggarakan even olah raga yang banyak melibatkan cabang-cabang olah raga. Namun demikian masih perlunya pembangunan sarana olah raga tempat mereka berlatih untuk meraih prestasi.

4.1.2. Bidang Ekonomi

4.1.2.1 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1. Kuantitas dan Kualitas Koperasi
 - a. Masih lemahnya tata kelola koperasi di Kabupaten Karawang;
 - b. Tingkat aktifitas koperasi masih rendah, dari 1.538 koperasi pada tahun 2015 hanya 627 koperasi atau 40,76% yang masih aktif;
 - c. Permodalan Dan Pembiayaan masih belum memadai;
 - d. Sarana Pemasaran masih belum memadai;
 - e. Kerjasama dengan Pelaku Usaha Lain belum optimal;
 - f. Kompetensi SDM masih perlu ditingkatkan;
 - g. Manajemen belum optimal;
 - h. Pengembangan Produk Unggulan Koperasi Dan Umkm (*One Villde One Product*).

2. Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
 - a. Lemahnya pengelolaan usaha yang dilakukan oleh pelaku UMKM termasuk rendahnya jiwa entrepreneur, mutu produksi, pengelolaan keuangan dan diversifikasi produk;
 - b. Lemahnya aksesibilitas permodalan yang disebabkan oleh kurang produktifnya petugas bank, pelaku usaha dan aparat pembina dalam mensosialisasikan skema kredit yang ada pada sumber-sumber pembiayaan;
 - c. Rendahnya pemahaman pelaku UMKM terhadap aspek pemasaran dan terbatasnya jejaring pasar yang diketahui oleh pelaku UMKM;
 - d. Belum optimalnya keterlibatan serta peran swasta dalam pembinaan UMKM;
 - e. Pemberdayaan usaha mikro kecil maupun menengah yang mewakili keunikan lokal dalam pemasaran dan permodalan serta tantangan perdagangan bebas belum optimal.

4.1.2.2 Penanaman Modal

1. Informasi serta promosi potensi ekonomi dan pelayanan perijinan melalui pemanfaatan teknologi informasi masih kurang optimal;
2. Masih belum efektif dan sesuainya regulasi penanaman modal di tingkat pemerintah pusat, provinsi maupun Kabupaten/Kota.

4.1.2.3 Statistik

1. Kelembagaan pengolahan data yang terintegrasi belum ada;
2. Sumberdaya manusia pengelola data statistik masih kurang;
3. Pengelolaan data masih lemah;
4. Kesadaran aparatur terhadap pentingnya data masih rendah.

4.1.2.4 Pertanian

1. Kesejahteraan Petani
 - a. Kepemilikan lahan oleh petani di Kabupaten Karawang sangat rendah, mereka mayoritas adalah petani penggarap dan buruh tani. Pendapatan Petani pada tahun 2015 di Kabupaten Karawang adalah sebesar Rp. 27.275.000 (asumsi pendapatan petani padi sawah/ha/musim);
 - b. Proteksi pemerintah terhadap pengendalian harga produk pertanian masih lemah.
2. Ketahanan Pangan
 - a. Diversifikasi konsumsi masyarakat terhadap pangan non beras belum membudaya;
 - b. Pemantapan ketahanan pangan daerah belum optimal.
3. Diversifikasi Pertanian dan Agribisnis
 - a. Pemahaman dan perilaku petani untuk melakukan penganekaragaman komoditas pertanian masih kurang;
 - b. Perubahan orientasi dari bertani secara konvensional menuju pola bertani yang modern dan berorientasi profit belum ada.
4. Lahan Pertanian
 - a. Lahan pertanian di Kabupaten Karawang menunjukkan kecenderungan penurunan yang diakibatkan oleh alih fungsi lahan. Perkembangan Luas Tanam Padi Sawah di Kabupaten karawang adalah sebagai berikut :

Tahun	2011	2012	2013	2014	2015
Luas (Ha)	98.612	98.615	98.346	97.835	97.577

- b. Peraturan mengenai Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) belum ditetapkan.

5. SDM Pertanian
 - a. Kualitas dan kuantitas penyuluh pertanian masih perlu ditingkatkan, pada tahun 2015 tenaga teknis profesional pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) berjumlah 87 orang. Tenaga profesional perikanan dan kelautan pada tahun 2015 sebanyak 13 orang sedangkan untuk Tenaga Teknis Profesional Kehutanan berjumlah 7 orang pada tahun 2015.
6. Kandungan C organik tanah sawah di kabupaten Karawang rendah (di bawah 1 %) artinya lahan sawah dalam keadaan sakit;
7. Sering terjadi bencana alam (banjir/kekeringan)
 - Tahun 2013 luas puso = 8.561 ha (banjir)
 - Tahun 2014 luas puso = 25.630 ha (banjir)
 - Tahun 2015 luas puso = 1.782 ha (kekeringan)
8. Tingginya serangan hama penyakit (opt)
 - Tahun 2013 serangan opt = 19.089 ha
 - Tahun 2014 serangan opt = 14.191 ha
 - Tahun 2015 serangan opt = 8.718 ha
9. Kehilangan hasil (*losses*) pasca panen padi sebesar 12,62 %;
10. Kabupaten Karawang masih kekurangan daging sebanyak 10.130 ton (perhitungan antara jumlah penduduk dibandingkan dengan jumlah populasi hewan yang ada);
11. Lahan kritis seluas 7.483 ha (darat 2,078 ha, pantai 5,405 ha);
12. Jumlah petani sebanyak 281.405 kk, terdiri dari:
 - Petani pemilik = 43.362 (15 %)
 - Petani pemilik penggarap = 80.905 (29 %)
 - Petani penggarap = 47.754 (17 %)
 - Buruh tani = 109.564 (39 %)
13. Posisi tawar hasil produk petani masih rendah

4.1.2.5 Kehutanan

Jumlah total lahan kritis di Kabupaten Karawang pada tahun 2015 adalah seluas 7.173,9 Ha, tersebar di 14 kecamatan, 9 diantaranya terdapat di kecamatan wilayah pantai.

4.1.2.6 Kelautan dan Perikanan

1. Masih rendahnya produksi budidaya perikanan air tawar maupun perikanan tangkap. Pada Tahun 2015 produksi perikanan budidaya air tawar di Kabupaten Karawang sebesar 42.483,15 ton, sedangkan produksi perikanan tangkap sebesar 8.591,99 ton;
2. Terbatasnya investasi dalam pengembangan komoditas perikanan dan kelautan;
3. Terbatasnya jumlah dan kapasitas sarana dan prasarana penangkapan ikan
4. Belum tersedianya industri pengolahan hasil-hasil perikanan;
5. Belum optimalnya tata kelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Balai ;
6. Masih rendahnya penerapan Teknologi Penangkapan Ikan dan Budidaya Perikanan;
7. Masih rendahnya SDM, baik budidaya maupun perikanan tangkap;
8. Peran pengawasan oleh kelompok masyarakat pengawas (Posmaswas) masih lemah karena tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

4.1.2.7 Pariwisata

1. Prasarana dan sarana wisata di objek wisata masih belum standar, terutama pada objek dan daya tarik wisata yang berada di Kawasan Wisata
2. Keberadaan objek dan daya tarik wisata di setiap destinasi belum terintegrasi ke dalam pola perjalanan pariwisata Jawa Barat.
3. Pendekatan pengembangan pariwisata masih belum berorientasi secara tegas kedalam pola pengembangan industri pariwisata secara berkelanjutan

4. Kesadaran dan partisipasi para pemangku kepentingan pariwisata terhadap upaya peningkatan kualitas pengalaman wisata masih belum merata dan memadai.
5. Upaya pemasaran dan promosi destinasi wisata masih belum terintegrasi, terarah, dan terukur sesuai dengan tujuan, sasaran dan target pengembangan pariwisata yg telah ditetapkan.
6. Ketersediaan pelayanan informasi wisata, terutama di stasiun kereta, terminal, hotel dan simpul-simpul kawasan wisata utama belum ada.
7. Kondisi pengelolaan keamanan dan keselamatan dalam kegiatan berwisata masih minim dan belum merata di setiap destinasi wisata.
8. Kemampuan dan profesionalitas SDM di sektor pariwisata masih terbatas dan belum merata, terutama untuk pekerja yang berada pada posisi penyedia pelayanan.
9. Pengembangan ODTW (Obyek Daya Tarik Wisata) lokal di Kabupaten Karawang untuk menarik wisatawan belum optimal;
10. Promosi kegiatan kepariwisataan belum optimal;
11. Belum optimalnya jalinan mitra usaha kepariwisataan baik dengan pengusaha lokal maupun investor luar;
12. Pengembangan sarana dan prasarana destinasi wisata belum optimal;
13. Belum adanya paket wisata yang menjual daya tarik obyek wisata di Kabupaten Karawang;
14. Kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana obyek wisata masih kurang.
15. Pengelolaan potensi destinasi pariwisata belum baik dan profesional.

4.1.2.8 Perindustrian

1. Pengembangan industri kecil yang memiliki kekhasan/keunikan lokal belum optimal;

2. Pusat promosi produk industri belum optimal dimanfaatkan;
3. Jejaring usaha yang kuat antar pelaku industri kecil belum optimal;
4. Dukungan infrastruktur ke sentra produksi industri kecil masih lemah.

4.1.2.9 Perdagangan

1. Pengelolaan pasar yang belum profesional;
2. Sarana pergudangan terpadu belum tersedia;
3. Perlindungan konsumen masih lemah;
4. Sebaran pusat fasilitas perdagangan belum merata.

4.1.3. Bidang Infrastruktur

4.1.3.1 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Proporsi jalan, jembatan dan irigasi dalam kondisi yang rusak masih tinggi;
2. Pemanfaatan saluran irigasi untuk pertanian tidak optimal, sebagai akibat dari alih fungsi lahan;
3. Partisipasi masyarakat (P3A Mitra Cai) dalam tata kelola irigasi masih kurang;
4. Kemantapan Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Pengairan Yang Belum Memenuhi Standar Pelayanan Minimal;
5. Infrastruktur jaringan irigasi banyak yang rusak: panjang sal primer 78,97 km (rusak 49,99 %), panjang sal sekunder 451,41 km (rusak 29,91 %), panjang sal tertier 1.791 km (rusak 34 %);
6. Panjang jalan usaha tani 919 km (rusak 46 %);
7. Penurunan Kapasitas Saluran Pembuang dan Muara Sebagai Akibat Sedimentasi.
8. Tingginya pencemaran, kerusakan lingkungan dan resiko bencana
9. Kesenjangan antar wilayah dalam penyediaan sarana prasarana
10. Kecenderungan pengembangan perumahan sub urbanisasi, urban sprawl

11. Produk hukum mengenai rencana tata ruang yang lebih operasional turunan RTRW masih dalam proses penetapan;
12. Pihak pengembang tidak melaporkan secara berkala (tiga bulan sekali) mengenai kegiatan investasi yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Karawang sehingga sulit dilakukan pengawasan;
13. Persoalan RTH (Ruang Terbuka Hijau), KDB (Koefisien Dasar Bangunan) dan KLB (Koefisien Luas Bangunan) yang belum dipenuhi oleh pengembang;
14. Kegiatan penyusunan NSPK yang bersifat spasial membutuhkan anggaran yang besar;
15. Sosialisasi kebijakan penataan ruang belum menyentuh secara merata terhadap seluruh stakeholder;
16. Peran BKPRD dalam penyelenggaraan penataan ruang belum optimal;
17. Perubahan kebijakan startegis nasional yang berdampak terhadap perubahan kebijakan penataan ruang daerah;
18. Mekanisme pelibatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang belum terstruktur;
19. Belum tersedianya mekanisme monitoring dan evaluasi terkait penyelenggaraan penataan ruang.
20. Kondisi Perkembangan Historis Geografis (Daratan, Sungai, Saluran Pembuang, Pesawahan dan Garis Pantai)
21. Dampak Perubahan Tata Ruang Internal Maupun Eksternal (macet, crowded dan banjir)
22. Karawang Bagian Dari Pengembangan BODEBEKARPUR Sebagai Twin Metropolitan (Jakarta)
23. Peraturan Presiden RI Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Api Cepat Jakarta dan Bandung ; Peraturan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

(Untuk Bandara Internasional Karawang) dan Rencana Pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II;

24. Belum memadainya Pranata Bidang Penataan Ruang khususnya Rencana Rinci Tata Ruang;
25. Rendahnya keterkaitan fungsional antar wilayah Perkotaan dan Perdesaan;
26. Belum terwujudnya sinergitas koordinasi penataan ruang baik yang bersifat fisik lingkungan, kebencanaan maupun ekonomi;
27. Penggunaan dan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan RTRW dan peraturan ketataruangan.

4.1.3.2 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Karawang masih cukup banyak, khususnya di sebagian wilayah pesisir utara Karawang dan sebagian wilayah selatan.
2. Masih banyak rumah yang tidak layak huni dibangun di atas tanah bukan hak milik, seperti Kehutanan, PJK, Tanah Pengairan maupun Rumija (Ruang Milik Jalan);
3. Belum terintegrasinya penataan sarana dan prasarana lingkungan sanitasi, air bersih dan drainase baik di perkotaan dan perdesaan;
4. Masih belum optimalnya pengelolaan dan penataan areal pemakaman di Kabupaten Karawang.
5. Tingkat occupancy/penghunian Rumah Sehat masih rendah
6. Laju pertumbuhan penduduk tinggi
7. Konsentrasi penduduk tidak merata
8. Belum optimalnya penanganan persampahan dan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan;
9. Belum tertanganinya kawasan kumuh perkotaan;

4.1.3.3 Perhubungan

1. Belum tersedianya infrastruktur wilayah yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal. Diantaranya berupa kemantapan jaringan dan kualitas jalan dan dukungan perlengkapan jalan (Trotoar, Marka Jalan, Rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), Alat Penerangan Jalan, Alat dan Pengamanan Jalan, Lajur Sepeda, Tempat Penyebrangan Pejalan Kaki, Halte dan Fasilitas Khusus bagi Penyandang Cacat dan Manusia Usia Lanjut).
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung, yang belum ditindaklanjuti dengan perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Karawang Tahun 2011-2031;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang perlu segera disikapi pengintegrasian dalam kebijakan Pemerintah Kabupaten Karawang;
4. Adanya Perubahan kewenangan sesuai Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Belum tersedianya terminal angkutan penumpang umum yang dapat mengintegrasikan moda angkutan, sehingga berdampak pada adanya terminal bayangan di beberapa titik;
6. Belum tersedianya terminal angkutan barang;
7. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas sehingga menimbulkan kemacetan dan kerawanan kecelakaan dalam berlalu lintas;

8. Masih terbatasnya sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan dalam mendukung terciptanya keamanan, kelancaran dan keselamatan berlalu lintas;
9. Manajemen rekayasa lalu lintas belum optimal.
10. Infrastruktur dan moda transportasi menuju objek dan daya tarik wisata masih belum memadai dan terkoneksi.

4.1.3.4 Lingkungan Hidup

1. Pengelolaan Sampah :
 - a. Masih rendahnya area pelayanan persampahan di Kabupaten Karawang;
 - b. Kesadaran masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah dan menerapkan 3 R masih rendah;
 - c. Tempat penampungan sampah sementara masih kurang;
 - d. Kondisi sarana pengangkut sampah sudah kurang baik, yang menyebabkan lindi yang sering menetes dan terjadi *over load* sampah;
 - e. Keterbatasan armada pengangkut sampah.
 - f. TPA Jalupang masih menggunakan sistem *open dumping* padahal menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 mengamanatkan TPA harus menggunakan *sanitary landfill*;
 - g. Kondisi eksisting TPA Jalupang yang sudah penuh, bahkan cenderung *over load*.
2. Pengendalian dan Pencemaran Kerusakan Lingkungan
 - a. Menurunnya fungsi tanah akibat pencemaran (tanah menjadi keras dan tidak subur) yang berasal dari limbah domestik, industri dan pertanian, sehingga tidak mampu lagi mendukung aktivitas manusia;
 - b. Menurunnya fungsi air karena masuknya limbah ke dalam air dan menyebabkan timbulnya masalah rawan air bersih;

3. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
 - a. Kurangnya apresiasi akan pentingnya RTH di Kabupaten Karawang;
 - b. Belum optimalnya pemeliharaan RTH di Kabupaten Karawang;
 - c. Minimnya fasilitas RTH khususnya bagi kelompok usia tertentu, seperti lapangan olahraga, taman bermain anak, taman lansia, taman khusus bagi penyandang cacat.
 - d. Dalam penataan lansekap kota, etika dan estetika, khususnya penempatan iklan/papan reklame belum ditata menurut kaidah penataan ruang yang sesuai.
4. Pengelolaan Ekosistem Pesisir dan Laut
 - a. Kerusakan hutan mangrove, abrasi pantai, akresi pantai, pencemaran air laut, pembuangan berbagai jenis limbah baik yang berasal dari kegiatan di laut maupun limbah dari darat, penumpukan sampah di pantai, pendangkalan muara sungai dan pengambilan pasir darat telah merusak lingkungan laut dan pesisir di Kabupaten Karawang.
 - b. Kabupaten Karawang belum memiliki sarana pengolah limbah di wilayah pesisir, sehingga lingkungan pesisir di wilayah Kabupaten Karawang terlihat kotor oleh limbah, baik yang berasal dari kegiatan domestik maupun *home industry*, serta dengan sanitasi lingkungan yang buruk.
5. Semakin menurunnya kualitas udara di Kabupaten Karawang, khususnya di wilayah perkotaan akibat emisi karbon kendaraan bermotor dan emisi karbon pabrik dan aktivitas lainnya.
6. Tata kelola lingkungan hidup yang baik sehingga kegiatan pembangunan tidak menimbulkan dampak berupa kerusakan lingkungan dan penurunan daya dukung/degradasi lingkungan.

4.1.3.5 Komunikasi dan Informatika

1. Penerapan *e-government* di Kabupaten Karawang belum optimal untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah;
2. Sumberdaya manusia di bidang teknologi informasi masih terbatas.

4.1.3.6 Energi dan Sumberdaya Mineral

1. Rumah Tangga kurang mampu yang belum mendapat sambungan listrik masih cukup banyak, sampai dengan tahun 2015 baru 29.476 sambungan listrik yang terpasang dari data jumlah keluarga miskin sebanyak 40.907 keluarga, sehingga masih tersisa 11.431 keluarga miskin yang belum mendapat sambungan listrik;
2. Perlu dioptimalkan pengawasan dan penertiban penggunaan air bawah tanah.

4.1.4. Bidang Pemerintahan

4.1.4.1 Perencanaan Pembangunan

1. Ketersediaan dan konsistensi data untuk perencanaan pembangunan
 - a. Validitas dan akurasi data untuk perencanaan pembangunan masih rendah;
 - b. Kesepahaman akan pentingnya data belum ada;
 - c. Institusi/bidang yang spesifik mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data belum ada;
 - d. Penyediaan data berbasis teknologi informasi belum optimal.
2. Konsistensi dalam perencanaan dan penganggaran
 - a. Inkonsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran;
 - b. Kemampuan anggaran terbatas bila dibandingkan dengan usulan kebutuhan;
 - c. Belum bersinerginya pendekatan teknokratik, partisipatif, *top down*, *bottom up* dengan pendekatan politik dalam perencanaan pembangunan;

- d. Ego sektoral dalam perencanaan pembangunan masih tinggi.

4.1.4.2 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kesadaran masyarakat dalam mentaati tertib administrasi kependudukan masih lemah;
2. Pemanfaatan *database* kependudukan belum optimal;
3. Pengelolaan administrasi kependudukan belum optimal.

4.1.4.3 Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Belum tingginya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan peraturan hukum, khususnya peraturan daerah;
2. Luasnya daerah Kabupaten Karawang tidak sebanding dengan rasio petugas keamanan dan ketertiban, sehingga penanganan masalah-masalah *trantibum* banyak yang tidak tertangani;
3. Potensi gesekan kelompok sosial masih besar;
4. Fungsi partai politik belum efektif sebagai wadah pendidikan politik, pengelola konflik, kaderisasi, agregasi kepentingan masyarakat dan komunikasi politik;
5. Penertiban dan pembinaan organisasi masyarakat (Ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) masih belum memadai.

4.1.4.4 Pemerintahan Umum

1. Sarana dan Prasarana Pemerintahan
 - a. Sarana dan prasarana pendukung tugas dan fungsi pemerintahan belum memadai;
 - b. Tata letak sarana dan prasarana pemerintahan belum memberikan akses kemudahan bagi masyarakat, termasuk bagi yang berkebutuhan khusus;
 - c. Pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung pemerintahan belum optimal.

2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah
 - a. Kontribusi pendapatan asli daerah terhadap seluruh pendapatan daerah masih relatif kecil yaitu 28,41% sehingga tingkat ketergantungan terhadap dana pusat dan provinsi masih tinggi;
 - b. Inovasi dan penggalan sumber pendapatan daerah baru belum optimal;
 - c. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan pendapatan asli daerah belum dilakukan secara maksimal.
3. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - a. Sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah belum didukung oleh sarana dan prasarana serta SDM yang handal;
 - b. Sistem manajemen aset daerah Kabupaten Karawang belum didukung oleh sarana dan prasarana serta SDM yang kompeten.
 - c. Masih banyak aset-aset daerah tidak bergerak (tanah dan bangunan) Pemerintah Daerah yang belum memiliki kelengkapan dokumen hak-hak keperdataan lahan.
 - d. Belum optimalnya pengelolaan asset-aset daerah untuk menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD).
4. Penataan dan Penegakan Peraturan Daerah
 - a. Penataan dan penegakan atas peraturan daerah belum efektif;
 - b. Sumberdaya manusia penegak Perda (PPNS) terbatas;
 - c. Kesadaran masyarakat untuk mematuhi atas perda masih rendah;
 - d. Sosialisasi atas Perda masih kurang.
5. Pelayanan Perijinan
 - a. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang tata cara dan manfaat perijinan
 - b. Implementasi mekanisme dan prosedur pelayanan perijinan belum optimal;

- c. Jumlah dan kualitas sumberdaya manusia pengelola pelayanan perijinan masih terbatas;
 - d. Tindak lanjut pengaduan masyarakat atas pelayanan perijinan belum optimal;
6. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
 - a. Kelembagaan yang efektif dan efisien serta ramping struktur dan kaya fungsi belum terwujud;
 - b. Belum semua lembaga pemerintah memiliki SPM (Standar Pelayanan Minimal).
 7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
 - a. Nilai akuntabilitas dan manajemen kinerja pemerintah Kabupaten Karawang masih rendah, hal tersebut terlihat dari hasil penilaian BPKP terhadap LAKIP Kabupaten Karawang serta berdasarkan hasil evaluasi inspektorat terhadap LAKIP OPD;
 - b. Pemahaman terhadap tata cara penyusunan LAKIP masih rendah
 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 - a. Standar Pelayanan belum berkembang.
 - b. Pelaksanaan SPM masih belum optimal;
 - c. Jumlah dan kualitas sumberdaya manusia yang memberikan pelayanan publik belum memadai;
 - d. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik belum optimal.

4.1.4.5 Persandian

1. Kelembagaan dan kebijakan urusan persandian untuk pengamanan informasi mengalami perubahan;
2. Sumberdaya manusia urusan persandian yang masih kurang;
3. Terbatasnya sarana dan prasarana serta peralatan persandian.

4.1.4.6 Kepegawaian

1. Proses rekrutmen ASN di daerah masih belum optimal;
2. Sistem informasi kepegawaian belum diterapkan secara komprehensif

3. Pembinaan kepegawaian berupa sanksi dan penghargaan belum sepenuhnya dilaksanakan;
4. Pola karir pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang belum dilaksanakan secara konsisten
5. Kompetensi sumberdaya aparatur belum sepenuhnya sesuai dengan penempatannya
6. Ketersediaan sarana dan prasarana serta SDM aparatur yang profesional berbasis *good governance* dan *clean governance* untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

4.1.4.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Sumberdaya manusia pengelola pemberdayaan masyarakat belum optimal;
2. Program pemberdayaan masyarakat masih ada yang kurang tepat sasaran;
3. Akuntabilitas dan mekanisme pelaporan masih lemah;
4. Partisipasi masyarakat belum optimal dan terbatas pada kelompok tertentu.

4.1.4.8 Transmigrasi

1. Target penempatan calon transmigran masih tergantung pada pemerintah provinsi, sehingga tidak sesuai dengan minat calon transmigran;
2. Minat masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi masih rendah.

4.1.4.9 Kearsipan

1. Manajemen kearsipan belum sistematis;
2. Sumberdaya pengelola dan sarana pendukung kearsipan masih kurang;
3. Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan arsip masih rendah.

4.1.4.10 Perpustakaan

1. Masih kurangnya sarana dan prasarana perpustakaan baik pada ruang layanan umum, layanan anak maupun perpustakaan keliling, khususnya armada motor pintar;

2. Pelayanan perpustakaan belum berbasis teknologi informasi;
3. Kompetensi sumberdaya aparatur pengelola perpustakaan masih belum memadai;
4. Keberadaan perpustakaan daerah belum dikenal luas oleh masyarakat;
5. Belum adanya kerjasama yang sinergis antara perpustakaan dengan lembaga lain dalam hal penambahan koleksi buku bacaan.

4.2. Isu Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, isu strategis adalah kondisi/hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah kerana dampaknya yang signifikan bagi daerah. Kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik isu strategis adalah kondisi/hal bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang.

4.2.1 Isu Strategis Kabupaten Karawang

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap permasalahan-permasalahan pembangunan diatas, maka pada subbab ini akan dilakukan perumusan isu strategis pengembangan Kabupaten Karawang lima tahun kedepan. Perumusan isu-isu strategis juga memperhatikan 9 (sembilan) janji Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada saat kampanye, antara lain :

1. Jaminan pembiayaan pendidikan untuk semua penduduk Karawang sampai jenjang pendidikan menengah, serta program kesetaraan Paket A, B dan C;
2. Jaminan pembiayaan kesehatan untuk semua penduduk Karawang terlayani 100% di pelayanan dasar;

3. Pembangunan infrastruktur termasuk jalan dan jembatan yang mendukung perekonomian daerah;
4. Penerapan *e-government*, Standar Pelayanan Minimal, dan Standar Pelayanan Publik;
5. Rehabilitasi rumah tidak layak huni selesai 100% pada masa periode terpilih melalui pembiayaan dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan CSR serta skema pembiayaan inovatif;
6. Pembangunan destinasi wisata alam dan budaya lokal;
7. Fasilitasi permodalan dan pelatihan industri kecil serta ekonomi kreatif;
8. Menerapkan konsep *link and match* dalam pendidikan dan peluang lapangan kerja, serta merintis industri yang mendukung UKM;
9. Peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diidentifikasi serta janji Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye, maka dirumuskan [L]beberapa isu strategis di Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pencapaian indikator dan Standar Pelayanan Minimal dalam pelayanan pendidikan dan kesehatan;
2. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur wilayah yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal. Diantaranya berupa kemantapan, jaringan dan kualitas jalan (termasuk trotoar, marka jalan, dan rambu lalu lintas), saluran drainase, infrastruktur pengelolaan sampah dan air limbah, infrastruktur air bersih dan sanitasi, infrastruktur irigasi;
3. Belum mantapnya ketahanan pangan daerah;
4. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana serta SDM aparatur yang profesional berbasiskan *good governance* dan *clean governance* untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
5. Belum optimalnya penggunaan dan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan RTRW dan peraturan ketataruangan;

6. Masih perlu ditingkatkannya pemberdayaan usaha mikro kecil maupun menengah yang mewakili keunikan lokal dalam pemasaran dan permodalan serta tantangan perdagangan bebas;
7. Masih perlu ditingkatkan pengelolaan potensi destinasi pariwisata secara baik dan profesional;
8. Pembangunan sosial budaya dan kehidupan beragama belum mencapai sasaran yang optimal;
9. Perlunya peningkatan peran kepemudaan dan masih belum optimalnya pengendalian jumlah penduduk dan KB serta pemberdayaan perempuan dan anak;
10. Pembangunan bidang politik, hukum dan keamanan belum optimal;
11. Belum efektifnya tata kelola lingkungan hidup yang baik sehingga kegiatan pembangunan tidak menimbulkan dampak berupa kerusakan lingkungan dan penurunan daya dukung/degradasi lingkungan.

Menindaklanjuti isu-isu strategis di atas, pemerintah Kabupaten Karawang menetapkan 8 (delapan) prioritas pembangunan. Keterkaitan antara isu strategis dan prioritas pembangunan ditampilkan dalam tabel berikut:

Isu Strategis	Prioritas Pembangunan
Belum optimalnya pencapaian indikator dan Standar Pelayanan Minimal dalam pelayanan pendidikan dan kesehatan	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan
Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana serta SDM aparatur yang profesional berbasis <i>good governance</i> dan <i>clean governance</i> untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik	Pemantapan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintahan desa dan pembangunan desa
Perlunya pemantapan peran kepemudaan dan masih belum optimalnya pengendalian jumlah penduduk dan KB serta pemberdayaan perempuan dan anak	Peningkatan peran kepemudaan dan olahraga, pengendalian penduduk, keluarga berencana, serta pemberdayaan perempuan

Isu Strategis	Prioritas Pembangunan
<p>1. Masih perlu ditingkatkannya pemberdayaan usaha mikro kecil maupun menengah yang mewakili keunikan lokal dalam pemasaran dan permodalan serta tantangan perdagangan bebas</p> <p>2. Belum mantapnya ketahanan pangan daerah</p>	<p>Penurunan angka pengangguran dan perlindungan ketenagakerjaan, peningkatan ekonomi masyarakat, termasuk peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan dan peran serta swasta melalui kebijakan investasi dan CSR</p>
<p>1. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur wilayah yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal. Diantaranya berupa kemantapan, jaringan dan kualitas jalan (termasuk trotoar, marka jalan, dan rambu lalu lintas), saluran drainase, infrastruktur pengelolaan sampah dan air limbah, infrastruktur air bersih dan sanitasi, infrastruktur irigasi</p> <p>2. Belum optimalnya penggunaan dan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan RTRW dan peraturan ketataruangan</p>	<p>Peningkatan kualitas infrastruktur dan penataan kota</p>
<p>Belum efektifnya tata kelola lingkungan hidup yang baik sehingga kegiatan pembangunan tidak menimbulkan dampak berupa kerusakan lingkungan dan penurunan daya dukung/degradasi lingkungan</p>	<p>Peningkatan upaya pengelolaan lingkungan hidup, sanitasi, pengurangan resiko bencana dan pengelolaan sumberdaya air</p>
<p>1. Pembangunan sosial budaya dan kehidupan beragama belum mencapai sasaran yang optimal</p>	<p>Peningkatan pelayanan kepada PMKS dan pengembangan kehidupan beragama yang harmonis</p>

Isu Strategis	Prioritas Pembangunan
2. Pembangunan bidang politik, hukum dan keamanan belum optimal	
Masih perlu ditingkatkan pengelolaan potensi destinasi pariwisata secara baik dan profesional	Pelestarian nilai-nilai sejarah, kearifan dan potensi lokal dalam mendukung pengembangan destinasi wisata

4.2.2 Rekomendasi KLHS RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021

Indikator TPB	Kondisi 6 Muatan Kajian	Kondisi Indikator TPB	Arahan Program (Alternatif)	Rekomendasi
1	2	3	4	5
Misi 1 : Mewujudkan Aparatur Pemerintah Daerah yang Bersih dan Berwibawa				
16.9.1.(b) Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	<p>(1) Daya Dukung Air Terparah : Kec.Rengasdengklok,Kec. Karawang Barat, Kec.Karawang Timur, Kec. Telukjambe Timur, Kec.Klari, Kec.Cikampek, dan Kec.Kotabaru</p> <p>(2) Daya Dukung Pangan sudah terlampaui terdapat di Kec.Kotabaru, Kec.Klari, Kec. Cikampek, Kec. Telukjambe Timur, Kec.Majalaya, Kec.Karawang Timur, Kec.Karawang Barat, Kec.Pangkalan</p> <p>(3) Daya Dukung Fungsi Lahan Lindung memiliki indeks 0,48 termasuk kategori kualitas daya dukung lahan sedang</p> <p>(4) Daya Dukung Lahan Terbangun memiliki indeks 3,36 termasuk kategori daya dukung</p>	Masih terdapat anak yang belum memiliki akta kelahiran, Ketercapaian baru mencapai 83,33 persen	Peningkatan Pencatatan Kependudukan, Peningkatan kualitas pelayanan administrasi, Peningkatan Dokumentasi Arsip.	Meningkatkan kinerja dan pengembangan sistem pelaporan dan pelayanan publik; Meningkatkan pelayanan publik dengan berteknologi; Meningkatkan Pencatatan Kependudukan, Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi, Meningkatkan Dokumentasi Arsip.

Indikator TPB	Kondisi 6 Muatan Kajian	Kondisi Indikator TPB	Arahan Program (Alternatif)	Rekomendasi
1	2	3	4	5
	<p>lahan terbangun kondisi baik</p> <p>(5) Daya Tampung penduduk yang sudah terlampaui pada tahun 2024 yaitu Kecamatan Cikampek, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Karawang Barat, Kecamatan Rengasdengklok, Kecamatan Klari, Kecamatan Telukjambe Timur dan Kecamatan Purwasari</p> <p>(6) Dampak dan Risiko LH pencemaran air di Sungai Citarum, Sungai Cilamya, Sungai Cikaranggalam dan Sungai Cibeet yang merupakan badan air penerima buangan oleh beberapa industri, pertumbuhan lahan kritis terus terjadi di lahan-lahan pertanian terluas di Kec.Pedes seluas 5.615 Ha, Timbulan sampah tertinggi dan belum optimal pelayanan persampahan di Kec.Rengasdengklok, Kec.Karawang Barat, Kec.Karawang Timur, Kec.Telukjambe Timur, Kec.Klari, Kec.Cikampek, dan Kec.Kotabaru, Jumlah emisi paling besar (Emisi CO2 akibat penggunaan pupuk</p>			

Indikator TPB	Kondisi 6 Muatan Kajian	Kondisi Indikator TPB	Arahan Program (Alternatif)	Rekomendasi
1	2	3	4	5
	<p>urea terdapat di kawasan pertanian (tinggi pangan) yaitu Kec.Tempuran, Kec.Tirtajaya, Kec.Cilamaya Kulon, dan Kec.Cilebar. Sementara itu peningkatan emisi CO2 akibat aktifitas kawasan perkotaan dan kawasan industri terdapat di daerah industri, terminal, pusat perbelanjaan (Kec.Cikampek, Kec.Purwasari, Kec.Klari, Kec.Telukjambe Timur, Kec.Karawang Timur, dan Kec.Pangkalan).</p> <p>(7) KEHATI Tentang flora khas tersebut, Bina Kependudukan dan Lingkungan Hidup Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tahun 1993/1994 menetapkan bahwa Jambu Air Cingcalo (Syzuim aquem) sebagai flora khas Daerah Kabupaten Karawang</p> <p>(8) Kerawanan Bencana Banjir, Erosi, Rawan Gelombang Pasang dan Kekeringan</p>			
Misi 2 : Mewujudkan Kabupaten Karawang yang Berdaya Saing				

Indikator TPB	Kondisi 6 Muatan Kajian	Kondisi Indikator TPB	Arahan Program (Alternatif)	Rekomendasi
1	2	3	4	5
<p>3.2.2.(a) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.</p>	<p>(1) Daya Dukung Air Terparah : Kec.Rengasdengklok,Kec. Karawang Barat, Kec.Karawang Timur, Kec. Telukjambe Timur, Kec.Klari, Kec.Cikampek, dan Kec.Kotabaru (2) Daya Dukung Pangan sudah terlampaui terdapat di Kec.Kotabaru, Kec.Klari, Kec. Cikampek, Kec. Telukjambe Timur, Kec.Majalaya, Kec.Karawang Timur, Kec.Karawang Barat, Kec.Pangkalan (3) Daya Dukung Fungsi Lahan Lindung memiliki indeks 0,48 termasuk kategori kualitas daya dukung lahan sedang (4) Daya Dukung Lahan Terbangun memiliki indeks 3,36 termasuk kategori daya dukung lahan terbangun kondisi baik (5) Daya Tampung penduduk yang sudah terlampaui pada tahun 2024 yaitu Kecamatan Cikampek, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Karawang Barat, Kecamatan Rengasdengklok, Kecamatan</p>	<p>Masih mengkhawatirkannya Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Bayi di Kabupaten Karawang sebesar 189 kematian bayi per 1.000 kelahiran pada tahun 2015, Gap AKB dengan target nasional masih sangat besar, Penurunan AKB masih belum optimal.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pelayanan kesehatan primer terutama di Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Karawang Barat, dan Kecamatan Rengasdengklok. 2. Peningkatan kualitas jaminan kesehatan nasional dan fasilitas kesehatan terutama di Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Karawang Barat, dan Kecamatan Rengasdengklok. 3. Peningkatan kualitas kesehatan penduduk miskin dan tidak mampu terutama di Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Karawang Barat, dan Kecamatan Rengasdengklok. 4. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak terutama di Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan 	<p>Menetapkan target penurunan Angka Kematian Bayi 47 kasus per 1000 kelahiran per tahun; Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak terutama di Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Karawang Barat, dan Kecamatan Rengasdengklok; Meningkatkan kualitas jaminan kesehatan nasional dan fasilitas kesehatan terutama di Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Karawang Barat, dan Kecamatan Rengasdengklok.terutama a untuk penduduk miskin dan kurang mampu; Meningkatkan pelayanan kesehatan tingkat terbawah (bidan siaga dan puskesmas siaga) terutama di Kecamatan Karawang</p>

Indikator TPB	Kondisi 6 Muatan Kajian	Kondisi Indikator TPB	Arahan Program (Alternatif)	Rekomendasi
1	2	3	4	5
	<p>Klari, Kecamatan Telukjambe Timur dan Kecamatan Purwasari (6) Dampak dan Risiko LH pencemaran air di Sungai Citarum, Sungai Cilamya, Sungai Cikarangelam dan Sungai Cibeet yang merupakan badan air penerima buangan oleh beberapa industri, pertumbuhan lahan kritis terus terjadi di lahan-lahan pertanian terluas di Kec.Pedes seluas 5.615 Ha, Timbulan sampah tertinggi dan belum optimal pelayanan persampahan di Kec.Rengasdengklok, Kec.Karawang Barat, Kec.Karawang Timur, Kec.Telukjambe Timur, Kec.Klari, Kec.Cikampek, dan Kec.Kotabaru, Jumlah emisi paling besar (Emisi CO₂ akibat penggunaan pupuk urea terdapat di kawasan pertanian (tinggi pangan) yaitu Kec.Tempuran, Kec.Tirtajaya, Kec.Cilamaya Kulon, dan Kec.Cilebar. Sementara itu peningkatan emisi CO₂ akibat aktifitas kawasan perkotaan dan kawasan industri terdapat di daerah industri,</p>		<p>Karawang Barat, dan Kecamatan Rengasdengklok.</p>	<p>Timur, Kecamatan Karawang Barat, dan Kecamatan Rengasdengklok.</p>

Indikator TPB	Kondisi 6 Muatan Kajian	Kondisi Indikator TPB	Arahan Program (Alternatif)	Rekomendasi
1	2	3	4	5
	<p>terminal, pusat perbelanjaan (Kec.Cikampek, Kec.Purwasari, Kec.Klari, Kec.Telukjambe Timur, Kec.Karawang Timur, dan Kec.Pangkalan).</p> <p>(7) KEHATI Tentang flora khas tersebut, Bina Kependudukan dan Lingkungan Hidup Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tahun 1993/1994 menetapkan bahwa Jambu Air Cingcalo (Syzuim aquem) sebagai flora khas Daerah Kabupaten Karawang</p> <p>(8) Kerawanan Bencana Banjir, Erosi, Rawan Gelombang Pasang dan Kekeringan</p>			

Indikator TPB	Kondisi 6 Muatan Kajian	Kondisi Indikator TPB	Arahan Program (Alternatif)	Rekomendasi
1	2	3	4	5
<p>Jumlah remaja usia 15-24 tahun yang mendapat penyuluhan tentang kesehatan reproduksi (Kespro), HIV/AIDS dan keluarga berencana (KB)</p>	<p>(1) Daya Dukung Air Terparah : Kec.Rengasdengklok,Kec. Karawang Barat, Kec.Karawang Timur, Kec. Telukjambe Timur, Kec.Klari, Kec.Cikampek, dan Kec.Kotabaru (2) Daya Dukung Pangan sudah terlampaui terdapat di Kec.Kotabaru, Kec.Klari, Kec. Cikampek, Kec. Telukjambe Timur, Kec.Majalaya, Kec.Karawang Timur, Kec.Karawang Barat, Kec.Pangkalan (3) Daya Dukung Fungsi Lahan Lindung memiliki indeks 0,48 termasuk kategori kualitas daya dukung lahan sedang (4) Daya Dukung Lahan Terbangun memiliki indeks 3,36 termasuk kategori daya dukung lahan terbangun kondisi baik (5) Daya Tampung penduduk yang sudah terlampaui pada tahun 2024 yaitu Kecamatan Cikampek, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Karawang Barat, Kecamatan Rengasdengklok, Kecamatan</p>	<p>Belum optimalnya pengendalian penyakit menular terutama HIV/AIDS, Angka perkembangan kasus HIV/AIDS di Kabupaten Karawang menunjukkan peningkatan, Kecenderungan kecamatan-kecamatan yang memiliki peningkatan persentase penderita HIV secara signifikan adalah Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Karawang Barat, dan Kecamatan Rengasdengklok.</p>	<p>1. Peningkatan kualitas pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular terutama di Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Karawang Barat, dan Kecamatan Rengasdengklok. 2. Peningkatan kualitas kompetensi Sumber Daya Manusia kesehatan terutama di Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Karawang Barat, dan Kecamatan Rengasdengklok. 3. Peningkatan kualitas jaminan kesehatan nasional dan fasilitas kesehatan terutama di Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Karawang Barat, dan Kecamatan Rengasdengklok.</p>	<p>Meningkatkan pendidikan pencegahan HIV atau penyakit menular lainnya sejak dini terutama di Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Karawang Barat, dan Kecamatan Rengasdengklok; Meningkatkan kualitas kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan (dokter siaga, penyuluh kesehatan siaga) terutama di Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Karawang Barat, dan Kecamatan Rengasdengklok; Meningkatkan kualitas jaminan kesehatan terutama di Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Karawang Barat, dan Kecamatan Rengasdengklok.</p>

Indikator TPB	Kondisi 6 Muatan Kajian	Kondisi Indikator TPB	Arahan Program (Alternatif)	Rekomendasi
1	2	3	4	5
	<p>Klari, Kecamatan Telukjambe Timur dan Kecamatan Purwasari (6) Dampak dan Risiko LH pencemaran air di Sungai Citarum, Sungai Cilamya, Sungai Cikaranggalam dan Sungai Cibee yang merupakan badan air penerima buangan oleh beberapa industri, pertumbuhan lahan kritis terus terjadi di lahan-lahan pertanian terluas di Kec.Pedes seluas 5.615 Ha, Timbulan sampah tertinggi dan belum optimal pelayanan persampahan di Kec.Rengasdengklok, Kec.Karawang Barat, Kec.Karawang Timur, Kec.Telukjambe Timur, Kec.Klari, Kec.Cikampek, dan Kec.Kotabaru, Jumlah emisi paling besar (Emisi CO₂ akibat penggunaan pupuk urea terdapat di kawasan pertanian (tinggi pangan) yaitu Kec.Tempuran, Kec.Tirtajaya, Kec.Cilamaya Kulon, dan Kec.Cilebar. Sementara itu peningkatan emisi CO₂ akibat aktifitas kawasan perkotaan dan kawasan industri terdapat di daerah industri,</p>			

Indikator TPB	Kondisi 6 Muatan Kajian	Kondisi Indikator TPB	Arahan Program (Alternatif)	Rekomendasi
1	2	3	4	5
	<p>terminal, pusat perbelanjaan (Kec.Cikampek, Kec.Purwasari, Kec.Klari, Kec.Telukjambe Timur, Kec.Karawang Timur, dan Kec.Pangkalan).</p> <p>(7) KEHATI Tentang flora khas tersebut, Bina Kependudukan dan Lingkungan Hidup Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tahun 1993/1994 menetapkan bahwa Jambu Air Cingcalo (Syzuim aquem) sebagai flora khas Daerah Kabupaten Karawang</p> <p>(8) Kerawanan Bencana Banjir, Erosi, Rawan Gelombang Pasang dan Kekeringan</p>			

Indikator TPB	Kondisi 6 Muatan Kajian	Kondisi Indikator TPB	Arahan Program (Alternatif)	Rekomendasi
1	2	3	4	5
3.7.2.(a) Total Fertility Rate (TFR).	<p>(1) Daya Dukung Air Terparah : Kec.Rengasdengklok,Kec. Karawang Barat, Kec.Karawang Timur, Kec. Telukjambe Timur, Kec.Klari, Kec.Cikampek, dan Kec.Kotabaru</p> <p>(2) Daya Dukung Pangan sudah terlampaui terdapat di Kec.Kotabaru, Kec.Klari, Kec. Cikampek, Kec. Telukjambe Timur, Kec.Majalaya, Kec.Karawang Timur, Kec.Karawang Barat, Kec.Pangkalan</p> <p>(3) Daya Dukung Fungsi Lahan Lindung memiliki indeks 0,48 termasuk kategori kualitas daya dukung lahan sedang</p> <p>(4) Daya Dukung Lahan Terbangun memiliki indeks 3,36 termasuk kategori daya dukung lahan terbangun kondisi baik</p> <p>(5) Daya Tampung penduduk yang sudah terlampaui pada tahun 2024 yaitu Kecamatan Cikampek, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Karawang Barat, Kecamatan Rengasdengklok, Kecamatan</p>	<p>Angka kelahiran di Kabupaten Karawang masih tinggi dengan angka kelahiran kasar 16. Sementara itu target RPJMN untuk TFR adalah menurun hingga 2,28. Jika angka TFR ini tidak terkontrol maka akan mendorong laju pertumbuhan penduduk yang tinggi di Kabupaten Karawang</p>	<p>Program Keluarga Berencana; Program Kesehatan Reproduksi Remaja; Program Pelayanan Kontrasepsi; Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri</p>	<p>Program Keluarga Berencana; Program Kesehatan Reproduksi Remaja; Program Pelayanan Kontrasepsi; Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri</p>

Indikator TPB	Kondisi 6 Muatan Kajian	Kondisi Indikator TPB	Arahan Program (Alternatif)	Rekomendasi
1	2	3	4	5
	<p>Klari, Kecamatan Telukjambe Timur dan Kecamatan Purwasari (6) Dampak dan Risiko LH pencemaran air di Sungai Citarum, Sungai Cilamya, Sungai Cikaranggelam dan Sungai Cibeet yang merupakan badan air penerima buangan oleh beberapa industri, pertumbuhan lahan kritis terus terjadi di lahan-lahan pertanian terluas di Kec.Pedes seluas 5.615 Ha, Timbulan sampah tertinggi dan belum optimal pelayanan persampahan di Kec.Rengasdengklok, Kec.Karawang Barat, Kec.Karawang Timur, Kec.Telukjambe Timur, Kec.Klari, Kec.Cikampek, dan Kec.Kotabaru, Jumlah emisi paling besar (Emisi CO₂ akibat penggunaan pupuk urea terdapat di kawasan pertanian (tinggi pangan) yaitu Kec.Tempuran, Kec.Tirtajaya, Kec.Cilamaya Kulon, dan Kec.Cilebar. Sementara itu peningkatan emisi CO₂ akibat aktifitas kawasan perkotaan dan kawasan industri terdapat di daerah industri,</p>			

Indikator TPB	Kondisi 6 Muatan Kajian	Kondisi Indikator TPB	Arahan Program (Alternatif)	Rekomendasi
1	2	3	4	5
	<p>terminal, pusat perbelanjaan (Kec.Cikampek, Kec.Purwasari, Kec.Klari, Kec.Telukjambe Timur, Kec.Karawang Timur, dan Kec.Pangkalan).</p> <p>(7) KEHATI Tentang flora khas tersebut, Bina Kependudukan dan Lingkungan Hidup Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tahun 1993/1994 menetapkan bahwa Jambu Air Cingcalo (Syzuim aquem) sebagai flora khas Daerah Kabupaten Karawang</p> <p>(8) Kerawanan Bencana Banjir, Erosi, Rawan Gelombang Pasang dan Kekeringan</p>			

Indikator TPB	Kondisi 6 Muatan Kajian	Kondisi Indikator TPB	Arahan Program (Alternatif)	Rekomendasi
1	2	3	4	5
<p>4.1.1.(e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/ sederajat.</p>	<p>(1) Daya Dukung Air Terparah : Kec.Rengasdengklok, Kec. Karawang Barat, Kec.Karawang Timur, Kec. Telukjambe Timur, Kec.Klari, Kec.Cikampek, dan Kec.Kotabaru (2) Daya Dukung Pangan sudah terlampaui terdapat di Kec.Kotabaru, Kec.Klari, Kec. Cikampek, Kec. Telukjambe Timur, Kec.Majalaya, Kec.Karawang Timur, Kec.Karawang Barat, Kec.Pangkalan (3) Daya Dukung Fungsi Lahan Lindung memiliki indeks 0,48 termasuk kategori kualitas daya dukung lahan sedang (4) Daya Dukung Lahan Terbangun memiliki indeks 3,36 termasuk kategori daya dukung lahan terbangun kondisi baik (5) Daya Tampung penduduk yang sudah terlampaui pada tahun 2024 yaitu Kecamatan Cikampek, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Karawang Barat, Kecamatan Rengasdengklok, Kecamatan</p>	<p>Belum tuntasnya program wajib belajar 9 Tahun di Kabupaten Karawang, Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan bagi anak, Masih adanya kasus putus sekolah atau tidak tamat SMP sederajat, Kecamatan yang masih memiliki angka partisipasi sekolah yang kecil adalah Kecamatan Cilebar, Kecamatan Majalaya, Kecamatan Ciampel, Kecamatan Tegalwaru, Kecamatan Pangkalan dan Kecamatan Banyusari.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan cakupan pelayanan untuk wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. 2. Peningkatan pendidikan non formal terutama 3. Pemerataan tenaga pendidik berkualitas 4. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pendidikan 	<p>Meningkatkan pemerataan wajib belajar 9 tahun Meningkatkan pemerataan tenaga pendidik berkualitas Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pemerintah dan fasilitas pendidikan Meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya pendidikan.</p>

Indikator TPB	Kondisi 6 Muatan Kajian	Kondisi Indikator TPB	Arahan Program (Alternatif)	Rekomendasi
1	2	3	4	5
	<p>Klari, Kecamatan Telukjambe Timur dan Kecamatan Purwasari (6) Dampak dan Risiko LH pencemaran air di Sungai Citarum, Sungai Cilamya, Sungai Cikaranggalam dan Sungai Cibee yang merupakan badan air penerima buangan oleh beberapa industri, pertumbuhan lahan kritis terus terjadi di lahan-lahan pertanian terluas di Kec.Pedes seluas 5.615 Ha, Timbulan sampah tertinggi dan belum optimal pelayanan persampahan di Kec.Rengasdengklok, Kec.Karawang Barat, Kec.Karawang Timur, Kec.Telukjambe Timur, Kec.Klari, Kec.Cikampek, dan Kec.Kotabaru, Jumlah emisi paling besar (Emisi CO₂ akibat penggunaan pupuk urea terdapat di kawasan pertanian (tinggi pangan) yaitu Kec.Tempuran, Kec.Tirtajaya, Kec.Cilamaya Kulon, dan Kec.Cilebar. Sementara itu peningkatan emisi CO₂ akibat aktifitas kawasan perkotaan dan kawasan industri terdapat di daerah industri,</p>			

Indikator TPB	Kondisi 6 Muatan Kajian	Kondisi Indikator TPB	Arahan Program (Alternatif)	Rekomendasi
1	2	3	4	5
	<p>terminal, pusat perbelanjaan (Kec.Cikampek, Kec.Purwasari, Kec.Klari, Kec.Telukjambe Timur, Kec.Karawang Timur, dan Kec.Pangkalan).</p> <p>(7) KEHATI Tentang flora khas tersebut, Bina Kependudukan dan Lingkungan Hidup Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tahun 1993/1994 menetapkan bahwa Jambu Air Cingcalo (Syzuim aquem) sebagai flora khas Daerah Kabupaten Karawang</p> <p>(8) Kerawanan Bencana Banjir, Erosi, Rawan Gelombang Pasang dan Kekeringan</p>			

Indikator TPB	Kondisi 6 Muatan Kajian	Kondisi Indikator TPB	Arahan Program (Alternatif)	Rekomendasi
1	2	3	4	5
<p>4.1.1.(f) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/MA/ sederajat.</p>	<p>(1) Daya Dukung Air Terparah : Kec.Rengasdengklok,Kec. Karawang Barat, Kec.Karawang Timur, Kec. Telukjambe Timur, Kec.Klari, Kec.Cikampek, dan Kec.Kotabaru (2) Daya Dukung Pangan sudah terlampaui terdapat di Kec.Kotabaru, Kec.Klari, Kec. Cikampek, Kec. Telukjambe Timur, Kec.Majalaya, Kec.Karawang Timur, Kec.Karawang Barat, Kec.Pangkalan (3) Daya Dukung Fungsi Lahan Lindung memiliki indeks 0,48 termasuk kategori kualitas daya dukung lahan sedang (4) Daya Dukung Lahan Terbangun memiliki indeks 3,36 termasuk kategori daya dukung lahan terbangun kondisi baik (5) Daya Tampung penduduk yang sudah terlampaui pada tahun 2024 yaitu Kecamatan Cikampek, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Karawang Barat, Kecamatan Rengasdengklok, Kecamatan</p>	<p>Belum tuntasnya program wajib belajar 9 Tahun di Kabupaten Karawang, Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan bagi anak, rendahnya APK SMA baru mencapai 65,27 di tahun 2016, Kecamatan yang masih memiliki angka partisipasi sekolah yang kecil adalah Kecamatan Cilebar, Kecamatan Majalaya, Kecamatan Ciampel, Kecamatan Tegalwaru, Kecamatan Pangkalan dan Kecamatan Banyusari.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan cakupan pelayanan untuk wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. 2. Peningkatan pendidikan non formal terutama 3. Pemerataan tenaga pendidik berkualitas 4. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pendidikan 	<p>Meningkatkan pemerataan wajib belajar 9 tahun Meningkatkan pemerataan tenaga pendidik berkualitas Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pemerintah dan fasilitas pendidikan Meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya pendidikan.</p>

Indikator TPB	Kondisi 6 Muatan Kajian	Kondisi Indikator TPB	Arahan Program (Alternatif)	Rekomendasi
1	2	3	4	5
	<p>Klari, Kecamatan Telukjambe Timur dan Kecamatan Purwasari (6) Dampak dan Risiko LH pencemaran air di Sungai Citarum, Sungai Cilamya, Sungai Cikaranggelam dan Sungai Cibeet yang merupakan badan air penerima buangan oleh beberapa industri, pertumbuhan lahan kritis terus terjadi di lahan-lahan pertanian terluas di Kec.Pedes seluas 5.615 Ha, Timbulan sampah tertinggi dan belum optimal pelayanan persampahan di Kec.Rengasdengklok, Kec.Karawang Barat, Kec.Karawang Timur, Kec.Telukjambe Timur, Kec.Klari, Kec.Cikampek, dan Kec.Kotabaru, Jumlah emisi paling besar (Emisi CO₂ akibat penggunaan pupuk urea terdapat di kawasan pertanian (tinggi pangan) yaitu Kec.Tempuran, Kec.Tirtajaya, Kec.Cilamaya Kulon, dan Kec.Cilebar. Sementara itu peningkatan emisi CO₂ akibat aktifitas kawasan perkotaan dan kawasan industri terdapat di daerah industri,</p>			

Indikator TPB	Kondisi 6 Muatan Kajian	Kondisi Indikator TPB	Arahan Program (Alternatif)	Rekomendasi
1	2	3	4	5
	<p>terminal, pusat perbelanjaan (Kec.Cikampek, Kec.Purwasari, Kec.Klari, Kec.Telukjambe Timur, Kec.Karawang Timur, dan Kec.Pangkalan).</p> <p>(7) KEHATI Tentang flora khas tersebut, Bina Kependudukan dan Lingkungan Hidup Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tahun 1993/1994 menetapkan bahwa Jambu Air Cingcalo (Syzuim aquem) sebagai flora khas Daerah Kabupaten Karawang</p> <p>(8) Kerawanan Bencana Banjir, Erosi, Rawan Gelombang Pasang dan Kekeringan</p>			

Indikator TPB	Kondisi 6 Muatan Kajian	Kondisi Indikator TPB	Arahan Program (Alternatif)	Rekomendasi
1	2	3	4	5
4.1.1.(g) Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi	<p>(1) Daya Dukung Air Terparah : Kec.Rengasdengklok,Kec. Karawang Barat, Kec.Karawang Timur, Kec. Telukjambe Timur, Kec.Klari, Kec.Cikampek, dan Kec.Kotabaru</p> <p>(2) Daya Dukung Pangan sudah terlampaui terdapat di Kec.Kotabaru, Kec.Klari, Kec. Cikampek, Kec. Telukjambe Timur, Kec.Majalaya, Kec.Karawang Timur, Kec.Karawang Barat, Kec.Pangkalan</p> <p>(3) Daya Dukung Fungsi Lahan Lindung memiliki indeks 0,48 termasuk kategori kualitas daya dukung lahan sedang</p> <p>(4) Daya Dukung Lahan Terbangun memiliki indeks 3,36 termasuk kategori daya dukung lahan terbangun kondisi baik</p> <p>(5) Daya Tampung penduduk yang sudah terlampaui pada tahun 2024 yaitu Kecamatan Cikampek, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Karawang Barat, Kecamatan Rengasdengklok, Kecamatan</p>	<p>Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan bagi anak, Tingginya kasus putus sekolah, Masih sangat rendah APK perguruan tinggi hanya mencapai 11,24 di tahun 2015, Kecamatan yang masih memiliki angka partisipasi sekolah yang kecil adalah Kecamatan Cilebar, Kecamatan Majalaya, Kecamatan Ciampel, Kecamatan Tegalwaru, Kecamatan Pangkalan dan Kecamatan Banyusari.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan cakupan pelayanan untuk wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. 2. Peningkatan pendidikan non formal terutama 3. Pemerataan tenaga pendidik berkualitas 4. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pendidikan 	<p>Meningkatkan pemerataan wajib belajar 9 tahun</p> <p>Meningkatkan pemerataan tenaga pendidik berkualitas</p> <p>Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pemerintah dan fasilitas pendidikan</p> <p>Meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya pendidikan.</p>

Indikator TPB	Kondisi 6 Muatan Kajian	Kondisi Indikator TPB	Arahan Program (Alternatif)	Rekomendasi
1	2	3	4	5
	<p>Klari, Kecamatan Telukjambe Timur dan Kecamatan Purwasari (6) Dampak dan Risiko LH pencemaran air di Sungai Citarum, Sungai Cilamya, Sungai Cikaranggalam dan Sungai Cibeet yang merupakan badan air penerima buangan oleh beberapa industri, pertumbuhan lahan kritis terus terjadi di lahan-lahan pertanian terluas di Kec.Pedes seluas 5.615 Ha, Timbulan sampah tertinggi dan belum optimal pelayanan persampahan di Kec.Rengasdengklok, Kec.Karawang Barat, Kec.Karawang Timur, Kec.Telukjambe Timur, Kec.Klari, Kec.Cikampek, dan Kec.Kotabaru, Jumlah emisi paling besar (Emisi CO₂ akibat penggunaan pupuk urea terdapat di kawasan pertanian (tinggi pangan) yaitu Kec.Tempuran, Kec.Tirtajaya, Kec.Cilamaya Kulon, dan Kec.Cilebar. Sementara itu peningkatan emisi CO₂ akibat aktifitas kawasan perkotaan dan kawasan industri terdapat di daerah industri,</p>			

Indikator TPB	Kondisi 6 Muatan Kajian	Kondisi Indikator TPB	Arahan Program (Alternatif)	Rekomendasi
1	2	3	4	5
	<p>terminal, pusat perbelanjaan (Kec.Cikampek, Kec.Purwasari, Kec.Klari, Kec.Telukjambe Timur, Kec.Karawang Timur, dan Kec.Pangkalan).</p> <p>(7) KEHATI Tentang flora khas tersebut, Bina Kependudukan dan Lingkungan Hidup Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tahun 1993/1994 menetapkan bahwa Jambu Air Cingcalo (Syzuim aquem) sebagai flora khas Daerah Kabupaten Karawang</p> <p>(8) Kerawanan Bencana Banjir, Erosi, Rawan Gelombang Pasang dan Kekeringan</p>			

Indikator TPB	Kondisi 6 Muatan Kajian	Kondisi Indikator TPB	Arahan Program (Alternatif)	Rekomendasi
1	2	3	4	5
<p>4.5.1* Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMP/MTs/Sederajat (3) SMA/SMK/MA/ sederajat;</p>	<p>(1) Daya Dukung Air Terparah : Kec.Rengasdengklok,Kec. Karawang Barat, Kec.Karawang Timur, Kec. Telukjambe Timur, Kec.Klari, Kec.Cikampek, dan Kec.Kotabaru (2) Daya Dukung Pangan sudah terlampaui terdapat di Kec.Kotabaru, Kec.Klari, Kec. Cikampek, Kec. Telukjambe Timur, Kec.Majalaya, Kec.Karawang Timur, Kec.Karawang Barat, Kec.Pangkalan (3) Daya Dukung Fungsi Lahan Lindung memiliki indeks 0,48 termasuk kategori kualitas daya dukung lahan sedang (4) Daya Dukung Lahan Terbangun memiliki indeks 3,36 termasuk kategori daya dukung lahan terbangun kondisi baik (5) Daya Tampung penduduk yang sudah terlampaui pada tahun 2024 yaitu Kecamatan Cikampek, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Karawang Barat, Kecamatan Rengasdengklok, Kecamatan</p>	<p>Belum tuntasnya program wajib belajar 9 Tahun di Kabupaten Karawang, Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan bagi anak, Masih sangat rendah APM SMA sederajat baru mencapai 55,07 di tahun 2016, Ketersediaan Sekolah Menengah Kejuruan masih kurang, khususnya untuk jurusan yang sesuai dengan permintaan pasar tenaga kerja di Kabupaten Karawang</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan cakupan pelayanan untuk wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. 2. Peningkatan pendidikan non formal terutama 3. Pemerataan tenaga pendidik berkualitas 4. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pendidikan 	<p>Meningkatkan pemerataan wajib belajar 9 tahun Meningkatkan pemerataan tenaga pendidik berkualitas Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pemerintah dan fasilitas pendidikan Meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya pendidikan.</p>

Indikator TPB	Kondisi 6 Muatan Kajian	Kondisi Indikator TPB	Arahan Program (Alternatif)	Rekomendasi
1	2	3	4	5
	<p>Klari, Kecamatan Telukjambe Timur dan Kecamatan Purwasari (6) Dampak dan Risiko LH pencemaran air di Sungai Citarum, Sungai Cilamya, Sungai Cikaranggelam dan Sungai Cibeet yang merupakan badan air penerima buangan oleh beberapa industri, pertumbuhan lahan kritis terus terjadi di lahan-lahan pertanian terluas di Kec.Pedes seluas 5.615 Ha, Timbulan sampah tertinggi dan belum optimal pelayanan persampahan di Kec.Rengasdengklok, Kec.Karawang Barat, Kec.Karawang Timur, Kec.Telukjambe Timur, Kec.Klari, Kec.Cikampek, dan Kec.Kotabaru, Jumlah emisi paling besar (Emisi CO₂ akibat penggunaan pupuk urea terdapat di kawasan pertanian (tinggi pangan) yaitu Kec.Tempuran, Kec.Tirtajaya, Kec.Cilamaya Kulon, dan Kec.Cilebar. Sementara itu peningkatan emisi CO₂ akibat aktifitas kawasan perkotaan dan kawasan industri terdapat di daerah industri,</p>			

Indikator TPB	Kondisi 6 Muatan Kajian	Kondisi Indikator TPB	Arahan Program (Alternatif)	Rekomendasi
1	2	3	4	5
	<p>terminal, pusat perbelanjaan (Kec.Cikampek, Kec.Purwasari, Kec.Klari, Kec.Telukjambe Timur, Kec.Karawang Timur, dan Kec.Pangkalan).</p> <p>(7) KEHATI Tentang flora khas tersebut, Bina Kependudukan dan Lingkungan Hidup Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tahun 1993/1994 menetapkan bahwa Jambu Air Cingcalo (Syzuim aquem) sebagai flora khas Daerah Kabupaten Karawang</p> <p>(8) Kerawanan Bencana Banjir, Erosi, Rawan Gelombang Pasang dan Kekeringan</p>			

Indikator TPB	Kondisi 6 Muatan Kajian	Kondisi Indikator TPB	Arahan Program (Alternatif)	Rekomendasi
1	2	3	4	5
4.1.1.(g) Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	<p>(1) Daya Dukung Air Terparah : Kec.Rengasdengklok,Kec. Karawang Barat, Kec.Karawang Timur, Kec. Telukjambe Timur, Kec.Klari, Kec.Cikampek, dan Kec.Kotabaru</p> <p>(2) Daya Dukung Pangan sudah terlampaui terdapat di Kec.Kotabaru, Kec.Klari, Kec. Cikampek, Kec. Telukjambe Timur, Kec.Majalaya, Kec.Karawang Timur, Kec.Karawang Barat, Kec.Pangkalan</p> <p>(3) Daya Dukung Fungsi Lahan Lindung memiliki indeks 0,48 termasuk kategori kualitas daya dukung lahan sedang</p> <p>(4) Daya Dukung Lahan Terbangun memiliki indeks 3,36 termasuk kategori daya dukung lahan terbangun kondisi baik</p> <p>(5) Daya Tampung penduduk yang sudah terlampaui pada tahun 2024 yaitu Kecamatan Cikampek, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Karawang Barat, Kecamatan Rengasdengklok, Kecamatan</p>	<p>Belum optimalnya pencapaian indikator dan Standar Pelayanan Minimal dalam pelayanan pendidikan, Rata-rata lama sekolah pada tahun 2015 adalah 7,09 tahun, berarti tidak tamat kelas 2 SMP, Kondisi ini disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan bagi anak</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan cakupan pelayanan untuk wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. 2. Peningkatan pendidikan non formal terutama 3. Pemerataan tenaga pendidik berkualitas 4. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pendidikan 	<p>Meningkatkan pemerataan wajib belajar 9 tahun</p> <p>Meningkatkan pemerataan tenaga pendidik berkualitas</p> <p>Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pemerintah dan fasilitas pendidikan</p> <p>Meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya pendidikan.</p>

Indikator TPB	Kondisi 6 Muatan Kajian	Kondisi Indikator TPB	Arahan Program (Alternatif)	Rekomendasi
1	2	3	4	5
	<p>Klari, Kecamatan Telukjambe Timur dan Kecamatan Purwasari (6) Dampak dan Risiko LH pencemaran air di Sungai Citarum, Sungai Cilamya, Sungai Cikaranggelam dan Sungai Cibeet yang merupakan badan air penerima buangan oleh beberapa industri, pertumbuhan lahan kritis terus terjadi di lahan-lahan pertanian terluas di Kec.Pedes seluas 5.615 Ha, Timbulan sampah tertinggi dan belum optimal pelayanan persampahan di Kec.Rengasdengklok, Kec.Karawang Barat, Kec.Karawang Timur, Kec.Telukjambe Timur, Kec.Klari, Kec.Cikampek, dan Kec.Kotabaru, Jumlah emisi paling besar (Emisi CO₂ akibat penggunaan pupuk urea terdapat di kawasan pertanian (tinggi pangan) yaitu Kec.Tempuran, Kec.Tirtajaya, Kec.Cilamaya Kulon, dan Kec.Cilebar. Sementara itu peningkatan emisi CO₂ akibat aktifitas kawasan perkotaan dan kawasan industri terdapat di daerah industri,</p>			

Indikator TPB	Kondisi 6 Muatan Kajian	Kondisi Indikator TPB	Arahan Program (Alternatif)	Rekomendasi
1	2	3	4	5
	<p>terminal, pusat perbelanjaan (Kec.Cikampek, Kec.Purwasari, Kec.Klari, Kec.Telukjambe Timur, Kec.Karawang Timur, dan Kec.Pangkalan).</p> <p>(7) KEHATI Tentang flora khas tersebut, Bina Kependudukan dan Lingkungan Hidup Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tahun 1993/1994 menetapkan bahwa Jambu Air Cingcalo (Syzuim aquem) sebagai flora khas Daerah Kabupaten Karawang</p> <p>(8) Kerawanan Bencana Banjir, Erosi, Rawan Gelombang Pasang dan Kekeringan</p>			

Indikator TPB	Kondisi 6 Muatan Kajian	Kondisi Indikator TPB	Arahan Program (Alternatif)	Rekomendasi
1	2	3	4	5
8.9.1.(b) Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja TPAK	<p>(1) Daya Dukung Air Terparah : Kec.Rengasdengklok,Kec. Karawang Barat, Kec.Karawang Timur, Kec. Telukjambe Timur, Kec.Klari, Kec.Cikampek, dan Kec.Kotabaru</p> <p>(2) Daya Dukung Pangan sudah terlampaui terdapat di Kec.Kotabaru, Kec.Klari, Kec. Cikampek, Kec. Telukjambe Timur, Kec.Majalaya, Kec.Karawang Timur, Kec.Karawang Barat, Kec.Pangkalan</p> <p>(3) Daya Dukung Fungsi Lahan Lindung memiliki indeks 0,48 termasuk kategori kualitas daya dukung lahan sedang</p> <p>(4) Daya Dukung Lahan Terbangun memiliki indeks 3,36 termasuk kategori daya dukung lahan terbangun kondisi baik</p> <p>(5) Daya Tampung penduduk yang sudah terlampaui pada tahun 2024 yaitu Kecamatan Cikampek, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Karawang Barat, Kecamatan Rengasdengklok, Kecamatan</p>	Banyaknya jumlah pencari kerja pendatang dari luar Kabupaten Karawang, Masih rendahnya kualitas ketrampilan pencari kerja, Rendahnya motivasi dan daya juang angkatan kerja dalam bidang wirausaha dan sektor informal, tingkat pengangguran masih tinggi, rendahnya kesempatan kerja, TPAK baru mencapai 64,94	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja 2. Peningkatan peluang kesempatan kerja 3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia angkatan kerja 4. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah 	Menetapkan target angka partisipasi kerja 1,39 persen per tahun; Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja (pelatihan, pendidikan formal, keterampilan); Melakukan pelatihan kerja sesuai dengan kebutuhan atau peluang lapangan kerja; Menciptakan wirausaha muda yang kompetitif; Mengembangkan wirausaha berbasis potensi daerah.

Indikator TPB	Kondisi 6 Muatan Kajian	Kondisi Indikator TPB	Arahan Program (Alternatif)	Rekomendasi
1	2	3	4	5
	<p>Klari, Kecamatan Telukjambe Timur dan Kecamatan Purwasari (6) Dampak dan Risiko LH pencemaran air di Sungai Citarum, Sungai Cilamya, Sungai Cikaranggelam dan Sungai Cibeet yang merupakan badan air penerima buangan oleh beberapa industri, pertumbuhan lahan kritis terus terjadi di lahan-lahan pertanian terluas di Kec.Pedes seluas 5.615 Ha, Timbulan sampah tertinggi dan belum optimal pelayanan persampahan di Kec.Rengasdengklok, Kec.Karawang Barat, Kec.Karawang Timur, Kec.Telukjambe Timur, Kec.Klari, Kec.Cikampek, dan Kec.Kotabaru, Jumlah emisi paling besar (Emisi CO₂ akibat penggunaan pupuk urea terdapat di kawasan pertanian (tinggi pangan) yaitu Kec.Tempuran, Kec.Tirtajaya, Kec.Cilamaya Kulon, dan Kec.Cilebar. Sementara itu peningkatan emisi CO₂ akibat aktifitas kawasan perkotaan dan kawasan industri terdapat di daerah industri,</p>			

Indikator TPB	Kondisi 6 Muatan Kajian	Kondisi Indikator TPB	Arahan Program (Alternatif)	Rekomendasi
1	2	3	4	5
	<p>terminal, pusat perbelanjaan (Kec.Cikampek, Kec.Purwasari, Kec.Klari, Kec.Telukjambe Timur, Kec.Karawang Timur, dan Kec.Pangkalan).</p> <p>(7) KEHATI Tentang flora khas tersebut, Bina Kependudukan dan Lingkungan Hidup Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tahun 1993/1994 menetapkan bahwa Jambu Air Cingcalo (Syzuim aquem) sebagai flora khas Daerah Kabupaten Karawang</p> <p>(8) Kerawanan Bencana Banjir, Erosi, Rawan Gelombang Pasang dan Kekeringan</p>			

Indikator TPB	Kondisi 6 Muatan Kajian	Kondisi Indikator TPB	Arahan Program (Alternatif)	Rekomendasi
1	2	3	4	5
8.9.1.(a) Jumlah wisatawan mancanegara.	<p>(1) Daya Dukung Air Terparah : Kec.Rengasdengklok,Kec. Karawang Barat, Kec.Karawang Timur, Kec. Telukjambe Timur, Kec.Klari, Kec.Cikampek, dan Kec.Kotabaru</p> <p>(2) Daya Dukung Pangan sudah terlampaui terdapat di Kec.Kotabaru, Kec.Klari, Kec. Cikampek, Kec. Telukjambe Timur, Kec.Majalaya, Kec.Karawang Timur, Kec.Karawang Barat, Kec.Pangkalan</p> <p>(3) Daya Dukung Fungsi Lahan Lindung memiliki indeks 0,48 termasuk kategori kualitas daya dukung lahan sedang</p> <p>(4) Daya Dukung Lahan Terbangun memiliki indeks 3,36 termasuk kategori daya dukung lahan terbangun kondisi baik</p> <p>(5) Daya Tampung penduduk yang sudah terlampaui pada tahun 2024 yaitu Kecamatan Cikampek, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Karawang Barat, Kecamatan Rengasdengklok, Kecamatan</p>	Masih rendahnya jumlah wisatawan, Informasi serta promosi potensi ekonomi dan pelayanan perijinan melalui pemanfaatan teknologi informasi masih kurang optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja bidang pariwisata 2. Peningkatan program kemitraan daerah dalam pengembangan pariwisata 3. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 4. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 	Meningkatkan kualitas SDM pariwisata (bahasa, public speaking, promotion, tour guide); Mengadakan pelatihan keterampilan dalam penyusunan tourism planning; Meningkatkan pengembangan pemasaran pariwisata; Meningkatkan pemanfaatan informasi dan komunikasi serta media sosial untuk pemasaran destinasi wisata.

Indikator TPB	Kondisi 6 Muatan Kajian	Kondisi Indikator TPB	Arahan Program (Alternatif)	Rekomendasi
1	2	3	4	5
	<p>Klari, Kecamatan Telukjambe Timur dan Kecamatan Purwasari (6) Dampak dan Risiko LH pencemaran air di Sungai Citarum, Sungai Cilamya, Sungai Cikaranggelam dan Sungai Cibeet yang merupakan badan air penerima buangan oleh beberapa industri, pertumbuhan lahan kritis terus terjadi di lahan-lahan pertanian terluas di Kec.Pedes seluas 5.615 Ha, Timbulan sampah tertinggi dan belum optimal pelayanan persampahan di Kec.Rengasdengklok, Kec.Karawang Barat, Kec.Karawang Timur, Kec.Telukjambe Timur, Kec.Klari, Kec.Cikampek, dan Kec.Kotabaru, Jumlah emisi paling besar (Emisi CO₂ akibat penggunaan pupuk urea terdapat di kawasan pertanian (tinggi pangan) yaitu Kec.Tempuran, Kec.Tirtajaya, Kec.Cilamaya Kulon, dan Kec.Cilebar. Sementara itu peningkatan emisi CO₂ akibat aktifitas kawasan perkotaan dan kawasan industri terdapat di daerah industri,</p>			

Indikator TPB	Kondisi 6 Muatan Kajian	Kondisi Indikator TPB	Arahan Program (Alternatif)	Rekomendasi
1	2	3	4	5
	<p>terminal, pusat perbelanjaan (Kec.Cikampek, Kec.Purwasari, Kec.Klari, Kec.Telukjambe Timur, Kec.Karawang Timur, dan Kec.Pangkalan).</p> <p>(7) KEHATI Tentang flora khas tersebut, Bina Kependudukan dan Lingkungan Hidup Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tahun 1993/1994 menetapkan bahwa Jambu Air Cingcalo (Syzuim aquem) sebagai flora khas Daerah Kabupaten Karawang</p> <p>(8) Kerawanan Bencana Banjir, Erosi, Rawan Gelombang Pasang dan Kekeringan</p>			

Indikator TPB	Kondisi 6 Muatan Kajian	Kondisi Indikator TPB	Arahan Program (Alternatif)	Rekomendasi
1	2	3	4	5
2.2.2.(c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	<p>(1) Daya Dukung Air Terparah : Kec.Rengasdengklok,Kec. Karawang Barat, Kec.Karawang Timur, Kec. Telukjambe Timur, Kec.Klari, Kec.Cikampek, dan Kec.Kotabaru</p> <p>(2) Daya Dukung Pangan sudah terlampaui terdapat di Kec.Kotabaru, Kec.Klari, Kec. Cikampek, Kec. Telukjambe Timur, Kec.Majalaya, Kec.Karawang Timur, Kec.Karawang Barat, Kec.Pangkalan</p> <p>(3) Daya Dukung Fungsi Lahan Lindung memiliki indeks 0,48 termasuk kategori kualitas daya dukung lahan sedang</p> <p>(4) Daya Dukung Lahan Terbangun memiliki indeks 3,36 termasuk kategori daya dukung lahan terbangun kondisi baik</p> <p>(5) Daya Tampung penduduk yang sudah terlampaui pada tahun 2024 yaitu Kecamatan Cikampek, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Karawang Barat, Kecamatan Rengasdengklok, Kecamatan</p>	Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Karawang pada tahun 2018 mencapai 85,5. Perkiraan nilai akan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Masih terdapat gap dengan target RPJMN 2019 dengan menetapkan nilai sebesar 92,5	Program Peningkatan Ketahanan Pangan; Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan; Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Indikator TPB	Kondisi 6 Muatan Kajian	Kondisi Indikator TPB	Arahan Program (Alternatif)	Rekomendasi
1	2	3	4	5
	<p>Klari, Kecamatan Telukjambe Timur dan Kecamatan Purwasari (6) Dampak dan Risiko LH pencemaran air di Sungai Citarum, Sungai Cilamya, Sungai Cikaranggelam dan Sungai Cibeet yang merupakan badan air penerima buangan oleh beberapa industri, pertumbuhan lahan kritis terus terjadi di lahan-lahan pertanian terluas di Kec.Pedes seluas 5.615 Ha, Timbulan sampah tertinggi dan belum optimal pelayanan persampahan di Kec.Rengasdengklok, Kec.Karawang Barat, Kec.Karawang Timur, Kec.Telukjambe Timur, Kec.Klari, Kec.Cikampek, dan Kec.Kotabaru, Jumlah emisi paling besar (Emisi CO₂ akibat penggunaan pupuk urea terdapat di kawasan pertanian (tinggi pangan) yaitu Kec.Tempuran, Kec.Tirtajaya, Kec.Cilamaya Kulon, dan Kec.Cilebar. Sementara itu peningkatan emisi CO₂ akibat aktifitas kawasan perkotaan dan kawasan industri terdapat di daerah industri,</p>			

Indikator TPB	Kondisi 6 Muatan Kajian	Kondisi Indikator TPB	Arahan Program (Alternatif)	Rekomendasi
1	2	3	4	5
	<p>terminal, pusat perbelanjaan (Kec.Cikampek, Kec.Purwasari, Kec.Klari, Kec.Telukjambe Timur, Kec.Karawang Timur, dan Kec.Pangkalan).</p> <p>(7) KEHATI Tentang flora khas tersebut, Bina Kependudukan dan Lingkungan Hidup Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tahun 1993/1994 menetapkan bahwa Jambu Air Cingcalo (Syzuim aquem) sebagai flora khas Daerah Kabupaten Karawang</p> <p>(8) Kerawanan Bencana Banjir, Erosi, Rawan Gelombang Pasang dan Kekeringan</p>			

Indikator TPB	Kondisi 6 Muatan Kajian	Kondisi Indikator TPB	Arahan Program (Alternatif)	Rekomendasi
1	2	3	4	5
2.1.1.(a) Prevalensi bayi penderita gizi buruk	<p>(1) Daya Dukung Air Terparah : Kec.Rengasdengklok,Kec. Karawang Barat, Kec.Karawang Timur, Kec. Telukjambe Timur, Kec.Klari, Kec.Cikampek, dan Kec.Kotabaru</p> <p>(2) Daya Dukung Pangan sudah terlampaui terdapat di Kec.Kotabaru, Kec.Klari, Kec. Cikampek, Kec. Telukjambe Timur, Kec.Majalaya, Kec.Karawang Timur, Kec.Karawang Barat, Kec.Pangkalan</p> <p>(3) Daya Dukung Fungsi Lahan Lindung memiliki indeks 0,48 termasuk kategori kualitas daya dukung lahan sedang</p> <p>(4) Daya Dukung Lahan Terbangun memiliki indeks 3,36 termasuk kategori daya dukung lahan terbangun kondisi baik</p> <p>(5) Daya Tampung penduduk yang sudah terlampaui pada tahun 2024 yaitu Kecamatan Cikampek, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Karawang Barat, Kecamatan Rengasdengklok, Kecamatan</p>	<p>Penderita gizi buruk di Kabupaten Karawang masih cukup tinggi sebesar 16,3 persen tahun 2017, Kecenderungan kecamatan-kecamatan yang memiliki peningkatan persentase penderita gizi buruk secara signifikan adalah Kecamatan Jatisari, Kecamatan Kotabaru, Kecamatan Karawang Barat, dan Kecamatan Pedes, Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terutama orang tua balita terhadap pentingnya gizi balita di masa pertumbuhan</p>	<p>Pengawasan dan Pembinaan kecukupan gizi untuk bayi; Program Peningkatan Kualitas Perbaikan Gizi Masyarakat; Program Perbaikan Gizi Masyarakat</p>	<p>Menetapkan target penurunan 0,18 persen per tahun; Pengawasan dan Pembinaan kecukupan gizi untuk bayi; Program Peningkatan Kualitas Perbaikan Gizi Masyarakat; Program Perbaikan Gizi Masyarakat</p>

Indikator TPB	Kondisi 6 Muatan Kajian	Kondisi Indikator TPB	Arahan Program (Alternatif)	Rekomendasi
1	2	3	4	5
	<p>Klari, Kecamatan Telukjambe Timur dan Kecamatan Purwasari (6) Dampak dan Risiko LH pencemaran air di Sungai Citarum, Sungai Cilamya, Sungai Cikaranggalam dan Sungai Cibee yang merupakan badan air penerima buangan oleh beberapa industri, pertumbuhan lahan kritis terus terjadi di lahan-lahan pertanian terluas di Kec.Pedes seluas 5.615 Ha, Timbulan sampah tertinggi dan belum optimal pelayanan persampahan di Kec.Rengasdengklok, Kec.Karawang Barat, Kec.Karawang Timur, Kec.Telukjambe Timur, Kec.Klari, Kec.Cikampek, dan Kec.Kotabaru, Jumlah emisi paling besar (Emisi CO₂ akibat penggunaan pupuk urea terdapat di kawasan pertanian (tinggi pangan) yaitu Kec.Tempuran, Kec.Tirtajaya, Kec.Cilamaya Kulon, dan Kec.Cilebar. Sementara itu peningkatan emisi CO₂ akibat aktifitas kawasan perkotaan dan kawasan industri terdapat di daerah industri,</p>			

Indikator TPB	Kondisi 6 Muatan Kajian	Kondisi Indikator TPB	Arahan Program (Alternatif)	Rekomendasi
1	2	3	4	5
	<p>terminal, pusat perbelanjaan (Kec.Cikampek, Kec.Purwasari, Kec.Klari, Kec.Telukjambe Timur, Kec.Karawang Timur, dan Kec.Pangkalan).</p> <p>(7) KEHATI Tentang flora khas tersebut, Bina Kependudukan dan Lingkungan Hidup Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tahun 1993/1994 menetapkan bahwa Jambu Air Cingcalo (Syzuim aquem) sebagai flora khas Daerah Kabupaten Karawang</p> <p>(8) Kerawanan Bencana Banjir, Erosi, Rawan Gelombang Pasang dan Kekeringan</p>			

Indikator TPB	Kondisi 6 Muatan Kajian	Kondisi Indikator TPB	Arahan Program (Alternatif)	Rekomendasi
1	2	3	4	5
<p>1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional.</p>	<p>(1) Daya Dukung Air Terparah : Kec.Rengasdengklok,Kec. Karawang Barat, Kec.Karawang Timur, Kec. Telukjambe Timur, Kec.Klari, Kec.Cikampek, dan Kec.Kotabaru (2) Daya Dukung Pangan sudah terlampaui terdapat di Kec.Kotabaru, Kec.Klari, Kec. Cikampek, Kec. Telukjambe Timur, Kec.Majalaya, Kec.Karawang Timur, Kec.Karawang Barat, Kec.Pangkalan (3) Daya Dukung Fungsi Lahan Lindung memiliki indeks 0,48 termasuk kategori kualitas daya dukung lahan sedang (4) Daya Dukung Lahan Terbangun memiliki indeks 3,36 termasuk kategori daya dukung lahan terbangun kondisi baik (5) Daya Tampung penduduk yang sudah terlampaui pada tahun 2024 yaitu Kecamatan Cikampek, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Karawang Barat, Kecamatan Rengasdengklok, Kecamatan</p>	<p>Angka kemiskinan di Kabupaten Karawang masih cukup tinggi, dengan pesatnya pembangunan di Kabupaten Karawang menimbulkan kesenjangan sosial antara perkotaan dan pedesaan, Angka kemiskinan terus meningkat dengan nilai pertumbuhan 0,42 persen per tahun, Kecenderungan kecamatan-kecamatan yang memiliki peningkatan persentase kemiskinan secara signifikan adalah Kecamatan Jatisari, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kecamatan Karawang Barat, Kecamatan Rengasdengklok, Kecamatan Pedes, dan Kecamatan Batujaya, Peningkatan jumlah PMKS sebesar 16,88 persen</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan terutama di daerah tinggi penduduk miskin. 2. Peningkatan bantuan untuk keluarga miskin meliputi kebutuhan pokok dan hak memiliki tempat tinggal. 3. Peningkatan pertumbuhan basis ekonomi di pedesaan sebagai motor penggerak membuka lapangan pekerjaan. 4. Penciptaan lapangan kerja dan wirausaha. 5. Peningkatan pelayanan sosial 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan terutama di daerah tinggi penduduk miskin. 2. Peningkatan bantuan untuk keluarga miskin meliputi kebutuhan pokok dan hak memiliki tempat tinggal. 3. Peningkatan pertumbuhan basis ekonomi di pedesaan sebagai motor penggerak membuka lapangan pekerjaan. 4. Penciptaan lapangan kerja dan wirausaha. 5. Peningkatan pelayanan sosial

Indikator TPB	Kondisi 6 Muatan Kajian	Kondisi Indikator TPB	Arahan Program (Alternatif)	Rekomendasi
1	2	3	4	5
	<p>Klari, Kecamatan Telukjambe Timur dan Kecamatan Purwasari (6) Dampak dan Risiko LH pencemaran air di Sungai Citarum, Sungai Cilamya, Sungai Cikaranggelam dan Sungai Cibee yang merupakan badan air penerima buangan oleh beberapa industri, pertumbuhan lahan kritis terus terjadi di lahan-lahan pertanian terluas di Kec.Pedes seluas 5.615 Ha, Timbulan sampah tertinggi dan belum optimal pelayanan persampahan di Kec.Rengasdengklok, Kec.Karawang Barat, Kec.Karawang Timur, Kec.Telukjambe Timur, Kec.Klari, Kec.Cikampek, dan Kec.Kotabaru, Jumlah emisi paling besar (Emisi CO₂ akibat penggunaan pupuk urea terdapat di kawasan pertanian (tinggi pangan) yaitu Kec.Tempuran, Kec.Tirtajaya, Kec.Cilamaya Kulon, dan Kec.Cilebar. Sementara itu peningkatan emisi CO₂ akibat aktifitas kawasan perkotaan dan kawasan industri terdapat di daerah industri,</p>			

Indikator TPB	Kondisi 6 Muatan Kajian	Kondisi Indikator TPB	Arahan Program (Alternatif)	Rekomendasi
1	2	3	4	5
	<p>terminal, pusat perbelanjaan (Kec.Cikampek, Kec.Purwasari, Kec.Klari, Kec.Telukjambe Timur, Kec.Karawang Timur, dan Kec.Pangkalan).</p> <p>(7) KEHATI Tentang flora khas tersebut, Bina Kependudukan dan Lingkungan Hidup Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tahun 1993/1994 menetapkan bahwa Jambu Air Cingcalo (Syzuim aquem) sebagai flora khas Daerah Kabupaten Karawang</p> <p>(8) Kerawanan Bencana Banjir, Erosi, Rawan Gelombang Pasang dan Kekeringan</p>			

Indikator TPB	Kondisi 6 Muatan Kajian	Kondisi Indikator TPB	Arahan Program (Alternatif)	Rekomendasi
1	2	3	4	5
<p>Persentase Indeks Pembangunan Manusia</p>	<p>(1) Daya Dukung Air Terparah : Kec.Rengasdengklok,Kec. Karawang Barat, Kec.Karawang Timur, Kec. Telukjambe Timur, Kec.Klari, Kec.Cikampek, dan Kec.Kotabaru (2) Daya Dukung Pangan sudah terlampaui terdapat di Kec.Kotabaru, Kec.Klari, Kec. Cikampek, Kec. Telukjambe Timur, Kec.Majalaya, Kec.Karawang Timur, Kec.Karawang Barat, Kec.Pangkalan (3) Daya Dukung Fungsi Lahan Lindung memiliki indeks 0,48 termasuk kategori kualitas daya dukung lahan sedang (4) Daya Dukung Lahan Terbangun memiliki indeks 3,36 termasuk kategori daya dukung lahan terbangun kondisi baik (5) Daya Tampung penduduk yang sudah terlampaui pada tahun 2024 yaitu Kecamatan Cikampek, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Karawang Barat, Kecamatan Rengasdengklok, Kecamatan</p>	<p>Kompetensi SDM masih perlu ditingkatkan, Masih rendahnya APK pendidikan, Masih belum optimalnya pemerataan kesejahteraan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan cakupan pelayanan untuk wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. 2. Peningkatan pendidikan non formal terutama 3. Pemerataan tenaga pendidik berkualitas 4. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pendidikan 	<p>Meningkatkan pemerataan wajib belajar 9 tahun Meningkatkan pemerataan tenaga pendidik berkualitas Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pemerintah dan fasilitas pendidikan Meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya pendidikan.</p>

Indikator TPB	Kondisi 6 Muatan Kajian	Kondisi Indikator TPB	Arahan Program (Alternatif)	Rekomendasi
1	2	3	4	5
	<p>Klari, Kecamatan Telukjambe Timur dan Kecamatan Purwasari (6) Dampak dan Risiko LH pencemaran air di Sungai Citarum, Sungai Cilamya, Sungai Cikaranggelam dan Sungai Cibeet yang merupakan badan air penerima buangan oleh beberapa industri, pertumbuhan lahan kritis terus terjadi di lahan-lahan pertanian terluas di Kec.Pedes seluas 5.615 Ha, Timbulan sampah tertinggi dan belum optimal pelayanan persampahan di Kec.Rengasdengklok, Kec.Karawang Barat, Kec.Karawang Timur, Kec.Telukjambe Timur, Kec.Klari, Kec.Cikampek, dan Kec.Kotabaru, Jumlah emisi paling besar (Emisi CO₂ akibat penggunaan pupuk urea terdapat di kawasan pertanian (tinggi pangan) yaitu Kec.Tempuran, Kec.Tirtajaya, Kec.Cilamaya Kulon, dan Kec.Cilebar. Sementara itu peningkatan emisi CO₂ akibat aktifitas kawasan perkotaan dan kawasan industri terdapat di daerah industri,</p>			

Indikator TPB	Kondisi 6 Muatan Kajian	Kondisi Indikator TPB	Arahan Program (Alternatif)	Rekomendasi
1	2	3	4	5
	<p>terminal, pusat perbelanjaan (Kec.Cikampek, Kec.Purwasari, Kec.Klari, Kec.Telukjambe Timur, Kec.Karawang Timur, dan Kec.Pangkalan).</p> <p>(7) KEHATI Tentang flora khas tersebut, Bina Kependudukan dan Lingkungan Hidup Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tahun 1993/1994 menetapkan bahwa Jambu Air Cingcalo (Syzuim aquem) sebagai flora khas Daerah Kabupaten Karawang</p> <p>(8) Kerawanan Bencana Banjir, Erosi, Rawan Gelombang Pasang dan Kekeringan</p>			

Indikator TPB	Kondisi 6 Muatan Kajian	Kondisi Indikator TPB	Arahan Program (Alternatif)	Rekomendasi
1	2	3	4	5
Angka Harapan Hidup	<p>(1) Daya Dukung Air Terparah : Kec.Rengasdengklok,Kec. Karawang Barat, Kec.Karawang Timur, Kec. Telukjambe Timur, Kec.Klari, Kec.Cikampek, dan Kec.Kotabaru</p> <p>(2) Daya Dukung Pangan sudah terlampaui terdapat di Kec.Kotabaru, Kec.Klari, Kec. Cikampek, Kec. Telukjambe Timur, Kec.Majalaya, Kec.Karawang Timur, Kec.Karawang Barat, Kec.Pangkalan</p> <p>(3) Daya Dukung Fungsi Lahan Lindung memiliki indeks 0,48 termasuk kategori kualitas daya dukung lahan sedang</p> <p>(4) Daya Dukung Lahan Terbangun memiliki indeks 3,36 termasuk kategori daya dukung lahan terbangun kondisi baik</p> <p>(5) Daya Tampung penduduk yang sudah terlampaui pada tahun 2024 yaitu Kecamatan Cikampek, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Karawang Barat, Kecamatan Rengasdengklok, Kecamatan</p>	<p>Peningkatan Angka Harapan Hidup belum optimal, Pertumbuhan Angka Harapan Hidup hanya mencapai 0,03 persen per tahun</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan terutama di daerah tinggi penduduk miskin. 2. Peningkatan bantuan untuk keluarga miskin meliputi kebutuhan pokok dan hak memiliki tempat tinggal. 3. Peningkatan pertumbuhan basis ekonomi di pedesaan sebagai motor penggerak membuka lapangan pekerjaan. 4. Penciptaan lapangan kerja dan wirausaha. 5. Peningkatan pelayanan sosial 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan terutama di daerah tinggi penduduk miskin. 2. Peningkatan bantuan untuk keluarga miskin meliputi kebutuhan pokok dan hak memiliki tempat tinggal. 3. Peningkatan pertumbuhan basis ekonomi di pedesaan sebagai motor penggerak membuka lapangan pekerjaan. 4. Penciptaan lapangan kerja dan wirausaha. 5. Peningkatan pelayanan sosial

Indikator TPB	Kondisi 6 Muatan Kajian	Kondisi Indikator TPB	Arahan Program (Alternatif)	Rekomendasi
1	2	3	4	5
	<p>Klari, Kecamatan Telukjambe Timur dan Kecamatan Purwasari (6) Dampak dan Risiko LH pencemaran air di Sungai Citarum, Sungai Cilamya, Sungai Cikaranggelam dan Sungai Cibeet yang merupakan badan air penerima buangan oleh beberapa industri, pertumbuhan lahan kritis terus terjadi di lahan-lahan pertanian terluas di Kec.Pedes seluas 5.615 Ha, Timbulan sampah tertinggi dan belum optimal pelayanan persampahan di Kec.Rengasdengklok, Kec.Karawang Barat, Kec.Karawang Timur, Kec.Telukjambe Timur, Kec.Klari, Kec.Cikampek, dan Kec.Kotabaru, Jumlah emisi paling besar (Emisi CO₂ akibat penggunaan pupuk urea terdapat di kawasan pertanian (tinggi pangan) yaitu Kec.Tempuran, Kec.Tirtajaya, Kec.Cilamaya Kulon, dan Kec.Cilebar. Sementara itu peningkatan emisi CO₂ akibat aktifitas kawasan perkotaan dan kawasan industri terdapat di daerah industri,</p>			

Indikator TPB	Kondisi 6 Muatan Kajian	Kondisi Indikator TPB	Arahan Program (Alternatif)	Rekomendasi
1	2	3	4	5
	<p>terminal, pusat perbelanjaan (Kec.Cikampek, Kec.Purwasari, Kec.Klari, Kec.Telukjambe Timur, Kec.Karawang Timur, dan Kec.Pangkalan).</p> <p>(7) KEHATI Tentang flora khas tersebut, Bina Kependudukan dan Lingkungan Hidup Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tahun 1993/1994 menetapkan bahwa Jambu Air Cingcalo (Syzuim aquem) sebagai flora khas Daerah Kabupaten Karawang</p> <p>(8) Kerawanan Bencana Banjir, Erosi, Rawan Gelombang Pasang dan Kekeringan</p>			

Indikator TPB	Kondisi 6 Muatan Kajian	Kondisi Indikator TPB	Arahan Program (Alternatif)	Rekomendasi
1	2	3	4	5
<p>1.4.1.(b) Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.</p>	<p>(1) Daya Dukung Air Terparah : Kec.Rengasdengklok,Kec. Karawang Barat, Kec.Karawang Timur, Kec. Telukjambe Timur, Kec.Klari, Kec.Cikampek, dan Kec.Kotabaru (2) Daya Dukung Pangan sudah terlampaui terdapat di Kec.Kotabaru, Kec.Klari, Kec. Cikampek, Kec. Telukjambe Timur, Kec.Majalaya, Kec.Karawang Timur, Kec.Karawang Barat, Kec.Pangkalan (3) Daya Dukung Fungsi Lahan Lindung memiliki indeks 0,48 termasuk kategori kualitas daya dukung lahan sedang (4) Daya Dukung Lahan Terbangun memiliki indeks 3,36 termasuk kategori daya dukung lahan terbangun kondisi baik (5) Daya Tampung penduduk yang sudah terlampaui pada tahun 2024 yaitu Kecamatan Cikampek, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Karawang Barat, Kecamatan Rengasdengklok, Kecamatan</p>		<p>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak; Program Peningkatan Kualitas Surveillance Epidemiologi dan Imunisasi</p>	<p>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak; Program Peningkatan Kualitas Surveillance Epidemiologi dan Imunisasi</p>

Indikator TPB	Kondisi 6 Muatan Kajian	Kondisi Indikator TPB	Arahan Program (Alternatif)	Rekomendasi
1	2	3	4	5
	<p>Klari, Kecamatan Telukjambe Timur dan Kecamatan Purwasari (6) Dampak dan Risiko LH pencemaran air di Sungai Citarum, Sungai Cilamya, Sungai Cikaranggelam dan Sungai Cibeet yang merupakan badan air penerima buangan oleh beberapa industri, pertumbuhan lahan kritis terus terjadi di lahan-lahan pertanian terluas di Kec.Pedes seluas 5.615 Ha, Timbulan sampah tertinggi dan belum optimal pelayanan persampahan di Kec.Rengasdengklok, Kec.Karawang Barat, Kec.Karawang Timur, Kec.Telukjambe Timur, Kec.Klari, Kec.Cikampek, dan Kec.Kotabaru, Jumlah emisi paling besar (Emisi CO₂ akibat penggunaan pupuk urea terdapat di kawasan pertanian (tinggi pangan) yaitu Kec.Tempuran, Kec.Tirtajaya, Kec.Cilamaya Kulon, dan Kec.Cilebar. Sementara itu peningkatan emisi CO₂ akibat aktifitas kawasan perkotaan dan kawasan industri terdapat di daerah industri,</p>			

Indikator TPB	Kondisi 6 Muatan Kajian	Kondisi Indikator TPB	Arahan Program (Alternatif)	Rekomendasi
1	2	3	4	5
	<p>terminal, pusat perbelanjaan (Kec.Cikampek, Kec.Purwasari, Kec.Klari, Kec.Telukjambe Timur, Kec.Karawang Timur, dan Kec.Pangkalan).</p> <p>(7) KEHATI Tentang flora khas tersebut, Bina Kependudukan dan Lingkungan Hidup Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tahun 1993/1994 menetapkan bahwa Jambu Air Cingcalo (Syzuim aquem) sebagai flora khas Daerah Kabupaten Karawang</p> <p>(8) Kerawanan Bencana Banjir, Erosi, Rawan Gelombang Pasang dan Kekeringan</p>			
Misi 3 : Mewujudkan Masyarakat Demokratis Berlandaskan Hukum				

Indikator TPB	Kondisi 6 Muatan Kajian	Kondisi Indikator TPB	Arahan Program (Alternatif)	Rekomendasi
1	2	3	4	5
<p>16.2.3 Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.</p>	<p>(1) Daya Dukung Air Terparah : Kec.Rengasdengklok, Kec. Karawang Barat, Kec.Karawang Timur, Kec. Telukjambe Timur, Kec.Klari, Kec.Cikampek, dan Kec.Kotabaru (2) Daya Dukung Pangan sudah terlampaui terdapat di Kec.Kotabaru, Kec.Klari, Kec. Cikampek, Kec. Telukjambe Timur, Kec.Majalaya, Kec.Karawang Timur, Kec.Karawang Barat, Kec.Pangkalan (3) Daya Dukung Fungsi Lahan Lindung memiliki indeks 0,48 termasuk kategori kualitas daya dukung lahan sedang (4) Daya Dukung Lahan Terbangun memiliki indeks 3,36 termasuk kategori daya dukung lahan terbangun kondisi baik (5) Daya Tampung penduduk yang sudah terlampaui pada tahun 2024 yaitu Kecamatan Cikampek, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Karawang</p>	<p>Terjadi peningkatan jumlah kekerasan, Peningkatan kekerasan cukup signifikan sebesar 11,49 persen per tahun, Masih rendahnya upaya penurunan tingkat kekerasan</p>	<p>Menetapkan target penurunan tindak kriminal dan kekerasan sebesar 2,23 persen per tahun; Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan; Meningkatkan pemberdayaan dan psikososial sejak dini; Meningkatkan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak; Meningkatkan Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan; Meningkatkan Perlindungan Terhadap Anak dan Perempuan</p>	<p>Menetapkan target penurunan tindak kriminal dan kekerasan sebesar 2,23 persen per tahun; Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan; Meningkatkan pemberdayaan dan psikososial sejak dini; Meningkatkan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak; Meningkatkan Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan; Meningkatkan Perlindungan Terhadap Anak dan Perempuan</p>

Indikator TPB	Kondisi 6 Muatan Kajian	Kondisi Indikator TPB	Arahan Program (Alternatif)	Rekomendasi
1	2	3	4	5
	<p>Barat, Kecamatan Rengasdengklok, Kecamatan Klari, Kecamatan Telukjambe Timur dan Kecamatan Purwasari (6) Dampak dan Risiko LH pencemaran air di Sungai Citarum, Sungai Cilamya, Sungai Cikaranggelam dan Sungai Cibeet yang merupakan badan air penerima buangan oleh beberapa industri, pertumbuhan lahan kritis terus terjadi di lahan-lahan pertanian terluas di Kec.Pedes seluas 5.615 Ha, Timbulan sampah tertinggi dan belum optimal pelayanan persampahan di Kec.Rengasdengklok, Kec.Karawang Barat, Kec.Karawang Timur, Kec.Telukjambe Timur, Kec.Klari, Kec.Cikampek, dan Kec.Kotabaru, Jumlah emisi paling besar (Emisi CO2 akibat penggunaan pupuk urea terdapat di kawasan pertanian (tinggi pangan) yaitu Kec.Tempuran, Kec.Tirtajaya, Kec Cilamaya Kulon, dan Kec.Cilebar. Sementara itu peningkatan emisi CO2 akibat aktifitas kawasan</p>			

Indikator TPB	Kondisi 6 Muatan Kajian	Kondisi Indikator TPB	Arahan Program (Alternatif)	Rekomendasi
1	2	3	4	5
	<p>perkotaan dan kawasan industri terdapat di daerah industri, terminal, pusat perbelanjaan (Kec.Cikampek, Kec.Purwasari, Kec.Klari, Kec.Telukjambe Timur, Kec.Karawang Timur, dan Kec.Pangkalan).</p> <p>(7) KEHATI Tentang flora khas tersebut, Bina Kependudukan dan Lingkungan Hidup Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tahun 1993/1994 menetapkan bahwa Jambu Air Cingcalo (<i>Syzuim aquem</i>) sebagai flora khas Daerah Kabupaten Karawang</p> <p>(8) Kerawanan Bencana Banjir, Erosi, Rawan Gelombang Pasang dan Kekeringan</p>			
Misi 4 : Mewujudkan Kabupaten Karawang yang Asri dan Lestari				

Indikator TPB	Kondisi 6 Muatan Kajian	Kondisi Indikator TPB	Arahan Program (Alternatif)	Rekomendasi
1	2	3	4	5
<p>9.4.1(a) Persentase Perubahan Emisi CO₂/Emisi Gas Rumah Kaca.</p>	<p>(1) Daya Dukung Air Terparah : Kec.Rengasdengklok,Kec. Karawang Barat, Kec.Karawang Timur, Kec. Telukjambe Timur, Kec.Klari, Kec.Cikampek, dan Kec.Kotabaru (2) Daya Dukung Pangan sudah terlampaui terdapat di Kec.Kotabaru, Kec.Klari, Kec. Cikampek, Kec. Telukjambe Timur, Kec.Majalaya, Kec.Karawang Timur, Kec.Karawang Barat, Kec.Pangkalan (3) Daya Dukung Fungsi Lahan Lindung memiliki indeks 0,48 termasuk kategori kualitas daya dukung lahan sedang (4) Daya Dukung Lahan Terbangun memiliki indeks 3,36 termasuk kategori daya dukung lahan terbangun kondisi baik (5) Daya Tampung penduduk yang sudah terlampaui pada tahun 2024 yaitu Kecamatan Cikampek, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Karawang Barat, Kecamatan Rengasdengklok, Kecamatan</p>	<p>Semakin menurunnya kualitas udara di Kabupaten Karawang, khususnya di wilayah perkotaan akibat emisi karbon kendaraan bermotor dan emisi karbon pabrik dan aktivitas lainnya, Emisi CO₂/Emisi Gas Rumah Kaca terus meningkat dengan nilai pertumbuhan 1,33 persen per tahun, Upaya penurunan Emisi GRK masih belum optimal.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan upaya-upaya pengujian kualitas air dan udara 2. Penyediaan ruang terbuka hijau terutama di daerah industri, terminal, pusat perbelanjaan (Kec.Cikampek, Kec.Purwasari, Kec.Klari, Kec.Telukjambe Timur, Kec.Karawang Timur, dan Kec.Pangkalan). 3. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan upaya-upaya pengujian kualitas air dan udara 2. Penyediaan ruang terbuka hijau terutama di daerah industri, terminal, pusat perbelanjaan (Kec.Cikampek, Kec.Purwasari, Kec.Klari, Kec.Telukjambe Timur, Kec.Karawang Timur, dan Kec.Pangkalan). 3. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Indikator TPB	Kondisi 6 Muatan Kajian	Kondisi Indikator TPB	Arahan Program (Alternatif)	Rekomendasi
1	2	3	4	5
	<p>Klari, Kecamatan Telukjambe Timur dan Kecamatan Purwasari (6) Dampak dan Risiko LH pencemaran air di Sungai Citarum, Sungai Cilamya, Sungai Cikaranggelam dan Sungai Cibeet yang merupakan badan air penerima buangan oleh beberapa industri, pertumbuhan lahan kritis terus terjadi di lahan-lahan pertanian terluas di Kec.Pedes seluas 5.615 Ha, Timbulan sampah tertinggi dan belum optimal pelayanan persampahan di Kec.Rengasdengklok, Kec.Karawang Barat, Kec.Karawang Timur, Kec.Telukjambe Timur, Kec.Klari, Kec.Cikampek, dan Kec.Kotabaru, Jumlah emisi paling besar (Emisi CO₂ akibat penggunaan pupuk urea terdapat di kawasan pertanian (tinggi pangan) yaitu Kec.Tempuran, Kec.Tirtajaya, Kec.Cilamaya Kulon, dan Kec.Cilebar. Sementara itu peningkatan emisi CO₂ akibat aktifitas kawasan perkotaan dan kawasan industri terdapat di daerah industri,</p>			

Indikator TPB	Kondisi 6 Muatan Kajian	Kondisi Indikator TPB	Arahan Program (Alternatif)	Rekomendasi
1	2	3	4	5
	<p>terminal, pusat perbelanjaan (Kec.Cikampek, Kec.Purwasari, Kec.Klari, Kec.Telukjambe Timur, Kec.Karawang Timur, dan Kec.Pangkalan).</p> <p>(7) KEHATI Tentang flora khas tersebut, Bina Kependudukan dan Lingkungan Hidup Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tahun 1993/1994 menetapkan bahwa Jambu Air Cingcalo (Syzuim aquem) sebagai flora khas Daerah Kabupaten Karawang</p> <p>(8) Kerawanan Bencana Banjir, Erosi, Rawan Gelombang Pasang dan Kekeringan</p>			

Indikator TPB	Kondisi 6 Muatan Kajian	Kondisi Indikator TPB	Arahan Program (Alternatif)	Rekomendasi
1	2	3	4	5
9.1.1.(a) Kondisi mantap jalan nasional.	<p>(1) Daya Dukung Air Terparah : Kec.Rengasdengklok,Kec. Karawang Barat, Kec.Karawang Timur, Kec. Telukjambe Timur, Kec.Klari, Kec.Cikampek, dan Kec.Kotabaru</p> <p>(2) Daya Dukung Pangan sudah terlampaui terdapat di Kec.Kotabaru, Kec.Klari, Kec. Cikampek, Kec. Telukjambe Timur, Kec.Majalaya, Kec.Karawang Timur, Kec.Karawang Barat, Kec.Pangkalan</p> <p>(3) Daya Dukung Fungsi Lahan Lindung memiliki indeks 0,48 termasuk kategori kualitas daya dukung lahan sedang</p> <p>(4) Daya Dukung Lahan Terbangun memiliki indeks 3,36 termasuk kategori daya dukung lahan terbangun kondisi baik</p> <p>(5) Daya Tampung penduduk yang sudah terlampaui pada tahun 2024 yaitu Kecamatan Cikampek, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Karawang Barat, Kecamatan Rengasdengklok, Kecamatan</p>		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan; Program Peningkatan Jalan dan Jembatan; Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan menggunakan bahan konstruksi berkelanjutan "Green Road Construction; Program Peningkatan Jalan dan Jembatan; Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Indikator TPB	Kondisi 6 Muatan Kajian	Kondisi Indikator TPB	Arahan Program (Alternatif)	Rekomendasi
1	2	3	4	5
	<p>Klari, Kecamatan Telukjambe Timur dan Kecamatan Purwasari (6) Dampak dan Risiko LH pencemaran air di Sungai Citarum, Sungai Cilamya, Sungai Cikaranggalam dan Sungai Cibeet yang merupakan badan air penerima buangan oleh beberapa industri, pertumbuhan lahan kritis terus terjadi di lahan-lahan pertanian terluas di Kec.Pedes seluas 5.615 Ha, Timbulan sampah tertinggi dan belum optimal pelayanan persampahan di Kec.Rengasdengklok, Kec.Karawang Barat, Kec.Karawang Timur, Kec.Telukjambe Timur, Kec.Klari, Kec.Cikampek, dan Kec.Kotabaru, Jumlah emisi paling besar (Emisi CO₂ akibat penggunaan pupuk urea terdapat di kawasan pertanian (tinggi pangan) yaitu Kec.Tempuran, Kec.Tirtajaya, Kec Cilamaya Kulon, dan Kec.Cilebar. Sementara itu peningkatan emisi CO₂ akibat aktifitas kawasan perkotaan dan kawasan industri terdapat di daerah industri,</p>			

Indikator TPB	Kondisi 6 Muatan Kajian	Kondisi Indikator TPB	Arahan Program (Alternatif)	Rekomendasi
1	2	3	4	5
	<p>terminal, pusat perbelanjaan (Kec.Cikampek, Kec.Purwasari, Kec.Klari, Kec.Telukjambe Timur, Kec.Karawang Timur, dan Kec.Pangkalan).</p> <p>(7) KEHATI Tentang flora khas tersebut, Bina Kependudukan dan Lingkungan Hidup Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tahun 1993/1994 menetapkan bahwa Jambu Air Cingcalo (Syzuim aquem) sebagai flora khas Daerah Kabupaten Karawang</p> <p>(8) Kerawanan Bencana Banjir, Erosi, Rawan Gelombang Pasang dan Kekeringan</p>			

Indikator TPB	Kondisi 6 Muatan Kajian	Kondisi Indikator TPB	Arahan Program (Alternatif)	Rekomendasi
1	2	3	4	5
<p>11.1.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.</p>	<p>(1) Daya Dukung Air Terparah : Kec.Rengasdengklok,Kec. Karawang Barat, Kec.Karawang Timur, Kec. Telukjambe Timur, Kec.Klari, Kec.Cikampek, dan Kec.Kotabaru (2) Daya Dukung Pangan sudah terlampaui terdapat di Kec.Kotabaru, Kec.Klari, Kec. Cikampek, Kec. Telukjambe Timur, Kec.Majalaya, Kec.Karawang Timur, Kec.Karawang Barat, Kec.Pangkalan (3) Daya Dukung Fungsi Lahan Lindung memiliki indeks 0,48 termasuk kategori kualitas daya dukung lahan sedang (4) Daya Dukung Lahan Terbangun memiliki indeks 3,36 termasuk kategori daya dukung lahan terbangun kondisi baik (5) Daya Tampung penduduk yang sudah terlampaui pada tahun 2024 yaitu Kecamatan Cikampek, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Karawang Barat, Kecamatan Rengasdengklok, Kecamatan</p>	<p>Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Karawang masih cukup banyak, khususnya di sebagian wilayah pesisir utara Karawang dan sebagian wilayah selatan, Masih banyak rumah yang tidak layak huni dibangun di atas tanah bukan hak milik, Tingkat occupancy/penghunian Rumah Sehat masih rendah, . Belum tertanganinya kawasan kumuh perkotaan, Proporsi rumah layak huni baru mencapai 69,95 persen di tahun 2017, Gap antara ketercapaian dan target masih sangat besar.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan lingkungan sehat perumahan. 2. Peningkatan pemenuhan sarana infrastruktur penunjang lingkungan sehat perumahan. 3. Peningkatan penyediaan rumah layak huni. 	<p>Mengendalikan pembangunan di kawasan –kawasan defisit air terparah Kecamatan Ciampel, Kecamatan Pangakalan, Kecamatan Tegalwaru, Membatasi hunian horizonntal dan mengarahkan pengembangan hunian vertikal di Kecamatan Telukjambe Timur, Kecamatan Klari, Kecamatan Cikampek, Kecamatan Purwasari, Kecamatan Kotabaru, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Karawang Barat, Kecamatan Rengasdengklok, Meningkatkan penyediaan sarana infrastruktur penunjang lingkungan sehat perumahan (sistem drainase yang baik, sistem pengolahan</p>

Indikator TPB	Kondisi 6 Muatan Kajian	Kondisi Indikator TPB	Arahan Program (Alternatif)	Rekomendasi
1	2	3	4	5
	<p>Klari, Kecamatan Telukjambe Timur dan Kecamatan Purwasari (6) Dampak dan Risiko LH pencemaran air di Sungai Citarum, Sungai Cilamya, Sungai Cikaranggalam dan Sungai Cibeet yang merupakan badan air penerima buangan oleh beberapa industri, pertumbuhan lahan kritis terus terjadi di lahan-lahan pertanian terluas di Kec.Pedes seluas 5.615 Ha, Timbulan sampah tertinggi dan belum optimal pelayanan persampahan di Kec.Rengasdengklok, Kec.Karawang Barat, Kec.Karawang Timur, Kec.Telukjambe Timur, Kec.Klari, Kec.Cikampek, dan Kec.Kotabaru, Jumlah emisi paling besar (Emisi CO₂ akibat penggunaan pupuk urea terdapat di kawasan pertanian (tinggi pangan) yaitu Kec.Tempuran, Kec.Tirtajaya, Kec.Cilamaya Kulon, dan Kec.Cilebar. Sementara itu peningkatan emisi CO₂ akibat aktifitas kawasan perkotaan dan kawasan industri terdapat di daerah industri,</p>			<p>limbah, instalasi air limbah yang berkelanjutan, persampahan, jalan). Meningkatkan pelayanan sesuai SPM untuk persampahan; Meningkatkan jangkauan pelayanan pengelolaan sampah; Meningkatkan sarana dan prasarana persampahan; Menghindari pengelolaan sampah dekat dengan pesisir dan Sungai Citarum, Sungai Cilamaya, Sungai Cikaranggalam dan Sungai Cibeet.</p>

Indikator TPB	Kondisi 6 Muatan Kajian	Kondisi Indikator TPB	Arahan Program (Alternatif)	Rekomendasi
1	2	3	4	5
	<p>terminal, pusat perbelanjaan (Kec.Cikampek, Kec.Purwasari, Kec.Klari, Kec.Telukjambe Timur, Kec.Karawang Timur, dan Kec.Pangkalan).</p> <p>(7) KEHATI Tentang flora khas tersebut, Bina Kependudukan dan Lingkungan Hidup Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tahun 1993/1994 menetapkan bahwa Jambu Air Cingcalo (Syzuim aquem) sebagai flora khas Daerah Kabupaten Karawang</p> <p>(8) Kerawanan Bencana Banjir, Erosi, Rawan Gelombang Pasang dan Kekeringan</p>			

Indikator TPB	Kondisi 6 Muatan Kajian	Kondisi Indikator TPB	Arahan Program (Alternatif)	Rekomendasi
1	2	3	4	5
<p>11.6.1.(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani.</p>	<p>(1) Daya Dukung Air Terparah : Kec.Rengasdengklok,Kec. Karawang Barat, Kec.Karawang Timur, Kec. Telukjambe Timur, Kec.Klari, Kec.Cikampek, dan Kec.Kotabaru (2) Daya Dukung Pangan sudah terlampaui terdapat di Kec.Kotabaru, Kec.Klari, Kec. Cikampek, Kec. Telukjambe Timur, Kec.Majalaya, Kec.Karawang Timur, Kec.Karawang Barat, Kec.Pangkalan (3) Daya Dukung Fungsi Lahan Lindung memiliki indeks 0,48 termasuk kategori kualitas daya dukung lahan sedang (4) Daya Dukung Lahan Terbangun memiliki indeks 3,36 termasuk kategori daya dukung lahan terbangun kondisi baik (5) Daya Tampung penduduk yang sudah terlampaui pada tahun 2024 yaitu Kecamatan Cikampek, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Karawang Barat, Kecamatan Rengasdengklok, Kecamatan</p>	<p>Belum optimalnya penanganan persampahan dan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, Belum optimalnya penyediaan infrastruktur wilayah yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal untuk persampahan, Masih rendahnya tingkat pelayanan persampahan, Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan pengurangan sampah melalui 3R, Sarana Prsarana Persampahan masih belum memenuhi kebutuhan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pelayanan pengelolaan sampah 2. Peningkatan pelayanan sesuai SPM untuk persampahan 3. Peningkatan jangkauan pelayanan pengelolaan sampah 4. Peningkatan sarana dan prasarana persampahan 	<p>Meningkatkan pelayanan pengelolaan sampah; Meningkatkan pelayanan sesuai SPM untuk persampahan; Meningkatkan jangkauan pelayanan pengelolaan sampah; Meningkatkan sarana dan prasarana persampahan; Menghindari pengelolaan sampah dekat dengan pesisir dan Sungai Citarum, Sungai Cilamaya, Sungai Cikaranggalam dan Sungai Cibeet.</p>

Indikator TPB	Kondisi 6 Muatan Kajian	Kondisi Indikator TPB	Arahan Program (Alternatif)	Rekomendasi
1	2	3	4	5
	<p>Klari, Kecamatan Telukjambe Timur dan Kecamatan Purwasari (6) Dampak dan Risiko LH pencemaran air di Sungai Citarum, Sungai Cilamya, Sungai Cikaranggalam dan Sungai Cibeet yang merupakan badan air penerima buangan oleh beberapa industri, pertumbuhan lahan kritis terus terjadi di lahan-lahan pertanian terluas di Kec.Pedes seluas 5.615 Ha, Timbulan sampah tertinggi dan belum optimal pelayanan persampahan di Kec.Rengasdengklok, Kec.Karawang Barat, Kec.Karawang Timur, Kec.Telukjambe Timur, Kec.Klari, Kec.Cikampek, dan Kec.Kotabaru, Jumlah emisi paling besar (Emisi CO₂ akibat penggunaan pupuk urea terdapat di kawasan pertanian (tinggi pangan) yaitu Kec.Tempuran, Kec.Tirtajaya, Kec.Cilamaya Kulon, dan Kec.Cilebar. Sementara itu peningkatan emisi CO₂ akibat aktifitas kawasan perkotaan dan kawasan industri terdapat di daerah industri,</p>			

Indikator TPB	Kondisi 6 Muatan Kajian	Kondisi Indikator TPB	Arahan Program (Alternatif)	Rekomendasi
1	2	3	4	5
	<p>terminal, pusat perbelanjaan (Kec.Cikampek, Kec.Purwasari, Kec.Klari, Kec.Telukjambe Timur, Kec.Karawang Timur, dan Kec.Pangkalan).</p> <p>(7) KEHATI Tentang flora khas tersebut, Bina Kependudukan dan Lingkungan Hidup Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tahun 1993/1994 menetapkan bahwa Jambu Air Cingcalo (Syzuim aquem) sebagai flora khas Daerah Kabupaten Karawang</p> <p>(8) Kerawanan Bencana Banjir, Erosi, Rawan Gelombang Pasang dan Kekeringan</p>			

Indikator TPB	Kondisi 6 Muatan Kajian	Kondisi Indikator TPB	Arahan Program (Alternatif)	Rekomendasi
1	2	3	4	5
15.4.1. Persentase Tutupan Hutan	<p>(1) Daya Dukung Air Terparah : Kec.Rengasdengklok,Kec. Karawang Barat, Kec.Karawang Timur, Kec. Telukjambe Timur, Kec.Klari, Kec.Cikampek, dan Kec.Kotabaru</p> <p>(2) Daya Dukung Pangan sudah terlampaui terdapat di Kec.Kotabaru, Kec.Klari, Kec. Cikampek, Kec. Telukjambe Timur, Kec.Majalaya, Kec.Karawang Timur, Kec.Karawang Barat, Kec.Pangkalan</p> <p>(3) Daya Dukung Fungsi Lahan Lindung memiliki indeks 0,48 termasuk kategori kualitas daya dukung lahan sedang</p> <p>(4) Daya Dukung Lahan Terbangun memiliki indeks 3,36 termasuk kategori daya dukung lahan terbangun kondisi baik</p> <p>(5) Daya Tampung penduduk yang sudah terlampaui pada tahun 2024 yaitu Kecamatan Cikampek, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Karawang Barat, Kecamatan Rengasdengklok, Kecamatan</p>	<p>Persentase tutupan hutan belum mencapai 30 persen, Persentase tutupan hutan baru mencapai 25,41 Persen, tumpang tindih pemanfaatan lahan di Kabupaten Karawang, yaitu antara pemanfaatan kegiatan pertambangan dan kawasan hutan</p>	<p>Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam terutama di Kecamatan Tegalwaru dan Kecamatan Pangkalan. Peningkatan kualitas dan akses informasi Sumber Daya Alam Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup terutama di Kecamatan Tegalwaru, Kecamatan Pangkalan, Kecamatan Ciampel, Kecamatan Klari, Kecamatan Telukjambe Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau terutama di Kawasan Perkotaan Peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan</p>	<p>Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam terutama di Kecamatan Tegalwaru dan Kecamatan Pangkalan. Peningkatan kualitas dan akses informasi Sumber Daya Alam Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup terutama di Kecamatan Tegalwaru, Kecamatan Pangkalan, Kecamatan Ciampel, Kecamatan Klari, Kecamatan Telukjambe Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau terutama di Kawasan Perkotaan Peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan</p>

Indikator TPB	Kondisi 6 Muatan Kajian	Kondisi Indikator TPB	Arahan Program (Alternatif)	Rekomendasi
1	2	3	4	5
	<p>Klari, Kecamatan Telukjambe Timur dan Kecamatan Purwasari (6) Dampak dan Risiko LH pencemaran air di Sungai Citarum, Sungai Cilamya, Sungai Cikaranggelam dan Sungai Cibeet yang merupakan badan air penerima buangan oleh beberapa industri, pertumbuhan lahan kritis terus terjadi di lahan-lahan pertanian terluas di Kec.Pedes seluas 5.615 Ha, Timbulan sampah tertinggi dan belum optimal pelayanan persampahan di Kec.Rengasdengklok, Kec.Karawang Barat, Kec.Karawang Timur, Kec.Telukjambe Timur, Kec.Klari, Kec.Cikampek, dan Kec.Kotabaru, Jumlah emisi paling besar (Emisi CO₂ akibat penggunaan pupuk urea terdapat di kawasan pertanian (tinggi pangan) yaitu Kec.Tempuran, Kec.Tirtajaya, Kec.Cilamaya Kulon, dan Kec.Cilebar. Sementara itu peningkatan emisi CO₂ akibat aktifitas kawasan perkotaan dan kawasan industri terdapat di daerah industri,</p>			

Indikator TPB	Kondisi 6 Muatan Kajian	Kondisi Indikator TPB	Arahan Program (Alternatif)	Rekomendasi
1	2	3	4	5
	<p>terminal, pusat perbelanjaan (Kec.Cikampek, Kec.Purwasari, Kec.Klari, Kec.Telukjambe Timur, Kec.Karawang Timur, dan Kec.Pangkalan).</p> <p>(7) KEHATI Tentang flora khas tersebut, Bina Kependudukan dan Lingkungan Hidup Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tahun 1993/1994 menetapkan bahwa Jambu Air Cingcalo (Syzuim aquem) sebagai flora khas Daerah Kabupaten Karawang</p> <p>(8) Kerawanan Bencana Banjir, Erosi, Rawan Gelombang Pasang dan Kekeringan</p>			

Indikator TPB	Kondisi 6 Muatan Kajian	Kondisi Indikator TPB	Arahan Program (Alternatif)	Rekomendasi
1	2	3	4	5
<p>15.3.1 Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.</p>	<p>(1) Daya Dukung Air Terparah : Kec.Rengasdengklok,Kec. Karawang Barat, Kec.Karawang Timur, Kec. Telukjambe Timur, Kec.Klari, Kec.Cikampek, dan Kec.Kotabaru (2) Daya Dukung Pangan sudah terlampaui terdapat di Kec.Kotabaru, Kec.Klari, Kec. Cikampek, Kec. Telukjambe Timur, Kec.Majalaya, Kec.Karawang Timur, Kec.Karawang Barat, Kec.Pangkalan (3) Daya Dukung Fungsi Lahan Lindung memiliki indeks 0,48 termasuk kategori kualitas daya dukung lahan sedang (4) Daya Dukung Lahan Terbangun memiliki indeks 3,36 termasuk kategori daya dukung lahan terbangun kondisi baik (5) Daya Tampung penduduk yang sudah terlampaui pada tahun 2024 yaitu Kecamatan Cikampek, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Karawang Barat, Kecamatan Rengasdengklok, Kecamatan</p>	<p>Jumlah total lahan kritis di Kabupaten Karawang pada tahun 2015 adalah seluas 7.173,9 Ha, tersebar di 14 kecamatan, 9 diantaranya terdapat di kecamatan wilayah pantai, Luas Lahan kirits terbesar terdapat di Kecamatan Pedes</p>	<p>Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam terutama di Kecamatan Tegalwaru dan Kecamatan Pangkalan. Peningkatan kualitas dan akses informasi Sumber Daya Alam Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup terutama di Kecamatan Tegalwaru, Kecamatan Pangkalan, Kecamatan Ciampel, Kecamatan Klari, Kecamatan Telukjambe Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau terutama di Kawasan Perkotaan Peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan</p>	<p>Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam terutama di Kecamatan Tegalwaru dan Kecamatan Pangkalan. Peningkatan kualitas dan akses informasi Sumber Daya Alam Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup terutama di Kecamatan Tegalwaru, Kecamatan Pangkalan, Kecamatan Ciampel, Kecamatan Klari, Kecamatan Telukjambe Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau terutama di Kawasan Perkotaan Peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan</p>

Indikator TPB	Kondisi 6 Muatan Kajian	Kondisi Indikator TPB	Arahan Program (Alternatif)	Rekomendasi
1	2	3	4	5
	<p>Klari, Kecamatan Telukjambe Timur dan Kecamatan Purwasari (6) Dampak dan Risiko LH pencemaran air di Sungai Citarum, Sungai Cilamya, Sungai Cikaranggelam dan Sungai Cibeet yang merupakan badan air penerima buangan oleh beberapa industri, pertumbuhan lahan kritis terus terjadi di lahan-lahan pertanian terluas di Kec.Pedes seluas 5.615 Ha, Timbulan sampah tertinggi dan belum optimal pelayanan persampahan di Kec.Rengasdengklok, Kec.Karawang Barat, Kec.Karawang Timur, Kec.Telukjambe Timur, Kec.Klari, Kec.Cikampek, dan Kec.Kotabaru, Jumlah emisi paling besar (Emisi CO₂ akibat penggunaan pupuk urea terdapat di kawasan pertanian (tinggi pangan) yaitu Kec.Tempuran, Kec.Tirtajaya, Kec.Cilamaya Kulon, dan Kec.Cilebar. Sementara itu peningkatan emisi CO₂ akibat aktifitas kawasan perkotaan dan kawasan industri terdapat di daerah industri,</p>			

Indikator TPB	Kondisi 6 Muatan Kajian	Kondisi Indikator TPB	Arahan Program (Alternatif)	Rekomendasi
1	2	3	4	5
	<p>terminal, pusat perbelanjaan (Kec.Cikampek, Kec.Purwasari, Kec.Klari, Kec.Telukjambe Timur, Kec.Karawang Timur, dan Kec.Pangkalan).</p> <p>(7) KEHATI Tentang flora khas tersebut, Bina Kependudukan dan Lingkungan Hidup Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tahun 1993/1994 menetapkan bahwa Jambu Air Cingcalo (Syzuim aquem) sebagai flora khas Daerah Kabupaten Karawang</p> <p>(8) Kerawanan Bencana Banjir, Erosi, Rawan Gelombang Pasang dan Kekeringan</p>			

Indikator TPB	Kondisi 6 Muatan Kajian	Kondisi Indikator TPB	Arahan Program (Alternatif)	Rekomendasi
1	2	3	4	5
<p>12.4.2.(a) Jumlah limbah B3 yang dikelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).</p>	<p>(1) Daya Dukung Air Terparah : Kec.Rengasdengklok,Kec. Karawang Barat, Kec.Karawang Timur, Kec. Telukjambe Timur, Kec.Klari, Kec.Cikampek, dan Kec.Kotabaru (2) Daya Dukung Pangan sudah terlampaui terdapat di Kec.Kotabaru, Kec.Klari, Kec. Cikampek, Kec. Telukjambe Timur, Kec.Majalaya, Kec.Karawang Timur, Kec.Karawang Barat, Kec.Pangkalan (3) Daya Dukung Fungsi Lahan Lindung memiliki indeks 0,48 termasuk kategori kualitas daya dukung lahan sedang (4) Daya Dukung Lahan Terbangun memiliki indeks 3,36 termasuk kategori daya dukung lahan terbangun kondisi baik (5) Daya Tampung penduduk yang sudah terlampaui pada tahun 2024 yaitu Kecamatan Cikampek, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Karawang Barat, Kecamatan Rengasdengklok, Kecamatan</p>	<p>Persentase pengelolaan limbah B3 masih belum optimal, Belum optimalnya sarana dan prasarana pengelolaan limbah, Kabupaten Karawang belum memiliki sarana pengolah limbah di wilayah pesisir, sehingga lingkungan pesisir di wilayah Kabupaten Karawang terlihat kotor oleh limbah, baik yang berasal dari kegiatan domestik maupun home industry, 2. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur wilayah yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal untuk pengelolaan limbah</p>	<p>Meningkatkan besar anggaran terkait dengan pengelolaan limbah lebih Meningkatkan penyediaan sarana pengolahan limbah B3; Mendorong pengelolaan limbah B3 secara mandiri Membatasi pembangunan sarana pengolahan limbah mendekati sungai ataupun kawasan pesisir haru memiliki buffer sejauh minimal lebih dari 100 meter; Meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk pemilahan limbah; Meningkatkan pengawasan industri dalam pengolahan limbah B3 (insentif dan disinsentif)</p>	<p>Meningkatkan besar anggaran terkait dengan pengelolaan limbah lebih Meningkatkan penyediaan sarana pengolahan limbah B3; Mendorong pengelolaan limbah B3 secara mandiri Membatasi pembangunan sarana pengolahan limbah mendekati sungai ataupun kawasan pesisir haru memiliki buffer sejauh minimal lebih dari 100 meter; Meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk pemilahan limbah; Meningkatkan pengawasan industri dalam pengolahan limbah B3 (insentif dan disinsentif)</p>

Indikator TPB	Kondisi 6 Muatan Kajian	Kondisi Indikator TPB	Arahan Program (Alternatif)	Rekomendasi
1	2	3	4	5
	<p>Klari, Kecamatan Telukjambe Timur dan Kecamatan Purwasari (6) Dampak dan Risiko LH pencemaran air di Sungai Citarum, Sungai Cilamya, Sungai Cikaranggelam dan Sungai Cibeet yang merupakan badan air penerima buangan oleh beberapa industri, pertumbuhan lahan kritis terus terjadi di lahan-lahan pertanian terluas di Kec.Pedes seluas 5.615 Ha, Timbulan sampah tertinggi dan belum optimal pelayanan persampahan di Kec.Rengasdengklok, Kec.Karawang Barat, Kec.Karawang Timur, Kec.Telukjambe Timur, Kec.Klari, Kec.Cikampek, dan Kec.Kotabaru, Jumlah emisi paling besar (Emisi CO₂ akibat penggunaan pupuk urea terdapat di kawasan pertanian (tinggi pangan) yaitu Kec.Tempuran, Kec.Tirtajaya, Kec Cilamaya Kulon, dan Kec.Cilebar. Sementara itu peningkatan emisi CO₂ akibat aktifitas kawasan perkotaan dan kawasan industri terdapat di daerah industri,</p>			

Indikator TPB	Kondisi 6 Muatan Kajian	Kondisi Indikator TPB	Arahan Program (Alternatif)	Rekomendasi
1	2	3	4	5
	<p>terminal, pusat perbelanjaan (Kec.Cikampek, Kec.Purwasari, Kec.Klari, Kec.Telukjambe Timur, Kec.Karawang Timur, dan Kec.Pangkalan).</p> <p>(7) KEHATI Tentang flora khas tersebut, Bina Kependudukan dan Lingkungan Hidup Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tahun 1993/1994 menetapkan bahwa Jambu Air Cingcalo (Syzuim aquem) sebagai flora khas Daerah Kabupaten Karawang</p> <p>(8) Kerawanan Bencana Banjir, Erosi, Rawan Gelombang Pasang dan Kekeringan</p>			

Indikator TPB	Kondisi 6 Muatan Kajian	Kondisi Indikator TPB	Arahan Program (Alternatif)	Rekomendasi
1	2	3	4	5
<p>7.1.2 Proporsi penduduk dengan sumber energi utama pada teknologi dan bahan bakar yang bersih.</p>	<p>(1) Daya Dukung Air Terparah : Kec.Rengasdengklok,Kec. Karawang Barat, Kec.Karawang Timur, Kec. Telukjambe Timur, Kec.Klari, Kec.Cikampek, dan Kec.Kotabaru (2) Daya Dukung Pangan sudah terlampaui terdapat di Kec.Kotabaru, Kec.Klari, Kec. Cikampek, Kec. Telukjambe Timur, Kec.Majalaya, Kec.Karawang Timur, Kec.Karawang Barat, Kec.Pangkalan (3) Daya Dukung Fungsi Lahan Lindung memiliki indeks 0,48 termasuk kategori kualitas daya dukung lahan sedang (4) Daya Dukung Lahan Terbangun memiliki indeks 3,36 termasuk kategori daya dukung lahan terbangun kondisi baik (5) Daya Tampung penduduk yang sudah terlampaui pada tahun 2024 yaitu Kecamatan Cikampek, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Karawang Barat, Kecamatan Rengasdengklok, Kecamatan</p>	<p>Rumah Tangga kurang mampu yang belum mendapat sambungan listrik masih cukup banyak, sampai dengan tahun 2015 baru 29.476 sambungan listrik yang terpasang dari data jumlah keluarga miskin sebanyak 40.907 keluarga, sehingga masih tersisa 11.431 keluarga miskin yang belum mendapat sambungan listrik, Kecamatan yang masih memiliki presentase yang rendah terkait dengan penggunaan bahan bakar bersih adalah Kecamatan Pangkalan, Kecamatan Tegalwaru, Kecamatan Ciampel dan Kecamatan Pasirjaya.</p>	<p>1. Pemerataan layanan listrik antara perdesaan dan perkotaan. 2. Pemanfaatan energi baru terbarukan</p>	<p>Mengembangkan energi listrik solar system; Meningkatkan pemerataan layanan listrik antara perdesaan dan perkotaan</p>

Indikator TPB	Kondisi 6 Muatan Kajian	Kondisi Indikator TPB	Arahan Program (Alternatif)	Rekomendasi
1	2	3	4	5
	<p>Klari, Kecamatan Telukjambe Timur dan Kecamatan Purwasari (6) Dampak dan Risiko LH pencemaran air di Sungai Citarum, Sungai Cilamya, Sungai Cikaranggelam dan Sungai Cibeet yang merupakan badan air penerima buangan oleh beberapa industri, pertumbuhan lahan kritis terus terjadi di lahan-lahan pertanian terluas di Kec.Pedes seluas 5.615 Ha, Timbulan sampah tertinggi dan belum optimal pelayanan persampahan di Kec.Rengasdengklok, Kec.Karawang Barat, Kec.Karawang Timur, Kec.Telukjambe Timur, Kec.Klari, Kec.Cikampek, dan Kec.Kotabaru, Jumlah emisi paling besar (Emisi CO2 akibat penggunaan pupuk urea terdapat di kawasan pertanian (tinggi pangan) yaitu Kec.Tempuran, Kec.Tirtajaya, Kec Cilamaya Kulon, dan Kec.Cilebar. Sementara itu peningkatan emisi CO2 akibat aktifitas kawasan perkotaan dan kawasan industri terdapat di daerah industri,</p>			

Indikator TPB	Kondisi 6 Muatan Kajian	Kondisi Indikator TPB	Arahan Program (Alternatif)	Rekomendasi
1	2	3	4	5
	<p>terminal, pusat perbelanjaan (Kec.Cikampek, Kec.Purwasari, Kec.Klari, Kec.Telukjambe Timur, Kec.Karawang Timur, dan Kec.Pangkalan).</p> <p>(7) KEHATI Tentang flora khas tersebut, Bina Kependudukan dan Lingkungan Hidup Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tahun 1993/1994 menetapkan bahwa Jambu Air Cingcalo (Syzuim aquem) sebagai flora khas Daerah Kabupaten Karawang</p> <p>(8) Kerawanan Bencana Banjir, Erosi, Rawan Gelombang Pasang dan Kekeringan</p>			

Indikator TPB	Kondisi 6 Muatan Kajian	Kondisi Indikator TPB	Arahan Program (Alternatif)	Rekomendasi
1	2	3	4	5
<p>6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.</p>	<p>(1) Daya Dukung Air Terparah : Kec.Rengasdengklok,Kec. Karawang Barat, Kec.Karawang Timur, Kec. Telukjambe Timur, Kec.Klari, Kec.Cikampek, dan Kec.Kotabaru (2) Daya Dukung Pangan sudah terlampaui terdapat di Kec.Kotabaru, Kec.Klari, Kec. Cikampek, Kec. Telukjambe Timur, Kec.Majalaya, Kec.Karawang Timur, Kec.Karawang Barat, Kec.Pangkalan (3) Daya Dukung Fungsi Lahan Lindung memiliki indeks 0,48 termasuk kategori kualitas daya dukung lahan sedang (4) Daya Dukung Lahan Terbangun memiliki indeks 3,36 termasuk kategori daya dukung lahan terbangun kondisi baik (5) Daya Tampung penduduk yang sudah terlampaui pada tahun 2024 yaitu Kecamatan Cikampek, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Karawang Barat, Kecamatan Rengasdengklok, Kecamatan</p>	<p>Belum optimalnya penyediaan infrastruktur wilayah yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal untuk air minum layak, Belum optimalnya pengelolaan air minum layak, Belum terintegrasinya penataan sarana dan prasarana lingkungan sanitasi, air bersih dan drainase baik di perkotaan dan perdesaan, Menurunnya fungsi air karena masuknya limbah ke dalam air dan menyebabkan timbulnya masalah rawan air bersih, Perlu dioptimalkan pengawasan dan penertiban penggunaan air bawah tanah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan cakupan pelayanan air perpipaan 2. Peningkatan infrastruktur air minum sesuai dengan SPM 3. Peningkatan jangkauan pelayanan air minum layak 	<p>Meningkatkan pelayanan air minum layak 7,5 persen per tahun; Mengembangkan skema pelayanan air kerjasama dengan kota/kabupaten sekitarnya untuk pelayanan rawan defisit air di Kec.Rengasdengklok,Kec. Karawang Barat, Kec.Karawang Timur, Kec. Telukjambe Timur, Kec.Klari, Kec.Cikampek, dan Kec.Kotabaru ; Meningkatkan infrastruktur air minum sesuai dengan SPM; Meningkatkan cakupan pelayanan air perpipaan.</p>

Indikator TPB	Kondisi 6 Muatan Kajian	Kondisi Indikator TPB	Arahan Program (Alternatif)	Rekomendasi
1	2	3	4	5
	<p>Klari, Kecamatan Telukjambe Timur dan Kecamatan Purwasari (6) Dampak dan Risiko LH pencemaran air di Sungai Citarum, Sungai Cilamya, Sungai Cikarangelam dan Sungai Cibeet yang merupakan badan air penerima buangan oleh beberapa industri, pertumbuhan lahan kritis terus terjadi di lahan-lahan pertanian terluas di Kec.Pedes seluas 5.615 Ha, Timbulan sampah tertinggi dan belum optimal pelayanan persampahan di Kec.Rengasdengklok, Kec.Karawang Barat, Kec.Karawang Timur, Kec.Telukjambe Timur, Kec.Klari, Kec.Cikampek, dan Kec.Kotabaru, Jumlah emisi paling besar (Emisi CO₂ akibat penggunaan pupuk urea terdapat di kawasan pertanian (tinggi pangan) yaitu Kec.Tempuran, Kec.Tirtajaya, Kec.Cilamaya Kulon, dan Kec.Cilebar. Sementara itu peningkatan emisi CO₂ akibat aktifitas kawasan perkotaan dan kawasan industri terdapat di daerah industri,</p>			

Indikator TPB	Kondisi 6 Muatan Kajian	Kondisi Indikator TPB	Arahan Program (Alternatif)	Rekomendasi
1	2	3	4	5
	<p>terminal, pusat perbelanjaan (Kec.Cikampek, Kec.Purwasari, Kec.Klari, Kec.Telukjambe Timur, Kec.Karawang Timur, dan Kec.Pangkalan).</p> <p>(7) KEHATI Tentang flora khas tersebut, Bina Kependudukan dan Lingkungan Hidup Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tahun 1993/1994 menetapkan bahwa Jambu Air Cingcalo (Syzuim aquem) sebagai flora khas Daerah Kabupaten Karawang</p> <p>(8) Kerawanan Bencana Banjir, Erosi, Rawan Gelombang Pasang dan Kekeringan</p>			

Indikator TPB	Kondisi 6 Muatan Kajian	Kondisi Indikator TPB	Arahan Program (Alternatif)	Rekomendasi
1	2	3	4	5
<p>6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.</p>	<p>(1) Daya Dukung Air Terparah : Kec.Rengasdengklok,Kec. Karawang Barat, Kec.Karawang Timur, Kec. Telukjambe Timur, Kec.Klari, Kec.Cikampek, dan Kec.Kotabaru (2) Daya Dukung Pangan sudah terlampaui terdapat di Kec.Kotabaru, Kec.Klari, Kec. Cikampek, Kec. Telukjambe Timur, Kec.Majalaya, Kec.Karawang Timur, Kec.Karawang Barat, Kec.Pangkalan (3) Daya Dukung Fungsi Lahan Lindung memiliki indeks 0,48 termasuk kategori kualitas daya dukung lahan sedang (4) Daya Dukung Lahan Terbangun memiliki indeks 3,36 termasuk kategori daya dukung lahan terbangun kondisi baik (5) Daya Tampung penduduk yang sudah terlampaui pada tahun 2024 yaitu Kecamatan Cikampek, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Karawang Barat, Kecamatan Rengasdengklok, Kecamatan</p>	<p>Belum optimalnya penyediaan infrastruktur wilayah yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal untuk sanitasi, Belum optimalnya pengelolaan sanitasi layak, Belum terintegrasinya penataan sarana dan prasarana lingkungan sanitasi, air bersih dan drainase baik di perkotaan dan perdesaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 2. Peningkatan pelayanan pengelolaan sampah 3. Peningkatan infrastruktur persampahan sesuai dengan SPM 4. Peningkatan pelayanan air limbah 5. Peningkatan infrastruktur sesuai dengan SPM 	<p>Meningkatkan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong; Meningkatkan pelayanan pengelolaan sampah; Meningkatkan infrastruktur persampahan sesuai dengan SPM; Meningkatkan pelayanan air limbah; Meningkatkan infrastruktur sesuai dengan SPM</p>

Indikator TPB	Kondisi 6 Muatan Kajian	Kondisi Indikator TPB	Arahan Program (Alternatif)	Rekomendasi
1	2	3	4	5
	<p>Klari, Kecamatan Telukjambe Timur dan Kecamatan Purwasari (6) Dampak dan Risiko LH pencemaran air di Sungai Citarum, Sungai Cilamya, Sungai Cikaranggelam dan Sungai Cibeet yang merupakan badan air penerima buangan oleh beberapa industri, pertumbuhan lahan kritis terus terjadi di lahan-lahan pertanian terluas di Kec.Pedes seluas 5.615 Ha, Timbulan sampah tertinggi dan belum optimal pelayanan persampahan di Kec.Rengasdengklok, Kec.Karawang Barat, Kec.Karawang Timur, Kec.Telukjambe Timur, Kec.Klari, Kec.Cikampek, dan Kec.Kotabaru, Jumlah emisi paling besar (Emisi CO₂ akibat penggunaan pupuk urea terdapat di kawasan pertanian (tinggi pangan) yaitu Kec.Tempuran, Kec.Tirtajaya, Kec.Cilamaya Kulon, dan Kec.Cilebar. Sementara itu peningkatan emisi CO₂ akibat aktifitas kawasan perkotaan dan kawasan industri terdapat di daerah industri,</p>			

Indikator TPB	Kondisi 6 Muatan Kajian	Kondisi Indikator TPB	Arahan Program (Alternatif)	Rekomendasi
1	2	3	4	5
	<p>terminal, pusat perbelanjaan (Kec.Cikampek, Kec.Purwasari, Kec.Klari, Kec.Telukjambe Timur, Kec.Karawang Timur, dan Kec.Pangkalan).</p> <p>(7) KEHATI Tentang flora khas tersebut, Bina Kependudukan dan Lingkungan Hidup Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tahun 1993/1994 menetapkan bahwa Jambu Air Cingcalo (Syzuim aquem) sebagai flora khas Daerah Kabupaten Karawang</p> <p>(8) Kerawanan Bencana Banjir, Erosi, Rawan Gelombang Pasang dan Kekeringan</p>			

Indikator TPB	Kondisi 6 Muatan Kajian	Kondisi Indikator TPB	Arahan Program (Alternatif)	Rekomendasi
1	2	3	4	5
<p>6.2.1.(d) Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).</p>	<p>(1) Daya Dukung Air Terparah : Kec.Rengasdengklok,Kec. Karawang Barat, Kec.Karawang Timur, Kec. Telukjambe Timur, Kec.Klari, Kec.Cikampek, dan Kec.Kotabaru (2) Daya Dukung Pangan sudah terlampaui terdapat di Kec.Kotabaru, Kec.Klari, Kec. Cikampek, Kec. Telukjambe Timur, Kec.Majalaya, Kec.Karawang Timur, Kec.Karawang Barat, Kec.Pangkalan (3) Daya Dukung Fungsi Lahan Lindung memiliki indeks 0,48 termasuk kategori kualitas daya dukung lahan sedang (4) Daya Dukung Lahan Terbangun memiliki indeks 3,36 termasuk kategori daya dukung lahan terbangun kondisi baik (5) Daya Tampung penduduk yang sudah terlampaui pada tahun 2024 yaitu Kecamatan Cikampek, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Karawang Barat, Kecamatan Rengasdengklok, Kecamatan</p>		<p>Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan</p>	<p>Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan</p>

Indikator TPB	Kondisi 6 Muatan Kajian	Kondisi Indikator TPB	Arahan Program (Alternatif)	Rekomendasi
1	2	3	4	5
	<p>Klari, Kecamatan Telukjambe Timur dan Kecamatan Purwasari (6) Dampak dan Risiko LH pencemaran air di Sungai Citarum, Sungai Cilamya, Sungai Cikaranggelam dan Sungai Cibeet yang merupakan badan air penerima buangan oleh beberapa industri, pertumbuhan lahan kritis terus terjadi di lahan-lahan pertanian terluas di Kec.Pedes seluas 5.615 Ha, Timbulan sampah tertinggi dan belum optimal pelayanan persampahan di Kec.Rengasdengklok, Kec.Karawang Barat, Kec.Karawang Timur, Kec.Telukjambe Timur, Kec.Klari, Kec.Cikampek, dan Kec.Kotabaru, Jumlah emisi paling besar (Emisi CO₂ akibat penggunaan pupuk urea terdapat di kawasan pertanian (tinggi pangan) yaitu Kec.Tempuran, Kec.Tirtajaya, Kec.Cilamaya Kulon, dan Kec.Cilebar. Sementara itu peningkatan emisi CO₂ akibat aktifitas kawasan perkotaan dan kawasan industri terdapat di daerah industri,</p>			

Indikator TPB	Kondisi 6 Muatan Kajian	Kondisi Indikator TPB	Arahan Program (Alternatif)	Rekomendasi
1	2	3	4	5
	<p>terminal, pusat perbelanjaan (Kec.Cikampek, Kec.Purwasari, Kec.Klari, Kec.Telukjambe Timur, Kec.Karawang Timur, dan Kec.Pangkalan).</p> <p>(7) KEHATI Tentang flora khas tersebut, Bina Kependudukan dan Lingkungan Hidup Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tahun 1993/1994 menetapkan bahwa Jambu Air Cingcalo (Syzuim aquem) sebagai flora khas Daerah Kabupaten Karawang</p> <p>(8) Kerawanan Bencana Banjir, Erosi, Rawan Gelombang Pasang dan Kekeringan</p>			
Misi 5 : Membangun Kabupaten Karawang Melalui Penguatan Desa				

Indikator TPB	Kondisi 6 Muatan Kajian	Kondisi Indikator TPB	Arahan Program (Alternatif)	Rekomendasi
1	2	3	4	5
10.1.1* Koefisien Gini.	<p>(1) Daya Dukung Air Terparah : Kec.Rengasdengklok,Kec. Karawang Barat, Kec.Karawang Timur, Kec. Telukjambe Timur, Kec.Klari, Kec.Cikampek, dan Kec.Kotabaru</p> <p>(2) Daya Dukung Pangan sudah terlampaui terdapat di Kec.Kotabaru, Kec.Klari, Kec. Cikampek, Kec. Telukjambe Timur, Kec.Majalaya, Kec.Karawang Timur, Kec.Karawang Barat, Kec.Pangkalan</p> <p>(3) Daya Dukung Fungsi Lahan Lindung memiliki indeks 0,48 termasuk kategori kualitas daya dukung lahan sedang</p> <p>(4) Daya Dukung Lahan Terbangun memiliki indeks 3,36 termasuk kategori daya dukung lahan terbangun kondisi baik</p> <p>(5) Daya Tampung penduduk yang sudah terlampaui pada tahun 2024 yaitu Kecamatan Cikampek, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Karawang Barat, Kecamatan Rengasdengklok, Kecamatan</p>	<p>Kesenjangan sosial antara perkotaan dan pedesaan tinggi., Kesenjangan antar wilayah dalam penyediaan sarana prasarana, Kecenderungan pengembangan perumahan sub urbanisasi, urban sprawl, Ego sektoral dalam perencanaan pembangunan masih tinggi, Sumberdaya manusia pengelola pemberdayaan masyarakat desa belum optimal</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pembangunan di pedesaan 2. Pemerataan pendapatan antara pedesaan dan perkotaan 3. Pengembangan basis ekonomi di pedesaan 4. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 5. Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 6. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 	<p>Meningkatan pembangunan di pedesaan; Meningkatkan pemerataan pendapatan antara pedesaan dan perkotaan; Mengembangkan basis ekonomi di pedesaan; Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan; Mengembangkan Lembaga Ekonomi Pedesaan; Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</p>

Indikator TPB	Kondisi 6 Muatan Kajian	Kondisi Indikator TPB	Arahan Program (Alternatif)	Rekomendasi
1	2	3	4	5
	<p>Klari, Kecamatan Telukjambe Timur dan Kecamatan Purwasari (6) Dampak dan Risiko LH pencemaran air di Sungai Citarum, Sungai Cilamya, Sungai Cikaranggelam dan Sungai Cibee yang merupakan badan air penerima buangan oleh beberapa industri, pertumbuhan lahan kritis terus terjadi di lahan-lahan pertanian terluas di Kec.Pedes seluas 5.615 Ha, Timbulan sampah tertinggi dan belum optimal pelayanan persampahan di Kec.Rengasdengklok, Kec.Karawang Barat, Kec.Karawang Timur, Kec.Telukjambe Timur, Kec.Klari, Kec.Cikampek, dan Kec.Kotabaru, Jumlah emisi paling besar (Emisi CO₂ akibat penggunaan pupuk urea terdapat di kawasan pertanian (tinggi pangan) yaitu Kec.Tempuran, Kec.Tirtajaya, Kec.Cilamaya Kulon, dan Kec.Cilebar. Sementara itu peningkatan emisi CO₂ akibat aktifitas kawasan perkotaan dan kawasan industri terdapat di daerah industri,</p>			

Indikator TPB	Kondisi 6 Muatan Kajian	Kondisi Indikator TPB	Arahan Program (Alternatif)	Rekomendasi
1	2	3	4	5
	<p>terminal, pusat perbelanjaan (Kec.Cikampek, Kec.Purwasari, Kec.Klari, Kec.Telukjambe Timur, Kec.Karawang Timur, dan Kec.Pangkalan).</p> <p>(7) KEHATI Tentang flora khas tersebut, Bina Kependudukan dan Lingkungan Hidup Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tahun 1993/1994 menetapkan bahwa Jambu Air Cingcalo (Syzuim aquem) sebagai flora khas Daerah Kabupaten Karawang</p> <p>(8) Kerawanan Bencana Banjir, Erosi, Rawan Gelombang Pasang dan Kekeringan</p>			

Indikator TPB	Kondisi 6 Muatan Kajian	Kondisi Indikator TPB	Arahan Program (Alternatif)	Rekomendasi
1	2	3	4	5
10.1.1.(c) Persentase desa tertinggal	<p>(1) Daya Dukung Air Terparah : Kec.Rengasdengklok,Kec. Karawang Barat, Kec.Karawang Timur, Kec. Telukjambe Timur, Kec.Klari, Kec.Cikampek, dan Kec.Kotabaru</p> <p>(2) Daya Dukung Pangan sudah terlampaui terdapat di Kec.Kotabaru, Kec.Klari, Kec. Cikampek, Kec. Telukjambe Timur, Kec.Majalaya, Kec.Karawang Timur, Kec.Karawang Barat, Kec.Pangkalan</p> <p>(3) Daya Dukung Fungsi Lahan Lindung memiliki indeks 0,48 termasuk kategori kualitas daya dukung lahan sedang</p> <p>(4) Daya Dukung Lahan Terbangun memiliki indeks 3,36 termasuk kategori daya dukung lahan terbangun kondisi baik</p> <p>(5) Daya Tampung penduduk yang sudah terlampaui pada tahun 2024 yaitu Kecamatan Cikampek, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Karawang Barat, Kecamatan Rengasdengklok, Kecamatan</p>	<p>Kesenjangan sosial antara perkotaan dan pedesaan tinggi., Kesenjangan antar wilayah dalam penyediaan sarana prasarana, Kecenderungan pengembangan perumahan sub urbanisasi, urban sprawl, Ego sektoral dalam perencanaan pembangunan masih tinggi, Pemantapan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintahan desa dan pembangunan desa.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pembangunan di pedesaan 2. Pemerataan pendapatan antara pedesaan dan perkotaan 3. Pengembangan basis ekonomi di pedesaan 4. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 5. Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 6. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 	<p>Meningkatan pembangunan di pedesaan; Meningkatkan pemerataan pendapatan antara pedesaan dan perkotaan; Mengembangkan basis ekonomi di pedesaan; Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan; Mengembangkan Lembaga Ekonomi Pedesaan; Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</p>

Indikator TPB	Kondisi 6 Muatan Kajian	Kondisi Indikator TPB	Arahan Program (Alternatif)	Rekomendasi
1	2	3	4	5
	<p>Klari, Kecamatan Telukjambe Timur dan Kecamatan Purwasari (6) Dampak dan Risiko LH pencemaran air di Sungai Citarum, Sungai Cilamya, Sungai Cikaranggalam dan Sungai Cibeet yang merupakan badan air penerima buangan oleh beberapa industri, pertumbuhan lahan kritis terus terjadi di lahan-lahan pertanian terluas di Kec.Pedes seluas 5.615 Ha, Timbulan sampah tertinggi dan belum optimal pelayanan persampahan di Kec.Rengasdengklok, Kec.Karawang Barat, Kec.Karawang Timur, Kec.Telukjambe Timur, Kec.Klari, Kec.Cikampek, dan Kec.Kotabaru, Jumlah emisi paling besar (Emisi CO₂ akibat penggunaan pupuk urea terdapat di kawasan pertanian (tinggi pangan) yaitu Kec.Tempuran, Kec.Tirtajaya, Kec.Cilamaya Kulon, dan Kec.Cilebar. Sementara itu peningkatan emisi CO₂ akibat aktifitas kawasan perkotaan dan kawasan industri terdapat di daerah industri,</p>			

Indikator TPB	Kondisi 6 Muatan Kajian	Kondisi Indikator TPB	Arahan Program (Alternatif)	Rekomendasi
1	2	3	4	5
	<p>terminal, pusat perbelanjaan (Kec.Cikampek, Kec.Purwasari, Kec.Klari, Kec.Telukjambe Timur, Kec.Karawang Timur, dan Kec.Pangkalan).</p> <p>(7) KEHATI Tentang flora khas tersebut, Bina Kependudukan dan Lingkungan Hidup Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tahun 1993/1994 menetapkan bahwa Jambu Air Cingcalo (Syzuim aquem) sebagai flora khas Daerah Kabupaten Karawang</p> <p>(8) Kerawanan Bencana Banjir, Erosi, Rawan Gelombang Pasang dan Kekeringan</p>			

4.2.3 Telaahan Terhadap RPJMD Provinsi Jawa Barat

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009–2029, menetapkan 6 (enam) Wilayah Pengembangan (WP), yaitu WP Bodebekpunjur, WP Purwasuka, WP Ciayumajakuning, WP Priangan Timur dan Pangandaran, WP Sukabumi dan sekitarnya, serta WP Kawasan Khusus (KK) Cekungan Bandung. Masing-masing WP dirumuskan dengan fokus pengembangan sebagai berikut:

- a. WP Bodebekpunjur, mencakup wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor dan sebagian Kabupaten Cianjur (Kecamatan Cugenang, Kecamatan Pacet, Kecamatan Sukaresmi dan Kecamatan Cipanas). Fokus Pengembangan WP dalam sektor pariwisata, industri manufaktur, perikanan, perdagangan, jasa, pertambangan, agribisnis dan agrowisata.
- b. WP Purwasuka, mencakup Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Karawang. Wilayah ini memiliki potensi pengembangan pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, bisnis kelautan, industri pengolahan, pariwisata, dan pertambangan. Kab. Karawang merupakan simpul pendukung pengembangan PKN Kawasan Perkotaan Bodebek; pertanian lahan basah berkelanjutan; bisnis kelautan; industri non-polutif dan non-ekstraktif yang tidak mengganggu irigasi dan cadangan air; agroindustri.
- c. WP Ciayumajakuning, mencakup Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu dan Kota Cirebon. Fokus Pengembangan WP dalam sektor agribisnis, agroindustri, perikanan, pertambangan, dan pariwisata.

- d. WP Priatim–Pangandaran, mencakup Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran. Fokus pengembangan WP dalam sektor pertanian, perkebunan, perikanan tangkap, pariwisata, industri pengolahan, dan pertambangan mineral.
- e. WP Sukabumi, mencakup Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi dan Kabupaten Cianjur. Fokus Pengembangan WP dalam sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan tangkap, pariwisata, industri pengolahan, bisnis kelautan, dan pertambangan mineral.
- f. WP Kawasan Khusus Cekungan Bandung, mencakup Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung dan sebagian Kabupaten Sumedang (Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Sukasari dan Kecamatan Pamulihan). Fokus pengembangan WP pada sektor pertanian hortikultura, industri non-polutif, industri kreatif, perdagangan dan jasa, pariwisata, dan perkebunan.

4.2.4 Telaahan Terhadap RTRW Kabupaten Karawang

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan penataan ruang di wilayahnya. Dalam sistem perkotaan nasional terdapat Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Kabupaten Karawang termasuk ke dalam sistem perkotaan nasional. Kabupaten Karawang termasuk ke dalam PKW

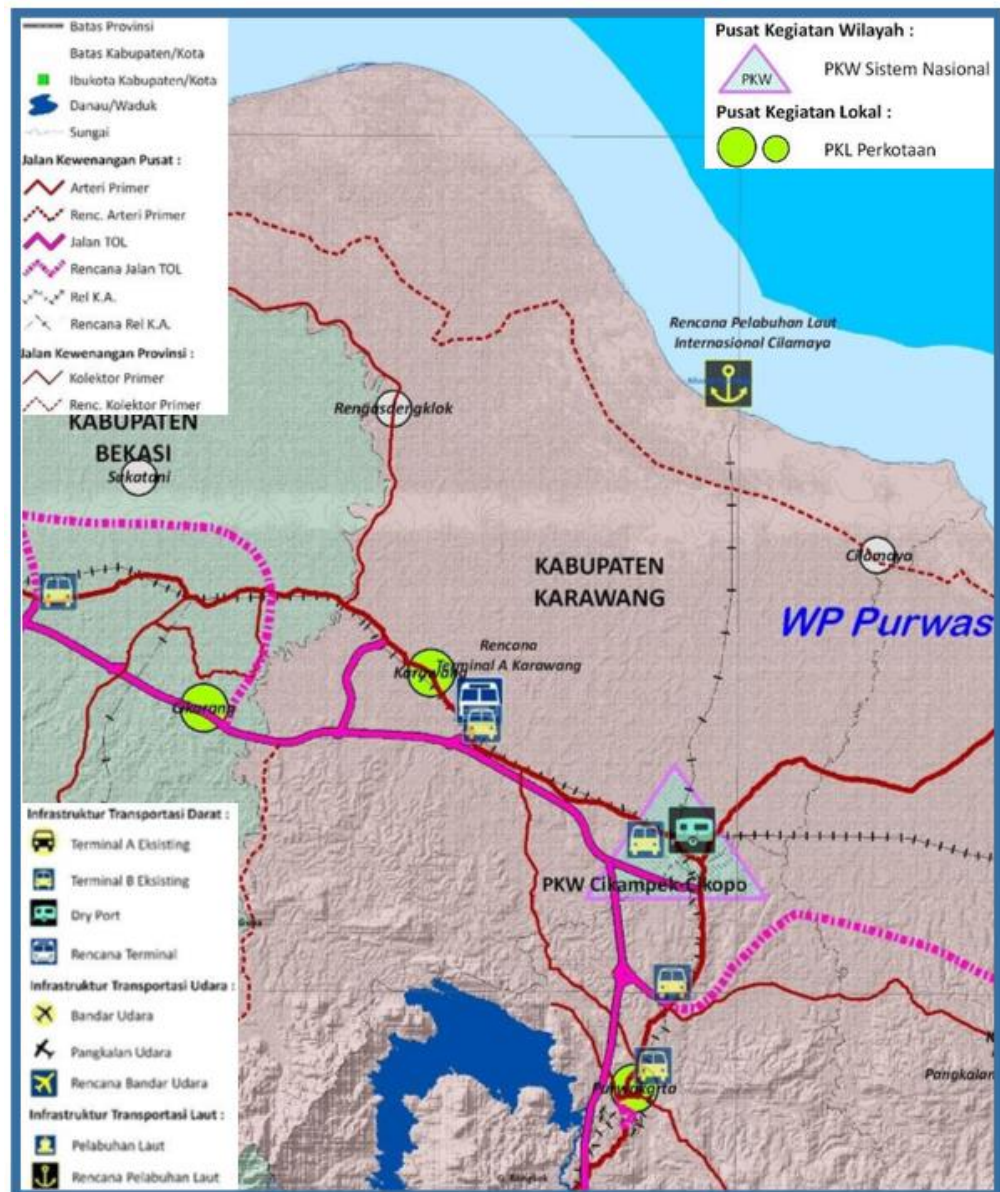
Cikampek-Cikopo. Sedangkan penetapan Kabupaten Karawang sebagai PKL Perkotaan diatur didalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat. PKL perkotaan Karawang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan. Penetapan PKL perkotaan diarahkan pada pertimbangan teknis bahwa kota-kota yang ditetapkan memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan perkotaan dengan kegiatan-kegiatan yang berciri perkotaan, seperti industri, permukiman perkotaan, perdagangan dan jasa, dan lainnya.

Pada skala regional, Kabupaten Karawang termasuk ke dalam salah satu dari tujuh Kawasan Andalan yang berada di Provinsi Jawa Barat, yaitu Kawasan Andalan Purwasuka (Kawasan Purwakarta, Subang, Karawang) dengan fokus pengembangan pada: Pertanian Pangan Abadi, Industri Pengolahan, Pariwisata, dan Perikanan. Kawasan ini merupakan kawasan yang terletak di antara dua kawasan yang berkembang pesat, yaitu Bodebek dan Metropolitan Bandung Raya. Oleh karena itu, kawasan ini rawan terhadap potensi alih fungsi lahan menjadi kawasan industri dan perkotaan, terutama fungsinya sebagai ruang pangan Jawa Barat, alih fungsi lahan produksi pangan menjadi perhatian yang serius. Sektor unggulan yang dapat dikembangkan di WP ini adalah pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, bisnis kelautan, pariwisata, dan pertambangan. Terkait dengan sektor unggulan pertanian yang dimiliki, pengembangan ekonomi diarahkan pada peningkatan produksi dan distribusi pangan.

Pengembangan kawasan diarahkan untuk mewujudkan kawasan unggul industri pengolahan dengan tetap mempertahankan kegiatan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan perikanan darat pada kawasan yang telah mengembangkannya. Untuk kawasan pesisir diarahkan pengembangan bisnis kelautan yang berdaya saing tinggi dan berorientasi ekspor. Tema pengembangan untuk WP Purwasuka adalah mendorong pengembangan kawasan dengan tetap mengendalikan lahan sawah di Pantura.

Peran Kabupaten Karawang dalam pengembangan WP ini adalah:

- PKW Cikampek-Cikopo, diarahkan untuk memenuhi fungsinya sebagai PKW dengan melengkapi sarana dan prasarana yang terintegrasi dengan wilayah pengaruhnya (hinterland);
- Kabupaten Karawang, diarahkan menjadi simpul pendukung pengembangan PKN Kawasan Perkotaan Bodebek, untuk kegiatan pertanian lahan basah berkelanjutan, bisnis kelautan, industri non-polutif dan non-ekstraktif yang tidak mengganggu irigasi dan cadangan air, serta kegiatan agroindustri.

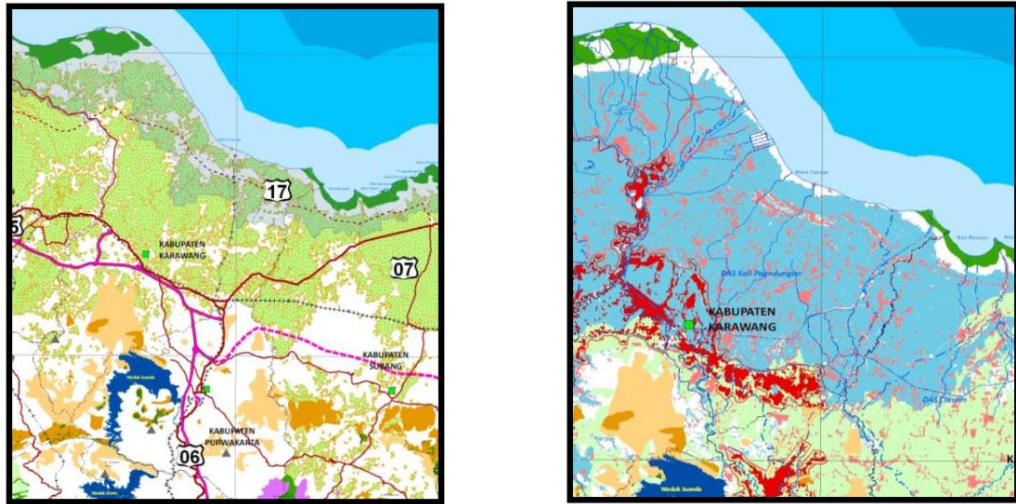


Gambar 4.1. Posisi Kabupaten Karawang Dalam Konteks Nasional dan Regional

Sumber: Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang RTRWP Jawa Barat

Aspek lokasi merupakan posisi karawang dalam hal fungsi kepada wilayah lainnya. Beberapa dokumen yang menyebutkan posisi dari Kabupaten Karawang adalah RTRWN, RTRW Provinsi Jawa Barat, serta Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016.

3. RTRWN (Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional)^[1]RTRWN (Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional) berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan penataan ruang di wilayahnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), sistem perkotaan nasional terdiri atas Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Kabupaten Karawang termasuk ke dalam PKL dan diatur didalam kebijakan penataan ruang provinsi.^[2]Pada skala regional, Kabupaten Karawang termasuk ke dalam salah satu dari tujuh Kawasan Andalan yang berada di Provinsi Jawa Barat, yaitu Kawasan Andalan Purwasuka (Kawasan Purwakarta, Subang, Karawang) dengan fokus pengembangan pada :
- Pertanian : Pengendalian Kawasan Andalan untuk Pertanian Pangan Abadi;
 - Industri : Pengembangan Kawasan Andalan untuk Industri Pengolahan;
 - Pariwisata : Pengembangan Kawasan Andalan untuk Pariwisata; dan
 - Perikanan : Pengembangan Kawasan Andalan untuk Perikanan.



Gambar 4.2. Kedudukan Kabupaten Karawang Dalam RTRWN

4. RTRW Provinsi Jawa Barat

Kebijakan Penataan ruang Provinsi Jawa Barat mengacu pada substansi penataan ruang yang terangkum dari proses penyusunan RTRW Provinsi Jawa Barat yang sedang berjalan. Beberapa aspek penunjang dalam penataan ruang Provinsi Jawa Barat tersebut adalah :

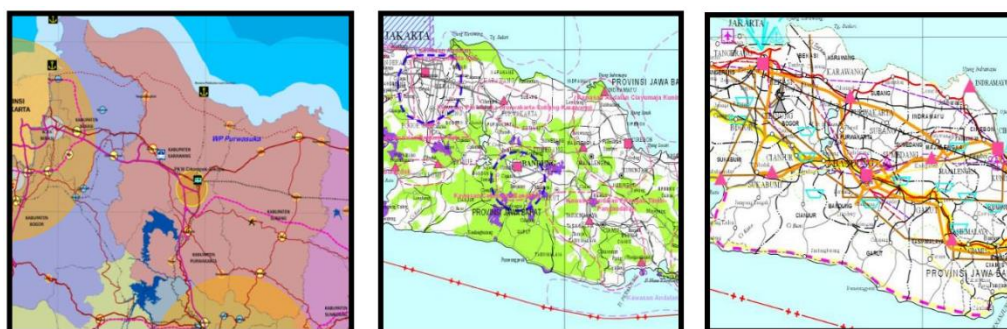
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kabupaten Karawang termasuk dalam PKL dalam sistem perkotaan Jawa Barat. Pusat kegiatan lokal perkotaan adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
- Rencana Pengembangan Wilayah Pengembangan (WP) PURWASUKA Wilayah pengembangan Purwasuka meliputi Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Karawang. Kawasan ini merupakan kawasan yang terletak di antara dua kawasan yang berkembang pesat, yaitu Bodebek dan Metropolitan Bandung Raya. Pengembangan kawasan diarahkan untuk mewujudkan

kawasan unggul industri pengolahan dengan tetap mempertahankan kegiatan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan perikanan darat pada kawasan yang telah mengembangkannya. Untuk kawasan pesisir diarahkan pengembangan bisnis kelautan yang berdaya saing tinggi dan berorientasi ekspor.

Tema pengembangan untuk WP Purwasuka adalah mendorong pengembangan kawasan dengan tetap mengendalikan lahan sawah di Pantura. Fokus pengembangan WP ini adalah:

- g. PKW Cikampek-Cikopo, diarahkan untuk memenuhi fungsinya sebagai PKW dengan melengkapi sarana dan prasarana yang terintegrasi dengan wilayah pengaruhnya (*hinterland*);
- h. Kabupaten Purwakarta, diarahkan untuk kegiatan industri non polutif dan non ekstraktif atau tidak mengganggu irigasi dan cadangan air, industri kreatif, pariwisata dan agroindustri, serta kegiatan pertambangan mineral logam dan non logam;
- i. Kabupaten Subang, diarahkan menjadi simpul pendukung pengembangan PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, untuk kegiatan pertanian lahan basah berkelanjutan, industri non polutif dan non ekstraktif yang tidak mengganggu irigasi dan cadangan air serta tidak mengakibatkan alih fungsi lahan sawah, kegiatan bisnis kelautan, serta kegiatan pertambangan mineral non-logam .

- j. Kabupaten Karawang, diarahkan menjadi simpul pendukung pengembangan PKN Kawasan Perkotaan Bodebek, untuk kegiatan pertanian lahan basah berkelanjutan, bisnis kelautan, industri non polutif dan non ekstraktif yang tidak mengganggu irigasi dan cadangan air, serta kegiatan agroindustri.



Gambar 4.3. Kedudukan Kabupaten Karawang Dalam RTRWP

3. Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016

Kabupaten Karawang memiliki lokasi yang strategis yang didukung oleh Perpres Nomor 32 Tahun 2011 tentang MP3EI dan Peraturan Presiden nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Selain itu wilayah ini juga memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik, didominasi penduduk usia produktif, dan memiliki potensi basis dalam perekonomian. Potensi lain yang bisa dikembangkan ialah sebagai daerah industri yang bisa mendukung perekonomian daerah, serta adanya permintaan yang cukup tinggi dari pasar domestik dan internasional terhadap hasil pertanian, perikanan dan peternakan yang dihasilkan.

4.2.5 Telaahan Terhadap RPJPD Kabupaten Karawang

Revisi RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 merupakan RPJMD ke-3 pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025. Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan penyempurnaan serta sebagai keberlanjutan RPJMD ke - 2, maka RPJMD ke - 3 ditujukan untuk menguatkan pembangunan daerah di segala bidang dengan menekankan pada penyempurnaan pranata, penguatan pembangunan kualitas SDM dan pembentukan modal sosial serta penguatan struktur ekonomi melalui perluasan pengembangan agribisnis pertanian dan industri unggulan serta tumbuh berkembangnya bisnis kelautan. Secara umum pada tahapan ini sasaran prioritas arah pengembangan misi pembangunan daerah meliputi :

Pertama, Mewujudkan Masyarakat Yang Berkualitas Dalam Lingkungan Kehidupan Sosial Yang Berbudaya, Berakhlak Dan Beradab dengan prioritas pengembangan : (i) Penguatan kondisi individu yang cerdas melalui meningkatkan pemerataan, perluasan akses dan kualitas layanan PAUD seluruh anak 0 – 6 tahun, Rintisan Wajib Belajar 15 Tahun, Pendidikan kecakapan hidup – pendidikan kejuruan dan non-formal, Pendidikan bagi anak berkelainan, Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan melalui penyiapan pranata, penyempurnaan, pelaksanaan dan pengembangan kurikulum dan model pembelajaran berbasis multimedia, meningkatnya kualifikasi tenaga pendidik sesuai dengan syarat kompetensi serta meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang terstandar dan berbasis teknologi, penyempurnaan, pelaksanaan dan pengembangan sistem evaluasi proses belajar-mengajar, Peningkatan tata kelola pendidikan melalui pelaksanaan dan penyempurnaan regulasi di bidang

pendidikan, penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pendidikan, perbaikan sistem informasi data pendidikan, peningkatan kapasitas manajemen lembaga dan pengelola pendidikan, pengembangan sistem pengendalian mutu, Peningkatan minat membaca dan pelestarian keberaksaraan melalui penyediaan sarana baca dengan melibatkan peran aktif swasta dan masyarakat. (ii) Penguatan kondisi individu yang sehat melalui pembangunan bidang kesehatan dengan prioritas peningkatan pelayanan kesehatan dengan melibatkan peran swasta, peningkatan sarana dan prasarana serta tenaga kesehatan yang berkualitas, pelayanan jaminan kesehatan masyarakat, peningkatan dan pengembangan perilaku hidup bersih dan sehat, peningkatan kondisi status gizi masyarakat, pengendalian intensitas dan penyebaran penyakit menular, peningkatan cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak. (iii) Penciptaan suasana keluarga yang harmonis dan terencana melalui pengembangan kelembagaan dan peningkatan pelayanan Keluarga Berencana. (iv) Dalam rangka perlindungan bagi kelompok masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial disediakan berbagai fasilitasi dan program perlindungan sosial sebagai stimulan bagi mereka untuk dapat hidup lebih layak dan mandiri. Dalam rangka mewujudkan lingkungan sosial masyarakat yang berbudaya, beradab dan berakhlak, dibentuk dan dikembangkan berbagai pranata sosial masyarakat, semakin berkembangnya aktifitas kehidupan beragama secara mandiri, semakin berkembangnya nilai-nilai demokrasi dan politik lokal dan meningkatnya aktifitas dan upaya pelestarian nilai seni dan budaya.

Kedua, Mewujudkan Perekonomian Masyarakat Yang Kuat, Berdaya Saing, Berkualitas Dan Rasional dengan

prioritas pengembangan : Penguatan manajemen, sistem dan jaringan produk agribisnis unggulan disertai dengan perluasan pengembangan agribisnis berbasis inovasi pertanian melalui pemanfaatan teknologi dan sistem produksi yang ramah lingkungan, pemantapan budidaya akuakultur berbasis manajemen pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu, Pengembangan bisnis kelautan yang mengarah pada terbentuknya industri kelautan, Perluasan Pengembangan diversifikasi dan peningkatan mutu produk komoditas pertanian mendukung perluasan pengembangan agroindustri unggulan, Pengembangan Manajemen logistik pangan, Perluasan pengembangan industri pendukung dan industri terkait yang mendukung keberadaan industri inti (*foot loose industry*) melalui pemanfaatan teknologi dan sistem produksi yang ramah lingkungan didukung oleh pengembangan kemitraan dan Penguatan jaringan struktur industri antara IKM dengan industri besar, Penguatan *capacity building* masyarakat Pertanian dan kelautan serta IKM melalui pengembangan dan pengimplementasian teknologi proses dan produk teknik desain dan manajemen usaha, Pengembangan dan penguatan manajemen pengelolaan kepariwisataan, Pengembangan jasa perdagangan yang semakin mendukung sektor pertanian dan industri serta penguatan pasar produk IKM dan agroindustri, Fasilitasi, penyempurnaan regulasi, penguatan peran koperasi agribisnis, IKM serta kelembagaan UKM sektor jasa dan perdagangan, Penyiapan angkatan kerja baru serta penguatan kompetensi tenaga kerja dalam memenuhi pasar tenaga kerja disertai dengan penguatan hubungan industrial dalam penanganan permasalahan dan perlindungan ketenagakerjaan.

Ketiga, Mewujudkan Kabupaten Karawang Yang Produktif, Nyaman, Indah Dan Lestari dengan prioritas pengembangan : Penyusunan revisi RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 Pasal 20 Ayat 4 serta penetapan Perda RTRW dan turunannya; Penyusunan rencana rinci tata ruang; Penyusunan peraturan zonasi; Penetapan mekanisme perizinan yang sesuai dengan peraturan penataan ruang; Evaluasi pemanfaatan ruang; Pemantapan sistem pengendalian serta koordinasi dalam pengaturan pembinaan pelaksanaan serta pengawasan penataan ruang; Pelaksanaan pembangunan yang semakin baik dan sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang; Terwujudnya proporsi kawasan lindung sebesar 13% (diluar kawasan lindung Perhutani); Penataan ruang dilaksanakan dengan penggunaan data dan informasi spasial yang mutakhir serta operasional dan aplikatif dalam kerangka pengembangan infrastruktur data spasial; Pelaksanaan pembangunan prasarana transportasi jalan yang mengacu pada sistem informasi transportasi; Persiapan dan pelaksanaan prasarana dan sarana manajemen lalu lintas; Ringroad Kota Karawang Tanjung pura – Resinda – Wadas, pelaksanaan pembangunan terminal integrated pasar area AP.02, Pelaksanaan Pembangunan IPAL Terpadu, Studi pengembangan TPA, pengembangan kawasan agribisnis, pengembangan kawasan wilayah pantai dan pesisir yang semakin didukung dengan infrastruktur fisik dan fasilitas bisnis lainnya, pembangunan RTH semakin diarahkan dengan membangun keterlibatan masyarakat dan swasta, Meningkatnya ketersediaan air baku, peningkatan manajemen pelayanan kebersihan dan penyediaan air bersih, berfungsinya infrastruktur sistem data spasial yang operasional dan terintegrasi. Termanfaatkannya

air permukaan sebagai air minum dan air bersih; Termanfaatkannya air bawah tanah sebagai air minum dan air bersih; Terkelolanya pemanfaatan air bersih dan air minum dengan melibatkan peran serta masyarakat dan swasta (*public-private partnership*); Terkendalinya sumberdaya air; Rehabilitasi bangunan irigasi yang mengalami kerusakan/penurunan kualitas; Pembangunan saluran irigasi di areal persawahan setengah teknis; Penyempurnaan regulasi penataan bangunan dan lingkungan permukiman; Pembangunan infrastruktur permukiman perkotaan dan perdesaan; Penyediaan perumahan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan swasta; Revitalisasi kawasan permukiman kumuh; Diterapkannya secara optimal sistem pengelolaan limbah pada terpadu mulai dari hirarki pengurangan sumber sampah (*source reduction/waste prevention*), penggunaan kembali (*reuse*), daur ulang (*recycle*), pengomposan (*composting*), insinerasi untuk menghasilkan energi (*incineration with energy recovery*), insinerasi untuk mengurangi volume sampah (*incineration for volume reduction*), berbagai usaha pengurangan volume sampah (*other form of volume reduction*) dan *sanitary landfill*, dengan melibatkan peran serta masyarakat dan swasta (*public-private partnership*); Pengembangan, penyempurnaan penerapan sistem pengelolaan limbah padat terpadu di Kabupaten Karawang dalam mengantisipasi perubahan legislasi, peraturan perundang-undangan maupun isu-isu strategis yang terkait dengan pengelolaan lingkungan; Pembangunan, penyempurnaan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH); Peningkatan dan pengembangan pengelolaan sumberdaya alam (air, udara, tanah dan plasma nutfah); Penegakan hukum lingkungan hidup dan implementasi

pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan (air, udara, tanah) dan perlindungan kelestarian plasma nutfah; Pengembangan, penyempurnaan dan pemeliharaan basis data sumberdaya alam dan profil kondisi lingkungan hidup.

Keempat, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dalam Kerangka Otonomi Daerah dengan prioritas pengembangan : Penyempurnaan, pelaksanaan dan pengembangan struktur kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan, kewenangan dan hubungan kerja antar OPD, pembentukan dan pelaksanaan Standar Operasi dan Prosedur internal dan eksternal OPD, sistem pengawasan; Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur; Penyempurnaan regulasi bidang perencanaan pembangunan daerah, penguatan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan antar OPD dan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten, Penyempurnaan dan Pengembangan sistem data base perencanaan pembangunan, Peningkatan kualitas dan relevansi litbang; Pengembangan dan penguatan model kerjasama antar daerah, Penyempurnaan dan pengembangan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset, penguatan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, Pengembangan pemanfaatan dan penyempurnaan sistem informasi manajemen aset dan keuangan daerah serta peningkatan Akuntabilitas pengelolaan BUMD/ BLUD; Regulasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, penataan kewenangan desa, Penataan administrasi keuangan desa, Regulasi dan Penyempurnaan, pembinaan dan pelaksanaan rekrutmen kepala desa dan perangkat desa, Peningkatan kemampuan teknis Kepala Desa dan perangkat desa, Penyempurnaan Regulasi Penataan lembaga BPD dan penguatan kapasitas anggota BPD dalam

penyelenggaraan pemerintah desa, Regulasi dan Penataan administratif wilayah desa-desa perkotaan, pelaksanaan dan pengembangan sistem evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa, Penyempurnaan Regulasi dan pengembangan pola pembiayaan pembangunan desa; Pembentukan, penyempurnaan dan Penegakkan Perda; Penyempurnaan Peningkatan kemampuan manajerial dan teknis aparatur, Penyempurnaan pelaksanaan rekrutmen yang selektif sesuai dengan kebutuhan organisasi, Penyempurnaan pendayagunaan aparatur sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, Penyempurnaan pengembangan karier aparatur, Penyempurnaan Pemberian insentif sesuai dengan beban kerja dan prestasi kerja, Penyempurnaan Pengembangan budaya organisasi; Penerapan dan penyempurnaan standar pelayanan minimum kepada seluruh OPD; Penyempurnaan Regulasi, fasilitasi dan penataan lembaga kemasyarakatan, peningkatan partisipasi masyarakat swasta dalam pemerintahan dan pembangunan daerah, Rekrutmen dan pembinaan kader pembangunan masyarakat. Penerapan regulasi dan implementasi pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam bentuk *e-government* untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah selain juga penerapan aplikasi dasar seperti *e-billing*, *e-procurement*, *e-reporting*; Peningkatan *e-literacy* masyarakat karena SDM merupakan faktor yang turut menentukan keberhasilan pelaksanaan dan pengembangan *e-government* (baik sebagai pengembang, pengelola maupun pengguna *e-government*).

4.2.6 Sinergitas antara Isu Strategis RPJMD Provinsi Jawa Barat dan Isu KLHS Kabupaten Karawang

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber, yaitu; (1) Permasalahan pembangunan Provinsi Jawa Barat; (2) Dinamika internasional, nasional dan regional yang mempengaruhi pembangunan Provinsi Jawa Barat; (3) Kebijakan pembangunan daerah sekitar yang mempengaruhi pembangunan Provinsi Jawa Barat; (4) Kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat yang antara lain terdiri dari RPJPD dan RTRW Provinsi Jawa Barat; dan (5) KLHS RPJMD, maka ditetapkan 5 (lima) isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat yaitu; (1) Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia; (2) Kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial; (3) Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan; (4) Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan; dan (5) Reformasi birokrasi.

Secara umum dari 5 (lima) isu strategis diatas diuraikan sebagai berikut:

1. Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia

Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, hal ini menunjukkan adanya potensi yang besar dalam pengembangan sumber daya manusia. Peningkatan kualitas manusia menjadi hal yang penting agar masyarakat Jawa Barat mampu bersaing secara global. Namun

saat ini masih terkendala dengan beberapa permasalahan terkait perkembangan sumber daya manusia antara lain masih rendahnya pelayanan pendidikan di Jawa Barat yang ditunjukkan dengan adanya fluktuasi capaian Angka Partisipasi Kasar periode 2012- 2017, sedangkan nilai APM menunjukkan tren kenaikan dari tahun ke tahun pada seluruh jenjang pendidikan. Angka Partisipasi sekolah yang paling rendah di Provinsi Jawa Barat yaitu pada kelompok usia 19-24 tahun atau pada jenjang perguruan tinggi. Selain peningkatan pelayanan pendidikan hal lain yang harus dituntaskan adalah peningkatan kualitas tenaga pengajar, dimana kondisi saat ini belum meratanya ketersediaan guru terutama guru di daerah terpencil, serta nilai rata-rata uji kompetensi guru masih relatif rendah.

Selain hal tersebut diatas, masalah tata kelola juga terjadi seperti masih banyaknya sekolah yang terakreditasi C dan masih banyak sekolah yang belum terakreditasi, belum sinergisnya pembagian tata kelola pendidikan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terkait dengan kewenangan, masih rendahnya mutu dan relevansi pendidikan dan kualitas dan relevansi, Tata kelola pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dalam rangka peningkatan daya saing, masih banyak sekolah yang belum memiliki perpustakaan yang sesuai dengan standar nasional perpustakaan, baik sarana prasarananya, koleksi, SDM maupun aspek-aspek perpustakaan lainnya, belum terintegrasinya layanan perpustakaan sekolah dengan perpustakaan daerah milik pemerintah dalam memberikan layanan literasi melalui program perpustakaan keliling, belum ada regulasi yang mengatur tentang pengelola perpustakaan sekolah untuk bekerja sama dengan komunitas literasi seperti

forum perpustakaan desa/kelurahan atau forum perpustakaan taman bacaan masyarakat.

Selain permasalahan pelayanan pendidikan, permasalahan pelayanan kesehatan di Jawa Barat pada saat ini menunjukkan belum optimalnya pelayanan kesehatan yang ditandai dengan Indeks Kesehatan belum optimal dan masih perlu ditingkatkan, dengan capaian sebesar 80,72 poin pada tahun 2017, masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dan rasio balita per satuan posyandu yang cenderung menurun. Hal tersebut disebabkan karena masih rendahnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan, terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi yang tidak merata, perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat, kinerja pelayanan kesehatan yang rendah. Disamping itu, permasalahan gizi kurang di masyarakat cenderung masih tinggi yang ditunjukkan dengan 1 dari 4 anak usia 0-59 bulan di Provinsi Jawa Barat mengalami stunting.

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Jawa Barat pada saat ini masih perlu ditingkatkan, hal ini dikarenakan masih terjadinya diskriminasi pengupahan sektor informal terhadap perempuan, kualitas tenaga kerja perempuan masih rendah, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan yang masih rendah, paradigma pembangunan anak masih bersifat parsial, segmentatif, dan sektoral serta partisipasi perempuan di lembaga pemerintah baru mencapai 29,99 persen.

2. Kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial

Kemiskinan menjadi isu global yang terjadi saat ini, sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 bahwa tujuan globalnya adalah mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menurunkan jumlah penduduk miskin. Pada Maret tahun 2012 penduduk miskin sebesar 10,09 persen, sedangkan maret tahun 2018 sebesar 7,45 persen atau mengalami penurunan sebesar 0,38 persen. Persoalan kemiskinan bukan sekedar jumlah dan persentase penduduk miskin, tetapi akar penyebab kemiskinan salah satunya adalah pola hidup konsumtif. Dimensi lain yang perlu diperhatikan dalam persoalan kemiskinan adalah tingkat kedalaman kemiskinan (P1) dan keparahan kemiskinan (P2). Kemiskinan lebih banyak terjadi di desa dibandingkan dengan perkotaan, diindikasikan dari angka kemiskinan perdesaan sebesar 10,25 persen dan kemiskinan perkotaan sebesar 6,47 persen pada Maret Tahun 2018. Kemiskinan di pedesaan disebabkan oleh rendahnya akses pelayanan dasar, akses ekonomi dan infrastruktur serta pola hidup masyarakat.

Pengangguran merupakan salah satu masalah penting yang harus segera dituntaskan, dimana berdasarkan data BPS tercatat terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) dari Februari Tahun 2012 sebesar 9,84 persen menjadi 8,16 persen pada bulan Februari Tahun 2018 dan selama lima tahun terakhir terjadi penurunan pengangguran sebesar 1,68 persen. Meskipun terjadi penurunan secara persentase namun secara absolut jumlah pengangguran masih tinggi yaitu sebesar 1,86 juta orang pada Februari Tahun 2018 hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan kesempatan kerja baru serta tidak adanya *link and match* antara kompetensi

yang dimiliki tenaga kerja dengan pasar kerja. Ketersediaan lapangan pekerjaan yang terbatas, banyak PHK, kurangnya minat pencari kerja untuk usaha mandiri menjadi faktor-faktor pemicu angka pengangguran tinggi di Jawa Barat.

Permasalahan sosial muncul diakibatkan karena perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Sumber permasalahan sosial bisa terjadi dari proses sosial kemasyarakatan dan bencana alam. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Jawa Barat mengalami peningkatan. Hal tersebut disebabkan karena masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran, belum optimalnya penanganan bencana sosial, masih rendahnya penanganan kasus-kasus kekerasan anak, perempuan dan *human trafficking*, belum optimalnya penanganan PMKS melalui rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, penanganan Fakir Miskin serta Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan masih rentan terhadap konflik sosial dan kurangnya pemanfaatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Lebih lanjut, permasalahan sosial lainnya yang potensial dapat terjadi yaitu Ancaman Tantangan, Hambatan, Gangguan (AHTG) terhadap stabilitas politik dan keamanan, pemahaman ideologi serta kerukunan beragama. Untuk itu, perlu langkah-langkah preventif dan advokasi yang intens demi terciptanya kerukunan umat beragama.

3. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan

Pembangunan infrastruktur wilayah dan kawasan menjadi perhatian utama guna mendukung pemerataan dan percepatan pembangunan di Jawa Barat. Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi serta perumahan dan permukiman sampai dengan saat ini dikategorikan dalam

kondisi cukup baik meskipun di beberapa tempat masih perlu penanganan yang maksimal. Penataan sistem transportasi perlu segera ditingkatkan terutama di wilayah perkotaan, dikarenakan Pemenuhan sarana transportasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertumbuhan dan pergerakan orang, barang dan jasa. Revitalisasi jaringan kereta api, pembangunan jalan dan jembatan serta pelabuhan dan bandar udara, penyediaan listrik serta pemanfaatan energi baru dan terbarukan, serta penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman, menjadi fokus lima tahun kedepan. Komunikasi dan telekomunikasi menjadi daya dukung untuk pembangunan dan pemerataan pembangunan di Jawa Barat.

Saat ini, kualitas lingkungan hidup baik kualitas air, udara maupun tutupan lahan semakin menurun. Pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan perlu menjadi perhatian kedepan dan harus dilakukan secara seimbang dan holistik bersamaan dengan pembangunan ekonomi dan sosial. Berbagai aktivitas yang dilakukan harus dipastikan agar tidak mengakibatkan terlampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan sehingga menimbulkan kerusakan ekosistem dan pencemaran. Fokus utama lainnya adalah mengantisipasi dampak dari perubahan iklim dengan melakukan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dampak perubahan iklim dapat meningkatkan kerusakan lingkungan, risiko bencana, dan kerugian ekonomi serta menurunkan tingkat kesehatan masyarakat. Pengolahan sampah terpadu antar lintas daerah, pembangunan sanitasi baik individual maupun komunal, pelayanan air minum, air bersih dan air baku harus dioptimalkan terutama penyebaran dan distribusi guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Begitu

juga dengan air limbah domestik harus dikelola secara tepat guna.

Pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang, penanganan kebencanaan tetap menjadi perhatian utama untuk lima tahun kedepan.

4. Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat mengalami perlambatan hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya; belum berkembangnya koperasi dan usaha kecil dan menengah, khususnya pada akses modal KUKM terhadap dunia perbankan masih minim, belum optimalnya fungsi dan kelembagaan koperasi yang ditunjukkan dengan masih cukup tingginya persentase jumlah koperasi tidak aktif (35,97%), pemanfaatan serta pengembangan akses pemasaran dan promosi bagi produk koperasi, serta usaha mikro dan kecil belum optimal, dan belum meratanya penerapan standar produk koperasi, serta usaha mikro dan kecil.

Terjadinya penurunan realisasi penanaman modal asing yang disebabkan oleh realisasi investasi di kabupaten/kota belum merata, ketersediaan dan kualitas infrastruktur penunjang investasi belum merata, dinamika sosial mempengaruhi kepastian dan keamanan berusaha, belum optimalnya serapan tenaga kerja lokal pada perusahaan/kegiatan PMA/PMDN.

Permasalahan lain yang penting adalah belum menguatnya pariwisata sebagai pendorong terciptanya perekonomian inklusif, hal tersebut disebabkan oleh masih lemahnya konektivitas infrastruktur transportasi menuju destinasi wisata, terbatasnya atraksi di destinasi wisata yang menekan lama kunjung wisatawan, belum terinternalisasinya

nilai-nilai *hospitality* di masyarakat, belum maksimalnya analisa pasar wisatawan, branding dan aktivitas promosi, keterbatasan produk ekonomi kreatif dan rendahnya konsumsi produk lokal.

Pada sektor pertanian terjadi beberapa permasalahan yang ditandai dengan Masih rendahnya produktivitas komoditas pertanian, belum optimalnya aktivitas ekonomi pertanian dari hulu ke hilir, terganggunya ekosistem pertanian dan menurunnya luas lahan pertanian, hal tersebut disebabkan oleh intensitas pembangunan sektor non-pertanian sangat tinggi, ketersediaan data pertanian belum memadai, rendahnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi budidaya pertanian, tingginya gangguan hama dan penyakit tanaman pertanian dan perkebunan, peternakan, serta rendahnya penerapan sertifikasi jaminan mutu hulu-hilir pertanian, rendahnya regerasi petani dan rendahnya akses permodalan.

Pada sektor perikanan dan kelautan terdapat permasalahan yang ditandai oleh turunnya Nilai Tukar Nelayan, hal tersebut disebabkan oleh eksploitasi ruang laut yang berlebihan dan tingginya tingkat pencemaran mengakibatkan penurunan laju tangkapan (*fish landing*) dan kerusakan lingkungan wilayah pesisir, pelabuhan perikanan Jawa Barat belum dimanfaatkan secara optimal dan masih terbatasnya pemenuhan sarana prasarana perikanan budidaya dan tangkap (lahan, kapal, dll), pemasaran hasil kelautan dan perikanan masih bersifat individu, belum terintegrasi secara sistematis antara hulu dan hilir, masih rendahnya tingkat penguasaan teknologi oleh nelayan, dan pencemaran perairan umum dan laut.

Pada sektor pangan masih terdapat beberapa masalah yang ditandai oleh Skor Pola Pangan Harapan Provinsi Jawa Barat masih di bawah rata-rata nasional dan ketidakstabilan harga. Hal ini disebabkan oleh masyarakat miskin rawan pangan masih tinggi, ketersediaan pangan di Jawa Barat masih mengalami ketimpangan, keragaman konsumsi pangan masih rendah, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi pangan yang berpengaruh terhadap gizi.

Pada sektor kehutanan masih terdapat permasalahan yang ditandai oleh degradasi lahan masih tinggi di Daerah Aliran Sungai (DAS), pengelolaan hutan belum optimal dan rendahnya produksi hasil hutan kayu dan non kayu. Hal ini disebabkan oleh tingginya aktivitas ekonomi secara berlebihan di kawasan hulu DAS, meningkatnya gangguan ekosistem, jumlah masyarakat miskin di sekitar hutan masih tinggi dan rendahnya teknologi pemanfaatan sumberdaya hutan.

Pada sektor perdagangan terdapat beberapa permasalahan yang ditandai oleh menurunnya kontribusi perdagangan terhadap PDRB, hal tersebut disebabkan oleh dominasi barang impor, kerentanan fluktuasi harga barang konsumsi terutama bahan pokok, promosi produk industri lokal (asal Jawa Barat) masih dirasa kurang, dan belum meratanya penerapan standar produk dan teknologi informasi dalam perdagangan.

Pada sektor industri terdapat beberapa permasalahan yang ditandai dengan menurunnya pertumbuhan sektor industri, hal tersebut disebabkan oleh produk industri berdaya saing rendah akibat biaya ekonomi tinggi (pajak dan biaya distribusi) sehingga mengakibatkan pertumbuhan sektor industri melambat, infrastruktur pendukung kawasan industri yang belum terintegrasi mengakibatkan tingginya biaya logistik

dan ketimpangan pengembangan kawasan industri di Jawa Barat bagian Barat dengan Jawa Barat bagian Timur, bahan baku industri mayoritas impor mengakibatkan biaya produksi tinggi, peranan industri kecil dan menengah (IKM) masih kecil dalam rantai pasok industri, dan belum memadainya ketersediaan SDM sektor industri yang kompeten dan tersertifikasi.

5. Reformasi birokrasi

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Jawa Barat masih terjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu masih kurangnya sosialisasi dan kualitas serta jangkauan layanan informasi bagi publik atas hasil pembangunan daerah yang dilaksanakan, masih rendahnya profesionalisme aparatur dan masih terdapatnya sarana prasarana pemerintah yang kurang memadai, belum optimalnya pengelolaan kekayaan/aset pemerintah daerah, kualitas pelayanan publik, pelayanan data perencanaan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penataan peraturan perundang-undangan, dan kolaborasi pembangunan dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota. Meningkatnya potensi Ancaman Tantangan, Hambatan, Gangguan (AHTG), terhadap stabilitas politik dan keamanan, Pemahaman Ideologi serta kerukunan beragama

Identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan pengolahan data berdasarkan indikator-indikator dari setiap tujuan pembangunan. Selanjutnya, indikator-indikator akan diolah sesuai dengan data yang ada dan menghitung gap setiap TPB di Kabupaten Karawang yang diperoleh untuk dimasukkan kedalam pengkategorian yaitu:

- Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SS)
- Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB)
- Indikator TPB yang tidak ada/belum ada data (NA)

Selanjutnya, setelah analisis pengkategorian indikator setiap tujuan pembangunan berkelanjutan akan memperoleh nilai persentase dari perhitungan gap dan akan terlihat yang memenuhi target dengan yang belum memenuhi target yang sudah ditentukan. Tujuan pembangunan berkelanjutan akan melakukan sintesi atau pengolahan kembali untuk menemukan isu prioritas, yaitu dengan cara melihat persentase dari indikator yang belum tercapai dari persentase semua indikator yang terdapat dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan proses analisis diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Persentase Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang Belum Tercapai

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Indikator yang Tercapai (SS)	Indikator yang belum tercapai (SB)	Jumlah Indikator	Persentase yang belum tercapai
1. Tanpa kemiskinan	2	4	10	40,00
2. Tanpa kelaparan	2	2	5	40,00
3. Kehidupan sehat dan sejahtera	2	3	8	37,50
4. Pendidikan berkualitas	3	6	9	66,67
5. Kesetaraan gender	1	0	2	0,00
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak	0	3	9	33,33
7. Energi Bersih dan Terjangkau	1	0	4	0,00
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	5	2	8	25,00
9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	1	1	7	14,29
10. Berkurangnya Kesenjangan	0	2	5	40,00
11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	0	2	6	33,33
12. Kosumsi dan Produksi yang	0	1	6	16,67

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Indikator yang Tercapai (SS)	Indikator yang belum tercapai (SB)	Jumlah Indikator	Persentase yang belum tercapai
Bertanggung Jawab				
13. Penanganan Perubahan Iklim	1	0	4	0,00
14. Ekosistem Lautan	1	0	2	0,00
15. Ekosistem Daratan	1	2	10	20,00
16. Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	1	2	7	28,57
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	1	0	2	0,00

Sumber: Hasil Analisis, 2019

Berdasarkan tabel 4.1 isu prioritas yang menjadi hasil dari analisis dan memiliki persentase belum tercapai yang paling besar akan diolah kembali dalam proses perangkaan setiap indikator dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Adapun untuk memperoleh isu strategis yang diprioritaskan penangannya dilakukan hasil perangkaan dari beberapa indikator yang menjadi permasalahan prioritas. Berdasarkan serangkaian proses analisis dengan demikian didapat isu pembangunan berkelanjutan yang menjadi prioritas di Kabupaten Karawang hingga isu yang tidak prioritas, setelah dilakukan perangkaan/prioritas TPB maka isu strategis didapat sebagai berikut:

Tabel 4. 2
Ranking/Isu Prioritas TPB di Kabupaten Karawang Tahun 2019

No Ranking	No TPB	Ranking/Prioritas TPB di Kabupaten Karawang	Persentase Tidak Tercapai
1	4	Pendidikan berkualitas	66,67
2	10	Berkurangnya Kesenjangan (mengurangi kesenjangan antar kecamatan atau suatu daerah)	40,00
3	1	Tanpa kemiskinan	40,00
4	3	Kehidupan sehat dan sejahtera	37,50
5	6	Air Bersih dan Sanitasi Layak (menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.)	33,33

No Ranking	No TPB	Ranking/Prioritas TPB di Kabupaten Karawang	Persentase Tidak Tercapai
6	11	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan (mencangkup hunian layak dan persampahan)	33,33
7	16	Perdamaian keadilan dan kelembagaan yang tangguh	28,57
8	8	Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi	25,00
9	15	Ekosiste Daratan	20,00
10	2	Tanpa kelaparan (menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan)	20,00
11	12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	16,67
12	9	Industri, Inovasi, dan Infrastruktur (mencangkup pencemaran udara emisi CO2 , perubahan emisi gas rumah kaca GRK)	14,29
13	5	Kesetaraan gender	0,00
14	7	Energi Bersih dan Terjangkau (menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua)	0,00
15	14	Ekosistem Lautan (melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.	0,00
16	13	Penanganan Perubahan Iklim (mencangkup pengambilan tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya)	0,00
17	17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	0,00

Sumber: Hasil Analisis, 2019

Dari hasil analisis pengelompokkan isu strategis serta hasil pengrangkingan yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Karawang, yang memerlukan penanganan dan perhatian khusus adalah Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas mencangkup 9 indikator, Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan (mengurangi kesenjangan antar kecamatan atau suatu daerah) sebanyak 5 indikator, Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan sebanyak 10 indikator, Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera mencangkup 8 indikator, Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi sebanyak 9 indikator. Dengan adanya Tujuan pembangunan berkelanjutan prioritas, maka akan diketahui cara penanganannya dan mendapatkan perhatian khusus. Berdasarkan, hasil analisis

yang telah dilakukan dan menghasilkan isu prioritas, maka isu strategis serta pengaruh terhadap capaian TPB di Kabupaten Karawang dapat mendorong dan mendukung pencapaian TPB di Kabupaten Karawang.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Dalam menyusun RPJMD Kabupaten Karawang tahun 2016-2021, acuan utama yang digunakan adalah rumusan visi, misi, arah kebijakan dan rencana program indikatif Bupati dan Wakil Bupati yang telah disampaikan kepada masyarakat pemilih dalam tahapan kampanye pemilihan pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah secara langsung. Di samping itu penyusunan RPJMD Kabupaten Karawang tahun 2016-2021 ini juga mengacu kepada dokumen perencanaan nasional, dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat, Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan berbagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin terciptanya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal antar tingkat pemerintahan yang berbeda, menjamin prinsip pembangunan berkelanjutan.

5.1. Visi

Visi dibangun guna mendorong semangat bagi seluruh pemangku-kepentingan (*stakeholders*) untuk berperan serta dalam membangun dan mewujudkan Kabupaten Karawang yang maju disegala aspek kehidupan, serta terciptanya kehidupan masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Dengan demikian kemajuan akan mendorong terwujudnya kesejahteraan dan kemandirian sebagai tujuan akhir.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025 pada tahap ketiga. Perumusan Visi untuk RPJMD 2016-2021 selain mengacu kepada RPJPD Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025, juga memperhatikan visi yang tertera pada RPJM Nasional Tahun 2015-2019 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Tabel 5.1

Visi RPJPD, RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Barat

VISI RPJPD	VISI RPJM	
Kabupaten Karawang (Tahun 2005-2025)	Nasional (Tahun 2015-2019)	Jawa Barat (Tahun 2019-2023)
Karawang Sejahtera Berbasis Pertanian dan Industri	Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur	“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”

Visi pembangunan Kabupaten Karawang penting sekali untuk dijadikan sebagai visi bersama (*shared vision*). Berdasarkan kepada modal dasar Kabupaten Karawang, tantangan yang dihadapi 20 tahun ke depan, dan mengacu pada Visi jangka panjang Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025 serta janji pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada saat kampanye pemilihan umum kepala daerah secara serentak, maka Visi Kabupaten Karawang 2016-2021 adalah **“KARAWANG YANG MANDIRI MAJU ADIL DAN MAKMUR”**

Visi diatas mengandung arti yang secara filosofis sebagai berikut ;

1. Mandiri

Berarti suatu sikap dan kondisi masyarakat yang produktif, inovatif, adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mampu mengoptimalkan potensi daerah dan menggali sumber-sumber pendapatan daerah dengan tetap berpegang kepada budaya dan kearifan lokal

2. Maju

Berarti Sumber Daya Manusia Kabupaten Karawang telah mencapai kualitas yang tinggi dengan tingkat kemakmuran yang juga tinggi disertai dengan sistem dan kelembagaan politik dan hukum yang mantap

3. Adil

Berarti tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender, maupun wilayah

4. Makmur

Berarti kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Karawang dapat terpenuhi sehingga memberikan makna dan arti penting bagi daerah-daerah lain.

Visi Pembangunan Kabupaten Karawang meliputi perkotaan dan perdesaan sebagai pusat dan lokasi kegiatan sosial ekonomi dari wilayah tersebut. Dari segi pemerintahan, visi pembangunan daerah merupakan usaha untuk mengembangkan dan memperkuat pemerintahan daerah untuk makin mantapnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab. Pembangunan daerah di Kabupaten Karawang memiliki dua aspek yaitu: bertujuan memacu pertumbuhan ekonomi dan sosial di daerah yang relatif terbelakang, dan untuk lebih memperbaiki dan meningkatkan kemampuan daerah dalam melaksanakan pembangunan melalui kemampuan menyusun perencanaan sendiri dan pelaksanaan program serta kegiatan secara efektif.

5.2. Misi

Untuk mewujudkan visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Karawang Tahun 2016 - 2021, sesuai dengan arah pembangunan ke 3 (tiga) pada RPJPD Kabupaten Karawang tahun 2005-2025 dan berdasarkan janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Karawang tahun 2016-2021 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2015, dirumuskan 5 (lima) misi sebagai berikut ;

Tabel 5.2
Misi RPJPD, RPJMD Kabupaten Karawang dan RPJMD Provinsi Jawa Barat

MISI RPJPD	MISI RPJMD	
Kabupaten Karawang (Tahun 2005-2025)	Kabupaten Karawang (Tahun 2016-2021)	Jawa Barat (Tahun 2019-2023)
1. Mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan berakhlak dalam lingkungan kehidupan sosial yang berbudaya dan beradab; 2. Mewujudkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing, berkualitas dan rasional yang digerakan oleh sektor pertanian dan industri;	1. Mewujudkan Aparatur Pemerintah Daerah yang Bersih dan Berwibawa 2. Mewujudkan Kabupaten Karawang yang Berdaya Saing; 3. Mewujudkan Masyarakat Demokratis Berlandaskan Hukum;	1. Membentuk Manusia Pancasila yang Bertaqwa; 2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif; 3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan

3. Mewujudkan Kabupaten Karawang yang produktif, nyaman, indah dan lestari;	4. Mewujudkan Kabupaten Karawang yang Asri dan Lestari;	4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera dan Adil;
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Mandiri, profesional dan akuntabel dalam kerangka otonomi daerah	5. Membangun Kabupaten Karawang Melalui Penguatan Desa.	5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota

1. Mewujudkan Aparatur Pemerintah Daerah yang Bersih dan

Berwibawa; melalui implementasi prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih (profesional, bertanggung jawab, efisien dan efektif, bersih, bebas KKN, dan dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat) dan pemerintahan yang baik (yaitu : keterbukaan dan transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien, menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, responsif, dan membuka partisipasi masyarakat) serta reformasi birokrasi melalui penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan; peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur agar memiliki kinerja yang optimal dengan disertai upaya perbaikan tingkat kesejahteraan PNS; peningkatan kualitas pelayanan publik, baik pelayanan dasar maupun pelayanan lainnya; dan pengembangan sistem pengawasan dan pemeriksaan yang efektif, serta peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi pemerintah;

2. Mewujudkan Kabupaten Karawang yang Berdaya Saing;

melalui upaya menciptakan sumber daya manusia sehat, cerdas dan berkualitas serta tenaga kerja yang terampil, meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek, membangun infrastruktur dan sistem transportasi yang mendukung pembangunan daerah, memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan lokal menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi

dan distribusi, penciptaan iklim kondusif bagi kegiatan usaha (membuka peluang investasi dibidang industri pariwisata, industri perikanan, agro industri, industri jasa angkutan, industri jasa pergudangan dan industri perkapalan), membangun dan memperkuat sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, pengendalian kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga serta pemberdayaan perempuan dan sinkronisasi dan sinergitas regulasi pusat dan daerah serta menetapkan regulasi daerah yang mempunyai azas manfaat bagi masyarakat luas.

3. Mewujudkan Masyarakat Demokratis Berlandaskan Hukum;

melalui upaya pendidikan politik (masyarakat, parpol, ormas) dalam rangka meningkatkan kedewasaan perilaku berdemokrasi, memperkuat kerukunan umat beragama untuk mewujudkan stabilitas lokal sebagai kontribusi terciptanya stabilitas nasional dan menegakkan produk hukum daerah secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif dan mengedepankan kepentingan masyarakat serta melalui upaya optimalisasi peran dan fungsi POL PP dan revitalisasi LINMAS, agar mampu melindungi dan mengayomi masyarakat.

4. Mewujudkan Kabupaten Karawang yang Asri dan Lestari ;

melalui upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dalam membangun desa dan menata kota dengan menjaga fungsi, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup melalui antisipasi program dan kegiatan alternatif yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

5. Membangun Kabupaten Karawang Melalui Penguatan Desa;

melalui implementasi Tri Matra Pembangunan Desa yang terdiri atas penguatan daya dan ekspansi kapabilitas masyarakat desa, optimalisasi sumberdaya desa untuk mewujudkan kemandirian ekonomi, kedaulatan pangan masyarakat desa serta partisipasi masyarakat desa sebagai kerja budaya.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan, maka diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi, menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.3
Keterkaitan Misi dan Tujuan Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021

Tabel 5.4
Keterkaitan Misi 1, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021

Misi 1 : Mewujudkan Aparatur Pemerintah Daerah yang Bersih dan Berwibawa

Tabel 5.5
Keterkaitan Misi 2, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021
Misi 2 : Mewujudkan Kabupaten Karawang yang Berdaya Saing

Tabel 5.6
Keterkaitan Misi 3, Tujuan dan Saran Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021
Misi 3 : Mewujudkan Masyarakat Demokrasi Berlandaskan Hukum

Tabel 5.7
Keterkaitan Misi 4, Tujuan dan Saran Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021
Misi 4 : Mewujudkan Kabupaten Karawang yang Asri dan Lestari

Tabel 5.8
Keterkaitan Misi 5, Tujuan dan Saran Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021
Misi 5 : Membangun Kabupaten Karawang melalui Penguatan Desa

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam rangka menciptakan pembangunan Kabupaten Karawang lima tahun kedepan yang lebih terarah, maka Visi dan Misi yang telah dirumuskan serta telah dijabarkan ke dalam Tujuan dan Sasaran pembangunan perlu dijabarkan lebih lanjut kedalam Strategi dan Kebijakan. Pendekatan yang dipergunakan dalam proses penyusunan strategi dan kebijakan tersebut yaitu metode analisis SWOT (*Strength-Weakness-Opportunity-Threat*). Dengan metode ini, berbagai peluang dan tantangan baik dari sisi internal maupun dari sisi eksternal diidentifikasi sebagai basis dalam penentuan strategi. Melalui penggunaan metode SWOT ini, diharapkan dapat diperoleh strategi dan kebijakan yang bersifat holistik dan mampu menjawab tantangan pembangunan kedepan.

6.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dirumuskan, maka perlu ditindaklanjuti dengan upaya untuk mencapainya melalui penyusunan strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan daerah Tahun 2016-2021. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Karawang melakukan upaya untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan.

Strategi dan arah kebijakan dituangkan secara lebih rinci yang dibagi ke dalam Misi 1 sampai dengan Misi 5 sebagai berikut :

Tabel 6.1
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Kabupaten Karawang 2016-2021

Tabel 6.2
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Kabupaten Karawang 2016-2021

Tabel 6.3
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Kabupaten Karawang 2016-2021

Tabel 6.4
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Kabupaten Karawang 2016-2021

Tabel 6.5
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Kabupaten Karawang 2016-2021

6.2 Prioritas RPJMD Kabupaten Karawang 2016-2021

Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Karawang tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut ;

6.3.1. Bidang Pendidikan

1. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Sinergi dengan BOS Pusat dan Provinsi
2. Pembangunan Ruang Kelas Baru
3. Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan
4. Peningkatan sarana belajar sesuai standar
5. Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
6. Fasilitasi sertifikasi standar kompetensi guru
7. Peningkatan kemampuan guru bidang studi
8. Peningkatan mutu peserta didik
9. Keberlanjutan program keaksaraan fungsional
10. Pemberian bantuan pendidikan bagi yang rawan DO dari lulusan SLTP ke SLTA atau sederajat
11. Bantuan peningkatan kualitas lembaga pendidikan keagamaan
12. Fasilitasi Pemberian bea siswa secara penuh kepada masyarakat yang tidak mampu ke perguruan tinggi;
13. Pendidikan kesetaraan (Paket A, B dan C)

14. Pemberian bantuan modal kepada kelompok pemuda melalui pra koperasi pemuda

6.3.2. Bidang Kesehatan

1. Penyediaan dan peningkatan system pelayanan kesehatan
2. Pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat
3. Peningkatan Puskesmas PONED menjadi RSIA
4. Pembangunan RSUD di Rengasdengklok
5. Membuka sistem informasi manajemen Pelayanan Kesehatan di setiap PUSKESMAS
6. Penanggulangan gizi buruk
7. Pemberdayaan posyandu
8. Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan (terutama bidan desa)
9. Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap di 30 kecamatan
10. Optimalisasi kinerja pelayanan Poskesdes
11. Pelayanan, pencegahan dan penanggulangan KLB Penyakit
12. Pengembangan system surveillance
13. Peningkatan upaya-upaya promosi kesehatan
14. Penanganan ibu melahirkan beresiko tinggi
15. Peningkatan Program pelayanan keluarga berencana
16. Penanganan ibu melahirkan beresiko tinggi
17. Pembangunan Rumah Sakit Paru
18. Peningkatan Pustu menjadi Puskesmas
19. *Pembangunan Lanjutan Gedung Rawat Inap kelas 3 RSUD (Maskin)*
20. *Pembangunan Gedung Maternitas*
21. *Pembangunan Gedung Private Wings*
22. *Peningkatan Kualitas Pelayanan BLUD RSUD*
23. *Pembangunan Gedung-Gedung Penunjang layanan medik RSUD*
24. *Pengembangan Jenis Pelayanan Rumah Sakit*
25. *Penetapan Rumah Sakit Terakreditasi*
26. *Penetapan Rumah Sakit Rujukan Regional*
27. *Peningkatan Status Rumah Sakit Menjadi Rumah Sakit Pendidikan*

6.3.3. Bidang pemuda dan Olahraga, kependudukan, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

1. Penanganan Masalah kenakalan remaja;
2. Pembinaan mental pemuda dan menggalakan gerakan disiplin nasional
3. Penanaman wawasan kebangsaan
4. Optimalisasi Peran dan Fungsi Organisasi Kepemudaan.
5. Restrukturisasi dan revitalisasi Karang Taruna
6. Penyediaan sarana dan prasarana olah raga
7. Advokasi, fasilitasi penanganan dan perlindungan anak dan perempuan
8. Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk
9. Pembangunan Kampung KB
10. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11. Pengarusutamaan Gender

6.3.4. Bidang Ketenagakerjaan

1. Penyediaan Sistem Informasi Bursa Tenaga Kerja;
2. Pengembangan Regulasi Ketenagakerjaan;
3. Pembangunan Balai Latihan Kerja di 3 wilayah (Kecamatan Cilamaya Kulon, Kecamatan Rengasdengklok dan Kecamatan Pangkalan);
4. Penurunan Angka Pengangguran melalui informasi dan pelayanan terpadu satu pintu;
5. Penempatan dan perluasan kerja;
6. Peningkatan kualitas dan produktivitas kerja;
7. Pelatihan dan pemagangan tenaga kerja di perusahaan;
8. Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI);
9. Fasilitasi Persyaratan Kerja dan Pengupahan;
10. Fasilitasi Hubungan Industrial, Kesejahteraan Pekerja dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
11. Menyelenggarakan Kursus Keterampilan gratis bagi masyarakat.

6.3.5. Bidang Ekonomi Masyarakat

1. Peningkatan Capaian Investasi;

2. Pengembangan Regulasi dan Pengawasan Kebijakan Industri Kecil dan Menengah (IKM)
3. Pemberian modal dan pembinaan kewirausahaan bagi masyarakat miskin;
4. Membuka jaringan pemasaran hasil produksi.
5. Program padat karya daerah
6. Pengembangan pariwisata daerah dengan ikonik angklung dan destinasi wisata
7. Pengembangan Destinasi Wisata Situ Cipule
8. Pembangunan Pusat Budaya Batujaya
9. Melakukan kerjasama dengan Bank dalam menyalurkan kredit murah
10. Membuka akses pemasaran hasil produksi UKM, Koperasi dan BUMDes
11. Pelatihan Pengelolaan Manajemen Usaha
12. Pelatihan Pengelolaan dan penambahan nilai hasil produksi
13. Memberikan Bantuan Peralatan yang dibutuhkan
14. Pengembangan komoditas unggulan sebagai rintisan one village one product dan pengembangan varietas benih adaptif
15. Optimalisasi lahan dan sumberdaya air bagi pertanian
16. Penguatan kelembagaan kelompok tani dalam bentuk Koperasi Tani yang bankable
17. Peningkatan kinerja penyuluhan pertanian
18. Pengawasan peredaran pupuk dan pestisida
19. Fasilitasi teknologi dan mekanisasi pertanian
20. Fasilitasi Pengembangan sentra produk-produk olahan hasil perikanan
21. Peningkatan sarana dan prasarana TPI
22. Penguatan kelembagaan kelompok nelayan dan pembudidaya dalam bentuk Koperasi nelayan dan pembudidaya yang bankable
23. Fasilitasi pengembangan desain dan standar mutu hasil perikanan (Mina Bisnis)
24. Penataan sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) Unggulan menuju One village one product desa industri
25. Penataan pasar milik pemerintah

26. Fasilitasi pengembangan pasar desa
27. Terminal agribisnis (diutamakan pembangunan Pasar Induk Beras/pasar baru)
28. Pembangunan sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan (RPH) berbasis tata ruang
29. Pengembangan kebijakan, fasilitasi dan penyediaan skema pembiayaan KUMKM
30. Pembinaan kelembagaan dan kewirausahaan KUMKM
31. Pembangunan BLUD UKM
32. Pembangunan sarana pemasaran
33. Penataan PKL dan shelter-shelter PKL
34. Pemantapan manajemen perencanaan ODTW
35. Pembuatan dan peningkatan sarana dan prasarana kampung budaya dan wisata gerbang karawang
36. Peningkatan sarana dan prasarana ODTW Sanggabuana
37. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
38. Pembangunan kawasan wisata Karawang Selatan dan Karawang Utara
39. Pengembangan Desa Padi Organik (Kec. Tegalwaru dan Pangkalan)
40. Penumbuhan Desa Mandiri Benih Padi (40 Ha) dan Kedelai (20 Ha)
41. Pengembangan Tanaman Pisang (Kec. Tegalwaru dan Pangkalan)
42. Penangkaran bibit Jamur Merang (Kec. Cilamaya Wetan)
43. Pembuatan Outlet/koordinasi dengan OPD lain
44. Peningkatan Pendapatan Buruh Ternak (Sapi/Kambing/Itik/Burung Puyuh)
45. Penumbuh-kembangan OVOP berbasis Komoditas Lokal (Produk Olahan yang berkualitas)
46. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)
47. Rehabilitasi TPI
48. Pembangunan TPI Pasir Putih, Ciparage dan Muara
49. Fasilitasi Pembangunan Perumahan Nelayan
50. Fasilitasi Pengadaan Kapal diatas 12 GT
51. Pengadaan Alat Berat untuk pengerukan muara dilokasi TPI
52. Pembangunan Pasar Induk Beras/Pasar Baru

6.3.6. Bidang Sosial Budaya, Hukum dan Agama

1. Pengembangan komunikasi antar dan inter umat beragama
2. Pengembangan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat
3. Peningkatan peran dan fungsi kalangan agamawan
4. Penguatan Peran dan Fungsi Organisasi Kerukunan Umat Beragama
5. Pembinaan kelembagaan sosial keagamaan
6. Peningkatan sarana dan prasarana keagamaan
7. Penegakan peraturan daerah
8. Penyusunan produk hukum daerah
9. Peningkatan kapasitas lembaga legislatif
10. Fasilitasi peningkatan peran dan fungsi partai politik dan organisasi sosial kemasyarakatan
11. Meningkatkan pembinaan trantibmas, satuan perlindungan masyarakat dan unsur rakyat terlatih lainnya.

6.3.7. Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

1. Mengembangkan ruas jalan kolektor primer dan lokal sekunder pada ruas jalan Kabupaten
2. Akselerasi pembangunan terminal type A dan B
3. Pembangunan Jembatan Penghubung Strategis
4. Fasilitasi Pembangunan Jalan antar kawasan
5. Pengembangan Regulasi sistem transportasi Kabupaten
6. Pembangunan Terminal Tipe C
7. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi
8. Peningkatan Cakupan Pelayanan Air Minum mendukung target nasional universal akses
9. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif
10. Penataan Lingkungan Kumuh Permukiman (Penataan Kampung Layak Huni, meliputi Jalan Lingkungan, Drainase dan Sanitasi Lingkungan)
11. Program Pembangunan Rumah Layak Huni (RULAHU)
12. Penataan dan Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah
13. Penataan Ruang Publik dan Taman Kota
14. Peningkatan sarana prasarana laboratorium pengujian lingkungan hidup

15. Peningkatan Kapasitas SDM (diutamakan PPNS Bidang LH)
16. Penegakan peraturan bidang LH
17. Peningkatan upaya-upaya pengujian kualitas air dan udara
18. Penyediaan ruang terbuka hijau
19. Fasilitasi pengembangan area mangrove di pesisir pantai
20. Penanganan lahan kritis, melalui inventarisasi dan penanganan lahan kritis di Daerah Aliran Sungai.
21. Penyusunan Kebijakan Strategi Daerah () dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
22. Penataan Lingkungan/kawasan Kumuh Perkotaan/Kampung Sehat
23. Penyediaan Infrastruktur Sanitasi dan Air Bersih
24. Peningkatan Penanganan Infrastruktur Jaling dan drainase lingkungan
25. Peningkatan sarana dan prasarana gedung pemerintah
26. Pembangunan fasilitas umum dan sarana publik, sarana olah raga, sarana ibadah termasuk penataan kawasan alun-alun Karawang
27. Pembangunan transportasi massal/Trans Karawang
28. Perencanaan dan pembangunan perlintasan tidak sebidang kereta api
29. Pembangunan Jalan Kabupaten
 - Jaringan Jalan Lingkar Timur Karawang (pendanaan partisipatif)
 - Jaringan Jalan ODTW Sangga Buana dan Green Canyon Karawang / Loji-Tonjong
 - Underpass Pasundan – Otista/ Tuparev
 - Underpass Pawarengan
 - Persiapan pembangunan Fly Over Wirasaba
30. Pembangunan Jembatan
 - Jembatan Walahar
 - Jembatan Rumambe II
 - Jembatan BTB II Akses Karawang Barat
 - Jembatan Rengasdengklok - Pebayuran
 - Jembatan BTB II - Mulyasari
 - Jembatan Kw.6 Karawang
31. Peningkatan kontruksi Jalan Kabupaten
32. Penurapan Jalan Kabupaten
33. Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten
34. Pemeliharaan Berkala / Periodik Jalan Kabupaten

35. Rehabilitasi Jalan Kabupaten
36. Pemeliharaan Rutin Jembatan Kabupaten
37. Rehabilitasi Jembatan Kabupaten
38. Peningkatan Jembatan Kabupaten
39. Pembangunan Saluran Drainase Jalan Kabupaten
40. Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Kabupaten
41. Pembangunan Trotoar Jalan Kabupaten
42. Pembangunan / Rehabilitasi / normalisasi / pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier Kabupaten
43. Pembangunan / Pehabilitasi / normalisasi / pemeliharaan Saluran Irigasi Sekunder Kabupaten
44. Pembangunan / Pehabilitasi / normalisasi / pemeliharaan Saluran Pembuang Kabupaten
45. Pembangunan /Rehabilitasi / normalisasi / pemeliharaan Bendung / Situ / Embung / Folder Saluran Air Kabupaten
46. Pembangunan Pengaman Abrasi Pantai
47. Rehabilitasi / normalisasi / pemeliharaan Muara
48. Pembangunan terminal integrated Pasar Rengasdengklok
49. Penanggulangan bencana alam

6.3.8. Bidang Pemerintahan

1. Pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa;
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berkualitas dalam melaksanakan pelayanan publik;
3. Penguatan SDM masyarakat desa
4. Optimalisasi sumber daya desa untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dan kedaulatan pangan masyarakat desa;
5. Peningkatan partisipasi masyarakat Desa
6. Peningkatan kapasitas dan kompetensi Aparatur Desa
7. Peningkatan peran aktif masyarakat desa
8. Revitalisasi kelembagaan ekonomi desa
9. Pengembangan usaha ekonomi desa
10. Penguatan akses dan media informasi masyarakat desa
11. Pembangunan aplikasi SiAP Bankeu untuk Pemerintah Desa

6.3.9. Bidang Pemerintahan Umum dan Keuangan Daerah

1. Penataan Sistem dan prosedur kerja pelayanan publik (PTSP, LPSE, e-KTP)
2. Peningkatan sarana dan prasarana kerja yang terstandar
3. Rintisan smart city
4. Penataan dan penguatan kelembagaan urusan persandian untuk pengamanan informasi di Kabupaten Karawang;
5. Penyusunan dokumen perencanaan dan penguatan peraturan perundang-undangan dalam implementasi keamanan informasi di Kabupaten Karawang;
6. Pemenuhan dan peningkatan sumberdaya manusia (SDM) di bidang kewanitaan informasi;
7. Peningkatan dan optimalisasi perangkat keamanan teknologi informasi dan komunikasi;
8. Peningkatan kapasitas SDM aparatur (formal, teknis dan fungsional)
9. Penyusunan regulasi dan penerapan penilaian kinerja
10. Optimalisasi kinerja aparatur pada OPD pelayanan publik
11. Peningkatan tunjangan kesejahteraan pegawai berbasis kinerja
12. Penyediaan Fasilitas kendaraan dinas Pegawai
13. Fasilitasi Penyediaan Perumahan Pegawai
14. Peningkatan PAD
15. Pengembangan sistem akuntansi keuangan dan pengelolaan asset daerah dalam rangka tercapainya penyelesaian LKPD unaudited setiap tahun tepat waktu.
16. Peningkatan Sistem perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah berbasis data
17. Peningkatan mutu Perencanaan Pembangunan
18. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan secara tepat waktu sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
19. Meningkatkan pembinaan trantibmas, satuan perlindungan masyarakat dan unsur rakyat terlatih lainnya
20. Transparansi biaya perizinan.
21. Pendapatan Berbasis IT :
 - PBB *On Line*
 - BPHTB *On Line*

- *Taping Box*
- *Barcode Reklame*

Secara umum berdasarkan hasil pengkajian KLHS, diperlukan perhatian terhadap upaya sinkronisasi rencana dengan wilayah sekitarnya, dan diperlukan konsistensi terhadap upaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup, terutama atas program prioritas yang diindikasikan memiliki potensi dampak terhadap lingkungan hidup.

Sementara itu, pengajuan muatan KLHS yang diintegrasikan dengan RPJMD adalah pada upaya mitigasi terhadap program prioritas. Program mitigasi ini sebagian besar telah diindikasikan dalam program RPJM, namun arahan lokasinya perlu disesuaikan pada lokasi program prioritas. Sementara mitigasi yang belum dinyatakan dalam RPJM perlu dipertimbangkan kesesuaiannya untuk ditindaklanjuti oleh OPD terkait.

Tabel 6.6a
Arahan Integrasi Rekomendasi Program

NO	PROGRAM PRIORITAS (potensi menimbulkan dampak)	MITIGASI PROGRAM (terindikasi dalam RPJM)	MITIGASI PROGRAM (blm terindikasi dalam RPJM)
1	Pembangunan RSUD di Rengasdengklok	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan RTH (Dinas PRKP Karya, Bappeda, DLHK) 2. Penanganan dan pengelolaan pelayanan persampahan (Dinas LHK) 3. Penyediaan infrastruktur sanitasi dan air bersih (DLHK, Dinas PRKP, PDAM) 4. Mengembangkan ruas jalan kolektor primer dan lokal sekunder pada ruas jalan Kabupaten (Dinas PUPR, Bappeda) 5. Pembangunan Terminal Tipe C (Dinas Perhubungan, Bappeda) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan (BPN, Bappeda) 2. Pengelolaan IPAL yang berbasis <i>zero waste</i>, (DLHK, Dinas PRKP) 3. Meningkatkan capaian STBM untuk masyarakat sekitar (Dinas Kesehatan, Dinas PRKP) 4. Adaptasi konsep <i>green infrastructure</i> (Dinas PRKP, DLHK, Dinas PUPR)

NO	PROGRAM PRIORITAS (potensi menimbulkan dampak)	MITIGASI PROGRAM (terindikasi dalam RPJM)	MITIGASI PROGRAM (blm terindikasi dalam RPJM)
		<ul style="list-style-type: none"> 6. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi (Dinas Perhubungan, Bappeda) 7. Pembangunan transportasi massal/Trans Karawang (Dinas Perhubungan, Bappeda) 	
2	Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap di 30 kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan RTH (Dinas PRKP, Bappeda, DLHK) 2. Penanganan dan pengelolaan pelayanan persampahan (Dinas LHK) 3. Penyediaan infrastruktur sanitasi dan air bersih (DLHK, Dinas PRKP, PDAM) 4. Peningkatan Penanganan Infrastruktur Jaling dan drainase lingkungan (Dinas PUPR, Dinas PRKP, DLHK) 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan IPAL yang berbasis <i>zero waste</i> (DLHK, Dinas PRKP) 2. Meningkatkan capaian STBM untuk masyarakat sekitar (Dinas Kesehatan, Dinas PRKP) 3. Adaptasi konsep <i>green infrastructure</i> (Dinas PRKP, DLHK, Dinas PUPR)
3	Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas DTP (dengan tempat perawatan)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan RTH (Dinas PRKP, Bappeda, DLHK) 2. Penanganan dan pengelolaan pelayanan persampahan (Dinas LHK) 3. Penyediaan infrastruktur sanitasi dan air bersih (DLHK, Dinas PRKP, PDAM) 4. Peningkatan Penanganan Infrastruktur Jaling dan drainase lingkungan (Dinas PUPR, Dinas PRKP, DLHK) 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan IPAL yang berbasis <i>zero waste</i> (DLHK, Dinas PRKP) 2. Meningkatkan capaian STBM untuk masyarakat sekitar (Dinas Kesehatan, Dinas PRKP) 3. Adaptasi konsep <i>green infrastructure</i> (Dinas PRKP, DLHK, Dinas PUPR)

NO	PROGRAM PRIORITAS (potensi menimbulkan dampak)	MITIGASI PROGRAM (terindikasi dalam RPJM)	MITIGASI PROGRAM (blm terindikasi dalam RPJM)
4	Pembangunan Rumah Sakit Paru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan RTH (Dinas PRKP, Bappeda, DLHK) 2. Penanganan dan pengelolaan pelayanan persampahan (Dinas LHK) 3. Penyediaan infrastruktur sanitasi dan air bersih (DLHK, Dinas PRKP, PDAM) 4. Mengembangkan ruas jalan kolektor primer dan lokal sekunder pada ruas jalan Kabupaten (Dinas PUPR, Bappeda) 5. Pembangunan Terminal Tipe C (Dinas Perhubungan, Bappeda) 6. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi (Dinas Perhubungan, Bappeda) 7. Pembangunan transportasi massal/Trans Karawang (Dinas Perhubungan, Bappeda) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan (BPN, Bappeda) 2. Pengelolaan IPAL yang berbasis <i>zero waste</i>, (DLHK, Dinas PRKP) 3. Meningkatkan capaian STBM untuk masyarakat sekitar (Dinas Kesehatan, Dinas PRKP) 4. Adaptasi konsep <i>green infrastructure</i> (Dinas PRKP, DLHK, Dinas PUPR)
5	Pembangunan kawasan wisata Karawang Selatan dan Karawang Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi pengembangan area mangrove di pesisir pantai (<i>Green belt</i> dan <i>silvo fishery</i>) (Dinas Pariwisata dan Budaya, Dinas PRKP, Dinas Perikanan) 2. Penanganan lahan kritis (DAS) (DLHK, Dinas PRKP) 3. Penanganan dan pengelolaan pelayanan persampahan (Dinas LHK) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adaptasi konsep penguatan pelestarian lingkungan hidup kawasan pesisir dengan DPSIR (<i>Driver-Pressure-State-Impact-Response</i>) (DLHK, Dinas Perikanan, Bappeda) 2. Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Bidang Wisata (Dinas Pariwisata dan Budaya) 3. Penetapan spasial

NO	PROGRAM PRIORITAS (potensi menimbulkan dampak)	MITIGASI PROGRAM (terindikasi dalam RPJM)	MITIGASI PROGRAM (blm terindikasi dalam RPJM)
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Penyediaan infrastruktur sanitasi dan air bersih (DLHK, Dinas PRKP, PDAM) 5. Mengembangkan ruas jalan kolektor primer dan lokal sekunder pada ruas jalan Kabupaten (Dinas PUPR, Bappeda) 6. Pembangunan Terminal Tipe C (Dinas Perhubungan, Bappeda) 7. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi (Dinas Perhubungan, Bappeda) 8. Pembangunan transportasi massal/Trans Karawang (Dinas Perhubungan, Bappeda) 	<p>wilayah pertanian abadi (pemetaan sawah abadi), (Bappeda & Dinas Pertanian)</p>
6	Terminal Agribisnis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan RTH (Dinas PRKP, Bappeda, DLHK) 2. Penanganan dan pengelolaan pelayanan persampahan (Dinas LHK) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Pengadaan Tanah kepada Masyarakat (BPN) 2. Adaptasi konsep <i>green infrastructure</i> (Dinas Pertanian, DLHK, Dinas PUPR) 3. Konversi penanaman pohon atas pembukaan lahan (DLHK) 4. Pembuatan sumur biopori (DLHK) 5. Monitoring kualitas air dan udara atas implementasi program (DLHK)
7	Pembangunan sarana & prasarana Rumah Potong Hewan (RPH) berbasis tata ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan infrastruktur sanitasi dan air bersih (DLHK, Dinas PRKP, PDAM) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Pengadaan Tanah kepada Masyarakat (BPN) 2. Konversi penanaman pohon atas pembukaan lahan

NO	PROGRAM PRIORITAS (potensi menimbulkan dampak)	MITIGASI PROGRAM (terindikasi dalam RPJM)	MITIGASI PROGRAM (blm terindikasi dalam RPJM)
			(DLHK) 3. Pembuatan sumur biopori (DLHK) 4. Monitoring kualitas air dan udara atas implementasi program (DLHK)
8	Mengembangkan ruas jalan kolektor primer dan lokal sekunder pada ruas jalan Kabupaten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan RTH (Dinas PRKP, Bappeda, DLHK) 2. Penataan Ruang Publik dan Taman Kota (Dinas PRKP) 3. Peningkatan upaya-upaya pengujian kualitas air dan udara (DLHK) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Pengadaan Tanah kepada Masyarakat (BPN) 2. Adaptasi konsep <i>green infrastructure</i> (Dinas Pertanian, DLHK) 3. Konversi penanaman pohon atas pembukaan lahan (DLHK) 4. Pembuatan sumur biopori (DLHK) 5. Monitoring kualitas air dan udara atas implementasi program (DLHK)
9	Meningkatkan infrastruktur jalan pedesaan dengan diarahkan pada meningkatkan infrastruktur jalan poros desa penghubung kecamatan dengan desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan RTH (Dinas PRKP, Bappeda, DLHK) 2. Penataan Ruang Publik dan Taman Kota (Bappeda, Dinas PRKP) 3. Peningkatan upaya-upaya pengujian kualitas air dan udara (DLHK) 4. Peningkatan Penanganan Infrastruktur Jaling dan drainase lingkungan (Dinas PUPR, Dinas PRKP, DLHK) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Pengadaan Tanah kepada Masyarakat (BPN) 2. Adaptasi konsep <i>green infrastructure</i> (Dinas Pertanian, DLHK) 3. Konversi penanaman pohon atas pembukaan lahan, (DLHK) 4. Pembuatan sumur biopori (DLHK) 5. Monitoring kualitas air dan udara atas implementasi program (DLHK)
10	Pembangunan Terminal Tipe C	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan RTH (Dinas PRKP, Bappeda, DLHK) 2. Penanganan dan pengelolaan pelayanan persampahan (Dinas LHK) 3. Peningkatan upaya pengujian kualitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Pengadaan Tanah kepada Masyarakat (BPN) 2. Adaptasi konsep <i>green infrastructure</i> (Dinas Pertanian, DLHK) 3. Konversi penanaman pohon atas pembukaan lahan,

NO	PROGRAM PRIORITAS (potensi menimbulkan dampak)	MITIGASI PROGRAM (terindikasi dalam RPJM)	MITIGASI PROGRAM (blm terindikasi dalam RPJM)
		air dan udara (DLHK) 4. Penyediaan infrastruktur dan air bersih (DLHK, Dinas PRKP, PDAM) 5. Peningkatan sarana & prasarana transportasi (Dinas Perhubungan, Bappeda)	(DLHK) 4. Pembuatan sumur biopori(DLHK) 5. Monitoring kualitas air dan udara atas implementasi program (DLHK)
11	Pembangunan terminal integrated Pasar Rengasdengklok	1. Penyediaan RTH (Dinas PRKP, Bappeda, DLHK) 2. Penanganan dan pengelolaan pelayanan persampahan (DLHK) 3. Peningkatan upaya pengujian kualitas air dan udara (DLHK) 4. Penyediaan infrastruktur dan air bersih (DLHK, Dinas PRKP, PDAM) 5. Peningkatan sarana & prasarana transportasi (Dinas Perhubungan, Bappeda)	1. Sosialisasi Pengadaan Tanah kepada Masyarakat (BPN) 2. Adaptasi konsep <i>green infrastructure</i> (Dinas Pertanian, DLHK) 3. Konversi penanaman pohon atas pembukaan lahan, (DLHK) 4. Pembuatan sumur biopori (DLHK) 5. Monitoring kualitas air dan udara atas implementasi program (DLHK)
12	Pembangunan Jalan Kabupaten	1. Penyediaan RTH (Dinas PRKP, Bappeda, DLHK) 2. Penataan Ruang Publik dan Taman Kota (Dinas PRKP) 3. Peningkatan upaya-upaya pengujian kualitas air dan udara (DLHK)	1. Sosialisasi Pengadaan Tanah kepada Masyarakat (BPN) 2. Adaptasi konsep <i>green infrastructure</i> (Dinas Pertanian, DLHK) 3. Konversi penanaman pohon atas pembukaan lahan, (DLHK) 4. Pembuatan sumur biopori (DLHK) 5. Monitoring kualitas air dan udara atas implementasi program, (DLHK)

Untuk pelaksanaan pengintegrasian rekomendasi, selanjutnya unit-unit OPD yang terkait merupakan unit yang paling menentukan dalam menindaklanjuti hasil pengintegrasian ini ke dalam tugas dan fungsi kerjanya masing-masing, yaitu ke dalam Renstra OPD, terutama untuk rekomendasi program yang belum dinyatakan dalam RPJMD. Sementara untuk program mitigasi yang sudah dinyatakan dalam RPJMD memerlukan arahan lokasi program, yaitu pada sekitar wilayah program prioritas RPJMD yang diidentifikasi berpotensi menimbulkan dampak.

Sesuai Pasal 258 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan :

1. Pendapatan masyarakat;
2. Kesempatan kerja;
3. Lapangan usaha;
4. Akses dan kualitas pelayanan publik; dan
5. Daya saing daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintah Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Adapun Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
6. Sosial.

Kriteria SPM yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara Indonesia meliputi :

1. SPM Pendidikan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR
----	-----------------------	----------------------	--------------------------

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR
1.	Pendidikan dasar	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar;	warga negara usia 7 s.d. 15 tahun.
2.	Pendidikan kesetaraan	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar;	warga negara usia 7 s.d. 18 tahun.

2. SPM Bidang Kesehatan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR
1.	pelayanan kesehatan ibu hamil	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	ibu hamil.
2.	pelayanan kesehatan ibu bersalin	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	ibu bersalin.
3.	pelayanan kesehatan bayi baru lahir	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	bayi baru lahir.
4.	pelayanan kesehatan balita	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya	balita.

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR
		<p>manusia kesehatan; dan</p> <p>c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar</p>	
5.	<p>pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar</p>	<p>a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;</p> <p>b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan</p> <p>c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar</p>	<p>anak usia pendidikan dasar.</p>
6.	<p>pelayanan kesehatan pada usia produktif</p>	<p>a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;</p> <p>b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan</p> <p>c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar</p>	<p>setiap warga negara pada usia produktif</p>
7.	<p>pelayanan kesehatan pada usia lanjut</p>	<p>a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;</p> <p>b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan</p> <p>c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar</p>	<p>setiap warga negara pada usia lanjut</p>
8.	<p>pelayanan kesehatan penderita hipertensi</p>	<p>a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;</p> <p>b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan</p> <p>c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar</p>	<p>penderita hipertensi.</p>
9.	<p>pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus</p>	<p>a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;</p> <p>b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan</p> <p>c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar</p>	<p>penderita diabetes melitus.</p>

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR
10.	pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat.
11 .	pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	orang terduga tuberkulosis
12.	pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	orang dengan risiko terinfeksi <i>Human Immunodeficiency Virus</i>

3. SPM Pekerjaan umum dan penataan ruang

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR
1.	memenuhi kebutuhan pokok air minum sehari-hari	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b. standar jumlah dan kualitas sarana dan prasarana; dan c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	warga negara.
2.	penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b. standar jumlah dan kualitas sarana dan prasarana; dan c. petunjuk teknis atau	warga negara.

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR
		tata cara pemenuhan standar.	

4. SPM Perumahan rakyat dan kawasan permukiman

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR
1.	penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	1. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; dan 2. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	korban bencana kabupaten/kota yang memiliki rumah terkena dampak bencana
2.	fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena program pemerintah kabupaten/kota	1. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; dan 2. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	masyarakat yang terkena akibat program pemerintah kabupaten/kota

5. SPM Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR
1.	pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia; dan c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar;	Warga Negara yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah kabupaten/kota dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR
2.	pelayanan informasi rawan bencana	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia; dan c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar;	warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana
3.	pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia; dan c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar;	warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana
4.	pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia; dan c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar;	warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana
5.	pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia; dan c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar;	warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran

6. SPM Sosial

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR
1.	rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b. standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	penyandang disabilitas telantar
2.	rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b. standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	anak telantar
3.	rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b. standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	lanjut usia telantar
4.	rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b. standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	gelandangan dan pengemis
5.	perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b. standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	korban bencana alam kabupaten/kota dan/atau bencana sosial kabupaten/kota

6.3 Program Prioritas Pembangunan Daerah disertai Pagu Indikatif Kabupaten Karawang

Program Prioritas Pembangunan Daerah dirumuskan dalam bab ini dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan keterpaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih. Adapun keterkaitan antara misi, tujuan sasaran, indikator sasaran, beserta program dalam RPJMD Kabupaten Karawang tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM
PERANGKAT DAERAH

7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi serta kebijakan yang telah dijelaskan sebelumnya, disusun indikasi program-program pembangunan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Karawang sesuai dengan bidang urusan pemerintahan selama periode lima tahun, selain untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah juga untuk pemenuhan layanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah

Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Karawang Tahun 2016 – 2021

Kode	Kapasitas Riil/Belanja	Proyeksi (Rp)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	BELANJA	4.271.035.096.866	4.927.929.387.563	5.584.823.678.261	6.241.717.968.959	6.898.612.259.656	7.555.506.550.354
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.928.348.851.957	2.121.288.066.767	2.314.227.281.576	2.507.166.496.386	2.700.105.711.196	2.893.044.926.006
2.1.1	Belanja Pegawai	1.500.645.719.380	1.670.034.775.169	1.839.423.830.959	2.008.812.886.749	2.178.201.942.538	2.347.590.998.328
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	176.818.400.999	205.615.605.798	234.412.810.598	263.210.015.397	292.007.220.196	320.804.424.995
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	26.430.129.520	32.700.709.041	38.971.288.561	45.241.868.082	51.512.447.602	57.783.027.123
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-	-
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	337.475.168.903	438.978.110.449	540.481.051.995	641.983.993.540	743.486.935.086	844.989.876.632
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-	-
2.2	Belanja Langsung	2.434.706.415.268	2.990.661.846.514	3.546.617.277.761	4.102.572.709.007	4.658.528.140.254	5.214.483.571.501
2.2.1	Belanja Pegawai	195.729.806.927	204.272.799.394	212.815.791.861	221.358.784.329	229.901.776.796	238.444.769.263
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.404.535.167.736	1.748.557.317.561	2.092.579.467.386	2.436.601.617.211	2.780.623.767.036	3.124.645.916.861
2.2.3	Belanja Modal	985.937.497.699	1.340.823.843.748	1.695.710.189.796	2.050.596.535.845	2.405.482.881.894	2.760.369.227.943

Rencana Program Pembangunan disusun berdasarkan urusan konkuren wajib pelayanan dasar dan non pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang serta **memperhatikan rekomendasi dari kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) yaitu mempertimbangkan :**

- **Urusan kewenangan Pemerintah Kabupaten**

- **Keterkaitan program utama dengan program mitigasi.**
- **Keterkaitan dimensi waktu dengan program utama**
- **Kemampuan Anggaran Daerah**

Rekomendasi kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tentu saja pada proses pelaksanaannya akan melalui kajian untuk menghindari dampak negatif pelaksanaan program dan kegiatan terutama dampak/resiko terhadap lingkungan hidup.

Adapun program kegiatan yang akan melalui proses pengkajian dampak/resiko terhadap lingkungan hidup adalah:

1. Pembangunan RSUD di Rengasdengklok
2. Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas DTP (dengan tempat perawatan)
3. Pembangunan Rumah Sakit Paru
4. Pembangunan Kawasan Wisata Karawang Selatan dan Karawang Utara
5. Pengembangan Desa Padi Organik (Kec. Tegalwaru dan Pangkalan)
6. Penumbuhan Desa Mandiri Benih Padi (40 Ha) dan Kedelai (20 Ha)
7. Pengembangan Tanaman Pisang (Kec. Tegalwaru dan Pangkalan)
8. Pembangunan TPI Pasir Putih, Ciparage dan Muara
9. Mengembangkan Ruas Jalan Kolektor Primer dan Lokal Sekunder pada Ruas Jalan Kabupaten
10. Meningkatkan Infrastruktur Jalan Pedesaan Dengan Diarahkan Pada Meningkatkan Infrastruktur Jalan Poros Desa Penghubung Kecamatan Dengan Desa
11. Pembangunan Jembatan Penghubung Strategis
12. Fasilitasi Pembangunan Jalan antar kawasan
13. Pembangunan Terminal Tipe C (Cilamaya & Tegalwaru)
14. Pembangunan Terminal Integrated Pasar Rengasdengklok
15. Penataan Lingkungan Kumuh Permukiman (Penataan Kampung Layak Huni, meliputi Jalan Lingkungan, Drainase dan Sanitasi Lingkungan)
16. Pembangunan Jalan Kabupaten
 - Jaringan Jalan Lingkar Barat Karawang
 - Jaringan Jalan Lingkar Timur Karawang

- Jalan ODTW Sangga Buana (lingkar Loji) & Green Canyon Karawang / Loji-Tonjong

Adapun resiko/dampak terhadap lingkungan hidup pada program kegiatan prioritas tersebut sesuai dengan kajian lingkungan hidup strategis adalah :

1. Berkurangnya tangkapan air
2. Peningkatan air larian (potential runoff)
3. Penambahan volume limbah cair dan padat
4. Peningkatan volume kendaraan
5. Alih fungsi lahan pertanian
6. Berkurangnya RTH
7. Peningkatan suhu/pemanasan lokal
8. Pencemaran udara

Untuk melaksanakan rekomendasi dari KLHS dimaksud, maka akan dilakukan beberapa langkah kegiatan sebagai berikut:

Mitigasi dan/ alternatif penyempurnaan program yang mempunyai dampak terhadap “Sumber Daya Air dan Lintas Perairan”

a. Penambahan Program :

- 1) Peraturan konversi penanaman pohon atas pembukaan lahan
- 2) Pembuatan sumur biopori
- 3) Pembuatan embung dan/atau waduk
- 4) Konservasi mata air, khususnya di bagian selatan Karawan
- 5) Peningkatan Capaian STBM di wilayah terdampak

b. Penyempurnaan Pelaksanaan Program :

- 1) Program-program pembangunan/peningkatan sarana kesehatan, dilaksanakan dengan memperhatikan :
 - Penyediaan RTH
 - Penyediaan infrastruktur sanitasi dan air bersih
 - Peningkatan upaya-upaya pengujian kualitas air
 - Pembangunan kawasan wisata Karawang Selatan dan Karawang Utara, agar memperhatikan daya dukung dan tampung kawasan. Pengembangan wisata di Karawang Selatan diikuti pembangunan embung/waduk agar air yang ditampung dapat digunakan untuk kebutuhan air kawasan wisata.

c. Mitigasi dan/ alternatif penyempurnaan program yang mempunyai dampak terhadap “Kurangnya Infrastruktur Pembangunan & Pemeliharaannya”

1) Penambahan Program :

- Sosialisasi pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur kepada masyarakat
- Penyediaan angkutan umum yg nyaman dg harga terjangkau

2) Penyempurnaan Pelaksanaan Program :

- Program pembangunan infrastruktur dilaksanakan dengan alternatif :
- Menghindari pembangunan jalan pada lahan sawah
- Pembangunan jalan di lahan sawah, menggunakan jalan layang

d. Mitigasi dan/ alternatif penyempurnaan program yang mempunyai dampak terhadap “Kurangnya RTH, Pencemaran Udara & Perubahan Iklim”

1) Penambahan Program :

- Penyusunan dan penegakan aturan batas emisi bagi kendaraan pribadi dan umum

2) Penyempurnaan Pelaksanaan Program :

- Penyediaan Ruang Terbuka Hijau, diupayakan tercapai luasan ideal RTH bagi suatu daerah, sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Peningkatan upaya-upaya pengujian kualitas air dan udara, melalui pembangunan stasiun-stasiun pengamatan kualitas udara.
- Pembangunan Terminal Tipe C, yang mengadaptasi konsep green shelter/bus station

e. Mitigasi dan/ alternatif penyempurnaan program yang mempunyai dampak terhadap “Pertanian”

1) Penambahan Program :

- Peraturan tentang sawah abadi & ketetapan spasial wilayahnya.
- Peraturan tentang alih fungsi lahan sawah
- Inovasi peningkatan produktifitas pertanian

2) Penyempurnaan Pelaksanaan Program :

- Pembangunan kawasan wisata Karawang Selatan dan Karawang Utara , dilaksanakan dengan alternatif : mengendalikan perijinan mendirikan bangunan fasilitas pariwisata khususnya akomodasi pariwisata & sarana penunjang wisata lainnya pada lahan sawah .
- Program pembangunan infrastruktur, seminimal mungkin menggunakan lahan sawah

7.2 Kebijakan Pendanaan

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi serta kebijakan yang telah dijelaskan sebelumnya, disusun indikasi program-program prioritas pembangunan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Karawang sesuai dengan bidang urusan pemerintahan selama periode lima tahun, selain untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah juga untuk pemenuhan layanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, anggaran program Tahun 2016-2021 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian program prioritas pembangunan, yaitu program prioritas Bupati dan Wakil Bupati, kemudian program penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten dan bantuan tidak langsung berupa bantuan keuangan kepada desa, hibah, sosial yang merupakan prioritas ketiga. Secara umum kebijakan anggaran antara lain:

1. Belanja yang diarahkan (*Earmark*) seperti DAK, DBH – DR, DBH Cukai Hasil Tembakau, Dana Otonomi Khusus (Untuk Program), Dana BOS, Dana Insentif Daerah (DID), Dana Penyesuaian (Tunj. Fungsional, Tambahan Penghasilan Guru PNS, Sertifikasi Guru) dan Bantuan keuangan yang bersifat khusus.

2. Belanja yang bersifat wajib/mengikat seperti ; belanja pegawai, belanja bunga, kegiatan DPA-L, dukungan program prioritas nasional (al. dana pendamping DAK, DDUB dan e- KTP) dan Belanja program/kegiatan yang bersifat rutin seperti keperluan kantor dll.
3. Belanja yang ditentukan persentasenya sesuai amanat perundang-undangan (belanja fungsi pendidikan 20% dari total belanja, belanja urusan kesehatan 10% dari total belanja diluar gaji, Alokasi Dana Desa (ADD) 10% dari dana perimbangan – DAK, Dana Bagi Hasil Pajak kepada Desa (PDRD, 10% dari PAD), bantuan Parpol, insentif pemungutan pajak dan belanja modal.
4. Belanja pemenuhan urusan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), dikaitkan dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah (provinsi atau kab/kota) sesuai tugas dan fungsi SKPD;
5. Belanja lainnya (belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan belanja subsidi).
6. Pengalokasian belanja wajib mengikat yaitu besaran belanja tidak langsung kelompok belanja pegawai dengan memperhitungkan antisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi, pensiun dengan *acress* yang besarnya dibatasi maksimum 2,5 persen dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan). Dalam rangka peningkatan kinerja PNS, diberikan penghasilan tambahan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka mewujudkan APBD yang pro rakyat maka besaran belanja pegawai dibatasi tidak boleh melebihi 50 persen dari total belanja daerah;
7. Alokasi anggaran belanja wajib pelayanan dasar pendidikan dialokasikan minimal 20 persen, yang diarahkan pada :
 - a. Peningkatan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan bagi masyarakat melalui:
 - 1) Alokasi Biaya Peningkatan Manajemen dan Mutu Sekolah (PMMS) pada jenjang pendidikan dasar yang sinergi dengan dana BOS bersumber APBN dan APBD Provinsi;

- 2) Alokasi anggaran PMMS disesuaikan dengan proporsi dana BOS Pusat dan Provinsi sesuai dengan standar biaya penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing jenjang mulai dari SD/MI, SMP/MTs baik negeri maupun swasta.
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan diarahkan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru dan Ruang Kelas Baru/ tambah lokal, sedangkan Belanja rehabilitasi ruang kelas dan belanja investasi mesin dan peralatan praktek siswa, peralatan laboratorium, meja, kursi, dan lain-lain dianggarkan melalui dana PMMS;
 - c. Penyediaan Dana Bantuan biaya pendidikan jenjang Perguruan Tinggi bagi masyarakat tidak mampu berbasis data PPLS (Pendataan Program Perlindungan Sosial) 2011;
 - d. Peningkatan mutu dan manajemen tata kelola pelayanan pendidikan;
 - e. Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan;
 - f. Peningkatan pelayanan perpustakaan dan laboratorium
8. Alokasi anggaran urusan wajib pelayanan dasar kesehatan, dialokasikan minimal 10 persen yang diarahkan pada :
 - a. Penyediaan pelayanan kesehatan masyarakat miskin;
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan terstandar;
 - c. Pengadaan dan pemerataan obat serta perbekalan kesehatan;
 - d. Pelayanan kesehatan ibu dan anak;
 - e. Penanganan masalah gizi masyarakat;
 - f. Penanganan Penyakit Menular, serta
 - g. *Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan BLUD RSUD.*
 9. Alokasi anggaran urusan wajib pelayanan dasar pekerjaan umum dan penataan ruang diarahkan antara lain :
 - a. Mengembangkan ruas jalan Kolektor primer penghubung antar pusat kegiatan/ jalan batang (Pusat Kegiatan Wilayah/PKW – Pusat Kegiatan Lokal/PKL, dan antar PKL) pada ruas jalan kabupaten;
 - b. meningkatkan infrastruktur jalan penghubung pusat pengembangan wilayah/ jalan cabang (kolektor sekunder PKL/Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) dan antar PPL) pada ruas jalan Kabupaten;

- c. Peningkatan jalan perkotaan dengan fokus penataan ruas jalan di pusat ibukota kabupaten.
 - d. meningkatkan infrastruktur jalan pedesaan dengan diarahkan pada meningkatkan infrastruktur jalan poros desa penghubung PPK/PPL dengan desa;
 - e. pembangunan Jembatan Penghubung Strategis;
 - f. meningkatkan koordinasi pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan; Infrastruktur Irigasi berbasis partisipasi masyarakat;
 - g. penanganan abrasi pantai dan sistem pengendali banjir;
 - h. koordinasi penanganan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS);
 - i. penataan Gedung Kantor Pemerintah dan fasilitas publik dengan fokus penataan kantor SKPD dan penyediaan Ruang Publik (Public Space) dalam bentuk taman kota dan sarana olahraga dan rekreasi masyarakat;
 - j. Peningkatan pelayanan persampahan.
 - k. Melaksanakan percepatan penyelesaian regulasi daerah, standar dan pedoman bidang penataan ruang (Peraturan Zonasi, Rencana Detail Tata Ruang, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan);
 - l. Meningkatkan koordinasi dan pemantapan keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah yang serasi dengan pola dan struktur ruang wilayah.
10. Alokasi anggaran urusan wajib pelayanan dasar sosial diarahkan untuk meningkatkan fungsi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui fasilitasi, pendampingan, bimbingan dan pelatihan, penanggulangan kebencanaan dan dampak sosial masyarakat korban bencana, serta sinkronisasi kebijakan dan pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.
11. Alokasi anggaran urusan wajib pelayanan dasar perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, antara lain :
- a. Peningkatan sarana dan prasarana dasar permukiman dan perumahan;
 - b. Penataan Lingkungan Kumuh Permukiman (Rumah Layak Huni, Jalan Lingkungan, Drainase dan Sanitasi Lingkungan);

12. Alokasi anggaran urusan wajib wajib pelayanan dasar ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat antara lain :
 - a. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. Penegakan Peraturan Daerah;
13. Alokasi anggaran urusan wajib non pelayanan dasar tenaga kerja diarahkan untuk peningkatan kualitas angkatan kerja daerah yang berbasis kebutuhan pasar tenaga kerja, penyediaan informasi dan layanan ketenagakerjaan, pengembangan kebijakan, pembinaan dan pengawasan regulasi bidang ketenagakerjaan.
14. Alokasi anggaran urusan wajib non pelayanan dasar pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan untuk meningkatkan upaya-upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui penyediaan pelayanan rehabilitasi, penyuluhan dan advokasi terhadap tindak kekerasan dan *trafficking serta kekerasan terhadap anak*, meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan yang berbasis kemandirian berusaha, meningkatkan upaya perlindungan terhadap anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perdagangan perempuan dan anak.
15. Alokasi anggaran urusan wajib non pelayanan dasar pangan diarahkan untuk melaksanakan program peningkatan ketahanan pangan;
16. Alokasi anggaran urusan wajib non pelayanan dasar pertanahan diarahkan untuk melaksanakan program peningkatan tertib administrasi pertanahan berupa penataan asset tanah milik pemerintah Kabupaten Karawang, serta penyediaan tanah untuk kegiatan-kegiatan pembangunan;
17. Alokasi anggaran urusan wajib non pelayanan dasar lingkungan hidup diarahkan:
 - a. Peningkatkan upaya-upaya perlindungan, pengendalian pencemaran dan pemantauan kualitas air dan udara dengan membangun laboratorium dan kelengkapan fasilitasnya;
 - b. meningkatkan upaya-upaya koordinasi dan penegakan hukum serta pengawasan AMDAL, UPL/UKL (Usaha Pengendalian dan Kesehatan Lingkungan);

- c. Pengembangan sistim data basis dan pelaksanaan kajian Bidang lingkungan hidup
 - d. Pengembangan regulasi dan penyediaan ruang terbuka hijau di perkotaan;
18. Alokasi anggaran urusan wajib non pelayanan dasar kependudukan dan pencatatan sipil diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
 19. Alokasi anggaran urusan wajib non pelayanan dasar pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk pengembangan kebijakan, pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan desa, pengembangan kebijakan, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa, penguatan pembiayaan pembangunan desa, pengembangan informasi dan teknologi berbasis aplikasi dan penataan kelembagaan desa.
 20. Alokasi anggaran urusan wajib non pelayanan dasar pengendalian penduduk dan keluarga berencana diarahkan untuk penyediaan, pelayanan, rehabilitasi, penyuluhan dan advokasi kesehatan reproduksi untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.
 21. Alokasi anggaran urusan wajib non pelayanan dasar perhubungan diarahkan:
 - a. Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana prasarana lalu lintas, angkutan dan jalan serta moda transportasi;
 - b. Penegakan peraturan dan disiplin lalu lintas, angkutan dan jalan.
 22. Alokasi anggaran urusan wajib non pelayanan dasar komunikasi dan informatika diarahkan untuk Menerapkan dan mengembangkan teknologi informasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
 23. Alokasi anggaran urusan wajib non pelayanan dasar koperasi dan usaha kecil menengah diarahkan untuk meningkatkan kemampuan kewirausahaan UMKM dan sistim kelembagaan koperasi dan meningkatkan skal usaha KUMKM melalui fasilitasi pembiayaan, pengembangan kerjasama, promosi dan akses pasar, pengembangan inovasi dan teknologi serta standarisasi desain produk.

24. Alokasi anggaran urusan wajib non pelayanan dasar Penanaman modal diarahkan untuk Operasionalisasi kelembagaan yang menangani penanaman modal termasuk pengelolaan urusan perizinan, Promosi dan pengembangan potensi daerah dalam rangka menarik minat investasi pengembangan kerjasama antar daerah maupun dengan pihak swasta dalam rangka pengelolaan potensi daerah.
25. Alokasi anggaran urusan wajib non pelayanan dasar kepemudaan dan olahraga diarahkan untuk pembinaan kelembagaan dan aktifitas kepemudaan serta peningkatan prestasi olahraga dan atlet daerah Meningkatkan kontribusi pemuda dan organisasi kepemudaan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, Meningkatkan apresiasi terhadap pengembangan olahraga masyarakat dan olahraga tradisional, dan penyediaan sarana prasarana dan kawasan olahraga masyarakat dan olahraga prestasi.
26. Alokasi anggaran urusan wajib non pelayanan dasar statistik diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas data dan informasi pendukung perencanaan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan.
27. Alokasi anggaran urusan wajib non pelayanan dasar persandian diarahkan untuk pembinaan kelembagaan dan aktifitas persandian dalam mendukung informasi bagi pembangunan daerah.
28. Alokasi anggaran urusan wajib non pelayanan dasar kebudayaan diarahkan:
29. Pengembangan kapasitas pelaku budaya:
 - a. Pengembangan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal;
 - b. Pelestarian situs sejarah dan budaya ;
 - c. Melestarikan nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal;
 - d. Meningkatkan upaya implementasi kesaalehan social baik dikalangan aparatur tur pemerintah maupun seluruh unsur masyarakat;
 - e. Meningkatkan upaya revitalisasi nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal yang selaras dengan perkembangan zaman;
 - f. Mengembangkan jenis dan untuk kegiatan pembangunan kebudayaan yang berkontribusi terhadap peningkatan apresiasi dan kesejahteraan masyarakat.

- g. Memantapkan kerjasama antara umat beragama dan pemerintah;
 - h. Pengembangan fungsi dan peran forum kerukunan umat beragama;
 - i. Implementasi dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat
30. Alokasi anggaran urusan wajib non pelayanan dasar perpustakaan diarahkan untuk pembinaan kelembagaan perpustakaan desa dan aktifitas budaya baca masyarakat, peningkatan manajemen perpustakaan daerah, peningkatan kualitas bahan bacaan perpustakaan daerah dan peningkatan SDM pengelola perpustakaan dan perpustakaan desa
31. Alokasi anggaran urusan wajib non pelayanan dasar arsip diarahkan untuk peningkatan kualitas pengelolaan arsip daerah dan pengembangan informasi dan teknologi pada pengelolaan arsip daerah.
32. Alokasi anggaran urusan pilihan kelautan dan perikanan diarahkan pada pengembangan potensi dan peningkatan hasil produksi perikanan tangkap dan budidaya perikanan melalui fasilitasi, pemberdayaan dan pembinaan pelaku usaha sektor perikanan, pengembangan sentra-sentra produksi perikanan menuju pengembangan kawasan minapolitan serta peningkatan sarana prasarana perikanan.
33. Alokasi anggaran urusan pilihan pariwisata diarahkan untuk pengembangan potensi dan arus masuk wisatawan melalui penyediaan fasilitasi, regulasi iklim usaha dan promosi kepariwisataan daerah, pengembangan sarana dan prasarana objek daya tarik wisata (ODTW) serta pembinaan dan pemberdayaan pelaku usaha sektor pariwisata daerah, Pengembangan destinasi wisata berbasis wisata alam, sejarah dan religi, Peningkatan manajemen pariwisata daerah dan Pembangunan kawasan wisata berbasis sumber daya local.
34. Alokasi anggaran urusan pilihan pertanian diarahkan untuk pengembangan potensi dan peningkatan produksi hasil pertanian melalui penyediaan sarana dan prasarana produksi, pemberdayaan kelembagaan, penerapan inovasi dan teknologi pertanian, pengembangkan sistem dan sumberdaya penyuluh pertanian,

- peningkatan skala produksi peternakan dan pengendalian penyakit ternak
35. Alokasi anggaran urusan pilihan kehutanan diarahkan untuk kegiatan rehabilitasi lahan kritis dan konservasi tanah, pembangunan hutan kota, konservasi tanah dan air serta peningkatan produksi tanaman hasil hutan.
 36. Alokasi anggaran urusan pilihan energy dan sumber daya mineral diarahkan untuk Meningkatkan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pertambangan, Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan, Penyambungan listrik desa (lisodes) pada masyarakat kurang mampu
 37. Alokasi anggaran urusan pilihan perdagangan diarahkan pengembangan regulasi, fasilitasi serta sarana prasarana perdagangan dalam mendukung sistem distribusi barang produksi dan konsumsi, pengembangan kerjasama perdagangan dalam rangka mendukung promosi produk unggulan daerah serta perlindungan konsumen.
 38. Alokasi anggaran urusan pilihan industri diarahkan untuk pengembangan regulasi, fasilitasi dan iklim usaha bagi masuknya investasi sektor industri serta pengembangan industri kecil dan menengah berbasis sumberdaya lokal dan keterkaitan rantai nilai industri, pengembangan sentra IKM, pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha serta pelatihan kewirausahaan IKM, Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial, Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri, dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Besar
 39. Alokasi anggaran urusan pilihan transmigrasi diarahkan untuk fasilitasi, koordinasi dan pelayanan masyarakat peserta program transmigrasi.
 40. Alokasi anggaran unsur penunjang perencanaan diarahkan untuk pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, evaluasi dan pengendalian program pembangunan daerah, peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah, peningkatan kualitas data dan informasi statistik serta pengembangan sumber daya manusia perencana pembangunan daerah, Peningkatan Sistem perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah berbasis data, Peningkatan mutu Perencanaan Pembangunan.

41. Alokasi anggaran unsur penunjang keuangan diarahkan untuk mewujudkan kemandirian keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan, mewujudkan manajemen keuangan daerah yang akuntabel, transparan, profesional dan bertanggungjawab melalui Peningkatan pengembangan sistem akuntansi keuangan dan pengelolaan asset daerah untuk pencapaian penyelesaian LKPD unaudited setiap tahun tepat waktu, serta pengelolaan keuangan berbasis IT : SP2D online.
42. Alokasi anggaran unsur penunjang kepegawaian dan Diklat diarahkan untuk Pembentukan dan pembangunan *Assessment Center* Kab. Karawang untuk menunjang transparansi dan objektivitas penempatan dalam jabatan, Pengembangan SIMPEG online dalam rangka meningkatkan kinerja SKPD dalam mewujudkan akurasi data pegawai ASN, Penyempurnaan mekanisme rekrutmen CPNS melalui sistem CAT dan promosi terbuka agar memperoleh SDM aparatur yang profesional, bersih dan kompeten, Pengembangan pelayanan administrasi kepegawaian berbasis teknologi informasi (IT), Pengembangan implementasi sistem absensi yang akurat sehingga data kehadiran PNS dapat terukur dan dapat dipertanggungjawabkan, Pengembangan aplikasi penilaian kinerja pegawai online dan terintegrasi dengan tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP), Penyempurnaan mekanisme penghargaan bagi PNS teladan, Beasiswa bagi tenaga teknis untuk memenuhi kebutuhan tenaga teknis SKPD.
43. Alokasi anggaran unsur penunjang penelitian dan pengembangan diarahkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan untuk kajian strategis sebagai bahan referensi pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Kabupaten Karawang.

Selain mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kabupaten, kebijakan umum anggaran 2016-2021 juga tetap mengalokasikan anggaran untuk:

1. Belanja program rutin dalam rangka dukungan administrasi dan logistik bagi pelaksanaan Tupoksi SKPD dialokasikan secara terukur dan terarah sesuai kebutuhan, yaitu : belanja pelayanan administrasi perkantoran, belanja peningkatan sarana prasarana

aparatur, peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur serta peningkatan disiplin aparatur.

2. Dalam rangka pemerataan pembangunan wilayah pedesaan, dialokasikan kepada seluruh desa dana bagi hasil kepada pemerintah desa melalui peningkatan kemampuan keuangan desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, tentang Dana Desa, jo Peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa dan telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. Alokasi anggaran bagi Hasil Pajak dan retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa Tidak berupa dana transfer ke desa (menjadi pendapatan desa) tetapi dalam bentuk belanja langsung program infrastruktur perdesaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
3. Alokasi anggaran pendampingan yang dipersyaratkan oleh Pemerintah, maupun anggaran yang bersifat sinergi antara Program Prioritas Nasional dan Daerah.
4. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial sesuai Surat Himbauan KPK Nomor B-14/01-15/01/2014 harus mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk yang luas bagi masyarakat sehingga jauh dari kepentingan pribadi, kelompok serta kepentingan politik dari unsur pemerintahan daerah, karena itu agar kepala daerah memperhatikan waktu pemberian dana bansos dan hibah agar tidak terkesan dilakukan terkait dengan pelaksanaan Pemilukada.
5. Belanja Tidak Terduga dialokasikan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di

daerah atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, serta pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup yang didukung dengan bukti-bukti yang sah.

7.3 Indikasi Rencana Program Pembangunan yang Disertai Kebutuhan Pendanaan di Kabupaten Karawang

Adapun untuk program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun 2016-2021 yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan urusan konkuren wajib pelayanan dasar dan non pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten, nomenklatur program mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karawang pada akhir periode masa jabatan. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*), yang meliputi 3 (tiga) aspek kinerja yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat; aspek pelayanan umum; serta aspek daya saing daerah.

Penetapan indikator kinerja daerah dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah. Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten Karawang sebagaimana Tabel RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 berikut ini :

Tabel 8.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Karawang

No	Indikator	Target Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Nilai/predikat SAKIP Kabupaten (Predikat)	C	CC	CC	B	B	BB
2.	Nilai Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah (Kategori)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3.	Nilai LPPD (Nilai)	3,09 (Sangat Tinggi)	3 ≤ ... ≤ 4 (Sangat Tinggi)	3 ≤ ... ≤ 4 (Sangat Tinggi)	3 ≤ ... ≤ 4 (Sangat Tinggi)	3 ≤ ... ≤ 4 (Sangat Tinggi)	3 ≤ ... ≤ 4 (Sangat Tinggi)

No	Indikator	Target Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
4.	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) (%)	-	> 70 – 80 (Sangat Baik)	> 70 – 80 (Sangat Baik)	> 70 – 80 (Sangat Baik)	> 70 – 80 (Sangat Baik)	> 70 – 80 (Sangat Baik)
5.	Indeks Kesehatan Kabupaten Karawang (%)	79,28	79,32	79,37	79,41	79,46	79,51
6.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%)	1,02	0,99	0,97	0,95	0,93	0,91
7.	Indeks Pendidikan Kabupaten Karawang (%)	56,27	56,5	56,73	56,96	57,18	57,41
8.	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (%)	89,64	89,68	89,72	89,76	89,80	89,84
9.	Capaian Nilai Evaluasi kota Layak Anak	-	575,05	605,45	635,85	666,25	696,65
10.	Tingkat pengangguran terbuka (TPT) (%)	11	10,5	10	9,5	8	7,5
11.	Nilai tukar petani (Rp)	106,75	107.82	107.82	107.82	107.82	107.82
12.	Peningkatan Produktivitas Tanaman Padi (Kw/Ha)	75,13	75,88	76,64	77,41	78,18	78,96
13.	Skor Pola Pangan Harapan (%)	83,5	85,5	87,5	89,5	91,5	93,5
14.	Peningkatan Pendapatan masyarakat perikanan (%)	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61
15.	Jumlah Wisatawan (orang)	6.123.383	7.465.984	8.278.267	9.276.589	10.374.510	11.198.235
16.	Indeks ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17.	Angka partisipasi Pilpres/Pileg/Pilgub (%)						
	· Pilpres	-	-	-	> 69,86%	-	-
	· Pileg* :						
	* DPR			-	>63,85%		
	* DPD			-	>55,56%		
	* DPRD Jawa Barat			-	> 61,46%		
	* DPRD Karawang			- -	>68,49%		
	· Pilgub	-	-	> 59,22%	-	-	-
· Pilbup	-	-	-	-	-	>53,98	
18.	Persentase jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik (%)	65%	70%	75%	80%	85%	90%

No	Indikator	Target Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
19.	Persentase Saluran Irigasi Kabupaten yang kondisinya baik (%)	30%	34,46%	38,92%	43,48%	47,84%	52,30%
20.	Rasio rumah layak huni (%)	7,96	29,94	45,99	65,01	83,53	100,00
21.	Persentase penanganan sampah perkotaan (%)	33,52	41,35	43,41	45,58	47,86	50,26
22.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (%)	-	38,00%	40,00%	43,00%	45,00%	50,00%
23.	Penurunan Persentase desa dengan status desa sangat tertinggal (%)	6,01% (8 Desa sangat tertinggal)	4,51% (6 Desa sangat tertinggal)	3,01% (4 Desa sangat tertinggal)	1,5% (2 Desa sangat tertinggal)	0% (0 Desa sangat tertinggal)	0% (0 Desa sangat tertinggal)

Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2015)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2021	SKPD Penanggung jawab
				2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat									
1.1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi									
1.1.1	Daya Beli Masyarakat	Ribu Rupiah	9.818,38	10,800.22	11,880.24	13,068.26	14,375.09	15,812.60	17,393.86	Lintas SKPD
1.1.2	PDRB Per Kapita (ADHB)	Juta Rupiah	73.475.655,2	80,823,220.72	88,905,542.79	88,905,542.79	97,796,097.07	107,575,706.78	118,333,277.46	Lintas SKPD
1.2	Kesehatan									
1.2.1	AHH	Tahun	71,50	71.53	71.56	71.59	71.62	71.65	71.68	Dinas Kesehatan
1.3	Pertanian									
1.3.1	Indeks Nilai Tukar Petani	Point	105,69	106,75	107.82	107.82	107.82	107.82	107.82	Dinas Pertanian
1.4	Ketahanan Pangan									
1.4.1	Skor Pola Pangan Harapan	Point	71,50	83,5	85,5	87,5	89,5	91,5	93,5	Dinas Ketahanan Pangan
1.2	Fokus Kesejahteraan Sosial									
1.2.1	Ketenagakerjaan									
1.2.1.1	Jumlah Angkatan Kerja	Jiwa	1.069.036	1,175,939	1,234,736	1,296,473	1,361,297	1,429,361	1,500,830	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.2.1.2	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	11.88	11	10,50	10	9,50	8	7,50	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.2.2	Sosial									
1.2.2.1	Persentase Penduduk Miskin (Angka Kemiskinan)	%	10,15	10	10	10	10	10	9	Lintas SKPD
2	Aspek Pelayanan Umum									
2.1.	Fokus Pelayanan Urusan Wajib									
2.1.1	Pendidikan									
2.1.1.1	Angka Melek Huruf	%	94	95	95	96	97	97	97	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2.1.1.2	Angka Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,09	7.39	7.69	7.99	8.29	8.59	8.89	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2.1.1.3	Angka Partisipasi Murni SD	%	96,02	96	96	96	96	96	96	Dinas Pendidikan,

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2015)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2021	SKPD Penanggung jawab
				2016	2017	2018	2019	2020		
										Pemuda dan Olahraga
2.1.1.4	Angka Partisipasi Murni SMP	%	69,81	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	74,36	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2.1.1.5	Angka Partisipasi Kasar SD	%	107,24	107,42	107,62	107,82	108,02	108,12	108,22	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2.1.1.6	Angka Partisipasi Kasar SMP	%	96,72	96,89	97,00	97,50	98,00	98,25	98,50	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2.1.2	Koperasi dan UMKM									
	Jumlah Penerima Manfaat Kredit Modal Usaha	Orang	38.904	42,794	44,934	47,180	49,539	52,016	54,617	Dinas Kopersai dan UMKM
2.1.3	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian									
2.1.3.1	Skala Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Pemerintahan	Skala 1 -4	3	3	3	3	3	4	4	Setda
2.1.3.2	Skala Komunikasi Organisasi Pemerintahan	Skala 1-7	5	6	6	6	6	7	7	Setda
2.1.3.3	Tingkat Partisipasi Pemilihan Umum	%	60	65	70	75	75	80	80	Setda/KPUD
2.1.3.4	Indeks Persepsi Korupsi	Point	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.3.5	Indeks Kebahagiaan	Point	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.4	Pekerjaan Umum									
2.1.4.1	Tingkat Kondisi Baik Jaringan Jalan	%	60	65	70	75	80	85	90	Dinas PUPR
2.1.4.2	Volume Sampah Terangkut	M ³	732	805.20	845.46	887.73	932.12	978.73	1,027.66	Dinas LH dan Kebersihan
2.1.4.3	Cakupan Pelayanan Air Minum (PDAM)	%	20,31	22.34	23.46	24.63	25.86	27.16	28.51	Dinas PRKP/PDAM
2.1.4.4	Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik	%	-	-	-	-	-	-	-	Dinas LH dan Kebersihan
2.1.5	Energi dan Sumber Daya Mineral									
2.1.5.1	Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga Miskin	0-1	0,13	0,15	0,20	0,50	0,70	0,90	1,00	Disperindag
2.1.6	Sosial									
2.1.6.1	Jumlah PMKS yang Ditangani	Orang	176.503	170.000	169.000	168.000	167.000	166.000	165.000	Dinsos
2.1.6.2	Jumlah Anak Jalanan	Orang	301	280	270	260	250	240	230	Dinsos
3	Aspek Daya Saing									
3.1	Fokus kemampuan Ekonomi									
3.1.1	Indeks Pembangunan Manusia	Point	67,60	68.1	68.6	69.1	69.6	70.1	70.6	Lintas SKPD
3.1.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%/tahun	4,62	3-6	3-6	3-6	3-6	3-6	3-6	Lintas SKPD
3.1.3	Laju Pertumbuhan Ekspor	%	2	3	3	3	3	3	3	Lintas SKPD
3.1.4	Inflasi	%	3,2	5-6	5-6	5-6	5-6	5-6	5-6	Lintas SKPD
3.2	Penanaman Modal									

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2015)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2021	SKPD Penanggung jawab
				2016	2017	2018	2019	2020		
3.2.1	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA/PMDN)	Trilyun Rupiah	25,454	27,348	27,848	28,353	28,863	29,378	29,898	DPMPPTSP
3.3	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian									
3.3.1	Jumlah Penerbitan Ijin	Izin	12.672	13,305	13,970	14,669	15,402	16,173	16,981	DPMPPTSP
3.3.2	Indeks Demokrasi	Point	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.3	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Point	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.4	Pendapatan Asli Daerah	Trilyun Rupiah	1.056.381	943.596	965.901	1.052.539	1.114.831	1.485.748	1.700.000	BAPENDA
3.4	Kependudukan dan Catatan Sipil									
3.4.1	Jumlah Penduduk (Proyeksi BPS)	Jiwa	2.079.742	2.295.778	2.316.489	2.336.009	2.353.915	2.370.488		Disdukcatpil
3.5	Lingkungan Hidup									
3.5.1	Capaian Fungsi Kawasan RTH	%	11	12	12	12	13	14	14	Dinas LHK
3.6	Pekerjaan Umum									
3.6.1	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten (kondisi baik & sedang)	%	65	70	75	80	85	90	95	Dinas PUPR
3.7	Pariwisata									
3.7.1	Jumlah Kunjungan Pariwisata	Orang	-	6.123.383	7.465.984	8.278.267	9.276.589	10.374.510	11.198.235	Disparbud
3.8	Kebudayaan									
3.8.1	Jumlah sanggar budaya	Buah	19	30	60	120	240	309	309	Disparbud
3.8.2	Jumlah Pelaku Budaya	Orang	12.629	13.891	15.281	16.809	18.490	20.339	22.373	Disparbud
3.8.3	Jumlah Grup kesenian	Buah	604	614	624	634	644	654	674	Disparbud
3.9	Pemuda dan Olaharaga									
3.9.1	Jumlah Organisasi Pemuda yang Dibina	Kelompok	65	65	65	65	65	65	65	Diasdikpora
3.10	Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak									
3.10.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Point	-	64,71	65,21	65,71	66,21	66,71	67,21	DPPPA

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2015	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2021
				2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Daya Beli Masyarakat	Ribu Rupiah	9.818,38	10,800.22	11,880.24	13,068.26	14,375.09	15,812.60	17,393.86
2	PDRB Per Kapita (ADHB)	Juta Rupiah	73.475.655,2	80,823,220.72	88,905,542.79	88,905,542.79	97,796,097.07	107,575,706.78	118,333,277.46
3	AHH	Tahun	71,50	71.53	71.56	71.59	71.62	71.65	71.68
4	Tingkat Partisipasi angkatan Kerja	Jiwa	1.069.036	1,175,939	1,234,736	1,296,473	1,361,297	1,429,361	1,500,830
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	11.88	11	10,50	10	9,50	8	7,50
6	Kemiskinan	%	10,15	10	10	10	10	10	9
7	Angka Melek Huruf	%	94	95	95	96	97	97	97
8	Angka Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,09	7.39	7.69	7.99	8.29	8.59	8.89
9	Indeks Pembangunan Manusia	Point	67,60	68.1	68.6	69.1	69.6	70.1	70.6
10	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%/tahun	4,62	3-6	3-6	3-6	3-6	3-6	3-6
11	Inflasi	%	3,2	5-6	5-6	5-6	5-6	5-6	5-6
12	Jumlah Penduduk (Proyeksi BPS)	Jiwa	2.079.742	2.295.778	2.316.489	2.336.009	2.353.915	2.370.488	

BAB IX

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 ini merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih masa bakti 2016-2021 dan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2005 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karawang dan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang dan RPJM Nasional. Hal tersebut sesuai dengan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

RPJMD Kabupaten Karawang 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan yang terpadu dan searah dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat dan RPJM Nasional. Sebagai tanggung jawab bersama pencapaian tujuan, sasaran dan indikator kinerja, perlu dikembangkan peran aktif seluruh *stakeholder* dalam pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan perlu peran aktif seluruh masyarakat Karawang, swasta dan sikap mental, tekad dan semangat aparat pemerintah daerah Kabupaten Karawang, dukungan DPRD Kabupaten Karawang, Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Pusat. Dengan didukung dan kepedulian semua pihak Kabupaten Karawang akan lebih baik dari hari kemarin.

9.1 Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Karawang tahun 2016-2021 merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Karawang dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD termasuk Kecamatan dan RSUD dan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran untuk lima tahun kedepan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Karawang dengan didukung oleh serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk bersinergi dan konsisten mempedomani dan melaksanakan program-program yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 dengan sebaik-baiknya.
2. Bupati dan Wakil Bupati Karawang, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Karawang tahun 2016-2021 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah.
3. Sekretaris Daerah, berkewajiban mengkoordinasikan dan menjadi Pelaksana Harian dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Karawang 2016-2021.
4. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Karawang berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Karawang 2016-2021 yang nantinya akan menjadi pedoman di dalam menyusun Renja OPD dan penyusunan anggaran OPD Kabupaten Karawang;
5. Sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 adalah sasaran dan indikator kinerja Kabupaten. Perangkat Daerah sebagai instansi pelaksana wajib mendukung tercapainya sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen tersebut, disamping merumuskan sasaran dan indikator kinerja bagi kepentingan masing-masing Perangkat Daerah;
6. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Kabupaten Karawang 2016-2021 untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karawang;

7. Penyusunan RKPD Kabupaten Karawang dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten;
8. RKPD Kabupaten Karawang menjadi acuan bagi setiap OPD dalam menyusun Rencana Kerja OPD (Renja-OPD) yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja;
9. Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan RKPD Kabupaten Karawang, merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) terutama sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
10. Seluruh OPD berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD Kabupaten Karawang 2016-2021 dengan Rencana Strategis (Renstra) OPD;
11. Renja OPD yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD (RKA-OPD);
12. Dalam rangka menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :
 - a. Bappeda Kabupaten Karawang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pengendalian terhadap penjabaran RPJMD ke dalam rencana strategis (Renstra) OPD;
 - b. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing OPD;
 - c. Bappeda Kabupaten Karawang menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing OPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya;


- d. OPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan OPD periode sebelumnya;
 - e. Bappeda Kabupaten Karawang menyusun evaluasi rencana kerja pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf (d);
 - f. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (e) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
13. Dalam hal terjadi perkembangan yang berpengaruh terhadap target sasaran, kebutuhan pembiayaan dan lain-lain dalam RPJMD, maka penyesuaiannya dilakukan melalui penyusunan kebijakan umum anggaran, prioritas dan plafon anggaran serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya;
14. Dengan mempertimbangkan berbagai hal diluar kendali Pemerintah Kabupaten Karawang dan diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RPJMD, maka berbagai strategi, arah kebijakan dan program yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya dikonsultasikan kepada DPRD Kabupaten Karawang untuk mendapat pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.

Dalam pelaksanaan penyusunan RPJMD Kabupaten Karawang 2016-2021 telah mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karawang 2011-2031 agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, pasal 2 yang menyebutkan bahwa “Gubernur dan Bupati/Walikota wajib melaksanakan KLHS dalam penyusunan RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup”.

9.2 Pedoman Transisi

Dalam rangka untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan dan pedoman pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir, langkah-langkah strategis yang akan dilakukan adalah :

1. Dalam rangka menjamin konsistensi proses perencanaan, RPJMD Kabupaten Karawang 2016-2021 akan menjadi pedoman untuk penyusunan dokumen perencanaan masa transisi untuk perencanaan dan penganggaran pembangunan Kabupaten Karawang tahun 2021, yaitu untuk penyusunan RKPD Tahun 2021 dan Renja OPD Tahun 2021. Masa transisi ini berlaku sampai ditetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2021-2025 sesuai dengan periodisasi Kepala Daerah terpilih;
2. RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 sebagai pedoman dimaksud pada butir 1) bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya dapat tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD yang lalu dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru;
3. Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD Kepala Daerah terpilih, yang kemudian akan direvisi sesuai dengan RPJMD yang baru.


BUPATI KARAWANG,
CELLICA NURRACHADIANA